



**BEYOND
INFRASTRUCTURE**



DISCLAIMER DAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB **DISCLAIMER AND SCOPE OF RESPONSIBILITY**

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perseroan") tahun 2022 menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan bukan perusahaan yang tercatat di bursa efek, Laporan Tahunan ini menggunakan standar *best practice* penyusunan laporan tahunan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikombinasikan dengan kriteria *Annual Report Award* (ARA) 2018 serta dengan merujuk pada ketentuan lain terkait penyusunan laporan tahunan yang berlaku bagi Perseroan.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan terdapat perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait bisnis Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan" atau "PT PII" yang mengacu pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Selain itu, kata "Kami" terkadang diselipkan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan Perseroan. Demi kemudahan, Laporan Tahunan ini dapat diunduh pada situs web Perseroan dengan alamat www.ptpii.co.id.

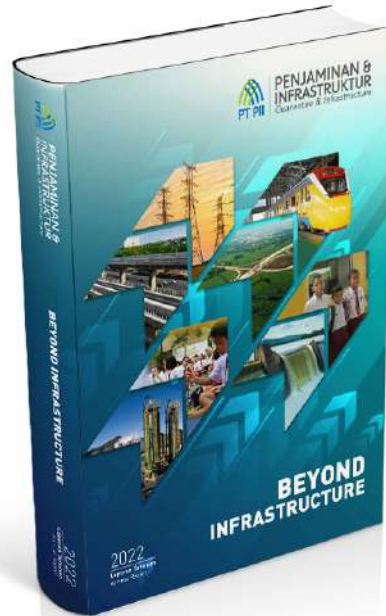
The references and standards used in the 2022 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("the Company") are using parameter and standard criteria that are applicable in Indonesia, where the Company operates. Despite not being listed in a stock exchange, the Company uses the best practice standards in preparing the Annual Report in Indonesia, as stated in the Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies combined with the 2018 Annual Report Award (ARA) criteria and by referring to other provisions related to the preparation of the annual report applicable to the Company.

The Annual Report contains various information on financial statement, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the Company that are classified into forward statements in the implementation of the applicable regulations. The statements are subject to risks of prospect and uncertainty, potentially resulting in difference from the actual development. Various prospective statements in the Annual Report is prepared based on assumptions of the current condition, and projection on the upcoming situation of the Company's business. The Company is unable to guarantee that the valid documents will bring the exact result.

The Annual Report contains the words "the Company" or "IIGF" that refer to Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. In addition, the word "We" is sometimes included in certain occasions with the similar function to refer the Company. For convenience, the Annual Report can be downloaded on the Company's website at www.ptpii.co.id.



KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY



2022 Beyond Infrastructure

Pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari 2 tahun telah memukul segala aspek kehidupan dan hampir semua sektor usaha terkena imbasnya termasuk sektor infrastruktur. Agenda pembangunan infrastruktur turut terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19. Hal itu terjadi akibat ruang fiskal pemerintah mengalami tekanan, karena lebih banyak digunakan untuk mendukung sektor kesehatan, pengusaha dan masyarakat yang terdampak pandemi. Terlebih lagi, adanya perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global sehingga menimbulkan ketidakpastian. Namun demikian, di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian nasional mampu menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,31%, jauh melampaui pertumbuhan tahun 2021 sebesar 3,69%. Perlahan tapi pasti, sektor infrastruktur juga mulai menggeliat sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dan didukung oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempercepat pergerakan ekonomi Indonesia yang sebelumnya terhambat oleh pandemi Covid-19.

Dalam hal ini, keberadaan Perseroan sangatlah signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia melalui proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selama 13 tahun perjalanannya, PT PII telah menjamin 49 proyek yang terdiri dari 41 proyek penjaminan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pinjaman langsung (non-KPBU) serta 8 proyek penjaminan BUMN dalam rangka program PEN dengan total nilai proyek sebesar Rp550 triliun. Dengan kinerja yang semakin solid di tahun 2022, Perseroan akan terus berupaya memainkan perannya sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan guna mengakselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

The Covid-19 pandemic that lasted more than 2 years has hit all aspects of life and all business sectors, including the infrastructure sector. The infrastructure development agenda has also been negatively affected by the Covid-19 pandemic. This is since the government's fiscal space is under pressure, as it is mostly used to support the health sector, entrepreneurs and communities affected by the pandemic. Moreover, the Russia-Ukraine war has had a significant impact on the global economy, creating uncertainty. Nevertheless, amidst the global economic slowdown, the national economy was able to show strong growth of 5.31%, far exceeding 2021's growth of 3.69%. Slowly but surely, the infrastructure sector has also begun to stretch in line with the national economic recovery and is supported by the National Economic Recovery (PEN) program to accelerate Indonesia's economic movement which was previously hampered by the Covid-19 pandemic.

In this context, the presence of the Company can significantly support Indonesia's economic recovery through infrastructure projects that can improve the quality of life of the Indonesians. In its 13-year journey, IIGF has guaranteed 49 projects consisting of 41 PPP scheme guarantee projects and direct lending (Non-PPP), as well as 8 SOE guarantee projects related to the National Economic Recovery Program (PEN) with a total Project Value of Rp550 trillion. With an increasingly solid performance in 2022, IIGF will continue to play its role as a *Special Mission Vehicle* (SMV) of the Ministry of Finance to accelerate infrastructure development and sustainable development in Indonesia.

2021



Aksi Strategis Menuju Pemulihan yang Lebih Baik Strategic Actions Towards A Better Recovery

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan semangat mendukung program percepatan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, PT PII tentunya terlibat aktif dalam berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Salah satunya melalui penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai agenda besar Pemerintah dalam mempercepat pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema "Aksi Strategis Menuju Pemulihan yang Lebih Baik" memberikan gambaran upaya PT PII mengemban amanat yang diberikan dengan tujuan besar mendukung Program PEN dari Pemerintah Indonesia. Dengan pengelolaan usaha yang sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham, tahun 2021 menjadi jejak langkah penting bagi PT PII untuk dapat memperkuat kompetensinya.

IIGF is a State-Owned Enterprise (SOE) that serves to support the national economic acceleration program through infrastructure development. The Company actively participates in various policies of the Indonesian Government, including providing Guarantee to the National Economic Recovery (PEN) Program as the main agenda of the Government to speed up the economic recovery that was impacted by the Covid-19 pandemic.

The theme of "Strategic Actions towards a Better Recovery" illustrates the commitment of IIGF to implementing the tasks of realizing the PEN Program of the Indonesian Government. The Company's business management, at the same time, provides added value to the Indonesian Government as the main shareholders. 2021 marks the momentous Milestones for IIGF to enhance the competitiveness.

2020



Menjaga Momentum Pemulihan Safeguarding Momentum Towards Recovery

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dinamika perekonomian dunia 2020, termasuk Indonesia. Covid-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, di tengah tantangan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 PT PII tetap menjaga momentum pembangunan infrastruktur dengan secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan mandatnya dalam memberikan penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur. Selain fokus pada pelaksanaan mandat utama, PT PII turut berperan serta mendukung Pemerintah dalam program penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Pemerintah memberikan mandat baru dan penugasan kepada PT PII untuk berkontribusi dalam PEN.

Berbekal pengalaman selama lebih dari satu dekade sebagai *fiscal tools* Pemerintah, semangat mewujudkan visi dan misi Perseroan serta dukungan dari Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan, Pandemi Covid-19 bukan menjadi penghalang bagi Perseroan untuk terus senantiasa berkarya dan berkontribusi dalam membangun negeri, namun justru menjadi momentum untuk semakin optimal berkontribusi dalam menjaga pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional.

The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic made an extraordinary impact on the dynamics of the world economy in 2020, including Indonesia. Covid-19 has not only caused a health and humanitarian crisis, but also slowed down the rate of economic growth.

In accordance with the Government policies, amid the challenges of overcoming the impact of the Covid-19 pandemic, IIGF continued to maintain the momentum of infrastructure development by consistently and sustainably conducting the mandate in providing government guarantee in the infrastructure sector. In addition to focusing on implementing its key mandate, the Company also performed a role in supporting the Government in the program to overcome the impact of the Covid-19 pandemic. In 2020, the Government gave a new mandate and assignment to the Company to contribute to the National Economic Recovery PEN Program. Equipped with more than a decade of experience as the Government's fiscal tool and the spirit to realize IIGF's vision and mission as well as support from the Shareholders and all Stakeholders, the Covid-19 Pandemic was not an obstacle for the Company to continue working and contributing to the country's development. Instead, it became a momentum to contribute more optimally in maintaining the development and recovery of the national economy.

2019



Jaga Infrastruktur untuk Indonesia Maju Safeguarding the Infrastructure for a Developed Indonesia

Satu dekade kami lalui dengan menjalankan kegiatan usaha untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Selama itu pula, kami senantiasa bekerja keras membangun ekosistem dan pemahaman terkait pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Memasuki dekade kedua, dengan mandat-mandat baru yang diberikan, merupakan saat bagi kami memantapkan langkah selanjutnya untuk semakin mengokohkan peran PT PII dalam mengawal pembangunan infrastruktur demi menjaga cita-cita bangsa untuk Indonesia maju.

In the first decade of our establishment, IIGF has been carrying out the mandate to provide government guarantee in the field of infrastructure. In the course of time, we are always working hard to build ecosystems and awareness of infrastructure project development in Indonesia through the Public Private Partnership (PPP) scheme. Entering the second decade, with new mandates given, we are strengthening the next move to enhance the role of IIGF in safe guarding infrastructure development in order to drive the nation's aspirations for a developed Indonesia.

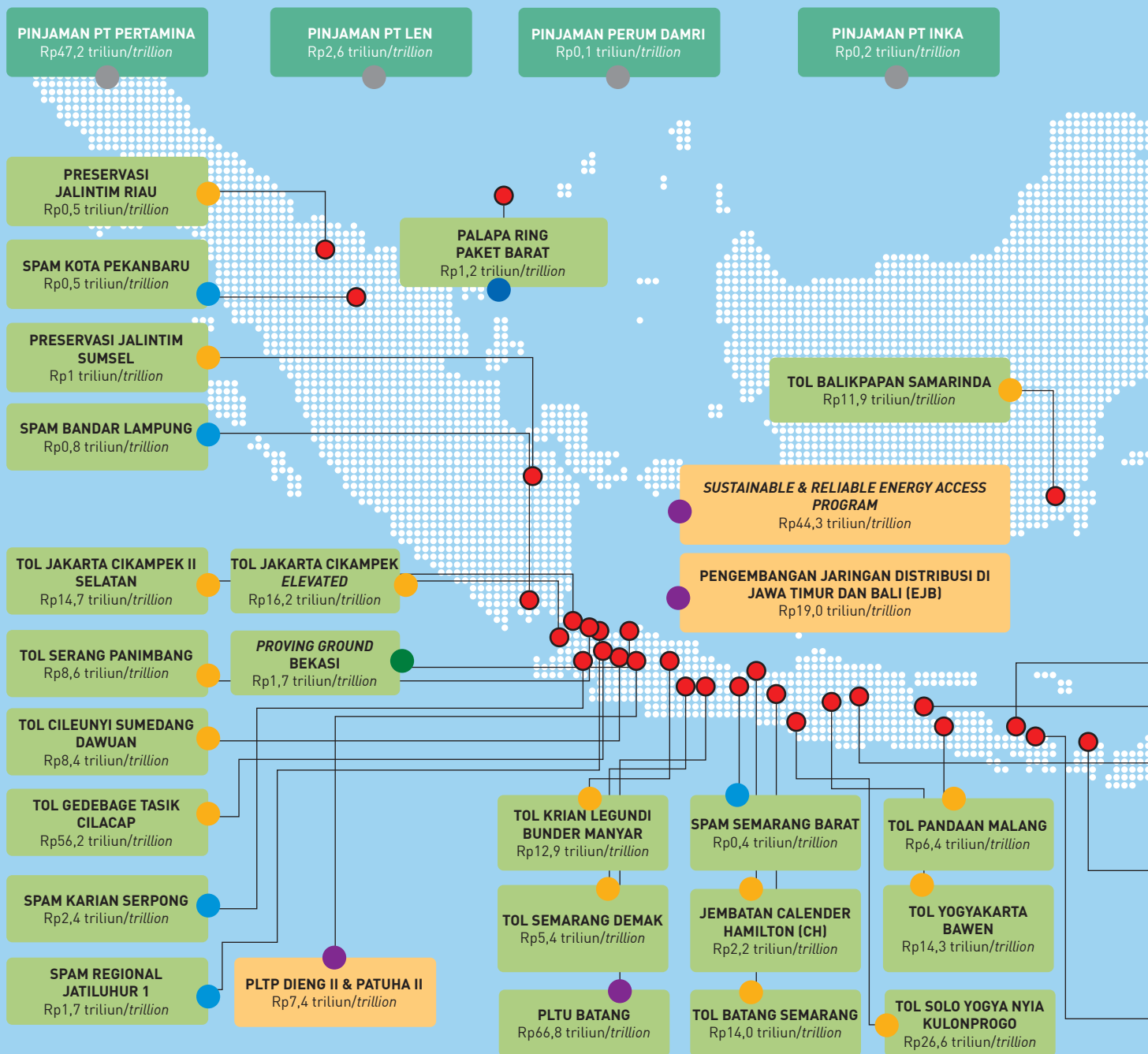


PETA SEBARAN PROYEK HINGGA TAHUN 2022

MAP OF PROJECT DISTRIBUTION UNTIL 2022

Per 31 Desember 2022, Perseroan telah menjamin 49 proyek yang terdiri dari 41 proyek penjaminan skema KPBU dan pinjaman langsung (Non-KPBU), dan 8 proyek penjaminan BUMN dalam rangka program PEN dengan total Nilai Proyek sebesar Rp550 triliun.

As of December 31, 2022, the Company has provided guarantee for 49 projects consisting of 41 PPP scheme guarantee projects and direct loans (Non-PPP), as well as 8 SOE guarantee projects related to the National Economic Recovery Program (PEN) with a total Project Value of Rp550 trillion.





Gearing Ratio*

6,95x



Total Nilai Proyek
Total Project Value

Rp550
triliun/trillion



Jumlah Proyek
Number of Projects

49
proyek/projects

OBLIGASI III WASKITA KARYA
Rp1,8 triliun/trillion

PINJAMAN WASKITA KARYA
Rp8,1 triliun/trillion

SUKUK MUDHARABAH I
WASKITA
Rp1,2 triliun/trillion

OBLIGASI IV WASKITA KARYA
Rp2,1 triliun/trillion

TOL MANADO BITUNG
Rp4,9 triliun/trillion

PALAPA RING
PAKET TENGAH
Rp1,1 triliun/trillion

HYDROPOWER PROGRAMME
Rp7,0 triliun/trillion

KERETA API MAKASSAR
PAREPARE
Rp1,0 triliun/trillion

TOL GILIMANUK MENGWI
Rp24,6 triliun/trillion

TOL PROBOLINGGO
BANYUWANGI
Rp23,4 triliun/trillion

SPAM UMBULAN
Rp2,1 triliun/trillion

ALAT PENERANGAN
JALAN KAB. MADIUN
Rp0,09 triliun/trillion

PENGEMBANGAN DISTRIBUSI
KALIMANTAN MALUKU PAPUA
Rp33,2 triliun/trillion

PENGEMBANGAN DISTRIBUSI
SULAWESI
DAN NUSA TENGGARA (SNT)
Rp23,0 triliun/trillion

KEK MANDALIKA
Rp5,0 triliun/trillion

PLTU TIMOR
Rp3,7 triliun/trillion

BANDARA LABUAN BAJO*
Rp1,2 triliun/trillion

SATELIT MULTIFUNGSI
Rp6,4 triliun/trillion

PALAPA RING
PAKET TIMUR
Rp5,1 triliun/trillion

- Sektor Pariwisata/Tourism Sector
- Sektor Ketenagalistrikan/Electricity Sector
- Sektor Telekomunikasi/Telecommunication Sector
- Sektor Air Minum/Drinking Water Sector
- Sektor Transportasi/Transportation Sector
- Sektor Jalan/Roads Sector
- Sektor Konservasi Energi/Energy Conservation Sector
- Titik Lokasi/Location Point
- Proyek KPBU/PPP Proyek
- Direct Lending
- PEN BUMN/PEN SOE

*) Penjaminan terhadap proyek Bandara Labuan Bajo telah secara efektif diakhiri pada tanggal 14 November 2022.
The guarantee for Labuan Bajo Airport Project effectively terminated by November 14, 2022.
Perhitungan mengacu kepada PMK 95/2017./Calculation refers to PMK 95/2017.



KINERJA UNGGUL TAHUN 2022

EXCELLENT PERFORMANCE IN 2022

KINERJA OPERASIONAL OPERATIONAL PERFORMANCE



Nilai Eksposur Penjaminan
Guarantee Exposure Value

Rp95
triliun/trillion

Total penjaminan yang dilakukan Perseroan hingga akhir tahun 2022.

Total guarantees carried out by the Company until the end of 2022.



Jumlah Proyek
Total Projects

49
proyek/projects

Terdapat 4 tambahan Proyek KPBU, 2 Proyek *Direct Lending*, dan 6 Penjaminan BUMN dalam rangka PEN yang telah mendapatkan Penjaminan Perseroan di tahun 2022. Total proyek yang telah mendapatkan penjaminan Perseroan hingga tahun 2022 adalah 49 Proyek.

There were 4 additional PPP Projects, 2 Direct Lending Project, and 6 SOE Guarantees in the PEN framework that have received the Company Guarantee in 2022. Total projects that have guaranteed by the Company until 2022 was 49 projects.

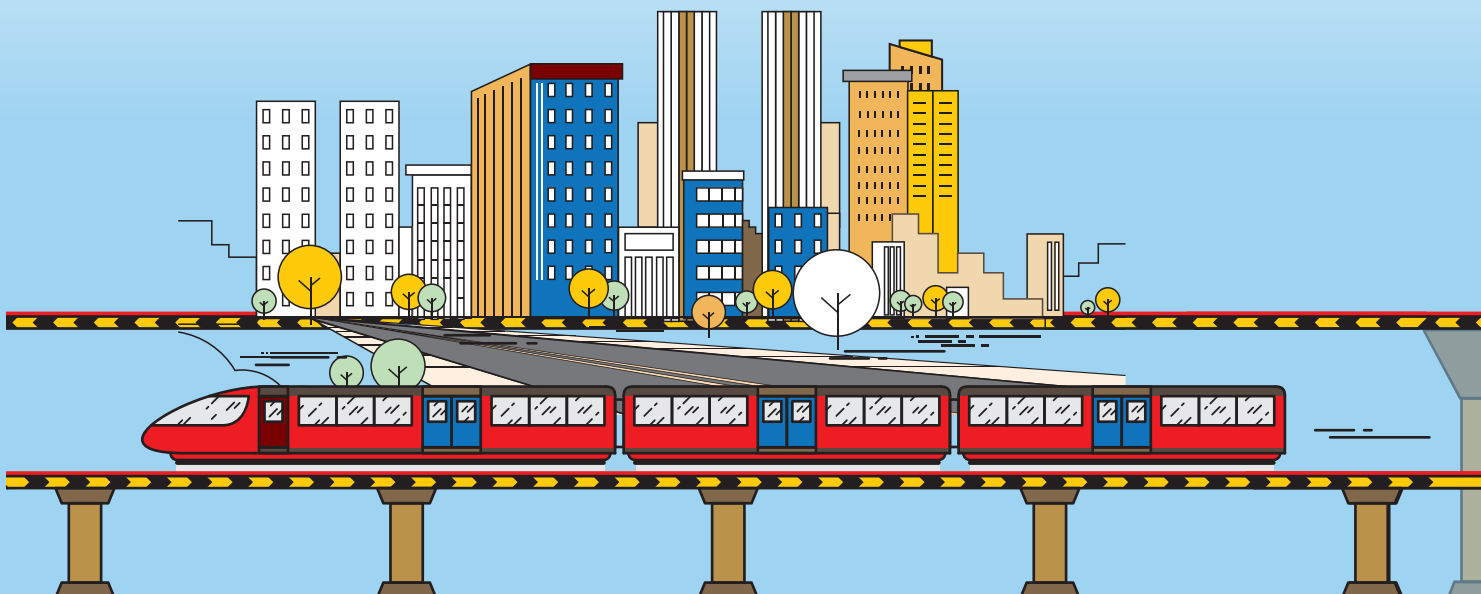


Skor Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Score of Good Corporate Governance (GCG)
Implementation

88,170
Sangat Baik/Very Good

Assessment GCG Perseroan tahun buku 2022 dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pihak independen. *Assessment* GCG menggunakan parameter dari Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 yang terdiri dari 6 Aspek, 43 Parameter, 153 Indikator dan 568 Faktor Uji Kesesuaian.

GCG assessment of the Company for fiscal year of 2022 was conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as an independent party. GCG assessment applied parameters from the Decree of the Minister of Finance No. 505/KMK.06/2020 which consists of 6 aspects, 43 Parameters, 153 Indicators and 568 Conformity Test Factors.



KINERJA KEUANGAN FINANCIAL PERFORMANCE



Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit for the Year

Rp714,2
miliar/billion

Meningkat 14,2% dari Rp625,4 miliar di tahun 2021.

Increased by 14.2% from Rp625.4 billion in 2021.



Beban Usaha
Operating Expenses

Rp386,2
miliar/billion

Meningkat 15,7% dari Rp333,9 miliar di tahun 2021.

Increased by 15.7% from Rp333.9 billion in 2021.



Jumlah Aset
Total Assets

Rp15,5
triliun/trillion

Meningkat 10,0% dari Rp14,1 triliun di tahun 2021.

Increased by 10.0% from Rp14.1 trillion in 2021.



Jumlah Ekuitas
Total Equity

Rp15,2
triliun/trillion

Meningkat 9,9% dari Rp13,8 triliun di tahun 2021.

Increased by 9.9% from Rp13.8 trillion in 2021.

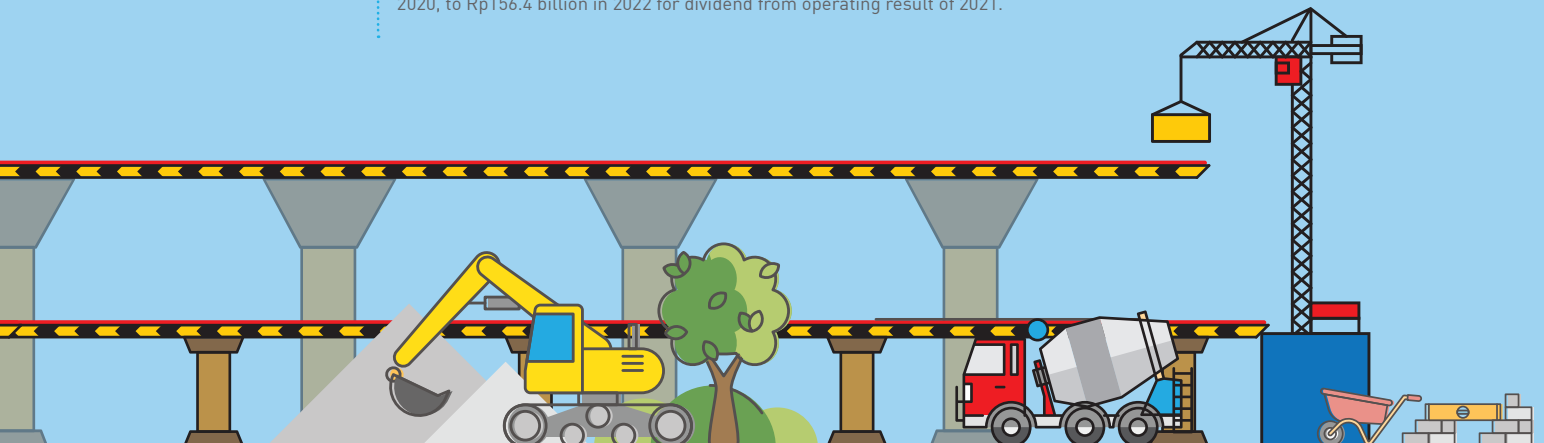


Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham
Dividend Payment to Shareholders

Rp156,4
miliar/billion

Menurun 16,0% dari Rp186,2 miliar di tahun 2021 untuk dividen hasil usaha tahun 2020, menjadi Rp156,4 miliar di tahun 2022 untuk dividen hasil usaha tahun 2021.

Decreased by 16.0% from Rp186.2 billion in 2021 for dividend from operating result of 2020, to Rp156.4 billion in 2022 for dividend from operating result of 2021.





Daftar Isi CONTENTS



<i>Disclaimer dan Lingkup Tanggung Jawab</i>	1
Disclaimer and Scope of Responsibility	
<i>Kesinambungan Tema</i>	2
Theme Continuity	
<i>Peta Sebaran Proyek Hingga Tahun 2022</i>	4
Map of Project Distribution Until 2022	
<i>Kinerja Unggul Tahun 2022</i>	6
Excellent Performance in 2022	
<i>Daftar Isi</i>	8
Contents	

Ikhtisar Kinerja	
Performance Highlights	
<i>Ikhtisar Data Keuangan Penting</i>	12
Significant Financial Data Highlights	
<i>Ikhtisar Bisnis</i>	16
Business Highlights	
<i>Ikhtisar Saham dan Aksi Korporasi</i>	18
Stock and Corporate Action Highlights	
<i>Informasi Tentang Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Informasi Pendanaan Lainnya</i>	18
Information of Bonds, Sukuk or Converted Bonds, as well as Other Financing Information	
<i>Penghargaan dan Sertifikasi</i>	19
Awards and Certifications	
<i>Peristiwa Penting</i>	22
Significant Events	

Laporan Manajemen	
Management Report	
<i>Laporan Dewan Komisaris</i>	38
Board of Commissioners' Report	
<i>Laporan Direksi</i>	54
Board of Directors Report	
<i>Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)</i>	68
Statement of Accountability of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2022 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	

Profil Perusahaan	
Company Profile	
<i>Identitas Perusahaan</i>	72
Company Identity	
<i>Riwayat Singkat Perusahaan</i>	73
The Company's Brief History	
<i>Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan</i>	78
Vision, Mission, Values and Culture of the Company	
<i>Makna Logo Perusahaan</i>	81
Meaning of Corporate Logo	
<i>Jejak Langkah</i>	82
Milestone	
<i>Bidang Usaha Serta Produk dan Jasa</i>	90
Business Line, Products, and Services	
<i>Wilayah Operasional</i>	92
Operational Area	
<i>Daftar Keanggotaan Asosiasi</i>	92
List of Association Membership	
<i>Struktur Organisasi</i>	93
Organizational Structure	
<i>Profil Dewan Komisaris</i>	96
Board of Commissioners' Profile	
<i>Profil Direksi</i>	102
Board of Directors' Profile	
<i>Profil Deputy Direktur</i>	107
Profile of Deputy Director	
<i>Demografi Karyawan</i>	109
Employee Demography	
<i>Informasi Pemegang Saham</i>	112
The Shareholders Information	
<i>Informasi tentang Struktur Grup/ Kelompok Usaha serta Entitas Anak/ Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan/ Special Purpose Vehicle</i>	113
Information on Group Structure/ Business Group and Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures/Special Purpose Vehicle	
<i>Informasi tentang Pencatatan Saham serta Penerbitan dan Pencatatan Obligasi/Efek Lainnya</i>	113
Information on Share Listing and Issuance Bonds/Other Securities Listing	
<i>Lembaga dan Profesi Penunjang</i>	114
Institution and Supporting Professional	
<i>Informasi pada Situs Web Perusahaan</i>	116
The Company's Website	

Sumber Daya Manusia	
Human Resources	
<i>Pengelolaan Sumber Daya Manusia</i>	120
Human Resources Management	
<i>Penanggung Jawab Pengelolaan SDM</i>	122
Person in Charge of HR Management	
<i>Manajemen SDM</i>	124
HR Management	
<i>Survei Keterikatan Karyawan</i>	130
Employee Engagement Survey	
<i>Program Pensiun</i>	130
Pension Program	
<i>Turnover Karyawan</i>	131
Employee Turnover	
<i>BPJS Ketenagakerjaan</i>	132
Employment BPJS	
<i>Internalisasi Budaya Kerja</i>	133
Internalization of Work Culture	
<i>Hubungan Industrial</i>	134
Industrial Relationship	
<i>Praktik K3</i>	135
OHS Practice	
<i>Rencana Fokus Pengembangan SDM Tahun 2023</i>	136
Human Resources Focus Development Plan for 2023	

Analisis dan Pembahasan Manajemen	
Management Discussion and Analysis	
<i>Tinjauan Perekonomian dan Industri</i>	140
Economic and Industry Overview	
<i>Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha</i>	143
Operational Overview Per Business Segment	
<i>Portofolio Penjaminan Proyek Infrastruktur - Non KPBU</i>	174
Infrastructure Portfolio of Infrastructure Project Guarantee - Non PPP	
<i>Penjaminan Korporasi Padat Karya</i>	180
Labor-Intensive Corporate Guarantee	
<i>Penjaminan BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional</i>	184
SOE Guarantee in the Context of Implementing the National Economic Recovery Program	
<i>Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi</i>	190
Project Development Facility (PDF) Business Segment	



Segmen Pengelolaan Dana Investment Segment	204	Organ Pendukung Direksi Supporting Organs of the Board of Directors	343	Dasar Peraturan Pelaksanaan Program TJSL Basic Regulations for Implementing the CSR	409
Segmen Lainnya Other Segments	206	Fungsi Manajemen Risiko Risk Management Function	347	Prinsip Dasar Pelaksanaan TJSL Basic Principles of Implementing the CSR	409
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	211	Manajemen Risiko Risk Management	353	Struktur Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Management Structure	410
Tinjauan Keuangan Financial Review	213	Audit Internal Internal Audit	371	Visi dan Misi Pelaksanaan TJSL CSR Vision and Mission	410
<hr/>					
Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance					
Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang Baik Commitment of Good Corporate Governance	238	Audit Eksternal/Akuntan Publik External Audit/Public Accountant	377	Metode dan Lingkup Evaluasi atas Dampak Kegiatan Perseroan terhadap Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Method and Scope of Evaluation of the Impact of the Company's Activities on Social, Economic and Environmental Aspects	410
Implementasi Tata Kelola di Tahun 2022 GCG Implementation in 2022	241	Sistem Pengendalian Intern Internal Control System	379	Penerapan Manajemen Risiko Seputar Pelaksanaan Kegiatan TJSL PT PII Implementation of Risk Management Surrounding IIGF's CSR Activities	410
Penilaian Penerapan Tata Kelola Assessment of Governance Implementation	242	Perkara Penting dan Sanksi Administratif Significant Cases and Administrative Sanctions	384	Tujuan Pelaksanaan TJSL Objectives of CSR Implementation	411
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik Structure and Mechanism of Good Corporate Governance	247	Akses Data dan Informasi Perusahaan Access to the Company's Data and Information	385	Program TJSL Prioritas Priority CSR Program	411
Dewan Komisaris Board of Commissioners	258	Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	389	Implementasi Program TJSL di Tahun 2022 Implementation of the CSR Program in 2022	411
Direksi Board of Directors	278	Kode Etik Perusahaan Code of Conduct	393	Rincian Penyerapan Dana TJSL Details of CSR Fund Absorption	412
Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi Information Transparency About the Board Commissioners and Board of Directors	303	Budaya Perusahaan Corporate Culture	395	Rujukan Keberlanjutan Sustainability Reference	415
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Diversity of Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors	305	Program Pengendalian Gratifikasi Anti-Gratification Policy	396	Penghargaan dan Sertifikasi Award and Certification	416
Penilaian Penerapan GCG pada Dewan Komisaris dan Direksi Assessment of GCG Implementation for the Board of Commissioners and the Board of Directors	308	Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Penyuapan Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy	398	Penyelarasan Kinerja Keberlanjutan Perseroan dengan Sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Alignment of IIGF's Sustainability Performance with the Goals of the Sustainable Development Objectives	416
Penilaian Kinerja Korporasi Performance Assessment of Corporate	308	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Policy	399	<hr/>	
Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination of the Board of Commissioners and the Board of Directors	311	Kebijakan Perlindungan Hak dan Kepentingan Kreditur Creditor Rights and Interests Protection Policy	400	Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statement	
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors	315	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Official Assets Report (LHKPN)	400	<hr/>	
Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners	317	Informasi Tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Information on Employee and/ or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)	401	Untuk informasi selanjutnya silakan mengunjungi situs web kami: For further information, please visit our website:	
Fungsi Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Function	342	Whistleblowing System	402	www.iigf.co.id	
<hr/>					
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility					
		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Rujukan Keberlanjutan Corporate Social Responsibility and Sustainability References	408		
		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility	408		



PT PII
PT PII
PT PII

IMPLEMENTASI VENDOR PT PII (

In connection with
of the Vendor C
PII, all partners a
are expected to b
filling out the form

[VISIT PAGE >](#)

EVENTS





IKHTISAR KINERJA PERFORMANCE HIGHLIGHTS





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

SIGNIFICANT FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

Upaya berkelanjutan dari Perseroan untuk menjaga kelangsungan bisnisnya menghasilkan performa yang solid baik dari sisi operasional maupun keuangan.

The Company's continuous efforts to maintain its business continuity in presenting solid performance both operationally and financially.

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPRESHENSIF LAIN

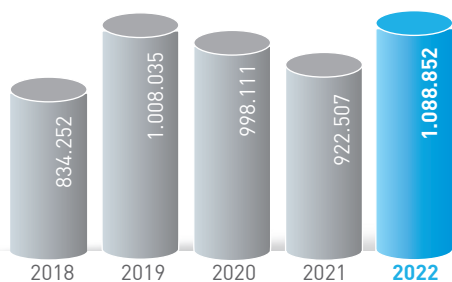
PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021-2022 (%)	(in million Rupiah, unless otherwise stated)
Pendapatan	1.088.852	922.507	998.111	1.008.035	834.252	18,03%	Revenue
Beban Usaha	(386.216)	(333.941)	(376.687)	(413.629)	(356.787)	15,65%	Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	702.636	588.566	621.424	594.406	477.465	19,38%	Profit Before Income Tax
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan	11.537	36.836	(864)	(64.986)	(6.385)	-68,68%	Income Tax Benefit/(Expense)
Laba Tahun Berjalan	714.173	625.402	620.560	529.420	471.080	14,19%	Profit for the Year
(Beban)/Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	(278.069)	6.049	291.916	117.149	(140.702)	-4.696,94%	Other Comprehensive (Expenses)/Income for the Year
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	436.104	631.451	912.476	646.568	330.378	-30,94%	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Bersih per Saham* (nilai penuh dalam Rupiah)	67.027	65.350	64.844	66.178	58.885	2,57%	Earnings per Share* (full amount in Rupiah)

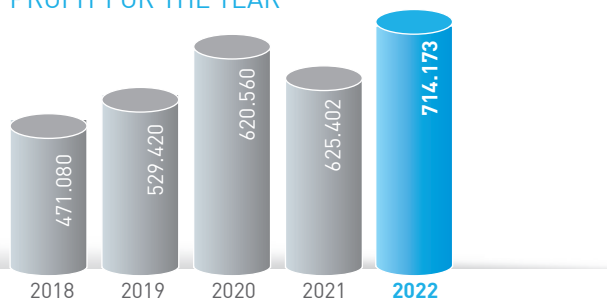
*) Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah lembar saham.
Earnings per share was calculated by dividing profit for the year by total number of shares.

(dalam jutaan Rp/in million Rp)

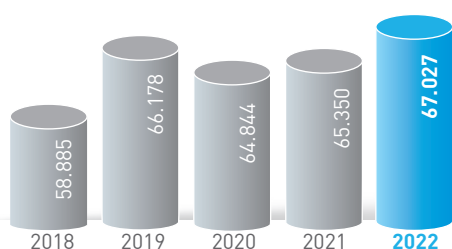
PENDAPATAN REVENUES



LABA TAHUN BERJALAN PROFIT FOR THE YEAR



LABA BERSIH PER SAHAM EARNINGS PER SHARE



POSISI KEUANGAN

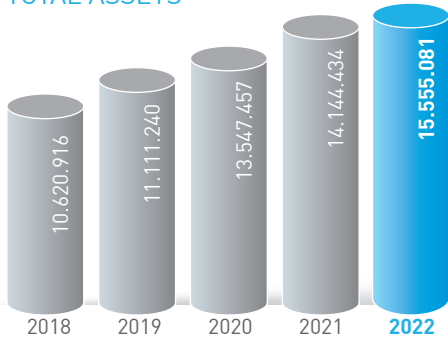
FINANCIAL POSITION

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021-2022 (%)	(in million Rupiah, unless otherwise stated)
Aset							Assets
Kas dan Setara Kas	134.306	5.893.948	4.883.893	26.809	1.699.179	-97,7%	Cash and Cash Equivalent
Investasi	15.008.164	7.948.301	8.380.506	10.881.161	8.673.174	88,8%	Investment
Piutang Usaha	294.720	169.217	155.189	113.189	79.986	74,2%	Trade Receivables
Piutang Lainnya	9.885	10.735	12.757	12.581	8.978	-7,9%	Other Receivables
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	2.826	6.734	1.147	1.570	2.448	-58,0%	Prepaid Expenses and Advances
Aset Tetap	4.896	8.141	10.606	14.499	18.776	-39,9%	Fixed Assets
Aset Hak Guna	12.573	31.433	50.293	-	-	-60,0%	Right-of-Use Assets
Aset Takberwujud	5.470	3.242	2.045	1.824	1.195	68,7%	Intangible Assets
Beban Tangguhan	5.663	7.571	19.164	26.697	43.360	-25,2%	Deferred Expense
Pajak Dibayar Dimuka	2.015	1.613	3.870	4.210	368	24,9%	Prepaid Tax
Aset Pajak Tangguhan	69.194	58.130	22.618	23.331	88.106	19,0%	Deferred Tax Assets
Uang Jaminan yang Dapat Dikembalikan	5.369	5.369	5.369	5.369	5.346	0%	Refundable Deposit
Jumlah Aset	15.555.081	14.144.434	13.547.457	11.111.240	10.620.916	10,0%	Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Utang Usaha	9.993	7.373	3.089	3.772	7.481	35,5%	Trade Payables
Utang Pajak	3.780	4.421	3.258	2.439	4.816	-14,5%	Taxes Payable
Biaya yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain	135.669	65.282	39.570	37.990	42.913	107,8%	Accrued Expenses, Provisions and Other Payables
Pendapatan Tangguhan	169.932	171.117	15.662	10.968	8.510	-0,7%	Deferred Income
Liabilitas Sewa Pembiayaan	8.546	33.504	51.094	-	-	-74,5%	Finance Lease Liabilities
Pinjaman Penerusan	55.127	55.127	55.127	55.127	55.127	0%	Two-Steps Loans
Liabilitas Imbalan Kerja	18.565	18.896	36.225	29.161	21.398	-1,8%	Employee Benefits Obligation
Jumlah Liabilitas	401.612	355.720	204.025	139.457	140.245	12,9%	Total Liabilities
Ekuitas							Equity
Modal Saham	10.655.000	9.570.000	9.570.000	8.000.000	8.000.000	11,3%	Share Capital
Laba/(Rugi) Belum Direalisasi atas Kepemilikan Aset Keuangan	20.605	300.351	298.993	6.404	(111.375)	-93,1%	Unrealized Gain (Loss) on Financial Assets Ownership
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial, Setelah Pajak	5.907	4.229	(461)	212	843	39,7%	Actuarial (Loss)/Gain, Net of Tax
Saldo Laba							Retained Earnings
Ditentukan Penggunaannya	228.769	197.499	166.471	140.000	116.446	15,8%	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	4.243.188	3.716.635	3.308.429	2.825.167	2.474.757	14,2%	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	15.153.469	13.788.714	13.343.432	10.971.783	10.480.671	9,9%	Total Equity
Liabilitas dan Ekuitas							Liabilities and Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	15.555.081	14.144.434	13.547.457	11.111.240	10.620.916	10,0%	Total Liabilities and Equity

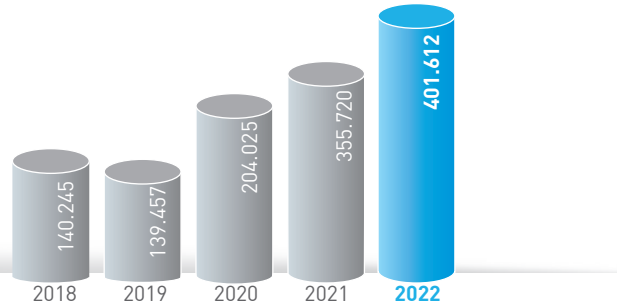


(dalam jutaan Rp/in million Rp)

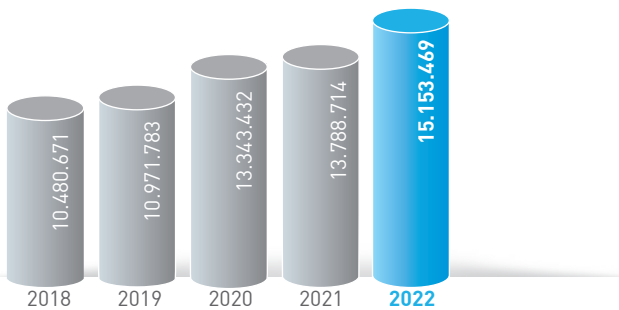
JUMLAH ASET
TOTAL ASSETS



JUMLAH LIABILITAS
TOTAL LIABILITIES



JUMLAH EKUITAS
TOTAL EQUITY



ARUS KAS

CASH FLOWS

(dalam jutaan Rupiah)	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021-2022 (%)	(in million Rupiah)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	684.034	788.709	616.703	578.552	502.149	-13,3%	Cash Flows from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(7.344.891)	429.422	2.788.510	(2.095.466)	(153.696)	-1.810,4%	Cash Flows from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	901.215	(208.076)	1.451.870	(155.456)	(93.322)	-533,1%	Cash Flows from Financing Activities
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(5.759.642)	1.010.055	4.857.084	(1.672.370)	256.131	-670,2%	Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	5.893.948	4.883.893	26.809	1.699.179	1.433.048	20,7%	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	134.306	5.893.948	4.883.893	26.809	1.699.179	-97,7%	Cash and Cash Equivalents at End of Year

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR



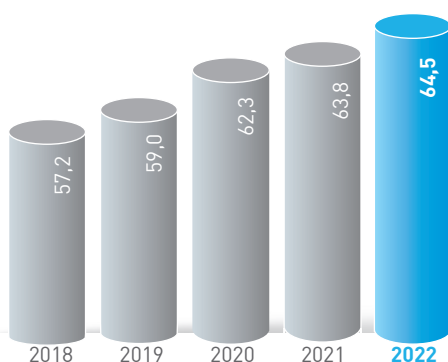
RASIO-RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

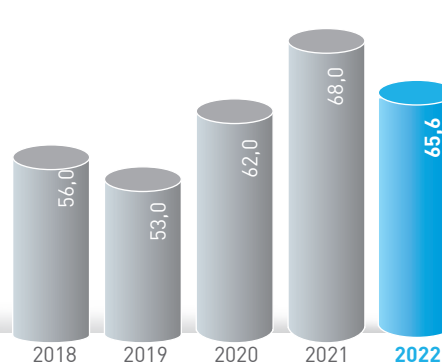
(dalam persen)	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021-2022 (%)	(in percent)
Rasio Profitabilitas							Profitability Ratio
Rasio Imbal Hasil Aset	5,0	4,6	5,4	4,9	4,5	0,4%	Return on Asset (ROA)
Rasio Imbalan Ekuitas	5,1	4,6	5,5	4,9	4,5	0,5%	Return on Equity (ROE)
Margin Laba Operasi	64,5	63,8	62,3	59,0	57,2	0,7%	Operating Profit Margin (OPM)
Margin Laba Bersih	66,0	68,0	62,0	53,0	56,0	-2,4%	Net Profit Margin (NPM)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	36,0	37,0	38,0	41,0	43,0	-1,5%	Operating Expenses to Operating Income (BOPO)
Rasio Likuiditas							Liquidity Ratio
Rasio Kas	10.132,7	17.959,2	28.887,8	24.678,1	18.786,9	-43,6%	Cash Ratio
Rasio Lancar	8.581,8	17.889,7	28.850,9	23.737,8	17.752,7	-52,0%	Current Ratio
Rasio Solvabilitas							Solvency Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Aset	2,6	2,5	1,5	1,3	1,3	0,1%	Liabilities to Asset Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	2,9	2,6	1,8	1,3	1,3	0,3%	Liabilities to Equity Ratio
Pertumbuhan							Growth Rate
Pendapatan	18,0	-7,6	-1,0	20,8	8,9	25,6%	Revenue
Beban Usaha	15,7	-11,3	-8,9	15,9	13,7	27,0%	Operating Expenses
Labanya Tahun Berjalan	14,2	0,8	17,2	12,4	0,1	13,4%	Profit for the Year
Aset	10,0	4,4	21,9	4,6	2,5	5,6%	Assets
Liabilitas	12,9	74,4	46,3	-0,6	28,4	-61,5%	Liabilities
Ekuitas	9,9	3,3	21,6	4,7	2,2	6,6%	Equity

(dalam persen/in percent)

MARGIN LABA OPERASI OPERATING PROFIT MARGIN (OPM)



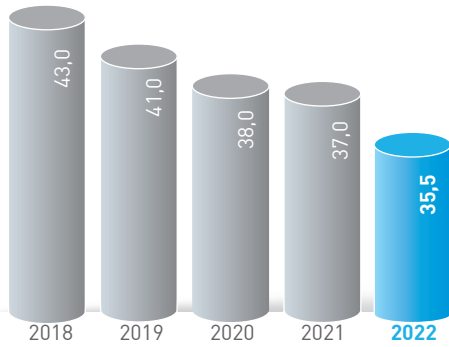
MARGIN LABA BERSIH NET PROFIT MARGIN (NPM)



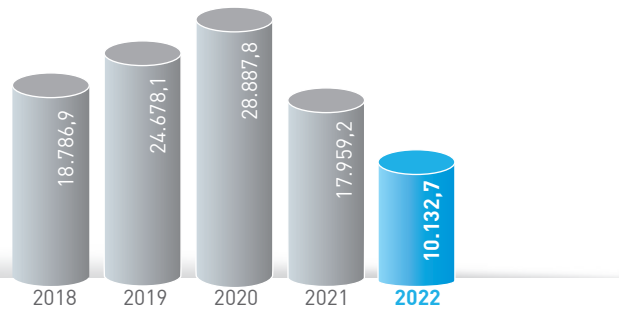


(dalam %/in %)

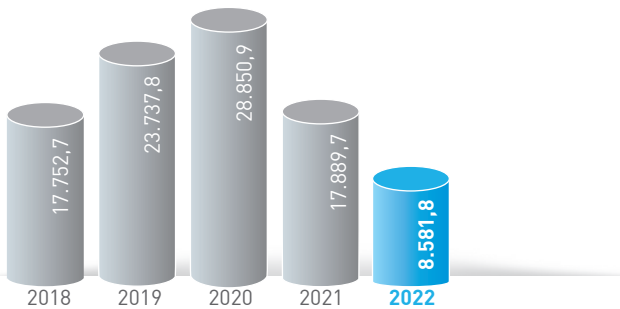
BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)
OPERATING EXPENSES TO OPERATING INCOME (BOPO)



RASIO KAS
CASH RATIO



RASIO LANCAR
CURRENT RATIO

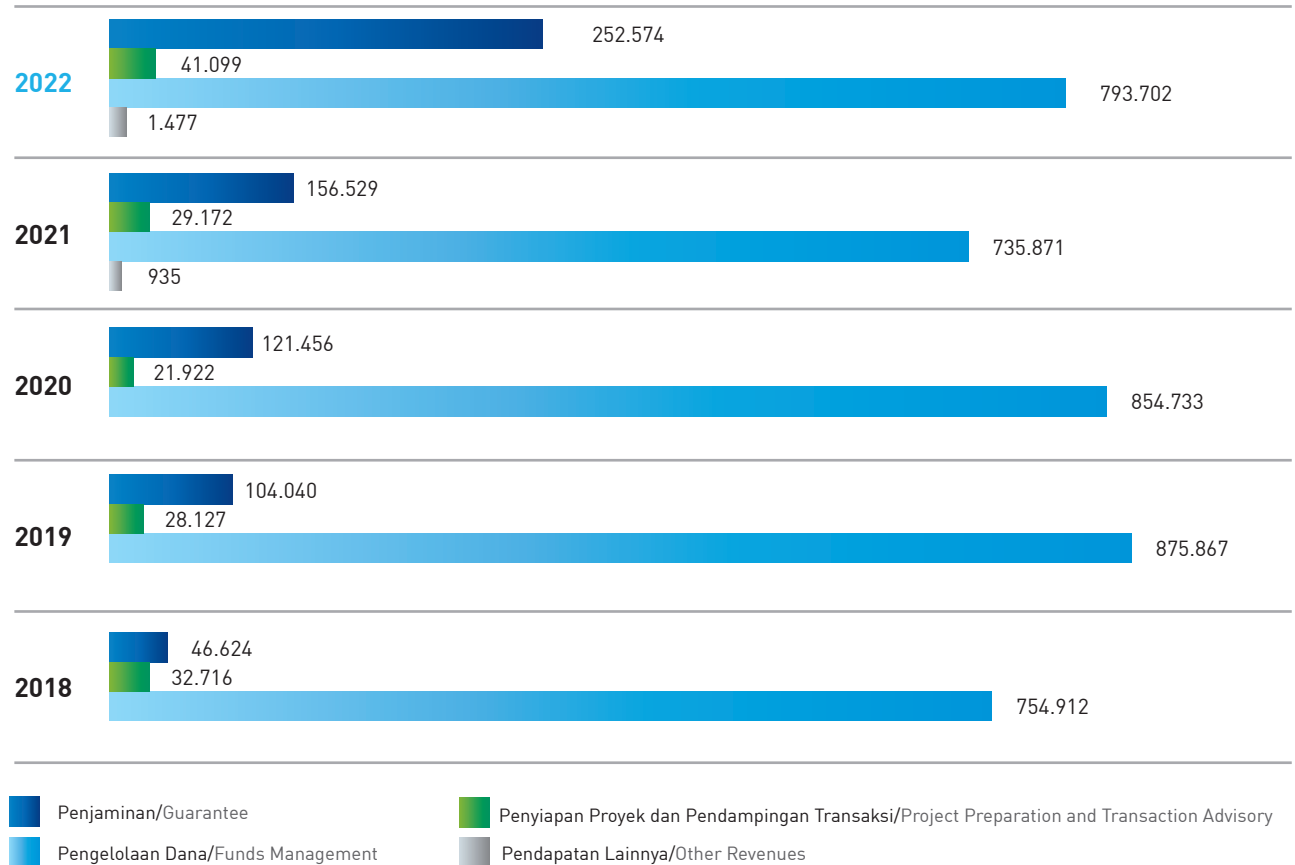


IKHTISAR BISNIS
BUSINESS HIGHLIGHTS

IKHTISAR PENDAPATAN

REVENUE HIGHLIGHTS

(dalam jutaan Rupiah)	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021-2022 (%)	(in million Rupiah)
Pendapatan							Revenues
Penjaminan	252.574	156.529	121.456	104.040	46.624	61,4%	Guarantee
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (PDF)	41.099	29.172	21.922	28.127	32.716	40,9%	Project Preparation and Transaction Advisory (PDF)
Pengelolaan Dana	793.702	735.871	854.733	875.867	754.912	7,9%	Investment
Pendapatan Lainnya	1.477	935	-	-	-	58,0%	Other Income
Jumlah Pendapatan	1.088.852	922.507	998.111	1.008.035	834.252	18,0%	Total Revenues



DIVIDEN SAHAM

Berdasarkan RUPS Tahunan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2022, para pemegang saham menyetujui keputusan Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 untuk dialokasikan cadangan laba Perseroan sebesar Rp31.270.106.800,- dan pembagian Dividen sejumlah Rp156.350.534.000,-.

Berdasarkan RUPS Tahunan tahun buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2021, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2020 sejumlah Rp186.168.000.000,-.

SHARE DIVIDENDS

According to the Annual GMS for the 2021 fiscal year held on June 20, 2022, the shareholders approved the decision to use net profit of the Company for the 2021 fiscal year to be allocated for the Company's profit reserve of Rp31,270,106,800,- and dividend distribution of Rp156,350,534,000,-.

According to the Annual GMS for the 2020 fiscal year held on June 23, 2021, the shareholders approved the distribution of dividends for 2020 of Rp186,168,000,000,-.



IKHTISAR SAHAM DAN AKSI KORPORASI **STOCK AND CORPORATE ACTION HIGHLIGHTS**

Jumlah saham Perseroan sebanyak 10.655.000 lembar saham, dengan kepemilikan seluruhnya atau 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hingga akhir tahun 2022, Perseroan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga saham penutupan, dan volume perdagangan saham Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga tidak menyajikan informasi terkait pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, penurunan nilai nominal saham, penghentian sementara perdagangan saham dan penghapusan pencatatan saham.

The Company has a total of 10,655,000 shares, with 100% ownership by the Government of the Republic of Indonesia. Until the end of 2022, the Company did not list its shares on any stock exchange either in Indonesia or abroad. Accordingly, the Company does not present information related to the number of outstanding shares, market capitalization, highest share price, lowest share price, closing share price, and trading volume of the Company's shares.

In addition, the Company also does not present information related to stock split, reverse stock, share dividend, bonus shares, decrease in par value of shares, suspension and delisting.

INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA INFORMASI PENDANAAN LAINNYA **INFORMATION OF BONDS, SUKUK OR CONVERTED BONDS, AS WELL AS OTHER FINANCING INFORMATION**

Hingga akhir tahun 2022, Perseroan tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki pendanaan lainnya seperti Surat Berjangka Menengah.

Until the end of 2022, the Company did not issue any bonds/sukuk/converted bonds. Accordingly, the Company does not present information related to the number of outstanding bonds/sukuk/converted bonds, interest/reward rates, maturity dates, and bond/sukuk ratings. In addition, the Company also does not have other funding such as Medium Term Notes.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN TAHUN 2022 BERKALA INTERNASIONAL/REGIONAL INTERNATIONAL/REGIONAL AWARDS IN 2022



Deskripsi Penghargaan/Award Description:
ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-bribery Management System

Pemberi Penghargaan/Award Presenter:
PT CHESNA dan Komite Akreditasi Nasional/PT CHESNA and National Accreditation Committee

Masa Bertaku/Validity Period:
30 Maret/March 2022 s/d/to
29 Maret/March 2025



Deskripsi Penghargaan/Award Description:
PPP Agency of the Year 2022

Pemberi Penghargaan/Award Presenter:
The Asset

Acara/Kegiatan/Event/Activity:
The Asset Triple A Award

Tanggal Diberikan/Date:
7 Juli/July 2022



Deskripsi Penghargaan/Award Description:
The Most Sustainable Infrastructure Financing Institution

Pemberi Penghargaan/Award Presenter:
CNBC Indonesia

Acara/Kegiatan/Event/Activity:
CNBC Indonesia Award 2022

Tanggal Diberikan/Date:
6 September 2022



Deskripsi Penghargaan/Award Description:
Environmental and Social Innovation Awards dengan apresiasi Gold dalam kategori Inovasi Sosial/Environmental and Social Innovation Awards with Gold award in Social Innovation category

Pemberi Penghargaan/Award Presenter:
Top Business

Acara/Kegiatan/Event/Activity:
Environmental and Social Innovation Awards

Tanggal Diberikan/Date:
6 September 2022



Deskripsi Penghargaan/Award Description:
Top GRC Awards #4 Star; dan/and Direktur Utama PT PII sebagai/ President Director of IIGF as The Most Committed GRC Leader 2022 Special Appreciation of TOP GRC Award 2022 on Collaboration of Risk & Control Management

Pemberi Penghargaan/Award Presenter:
PT Sucofindo

Acara/Kegiatan/Event/Activity:
Top GRC Awards 2022

Tanggal Diberikan/Date:
7 September 2022



Deskripsi Penghargaan/Award Description:
Winner: Risk Champion Runner Up: GRC Awards dan/and Risk Educator

Pemberi Penghargaan/Award Presenter:
ERMA [Enterprise Risk Management Academy]

Acara/Kegiatan/Event/Activity:
ASEAN Risk Awards 2022

Tanggal Diberikan/Date:
8 Desember/December 2022



PENGHARGAAN TAHUN 2022 BERSKALA NASIONAL NATIONAL AWARDS IN 2022



Deskripsi Penghargaan/Award Description:
*Indonesia Best CEO Awards
Employee Choice's 2022*

Pemberi Penghargaan/Award Presenter:
The Economics

Acara/Kegiatan/Event/Activity:
The Economics Best CEO Award 2022

Tanggal Diberikan/Date:
20 April 2022



Deskripsi Penghargaan/Award Description:
*Top Digital Implementation,
Top Special Recognition dan/and
Top Leader on Digital
Implementation*

Pemberi Penghargaan/Award Presenter:
It Works

Acara/Kegiatan/Event/Activity:
Top Digital Award 2022

Tanggal Diberikan/Date:
15 Desember/December 2022



PERISTIWA PENTING SIGNIFICANT EVENTS

14 JANUARI JANUARY



Direktur Bisnis hadir sebagai narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di daerah Jawa Tengah dengan tajuk "Seminar Ekonomi Islam - Peran Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan".

Business Director of the Company was presented as a guest speaker at an activity organized by Association of Islamic Economists (IAEI) in Central Java with the title of "Seminar Islamic Economy - The Role of Sharia Economy in the Sustainable National Economic Recovery".

18 JANUARI JANUARY



Kunjungan Kerja dari DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pembahasan Perubahan Raperda untuk penguatan modal PDAM Tirta Jawa Barat sebagai pihak yang akan bertindak menjadi PJKP Proyek KPBU SPAM Regional Jatigede (Cirebon Raya).

Work Visit from the West Java Provincial DPRD in the context of Discussing Amendments to the Regional Regulation for strengthening the capital of PDAM Tirta West Java as the party that will act as GCA for the Jatigede Regional SPAM PPP Project (Cirebon Raya).

20 JANUARI JANUARY



Penandatanganan PKS antara Jamdatun dan Perseroan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Seminar BJR pada Perseroan.

MoU signing between Jamdatun and the Company on Handling Legal Issues in Civil and State Administration and BJR Seminar at the Company.

25 JANUARI JANUARY



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Direksi Perseroan - Donny Hamdani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KMK-14/KMK.06/2022 tertanggal 17 Januari 2022.

Inauguration and Oath Taking of the Company's Board of Directors - Donny Hamdani according to the Decree of the Minister of Finance No. KMK-14/KMK.06/2022 dated January 17, 2022.

31 JANUARI JANUARY



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Regres untuk Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap antara Perseroan dengan Kementerian PUPR dan PT Jasa Marga Gedebage Cilacap.

Signing of Guarantee and Recourse agreement for the Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Toll Road Public Private Partnership (PPP) Project between the Company, the Ministry of Public Works and Housing and PT Jasa Marga Gedebage Cilacap.

9, 16 & 23 FEBRUARI FEBRUARY



Perseroan bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menggelar Seminar Nasional Ekonomi Syariah "Peran Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Nasional yang Berkelanjutan".

The Company cooperated with the Indonesian Islamic Economists (IAEI) held a National Seminar on Sharia Economics of "The Role of Sharia Economics in Sustainable National Recovery".

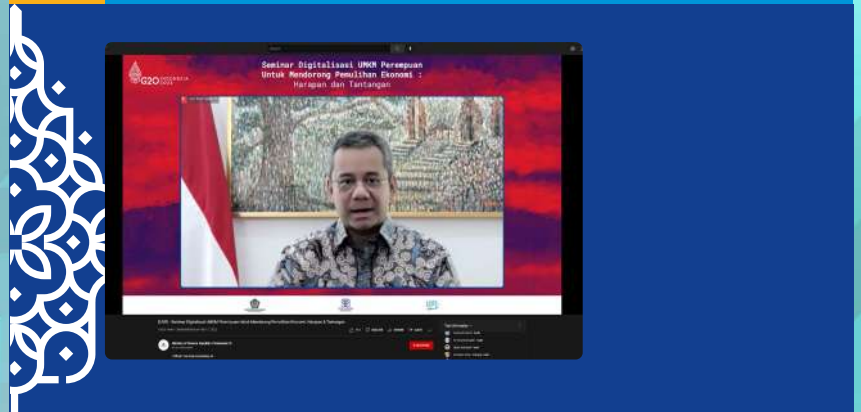
9 FEBRUARI FEBRUARY



Perseroan menggelar kegiatan tahunan *Stratcomm Talks* bertemakan “*Strengthening Strategic Communications for Kemenkeu Satu*” yang bertujuan membangun pemahaman insan SMV terkait strategi komunikasi Kemenkeu termasuk optimalisasi media serta hubungan antara media dengan publik.

The Company holds annual event *Stratcomm Talks* with the theme of “*Strengthening Strategic Communications for Kemenkeu Satu*” which aims to build an understanding of SMV personnel related to the Ministry of Finance’s communication strategy including media optimization and relationships between the media and the public.

17 FEBRUARI FEBRUARY



Perseroan turut serta hadir berperan sebagai Pembicara dalam rangka mendukung agenda strategis Presidensi Indonesia dalam forum G20. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong sinergi dan kerja sama antara para pemangku kepentingan dengan pihak swasta dalam penguatan peran UMKM melalui digitalisasi ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

The Company participated as a Speaker in order to support the strategic agenda of the Indonesian Presidency in the G20 forum. This activity aimed at encouraging synergy and cooperation between stakeholders and private sectors in strengthening the role of MSMEs through economic digitalization in the middle of the Covid-19 pandemic.

18 FEBRUARI FEBRUARY



Perseroan berpartisipasi pada kegiatan seminar yang merupakan rangkaian acara ‘*The 21st Indonesia Capital Market Student Studies*’ (ICMSS) yang diselenggarakan oleh Management Student Society FEB Universitas Indonesia dengan tajuk “*Infrastructure Development - Stable Foundation for Economic Growth*”.

The Company participated in seminar which is a series of events ‘*The 21st Indonesia Capital Market Student Studies*’ (ICMSS) which was organized by the Management Student Society FEB University of Indonesia with the theme “*Infrastructure Development - Stable Foundation for Economic Growth*”.

8 MARET MARCH



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Regres untuk Proyek KPBU Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi bersama Kementerian PUPR dan PT Tol Jagat Kerthi Bali. Sebagai salah satu PSN, proyek ini diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah Bali dan sekitar.

The signing of the Guarantee and Recourse Agreement for the Gilimanuk - Mengwi Toll Road PPP Project with the Ministry of Public Works and Housing and PT Tol Jagat Kerthi Bali. As one of the PSN, this project is expected to boost the economy of Bali and surrounding areas.

14-17 MARET MARCH



SMV Week “*Harmony to Strengthen the Economy*”, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh Kanwil DJKN terkait SMV serta dapat menjadi wadah untuk mendorong sinergi antara SMV dengan *Stakeholders* di Daerah melalui representasi Kantor Wilayah DJKN.

SMV Week of “*Harmony to Strengthen the Economy*”, this activity was expected to increase the understanding of all DJKN Regional Offices related to SMV and to be a forum to encourage synergy between SMV and Stakeholders in the Region through the representation of DJKN Regional Offices.



Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari 5 kegiatan, Perseroan turut berpartisipasi sebagai narasumber saat Sosialisasi berlangsung di kota Malang dan Bandung.

Socialization of Law No. 1 of 2022, concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. Of the 5 activities, the Company participated as a speaker when the Socialization took place in Malang and Bandung.



- *Fitch on Indonesia 2022 - Exit Strategy After the Pandemic: Corporate and Infrastructure and Project Finance.* Pada agenda ini, Direktur Utama Perseroan hadir memaparkan beberapa topik strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait efektivitas penerapan *Sustainable Financial Roadmap* dalam mendorong pemulihan perekonomian Indonesia.
- *Launching pojok SMV dan Penguatan SMV Icon 2022*, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana dan wadah kolaborasi nyata guna mengoptimalkan peran Kanwil DJKN dan SMV agar sejalan dengan program RCE yang diusung oleh Kementerian Keuangan.
- *Fitch on Indonesia 2022 - Exit Strategy After the Pandemic: Corporate and Infrastructure and Project Finance.* In this agenda, the President Director of the Company presented to explain several strategic topics. This activity aimed at providing an understanding of the effectiveness of *Sustainable Financial Roadmap* implementation in encouraging Indonesia's economic recovery.
- *Launching the SMV corner and inaugurating the SMV Icon 2022*, this activity is expected to be a real means and forum for collaboration to optimize the role of the Regional Office of DJKN and SMV in line with the RCE program carried out by the Ministry of Finance.



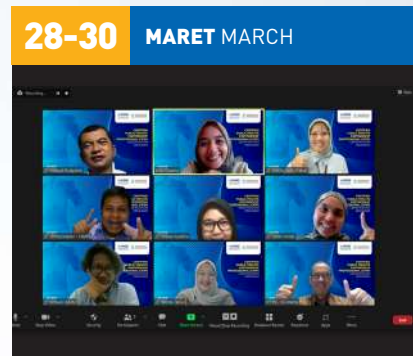
Forum ISDB Group - Indonesia Presidency G20 Engagement Dinner yang dihadiri oleh Menteri Keuangan bersama para pemangku kepentingan G20 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan. Acara yang diadakan oleh Islamic Development Bank ini bertujuan untuk mendukung G20 di Indonesia, sekaligus memperkuat kemitraan jangka panjang.

ISDB Group Forum - Indonesia Presidency G20 Engagement Dinner which attended by the Minister of Finance and G20 stakeholders at Fairmont Hotel, Senayan, South Jakarta. This event organized by the Islamic Development Bank aimed at supporting the G20 in Indonesia, while strengthening long-term partnerships.



Indonesia PPP Day 2022, terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman investor dan perbankan global serta menciptakan peluang kerja sama yang kuat dalam berinvestasi pada sektor Infrastruktur di Indonesia.

Indonesia PPP Day 2022, consists of a series of activities with the aim of increasing the understanding of global investors and banks and creating strong co-operation opportunities in investing in the Infrastructure sector in Indonesia.



Pelaksanaan Course Program Sertifikasi CP3P Foundation Level Batch 9 yang ditujukan bagi Publik (LMAN, HPP Law Firm dan Konsultan), kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan ujian pada tanggal 2 April 2022.

The implementation of the CP3P Foundation Level Batch 9 Certification Program Course aimed at the Public (LMAN, HPP Law Firm and Consultant), continued with the examination on April 2, 2022.



1 APRIL

Perjanjian Kredit PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur dan PT Baja Titian Utama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk proyek KPBUSPAM Regional Jatiluhur I dan Proyek KPBUSPAM Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (ICH) di Pulau Jawa. Perseroan sebagai salah satu SMV turut berkontribusi dalam memberikan penjaminan Pemerintah kepada kedua belah pihak.

Credit Agreement of PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur and PT Baja Titian Utama with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for the Jatiluhur I Regional SPAM PPP project and the Hamilton Callender Bridge (ICH) Replacement and/or Duplication PPP Project on Java Island. The Company as one of the SMVs contributed in providing government guarantees to both parties.



21 APRIL

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kegiatan Task Force (TF) 8 - T20 yang dihadiri oleh TF8 Co-Chair dan Thematic Coordinators serta Direktur Bisnis Perseroan. Kegiatan ini dilakukan secara luring dalam rangka melakukan pengkinian rangkaian pelaksanaan kegiatan TF8 dan Rencana TF8 Pre-Summit Meeting yang akan dilaksanakan pada Juli 2022.

Organization of Task Force (TF) 8 - T20 Activity Coordination Meeting attended by TF8 Co-Chair and Thematic Coordinators as well as Business Director of the Company. This activity was conducted offline in order to update the series of TF8 activities and the TF8 Pre-Summit Meeting Plan to be held in July 2022.



22 APRIL

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Akta Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan sehubungan dengan Penjaminan Pemerintah atas Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2022 dengan Bank Bukopin sebagai Wali Amanat. Perseroan turut membantu mendorong program PEN bagi korporasi dalam hal ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui mandatnya yaitu Penjaminan Pemerintah.

The signing of the Guarantee Agreement and the Deed of Guarantee Implementation Agreement in connection with the Government Guarantee of Bond IV and Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero) Tbk Year 2022 with Bank Bukopin as Trustee. The Company supports PEN program for corporations, in this case PT Waskita Karya (Persero) Tbk through its mandate, namely Government Guarantee.



25 APRIL

Sosialisasi UU IKN No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan sebagai narasumber, serta jajaran Direksi dan karyawan Perseroan. Kegiatan yang diadakan bersamaan dengan agenda Rapat Koordinasi Direktorat Utama Perseroan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atas isu dan implementasi UU IKN dalam proses bisnis Perseroan.

Socialization of the IKN Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital City which was attended by the Head of the Legal Bureau of the Ministry of Finance as a speaker, as well as the Board of Directors and employees of the Company. The activity, which was held in conjunction with the Company Main Directorate Coordination Meeting agenda, was expected to provide an understanding of the issues and implementation of the IKN Law in the Company's business processes.



26 APRIL

Audiensi dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur, sinergi antara kedua belah pihak dilakukan sebagai upaya dalam mendukung program prioritas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur.

Hearing session with the Governor of East Java Province, synergy between the two parties was carried out as an effort to support the priority program of infrastructure development in East Java Province.



28 APRIL

Audiensi dengan Kepala dan Waka Otorita Ibu Kota Negara (IKN) pada pertemuan kali ini salah satunya diskusi terkait peran Perseroan dalam hal penyiapan dan advisory untuk IKN. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur PDPPI Kemenkeu, Direktur PPP Bappenas, Direktur Utama, dan Direktur Bisnis Perseroan.

Hearing session with Head and Vice Authority of the National Capital City (IKN) in which one of the meeting's discussions was related to the role of the Company in terms of preparation and advisory for IKN. This activity was attended by the Director of PDPPI of the Ministry of Finance, Director of PPP Bappenas, President Director and Business Director of the Company.



10 MEI MAY
Kegiatan Silaturahmi Idul Fitri 1443 H berlangsung secara *hybrid* dengan dihadiri oleh Menteri Keuangan beserta jajaran, SMV dan para pemangku kepentingan dari Sektor Jasa Keuangan.

Eid al-Fitr 1443 H gathering activity took place in a hybrid manner with the presence of by the Minister of Finance and his staff, SMV and stakeholders from the Financial Services Sector.



12 MEI MAY
Kunjungan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka dalam rangka penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJPP) Perseroan Tahun 2023-2027 serta pembahasan perkembangan kinerja Perseroan di Triwulan I Tahun 2022.

The visit of the General Director of Country's Wealth was carried out in order to prepare the Company's Long Term Plan (RJPP) for 2023-2027 and discussing the development of the Company's performance in the First Quarter of 2022.



13 MEI MAY
Audiensi Universitas Sam Ratulangi dan Pemkot Bitung terkait KPDBU SPAM Bitung dihadiri oleh Bappeda Kota Bitung, Perumda Air Minum Duasudara Kota Bitung, dan Bank Indonesia Sulut. Pembahasan terkait status dan tindak lanjut Proyek SPAM Bitung dengan skema KPBU.

Hearing Session with Sam Ratulangi University and Bitung City Government regarding KPDBU SPAM Bitung attended by Bappeda Bitung City, Perumda Air Minum Duasudara Bitung City, and Bank Indonesia North Sulawesi. The discussion was related to the status and follow-up of the Bitung SPAM Project with the PPP scheme.



19 MEI MAY
Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah Proyek *Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central Java)* PT PLN (Persero). Proses penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Perseroan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) serta Country Director Asian Development Bank (ADB).

The signing of the Government Guarantee Agreement for the Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central Java) Project of PT PLN (Persero). The signing process was carried out by the President Director of the Company, Director General of Financing and Risk Management of the Ministry of Finance and President Director of PT PLN (Persero) and Country Director of Asian Development Bank (ADB).



28 MEI MAY
Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan melakukan *Site Visit* ke lokasi proyek-proyek Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo sekaligus melakukan diskusi terkait pembangunan proyek dengan *stakeholders* terkait.

The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company conducted a Site Visit to the project site of the Solo - Yogyakarta - NYIA Toll Road Project. Kulonprogo Toll Road Project as well as conducting discussions related to the development project with relevant stakeholders.

30

MEI MAY



Kick Off Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi KPBU Proyek TPA Sampah Regional Piyungan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian terkait Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi. Pembahasan terkait rencana ruang lingkup dan DED rencana proyek KPBU RSPTN UNPAD. Tindak lanjut kegiatan adalah penyesuaian pada Dokumen Studi Pendahuluan atas hasil Konsultasi Publik dan FGD dan selanjutnya UNPAD akan melakukan pengajuan fasilitas PDF kepada Kemenkeu.

Kick Off of PPP project preparation and transaction advisory of Piyungan Regional Waste Landfill as a follow-up to the Agreement related to the Implementation of the Project Preparation Facility and Transaction Implementation. Discussion related to the scope plan and DED of UNPAD RSPTN PPP project plan. The followed-up activities are adjustments to the Preliminary Study Document on the results of Public Consultation and FGD and then UNPAD will submit a PDF facility to the Ministry of Finance.

1-6

JUNI JUNE



Annual Meeting Islamic Development Bank Group 2022. Sebagai salah satu wadah bagi Perseroan untuk memperkenalkan skema KPBU yang dilakukan di Indonesia beserta Penjaminan yang dijalankan. Perseroan melakukan diskusi dengan IsDB Group untuk menindaklanjuti MoU yang ditandatangani pada tahun 2019.

Annual Meeting of Islamic Development Bank Group 2022. As one of the platforms for the Company to introduce the PPP scheme carried out in Indonesia along with the Guarantee, the Company held discussions with the IsDB Group to follow-up on the MoU signed in 2019.

14

JUNI JUNE



Workshop Implementasi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebagai forum untuk menjembatani diskusi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN guna menghasilkan acuan risiko fiskal yang lebih baik.

State Financial Risk Management Implementation Workshop one of the objectives of this activity is as a forum to bridge discussions between the Ministry of Finance and the Ministry of SOEs in order to produce a better fiscal risk reference.

20

JUNI JUNE



Pada agenda RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2021, pemegang Saham menilai Perseroan mampu mempertahankan kinerja pendapatan dan mendorong pertumbuhan laba bersih di tengah Pandemi Covid-19.

On the agenda of the GMS Annual Report Financial Year 2021, Shareholders assessed that the Company was able to maintain revenue performance and drive net profit growth in the middle of the Covid-19 Pandemic.



22 JUNI JUNE
Kick Off PDF Proyek KPBU Rusunawa terintegrasi KEK Sei Mangkei sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi antara Perseroan, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, dengan harapan seluruh proses yang berjalan hingga *Financial Close* dapat berjalan lancar serta mampu mendorong percepatan Proyek.

Kick Off PDF of Rusunawa PPP Project Sei Mangkei SEZ Integrated as a support and collaboration between Company, Ministry of Finance, North Sumatra Provincial Government and all stakeholders involved, with the hope that the entire process process that runs until Financial Close can run smoothly and be able to encourage acceleration of the Project.



8 JULI JULY
Perseroan bekerja sama dengan berbagai Kementerian terkait dan Universitas Negeri, melaksanakan kegiatan Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi T20 dengan tema "*Equitable Risk Allocation*" yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan beserta jajaran dan pemangku kepentingan terkait.

The Company in collaboration with various related Ministries and State Universities, held the 23rd Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) T20 Edition with the theme of "Equitable Risk Allocation" which was attended by the Vice Minister of Finance and related staffs and stakeholders.



13 JULI JULY
Kegiatan "*Media Luncheon*" yang dihadiri seluruh jajaran Direksi dimana merupakan ajang silaturahmi yang bertujuan untuk mengoptimalkan komunikasi dan kerja sama antara Perseroan dengan media.

The "Media Luncheon" activity which was attended by the entire Board of Directors was a gathering event aimed at optimizing communication and cooperation between the Company and the media.



20-21 JULI JULY
Perseroan bersama dengan Universitas Pancasila dan UNIID melaksanakan kegiatan Simposium V dengan tajuk "Kolaborasi Keilmuan dan Keprakerjaan dalam Membangun Infrastruktur". Direktur Bisnis Perseroan hadir sebagai panelis.

The Company together with Pancasila University and UNIID held the 5th Symposium with the title of "Scientific Collaboration and Expertise in Building Infrastructure". The Executive Director of the Company's Business Director was presented as the panelist.



25 JULI JULY
Agenda paparan dan diskusi terkait dengan pelaksanaan kajian akhir Pra Studi Kelayakan Proyek KPBU Pengembangan TPAS Regional Piyungan sebagai bagian dari dukungan PDF. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur DIY dan Direktur Keuangan Perseroan.

The agenda of exposure and discussion related to the implementation of final review of the Pre-Feasibility Study of PPP Project of Piyungan Regional Landfill Development as part of PDF support. The activity was attended by the Governor of Yogyakarta and the Finance Director of the Company.



27 JULI JULY
Perseroan berpartisipasi melalui Direktur Bisnis Perseroan yang hadir sebagai narasumber pada webinar Presidensi G20 dalam rangkaian acara Pekan Raya Perpajakan Nasional 2022 yang diselenggarakan oleh PKN-STAN dengan tema "*Indonesia's G20 Presidency Impact on Economic Recovery*".

The Company participated through the Business Director of the Company who attended as a speaker in the G20 Presidency webinar in a series of 2022 National Taxation Fair events organized by PKN-STAN with the theme of "Indonesia's G20 Presidency Impact on Economic Recovery".

2

AGUSTUS AUGUST



Direktur Utama Perseroan didampingi oleh Deputy Direktur Bidang I menghadiri agenda tahunan CEO Meeting SMV dengan Menteri Keuangan, dimana seluruh Direktur Utama SMV Kemenkeu hadir memaparkan capaian kinerja serta isu strategis Perseroan.

The President Director of the Company accompanied by the Deputy Director of Division I attended the annual SMV CEO Meeting agenda with the Minister of Finance, where all SMV Managing Directors of the Ministry of Finance attended to present the Company's performance achievements and strategic issues.

17

AGUSTUS AUGUST



Seluruh Direksi Perseroan hadir pada Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan di Lapangan AA Maramis Kementerian Keuangan dengan mengenakan pakaian adat daerah Indonesia.

The Board of Directors of the Company attended the 77th Anniversary of the Independence of the Republic of Indonesia which was led directly by the Minister of Finance at AA Maramis Field of Ministry of Finance by wearing Indonesian traditional clothing.

19

AGUSTUS AUGUST



- Direktur Utama Perseroan melakukan *site visit* proyek KPBU Kereta Api Makassar - Parepare dalam rangka meninjau progres pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diberikan penjaminan oleh Perseroan.
- Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Teknologi Digital Menuju UMKM yang lebih Kuat dan Berdaya Saing Global" yang dihadiri oleh Direktur Utama Perseroan, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan pemangku kepentingan lainnya.

- The President Director of the Company conducted a site visit to the Makassar - Parepare Railway PPP project.
- The National Seminar titled "Optimizing the Role of Digital Technology Towards Stronger and Globally Competitive MSMEs" which was attended by the President Director of the Company, Director General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance and other stakeholders.

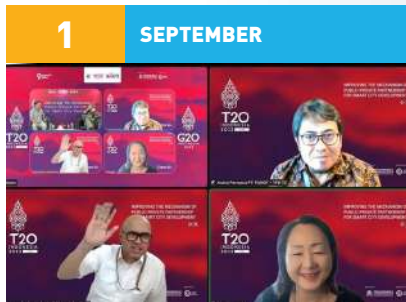
30

AGUSTUS AUGUST



Pada agenda Webinar WAPPP: *Connectivity through PPP - Key to unlocking Indonesia's Economic Potential* Direktur Bisnis Perseroan hadir sebagai narasumber memaparkan perihal Pengalaman dan Pipeline Perseroan terkait proyek KPBU khususnya di sektor Transportasi bersama rekan Bappenas, Kemenhub, dan PT SMI.

On the agenda of the WAPPP Webinar: *Connectivity through PPP - Key to Unlocking Indonesia's Economic Potential*, the Business Director of the Company attended as a speaker to explain the experience and pipeline of the Company regarding PPP projects, especially in the transportation sector with colleagues from Bappenas, Ministry of Transportation, and PT SMI.



Perseroan berpartisipasi pada kegiatan Webinar "Task Force-2 T20 Goesmart 2022: Improving The Mechanism of Public-Partnership for Smart City Development". Turut hadir dalam acara tersebut Lead Co-Chair T20, Head of ADB's Office of PPP, Lead Co-Chair Task Force-8 T20 Indonesia serta Direktur Bisnis Perseroan.

The Company participated in the Webinar "Task Force-2 T20 Goesmart 2022: Improving The Mechanism of Public-Partnership for Smart City Development". Also attending the event were the T20 Lead Co-Chair, Head of ADB's Office of PPP, Lead Co-Chair of Task Force-8 T20 Indonesia and Business Director of the Company.



Perseroan mendapatkan penghargaan di ajang Top GRC Awards tahun 2022 dengan kategori Top GRC Awards #4 Star, Special Appreciation of TOP GRC Award 2022 on Collaboration of Risk & Control Management serta The Most Committed GRC Leader 2022 yang diberikan kepada Direktur Utama Perseroan.

The Company received awards in the Top GRC Awards 2022 in the category of Top GRC Awards #4 Star, Special Appreciation of TOP GRC Award 2022 on Collaboration of Risk & Control Management as well as The Most Committed GRC Leader 2022 which were awarded to the President Director of the Company.



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Regres untuk Proyek KPBU Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun yang dilakukan oleh Direktur Utama Perseroan, Bupati Madiun, serta Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun. Proyek ini merupakan KPBU APJ pertama di Indonesia, serta Kabupaten Pertama yang menerapkan KPBU dengan Bupati sebagai PJPK.

The signing of the Guarantee and Recourse Agreement for the Public Street Lighting (PSL) PPP Project in Madiun Regency which was carried out by the President Director of the Company, Madiun Regent, and President Director of PT Tri Tunggal Madiun. This project is the first PSL PPP in Indonesia, as well as the first district to implement PPP with the Regent as GCA.



Program CSR Pengelolaan Sampah Organik dengan Bio Konversi sebagai solusi bagi permasalahan sampah di Provinsi DIY, yang dihadiri oleh Direktur Utama Perseroan. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan sampah serta menciptakan pola usaha pertanian terintegrasi dengan produksi turunan dari hasil pengolahan Bio Konversi.

CSR Program of Organic Waste Management with Bio Conversion as a solution to waste problems in DIY Province, attended by the President Director of the Company. This program is expected to be a solution to the waste problem and create an integrated agricultural business pattern with derivative production from Bio Conversion processing results.



Special Event toward G20 Summit "Infrastructure Development through Innovation and Collaborative Financing toward Greater Inclusivity and Productivity" yang dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Lead Co-Chairs of T20, Direktur Utama dan Direktur Bisnis Perseroan serta perwakilan SMV. Kegiatan ini membahas mengenai berbagai terobosan baru yang akan dirumuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang resilient, inklusif, dan berkelanjutan.

Special Event toward G20 Summit titled "Infrastructure Development through Innovation and Collaborative Financing toward Greater Inclusivity and Productivity" which was attended by the Minister of Finance of Indonesia, Lead Co-Chairs of T20, President Director and Business Director of the Company and SMV representatives. This activity discussed various new breakthroughs that will be formulated to support resilient, inclusive, and sustainable infrastructure development.



Perseroan bersama delagasi PT IIF, Kemenhub, dan UNIID melakukan kunjungan ke US Department of Transportation (US DOT) and Millenium Challenge Corporate (MCC), dalam rangka untuk mengembangkan potensi kolaborasi mengenai potensi pipeline proyek KPBU transportasi di Indonesia bersama Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah.

The Company together with its delegation, Ministry of Transportation, and UNIID visited the US Department of Transportation (US DOT) and Millennium Challenge Corporate (MCC), in order to develop potential collaboration regarding the potential pipeline of transportation of PPP projects in Indonesia with the relevant Ministries and Local Governments.



The Joint Workshop of IIGF and IsDB Group "Delivering Social Infrastructure through PPP - Case Study of PPP Hospital Development in Turkey". Dihadiri oleh Direktur Bisnis Perseroan beserta jajaran dan Resident Representative of the IsDB Regional Hub Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk bertukar informasi tentang pengalaman IsDB Group dalam mendukung penyediaan infrastruktur sosial melalui skema KPBU.

The Joint Workshop of IIGF and IsDB Group titled "Delivering Social Infrastructure through PPP - Case Study of PPP Hospital Development in Turkey". Attended by the Business Director of the Company and staff and Resident Representative of the IsDB Regional Hub Indonesia. This activity aimed at exchanging information about IsDB Group's experience in supporting the provision of social infrastructure through PPP scheme.



- Special Event Road to G20 bertajuk "Guarding Energy Transition in Indonesia and Beyond" yang diinisiasi oleh Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI). Direktur Utama Perseroan sebagai narasumber dengan menyampaikan materi mengenai Peran Perseroan sebagai penjamin dan penyedia fasilitas PDF dalam pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan Electric Vehicles (EV).
- Perseroan bersinergi dengan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) melalui program CSR memberikan bantuan dukungan kewirausahaan bagi pelaku UMKM yang berasal dari eks pekerja konstruksi PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW. Pada kegiatan ini Direktur Keuangan Perseroan turut serta hadir secara online.
- Road to G20 Special Event titled "Guarding Energy Transition in Indonesia and Beyond" initiated by the Association of Indonesian State University Alumni Organizations (HIMPUNI). The President Director of the Company as a speaker by delivering material on the role of the Company as a guarantor and PDF facility provider in infrastructure development related to Electric Vehicles (EV).
- The Company synergized with PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) through a CSR program to provide entrepreneurial support assistance for MSME players who come from former construction workers of the Central Java 2 x 1,000 MW PLTU. In this activity, the Finance Director of the Company also attended online.



Dalam rangka menindaklanjuti permohonan PDF untuk Proyek KPBU TPA Manggar Kota Balikpapan. Kementerian Keuangan bersama Perseroan dan PT SMI melakukan kunjungan lapangan ke tempat yang menjadi lokasi Proyek dengan dihadiri oleh Wakil Walikota Balikpapan, DPRD Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup.

In order to follow up on the PDF application for the PPP Project of Balikpapan City TPA Manggar. The Ministry of Finance together with the Company and PT SMI conducted a field visit to the Project site attended by the Deputy Mayor of Balikpapan, Balikpapan DPRD and the Environmental Agency.



Bersama dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Utama Perseroan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun dengan didampingi Bupati Madiun. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung wilayah Kabupaten Madiun yang dilewati proyek APJ dan juga pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan di daerah.

Together with the General Director of Fiscal Balance, the President Director of the Company paid a working visit to Madiun Regency accompanied by the Madiun Regent. This visit aimed at directly reviewing the Madiun Regency area which is passed by the APJ project and also the utilization of the Village Fund for development in the region.



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek KPBU Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada acara ini dihadiri Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan RI.

The signing of Cooperation Agreement, Infrastructure Provision Cooperation Agreement (KSPI), Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the PPP Proving Ground Project of the Roadworthiness Testing Center and Motor Vehicle Certification at this event was attended by the Minister of Finance and the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia.



Perseroan bersama Kementerian Keuangan RI, Bappenas, dan USAID SINAR bersinergi melakukan kegiatan Sharing Session terkait Alternatif Pembiayaan Infrastruktur APJ dengan skema KPBU. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Perseroan, Direktur PDPI Kementerian Keuangan, Direktur PPP Bappenas, dan Bupati Madiun.

The Company together with Indonesian Ministry of Finance, Bappenas, and USAID SINAR synergized to conduct Sharing Session activities related to Alternative APJ Infrastructure Financing with the PPP scheme. This activity was attended by Business Director of the Company, PDPI Director of the Ministry of Finance, PPP Director of Bappenas, and Madiun Regent.



Bersama dengan BPIW Kementerian PUPR, Perseroan melaksanakan internalisasi Kesepakatan Bersama dalam kolaborasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR berbasis pendekatan pengembangan wilayah. Melalui perannya masing-masing diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat Indonesia.

Together with BPIW of the Ministry of Public Works and Housing, the Company carried out the internalization of the Joint Agreement in collaboration on PUPR infrastructure planning and programming based on a regional development approach. Through their respective roles, they are expected to provide optimal services to the citizen of Indonesia.



Sebagai rangkaian Presidensi G20, Perseroan turut serta berkontribusi dalam ESG Framework and Manual Launch yang diinisiasi oleh DJPPR Kementerian Keuangan dan Perseroan. Direktur Bisnis Perseroan terlibat dalam sesi dialog bertajuk "The Journey of ESG Implementation in Infrastructure Development in Indonesia".

As a series of G20 Presidency, the Company also contributed to the ESG Framework and Manual Launch initiated by DJPPR Ministry of Finance and the Company. The Business Director of the Company was involved in the dialog session titled "The Journey of ESG Implementation in Infrastructure Development in Indonesia".



Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati selaku Pemegang Saham Perseroan mengangkat kembali Direktur Utama Perseroan, M. Wahid Sutopo, untuk masa jabatan 2022-2027. Pengangkatan ini merupakan suatu kepercayaan dari negara kepada M. Wahid Sutopo untuk kembali memimpin Perseroan, setelah dianggap berhasil memimpin Perseroan pada periode sebelumnya.

The Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, as the Shareholder of the Company, reappointed the President Director of the Company, M. Wahid Sutopo, for the period of 2022-2027. This appointment is a form of trustworthiness from the state to M. Wahid Sutopo to continuously lead the Company, after being considered successful in leading the Company in the previous period.



"Kemenkeu Mengajar 7" merupakan kegiatan kerelawanan mengajar dari para pegawai di Unit kerja serta SMV di berbagai tingkat pendidikan dari SD, SMP maupun SMA yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran Kementerian Keuangan maupun SMV Kementerian Keuangan.

"Kemenkeu Mengajar 7" is a teaching volunteer activity from employees in the work unit and SMV at various levels of education from elementary, junior high and high school aimed at providing knowledge about how the role of the Ministry of Finance and SMV Ministry of Finance.

1

DESEMBER DECEMBER



- Dalam rangka memwadahi kolaborasi peran Pemerintah dan para pemuda guna merealisasikan Visi Indonesia 2045, Kementerian Keuangan menyelenggarakan *Ministry of Finance Festival (MOFEST) 2022* yang dihadiri oleh Menteri Keuangan RI dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Perseroan bersama Kementerian PPN Bappenas dan DJKN Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan *Sharing Session* Alternatif Pembiayaan Infrastruktur dengan skema KPDBU. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Perseroan, Direktur PDPPI Kementerian Keuangan dan Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Aceh.
- In order to accommodate the collaborative role of the Government and the youth to realize Indonesia's Vision in 2045, the Ministry of Finance held the Ministry of Finance Festival (MOFEST) 2022 which was attended by the Indonesian Minister of Finance and Minister of Education, Culture, Research and Technology.
- The Company together with the Ministry of PPN Bappenas and DJKN Aceh Province carried out Socialization and *Sharing Session* of Alternative Infrastructure Financing with KPDBU scheme. This activity was attended by the Business Director of the Company, Director of PDPPI Ministry of Finance and Head of DJKN Regional Office of Aceh Province.

5

DESEMBER DECEMBER



Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Perseroan bersama dengan Bank Kaltimara terkait Pengembangan Ekosistem Pembiayaan Sektor Infrastruktur melalui Skema KPBU. Inisiatif ini merupakan bentuk kolaborasi Perseroan dan perbankan daerah pertama dalam penjaminan dan pembiayaan proyek infrastruktur dengan skema *staple financing*.

The signing of a Memorandum of Understanding between the Company and Bank Kaltimara regarding the Development of the Infrastructure Sector Financing Ecosystem through PPP Scheme. This initiative is the first form of collaboration between the Company and regional banks in guaranteeing and financing infrastructure projects with staple financing schemes.

8

DESEMBER DECEMBER



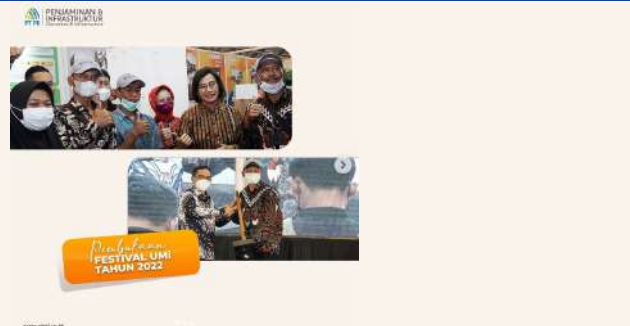
Perseroan berpartisipasi dalam acara Forum Diskusi Publik EY Indonesia - "*Unlocking the Potential of Creative Infrastructure Financing Towards Indonesia's Sustainable Development*" yang dihadiri oleh Direktur Bisnis Perseroan dan Staf Khusus Bidang Pendanaan dan Keuangan Kementerian Perhubungan RI yang memberikan *Sharing* terkait Studi Kasus Proyek KPBU *Proving Ground* Bekasi.

The Company participated in the EY Indonesia Public Discussion Forum - "*Unlocking the Potential of Creative Infrastructure Financing Towards Indonesia's Sustainable Development*" which was attended by the Business Director of the Company and the Special Staff for Funding and Finance of the Indonesian Ministry of Transportation who provided *Sharing* related to the Bekasi Proving Ground PPP Project Case Study.



15

DESEMBER DECEMBER



- RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dan RUPS Tahunan (RUPST) Perseroan dengan agenda RUPSLB menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode 2023-2027. Sementara agenda RUPST menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023, Kontrak Kinerja Direksi Tahun 2023 dan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2023.
- Direktur Utama hadir pada Pembukaan Festival UMi 2022 dan menyerahkan langsung secara simbolis bantuan berupa alat-alat kebutuhan para petani. Pada kesempatan ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan RI.
- Extraordinary GMS (EGMS) and Annual GMS (AGMS) of the Company with the EGMS agenda approved the Company's Long-Term Plan for the period 2023-2027. While the AGMS agenda approved the Company's Work Plan and Budget for 2023, the Board of Directors Performance Contract for 2023 and the Board of Commissioners Performance Contract for 2023.
- The President Director attended the Opening of the 2022 UMi Festival and symbolically handed over assistance in the form of tools for farmers. On this occasion was also attended by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

16

DESEMBER DECEMBER



Seremonial *Government Investment for Greener Environment*, SMV berama DJKN Kementerian Keuangan untuk menjalankan program TJSL sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan manfaat APBN bagi masyarakat yang lebih luas di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Turut hadir pada kegiatan ini Menteri Keuangan RI.

Ceremonial of Government Investment for Greener Environment, SMV together with DJKN of the Ministry of Finance carried out the CSR program as an effort to optimize the benefits of the state budget for the wider community in the social, economic, and environmental sectors. The Minister of Finance of the Republic of Indonesia also present at this activity.

17, 19, 28, & 30

DESEMBER DECEMBER



Dalam rangka memperingati HUT Perseroan ke-13 terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Direksi dan seluruh #IIGFans yaitu IIGFans Sehat Bareng, IIGFans Berbagi, *WFO Treats*, dan *A Day in PT PII*.

In order to commemorate the 13th Anniversary of the Company, there were several series of activities carried out by the Board of Directors and all #IIGFans, namely IIGFans Sehat Bareng, IIGFans Berbagi, *WFO Treats*, and *A Day in IIGF*.



Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara Kementerian Keuangan, Perseroan dan Badan Usaha Milik Negara (PT INKA, DAMRI, PT LEN dan Pertamina).

Guarantee Agreement and Guarantee Implementation Agreement between the Ministry of Finance, the Company and State-Owned Enterprises (PT INKA, DAMRI, PT LEN and Pertamina).





LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

“

Perbaikan skor hasil GCG *assessment* menjadi landasan untuk pengelolaan Perseroan yang lebih baik di tahun mendatang. Target peningkatan porsi Energi Baru dan Terbarukan di tahun-tahun mendatang didukung perbaikan tata kelola perusahaan menjadi dasar pertumbuhan berkelanjutan.

GCG assessment score improvement as a basis for the Company's better management in the future. A New and Renewable Energy portion target enhancement the following years sustained by good corporate governance improvement become a basis for sustainable growth.

”



AWAN NURMAWAN NUH

Komisaris Utama
President Commissioner

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami mewakili jajaran Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap Perseroan di tahun buku 2022.

Melalui penerbitan Laporan Tahunan tahun buku 2022 ini, Dewan Komisaris memenuhi peran dan tanggung jawabnya dalam melaporkan dan menyajikan sejumlah hal, di antaranya tinjauan terhadap penilaian kinerja Direksi, tinjauan terhadap implementasi strategi Perseroan, prospek usaha ke depan, penerapan tata kelola, hingga tinjauan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sepanjang tahun 2022.

Tema Laporan Tahunan ini adalah *"Beyond Infrastructure"* yang dengan tepat menggambarkan kondisi Perseroan di tahun 2022. Situasi ekonomi dunia pada tahun 2022 masih dalam ketidakpastian. Ekonomi global masih rentan oleh berbagai risiko (*downside risk*), yaitu: inflasi yang masih tinggi walaupun mulai menurun, suku bunga masih tinggi untuk mengendalikan inflasi, ruang fiskal menyempit, sehingga konsumsi global menurun, ditambah lagi tensi geopolitik di beberapa belahan dunia masih berlangsung.

Namun, di tengah terpaan ketidakpastian global tersebut, Perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan yang tinggi, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh solid sebesar 5,31%. Pertumbuhan tersebut ditopang dari tingginya pertumbuhan Konsumsi RT, Ekspor dan Investasi. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 3,87%, lebih tinggi jika dibandingkan 2 tahun terakhir. Pertumbuhan investasi tersebut sejalan dengan masifnya pertumbuhan infrastruktur di tahun 2022.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menjadi kunci ketahanan sektor infrastruktur Indonesia yang sangat tergantung pada kelancaran bisnis ekosistem pendukungnya. Menurut Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan investasi sepanjang 2022 tercatat mencapai Rp106,8 triliun yang digunakan untuk mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan investasi sepanjang 2022 terbesar diberikan kepada klaster infrastruktur, yang totalnya mencapai Rp97,6 triliun.

Situasi yang semakin kondusif tersebut tentunya berdampak positif, secara khusus, terhadap kinerja perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dan yang berkaitan dengannya, termasuk PT PII yang mendapat amanah untuk turut mendukung program-program PEN.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

Thanks to the presence of God Almighty, the 2022 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) can be finished properly and on time. This Annual Report is a form of accountability to shareholders and all Stakeholders. On this auspicious occasion, please allow us to represent the Board of Commissioners to submit the supervisory report of the Board of Commissioners to the Company in the 2022 fiscal year.

Through the publication of this Annual Report of 2022 fiscal year, the Board of Commissioners fulfills its role and responsibility in reporting and presenting a number of subjects, including the overview of the Board of Directors' performance assessment, overview of the implementation of the Company's strategy, future business prospects, implementation of governance, as well as overview of the implementation of corporate social responsibility throughout 2022.

The theme of this Annual Report is *"Beyond Infrastructure"* which accurately describes the Company's conditions and the uncertain situation of world economics in 2022. The global economy is still vulnerable to various downside risks, including: inflation that remain high although it has started to decline, high interest rates to control inflation, narrowing fiscal space, resulting in the decline of global consumption, plus the ongoing geopolitical tensions in several parts of the world.

However, in the midst of this global uncertainty, the Indonesian economy still has high resilience, where Indonesia's economic growth in 2022 had a solid growth of 5.31%. This growth was supported by high demands in household consumption, exports and investment. Investment or Gross Fixed Capital Formation grew by 3.87%, higher than the last 2 years. This investment growth is in line with the massive infrastructure development in 2022.

The stability of national economic growth is the key to the resilience of Indonesia's infrastructure sector which is highly dependent on the smooth running of its supporting business ecosystem. According to the Ministry of Finance, the realization of investment financing throughout 2022 was recorded at Rp106.8 trillion which was used to support priority sectors and encourage economic recovery. The largest realization of investment financing throughout 2022 was given to the infrastructure cluster, with a total of Rp97.6 trillion.

This increasingly conducive situation certainly has a positive impact, especially on the performance of companies engaged in the infrastructure sector and those related to it, including IIGF, which has been mandated to participate in supporting PEN programs.



Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan yang solid baik dari sisi operasional maupun finansial. Selain itu, pencapaian Perseroan semakin lebih baik lagi dimana menjelang akhir tahun, Perseroan berhasil menerima tiga penghargaan skala internasional dalam ajang ASEAN *Risk Award 2022*, yaitu sebagai Juara 1 *Risk Champion Category 1*, *Runner up GRC Award Category 1* dan *Risk Educator*. Dewan Komisaris mengapresiasi dengan pencapaian tersebut yang didapatkan menjelang Hari Ulang Tahun PT PII yang ke-13, sebuah usia yang bisa dikatakan cukup muda bagi sebuah entitas bisnis. Namun demikian, kami dapat menyimpulkan bahwa sinergi yang kuat antara manajemen dan seluruh karyawan mampu membawa Perseroan meraih berbagai prestasi yang membanggakan.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi

Peran strategis Dewan Komisaris senantiasa difokuskan pada pengawasan dan pemberian rekomendasi yang secara konsisten dengan mengedepankan profesionalisme, prinsip akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perumusan target kinerja dan kebijakan strategis di awal tahun, Dewan Komisaris berperan memberikan arahan dan masukan sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya kepada Direksi dan seluruh jajaran Perseroan. Tidak hanya dalam hal perumusan, namun Dewan Komisaris juga mengemban tanggung jawab untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis dan tercapainya target-target kinerja yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan melalui berbagai mekanisme hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat gabungan menjadi bagian penting dari proses pengawasan yang interaktif atas implementasi strategi, agar Dewan Komisaris dapat terus mengikuti arah perkembangan strategi yang dijalankan Direksi, dan sejauh apa strategi tersebut efektif untuk dapat mencapai target yang diharapkan.

Sepanjang tahun 2022, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kali dengan agenda pembahasan meliputi evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, tinjauan kinerja operasional dan keuangan, kemajuan dari proyek-proyek yang didukung oleh Perseroan, dan hal-hal lainnya. Pemberian arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi juga dapat dilakukan secara tertulis sebagai jawaban terhadap laporan pelaksanaan tugas Direksi, atau permohonan persetujuan atau konsultasi yang disampaikan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan *site visit* ke proyek-proyek dan menyampaikan rekomendasi dan pendapatnya berdasarkan hasil *site visit* tersebut. Bersama para Komitennya, Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat rutin dengan para deputy direktur dan unit kerja terkait. Di luar rapat rutin yang dilakukan sebulan sekali, pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi juga dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk ke depannya, Dewan Komisaris akan terus berupaya memperkuat pengawasan terhadap implementasi strategi secara berkesinambungan dengan memanfaatkan peran komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Perbaikan atas isu-isu strategis akan menjadi pertimbangan dalam penetapan target dan strategi di tahun berikutnya.

The Company managed to record solid growth both from an operational and financial standpoint. In addition, the Company's achievements were even better towards the end of the year, where the Company managed to receive three international awards at the ASEAN Risk Award 2022, including as 1st Place in Risk Champion Category 1, Runner up in GRC Award Category 1 and Risk Educator. The Board of Commissioners appreciates this achievement which was obtained ahead of the 13th Anniversary of IIGF, an age that can be said to be quite young for a business entity. However, we can conclude that the strong synergy between management and all employees has enabled the Company to achieve many exceptional achievements.

Supervision on the Implementation of Strategy

The strategic role of the Board of Commissioners is always focused on supervising and providing consistent recommendations by prioritizing the principles of professionalism, accountability, and compliance with applicable laws and regulations.

In the formulation of performance targets and strategic policies at the beginning of the year, the Board of Commissioners contributes in providing direction and input according to its capacity and capabilities to the Board of Directors and all ranks of the Company. Not only in the formulation, the Board of Commissioners is also responsible to ensure the effectiveness of the implementation of strategic policies and achieving the performance targets set out in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

The Board of Commissioners carries out its supervisory function through various mechanisms of working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Joint meetings become an integral part of the interactive monitoring process in the implementation of strategies so that the Board of Commissioners can continue to follow the direction of the development of the strategy carried out by the Board of Directors, and the effectiveness of the strategy in achieving the expected targets.

Throughout 2022, joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors have been held 15 (fifteen) times which discussion agenda includes evaluation of the follow-up on the results of previous meetings, review of operational and financial performance, progress of the Company's supported projects, and other agenda. The provision of advice and recommendations from the Board of Commissioners to the Board of Directors can also be made in writing in response to the duty implementation report of the Board of Directors, or requests for approval or consultation submitted by the Board of Directors. The Board of Commissioners also conducts site visits to projects and submits recommendations and opinions based on the results of the site visits. Together with its Committees, the Board of Commissioners also holds regular meetings with deputy directors and related work units. Apart from monthly routine meetings, the joint-meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors are also held at any time as needed.

Going forward, the Board of Commissioners will continue striving to strengthen the supervision of strategy implementation on an ongoing basis by utilizing the roles of its supporting committees, including the Audit Committee and Risk Monitoring Committee. Improvements on strategic issues will become the consideration in setting targets and strategies for the following year.

Penilaian atas Kinerja Direksi dan Perseroan

Dewan Komisaris sangat mengapresiasi kinerja Direksi dan seluruh jajaran insan Perseroan atas pencapaian kinerja positif yang berhasil dicapai di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengerahkan upaya dan strategi terbaik demi mempertahankan stabilitas dan kelangsungan bisnis Perseroan. Dewan Komisaris juga memandang Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur Keuangan Perseroan secara individual telah berhasil mencapai target kinerja yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan, hal ini ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama ("IKU"), individual berturut-turut sebesar 108,32%, 105,41%, dan 109,20%.

Kinerja Operasional

Di tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh tujuh kontrak baru yang melibatkan berbagai institusi dan Lembaga keuangan sebagai *lenders* dan investor, di antaranya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, ADB, BSI, HSBC, Korea Development Bank, ICBC, AIIIB, BPI Finance, Santander, IIF dan PT SMI.

Hingga akhir tahun 2022, Perseroan telah memberikan penjaminan kepada 49 proyek yang terdiri dari 41 proyek penjaminan skema KPBU dan Non-KPBU, dan delapan proyek terkait Penjaminan BUMN dalam rangka PEN dengan total nilai penjaminan sebesar Rp95 triliun, dan nilai investasi proyek sebesar Rp550 triliun. Selama tahun 2022, Perseroan dapat merealisasikan 12 penjaminan baru yang bersumber dari empat penjaminan KPBU, dua penjaminan non-KPBU dan enam penjaminan dan obligasi/sukuk BUMN dalam rangka program PEN.

Dari total 41 proyek penjaminan skema KPBU dan Non-KPBU, sektor jalan dan jembatan mendominasi portofolio proyek Perseroan sebanyak 18 proyek atau sebesar 44%, mengalami penurunan dibandingkan dengan kontribusi tahun 2021 sebesar 46%. Namun demikian, Dewan Komisaris berpendapat bahwa kondisi ini merupakan hal yang baik dan dapat mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap satu sektor serta memberikan peluang pertumbuhan bagi sektor-sektor lain untuk dapat berkontribusi. Sektor Ketenagalistrikan menjadi kontributor kedua dengan 9 proyek atau 20% dari seluruh proyek yang dijamin. Selanjutnya, masing-masing sektor air minum 6 proyek atau 15%, sektor telekomunikasi dan informatika 4 proyek atau 10%, sektor transportasi 3 proyek atau 7%, sektor pariwisata sebanyak 1 proyek atau 2% dan sektor konservasi energi 2%.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya Direksi untuk mencari proyek pengganti dari beberapa proyek yang direncanakan namun belum dapat ditandatangani perjanjian penjaminannya di tahun 2022, dengan upaya ini Perseroan dapat menjamin 12 dari 11 proyek yang ditargetkan, atau dengan kata lain lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Selain itu, Dewan Komisaris memandang penambahan sektor proyek dijamin, yaitu konservasi energi mampu menambah keragaman portofolio penjaminan Perseroan sekaligus menurunkan eksposur Perseroan terhadap risiko sektoral.

Dewan Komisaris terus mendorong Direksi agar melakukan upaya-upaya terbaik dalam memproses penjaminan proyek, dengan tetap memperhatikan tata kelola dan ketentuan yang

Assessment on the Performance of the Board of Directors and the Company

The Board of Commissioners highly appreciates the performance of the Board of Directors and all members of the Company for the achievement of positive performance amidst the challenging year. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has made the best efforts and strategies to maintain the stability and continuity of the Company's business. The Board of Commissioners also views that the Company's President Director, Business Director and Finance Director have succeeded in achieving their individual performance targets as expected by stakeholders, as indicated by individual Key Performance Indicators ("KPI") achievements of 108.32%, 105.41%, and 109.20% respectively.

Operational Performance

In 2022, the Company managed to obtain seven new contracts involving various financial institutions as lenders and investors, including Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, ADB, BSI, HSBC, Korea Development Bank, ICBC, AIIIB, BPI Finance, Santander, IIF and PT SMI.

Until the end of 2022, the Company has provided guarantees to 49 projects comprising of 41 project guarantees with PPP and Non-PPP schemes, and eight projects related to SOEs Guarantees in the context of PEN with total guarantee values of Rp95 trillion, and project investment values of Rp550 trillion. In 2022, the Company can realize 12 new guarantees originating from four PPP guarantees, two non-PPP guarantees and six SOE loan guarantees and bonds/sukuk within the framework of the PEN program.

Out of 41 PPP and Non-PPP scheme project guarantees, the roads and bridges sector dominates the Company's project portfolio of 18 projects or 44%, a decrease compared to 2021's contribution of 46%. However, the Board of Commissioners believes that this condition is a good thing and can reduce the Company's dependence on one sector and provide growth opportunities for other sectors to contribute. The electricity sector is the second contributor with 9 projects or 20% of all guaranteed projects. Followed by the drinking water sector with 6 projects or 15%, the telecommunications and informatics sector with 4 projects or 10%, the transportation sector with 3 projects or 7% and the tourism sector with 1 project or 2% and the energy conservation sector 2%.

The Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors to find replacement projects for several planned projects that the guarantee agreement has not yet been signed in 2022, this effort has enabled the Company to guarantee 12 of the 11 targeted projects, or in other words higher the target. In addition, the Board of Commissioners considers that the addition of guaranteed project sectors, namely the energy conservation, can add diversity to the Company's guarantee portfolio while simultaneously reducing the Company's exposure to sectoral risks.

The Board of Commissioners continues to encourage the Board of Directors to make the best efforts in processing project guarantees, while paying attention to governance and applicable



berlaku, penyebab ketidaktercapaian maupun keterlambatan penyelesaian proyek perlu didokumentasikan sebagai *loss event database* dan dimanfaatkan sebagai pembelajaran di tahun-tahun selanjutnya. Di tahun 2023 diharapkan target proyek yang di-*carry over* dari tahun sebelumnya maupun target proyek baru dapat dipetakan penyelesaiannya serta dan direalisasikan sesuai dengan rencana.

Kinerja Keuangan

Ditinjau dari sisi keuangan, realisasi pendapatan usaha tahun 2022 tercatat sebesar Rp1,09 triliun atau 98,37% targetnya, atau meningkat 18,03% dari Rp922,51 miliar di tahun 2021. Pendapatan ini terutama dikontribusikan dari pendapatan Penjaminan sebesar Rp252,57 miliar, pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (PDF) sebesar Rp41,10 miliar, pendapatan Pengelolaan Dana sebesar Rp793,70 miliar, dan pendapatan lainnya sebesar Rp1,48 miliar. Dewan Komisaris menyambut baik langkah efisiensi yang diambil oleh Direksi sehingga mampu mendorong profitabilitas. Upaya tersebut menghasilkan kenaikan laba tahun berjalan 2022 sebesar 14,19% dari Rp625,40 miliar di tahun 2021 menjadi sebesar Rp714,17 miliar di tahun 2022 atau 118,60% dari targetnya. Dengan hasil tersebut maka realisasi Margin Laba Bersih yang dapat dicapai pada tahun 2022 adalah 66,0% dari target sebesar $\geq 54\%$ dan realisasi BOPO tahun 2022 adalah 36,0% dari threshold $\leq 46,0\%$.

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), secara keseluruhan capaian kontrak kinerja korporasi adalah sebesar 107,51%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 97,78%. Capaian ini sejalan dengan momentum pemulihan ekonomi yang terjadi di tahun 2022.

Dengan demikian, dari capaian-capaian yang dihasilkan, dapat kami simpulkan bahwa secara keseluruhan Perseroan telah berhasil membukukan kinerja yang melampaui target-target yang telah dicanangkan sebagaimana tertuang dalam RKAP 2022.

Terkait kinerja keuangan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap tercapainya target pendapatan di tahun 2022 secara keseluruhan, terkait pendapatan pengelolaan dana, Perseroan mampu menghasilkan rata-rata tingkat pengembalian sebesar 5,9% atau 172 bps di atas rata-rata suku bunga acuan. Dewan Komisaris terus memberikan arahan agar investasi Perseroan senantiasa dikelola secara *prudent* dengan berpedoman pada PMK 148/PMK.08/2022.

Dewan Komisaris juga memberikan perhatian secara khusus terhadap rendahnya realisasi lini bisnis PDF selama beberapa tahun terakhir, di tahun 2022 pendapatan PDF hanya tercapai sebesar Rp41 miliar dari Rp121 miliar atau 33,88% dari targetnya. Dewan Komisaris berpandangan penyusunan *lesson learned* dari pengalaman pelaksanaan bisnis PDF sebagai hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Melalui *lesson learned* yang komprehensif, Dewan Komisaris mendorong Perseroan untuk berkoordinasi dan berdiskusi secara lebih intensif lagi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan prediktabilitas dan tata kelola lini bisnis PDF.

regulations, causes of non-achievement or delays in project completion need to be documented as a loss event database and used as learning experience in the following years. In 2023, it is expected that carry over project targets from the previous year as well as new project targets can be mapped for completion and realized according to plan.

Financial Performance

From a financial point of view, the realization of operating revenue in 2022 was recorded at Rp1.09 trillion or 98.37% of the target, or an increase of 18.03% from Rp922.51 billion in 2021. This revenue was mainly contributed from Guarantee income of Rp252.57 billion, Project Preparation and Transaction Advisory (PDF) of Rp41.10 billion, Investment of Rp793.70 billion, and other revenues of Rp1.48 billion. The Board of Commissioners welcomes the efficiency measures taken by the Board of Directors which was able to drive profitability. These efforts resulted in an increase in realized profit for the year 2022 of 14.19% from Rp625.40 billion in 2021 to Rp714.17 billion in 2022 or 118.60% of the target. With these results, the realized Net Profit Margin that can be achieved in 2022 was 66.0% of the target of $\geq 54\%$ and the realization of BOPO in 2022 was 36.0% from the threshold of $\leq 46.0\%$.

Based on the audit results conducted by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), the overall corporate performance contract achievement was 107.51%, higher than the previous year's 97.78%. This achievement is in line with the momentum of economic recovery that will occur in 2022.

Thus, from the achievements, we can conclude that overall the Company has managed to record performance that exceeds the targets set out in the 2022 RKAP.

Regarding financial performance, the Board of Commissioners appreciates the achievement of the overall revenue target in 2022. Regarding fund management revenue, the Company was able to generate an average rate of return of 5.9% or 172 bps above the average reference interest rate. The Board of Commissioners continues to provide direction so that the Company's investments are always managed prudently by referring to PMK 148/PMK.08/2022.

The Board of Commissioners also paid special attention to the low realization of PDF's business line over the past few years, in 2022 PDF's revenue only stood at Rp41 billion from Rp121 billion or 33.88% of the target. The Board of Commissioners is of the opinion that preparing lessons learned from experience in executing PDF business is an urgent matter to be implemented. Through comprehensive lessons learned, the Board of Commissioners encourages the Company to coordinate and have more intensive discussions with the Ministry of Finance to increase the predictability and governance of the PDF business line.

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, kami menilai Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik manajemen risiko secara berkesinambungan, terutama pada area-area yang mencakup kapabilitas sumber daya, teknologi, dan metodologi yang dikembangkan sesuai *best practice*. Direksi juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) pada ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa (*Procurement*) dalam rangka mencegah terjadinya risiko *fraud*. Penerapan manajemen risiko yang efektif sangat penting, mengingat tantangan dan tuntutan dunia usaha, termasuk harapan para pemangku kepentingan terus meningkat di tengah situasi ekonomi dan bisnis yang tidak pasti.

Beberapa rekomendasi perbaikan yang telah diberikan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko antara lain: penyusunan *early warning system* dan *key risk indicator* korporasi, program pengembangan *Risk Officer (Risk Officer Development Program)*, dan peningkatan maturitas *Enterprise Risk Management*. Kami juga telah memberikan arahan untuk melakukan perbaikan pengelolaan risiko pada beberapa aspek dukungan bisnis dan *enabler* Perseroan seperti isu lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG), pengembangan teknologi informasi berbasis *cloud*, serta penguatan fungsi kepatuhan.

Perseroan telah merumuskan Peta Jalan (*Road Map*) yang menggambarkan tahapan peningkatan maturitas manajemen risiko Perseroan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Untuk memastikan pencapaian sasaran dari tiap tahapan tersebut, Perseroan melakukan evaluasi secara berkala atas peta jalan tersebut guna menjaga relevansinya dengan perkembangan dan dinamika manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris terus melakukan pemantauan atas implementasi *road map* tersebut dan memberikan arahan serta masukan agar pengelolaan risiko oleh Direksi makin efektif.

Terkait pengelolaan risiko proyek, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam upaya menguatkan mitigasi risiko, khususnya dalam proses penjaminan *small scale project* alat penerangan jalan (APJ), penanganan proyek SPAM yang sudah valid mengajukan klaim penjaminan, mekanisme regres kepada pemerintah daerah, analisis risiko terhadap sektor-sektor yang menjadi target penjaminan korporasi dalam rangka PEN, serta analisis kemampuan PJPK dalam memenuhi komitmen AP.

Dewan Komisaris juga telah memberikan arahan kepada Direksi agar memastikan adanya pedoman pengelolaan risiko yang cukup kuat dalam menghadapi risiko pasar (*mark to market*) terhadap kegiatan pengelolaan dana, mengingat risiko kenaikan suku bunga yang semakin tinggi. Selain itu, Direksi diminta untuk memberikan masukan yang konstruktif dengan data yang akurat dan tepat dalam kegiatan penyusunan profil risiko jaminan Proyek KPBU sehubungan dengan pengisian *piloting* Profil Risiko APBN, Kontijensi dan Neraca Konsolidasi yang dilakukan oleh Ditjen PPR-Kementerian Keuangan. Masukan yang diberikan agar mempertimbangkan posisi Perseroan sebagai *ring fencing* APBN serta potensi kebutuhan PMN untuk memperkuat kapasitas penjaminan Perseroan di masa depan.

Effectiveness of Risk Management System

The Board of Commissioners has supervised and monitored the effectiveness of risk management implementation. Based on the supervision results, we consider that the Board of Directors has shown a strong commitment to continuously improving the quality of risk management practices, especially in areas that include the capabilities of resources, technology and methodologies that are developed according to best practices. The Board of Directors has also implemented an Anti-Bribery Management System (SMAP) in the scope of Procurement of Goods & Services in order to prevent the risk of fraud. The implementation of effective risk management is very important, considering the challenges and demands in the world of business, including the increasing expectations of stakeholders in the midst of an uncertain economic and business situation.

Some of the area of improvements that have been given to the Board of Directors to improve the quality of risk management implementation are: development of an early warning system and corporate key risk indicators, Risk Officer Development Program, and improving the maturity of Enterprise Risk Management. We have also provided directions for improving risk management in several supporting and enabler business aspects of the Company such as environmental, social and governance (ESG) issues, development of cloud-based information technology, and strengthening the compliance function.

The Company has formulated a Road Map which describes the stages of improving the Company's risk management maturity within the next 5 years. To ensure the achievement of targets within each of these stages, the Company periodically evaluates the roadmap in order to maintain its relevance to the development and dynamics of the Company's risk management. The Board of Commissioners continues to monitor the implementation of the road map and provide direction and input so that risk management by the Board of Directors is more effective.

Regarding project risk management, the Board of Commissioners has provided direction and input to the Board of Directors in an effort to strengthen risk mitigation, especially in the guarantee process of small scale projects for street lighting equipment (APJ), handling SPAM projects that are valid for submitting guarantee claims, regress mechanisms to local governments, risk analysis of sectors that are targeted for corporate guarantees in the framework of PEN, as well as an analysis of the GCA's ability to fulfill AP commitments.

The Board of Commissioners has also provided direction to the Board of Directors to ensure that there is an adequate risk management guideline to deal with market risk (*mark to market*) for fund management activities, considering the higher risk of rising interest rates. In addition, the Board of Directors is asked to provide constructive input with accurate and precise data in the preparation of the PPP Project guarantee risk profile in connection with filling out the piloting of the APBN Risk Profile, Contingencies and Consolidated Balance Sheets carried out by the Directorate General of PPR-Ministry of Finance. The input given is to consider the Company's position as the APBN ring fencing and the potential need for PMN to strengthen the Company's guarantee capacity in the future.



Pandangan atas Kinerja Kepatuhan Direksi

Dewan Komisaris berpandangan bahwa selama tahun 2022, Direksi telah menjalankan tata kelola Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian dengan pihak ketiga serta RKAP dan/atau RJP.

Kepatuhan tersebut salah satunya ditunjukkan melalui permohonan arahan dari Direksi kepada Pemegang Saham pada saat melaksanakan program kerja baru di luar RKAP melalui surat No. 391/PII/DRU/0822 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Permohonan Arahan terkait Pelaksanaan Tambahan Program Kerja di luar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2022 (RKAP 2022). Surat tersebut telah mendapatkan tanggapan dari Pemegang Saham melalui surat No. S-495/MK.6/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Arahan RUPS terkait Pelaksanaan Tambahan Program Kerja di luar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2022 (RKAP 2022) yang pada intinya memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melanjutkan program penjaminan pelaku usaha korporasi dalam rangka PEN dan potensi penugasan terkait IKN.

Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Bersama dengan Direksi, Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan keandalan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari penerapan GCG dalam rangka mencapai tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perseroan. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit terus berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan audit internal dalam rangka memberikan keyakinan atas berjalannya fungsi manajemen sesuai dengan prinsip GCG. Reviu kegiatan audit internal dilakukan mulai dari penyusunan perencanaan tahunan sampai dengan pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit serta tindak lanjutnya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah menerapkan *risk-based audit planning* yang baik sehingga menyajikan informasi yang memadai dan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam audit. Dewan Komisaris dan Komite Audit juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan rekomendasi audit internal diselesaikan sesuai dengan prosedur dan target waktu yang ditetapkan.

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan audit internal atas proses penjaminan pinjaman Proyek *Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central)*, penilaian implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Ruang Lingkup Pengadaan Barang & Jasa (*Procurement*), dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Tingkat Entitas Tahun 2022. Hasil audit memberikan keyakinan bahwa fungsi-fungsi tersebut telah dilakukan dengan baik walaupun masih terdapat 22 (dua puluh dua) rekomendasi audit yang *outstanding* dan ditambah 13 (tiga belas) tindak lanjut hasil audit tahun 2022. Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh manajemen sebanyak 29 (dua puluh sembilan) (96%) rekomendasi audit, sehingga pada akhir Triwulan IV 2022 tersisa sebanyak 6 (enam) rekomendasi (4%) audit yang masih terus dipantau dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai *timeline* yang ditentukan.

Overview on the Compliance Performance of the Board of Directors

The Board of Commissioners is of the opinion that in 2022, the Board of Directors has carried out corporate governance in accordance with laws and regulations in the agreements with third parties as well as RKAP and/or RJP.

An example of the compliance was shown through requests for directions from the Board of Directors to Shareholders when implementing new work programs outside the RKAP through letter No. 391/PII/DRU/0822 dated 30 August 2022 regarding Requests for Directions regarding the Implementation of Additional Work Programs outside the Work Plan and Budget Company Fiscal Year 2022 (RKAP 2022). The letter was responded by the Shareholders through letter No. S-495/MK.6/2022 dated 26 September 2022 regarding the GMS Directions regarding the Implementation of Additional Work Programs outside the Company's Work Plan and Budget for Fiscal Year 2022 (RKAP 2022) which essentially provides approval to the Board of Directors to continue the guarantee program for corporate entity in the framework of PEN and potential assignments related to IKN.

Effectiveness of Internal Control System Implementation

Together with the Board of Directors, the Board of Commissioners is committed to ensuring the reliability of the internal control system as part of GCG implementation in order to achieve the goal of maintaining and improving the Company's performance. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, continues striving to supervise the implementation of internal audits in order to provide assurance on the management function in accordance with GCG principles. The internal audit reviews are carried out from the preparation of annual plans to the implementation of audits and reporting of audit results and their follow-up. This process aims to ensure that the activities carried out have implemented good risk-based audit planning so as to present adequate information and provide recommendations that can correct the weaknesses found in the audit. The Board of Commissioners and the Audit Committee also conduct periodic monitoring to ensure that internal audit recommendations are completed according to the established procedures and timeline.

In 2022, an internal audit has been carried out on the loan guarantee process for the Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central) Project, an assessment of the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Scope of Goods & Services Procurement, and Implementation Entity Level Internal Control System in 2022. The audit results provide assurance that these functions have been carried out properly even though there were still 22 (twenty two) outstanding audit recommendations and an additional 13 (thirteen) follow-up audit results in 2022. Total 29 (twenty nine) (96%) audit recommendations have been followed up by management, so that at the end of Quarter IV 2022 there were 6 (six) audit recommendations (4%) remaining which are still being monitored and are expected to be completed according to the specified timeline.

Dewan Komisaris meminta Direksi agar segera menyelesaikan seluruh rekomendasi audit, terutama untuk temuan yang telah jatuh tempo dan dilakukan penjadwalan ulang, selain itu Dewan Komisaris juga mendukung penyusunan rencana kerja dari Divisi Internal Audit dengan pendekatan berbasis risiko yang dihadapi oleh Perseroan (*Risk Based Audit*) dan rencana kerja Divisi Internal Audit untuk melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan proses bisnis pada proyek-proyek baru yang dijamin. Direksi diharapkan dapat memastikan bahwa *lesson learned* terhadap proyek yang ditargetkan di tahun 2022 namun tidak tercapai maupun proyek-proyek lainnya sudah terdapat di dalam *Pre Screening Tool*.

Pandangan atas Penerapan Sistem Teknologi Informasi

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah memberikan perhatian yang memadai terkait pengembangan sistem Teknologi Informasi di Perseroan. Sepanjang tahun 2022, terdapat beberapa *milestone* dari sisi IT, di antaranya migrasi data Perseroan ke *cloud*, penggunaan *Enterprise Resource Planning*, dan penerapan *e-office*.

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi dalam hal pengembangan sistem Teknologi Informasi untuk mendukung proses bisnis Perseroan, mengintegrasikan masing-masing fungsi di Perseroan, dan meningkatkan aksesibilitas serta keamanan data. Selain itu penyusunan IT *Master Plan* tahun 2023-2027 diharapkan dapat segera diselesaikan.

Pandangan atas Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier

Terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia, PT PII menggunakan kerangka *Competency Based Management* untuk memetakan masing-masing pegawai berdasarkan kinerja serta kompetensi teknis dan non teknis yang dimiliki. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan pengembangan pegawai serta *mapping* karyawan ke dalam *talent pool*.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa SDM Perseroan sangat penting sebagai sumber daya Perseroan yang menjalankan Perseroan dan terus mengingatkan kepada Direksi dan jajaran untuk terus memperbaiki kebijakan dan tata kelola SDM. Kebijakan-kebijakan dalam hal Sumber Daya Manusia khususnya terkait pengembangan karier perlu terus disosialisasikan secara berkala sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kinerja dan *engagement* pegawai terhadap Perseroan.

Pandangan atas Penerapan Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dewan Komisaris telah melakukan rivi dan pembahasan terkait kebijakan akuntansi pada Perseroan, khususnya pada Skema Penjaminan Korporasi Padat Karya [Program PEN] karena adanya perubahan kebijakan merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 98/PMK.08/2020 *juncto* 32/PMK.08/2021 (Generasi 1) menjadi PMK No. 27/PMK.08/2022 (Generasi 2). Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Dewan Komisaris berpendapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan di Generasi 1 dan Generasi 2 masih sejalan dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum.

The Board of Commissioners requests the Board of Directors to immediately realize all audit recommendations, especially for findings that are past due and rescheduled. In addition, the Board of Commissioners also supports the preparation of a work plan from the Internal Audit Division using a risk-based approach faced by the company (*Risk Based Audit*) and work plan of the Internal Audit Division to audit the implementation of business processes on new project guarantees. The Board of Directors is expected to be able to ensure that lessons learned from unrealized projects targeted in 2022 or other projects have been included in the *Pre-Screening Tool*.

Overview on the Implementation of Information Technology System

The Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors has sufficiently paid attention to the development of Information Technology systems within the Company. Throughout 2022, there were several milestones from the IT side, including the migration of company data to the cloud, utilization of *Enterprise Resource Planning*, and implementation of *e-office*.

The Board of Commissioners always encourages the Board of Directors to develop Information Technology systems to support the Company's business processes, integrate each function in the Company, and improve data accessibility and security. In addition, the preparation of the IT *Master Plan* for 2023 – 2027 is expected to be completed soon.

Overview on Policy and Implementation of Career Development

Regarding the management of Human Resources, IIGF uses the *Competency Based Management* framework to map each employee based on their performance as well as technical and non-technical competencies. The mapping results will be used for employee development and mapping of employees into the talent pool.

The Board of Commissioners is of the opinion that the Company's HR is crucial as a corporate resource that runs the Company and continues to remind the Directors and staffs to continue improving HR policies and governance. Human Resources Policies, especially those related to career development, need to be disseminated regularly as an effort to improve employee performance and engagement with the Company.

Overview on the Implementation of Accounting Policies and the Preparation of Financial Statements

The Board of Commissioners has reviewed and discussed the accounting policies of the Company, especially on the Labor-Intensive Corporate Guarantee Scheme [PEN Program] due to a change in policy pursuant to Minister of Finance Regulation (PMK) No. 98/PMK.08/2020 *juncto* 32/PMK.08 /2021 (Generation 1) becomes PMK No. 27/PMK.08/2022 (Generation 2). Based on the discussions, the Board of Commissioners believes that the changes in accounting policies implemented in Generation 1 and Generation 2 are still in line with the generally accepted accounting policies.



Pandangan atas Penerapan Kebijakan Mutu atau Kepuasan Pelayanan

Penerapan kebijakan mutu dan kepuasan pelayanan Perseroan salah satunya ditunjukkan melalui telah tersedianya panduan pelaksanaan pemrosesan klaim yang tertuang di dalam SOP Penyampaian, Evaluasi, dan Pembayaran Klaim. SOP tersebut diharapkan memberikan panduan serta standar pelayanan dalam pemrosesan klaim yang pada akhirnya meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan para *stakeholder* khususnya penerima jaminan terhadap kapabilitas Perseroan sebagai perusahaan penjamin.

Efektivitas dari SOP tersebut terbukti pada saat pemrosesan pembayaran klaim pada proyek SPAM Lampung di bulan April dan Oktober 2022.

Pandangan atas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Audit Eksternal

Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) di lingkungan Perseroan telah menunjukkan kualitas yang sangat memadai. Hal tersebut ditunjukkan melalui penyempurnaan peraturan-peraturan di Perseroan secara berkelanjutan untuk memenuhi persyaratan dari pemegang saham maupun regulator. Selain itu penerapan prinsip tata kelola yang baik juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan pada setiap aspek di Perseroan. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi serta *assessment* atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.

Dalam rangka penilaian GCG tahun 2022, Perseroan telah menunjuk BPKP sebagai *independent assessor*. *Assessment* dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan ("PMK 88/2015"), serta KMK 505/2020. Dewan Komisaris berpandangan bahwa Perseroan telah cukup berhasil dalam menerapkan GCG secara efektif, hal ini tercermin dari pencapaian skor *assessment* GCG yang tinggi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar 88,17 dengan kategori penilaian "Sangat Baik". Penerapan GCG di lingkungan Perseroan memperlihatkan perkembangan yang signifikan dan dapat dilihat pada nilai skor *assessment* GCG Perseroan yang selalu berada dalam kategori "Sangat Baik" dari tahun ke tahun.

Kemajuan dalam penerapan GCG selama ini terbukti telah memberikan dampak yang positif bagi Perseroan, antara lain meningkatnya kinerja dan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Untuk ke depannya, Dewan Komisaris akan terus melakukan *monitoring* untuk memastikan perbaikan terhadap area-area yang direkomendasikan oleh BPKP. Dewan Komisaris juga berharap agar penerapan GCG Perseroan dapat terus disempurnakan melalui komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh insan Perseroan dalam rangka menjaga kepercayaan dan kepentingan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Terkait dengan audit eksternal, Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi audit melalui rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, rapat Komite Audit, serta laporan-laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris.

Overview on the Implementation of Quality or Service Satisfaction Policy

The implementation of the Company's quality and service satisfaction policies is reflected from the availability of guidelines for the implementation of claim processing as contained in the SOP for Submission, Evaluation, and Payment of Claims. The SOP is expected to provide guidelines and service standards in processing claims which in turn increases the comfort and trust of stakeholders, especially the guarantee recipients, regarding the capabilities of the Company as a guarantor company.

The effectiveness of the SOP has been proven when processing the claim payments for the Lampung SPAM project in April and October 2022.

Overview on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) and External Audit

The Board of Commissioners is of the opinion that the implementation of Corporate Governance (GCG) within the Company has demonstrated a very sufficient quality. This is reflected by the continuous improvement of regulations in the Company to meet the requirements of shareholders and regulators. In addition, the implementation of good governance principles also become the basis for decision-making in every aspect of the Company. The Board of Commissioners constantly monitors and evaluates as well as conduct assessment on the implementation of GCG principles by the Company.

For the 2022 GCG assessment, the Company has appointed BPKP as an independent assessor. The assessment is carried out referring to the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance ("PMK 88/2015"), and KMK 505/2020. The Board of Commissioners is of the opinion that the Company has been quite successful in implementing GCG effectively, as reflected in the achievement of a high GCG assessment score from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of 88.17 in the category of "Very Good". The implementation of GCG within the Company has shown significant progress and can be seen in the Company's GCG assessment scores which always in the "Very Good" category from year to year.

The progress in the implementation of GCG so far has proven to have a positive impact on the Company, including increasing the performance and trust of stakeholders.

Going forward, the Board of Commissioners will continue to monitor to ensure improvements to the areas recommended by BPKP. The Board of Commissioners also hopes that the implementation of GCG in the Company will be improved continuously through strong commitment and active participation from all Company personnel in order to maintain the trust and interests of stakeholders in a sustainable manner.

Regarding the external audit, the Board of Commissioners has monitored the follow-up on audit recommendations through joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, Audit Committee meetings, as well as reports prepared by the Board of Commissioners.

Selama tahun 2022, terdapat beberapa pemeriksaan oleh auditor eksternal. BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pendapatan, Belanja, dan Investasi Tahun 2019 s.d. Semester I tahun 2021. BPKP melakukan Audit atas Pembayaran IJP KMK dalam rangka PEN dan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sementara itu, Evaluasi atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian/Kepatuhan pada Perseroan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Sebagian besar rekomendasi dari auditor eksternal telah ditindaklanjuti, namun masih terdapat 6 rekomendasi audit dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang masih dalam proses penyelesaian di mana 2 diantaranya telah melewati jatuh tempo yaitu terkait pengaturan penomoran dokumen memo dan pengaturan tanda tangan dan paraf dokumen dalam Pedoman Tata Kelola Dokumen Perseroan. Dewan Komisaris akan senantiasa memastikan bahwa Direksi telah melakukan upaya terbaik untuk menyelesaikan hasil rekomendasi dari auditor eksternal.

Komitmen Perseroan Terhadap Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Sebagaimana kita ketahui bersama, sepanjang tahun 2022 momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlangsung. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif bahkan mencapai di atas 5%, lebih tinggi dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19. Namun demikian, Pandemi Covid-19 yang berlangsung dalam beberapa tahun, masih menimbulkan luka memar bagi perekonomian (*scarring effect*). Sebagian kelompok masyarakat juga masih merasakan dampak dari Pandemi, akibat kehilangan mata pencahariannya karena PHK, serta berkurangnya pendapatan para pedagang atau pelaku usaha UMKM. Kami sepenuhnya menyadari bahwa upaya untuk meringankan dampak negatif akibat pandemi Covid-19 serta menjaga momentum pemulihan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun juga peranan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk berperan aktif dalam mendukung Pemerintah.

Perseroan telah menjalankan 29 program TJSL yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan menyentuh langsung masyarakat penerima manfaat sepanjang tahun 2022. Program-program yang dijalankan tersebut meliputi sektor pemberdayaan masyarakat (7 kegiatan), sektor lingkungan (6 kegiatan, 3 diantaranya program sinergi SMV), sektor pendidikan (6 kegiatan), dan sektor sosial keagamaan (9 kegiatan). Adapun anggaran yang dialokasikan untuk program-program TJSL sebesar Rp6,6 miliar dengan penyerapan sebesar Rp3,7 miliar atau sekitar 57% dari total anggaran.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa kegiatan TJSL merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Perseroan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Oleh karena itu optimalisasi penyerapan anggaran TJSL serta ketepatan penggunaannya merupakan hal yang krusial. Ke depannya, Dewan Komisaris akan selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi dalam melakukan perbaikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabab kegiatan. Peraturan terkait TJSL di Perseroan perlu senantiasa diperbaharui dengan melakukan *benchmark* terhadap *best practice* pengelolaan TJSL yang baik. Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa terkait pelaksanaan TJSL juga perlu menjadi perhatian bagi Direksi agar ketepatan waktu pelaksanaan program TJSL tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek tata kelola.

Throughout 2022, there were several audits conducted by external auditors. The BPK conducted an Audit with a Specific Purpose (PDTT) on Income, Expenditure and Investment in 2019 until the Semester I of 2021. BPKP conducted an Audit of IJP KMK Payments in the context of PEN and Review on the Increasing Use of Domestic Products (P3DN). Meanwhile, Evaluation of Governance, Risk Management and Control/Compliance at the Company is carried out by the Inspectorate General of the Ministry of Finance.

Most of the recommendations from the external auditors have been followed up, other than 6 audit recommendations from the Inspectorate General of the Ministry of Finance which are still in the process of completion where 2 of them have passed their due date, which include the numbering setting of memo documents and the signatures and initials setting of documents in the Guidelines for Company Document Management. The Board of Commissioners will always ensure that the Directors have made their best efforts to complete the recommendations from the external auditors.

The Company's Commitment to the Implementation of Corporate Social and Responsibility (CSR)

As we all know, the momentum for Indonesia's economic recovery will continue throughout 2022. Indonesia's cumulative economic growth has even reached above 5%, higher than before the Covid-19 pandemic. However, the Covid-19 Pandemic, which has been going on for several years, is still causing scarring effect for the economy. Some community groups still feel the impact of the Pandemic, as a result of losing their livelihoods due to layoffs, as well as reduced income for merchants or MSME business actors. We are fully aware that the efforts to mitigate the negative impacts of the Covid-19 pandemic and maintain the momentum of recovery are not only the responsibility of the Government, but also the synergy and collaboration from various parties to play an active role in supporting the Government.

The Company has carried out 29 CSR programs across various regions in Indonesia and directly engages with the beneficiaries throughout 2022. The CSR programs cover the community empowerment sector (7 activities), the environmental sector (6 activities, 3 of which are the SMV synergy program), education sector (6 activities), and the social and religious sector (9 activities). The budget allocated for CSR programs was Rp6.6 billion with an absorption of Rp3.7 billion or around 57% of the total budget.

The Board of Commissioners is of the opinion that CSR activities are a form of the Company's concern and responsibility to stakeholders and the wider community. Therefore, it is crucial to optimize the absorption of the CSR budget and the accuracy of its use. Going forward, the Board of Commissioners will always support the efforts made by the Board of Directors in improving the planning, implementation and accountability aspects of the activities. Regulations related to CSR in the Company need to be constantly updated by benchmarking the best practices for good CSR management. The procurement policy of goods and/or services related to the implementation of CSR also needs to be a concern for the Board of Directors so that the timeliness of the CSR program is maintained without neglecting the governance aspect.



Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh program TJSL tersebut telah diterapkan dengan cukup baik. Untuk ke depannya, Dewan Komisaris akan terus mendukung penuh kegiatan-kegiatan TJSL Perseroan yang rencananya akan difokuskan pada program-program yang dapat mendukung percepatan perkembangan pembangunan masyarakat di Indonesia dalam sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan. Program tersebut sebagai bentuk dukungan kepada fokus Pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan dan diharapkan generasi muda Indonesia mendatang dapat memiliki daya saing dan profesionalisme yang dapat diperhitungkan.

Arahan atas Prospek Bisnis yang telah Disusun Direksi

Saat ini dunia sedang menghadapi kondisi yang tidak mudah. Kejutan tantangan terus datang dan menunjukkan bahwa dunia ini sangat dinamis dan rentan terhadap guncangan. Kondisi ekonomi global saat ini memberikan berbagai tekanan pada pemulihan ekonomi dunia. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023. Sumber risiko tersebut berasal dari ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya *extreme weather*, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit.

Kendati demikian, perbaikan ekonomi domestik diprakirakan akan terus berlanjut ditopang oleh penguatan permintaan domestik terutama peningkatan konsumsi swasta dan investasi, serta daya beli masyarakat yang masih terjaga di tengah kenaikan inflasi. Berbagai indikator dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik.

Di tengah tekanan ekonomi global yang terjadi saat ini dan datangnya tahun politik pada tahun depan, sektor infrastruktur diperkirakan masih akan tumbuh. Pada tahun 2023, berdasarkan Nota Keuangan dan APBN 2023, anggaran bidang infrastruktur akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan sentra pertumbuhan baru. Proyek PSN dan Pembangunan Ibu Kota Negara terus digalakan sejalan dengan akselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan layanan dasar dan pemerataan akses terhadap infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Melihat perkembangan ini, Dewan Komisaris merasa optimis dengan adanya berbagai peluang untuk memperoleh proyek baru walaupun pemerintah mulai selektif pada tahun 2023. Sesuai dengan arahan dari pemegang saham, Dewan Komisaris akan terus mendampingi Direksi dalam melakukan penguatan kapasitas penjaminan dengan melakukan *co-guarantee* atau *re-guarantee* bersama pihak lain guna mendorong kapabilitas Perseroan untuk menjamin kuantitas dan kualitas proyek-proyek.

Dengan semakin banyaknya proyek yang diberikan penjaminan oleh Perseroan, Dewan Komisaris sangat mendukung inisiatif Direksi untuk terus melakukan diversifikasi dan ekstensifikasi

Overall, the Board of Commissioners considers that all CSR programs have been implemented fairly well. In the future, the Board of Commissioners will continue to fully support the Company's CSR activities which are planned to focus on programs that can support the acceleration of community development in Indonesia in the Community Empowerment and Education sector. The program is a form of support for the Government's focus on developing quality Human Resources (HR) in a sustainable manner. Thus, it is expected that it can alleviate poverty and can cultivate competitiveness and professionalism that can be recognized among the Indonesian young generations.

Direction on the Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Currently, the world is in a difficult condition. Unexpected challenges keep coming and show that the world is very dynamic and vulnerable to shocks. The current global economic conditions put numerous pressures on the world economic recovery. The IMF projects global economic growth to slow down from 3.4% in 2022 to 2.9% in 2023. These risks originate from uncertain geopolitical tensions, the potential for extreme weather, high interest rates and relatively narrow fiscal policies.

Nevertheless, the improvement in the domestic economy is predicted to continue with the support from the strengthened domestic demand, especially the increased private consumption and investment, as well as public purchasing power that remain strong amid the rising inflation. Various indicators and results of recent Bank Indonesia surveys, such as consumer confidence, retail sales, and the Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) indicate the ongoing process of domestic economic recovery.

Amidst the current global economic pressures and the political year in next year, the infrastructure sector is expected to continue to grow. In 2023, based on the Financial Notes and the 2023 State Budget, the budget for infrastructure will be higher than the previous year and will be directed to support economic transformation and the development of new growth centers. The PSN Project and Development of the National Capital City continue to be promoted in line with the acceleration of infrastructure development to fulfill basic services and equal access to Information and Communication Technology infrastructure.

Seeing this development, the Board of Commissioners is optimistic of the various opportunities to obtain new projects even though the government will be more selective in 2023. In accordance with the directives from shareholders, the Board of Commissioners will continue to assist the Board of Directors in strengthening guarantee capacity by co-guaranteeing or re-guarantee with other parties to enhance the Company's capability to guarantee the quantity and quality of projects.

With the increasing number of projects being guaranteed by the Company's, the Board of Commissioners strongly supports the initiative of the Board of Directors to continue to diversify and

proyek-proyek yang dijamin oleh Perseroan dengan berbagai inisiatif, antara lain: dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang mengedepankan konsep *green and sustainable building*, perluasan jangkauan penjaminan di luar infrastruktur demi memberikan nilai tambah yang lebih besar (*go beyond infrastructure*), akselerasi dan penguatan *small scale* KPBU serta perluasan aliansi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem penjaminan infrastruktur. Dewan Komisaris juga memandang perlu agar Direksi melakukan *assessment* terhadap penguatan aspek kelembagaan Perseroan untuk memastikan kapasitas organisasi *fit* dengan kebutuhan pelaksanaan mandat dengan *size* yang makin besar.

Namun demikian, Dewan Komisaris juga senantiasa meminta Direksi untuk mencermati berbagai risiko yang ada, terutama yang berasal dari dinamika ekonomi global. Sehingga sikap yang penuh kewaspadaan dan antisipatif terhadap dinamika tersebut merupakan langkah bijak yang perlu terus dilakukan.

Peran Aktif Dewan Komisaris Dalam Memantau Penerapan *Whistleblowing System* (WBS)

Menurut pemantauan Dewan Komisaris, implementasi *Whistleblowing System* (WBS) telah berjalan dengan baik dimana semua elemen yang terlibat semakin memahami apa yang menjadi peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Seluruh insan Perseroan juga semakin banyak yang mengetahui keberadaan WBS. Hal ini berkat sosialisasi yang dilakukan oleh manajemen secara berkala dalam bentuk *company gathering*, webinar, maupun *expo*. Manajemen senantiasa berupaya mendorong para karyawan untuk berani menyampaikan pengaduan apabila mereka mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi di unit-unit kerjanya.

Dalam hal ini, Dewan Komisaris berperan dalam menerima laporan beserta data dan fakta dari fungsi penerima laporan pelanggaran. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi terhadap laporan pelanggaran apakah diperlukan investigasi lebih lanjut atau sudah cukup dilakukan penetapan hukuman.

Dewan Komisaris memastikan bahwa sepanjang tahun 2022 Perseroan tidak menerima pelaporan atas dugaan pelanggaran baik yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar terkait maupun peraturan internal Perseroan yang meliputi hal-hal sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

Pandangan atas Realisasi dan Tata Kelola Penggunaan Tambahan Dana PMN

Sampai dengan tahun 2022, Perseroan telah menerima PMN senilai Rp10,655 triliun yang terbagi menjadi 2 peruntukan yaitu sebesar Rp9,085 triliun untuk penjaminan infrastruktur dan Rp1,57 triliun untuk penjaminan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tambahan PMN dalam rangka penjaminan infrastruktur sebesar Rp9,085 triliun telah diutilisasi untuk menjamin 41 proyek dengan estimasi nilai proyek Rp487 triliun dan estimasi maksimum

extend the guarantee projects of the Company through various initiatives, including: supporting infrastructure development that puts forward the concept of green and sustainable building, expanding the scope of guarantees beyond infrastructure in order to provide greater added value (*go beyond infrastructure*), accelerating and strengthening small scale PPPs as well as expanding alliances and partnerships with various stakeholders in the development of infrastructure guarantee ecosystems. The Board of Commissioners also deems it necessary for the Board of Directors to conduct an assessment of the strengthening of the Company's institutional aspects to ensure the organizational capacity is fit with the needs of carrying out mandates with an increasingly large size.

However, the Board of Commissioners also constantly reminds the Board of Directors to pay close attention to the various existing risks, especially those from the dynamics of the global economy. Thus, full alert and anticipatory attitude towards these dynamics is a wise step that needs to be continued.

Board of Commissioners' Active Role in Monitoring the Implementation of *Whistleblowing System* (WBS)

According to the monitoring of the Board of Commissioners, the implementation of the *Whistleblowing System* (WBS) has been going well where all the elements involved are increasingly understood of their respective roles, duties and responsibilities. All of the Company's personnel are also increasingly aware of the existence of WBS. This is thanks to the regular socialization conducted by management through company gatherings, webinars, and expos. Management always tries to encourage employees to have the courage to submit complaints if they are aware of irregularities that occur in their work units.

In this case, the Board of Commissioners' role is to receive reports along with data and facts from the whistleblowing system. In addition, the Board of Commissioners also evaluates the violation reports whether further investigation is needed or to determine the sanction.

The Board of Commissioners ensures that throughout 2022 the Company did not receive reports of alleged violations, whether those violating the laws and regulations, related regulations/standards or internal Company regulations which include the matters stipulated in the Company's *Whistleblowing System* Guidelines.

Overview on the Realization and Governance of the Use of Additional PMN Funds

As of 2022, the Company has received PMN funds of Rp10.655 trillion which is divided into 2 allocations, with Rp9.085 trillion for infrastructure guarantees and Rp1.57 trillion for guarantees in the National Economic Recovery Program (PEN).

The additional PMN for infrastructure guarantees amounting to Rp9.085 trillion has been utilized to guarantee 41 projects with an estimated project value of Rp487 trillion and an estimated



eksposur Rp86,8 triliun. Tanpa memperhitungkan PMN PEN dan PMN tahun 2022 sebesar Rp1,085 triliun, Perseroan berhasil *leverage* PMN sebesar 61x terhadap total nilai proyek dengan *Gearing Ratio* sebesar 6,95x terhadap estimasi maksimum eksposur.

Tambahan PMN dalam rangka penjaminan program PEN sebesar Rp1,57 triliun telah diutilisasi untuk menjamin pinjaman pelaku usaha korporasi dengan skema dukungan *loss limit* dan penjaminan bersama dengan nilai *outstanding* pinjaman senilai Rp3,66 triliun dengan nilai penjaminan sebesar Rp2,78 triliun.

Sampai dengan akhir tahun 2022, penjaminan kepada BUMN dalam rangka program PEN telah terealisasi dengan nilai proyek sebesar Rp63,173 triliun dan maksimum eksposur sebesar Rp7,784 triliun. Penjaminan tersebut terdiri dari Penjaminan Pemerintah Secara Bersama Atas Penerbitan Obligasi V dan Sukuk Mudharabah II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Pinjaman Tahap II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Penerbitan Obligasi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Pinjaman PT Industri Kereta Api (Persero), Pinjaman Perusahaan Umum Damri, Pinjaman PT Pertamina (Persero), dan Pinjaman PT Len Industri (Persero).

Dana PMN senilai total Rp10,655 triliun senantiasa dikelola oleh Perseroan melalui pengelolaan dana yang *prudent* dan dapat dikembangkan hingga mencapai Rp15,15 triliun. Saldo PMN tersebut diupayakan akan terus *sustainable* melalui mitigasi risiko dan klaim yang optimal. Selain itu, dari sisi tata kelola, sesuai dengan PMK No. 182 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan PMN, Direksi telah melaporkan penggunaan PMN kepada Pemegang Saham setiap triwulan sekali.

Kinerja Dewan Komisaris dan Penilaian Kinerja Organ Dewan Komisaris

Pengaturan mengenai IKU Dewan Komisaris tercantum di dalam Pasal 24 PMK 88/2015. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 24 tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah menetapkan IKU Dewan Komisaris. Secara reguler RUPS juga menerima laporan dari Dewan Komisaris atas pencapaian/realisasi dari seluruh IKU Dewan Komisaris. IKU ini merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. Realisasi IKU tahun 2022 telah dilaporkan kepada RUPS melalui surat No. S-12/PII/DK/0223 tanggal 17 Februari 2023. Berdasarkan hasil review KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), capaian nilai IKU Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 mencapai 106,60%. Untuk menjalankan tugas dan mencapai IKU tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, yang berada langsung di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Sekretaris Dekom dan kedua komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan efektif sesuai piagam yang berlaku bagi masing-masing komite. Sepanjang tahun 2022, Sekretariat membantu Dewan Komisaris dalam penyelesaian seluruh administrasi

maximum exposure of Rp86.8 trillion. Without calculating the PMN PEN and PMN in 2022 of Rp1.085 trillion, the Company managed to leverage PMN of 61x of the total project value with a Gearing Ratio of 6.95x of the estimated maximum exposure.

The additional PMN in for of the PEN program guarantee of Rp1.57 trillion has been utilized to guarantee corporate business loans with a loss limit support scheme and joint guarantee with an outstanding loan value of Rp3.66 trillion with a guarantee value of Rp2.78 trillion.

Until the end of 2022, guarantees to SOEs in the framework of the PEN program have been realized with a project value of Rp63.173 trillion and a maximum exposure of Rp7.784 trillion. The guarantee consists of Joint Government Guarantees for the Issuance of Bonds V and Sukuk Mudharabah II of PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Phase II Loans of PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Issuance of Bonds IV of PT Waskita Karya (Persero) Tbk, and Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api (Persero) Loans, Loans to Public Company Damri, PT Pertamina (Persero) Loans, and PT Len Industri (Persero) Loans.

PMN funds of Rp10.655 trillion are constantly managed by the Company through prudent fund management and can be developed up to Rp15.15 trillion. The PMN balance is strived to be sustainable through optimal risk and claim mitigation. In addition, from a governance perspective, in accordance with PMK No. 182 of 2018 concerning Procedures for Reporting, Changes and Monitoring of PMN, the Directors have reported the use of PMN to Shareholders once in every quarter.

The Board of Commissioners Performance and Assessment on the Performance of the Board of Commissioners' Organs

Regulations regarding the Board of Commissioners' KPI are stipulated in Article 24 of the PMK 88/2015. In accordance with the provisions in Article 24, the General Meeting of Shareholders (GMS) has determined the KPI for the Board of Commissioners. The GMS regularly receives reports from the Board of Commissioners on the KPI achievements/realization of the Board of Commissioners. This KPI measures the successful implementation of the supervisory and advisory duties and responsibilities of the Board of Commissioners. The realization KPI in 2022 was reported to the GMS through letter No. S-12/PII/DK/0223 dated 17 February, 2023. Based on the audit results of KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), the Board of Commissioners' KPI score in 2022 reached 106.60%. To carry out its duties and achieve the KPI, the Board of Commissioners is assisted by the Board of Commissioners' Organs consisting of the Secretary to the Board of Commissioner, the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee, which are directly under the supervision of the Board of Commissioners.

Based on the assessment results, the Board of Commissioners is of the opinion that the Secretary to the Board of Commissioners and the two committees have carried out their duties and responsibilities properly and effectively according to their respective charter. Throughout 2022, the Secretariat has assisted the Board of Commissioners in completing the entire

Dewan Komisaris. Sementara itu, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah memberikan arahan-arahan kepada manajemen terkait pelaksanaan audit, manajemen risiko, dan hal-hal lainnya melalui rapat yang diselenggarakan setiap bulan. Kedua komite juga secara rutin memberikan rekomendasi serta laporan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Komite Audit telah memberikan rekomendasi terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) untuk melakukan pekerjaan Audit Umum Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Sementara itu, Komite Pemantau Risiko telah membantu Dewan Komisaris dalam menelaah kecukupan, kelengkapan dan efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko Perseroan serta merekomendasikan perbaikan yang diperlukan serta tugas-tugas lainnya sesuai penugasan yang diberikan Dewan Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 33/KMK.06/2023 tanggal 31 Januari 2023, komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan dengan diangkatnya Iqbal Islami sebagai Komisaris Perseroan, menggantikan Wahyu Utomo.

Pada kesempatan yang baik ini, jajaran Dewan Komisaris ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wahyu Utomo atas kontribusinya selama bertugas sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga ingin mengucapkan selamat bergabung dan menjalankan tugas kepada Iqbal Islami di jajaran Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan adanya perubahan jajaran Dewan Komisaris, maka susunan Dewan Komisaris sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan (Tahun 2023) adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris Utama President Commissioner	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 205/KMK.06/2020. Pursuant to the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 205/KMK.06/2020.
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 861/KMK.06/2018 <i>juncto</i> KMK No. 720/KMK.06/2019. Pursuant to the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 861/KMK.06/2018 <i>juncto</i> KMK No. 720/KMK.06/2019.
Iqbal Islami	Komisaris Commissioner	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 33/KMK.06/2023. Pursuant to the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023.

administration of the Board of Commissioners. Meanwhile, the Audit Committee and Risk Monitoring Committee have provided directions to management regarding the implementation of audits, risk management, and other matters through monthly meetings. The two committees also routinely provide recommendations and reports to the Board of Commissioners on issues that should be of concern and the Board of Commissioners' follow up in carrying out supervisory duties.

The Audit Committee has provided recommendations regarding the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) that will conduct audit on the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year. Based on recommendations from the Audit Committee, the Board of Commissioners has appointed KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) to conduct General Audit on the Company's Financial Statements of 2022 Fiscal Year.

Meanwhile, the Risk Monitoring Committee has assisted the Board of Commissioners in reviewing the adequacy, comprehensiveness and effectiveness of the implementation of risk management procedures in the Company and recommending necessary improvements and other duties assigned by the Board of Commissioners.

Composition of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners

Pursuant to the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023 dated 31 January 2023, the composition of the Board of Commissioners had changed with the appointment of Iqbal Islami as Commissioner of the Company, replacing Wahyu Utomo.

On this auspicious occasion, the Board of Commissioners would like to express our deepest gratitude to Wahyu Utomo for his contributions while serving as a member of the the Company Board of Commissioners. In addition, the Board of Commissioners would also like to congratulate Iqbal Islami on joining the Company as a member of the Board of Commissioners.

With the changes in the membership of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners as of the publication of this Annual Report (2023) is as follows:



Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Susunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

In carrying out its supervisory duties and functions, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and Risk Monitoring Committee. The composition of Audit Committee and Risk Monitoring Committee as of the publication of this Annual Report is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Mariatul Aini	Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/KOM/PII/02/2023 Based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-01/KOM/PII/02/2023
Ferry Irawan	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/KOM/PII/09/2022 Based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-06/KOM/PII/09/2022
Marsiyati	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/KOM/PII/06/2020 Based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-05/KOM/PII/06/2020
Iqbal Islami	Ketua Komite Pemantau Risiko Head of Risk Monitoring Committee	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/KOM/PII/02/2023 Based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-01/KOM/PII/02/2023
Ahmad Ghufroon	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/KOM/PII/09/2022 Based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-05/KOM/PII/09/2022
Belis Siswanto	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/02/2023 Based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-03/KOM/PII/02/2023

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami Dewan Komisaris untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perseroan di tahun mendatang sebagaimana telah diamanatkan pemegang saham. Kami terus menjaga soliditas yang telah terbina selama ini di antara sesama anggota Dewan Komisaris untuk dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

On this occasion, we would like to express our gratitude to shareholders for the trust given to the Board of Commissioners to continue carrying out supervisory function to the Company in the coming year as mandated by the shareholders. We continue to maintain and improve the solidity that has been established so far between members of the Board of Commissioners.

Apresiasi

Appreciation

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas pengelolaan Perseroan sepanjang tahun 2022. Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat agar kinerja Perseroan dapat selalu meningkat dan bermanfaat di masa yang akan datang.

And thus the supervisory duty report of the Board of Commissioners on the management of the Company throughout 2022. The Board of Commissioners always strives to be professional and independent in carrying out its supervisory and advisory functions so that the Company's performance can constantly improve and be beneficial in the future.

Mengakhiri laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh insan Perseroan atas dedikasi, kerja keras dan sinergi yang solid, sehingga Perseroan mampu mencatat hasil-hasil yang sangat baik di tahun 2022.

Concluding this report, the Board of Commissioners expresses its utmost appreciation to all members of the Board of Directors and all the Company personnel for their dedication, hard work and solid synergy, that enable the Company to record excellent results in 2022.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemegang saham, mitra bisnis, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan.

We would also like to express our deepest gratitude to our shareholders, business partners, regulators and other stakeholders for the support and trust that has been given.

Akhir kata, kami berharap segala tantangan yang kita hadapi dan pencapaian yang kita raih di tahun 2022 dapat menjadi sebuah pembelajaran tersendiri bagi seluruh insan Perseroan agar semakin mampu beradaptasi dan inovatif dalam mendukung perkembangan bisnis Perseroan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati Perseroan agar terus berkarya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan juga membantu Pemerintah dalam mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional demi menuju Indonesia Maju. Dalam upaya untuk merealisasikan visi tersebut, Perseroan senantiasa berupaya untuk memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak kebermanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia.

In conclusion, we hope that all the challenges and achievements in 2022 can become a lesson learned for all the Company employees so that they can be more adaptive and innovative in supporting the Company's business development in the future. May God Almighty always bless the Company so that it continues to perform in improving the quality of life of Indonesian people and also assist the Government in pushing for the National Economic Recovery Program towards an Advanced Indonesia. In an effort to realize this vision, the Company constantly strives to ensure the acceleration of the fulfillment of sustainable infrastructure development by providing guarantees and added value for infrastructure development that has the greatest beneficial impact on the people of Indonesia.

Jakarta, 26 April 2023

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Atas Nama Dewan Komisaris,

On behalf of the Board of Commissioners,



Awan Nurmawan Nuh
Komisaris Utama
President Commissioner



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

“

Sebagai bentuk dukungan Perseroan terhadap Presidensi G20 Indonesia, kami bersama T20 *Official Group: Task Force 8 (TF8)* menyelenggarakan beberapa *side event*, salah satunya yaitu *Special Event Toward G20 Summit* dengan tema “*Infrastructure Development through Innovation and Collaborative Financing toward Greater Inclusivity and Productivity*”.

As a form of the Company support for Indonesia's G20 Presidency, IIGF together with the T20 Official Group: Task Force 8 (TF8) organized a Special Event towards G20 Summit with the theme “Infrastructure Development through Innovation and Collaborative Financing towards Greater Inclusivity and Productivity”.

”



MUHAMMAD WAHID SUTOPO

Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa karena di tengah situasi global yang masih belum sepenuhnya kondusif, Direksi beserta jajaran manajemen dan seluruh karyawan telah mampu menghasilkan kinerja yang solid sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang progresif. Pada Laporan Tahunan ini, izinkan saya mewakili Direksi menyampaikan hasil pengelolaan Perseroan yang telah kami lakukan selama tahun 2022.

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan ini, apa yang dicapai oleh Perseroan di tahun 2022 merupakan gambaran dari upaya-upaya inisiatif strategis yang telah dilakukan manajemen, yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Perseroan secara berkelanjutan. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Direksi Perseroan untuk menyampaikan laporan pengelolaan Perseroan di tahun buku 2022.

Tinjauan Makro Ekonomi

Kita ketahui bersama, pada tahun 2022 penurunan kasus Covid-19 telah terjadi hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Indonesia telah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dan bersiap diri untuk transisi endemi. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai langkah strategis yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui pengadaan dan pengembangan vaksin dalam negeri, serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang didukung oleh berbagai Kementerian/Lembaga, TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah yang terbukti berhasil dan diakui oleh dunia internasional. Meredanya pandemi Covid-19 tentunya berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah senantiasa melakukan langkah-langkah untuk menjaga tingkat harga termasuk penggunaan APBN dengan memberikan subsidi untuk stabilisasi yang luar biasa besar di tahun 2022. Meskipun situasi global tergolong kurang kondusif, kinerja ekonomi Indonesia justru menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang paling resilien di tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3% (YoY) dimana pemulihan ekonomi merata di semua sektor (*broad-based*). Daya tahan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2022 masih terjaga dan relatif baik, terutama karena ditopang dari sisi permintaan dan produksi yang cukup kokoh dari setiap sektor.

Sebagai *shock absorber* dalam meredam gejolak perekonomian global, pelaksanaan APBN tahun 2022 mencatatkan kinerja positif yang menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi defisit sebesar 2,38% PDB, lebih cepat satu tahun dalam pencapaian defisit maksimal 3% dari PDB sesuai amanat UU No. 2 tahun 2020. Selama tahun 2022, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

Let us praise the presence of God Almighty for in the midst of the less conducive global situation, the Board of Directors along with the management and all employees have been able to record a solid performance along with the progressive national economic recovery. With this Annual Report, allow me to represent the Board of Directors in submitting the results of the Company's management that we have carried out throughout 2022.

As disclosed in this Annual Report, the Company's achievements in 2022 illustrate the strategic initiative efforts conducted by the management, which are expected to provide positive impacts to the Company's performance in sustainable manner. Furthermore, allow us as the Company's Board of Directors to present the Company's management report of 2022 fiscal year.

Macroeconomy Overview

As we all know that in 2022, the Covid-19 cases has declined in almost all countries, including Indonesia. Indonesia has succeeded in controlling the Covid-19 pandemic and preparing for the transition to endemic. This success cannot be separated from the various strategic steps taken by the Government, one of which is by procurin and developing domestic vaccines, as well as the implementation of the Covid-19 vaccination which is supported by various Ministries/Agencies, TNI/POLRI, and Regional Governments which have proven successful and are recognized by the international world. The realxation of the Covid-19 pandemic will certainly have a positive impact on national economic recovery.

The government has always taken steps to maintain the price level including the use of the state budget by providing subsidies for stabilization, which will be very large in year 2022. Despite the unfavorable global situation, Indonesia's economic performance has shown Indonesia became one of the most resilient countries in 2022 with most resilient countries in 2022 with reached 5.3% (YoY) where the economic recovery was evenly distributed across all sectors (*broad-based*). The resilience of the Indonesian economy throughout 2022 is still maintained and relatively good, especially supported by strong demand and production from every sector.

As a shock absorber in reducing economic turmoil globally, the implementation of the 2022 state budget recorded a positive performance which conditions indicate an increasingly healthy fiscal with the realization of a deficit of 2.38% of GDP, one year earlier in a maximum deficit offer of 3% of GDP according to the mandate Law No. 2 of 2020. During 2022, the State Budget has succeeded in becoming stabilization instrument in protecting society, support movement of the business world and priority



pertumbuhan ekonomi. Kerja keras APBN tersebut diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara yang tumbuh 10,9% dari tahun 2021 dan sekitar 99,5% dari pagu pada Perpres 98/2022, untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian, pemerintah memberikan berbagai subsidi non-energi, subsidi energi, dan kompensasi kepada masyarakat dan dunia usaha.

Di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, untuk pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi *Group of 20 (G20)*, forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia. Hal ini membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Dengan mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*", Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu dan saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Adapun Presidensi Indonesia fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu: penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi.

Sebagai bentuk dukungan Perseroan terhadap Presidensi G20 Indonesia, kami terlibat aktif dalam salah satu *G20 official engagement group*, yaitu *Think-20* atau *T-20*, dimana memiliki tugas sebagai 'bank ide' untuk G20 yang aktif mewadahi *global think-tank* dan para ahli untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan relevan dengan G20. Hal itu tentunya juga bertujuan untuk mendukung G20 dalam menghasilkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan selama KTT G20. Partisipasi Perseroan di forum ini diharapkan dapat menjalin sinergi dengan negara-negara G20, pihak swasta, akademisi serta organisasi internasional dalam pengembangan pembangunan infrastruktur.

Dalam T-20 Indonesia 2022 tersebut, kami melalui IIGF Institute menjadi *knowledge partner* dalam *Task Force 8 (TF8)* dan menyelenggarakan beberapa *side event*. Selain melalui kegiatan *Indonesia Infrastructure Roundtable* ke-23 dengan tema T-20 yang terkait '*Equitable Risk Allocation for Quality Infrastructure Investment (QII)*', kami juga menjadi bagian utama dalam *Special Event toward G20 Summit* dengan tema "*Infrastructure Development through Innovation and Collaborative Financing toward Greater Inclusivity and Productivity*". Melalui kegiatan tersebut, kami berkomitmen untuk memberikan *knowledge sharing*, pemikiran, kajian, dan rekomendasi terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui berbagai inovasi dan skema pembiayaan kolaboratif, guna memberikan pemahaman menyeluruh terkait KPBU dan implementasinya dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan *exposure* Perseroan sebagai *Special Mission Vehicle (SMV)* Kementerian Keuangan RI yang melaksanakan mandat Pemerintah RI untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berfokus pada inovasi digital dan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.

Mengatasi Kendala Melalui Langkah Strategis yang Efektif

Dinamika geopolitik yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi tantangan bagi kinerja pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor infrastruktur. Walaupun kegiatan infrastruktur mulai menggeliat pasca pandemi Covid-19, namun *refocusing*

sectors, as well as encouraging economic growth. The APBN's hard work can be realized through increased and accelerated spending by growing countries 10.9% from 2021 and around 99.5% from the ceiling in the Perpres 98/2022, to support improving the quality of education and public health and acceleration of development infrastructure and connectivity. In order to protect power public trust and economic stability, government provide various non-energy subsidies, energy subsidies, and for society and business.

In the midst of economic recovery due to the Covid-19 pandemic, Indonesia for the first time held the Presidency of the Group of 20 (G20), a cooperation forum for 20 of the world's major economies. This proves the good perception of Indonesia's economic resilience to the crisis. With the theme "Recover Together, Recover Stronger", Indonesia would like to invite the whole world to work hand in hand and support each other to recover together and grow stronger and more sustainable. The Indonesian Presidency focuses on three prioritized key sectors to a strong and sustainable recovery, namely: strengthening the architecture of global health, digital transformation, and energy transition.

As a form of the Company's support for the Indonesian G20 Presidency, we are actively involved in one of the G20 official engagement groups, namely Think-20 or T-20, which has the task of being an 'idea bank' for the G20 which actively accommodates global think-tanks and experts to present a comprehensive and relevant analysis to the G20. And of course, this also aims to support the G20 in establishing concrete and sustainable policies during the G20 Summit. The Company's participation in this forum is expected to establish synergies with G20 countries, the private sector, academics and international organizations in the development of infrastructure construction.

In the T-20 Indonesia 2022, through the IIGF Institute, we become knowledge partners in Task Force 8 (TF8) and hold several side events. Apart from participating in the 23rd Indonesia Infrastructure Roundtable with the T-20 themes related to 'Equitable Risk Allocation for Quality Infrastructure Investment (QII)', we are also a key part of the Special Event toward the G20 Summit with the theme "Infrastructure Development through Innovation and Collaborative Financing toward Greater Inclusivity and Productivity". Through these events, we are committed to providing knowledge sharing, thoughts, studies and recommendations regarding sustainable infrastructure development through various innovations and collaborative financing schemes, in order to provide a thorough understanding of PPPs and their implementation in accelerating infrastructure development in Indonesia. This activity also aims to increase the Company's exposure as a Special Mission Vehicle (SMV) of the Indonesian Ministry of Finance which carries out the Indonesian Government's mandate to support sustainable infrastructure development and focus on digital innovation and Environmental, Social, and Governance (ESG).

Handling Obstacles Through Effective Strategic Approach

The aforementioned geopolitical dynamics have become a challenge to the performance of the national economic recovery, particularly in the infrastructure sector. Despite the infrastructure activities started to commence after the Covid-19 pandemic, the

anggaran Pemerintah Indonesia berdampak pada berkurangnya anggaran bagi infrastruktur yang turun 14% menjadi Rp365,5 triliun dibandingkan tahun 2021. Untuk tahun 2022, anggaran infrastruktur yang dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp168,35 triliun, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp162,25 triliun dan belanja non-K/L senilai Rp6,1 triliun. Sementara itu, anggaran infrastruktur yang melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp102,19 triliun.

Di tahun 2022, Pemerintah terus berupaya melanjutkan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di mana Perseroan turut mendapat amanah untuk melakukan penjaminan korporasi padat karya. Program yang sebelumnya telah berakhir pada tahun 2021 melalui PMK 32/PMK.08/2021 dilanjutkan di tahun 2022 melalui PMK 27/PMK.08/2022 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penugasan Perseroan juga mulai mengalami perluasan yang sebelumnya hanya fokus di infrastruktur, kemudian merambah ke sektor-sektor lain di luar infrastruktur.

Dalam rangka mendukung berbagai proyek yang dimandatkan kepada Perseroan, kami juga berupaya menyeimbangkan peningkatan kebutuhan langkah mitigasi risiko pada setiap pengambilan keputusan yang diambil serta melakukan berbagai upaya efisiensi agar dapat mencapai target-target yang telah dicanangkan.

Perseroan memiliki eskposur potensi klaim dalam kaitannya dengan penjaminan yang telah efektif. Penguatan mitigasi risiko dilakukan oleh Perseroan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penanganan risiko dari proses bisnis penjaminan dilakukan dengan baik, diantaranya dengan melakukan pemantauan atas proyek untuk mengidentifikasi potensi keterjadian klaim.

Pada tahun 2022, untuk menjaga keberlanjutan proyek dan sebagai bentuk pelaksanaan komitmen Perseroan dalam rangka penjaminan proyek, Perseroan telah melakukan pembayaran klaim atas Proyek SPAM Bandar Lampung, pada bulan April 2022 dan Oktober 2022, dengan total nilai klaim penjaminan sebesar Rp35,3 miliar.

Perumusan dan Implementasi Kebijakan Strategis

Direksi berperan aktif dalam melakukan perumusan strategi dan kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 yang mengusung tema "Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Perluasan Penjaminan". Kami menyusun RKAP tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi makro ekonomi, aspirasi Pemegang Saham serta mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Tahun 2022 merupakan keberlanjutan proses dari tahun 2021 terkait penguatan keberlangsungan *pipeline* dalam mandat eksisting, pelaksanaan mandat baru sehubungan dengan penjaminan non-infrastruktur serta menjadi momentum dalam mengeksplorasi potensi dan penyiapan atas perluasan mandat yang diberikan kepada Perseroan.

refocusing of the Government of Indonesia's budget had impacted on the lower budget for infrastructure which fell 14% to Rp365.5 trillion compared to 2021. For 2022, the infrastructure budget allocated through Central Government spending was Rp168.35 trillion, consisting of Ministry/Institution (K/L) expenditure of Rp162.25 trillion and non-K/L expenditure of Rp6.1 trillion. Meanwhile, the infrastructure budget through transfers to regions and village funds (TKDD) amounted to Rp102.19 trillion.

In 2022, the Government strives to continue the National Economic Recovery (PEN) programs in which the Company is also mandated to provide labor-intensive corporate guarantees. The program which previously ended in 2021 through PMK 32/PMK.08/2021 will be continued in 2022 through PMK 27/PMK.08/2022 Concerning Procedures for Government Guarantees for Corporate Business Players Through the Designated Infrastructure Guarantee Agency in the Implementation of the National Economic Recovery Program. The Company's designation has also been expanded, which previously only focused on infrastructure, then penetrated into other sectors outside of infrastructure.

In order to support the various projects that have been mandated to the Company, we also strive to balance the increasing need for risk mitigation measures in every decision making and carried out various efficiency efforts in order to achieve the designated targets.

The Company is exposed to potential claims in relation to effective guarantees. The Company strengthened its risk mitigation to ensure that the risk management and handling from the guarantee business process are carried out properly, including by monitoring projects to identify potential claims.

In 2022, to maintain project sustainability and as a form of implementation of the Company's commitment to project guarantees, the Company has paid claims for the Bandar Lampung SPAM Project, in April 2022 and October 2022, with a total guarantee claim value of Rp35.3 billion.

Formulation and Implementation of Strategic Policies

The Board of Directors actively participates in the formulation of strategies and strategic policies stipulated in the 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) which carries the theme "Acceleration of National Economic Recovery through Expansion of Guarantees". We prepared the RKAP by considering various factors such as macroeconomic conditions, aspirations of Shareholders and referring to the Company's Long Term Plan (RJPP).

The year of 2022 is a continuation of the process from 2021 related to strengthening the continuity of the pipeline in the existing mandate, implementation of new mandates related to non-infrastructure guarantees as well as a momentum in exploring potential and preparing for the expansion of the mandates given to the Company.



Kami telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang menjadi bagian dari langkah untuk mencapai target pertumbuhan usaha yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022 yang dikategorikan ke dalam 3 fokus utama, yaitu:

1. Penjaminan di bidang infrastruktur - *Stabilising Stage*
Fase ini merupakan kelanjutan pendalaman dari fase "*Deepening stage*" yang dicanangkan sebagai inisiatif strategis di tahun 2021. Pada fase ini, kami berupaya mengusahakan *pipeline* proyek yang berkelanjutan melalui pengusahaan sektor/subsektor baru, memperkuat bisnis penjaminan baik KPBU maupun penjaminan pinjaman langsung serta terus memperkuat peran Perseroan sebagai *sovereign risk manager*, khususnya melalui manajemen risiko penjaminan yang kuat.
2. Penguatan Penjaminan Non-Infrastruktur dan Dukungan Program PEN
Pelaksanaan potensi penjaminan pemerintah dalam pembiayaan di bidang lainnya melalui penugasan Pemerintah seperti diantaranya pelaksanaan penjaminan bersama korporasi padat karya sesuai PMK 98/2020 *juncto* PMK 32/2021 *juncto* PMK 27/2022 serta pelaksanaan penjaminan non-infrastruktur lainnya, bilamana penugasan diberikan. Selain itu, Perseroan kembali mendapatkan mandat dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK.08/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
3. Kegiatan pendukung penjaminan dan pembangunan proyek
Kami berupaya melakukan eksplorasi potensi dan persiapan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional, meliputi:
 - Pemantauan dan pengelolaan risiko proyek;
 - Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi baik untuk penugasan maupun di luar penugasan Pemerintah;
 - Peningkatan kapasitas maturitas dan jejaring ekosistem pembangunan infrastruktur dan skema pembiayaan yang inovatif.

Kami melakukan *monitoring* secara berkala melalui rapat-rapat dengan divisi terkait dalam rangka memastikan keseluruhan kebijakan strategis berjalan sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Selain itu, kami juga melaporkan kemajuan pelaksanaan kebijakan strategis melalui berbagai rapat gabungan yang terjadwal untuk mendapat arahan, masukan, maupun persetujuan dari Dewan Komisaris.

Tahun 2022 merupakan fase terakhir dalam RJPP periode 2018-2022 yang merupakan RJPP kedua dalam sejarah pendirian Perseroan. Oleh karenanya, kami telah memformulasikan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk menetapkan RJPP periode 2023-2027 yang menjadi RJPP ketiga Perseroan pada Desember 2022. Dalam RJPP periode 2023-2027 ini, kami berupaya melanjutkan program-program yang telah dicanangkan di RJPP periode sebelumnya. Selain itu, kami juga memformulasikan visi dan misi yang baru, yaitu memasukkan peran Perseroan sebagai entitas terpercaya yang dapat melaksanakan atau mendukung akselerasi program pembangunan berkelanjutan Pemerintah yang tidak hanya terbatas pada proyek-proyek infrastruktur (*go beyond infrastructure*).

We have formulated a number of strategic policies as part of the approaches to achieve the business growth targets set in the 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) which are categorized into 3 main focuses, including:

1. Infrastructure guarantee – *Stabilising Stage*
This stage is a continuation of the deepening stage which was announced as a strategic initiative in 2021. In this stage, we strive to pursue a sustainable project pipeline through the exploitation of new sectors/sub-sectors, strengthening the guarantee business of both PPP and direct loan guarantees and continue to strengthen the Company's role as a sovereign risk manager, particularly through strong risk management guarantees.
2. Strengthening Non-Infrastructure Guarantee and Support to PEN Program
The implementation of potential government guarantees in financing in other sectors through Government assignments, such as the implementation of joint guarantees for labor-intensive corporations pursuant to PMK 98/2020 jo. PMK 32/2021, Jo PMK 27/2022 and implementation of other non-infrastructure guarantees, when the assignment is given. In addition, the Company has been mandated again in the National Economic Recovery Program through Minister of Finance Regulation Number 211/PMK.08/2020 of 2020 concerning Procedures for Providing Government Guarantees for State-Owned Enterprises in the Context of Implementing the National Economic Recovery Program.
3. Supporting activities of guarantees and project construction
We strive to explore the potential and preparation of the activities related to the implementation of government guarantees and other activities related to the implementation of project construction that support the national economics, including:
 - Project monitoring and risk management;
 - Project preparation and transaction advisory, both for the assignment and outside the assignment of the Government;
 - Improving the maturity capacity and ecosystem network of infrastructure development and innovating financing schemes.

We conduct regular monitoring through meetings with related divisions in order to ensure that all strategies are in accordance with the plans and on time. In addition, we also report the progress of the implementation of strategic policies through numerous scheduled joint-meetings to obtain directions, inputs, or approval from the Board of Commissioners.

2022 is the final phase in the 2018-2022 RJPP which is the second RJPP in the history of the Company's establishment. Therefore, we have formulated and obtained shareholder approval to ratify the 2023-2027 RJPP which will become the Company's third RJPP in December 2022. In this 2023-2027 RJPP, we strive to continue the programs that have been announced in the previous RJPP period. In addition, we have also formulated a new vision and mission, which include the Company's role as a trusted entity that can implement or support the acceleration of the Government's sustainable development program which is not only limited to infrastructure projects (*go beyond infrastructure*). The renewed mission is not only related to stakeholders, but

Adapun misi yang diperbaharui tidak hanya berkaitan dengan para pemangku kepentingan, namun juga berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas Perseroan dan para karyawan.

Pencapaian Kinerja yang Memenuhi Target

Kami merasa bersyukur dengan pencapaian Perseroan sepanjang tahun 2022 dimana kami berhasil membukukan pertumbuhan kinerja yang secara keseluruhan memenuhi target yang telah dicanangkan dalam RKAP Tahun 2022. Di tahun 2022, Perseroan memainkan peran penting untuk akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis dan menjadi penyedia penjaminan pada 12 proyek baru dengan nilai total investasi sebesar Rp184 triliun dan nilai maksimum penjaminan sebesar Rp15,143 triliun yang terdiri dari 4 proyek KPBU, 2 proyek non-KPBU dan 6 proyek terkait program PEN. Pencapaian ini telah melampaui target RKAP tahun 2022 yang mencanangkan 11 proyek baru. Pengelolaan investasi yang dilakukan telah sesuai anggaran tahun 2022 dengan mengacu pada ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.08/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, yang selanjutnya pada Oktober 2022 digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.08/2022 tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Pencapaian ini sesuai dengan visi dan misi terbaru Perseroan sebagaimana tertuang dalam RJPP periode 2023-2027 dimana Perseroan akan menjalankan peran lebih luas di luar infrastruktur dan mencakup program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Di tahun 2022 ini, kami juga memiliki komitmen untuk mendukung proyek infrastruktur berbasis *green-energy*, salah satunya diwujudkan melalui dukungan kepada proyek *Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) in Java (Western and Central Java)* PT PLN (Persero). PLN sebagai salah satu BUMN telah mendapatkan kepercayaan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur terkait dengan kelistrikan. Diantara target pembangunan dari pinjaman ini adalah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan meningkatkan bisnis *roof-top* solar PV.

Masih dalam kaitannya dengan dukungan Perseroan terhadap proyek berbasis *green-energy*, Perseroan juga melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan ruang lingkup meliputi pembangunan baru (tanpa *retrofit*), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.458 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan. Kami mengapresiasi upaya Kabupaten Madiun untuk menerapkan *alternative financing* melalui KPBU sehingga berhasil menjadi Kabupaten pertama yang menerapkan KPBU dengan Bupati sebagai PJPK. Proyek APJ ini merupakan proyek KPBU berskala kecil pertama yang dijamin oleh Perseroan yang sekaligus menunjukkan komitmen kami dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur hijau dengan manfaat penghematan energi.

also related to the capacity and capability of the Company and its employees.

Achievement of Performance that Exceeds Target

We are grateful for the Company's achievements throughout 2022 where we managed to record overall performance growth which fulfilled the targets set out in the 2022 RKAP. In 2022, the Company was pivotal to the acceleration of several strategic infrastructure construction and became the guarantee provider to 12 new projects with a total investment value of Rp184 trillion and a maximum guarantee value of Rp15.143 trillion consisting which consists of 4 PPP projects, 2 non-PPP projects and 6 projects related to the PEN program. The management of investment is carried out in accordance with the 2022 budget with reference to the provisions required in the Minister of Finance Regulation No. 95/PMK.08/2017 concerning the Scope and Procedures for Providing Government Guarantees in the Infrastructure Sector by Infrastructure Guarantee Agency, which will then be in October 2022 replaced by Regulation of the Minister of Finance No. 148/PMK.08/2022 concerning the Scope of Management of Government Guarantees by Infrastructure Guarantee Agency.

This achievement is in accordance with the Company's latest vision and mission as stated in the 2023-2027 RJPP period where the Company will carry out a broader role beyond infrastructure and cover sustainable development programs.

In 2022, we are also committed to support green-energy-based infrastructure projects, one of which is realized by supporting PT PLN (Persero)'s Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) in Java (Western and Central Java) project. PLN as one of the BUMNs has been trusted to complete electricity-related infrastructure projects. Among the development targets of this loan are to increase the construction of Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) infrastructure and increase the roof-top solar PV business.

Still in relation to the Company's support for green-energy-based projects, the Company also guarantees infrastructure projects under the Public Private Partnership (PPP) scheme, namely the Street Lighting Equipment Project (APJ) in Madiun Regency, East Java with the scope covering new construction (without retrofit), operation and maintenance of 7,458 points spread across National Roads, Main District Roads and Urban Roads. We appreciate Madiun Regency's efforts to implement alternative financing through PPP which enable it to successfully becoming the first Regency to implement PPP with the Regent as the GCA. This APJ project is the first small-scale PPP project guaranteed by the Company which at the same time demonstrates our commitment to supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia for various project scales. In addition, this is also part of our commitment to support green infrastructure projects with energy saving benefits.



Perseroan melanjutkan dukungan atas aktivitas program konektivitas melalui proyek jalan tol dengan skema KPBU, yaitu Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sepanjang 206,65 km dan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi sepanjang 96,84 km. Kami juga mendapat amanat untuk memberikan dukungan kepada proyek *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat. Proyek ini merupakan fasilitas pengujian kendaraan di luar ruangan sesuai dengan standar internasional di mana Perseroan menjadi pelaksana fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksinya.

Selain itu, Perseroan juga mendapat mandat untuk menjamin pinjaman BUMN pada lembaga keuangan internasional dan melakukan penjaminan korporasi dalam rangka program PEN. Sepanjang tahun kami ditugaskan untuk memberikan dukungan kepada PT Waskita Karya Tbk, PT LEN Industri (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Dukungan juga diberikan kepada Perum DAMRI dan PT Industri Kereta Api (Persero) untuk penyediaan armada bus listrik dalam rangka menunjang mobilisasi para peserta dan delegasi KTT G20.

Secara total, sejak awal berdirinya hingga Desember 2022, Perseroan telah memberikan penjaminan kepada 49 proyek yang terdiri dari 41 proyek penjaminan skema KPBU dan Non-KPBU, dan 8 proyek terkait Penjaminan BUMN dalam rangka PEN dengan total nilai penjaminan sebesar Rp95 triliun, dan nilai investasi proyek sebesar Rp550 triliun.

Pada aspek finansial, Perseroan berhasil mencatat kinerja keuangan yang solid dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dalam laporannya tertanggal 27 Februari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Ditinjau dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, realisasi pendapatan usaha tahun 2022 tercapai sebesar Rp1,09 triliun, meningkat 18,03% dari Rp922,51 miliar di tahun 2021. Namun setahun 2% di bawah target RKAP 2022. Pendapatan ini terutama dikontribusikan dari pendapatan Penjaminan sebesar Rp252,57 miliar, pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (PDF) sebesar Rp41,10 miliar, pendapatan Pengelolaan Dana sebesar Rp793,70 miliar, dan pendapatan Lainnya sebesar Rp1,48 miliar.

Adapun realisasi laba tahun berjalan 2022 tercapai sebesar Rp714,17 miliar, meningkat 14,19% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp625,40 miliar. Capaian ini berada 119% di atas target RKAP 2022 sebesar Rp112,09 miliar.

Berkat upaya kami dalam melakukan efisiensi biaya, maka kenaikan beban usaha berhasil ditekan hingga di bawah peningkatan pendapatan Perseroan. Kondisi ini menghasilkan capaian tingkat rasio BOPO yang lebih baik dari sebelumnya sebesar 36,90% menjadi 35,83%, capaian ini berada 77,88% dari target RKAP 2022.

Ditinjau dari posisi keuangan, realisasi aset tahun 2022 tercapai sebesar Rp15,56 triliun, meningkat 9,97% dibandingkan Rp14,14 triliun di tahun 2021 yang terutama disebabkan oleh adanya kenaikan hasil investasi yang signifikan dan penambahan modal negara (PMN). Capaian ini berada 99,75% di bawah target RKAP

The Company continues to support connectivity program activities through toll road projects under the PPP scheme, namely the Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Toll Road for 206.65 km and the Gilimanuk – Mengwi Toll Road for 96.84 km. We were also mandated to support the Proving Ground project for the Road Feasibility Test and Motor Vehicle Certification (BPLJSKB) project in Bekasi, West Java. This project is an outdoor vehicle testing facility in accordance with international standards where the Company prepare and assist the facility transaction.

In addition, the Company is also mandated to guarantee SOE loans to international financial institutions and carry out corporate guarantees within the framework of the PEN program. Throughout the year, we were assigned to provide support to PT Waskita Karya Tbk, PT LEN Industri (Persero), and PT Pertamina (Persero). Support was also given to Perum DAMRI and PT Industri Kereta Api (Persero) for providing electric bus fleets in order to support the mobilization of participants and delegations of the G20 Summit.

In total, since its establishment until December 2022, the Company has provided guarantees for 49 projects consisting of 41 guarantee projects for PPP and Non-PPP schemes, and 8 projects related to BUMN Guarantees in the context of PEN with a total guarantee value of Rp95 trillion, and project investment value of Rp550 trillion.

On the financial aspect, the Company managed to record a solid and better financial performance compared to the previous year. This is reflected in the 2022 Financial Statements which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners in their report dated 27 February 2023 with an unqualified opinion.

From the statement of profit and loss and comprehensive income, the realization of operating income in 2022 was Rp1.09 trillion, an increase of 18.03% from Rp922.51 billion in 2021. Still 2% below the 2022 RKAP target. This income was mainly contributed by Guarantee income of Rp252.57 billion, Project Preparation and Transaction Advisory (PDF) income of Rp41.10 billion, Investments of Rp793.70 billion, and Other income of Rp1.48 billion.

Meanwhile realized profit for the year of 2022 was Rp714.17 billion, an increase of 14.19% compared to the previous year which was recorded at Rp625.40 billion. This achievement was 119% above the 2022 RKAP target of Rp112.09 billion.

Thanks to our cost efficiency efforts, the increase of operating expenses can be maintained bellow the increase of the Company's revenues. This condition has resulted in better BOPO ratio from previously 36.90% to 35.83%, this achievement is 77.88% of the 2022 RKAP target.

In terms of financial position, the realization of assets in 2022 reached Rp15.56 trillion, an increase of 9.97% compared to Rp14.14 trillion in 2021 which was mainly due to a significant increase in investment returns and additional state capital (PMN). This achievement was 99.75% below the 2022 RKAP

2022 sebesar Rp39,61 miliar. Realisasi ekuitas tercapai sebesar Rp15,15 triliun, meningkat 9,90% dari Rp13,79 triliun di tahun 2021. Capaian ini berada 98,82% di bawah target RKAP 2022 sebesar Rp181,44 miliar. Sementara itu, realisasi liabilitas tercapai sebesar Rp401,61 miliar, naik 12,90% dibandingkan Rp355,72 miliar di tahun 2021 yang terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada pos biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain.

Kami berhasil menutup tahun 2022 dengan menorehkan prestasi skala internasional dengan memperoleh 3 penghargaan sekaligus dalam ajang ASEAN *Risk Award 2022*, yaitu sebagai Juara 1 *Risk Champion Category 1*, *Runner up GRC Award Category 1* dan *Risk Educator*. Sebelumnya Perseroan juga mendapatkan *Award Penghargaan* yang didapat menjelang Hari Ulang Tahun Perseroan ke-13 ini merupakan bentuk konkret dari implementasi manajemen risiko sesuai praktik-praktik terbaik yang dilaksanakan oleh manajemen dan karyawan Perseroan. Pencapaian ini tentunya akan mendukung penguatan aspek bisnis Perseroan di tahun 2023 di mana kami bukan hanya mendukung pembangunan infrastruktur melalui *innovative financing* hingga KPBU berskala kecil, namun kami juga akan melakukan *enhancement* dan diversifikasi bisnis dengan melakukan penjaminan di luar infrastruktur. Hal ini berarti menjadi tantangan bagi kami sebagai lembaga penjaminan untuk terus mendapat kepercayaan. Oleh karena itu, pencapaian ini menjadi landasan bagi kami untuk semakin berkomitmen dalam menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta mengintegrasikan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko dan Kepatuhan di dalam Perseroan.

Prospek dan Fokus Bisnis Tahun 2023

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 akan tetap kuat dan ditargetkan dapat mencapai sebesar 5,3%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kami merasa optimis bahwa Industri infrastruktur akan tetap prospektif dan masih menjadi kontributor penggerak utama ekonomi dalam negeri di tahun 2023 mengingat hal tersebut merupakan kelanjutan dari proyek-proyek infrastruktur yang mulai menggeliat pasca pandemi Covid-19.

Walaupun Pemerintah akan lebih selektif dalam membangun infrastruktur baru, namun pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023 dalam rangka mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045.

Hal ini tercermin dari peningkatan dana yang dialokasikan untuk infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dari Rp365,8 triliun menjadi Rp392 triliun yang sebagian besar akan digunakan untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar. Ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

target of Rp39.61 billion. Realization of equity reached Rp15.15 trillion, an increase of 9.90% from Rp13.79 trillion in 2021. This achievement was 98.82% below the 2022 RKAP target of Rp181.44 billion. Meanwhile, realized liabilities reached Rp401.61 billion, an increase of 12.90% compared to Rp355.72 billion in 2021 which was mainly due to an increase in accrued expenses, allowances and other payables.

We managed to close the year of 2022 by achieving e international awards simultaneously at the ASEAN Risk Award 2022, namely as 1st Place in Risk Champion Category 1, Runner up in GRC Award Category 1 and Risk Educator. Previously, the Company also received an Award ahead of the 13th anniversary of the Company as a concrete form of implementing risk management according to the best practices carried out by the management and employees of the Company. This achievement will certainly strengthen of the Company's business aspects in 2023 where we will not only support infrastructure development through innovative financing to small-scale PPPs, but we will also carry out enhancements and business diversification by providing guarantees outside of infrastructure. This poses a challenge for us as a guarantee institution to continue gaining trust. Therefore, this achievement is the foundation for us to be more committed to implementing risk management as a whole and integrating Good Governance, Risk Management and Compliance within the Company.

Business Prospects and Focus in 2023

The government forecasted that economic growth in 2023 will remain strong and is targeted to reach 5.3%, driven by increased domestic demand in both household consumption and investment. This forecast is in line with the increase in public mobility after the abolition of the Community Activities Restriction Enforcement (PPKM) policy, improved business prospects, increased inflows of Foreign Investment (PMA), and the continued completion of National Strategic Projects (PSN).

We are optimistic that the infrastructure industry will remain prospective and still be the main contributor to driving the domestic economy in 2023, considering that this is a continuation of infrastructure projects that have begun to commence after the Covid-19 pandemic.

Despite the Government will be more selective in building new infrastructures, the development of infrastructure will remain as one of the government's policy focuses in 2023 in order to promote increased productivity for economic transformation towards the Vision of Advanced Indonesia in 2045.

This is reflected in the increase in funds allocated for infrastructure in the 2023 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) from Rp365.8 trillion to Rp392 trillion, most of which will be used to build basic service infrastructures. The availability of reliable infrastructure is essential to support economic activity and business growth.



Pemerintah telah menetapkan dua prioritas yang berkaitan dengan infrastruktur di 2023, yaitu mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagai badan usaha milik negara yang 100% kepemilikannya ada pada Kementerian Keuangan, Perseroan diharapkan mampu menerjemahkan posisinya sebagai bagian dari instrumen keuangan negara yang mempunyai misi khusus dalam pembangunan Indonesia.

Komitmen kami untuk terus mendorong skema pembiayaan alternatif akan terus dijalankan, utamanya untuk membantu beban APBN yang hingga saat ini juga masih berfokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional. Kami juga secara terbuka senantiasa mendukung Kementerian PUPR, kementerian-kementerian lain maupun Pemerintah Daerah yang akan mengembangkan proyek skema KPBU.

Kami mendapat arahan dari Pemegang Saham untuk melakukan kajian alternatif upaya penguatan kapasitas penjaminan termasuk melalui *co-guarantee* atau *re-guarantee* bersama pihak lain. Upaya itu diyakini akan mendorong kapabilitas Perseroan untuk menjamin proyek lebih banyak atau nilainya lebih besar dan memiliki *multiplier effect* yang lebih besar. Kami akan menelaah kembali proses bisnis di bidang penjaminan untuk menghasilkan prosedur yang lebih transparan dan akuntabel namun tetap terjaga tata kelolanya.

Kami menyadari bahwa penerapan konsep *green and sustainable infrastructure* sangat penting mengingat perubahan iklim menjadi isu utama dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah sendiri terus berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun 2030, melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) serta *Net Zero Emission* (NZE) di 2060. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pengendalian Emisi GRK. Oleh karena itu, kami akan terus mendukung langkah Kementerian Keuangan untuk membangun infrastruktur yang mengedepankan konsep *green and sustainable building* dengan standar *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang berkelas internasional. Dengan demikian, kami juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

Kami telah menyiapkan berbagai strategi dan program di tahun 2023, khususnya dalam arah pengembangan Perseroan untuk melakukan diversifikasi bisnis dengan memperluas jangkauan penjaminan di luar infrastruktur demi memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan negara, dimana hal ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2023-2027. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pada Desember 2022, kami telah mendapat persetujuan dari pemegang saham untuk RJPP periode 2023-2027 yang telah kami susun. Dalam RJPP tersebut, kami memperkuat pandangan mengenai *go beyond infrastructure*. Dengan demikian, di tahun mendatang kami tidak hanya memberikan dukungan terhadap infrastruktur, namun juga mengembangkan kapasitas dan kapabilitas serta menjalankan mandat-mandat lain di luar infrastruktur, seperti ekonomi hijau melalui pelaksanaan

The government has set two priorities related to infrastructure in 2023, namely accelerating the completion of national priority infrastructure development and encouraging the growth of new economic centers, including the Archipelago Capital (IKN).

As a state-owned enterprise whose 100% ownership is in the Ministry of Finance, the Company is expected to be able to translate its position as part of a state financial instrument that has a special mission in Indonesia's development.

Our commitment to continue to encourage alternative financing schemes will continue to be carried out, especially to ease the burden on the State Budget which has been focused on National Economic Recovery until today. We also openly support the Ministry of PUPR, other ministries and local governments who wish to develop PPP scheme projects.

We received directives from the Shareholders to review alternative efforts to strengthen the capacity of our guarantee, including through co-guarantee or re-guarantee with other parties. This effort is believed to boost the Company's capability to guarantee more projects or greater value and have a greater multiplier effect. We will re-examine business processes in the field of guarantees to produce procedures that are more transparent and accountable but still maintain good governance.

We realize that the implementation of green and sustainable infrastructure concept is crucial, considering that climate change will become a major issue in the next few years. The government itself remains committed to reducing Green House Gas (GHG) emissions by 2030, through a Nationally Determined Contribution (NDC) and Net Zero Emission (NZE) in 2060. In addition, the Government has also issued Presidential Regulation Number 98 of 2021 concerning Implementation of Value Carbon Economy for Controlling GHG Emissions. Therefore, we will continue to support the Ministry of Finance approaches to build infrastructure that promotes the concept of green and sustainable building with international-class Environmental, Social and Governance (ESG) standards. Thus, we also contribute in improving the quality of life of the people and preserving the environment in an effort to achieve sustainable development.

We have prepared various strategies and programs for 2023, particularly in the Company's development direction to diversify its business by expanding the scope of guarantees beyond infrastructure in order to provide greater added value for society and the country, which is stated in the Company's Long Term Plan (RJPP) of 2023-2027 period. As previously mentioned, in December 2022, we received approval from the shareholders for the RJPP of 2023-2027 period that we had prepared. In the RJPP, we reinforce our perspective of going beyond infrastructure. Thus, we will not only provide support for infrastructure in the coming year, but also develop capacities and capabilities and carry out other mandates beyond of infrastructure, such as a green economy through the implementation of the Environment, Social, and Governance (ESG) framework. Several attractive sectors to develop include energy transition and urban facilities in the form of energy

framework *Environment, Social, and Governance* (ESG). Beberapa sektor yang menarik untuk dikembangkan seperti transisi energi dan *urban facility* dalam bentuk konservasi energi dimana proyek-proyek yang berkaitan dengan hal tersebut sangatlah beragam, mulai dari jalan, ketenagalistrikan, air minum, transportasi, telekomunikasi, hingga pariwisata.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan

Kami meyakini bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan sebuah mekanisme yang tidak hanya bersifat kepatuhan, namun dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Kami memastikan bahwa seluruh insan Perseroan berkomitmen penuh untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini tidak lepas dari upaya berkelanjutan dari Perseroan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan (*Employee Engagement*) sehingga kelima prinsip GCG tersebut dapat menjadi budaya organisasi dan berfungsi sebagai pedoman dalam bekerja. Di tahun 2022, kami kembali mengadakan *Employee Engagement Survey* oleh pihak independen (Mercer) dengan skor akhir "77" meningkat dari tahun sebelumnya dengan skor "61". Hasil skor ini menunjukkan keberhasilan kami dalam menciptakan tempat kerja yang kondusif dan produktif.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perseroan secara berkala melakukan penilaian terhadap penerapan GCG (*GCG Assessment*) yang menjadi bagian dari mekanisme "*check and balances*". Dengan adanya *GCG Assessment* ini, kami dapat melihat efektivitas penerapan GCG di lingkungan Perseroan sekaligus sebagai dasar bagi manajemen untuk melakukan tindakan perbaikan agar kualitas penerapan GCG semakin meningkat untuk ke depannya.

Di tahun 2022, Perseroan kembali melakukan *GCG Assessment* menggunakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan yang terdiri dari 6 (enam) aspek yang meliputi Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat No. S-54/PII/DK/1222, Perseroan berhasil memperoleh skor 88,170 atau termasuk kategori "Sangat Baik". Dalam 5 tahun terakhir, skor *GCG Assessment* Perseroan mencerminkan efektivitas penerapan GCG yang semakin baik dari waktu ke waktu. Adapun hasil *GCG assessment* tersebut menghasilkan 28 area perbaikan/penyempurnaan di antaranya adalah meningkatkan pemahaman terhadap program tata kelola perusahaan yang ada di Perseroan dan tata kelola dokumentasi sebagai bukti terlaksananya kegiatan di lingkungan Perseroan. Adapun uraian atas area perbaikan ini kami ungkapkan lebih lanjut pada bagian lain dari Laporan Tahunan ini.

conservation where the projects related to this are very diverse, ranging from roads, electricity, drinking water, transportation, telecommunications, to tourism.

Improving Corporate Governance Quality

We believe that the nature of Good Corporate Governance mechanism is not only compliance, but to provide added value to the Company. We ensure that all Company personnel are fully committed to implementing GCG principles as the foundation in carrying out daily operational activities, which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness and Equality in order to maintain business continuity and achieve sustainable growth. This is inseparable from the continuous efforts of the Company to increase employee engagement so that the five GCG principles can become an organizational culture and serve as work guidelines. In 2022, we have conducted an Employee Engagement Survey again through an independent party (Mercer) with a final score of "77", an increase from the previous year's score of "61". The results of this score show our success in creating a conducive and productive workplace.

In order to improve the quality of GCG implementation, the Company periodically evaluates the implementation of GCG (*GCG Assessment*) as a part of the "*check and balances*" mechanism. With this *GCG Assessment*, we assess the effectiveness of GCG implementation within the Company as well as a foundation for management to take corrective actions to improve the quality of GCG implementation in the future.

In 2022, the Company conducted a *GCG Assessment* using the criteria stipulated on the Decree of the Minister of Finance Number 505/KMK.06/2020 concerning Guidelines for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance which consists of 6 (six) aspects including Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance, Shareholders and GMS, Board of Commissioners, Directors, Information Disclosure and Transparency, and Other Aspects.

Based on the assessment carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) pursuant to the approval of the Board of Commissioners through Letter Number S-54/PII/DK/1222, the Company managed to obtain a score of 88.170 or is in the category of "Very Good". In the last 5 years, the Company's *GCG Assessment* score reflects the effectiveness of GCG implementation which has been improving from time to time. The results of the *GCG assessment* resulted in 28 areas of improvement including increasing understanding of the existing corporate governance program in the Company and documentation management as evidence of the implementation of activities within the Company. As for the description of this area of improvement, we will disclose it further in another section of this Annual Report.



Kami menetapkan area perbaikan tersebut sebagai rencana aksi perbaikan/penyempurnaan yang menjadi fokus perhatian dan membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar dapat meningkatkan penerapan praktik GCG sesuai praktik-praktik yang terus berkembang. Sebelumnya kami telah menindaklanjuti 49 rekomendasi BPKP dari hasil GCG *Assessment* tahun 2021 dengan tingkat pemenuhan 100%. Selain itu, kami juga menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan mengadopsi ISO 37001:2016 dan telah mendapatkan sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 untuk ruang lingkup proses pengadaan barang dan jasa. Penerapan SMAP merupakan upaya Perseroan untuk mencegah praktik penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta menghindari terjadinya transaksi yang memiliki unsur konflik kepentingan. Dalam hal ini, para vendor Perseroan wajib mendukung penerapan SMAP di Perseroan dengan mematuhi dan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Realisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Kami menyadari bahwa penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam jangka panjang akan memberikan banyak manfaat bagi Perseroan, terutama pada aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan meningkatkan reputasi yang pada akhirnya memiliki implikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran kestabilan dan pertumbuhan usaha Perseroan.

Untuk menjalankan program-program TJSL di tahun 2022, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,6 miliar dan telah terserap sekitar 57% atau Rp3,7 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan 29 program TJSL yang didominasi oleh kegiatan sosial Keagamaan 33%, pemberdayaan masyarakat 24%, lingkungan 21%, pendidikan 18%, dan kesehatan 4%. Dibandingkan tahun sebelumnya, porsi kesehatan mengalami penurunan mengingat kasus Covid-19 mengalami penurunan di tahun 2022. Dengan demikian, kami lebih memfokuskan diri untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid19. Program-program TJSL dilaksanakan di lokasi sekitar proyek yang telah dijamin Perseroan maupun yang sedang berproses dan juga di lokasi-lokasi lain sesuai kebutuhan dari para pemangku kepentingan.

Di sektor pemberdayaan masyarakat, kami melaksanakan 7 program, di antaranya adalah pengisian sentra UMKM KEK Mandalika yang telah berjalan 3 tahun, dukungan kewirausahaan pelaku Usaha Mikro ex-Pekerja konstruksi demobilisasi PLTU Batang Jawa Tengah, program Desa Berdaya di Desa Karangmukti, Purwakarta – Jawa Barat dan Desa Manggungsari, Kendal – Jawa Tengah.

Walaupun kegiatan usaha Perseroan tidak berdampak secara langsung terhadap lingkungan hidup, namun kami memiliki komitmen kuat untuk ikut terlibat dalam berbagai inisiatif pelestarian lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

We define these areas of improvement as improvement action plans which are the focus of attention and require commitment from all relevant parties to be implemented in earnest in order to improve the implementation of GCG practices according to practices that continue to develop. Previously, we had followed up on 49 BPKP recommendations from the results of the 2021 GCG Assessment with a 100% fulfillment rate. In addition, we have also implemented an Anti-Bribery Management System (SMAP) by adopting ISO 37001:2016 and have received SMAP ISO 37001:2016 certification for the scope of the process of procuring goods and services. The implementation of the SMAP is the Company's effort to prevent bribery, corruption, collusion and nepotism practices and avoid transactions that have conflict of interest elements. In this case, the Company's vendors are required to support the implementation of SMAP in the Company by complying with and following the goods and services procurement process in accordance with applicable regulations and policies.

Realization of Corporate Social Responsibility (CSR) Program

We realize that the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in the long term will provide various benefits for the Company, especially in the aspects of growing trust, creating harmony and improving reputation which will ultimately have implications for creating added value that encourages the smooth stability and growth of the Company's business.

To carry out the CSR programs in 2022, we have allocated a budget of Rp6.6 billion and approximately 57% or Rp3.7 billion has been absorbed. The funds were used to carry out 29 CSR programs which were dominated by Religious social 33%, community empowerment 24%, environment 21%, education 18%, and health 4%. Compared to the previous year, the portion for health has decreased, considering that Covid-19 cases have declined in 2022. Thus, we are more focused on advancing the community's economy through various community empowerment initiatives in line with the economic recovery after the Covid19 pandemic. CSR programs are carried out in locations around projects that have been guaranteed by the Company or those that are currently in process and also in other locations according to the needs of stakeholders.

In the community empowerment sector, we carry out 7 programs, including filling the MSME center for KEK Mandalika which has been running for 3 years, entrepreneurial support for Micro Business actors ex-construction workers for the demobilization of PLTU Batang Central Java, the Empowered Village program in Karangmukti Village, Purwakarta - West Java and Manggungsari Village, Kendal – Central Java.

Even though the Company's business activities have no direct impact on the environment, we are strongly committed to participate in various environmental preservation initiatives, both directly and indirectly.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan 6 program TJSL pada sektor lingkungan, di mana 3 di antaranya merupakan program bersama *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan RI lainnya (Sinergi SMV). Program-program tersebut di antaranya meliputi pengolahan sampah organik dengan bio konversi melalui budidaya maggot di Yogyakarta, Pembangunan sanitasi dan pemanenan air hujan di TPA Jatibarang, Semarang, dan program akuakultur dan rehabilitasi mangrove di Desa Pegat Batumbuk, Berau-Kalimantan Timur. Sementara itu, melalui Sinergi SMV, kami melakukan penghijauan Daerah Aliran Sungai Citarum, Jawa Barat dan Dataran Tinggi Dieng – Jawa Tengah.

Di sektor pendidikan, kami memberikan beasiswa untuk 16 anak karyawan alih daya Perseroan yang sebelumnya telah berhasil melewati tahap seleksi, renovasi sarana prasarana PAUD Bougenville Kuningan Barat, pelatihan *Computer Assisted Test* (CAT) Tahap 1 bagi pegawai non-ASN, dan peningkatan kompetensi profesional guru melalui program Guru Binar di Denpasar, Surabaya/Malang, Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Dalam sektor kesehatan, program kami di tahun 2022 berfokus pada penanggulangan Tuberkulosis (TBC) sejalan dengan salah satu agenda prioritas program kesehatan nasional. Sebagai salah satu negara yang mendukung strategi End TB di tingkat global, Indonesia menetapkan target untuk mengurangi jumlah pasien TBC sebesar 80% dan jumlah kematian akibat TBC sebesar 90% pada tahun 2030.

Selain itu, kami juga secara rutin aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan terkait keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha sebagai bagian dari inisiatif kami di sektor keagamaan serta menjalankan program-program donasi dalam bentuk paket sembako, pembangunan dan renovasi fasilitas umum, ataupun uang tunai.

Komposisi Direksi

Perlu kami laporkan bahwa pada tahun 2022 jajaran Direksi mengalami perubahan dimana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 tanggal 17 Januari 2022, Pemegang Saham memutuskan untuk mengangkat Donny Hamdani sebagai Direktur. Selain itu, pemegang saham juga kembali menugaskan, M. Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun periode 2022-2027. Pengangkatan ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 340/KMK.06/2022 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan.

Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Length of Service	Periode Jabatan Term of Office
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019 <i>juncto</i> KMK No. 340/KMK.06/2022. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 890/KMK.06/2019 <i>juncto</i> KMK No. 340/KMK.06/2022.	4 Desember 2022 s.d. 3 Desember 2027 December 4, 2022 to December 3, 2027	Ke-2 2 nd

Throughout 2022, the Company has carried out 6 Corporate Social Responsibility (CSR) programs in the environmental sector, with 3 of them were joint programs with the other Indonesian Ministry of Finance's Special Mission Vehicles (Synergy SMV). These programs include processing organic waste with bio-conversion through maggot cultivation in Yogyakarta, construction of sanitation and rainwater harvesting at the Jatibarang landfill, Semarang, and an aquaculture program and mangrove rehabilitation in Pegat Batumbuk Village, Berau, East Kalimantan. Meanwhile, through the SMV Synergy, we are reforesting the Citarum River Basin, West Java and the Dieng Plateau - Central Java.

In the educational sector, we provided scholarships for 16 children of the Company's outsourced employees who had previously passed the selection stage, renovated PAUD Bougenville Kuningan Barat infrastructure facilities, Phase 1 Computer Assisted Test (CAT) training for non-Government Officer at the Ministry of PUPR RI, and increasing the professional competence of teachers through the Teacher Binar program in Denpasar, Surabaya/Malang, North Maluku Regency and Southeast Maluku Regency.

In the health sector, our program in 2022 focuses on tackling Tuberculosis (TB) in line with one of the priority agendas of the national health program. As one of the countries supporting the End TB strategy at the global level, Indonesia has set a target to reduce the number of TB patients by 80% and the number of deaths from TB by 90% by 2030.

In addition, we also regularly participate in various religious-related activities such as Eid al-Fitr and Eid al-Adha as part of our initiatives in the religious sector and carry out donation programs in the form of food packages, construction and renovation of public facilities, or cash.

Board of Directors' Composition

We should report that in 2022, the composition of the Board of Directors has changed based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia Number 14/KMK.06/2022 dated 17 January 2022, the Shareholders decided to appoint Donny Hamdani as Director. In addition, the shareholders also re-assigned M. Wahid Sutopo as the President Director of the Company with a term of 5 (five) years from 2022-2027. This appointment refers to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 340/KMK.06/2022 concerning Reappointment of Members of the Board of Directors of the Company.

Thus, the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2022 is as follows:



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Length of Service	Periode Jabatan Term of Office
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 s.d. 22 Maret 2025 March 23, 2020 to March 22, 2025	Ke-1 1 st
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022.	17 Januari 2022 s.d. 16 Januari 2027 January 17, 2022 to January 16, 2027	Ke-1 1 st

Komposisi Direksi yang baru ini diharapkan dapat terus berinovasi membawa Perseroan ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan pemegang saham.

Apresiasi

Atas pencapaian yang ditorehkan di tahun 2022, izinkan saya mewakili Direksi Perseroan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris serta pemegang saham, juga kepada regulator, para Pemangku Kepentingan, serta jajaran manajemen dan karyawan, atas seluruh kerja sama yang telah terjalin dengan baik.

Pada kesempatan ini, sehubungan dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris, kami secara khusus ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wahyu Utomo yang telah mengakhiri tugasnya pada tanggal 31 Januari 2023 atas kontribusinya yang signifikan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada kami selama bergabung dengan Perseroan. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Iqbal Islami selaku Komisaris Perseroan yang baru.

Akhir kata, kami berharap agar Perseroan dapat terus mengembangkan visinya dengan menjadi Entitas penggerak terpercaya yang aktif dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada segenap Pemangku Kepentingan.

The latest composition of the Board of Directors is expected to bring the Company to a better direction in accordance with the shareholders' expectation.

Appreciation

For the achievements recorded in 2022, allow me on behalf of the Company's Board of Directors to express my respect and gratitude to the Board of Commissioners and shareholders, as well as to regulators, Stakeholders, as well as management and employees, for all the cooperation that has been well established.

On this occasion, in line with the change in Board of Commissioners' composition, we would like to specifically express our greatest appreciation to Mr. Wahyu Utomo who has ended his duties on January 31, 2023 for his significant contribution in providing direction and guidance to us while serving Company. In addition, we would also like to welcome Mr. Iqbal Islami as the new Commissioner of the Company.

Finally, we hope that the Company can continue to develop its vision by becoming a trusted driving entity that actively accelerates the development of sustainable infrastructure, which will eventually provide added value to all Stakeholders.

Jakarta, 26 April 2023

Atas nama jajaran Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
On Behalf of the Board of Directors of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

MUHAMMAD WAHID SUTOPO
Direktur Utama
President Director





SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 April 2023

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

AWAN NURMAWAN NUH
Komisaris Utama
President Commissioner

MARIATUL AINI
Komisaris
Commissioner

IQBAL ISLAMI
Komisaris
Commissioner

STATEMENT OF ACCOUNTABILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2022 ANNUAL REPORT OF PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2022 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has been presented in full and we shall be fully accountable for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement was made with actual.

Jakarta, April 26, 2023

Direksi Board of Directors



MUHAMMAD WAHID SUTOPO
Direktur Utama
President Director



ANDRE PERMANA
Direktur Bisnis
Business Director



DONNY HAMDANI
Direktur Keuangan
Finance Director



PENJ
INFRA
Guarante



**AMINAN &
STRUKTUR**
Engineering & Infrastructure



**PROFIL
PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE**





IDENTITAS PERUSAHAAN COMPANY IDENTITY



NAMA PERUSAHAAN COMPANY NAME

PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (Persero)



JUMLAH KARYAWAN TOTAL EMPLOYEES

152



TANGGAL PENDIRIAN DATE OF ESTABLISHMENT

30 Desember 2009
December 30, 2009



JARINGAN NETWORK

1 Kantor Pusat
1 Head Office



JENIS/BADAN HUKUM PERUSAHAAN COMPANY TYPE/LEGAL ENTITY

Perseroan Terbatas yang merupakan
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di bawah pembinaan dan
pengawasan Menteri Keuangan
Limited Liability Company which
is a State-Owned Enterprise (SOE)
under the guidance and supervision
of Finance Minister



DASAR HUKUM PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEGAL BASIS OF ESTABLISHMENT AND AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Akta Pendirian No. 29 tertanggal 30 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 14 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M. Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 35 tertanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H.

Deed of Establishment No. 29 dated December 30 2009, made before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notary. as amended by the Amendment Deed No. 14 dated January 14, 2010 made before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notary. The deed of establishment has been amended several times and most recently by the Company's Shareholders Deed No. 35 dated September 22, 2022, made before Arry Supratno, S.H.



KEGIATAN BISNIS UTAMA SESUAI ANGGARAN DASAR MAIN BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION

- Memberikan penjaminan pemerintah (*Government Guarantee*) di bidang infrastruktur;
- Memberikan penjaminan pemerintah (*Government Guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah; dan
- Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat dan daerah.
- Providing the Government Guarantee in the infrastructure sector;
- Providing the Government Guarantee in financing in other sectors apart from infrastructure following the government assignments; and
- Carrying out activities related to the implementation of government guarantees as well as other activities related to the implementation of development projects that support the national economy both central and regional.



PENCATATAN DI BURSA LISTING ON THE EXCHANGE

Perseroan merupakan BUMN yang belum mencatatkan saham di bursa manapun
The Company is SOE that has not listed its shares on any stock exchange



MODAL DASAR AUTHORIZED CAPITAL

Rp20.000.000.000.000 yang terdiri dari 20.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham
Rp20,000,000,000,000 consisting of 20,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share



MODAL DITEMPAK DAN DISETOR PENUH ISSUED AND FULLY PAID UP CAPITAL

Rp10.655.000.000.000 yang terdiri dari 10.655.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar sah
Rp10,655,000,000,000 consisting of 10,655,000 shares with a valid nominal value of Rp1,000,000 per share



PEMANG SAHAM SHAREHOLDERS

100% milik Negara Republik Indonesia
100% owned by the Republic of Indonesia



ALAMAT KANTOR PUSAT HEAD OFFICE ADDRESS

Capital Place, Lt. 7 dan 8 | 7th and 8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia



SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Yunan Novaris Arifidianto
(EVP Corporate Secretary and Communication)

Telepon/Phone : (62-21) 5795 0550
Faksimile/Facsimile : (62-21) 5795 0040
Situs Web/Website : www.ptpii.co.id
Email : info@iigf.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN THE COMPANY'S BRIEF HISTORY



Sekilas Tentang Perseroan

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), yang dalam laporan tahunan ini disebut juga dengan Perseroan, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 30 Desember 2009 dan ditugaskan sebagai layanan satu pelaksana (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian jaminan bagi proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sebagai dasar pelaksanaan KPBU, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur ("Perpres 38/2015"). Penerapan KPBU dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Agar KPBU dapat berjalan baik, Pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan penjaminan infrastruktur melalui Perseroan, untuk memberikan kepastian kepada pihak swasta terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam pelaksanaan perjanjian KPBU. Peran Perseroan diharapkan mampu meningkatkan kepastian dalam perolehan pembiayaan (*financial close*) proyek melalui peningkatan kelayakan kredit atau *bankability* dari proyek-proyek KPBU, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontingensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah. Perseroan sebagai BUMN yang dirancang Pemerintah untuk menjadi lembaga penjaminan yang kredibel melalui tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko *framework* yang akuntabel serta didukung dengan transparansi, profesionalisme, dan independensi.

The Company at a Glance

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), which in this annual report is also referred to as "Company", is a State-Owned Enterprise (SEO) established by the Republic of Indonesia Government on December 30, 2009 and assigned as a single window in evaluating, compiling a guarantee structure and providing guarantees for infrastructure projects under the Public Private Partnership (PPP) scheme.

As the basis for PPP implementation, the Government issued Presidential Regulation No. 38 of 2015 concerning Public Private Partnership (PPP) in the Provision of Infrastructure ("Presidential Decree No. 38/2015"). PPP implementation is intended to meet the funding needs in a sustainable manner in the provision of infrastructure through the mobilization of private funds, realize the provision of quality, effective, efficient, targeted and timely infrastructure, as well as create the investment climate that encourages special purpose vehicle participation in the provision of infrastructure based on sound business principles as a whole.

In the context PPP is able to run well, the Government of the Republic of Indonesia provides infrastructure guarantee support through the Company, to provide certainty to the private sector regarding the commitment of Government Contracting Agency (GCA) in fulfilling its financial obligations in implementing PPP agreement. The Company role is expected to be able to increase certainty in obtaining financial close of projects through increasing the creditworthiness or bankability of PPP projects, while maintaining the Government interests, especially related to contingent obligations that may arise to the Government. The Company as SOE was designed by the Government to become a credible guarantee institution through good corporate governance, accountable risk management framework, and supported by transparency, professionalism and independence.



Pada tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia membuat Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP No. 50/2016"). Melalui PP No. 50/2016, Perseroan mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur di luar skema KPBU. Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur ("PMK 101/2018").

Sejak tahun 2018, Perseroan juga mendapatkan penugasan dari Kementerian Keuangan dalam melakukan pendampingan atas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek infrastruktur dengan skema KPBU yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.08/2018 yang pada tahun 2020 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK/08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan menjadi lebih luas, tidak hanya terbatas pada penjaminan, tetapi juga dapat melakukan pendampingan, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Pada tahun 2020, untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan Penjaminan Pemerintah yang semakin meningkat dan dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai akibat pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP No. 55/2020"). Melalui PP No. 55/2020 ini, Pemerintah memberikan perluasan mandat kepada Perseroan sehingga maksud dan tujuan usaha Perseroan menjadi lebih luas, yaitu:

1. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur;
2. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional; dan
3. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Perluasan mandat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KMK/06/2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ("KMK 497/2020"), Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan maksud dan tujuan

In 2016, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 50 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation No. 35 of 2009 concerning Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Company (Persero) Establishment in the Field of Infrastructure Guarantee ("Government Regulation No. 50/2016"). Through Government Regulation No. 50/2016, the Company received an expanded mandate to be able to provide government guarantees for infrastructure projects outside of PPP scheme. This mandate expansion was followed up with the issuance of Finance Minister Regulation No. 101 of 2018 concerning Procedures for Providing and Implementing Joint Government Guarantees or Through Infrastructure Guarantee Agency against the Risk of Default from State-Owned Enterprises Conducting Loans and/or Issuing Bonds to Financing Infrastructure Provision ("Finance Minister Regulation No. 101/2018").

Since 2018, the Company has also received an assignment from the Ministry of Finance to provide assistance for the preparation and implementation of infrastructure project transactions with PPP scheme as stipulated in Minister of Finance Regulation No. 73/PMK.08/2018 which was revoked and replaced with in 2020 by Minister of Finance Regulation No. 180/PMK/08/2020 concerning Facilities for the Preparation and Implementation of Public Private Partnership's Transaction in the Infrastructure Provision. Thus, business activities scope of the Company is getting wider, not only limited to guarantees, but also can provide assistance, both from the preparation stage to the transaction.

In 2020, to support Government policies in meeting the increasing needs for Government Guarantees and in order to support state financial policies including the National Economic Recovery (NER) program as the Covid-19 pandemic impacts, the Government of the Republic of Indonesia issued the Government Regulation No. 55 of 2020 concerning the Second Amendment to Government Regulation No. 35 of 2009 concerning Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Field of Infrastructure Guarantee ("Government Regulation No. 55/2020"). Through Government Regulation No. 55/2020, the Government extends the mandate to the Company so as to broaden the aims and objectives business of the Company as follows:

1. Providing the government guarantees in the infrastructure sector;
2. Carrying out activities related to the implementation of government guarantees and other activities related to the implementation of project development that supports the national economy; and
3. Providing the government guarantees in financing the other fields apart from infrastructure following the assignments from the Government.

The expanding mandate was further followed up with the changes on the Company's Articles of Association. Through the Minister of Finance Decree No. 497/KMK/06/2020 concerning Amendments to the Articles of Association of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ("KMK 497/2020"), the Minister of Finance of the Republic of Indonesia representing the Government of the Republic of Indonesia as the Major Shareholder, approved the amendments to the Company's Articles of Association including



Perseroan, kegiatan usaha Perseroan, serta penambahan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun.

Keputusan tersebut kemudian dinyatakan dalam Akta No. 14 tanggal 19 November 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464.AH.01.02. Tahun 2020 pada tanggal 19 November 2020.

Selain itu, di tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia juga membuat beberapa peraturan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan dampak pandemi Covid-19, yang memiliki dampak pada kegiatan usaha Perseroan. Peraturan-peraturan penting tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 23/2020") sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 43/2020");
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah kepada Pelaku usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2022 ("PMK 98/2020");

changes in the purposes and objectives, business activities, and the authorized capital increase of the Company up to Rp20 trillion.

The resolution was then stated in Deed No. 14 dated November 19, 2020, made before Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notary, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0077464.AH.01.02. Tahun 2020 dated November 19, 2020.

Moreover, in 2020, the Government of the Republic of Indonesia also drafted several regulations in the context of implementing management program for the Covid-19 pandemic impacts, which impacted business activities of the Company. These important regulations include the following:

1. Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of National Economic Recovery Program in the Context of Supporting State Financial Policies for Handling the Covid-19 Pandemic and/or to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability as well as Rescue the National Economy ("Government Regulation No. 23/2020"); as amended by Government Regulation No. 43 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in the Framework of Supporting State Financial Policies for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability as well as Rescue the National Economy ("Government Regulation 43/2020");
2. The Minister of Finance Regulation No. 98/PMK.08/2020 concerning Procedures for Government Guarantees for Corporate Business Actors through Infrastructure Guarantee Agency appointed in the Context of Implementing the National Economic Recovery Program, as amended by the Minister of Finance Regulation No. 27/PMK/08/2022;



- Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada Perseroan untuk Melaksanakan Dukungan *Loss Limit* Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("KMK 523/2020"); dan
- Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada Perseroan dalam Melaksanakan Penjaminan Bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("KMK 522/2020").

Implementasi perluasan mandat dan penugasan Perseroan dimulai dengan melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dirumuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Desember 2020. Keputusan Pemegang Saham pada RUPSLB telah menyetujui dan mengesahkan perubahan RKAP Perseroan Tahun Buku 2020. Kemudian, hasil keputusan RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Dari sisi kapasitas keuangan, menindaklanjuti peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun, pada tanggal 30 Desember 2020 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) Perseroan ("PP 79/2020") yang menjadi dasar tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perseroan sebesar Rp1,57 triliun. Penambahan PMN tersebut merupakan bentuk dukungan kapasitas dari Pemerintah kepada Perseroan dalam rangka pelaksanaan program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan pemerintah kepada Perseroan. Penambahan PMN tersebut telah dicatatkan sebagai modal disetor Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.06/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("KMK 61/2021"), yang kemudian dinyatakan dalam Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 9 Maret 2021 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0167178 tanggal 16 Maret 2021.

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perseroan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah, maka pada tanggal 12 Desember 2022 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Penambahan PMN ke dalam modal saham Perseroan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Perseroan diharapkan dapat menjaga dan/atau meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan nasional maupun internasional guna meningkatkan kapasitas penjaminan serta pelaksanaan penjaminan bersama (*co-guarantee*). Peningkatan kapasitas penjaminan agar seminimal mungkin menggunakan opsi penambahan Penyertaan Modal Negara.

- The Minister of Finance Decree No. 523/KMK.08/2020 concerning Assignment to the Company to Implement Government Guarantee Loss Limit Support in the Context of Implementing the National Economic Recovery Program ("The Minister of Finance Decree No. 523/2020"); and
- The Minister of Finance Decree No. 522/KMK.08/2020 concerning Assignments to the Company in Carrying Out Joint Guarantees with Indonesian Export Financing Institutions for Corporate Business Actors in the Context of Implementing the National Economic Recovery Program ("The Minister of Finance Decree 522/2020").

The implementation of expanding mandate and assignment for the Company began with adjustments to the Company Work Plan and Budget (RKAP) which were formulated through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on December 21, 2020. The Shareholders decree at the EGMS approved and ratified changes to the Company's RKAP for 2020 Financial Year. Then, the EGMS resolutions have been set forth in Deed No. 20 December 30, 2020 made before Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, a Notary.

In terms of financial capacity, following up the authorized capital increase in the Company up to Rp20 trillion, on December 30, 2020 Government Regulation No. 79 of 2020 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's Equity Participation into the Share Capital of the Company ("Government Regulation No. 79/2020") as the basis for additional State Equity Participation (PMN) to the Company of Rp1.57 trillion. The additional PMN is manifestation of capacity support from the Government to the Company in the framework of implementing PEN program and encouraging the national economy through the government assignment to the Company. The additional PMN has been recorded as the Company's paid-in capital based on Minister of Finance Decree No. 61/KMK.06/2021 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's Equity Participation into Share Capital and Amendments to the Company (Persero)'s Articles of Association ("The Minister of Finance Decree No. 61/2021"), which are then stated in the Notarial Deed by Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., No. 4 dated March 9, 2021 and had been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Acceptance Notification of Amendment to the Articles of Association of the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-AH.01.03-0167178 dated March 16, 2021.

In the context to improve the capital structure and increase business capacity of the Company as well as to accelerate the development of Government infrastructure projects, on December 12, 2022, Government Regulation No. 53 of 2022 was stipulated. The regulation is concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Capital Participation Into the Share Capital of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. The addition of PMN into the share capital of the Company is sourced from 2022 State Revenue and Expenditure Budget as restipulated in the Details of 2022 State Revenue and Expenditure Budget. The Company is expected to be able to maintain and/or increase cooperation with national and international financial institutions to increase guarantee capacity and co-guarantee implementation. Increasing the guarantee capacity so that it uses the option of adding State Capital Participation as minimum as possible.

Perseroan sebagai salah satu *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan RI, hingga 31 Desember 2022, telah menjamin 41 proyek infrastruktur dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp487 triliun dan 8 proyek non-Infrastruktur (PEN) dengan total nilai investasi sebesar Rp63 triliun serta nilai penjaminan proyek KPBU dan penjaminan pinjaman langsung (Non-KPBU) yang dijamin sebesar Rp87 triliun dengan *gearing ratio* 6,95x dan *leveraging ratio* 61x.

Keterangan Perubahan Nama

Sejak awal pendiriannya pada tahun 2009 hingga saat ini, Perseroan tidak pernah mengalami perubahan nama.

The Company as one of *Special Mission Vehicles* (SMV) of the Ministry of Finance, until December 31, 2022, has guaranteed 41 infrastructure projects with a total project investment value of Rp487 trillion, and 8 non-infrastructure projects (PEN) with a total investment value of Rp63 trillion as well as the value of PPP project guarantees and direct loan guarantees (Non-PPP) guaranteed amounting to Rp87 trillion. Guarantee value of Rp87 trillion with a gearing ratio of 6,95x and a leveraging ratio of 61x.

Name Changes

Since established in 2009 until present, the Company has never changed the Company's name yet.





VISI, MISI, NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN VISION, MISSION, VALUES AND CULTURE OF THE COMPANY



VISI VISION



MISI MISSION

RJPP Periode/Period of 2018-2022

VISI | VISION

Menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Developing to become state-owned enterprise that is actively accelerating sustainable infrastructure development to improve the quality of life for the Indonesian people.

MISI | MISSION

Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang:

1. Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia.
2. Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.

To ensure the acceleration of fulfilling the sustainable infrastructure development by providing guarantees and added values for infrastructure development with the following purposes:

1. To generate greatest beneficial impacts for Indonesian people.
2. To maintain the Government interests in fulfilling infrastructure development through a transparent and accountable process.
3. To increase the investors trust by providing investment convenience and certainty on payment of claims for the risk of loss in the cooperation infrastructure project.

RJPP Periode/Period of 2023-2027*

VISI | VISION

Menjadi entitas penggerak yang terpercaya dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan oleh Pemerintah melalui berbagai skema inovatif.

To be a driving entity that is trusted driving entity in supporting the acceleration of infrastructure development and sustainable development by the Government through various innovative schemes.

MISI | MISSION

1. Menjalankan peran sebagai alat fiskal Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dan proses yang transparan dan akuntabel (*Shareholder Centric*).
2. Menyediakan instrumen *de-risking*, penjaminan, dan fasilitasi pengelolaan risiko untuk mendukung partisipasi badan usaha dan pemenuhan pembiayaannya secara berkelanjutan (*Customer Centric*).
3. Berperan aktif sebagai bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan dan sosial (*Dampak Kebermanfaatn*).
4. Memperkuat kapabilitas, kapasitas organisasi, dan kualitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya visi Perseroan (*Fokus Pengembangan Kapabilitas dan Kapasitas Internal*).

1. Performing the role of a fiscal tool Government in implementing sustainable development through risk management and transparent and accountable process (*Shareholder Centric*).
2. Provide *de-risking* instruments, guarantee, and facilitation of risk management risk management facilitation to support the participation of participation of special purpose vehicle and the fulfillment offinancing in a sustainable manner (*Customer Centric*).
3. Play an active role as part of ecosystem of national development that is ecosystem by paying attention to environmental and social principles (*Impact Benefit*).
4. Strengthening the capability, capacity organization, and the quality of human resources to human resources to support the achievement of vision of the Company (*Development Focus Internal Capability and Capacity Development*).

* Visi dan Misi Perseroan tersebut di atas ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB) Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode 2023-2027. The Company's Vision and Mission as mentioned above were determined on December 15, 2022 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Approval of the Company's Long-Term Plan for the period 2023-2027.

Pengesahan Manajemen Kunci atas Visi dan Misi serta Kajian Periodik Visi dan Misi

Visi dan Misi Perseroan pada RJPP periode 2018-2022 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode 2018-2022.

Pada tahun 2022, Direksi dan Dewan Komisaris mengkaji dan meninjau Visi dan Misi Perseroan, khususnya dalam kaitannya dengan proses penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2023 - 2027. Peninjauan visi dan misi ini direalisasikan dengan adanya perubahan visi dan misi Perseroan yang akan mulai berlaku sesuai dengan periode RJPP Perseroan tahun 2023 - 2027.

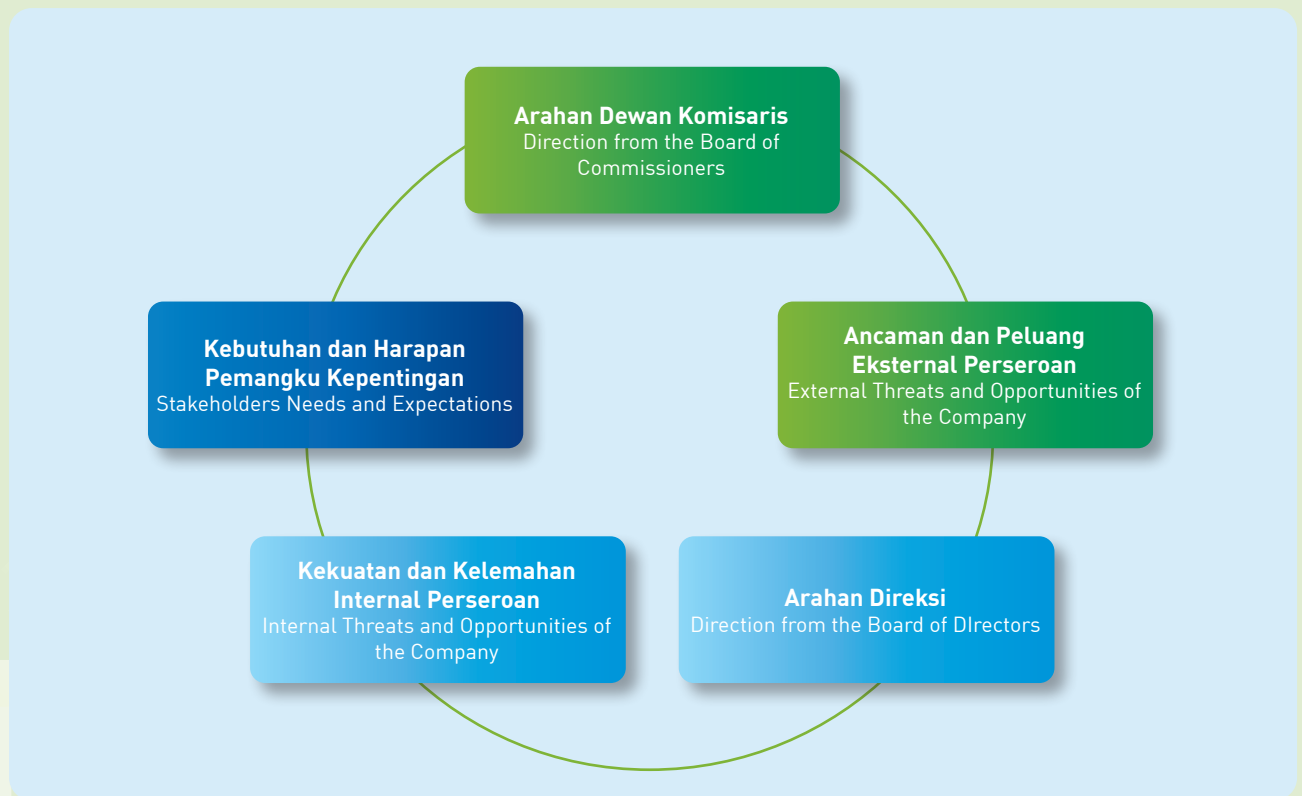
Key Management Approval for Vision and Mission as well as Its Periodic Review

The Company's Vision and Mission on the 2018-2022 RJPP period were set on December 27, 2017 in the General Meeting of Shareholders (GMS) Approval of Company Long-Term Plan of 2018-2022 period.

In 2022, the Board of Directors and the Board of Commissioners reviewed and review the Company's Vision and Mission, particularly in relation to the process of preparing the Company's Long-Term Plan Period 2023 - 2027. The review of the vision and mission is realized with the changes in the Company's vision and mission which will come into effect in accordance with the Company's RJPP period 2023 - 2027.

Skema Penyusunan Visi dan Misi

Scheme of Vision and Mission Formulation





Nilai-Nilai Budaya

Perseroan telah memiliki nilai-nilai budaya yang dikenal sebagai InTIME, yakni *Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* dan *Excellence*.






Nilai-nilai budaya tersebut diharapkan menjadi prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar oleh setiap insan Perseroan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, agar selanjutnya dapat menjadi budaya yang hidup dalam organisasi Perseroan.

Cultural Values

The Company already has cultural values known as InTIME, namely *Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* and *Excellence*.

These cultural values are expected to lead into principles that are believed to be good and true by every Company personnel in carrying out their roles and responsibilities, so as to further become a living culture within the Company's organization.

In TIME

INTEGRITY Integritas 	THINK BIG Berpikiran Luas 	TEAMWORK Kerja Sama 	MUTUAL TRUST Saling Percaya 	EXCELLENCE Keunggulan 
<ul style="list-style-type: none"> › Bekerja dengan standar etika tertinggi. › Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan. › Mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain. › Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas. › Menaati aturan Perseroan. › Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan. 	<ul style="list-style-type: none"> › Memiliki pemikiran luas dan mutakhir. › Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi Perseroan dan bagi pemangku kepentingan. › Menggali secara terus-menerus ide-ide baru untuk perkembangan Perseroan. › Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> › Beroperasi sebagai sebuah tim. › Memberi kontribusi keterampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim. › Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perseroan. 	<ul style="list-style-type: none"> › Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal Perseroan maupun dengan mitra Perseroan. › Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan. 	<ul style="list-style-type: none"> › Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan. › Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus. › Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan.
<ul style="list-style-type: none"> › Upholding the highest ethical standards on duty. › Being honest with yourself and others in all matters. › Prioritizing the Company interests above personal, groups and/or other parties interests. › Maintaining commitment on duty. › Complying with the Company regulations. › Taking responsible for all activities. 	<ul style="list-style-type: none"> › Spacious and up-to-date thinking. › Considering various alternatives for better results for the Company and for the stakeholders. › Continuously exploring new ideas for the Company development. › Being open to various developments in the environment for the best results without leaving the principles of good corporate governance. 	<ul style="list-style-type: none"> › Operate as a team. › Contributing skills and knowledge for the team benefit. › Prioritizing the team interests to achieve the Company goals. 	<ul style="list-style-type: none"> › Upholding business ethics with all internal components of the Company and with the partners. › Consistently fulfilling the promised service standards. 	<ul style="list-style-type: none"> › Committed to being superior in carrying out whatever is undertaken. › Striving for continuous improvement. › Having in-depth knowledge to support activities and obtain results beyond expectations.

Penerapan Budaya Perusahaan

Penerapan Tata Nilai dan Budaya Perusahaan di Perseroan menjadi tanggung jawab seluruh insan Perseroan, mulai dari jajaran Dewan Komisaris dan Direksi hingga karyawan.

Implementation of Corporate Culture

The implementation of Corporate Values and Culture at the Company is the responsibility of all Company personnel, starting from the Board of Commissioners and the Board of Directors to the employees.

MAKNA LOGO PERUSAHAAN MEANING OF CORPORATE LOGO

Brand/Logo

Logo Perseroan diciptakan dengan ide dasar merujuk pada kerajinan karya seni asli penduduk Indonesia, yaitu kerajinan anyaman yang merepresentasikan mandat Perseroan untuk menjadi jembatan penggerak percepatan pembangunan infrastruktur.



Warna biru pada logo mengandung makna:

Trust (terpercaya), *responsibility* (tanggung jawab) dan *strength* (kekuatan). Warna tersebut merepresentasikan Perseroan sebagai perusahaan yang terpercaya, bertanggung jawab dan profesional untuk mewujudkan visi Perseroan menjadi entitas penggerak yang terpercaya dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan oleh Pemerintah melalui masberbagai skema inovatif.

Warna hijau pada logo mengandung makna:

Growth (pertumbuhan), *financial* (keuangan), *harmony* (keseimbangan, keselarasan) dan *environment* (lingkungan; masyarakat). Warna tersebut sejalan dengan misi Perseroan untuk menjadi entitas penggerak yang terpercaya dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan oleh Pemerintah melalui masberbagai skema inovatif, yang:

1. Menjalankan peran sebagai alat fiskal Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dan proses yang transparan dan akuntabel (*Shareholder Centric*)
2. Menyediakan instrumen *de-risking*, penjaminan, dan fasilitasi pengelolaan risiko untuk mendukung partisipasi badan usaha dan pemenuhan pembiayaannya secara berkelanjutan (*Customer Centric*)
3. Berperan aktif sebagai bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan dan sosial (Dampak Kebermanfaatn)
4. Memperkuat kapabilitas, kapasitas organisasi, dan kualitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya visi Perseroan (Fokus Pengembangan Kapabilitas dan Kapasitas Internal)

Brand/Logo

The Company's logo was created with the basic idea of referring to the original Indonesian art crafts, namely woven crafts which represent the Company's mandate to become a bridge encouraging the acceleration of infrastructure development.

The blue color in the logo has the following means:

Trusted, responsibility, and strength. This color represents the Company as a company that is trusted, responsible and professional in realizing the Company's vision to be a driving entity that is trusted driving entity in supporting the acceleration of infrastructure development and sustainable development by the Government through various innovative schemes"

The green color in the logo has the following means:

Growth, financial, balance/alignment and environment/society. This color is in line with the Company's mission to ensure the acceleration of fulfilling the sustainable infrastructure development by providing guarantees and added value for infrastructure development with the following purposes:

1. Performing the role of a fiscal tool Government in implementing sustainable development through risk management and transparent and accountable process (*Shareholder Centric*)
2. Provide *de-risking* instruments, guarantee, and facilitation of risk management risk management facilitation to support the participation of participation of special purpose vehicle and the fulfillment offinancing in a sustainable manner (*Customer Centric*)
3. Play an active role as part of ecosystem of national development that is ecosystem by paying attention to environmental and social principles (*Impact Benefit*)
4. Strengthening the capability, capacity organization, and the quality of human resources to human resources to support the achievement of vision of the Company (*Development Focus Internal Capability and Capacity Development*)



JEJAK LANGKAH MILESTONE

2009

Pembentukan Perseroan

Pada 30 Desember 2009 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) resmi didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

The Company Establishment

On December 30, 2009 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) was officially established by the Government of the Republic of Indonesia as a State-Owned Enterprise (SOE) through the Republic of Indonesia's State Capital Participation of Rp1 trillion following the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Field of Infrastructure Guarantee.

2010

Peresmian Operasional Perseroan

Pada 11 Mei 2010 Perseroan resmi beroperasi dengan mandat menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur berskema KPBU sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Perpres No. 78/2010 dan PMK 260/2010

Pada 21 Desember 2010 diterbitkan Perpres No. 78/2010 dan 31 Desember 2010 diterbitkan PMK No. 260/2010 yang menjadi pedoman bagi Perseroan untuk menjamin proyek infrastruktur dan mengokohkan keberadaan Perseroan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).

Perpres No. 88/2010

Pemerintah RI menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) di IIGF sebesar Rp1 Triliun, merujuk pada PP No.88/2010.

Inauguration of the Company Operation

On May 11, 2010 the Company officially operated with the mandate to provide guarantees for infrastructure projects under the PPP scheme as one of the efforts to accelerate infrastructure development in Indonesia.

Presidential Regulation No. 78/2010 and Minister of Finance Regulation No. 260/2010

On December 21, 2010, Presidential Decree No. No. 78/2010 and on December 31, 2010, Minister of Finance Regulation No. 260/2010 was issued as the guideline for the Company to guarantee infrastructure projects and strengthen the Company existence as an Infrastructure Guarantee Agency (BUPI).

Perpres No. 88/2010

Pemerintah RI menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) di IIGF sebesar Rp1 Triliun, merujuk pada PP No.88/2010.

2011

MOU antara Perseroan dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Pada 24 Januari 2011 dilaksanakan penandatanganan MOU antara Perseroan dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam rangka mempromosikan investasi infrastruktur melalui berbagai kegiatan bersama.

Acuan Alokasi Risiko

Pada 31 Maret 2011 Perseroan menerbitkan Dokumen Acuan Alokasi Risiko Edisi Pertama yang berisi acuan mengenai kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

Penandatanganan Penjaminan Proyek PLTU Jawa Tengah

Pada 6 Oktober 2011 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah. Proyek ini merupakan proyek dengan skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah dengan menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh Perseroan dan Kementerian Keuangan RI.

MOU between the Company and Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

On January 24, 2011, Perseroan and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) signed MOU in the context to promote infrastructure investment through various joint activities.

Risk Allocation Reference

On March 31, 2011 Perseroan published the First Edition of the Risk Allocation Reference Document containing references to the categories and distribution of infrastructure risk which will be the reference for parties involved in infrastructure projects under the PPP scheme.

Signing of Guarantee for Central Java SPP Project

On October 6, 2011 Perseroan signed a Guarantee Agreement for Central Java 2 x 1,000 MW Steam Power Plant (SPP) project in Batang, Central Java. This project is the first PPP scheme project that was successfully realized by the Government using joint guarantee facility by the Company and the Indonesian Ministry of Finance.



2012



• **Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan ICIEC**

Pada 20 April 2012 Perseroan dan Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credits (ICIEC) menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangkaian acara Asia Finance and Risk Mitigation Forum 2012 di Makati City, Filipina.

• **IIGF Institute**

Peluncuran IIGF Institute dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perseroan dengan 3 (tiga) perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada tentang program peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penyediaan infrastruktur.

• **Signing of Memorandum of Understanding with ICIEC**

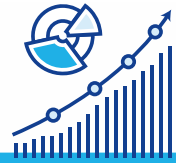
On April 20, 2012 the Company and the Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credits (ICIEC) signed the Memorandum of Understanding in the 2012 Asia Finance and Risk Mitigation Forum series of events in Makati City, Philippines.

• **IIGF Institute**

Launched IIGF Institute and signed the Memorandum of Understanding between the Company and 3 (three) tertiary institutions, namely the University of Indonesia, the Bandung Institute of Technology and Gadjah Mada University regarding programs to increase the understanding and capacity of stakeholders in infrastructure provision.



2013



• **Peningkatan Kapitalisasi Penjaminan dan Pengakuan Peringkat Kredit**

Pada awal tahun 2013 Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari World Bank senilai USD25 juta dan implementasi *Co-Guarantee* dengan MIGA senilai USD50 juta untuk peningkatan kapasitas penjaminan. Di samping itu Perseroan juga mendapatkan Peringkat Kredit BBB- (*outlook* stabil) dari Fitch Rating, lembaga pemeringkat keuangan internasional, setara dengan peringkat Pemerintah Indonesia yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan kinerja keuangan Perseroan.

• **Indonesia Infrastructure Roundtable II (IRR)**

Pada 28 Februari 2013 Perseroan melalui IIGF Institute bersama dengan UI, ITB dan UGM menyelenggarakan Indonesia *Infrastructure Roundtable II* dengan topik "Investasi Sektor Swasta pada Bidang Air Minum" di Kabupaten Tangerang.

• **Increased the Guarantee Capitalization and Recognition of Credit Ratings**

In early 2013, the Company obtained a loan facility from the World Bank worth USD25 million and the implementation of *Co-Guarantee* with MIGA worth USD50 million to increase guarantee capacity. Furthermore, the Company also received BBB- (stable outlook) Credit Rating from Fitch Rating, an international financial rating agency, equivalent to Indonesia Government rating which indicated recognition of the capacity and financial performance of the Company.

• **Indonesia Infrastructure Roundtable II (IRR)**

On February 28, 2013, the Company through the IIGF Institute together with UI, ITB and UGM held the Indonesia Infrastructure Roundtable II with the topic "Private Sector Investment in the Water Supply Sector" in Tangerang Regency.

2014

• **Kerja sama dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Hasanuddin**

Pada 18 Agustus 2014 dan 17 Oktober 2014 Perseroan melalui IIGF Institute menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Hasanuddin, untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kapasitas serta kemitraan dalam bina lingkungan, sosial dan masyarakat.

• **Seminar Nasional Infrastruktur untuk Rakyat**

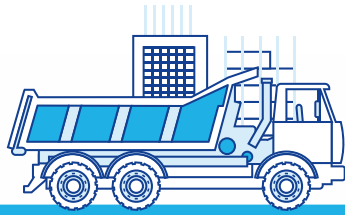
Perseroan bekerja sama dengan UI, ITB, dan UGM menyelenggarakan seminar nasional bertajuk "Infrastruktur untuk Rakyat, Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar" sebagai bentuk sosialisasi hasil acara Indonesia *Infrastructure Roundtable II* tahun 2013-2014 yang disponsori oleh Perseroan.

• **Cooperation with Sriwijaya University and Hasanuddin University**

On 18 August 2014 and 17 October 2014 the Company through the IIGF Institute signed a Memorandum of Understanding with Sriwijaya University and Hasanuddin University, for cooperation in the fields of education, research, community service, capacity building and partnerships in environmental, social and community development.

• **National Seminar on Infrastructure for the People**

The Company in collaboration with UI, ITB, and UGM held a national seminar entitled "Infrastructure for the People, Return of the State Role in Basic Infrastructure Provision" as manifestation of socialization of the 2013-2014 Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) event results sponsored by the Company.



2015

2016

• **Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015**

Pada 20 Maret 2015 diterbitkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai upaya memperluas sektor proyek infrastruktur berskema KPBU yang dapat dijamin Perseroan menjadi 19 sektor termasuk sektor infrastruktur sosial.

• **PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)**

Pada 28 Agustus 2015 dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan proyek PLTU Jawa Tengah-Batang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, PT PLN, Perseroan dan investor pengembang. Proyek ini merupakan proyek KPBU sektor listrik pertama yang akan memperoleh penjaminan dari Perseroan.

• **Pembentukan UNIID**

Pada 16 Desember 2015 Perseroan melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja Antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Pembentukan jaringan ini menjadi forum bagi para akademisi untuk berkontribusi mendorong pengembangan infrastruktur nasional.

• **Presidential Regulation No. 38 of 2015**

The issuance of Presidential Regulation No. 38 of 2015 on March 20, 2015 concerning Public Private Partnership Project in the Infrastructure Provision as the effort to expand the PPP scheme infrastructure project sector that can be guaranteed by the Company to 19 sectors including social infrastructure sector.

• **Batang Central Java SPP (CJPP)**

On August 28, 2015, President Joko Widodo and the Minister of Finance, Minister of SOE, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Governor of Central Java, Regent of Batang, PT PLN, the Company and developer investors held the groundbreaking for the construction of the Central Java-Batang SPP project. This project is the first electricity sector in PPP project that receives guarantee from the Company.

• **UNIID Establishment**

On December 16, 2015 the Company through the IIGF Institute facilitated the establishment of the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). The formation of this network is a forum for academics to contribute to encouraging the development of national infrastructure.

• **Proyek Palapa Ring Barat**

Pada 29 Februari 2016 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Barat oleh Perseroan dan PT Palapa Ring Barat selaku Badan Usaha, dan antara Perseroan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK.

Pada 25 Juli 2016 dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Barat.

• **Proyek Palapa Ring Tengah**

Pada 4 Maret 2016 dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Barat oleh Perseroan dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku Badan Usaha dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK.

Pada 29 September 2016 dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Tengah.

• **Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 4 Jalan Tol**

Perseroan menandatangani perjanjian penjaminan 4 (empat) proyek di sektor Jalan Tol yaitu Jalan Tol Batang- Semarang, Balikpapan- Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung.

• **Financial Close PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW**

Pada 6 Juni 2016 telah dicapai tahap *financial close* untuk proyek PLTU Batang Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 MW dengan nilai investasi sekitar USD4 miliar (±Rp52 triliun). Proyek ini telah mendapatkan penjaminan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan bersama dengan Perseroan.

• **Proyek SPAM Umbulan**

Pada 21 Juli 2016 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Meta Adhya Tirta dan Perjanjian Regres antara Perseroan dengan Gubernur Jawa Timur dalam rangka menjamin Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Pada 30 Desember 2016 dilaksanakan *Financial Close* Proyek SPAM Umbulan.

• **Sinergi Pendampingan Hukum**

Pada 2 Agustus 2016 Perseroan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk saling bersinergi dalam memberikan pendampingan hukum demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

• **Perluasan Mandat Perseroan**

Pada 7 November 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Diterbitkannya perubahan Peraturan ini memperluas mandat Perseroan untuk dapat menjamin proyek-proyek infrastruktur di luar skema KPBU.

2017

- **West Palapa Ring Project**

On February 29, 2016 the Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the West Palapa Ring project was signed by the Company and PT Palapa Ring Barat as Special Purpose Vehicle, and between the Company and the Ministry of Communication and Informatic as Project Government Contracting Agency (GCA). On July 25, 2016, Financial Close for the West Palapa Ring Project was held.

- **Middle Palapa Ring Project**

On March 4, 2016 the Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the West Palapa Ring project were signed by the Company with PT Len Telekomunikasi Indonesia as the Special Purpose Vehicle and the Ministry of Communication and Informatics as Project Government Contracting Agency (GCA). On September 29, 2016, Financial Close for the Middle Palapa Ring Project was held.

- **Signing of Guarantee Agreement for 4 Toll Roads**

The Company signed guarantee agreement for 4 (four) projects in the toll road sector, namely Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang and Manado-Bitung Toll Roads.

- **Financial Close for Central Java 2 x 1,000 MW SPP**

On June 6, 2016, the financial close phase was reached for Batang Central Java SPP project with a capacity of 2 x 1,000 MW with an investment of around USD4 billion (± Rp52 trillion). This project has received a government guarantee of Indonesia through the Ministry of Finance together with the Company.

- **Umbulan SPAM Project**

On July 21, 2016, Guarantee Agreement was signed between the Company and PT Meta Adhya Tirta and a Recourse Agreement between the Company and the Governor of East Java in order to guarantee the Umbulan Drinking Water Supply System (SPAM) Project. On December 30, 2016 the Financial Close for Umbulan SPAM Project was held.

- **Synergy of Legal Assistance**

On August 2, 2016, the Company signed a Memorandum of Understanding with the Deputy Attorney General and State Administration (Jamdatun) to work together in providing legal assistance to accelerate infrastructure development in Indonesia.

- **Mandate Expansion of the Company**

On November 7, 2016, Government Regulation No. 50 of 2016 was amended to Government Regulation No. 35 of 2009 concerning Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Field of Infrastructure Guarantee. The amendment issuance to this regulation expanded the mandate for the Company to be able to guarantee infrastructure projects outside of the PPP scheme.

- **Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 6 Jalan Tol**

Pada 22 Februari 2017 dan Desember 2017 Perseroan menandatangani perjanjian penjaminan sejumlah total 6 (enam) proyek Jalan Tol yaitu: (1) Cileunyi-Sumedang-Dawuan; (2) Serang-Panimbang; (3) Jakarta- Cikampek II Elevated (4); Krian-Legundi-Bunder-Manyar; (5) Probolinggo- Banyuwangi; dan (6) Jakarta-Cikampek II Selatan.

- **Financial Close Proyek Palapa Ring Timur**

Pada 29 Maret 2017 *Financial Close* Proyek Palapa Ring Timur yang melengkapi *Financial Close* Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah yang sebelumnya telah dicapai di tahun 2016.

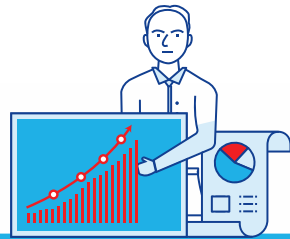
- **Signing of Guarantee Agreement for 6 Toll Roads**

On February 22, 2017 and December 2017, the Company signed guarantee agreements for a total of 6 (six) Toll Road projects, namely: (1) Cileunyi-Sumedang-Dawuan; (2) Serang-Panimbang; (3) Jakarta-Cikampek II Elevated (4); Krian-Legundi-Bunder-Manyar; (5) Probolinggo-Banyuwangi; and (6) South Jakarta-Cikampek II.

- **Financial Close for East Palapa Ring Project**

On March 29, 2017, the Financial Close for the East Palapa Ring Project complemented the Financial Close of the West Palapa Ring and Central Palapa Ring Projects which had previously been achieved in 2016.





2018

2019

- **Proyek SPAM Bandar Lampung**

Pada 14 Februari 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Regres proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung.

- **Proyek SPAM Semarang Barat**

Pada 23 November 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat.

- **Pinjaman Proyek KEK Mandalika**

Pada 28 Desember 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sehubungan dengan Penjaminan Pinjaman Proyek Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok.

- **Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU**

Perseroan mendapatkan mandat dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU, 1) Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan, 2) Jalan Lintas Timur Sumatra Selatan, 3) Jalan Lintas Timur Riau yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, dan 4) Rumah Sakit Kanker Dharmais yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

- **Bandar Lampung SPAM Project**

On February 14, 2018, the Company signed Guarantee and Recourse Agreement for Bandar Lampung Drinking Water Supply System (SPAM) project.

- **West Semarang SPAM Project**

On November 23, 2018, the Company signed Guarantee Agreement with PT Air Semarang Barat and a Recourse Agreement with PDAM Tirta Moedal for the West Semarang SPAM Project.

- **Mandalika SEZ Project Loan**

On December 28, 2018, the Company signed Guarantee Agreement with PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) in connection with Loan Guarantee for the Development of Tourism Infrastructure Facilities for Mandalika Special Economic Zone Tourism Project, Lombok.

- **Assignment and Implementation of PPP Project Facilities**

The Company received mandate from the Ministry of Finance to implement facilities in the context of Project Preparation and Transaction Advisory in PPP Projects, 1) Makassar-Parepare Public Railway developed by the Ministry of Transportation, 2) South Sumatra's East Cross Road, 3) Riau East Cross Road developed by the Ministry of Public Works and Human Settlements, and 4) Dharmais Cancer Hospital which was developed by the Ministry of Health.

- **Penandatanganan Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU RSUD Zainoel Abidin Aceh**

Pada 8 Januari 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penugasan Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD Zainoel Abidin antara Dirjen PPR dengan Direktur Utama Perseroan. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Induk Proyek Infrastruktur RSUD Zainoel Abidin antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Pemerintah Daerah Aceh pada tanggal 4 Desember 2018 serta terbitnya Keputusan Menteri Keuangan untuk penugasan khusus kepada Perseroan pada tanggal 5 Desember 2018 untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

- **Perseroan Memberikan Penjaminan pada Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare**

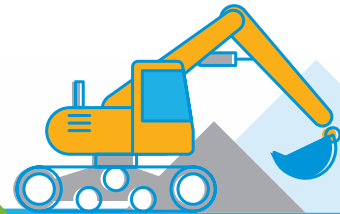
Pada 5 April 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku PJPK dengan PT Celebes Railway Indonesia (CRI) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Proyek ini berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor transportasi perkeretaapian sekaligus merupakan proyek KPBU pertama sektor transportasi di lingkup Kementerian Perhubungan.

- **Perseroan Memberikan Penjaminan pada Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia**

Pada 3 Mei 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Regres proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai PJPK. SATRIA merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang diberikan penjaminan pemerintah melalui Perseroan setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar Indonesia.

- **Perseroan Memberikan Penjaminan Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang – Demak**

Pada 23 September 2019 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ruas Jalan Tol Semarang-Demak antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PPSD) yang merupakan konsorsium dari Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Misi Mulia Metrikal.



2020

- **Signing of the Assignment Agreement and PPP Project Facility Implementation Agreement at RSUD Zainoel Abidin Aceh**

On January 8, 2019 the Public Private Partnership (PPP) for Zainoel Abidin Hospital was signed between the Director General of PPR and President Director of the Company. The agreement signing is a follow-up to Zainoel Abidin Hospital Infrastructure Project Master Agreement between the Ministry of Finance and the Regional Government of Aceh on December 4, 2018 and the issuance of Minister of Finance Decree for special assignment to the Company on December 5, 2018 to implement the facility in the context of project preparation and transaction advisory.

- **The Company Provides Guarantees for the Makassar – Parepare Railway PPP Project**

On April 5, 2019, PPP Agreement was signed between the Ministry of Transportation c.q the Directorate General of Railways as the Government Contracting Agency (GCA) and PT Celebes Railway Indonesia (CRI) as the Special Purpose Vehicle (SPV). This project is under the Public Private Partnership (PPP) scheme in the railway transportation sector and is the first PPP project in the transportation sector within the Ministry of Transportation.

- **The Company Provides Guarantees for the Republic of Indonesia Multifunctional Satellite PPP Project**

On May 3, 2019, Guarantee Agreement was signed between the Company and PT Satelit Nusantara Tiga as the Special Purpose Vehicle (SPV) and the Regress Agreement for the Republic of Indonesia Multifunction Satellite PPP project (SATRIA) with the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia as the Government Contracting Agency (GCA). SATRIA is the fourth PPP project in the telecommunications sector provided government guarantees through the Company after the West, Central and East Palapa Ring Package which purposes to improve connectivity of the Disadvantaged, Frontier and Outermost regions throughout Indonesia.

- **The Company Provided Guarantee for PPP Project of Semarang – Demak Toll Road Section**

On September 23, 2019, PPP agreement was signed for the Public Private Partnership (PPP) project for Semarang-Demak Toll Road Section between the Ministry of Public Works and Human Settlements as the Person in Charge of the Government Contracting Agency (GCA) and the Special Purpose Vehicle (SPV) of PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PPSD) as the consortium of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Misi Mulia Metrikal.

- **Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU**

Pada 8 Januari 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penugasan Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD Zainoel Abidin antara Dirjen PPR dengan Direktur Utama Perseroan.

- **Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare**

Pada 5 April 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Celebes Railway Indonesia dan Perjanjian Regres dengan Menteri Perhubungan untuk penjaminan Proyek KPBU Kereta Api Makassar-Parepare. Proyek ini merupakan proyek KPBU pertama untuk sektor transportasi.

- **Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia**

Pada 3 Mei 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Regres proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai PJPK.

- **Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang-Demak**

Pada 23 September 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak dan Perjanjian Regres dengan Menteri PUPR untuk penjaminan Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang-Demak.

- **Assignment and Implementation of PPP Project Facilities**

On January 8, 2019, Public Private Partnership (PPP) Project Assignment Agreement for Zainoel Abidin Hospital was signed between the Director General of PPR and President Director of the Company.

- **Makassar – Parepare Railway PPP Project**

On April 5, 2019, the Guarantee Agreement was signed between the Company and PT Celebes Railway Indonesia and a Recourse Agreement with the Minister of Transportation for guaranteeing the Makassar-Parepare Railway PPP Project. This project is the first PPP project in the transportation sector.

- **PPP Project for Republic of Indonesia Multifunctional Satellite**

On May 3, 2019, the Guarantee Agreement was signed between the Company and PT Satelit Nusantara Tiga as the Special Purpose Vehicle (SPV) and the Regress Agreement for the Republic of Indonesia Multifunction Satellite PPP project (SATRIA) with the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia as the Government Contracting Agency (GCA).

- **PPP Project for Semarang-Demak Toll Road Section**

On September 23, 2019, Guarantee Agreement was signed between the Company and PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak and a Recourse Agreement with the Minister of Public Works and Human Settlements for guaranteeing the PPP Project for Semarang-Demak Toll Road Section.



2021

• **Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Kelistrikan di Jawa Timur dan Bali**

Pada 10 Februari 2021 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Perseroan atas Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) kepada PT PLN untuk pembiayaan proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali.

• **Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Korporasi**

Pada 16 Februari 2021 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi yang dilakukan oleh Direktur Utama Perseroan dan Direktur Eksekutif LPEI.

• **Proyek KPBU *Unsolicited* SPAM Jatiluhur I**

Pada 18 Februari 2021 dilaksanakan kegiatan seremonial penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk Proyek SPAM Jatiluhur I yang merupakan Proyek KPBU *Unsolicited*.

• **Financial Close Proyek Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatra Selatan**

Pada 22 Februari 2021 dilaksanakan *Financial Close* Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel yang merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan Non-tol di Indonesia dan merupakan proyek KPBU pertama yang mendapatkan pendanaan Syariah.

• **Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Pasuruan Jawa Timur**

Pada 18 Februari 2021 dilaksanakan kegiatan seremonial penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk Proyek SPAM Jatiluhur I yang merupakan Proyek KPBU *Unsolicited*.

• **Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau**

Pada 12 April 2021 Perseroan resmi memberikan penjaminan pada Proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau yang merupakan proyek kedua di sektor jalan Non-tol di Indonesia.

• **Proyek KPBU *Unsolicited* SPAM Karian – Serpong (*Unsolicited*)**

Pada 29 April 2021 dilaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek SPAM Karian – Serpong dimana menjadi proyek ke-6 di sektor Air Minum yang diberikan penjaminan oleh Perseroan.

• **Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa (*Unsolicited*)**

Pada 6 Desember 2021 dengan disaksikan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Perseroan melaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek dengan skema KPBU *unsolicited* di sektor jalan dan jembatan yaitu proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.

• **Electricity Distribution Network Development Project in East Java and Bali**

On February 10, 2021, the Government Guarantee Agreement through the Ministry of Finance and the Company was signed for Direct Lending from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) to PT PLN for financing Distribution Network Development project at East Java and Bali.

• **Government Guarantees for Corporate Actors**

On February 16, 2021, PPP Agreement related to the Implementation of Government Guarantees for Corporate Actors was signed by President Director of the Company and Executive Director of LPEI.

• **Unsolicited PPP Project for Jatiluhur I SPAM**

On February 18, 2021, ceremonial activity was held to sign agreement related to the Government guarantee for Jatiluhur I SPAM Project, which was an *Unsolicited* PPP Project.

• **Financial Close for South Sumatra East Cross Road (Jalintim) Project**

On February 22, 2021, Financial Close for PPP Project of Jalintim Preservation was carried out in South Sumatra, which was the first PPP project in the Non-toll road sector in Indonesia and is the first PPP project to receive Sharia funding.

• **PPP Project for Umbulan Regional SPAM in Pasuruan, East Java**

On February 18, 2021, a ceremonial activity was held to sign agreement related to the Government guarantee for Jatiluhur I SPAM Project, which was an *Unsolicited* PPP Project.

• **Sumatra East Cross Road Preservation Project in Riau Province**

On April 12, 2021, the Company officially provided guarantee for Sumatra East Cross Road Preservation PPP Project in Riau Province, which was the second project in the non-toll road sector in Indonesia.

• **Unsolicited PPP Project for Karian – Serpong SPAM**

On April 29, 2021, an agreement was signed regarding Government guarantees for Karian - Serpong SPAM project which was the 6th project in the Drinking Water sector provided guarantee by the Company.

• **Callender Hamilton (CH) Bridge Replacement and/or Duplication Project in Java Island (*Unsolicited*)**

On December 6, 2021, witnessed directly by the Minister of Public Works and Human Settlements, Basuki Hadimuljono, the Company signed agreement related to government guarantees for projects with an *unsolicited* PPP scheme in the road and bridge sector, namely the Callender Hamilton (CH) Bridge Replacement and/or Duplication project on Java Island.

2022



• **Penjaminan Proyek KPBU**

- Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya – Cilacap
- Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi
- Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun
- *Proving Ground* Bekasi

• **Penjaminan Proyek Non-KPBU**

- 1 Proyek *Direct Lending*
Penjaminan Pinjaman Proyek *Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java – Western and Central Java*
- 1 Proyek Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan PLTU Tahap III (PLTU Timor-1)
- 6 Penjaminan BUMN dalam rangka PEN
 - > Penjaminan Obligasi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2022
 - > Penjaminan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2022
 - > Penjaminan Pinjaman Pengadaan Bus Listrik KTT G20 dan BTS Bandung dan Surabaya PT Industri Kereta Api (Persero)
 - > Penjaminan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Perum DAMRI
 - > Penjaminan Kredit Modal Kerja PT Len Industri (Persero)
 - > Penjaminan Kredit Modal Kerja Talangan Pembayaran Dana Kompensasi dan Subsidi BBM dan LPG 3 Kg PT Pertamina (Persero)

• **Presidensi G20**

Perseroan berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 sebagai *co-host* T20 TF8 dalam rangka percepatan *economic recovery* melalui penyediaan infrastruktur publik yang berkelanjutan dengan tema “*Stronger Economic Recovery through Inclusive, Resilient, and Greener Infrastructure Investment and Financing*”

• **PPP Project Guarantee**

- Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Toll Road
- Gilimanuk – Mengwi Toll Road
- Street lighting equipment (APJ) at Madiun Regency
- *Proving Ground* Bekasi

• **Guarantee for Non-PPP Projects**

- 1 *Direct Lending* Project
Guaranteed Sustainable and Reliable Project Loans Energy Access Program in Java – Western and Central Java
- 1 Electricity Infrastructure Acceleration Project Phase III CFPP (Timor-1 CFPP)
- 6 SOE Guarantees in terms of PEN
 - > Bond Guarantee IV for PT Waskita Karya (Persero) Tbk in 2022
 - > Guarantee of Sukuk Mudharabah I for PT Waskita Karya (Persero) Tbk 2022
 - > Loan Guarantee for the Procurement of Electric Buses for the G20 Summit and BTS for Bandung and Surabaya PT Industri Kereta Api (Persero)
 - > Guarantee of Working Capital Loans and Investment Loans for Perum DAMRI
 - > Guarantee of Working Capital Loans for PT Len Industri (Persero)
 - > Guarantee of Working Capital Loans Payment of Compensation Funds, Fuel Subsidies and 3 Kg LPG of PT Pertamina (Persero)

• **G20 Presidency**

The Company actively participated in supporting the implementation G20 Presidency as *co-host* of T20 TF8 in the context of accelerating *economic recovery* through the provision of sustainable public infrastructure sector with the theme “*Stronger Economic Recovery through Inclusive, Resilient, and Greener Infrastructure Investment and Financing*”



BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA BUSINESS LINE, PRODUCTS, AND SERVICES

Kegiatan Usaha Perseroan Menurut Anggaran Dasar dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk:

1. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) di bidang infrastruktur;
2. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah; dan
3. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat maupun daerah.

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai Anggaran Dasar tersebut, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

No. Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

- | | |
|---|--|
| 1 | Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial pemerintah dalam skema perjanjian kerja sama Pemerintah dan Badan usaha dalam proyek infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontingensi Pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit (<i>creditworthiness</i>) proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang infrastruktur. |
| 2 | Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial pemerintah dalam proyek infrastruktur. |
| 3 | Pemberian penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat dari: <ul style="list-style-type: none"> › Pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan; dan › Penerbitan surat utang atau obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya. |
| 4 | Pemberian penjaminan atas risiko gagal bayar kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat dari: <ul style="list-style-type: none"> › Pelaksanaan perjanjian-perjanjian dengan lembaga keuangan; dan › Penerbitan surat utang/obligasi. |
| 5 | Pemberian penjaminan atas risiko finansial lainnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat perolehan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial dalam bentuk selain pinjaman dan surat utang/obligasi. |

Business Activities of the Company According to the Articles of Association and Business Activities

Article 3 of the Company's Articles of Association states that the purposes and objectives of the Company are to the following:

1. Providing sovereign guarantees in the infrastructure sector;
2. Providing sovereign guarantees in financing in other sectors apart from infrastructure following the Government assignments; and
3. Carrying out activities related to the implementation of government guarantees and other activities related to the implementation of project development that supports the national economy both at the central and regional levels.

In the framework to achieve the purposes and objectives of the Company following the Articles of Association, the Company undertakes the following business activities:

Business Activity Based on Articles of Association

- | |
|--|
| Providing guarantee for the government's financial obligations in the Public Private Partnership scheme between the Government and Special Purpose Vehicle in infrastructure projects that are able to realize accountability in managing the Government contingent liabilities and increase the creditworthiness of the Public Private Partnership projects in the infrastructure sector. |
| Providing guarantee for the government financial obligations in infrastructure projects. |
| Providing guarantee for the risk of default of State-Owned Enterprises following the assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, which resulted in the following: <ul style="list-style-type: none"> › Implementation of loan agreements with financial institutions; and › Issuance of debentures or bonds and/or other financial instruments. |
| Providing guarantee for the risk of default to Regional Owned Enterprises and/or regional governments following assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, which resulted in the following: <ul style="list-style-type: none"> › Implementation of agreements with financial institutions; and › Issuance of debentures/bonds. |
| Providing guarantee for other financial risks to State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and/or Special Purpose Vehicle in line with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, which resulted in obtaining financing or financial risk mitigation facilities in certain form other than loans and bonds/debts. |

No. Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Business Activity Based on Articles of Association

6	Pemberian penjaminan kepada pelaku usaha lainnya sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.	Providing guarantee for businesses based on assignment and/or provision determined by the Minister of Finance.
7	Pemberian jasa konsultasi, penyediaan informasi, fasilitasi perencanaan, penyiapan, dan penilaian kelayakan, atas proyek atau program serta hal lain terkait mitigasi risiko/pemantauan risiko dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek.	Providing consulting services and information, facilitating planning, preparation, and assessment of feasibility for projects or programs and other matters related to risk mitigation/risk monitoring and/or activities related to risk allocation and project financing structure.
8	Kerja sama dengan pihak lain termasuk organisasi/ lembaga keuangan internasional dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.	Cooperation with other parties including international financial organization/institutions in the context of implementing the provision of guarantees as referred to in number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7.
9	Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perseroan.	Joint ventures or equity participation in other legal entities that share similar purposes with the Company.
10	Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Other activities to achieve the goals and objectives of the Company in accordance with the provisions of the legislation.

Produk dan Jasa yang Dihasilkan

Products and Services

1. Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur untuk Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU).
2. Penjaminan Pemerintah terhadap Pinjaman dan Penerbitan Obligasi BUMN untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur.
3. Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*).
4. Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

1. Government Guarantee in the Infrastructure Sector for Public-Private Partnership (PPP).
2. Government Guarantee on Loans and Issuance of SOE Bonds to Finance Infrastructure Provision.
3. Project Preparation and Transaction Advisory (*Project Development Facility*).
4. Government Guarantee for Corporate Business Actors in the Implementation of the PEN Program.

20 Sektor yang Dapat Diberikan Penjaminan

20 Sectors to be Guaranteed

Air Minum Drinking Water	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Centralized Wastewater Management System	Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Local Wastewater Management System	Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan Oil and gas and renewable energy	Konservasi Energi Energy Conservation
Pariwisata Tourism	Kesehatan Healthcare	Lembaga Pemasyarakatan Correctional Facilities	Fasilitas Perkotaan Urban Facilities	Perumahan Rakyat Public Housing
Transportasi Transportation	Jalan Roadway	Sumber Daya Air dan Irigasi Water Resource and Irrigation	Telekomunikasi dan Informatika Telecommunication and Informatics	Ketenagalistrikan Electricity
Sistem Pengelolaan Persampahan Waste Management System	Fasilitas Pendidikan Educational Facilities	Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian Sports and Arts Facilities and Infrastructure	Kawasan Region	Bangunan Negara State Building



Gearing Ratio

Berdasarkan jumlah eksposur penjaminan atas proyek yang dijamin oleh PT PII ialah sebesar Rp95 triliun yang terdiri dari Eksposur KPBU & Non KPBU sebesar Rp87 triliun, dan Eksposur BUMN PEN sebesar Rp8 triliun serta eksposur korporasi PEN sebesar Rp2,78 triliun. Nilai ekuitas PT PII per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15,15 triliun. Dengan demikian, rasio nilai penjaminan terhadap ekuitas PT PII (*gearing ratio*) dengan tidak memperhitungkan PMN sehubungan dengan pelaksanaan penugasan PEN dan PMN yang diterima Perseroan pada akhir bulan Desember 2022 adalah 6,95 kali.

Gearing Ratio

Based on Guarantee exposure of the project guaranteed by IIGF amounted to Rp95 trillion consisting of PPP & Non PPP Exposure of Rp87 trillion, and BUMN PEN exposure of Rp8 trillion and PEN's corporate exposure amounted to Rp2.78 trillion. The value of IIGF's equity as of December 31, 2022 is Rp15.15 trillion. Thus, the ratio of the Guarantee value to IIGF's equity (*gearing ratio*) by not taking into account the PMN in connection with the implementation of the PEN assignment at the end of December 2022 was 6.95 times.

WILAYAH OPERASIONAL OPERATIONAL AREA

Wilayah operasional Perseroan secara keseluruhan berada di wilayah Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, kantor cabang dan kantor perwakilan.

The Company's operational area is entirely located in Indonesia. Until December 31, 2022, Perseroan did not have any subsidiary, associate, branch office and representative office.

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI LIST OF ASSOCIATION MEMBERSHIP

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki keanggotaan di asosiasi industri apapun.

Until this Annual Report is published, the Company does not have membership in any industry association.

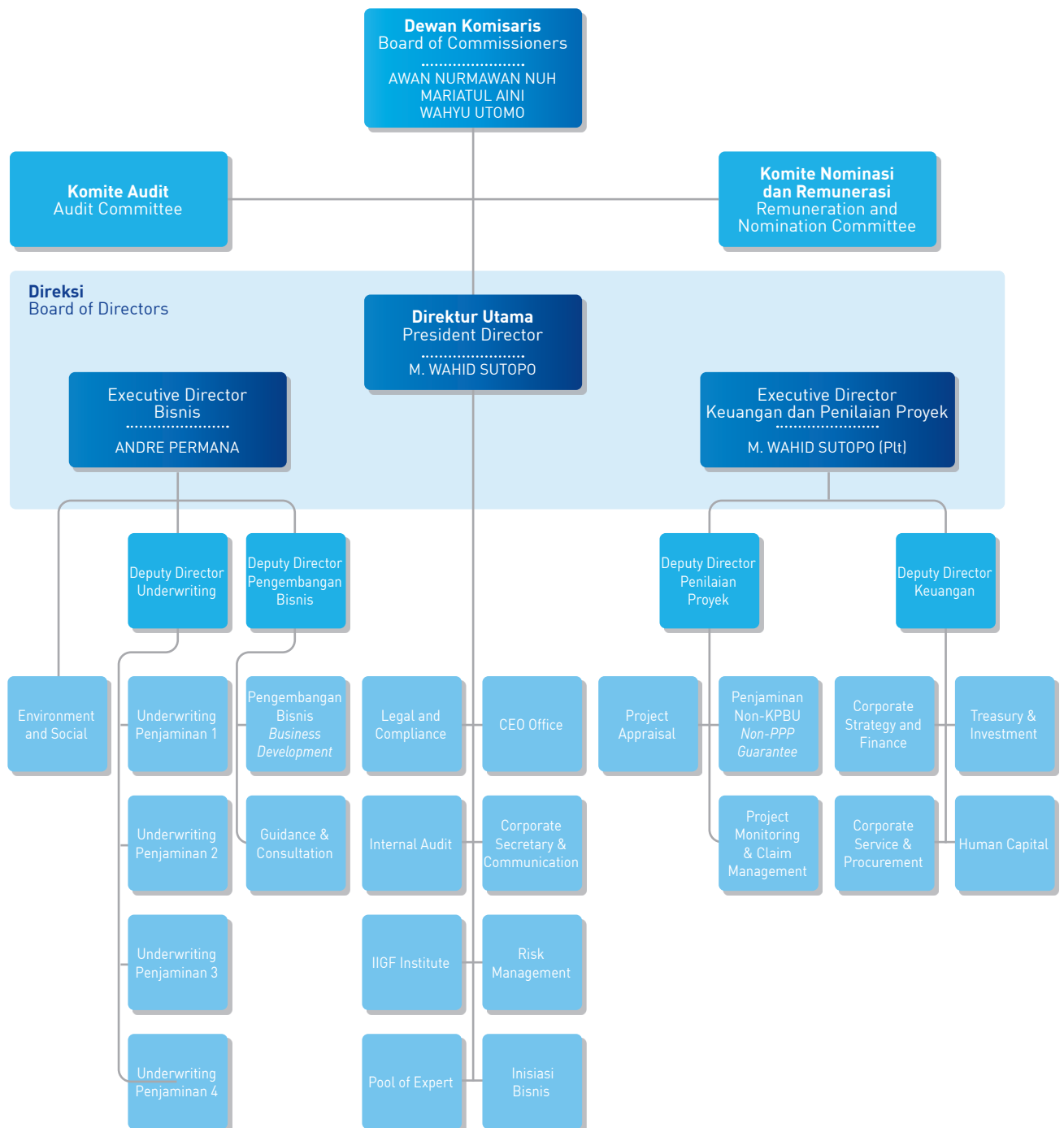
STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Pada tahun 2022 Struktur Organisasi Perseroan mengalami perubahan, sebagai berikut:

There were changes on Organizational Structure of the Company in 2022, as follows:

Struktur Organisasi Perseroan per 1 Januari 2022

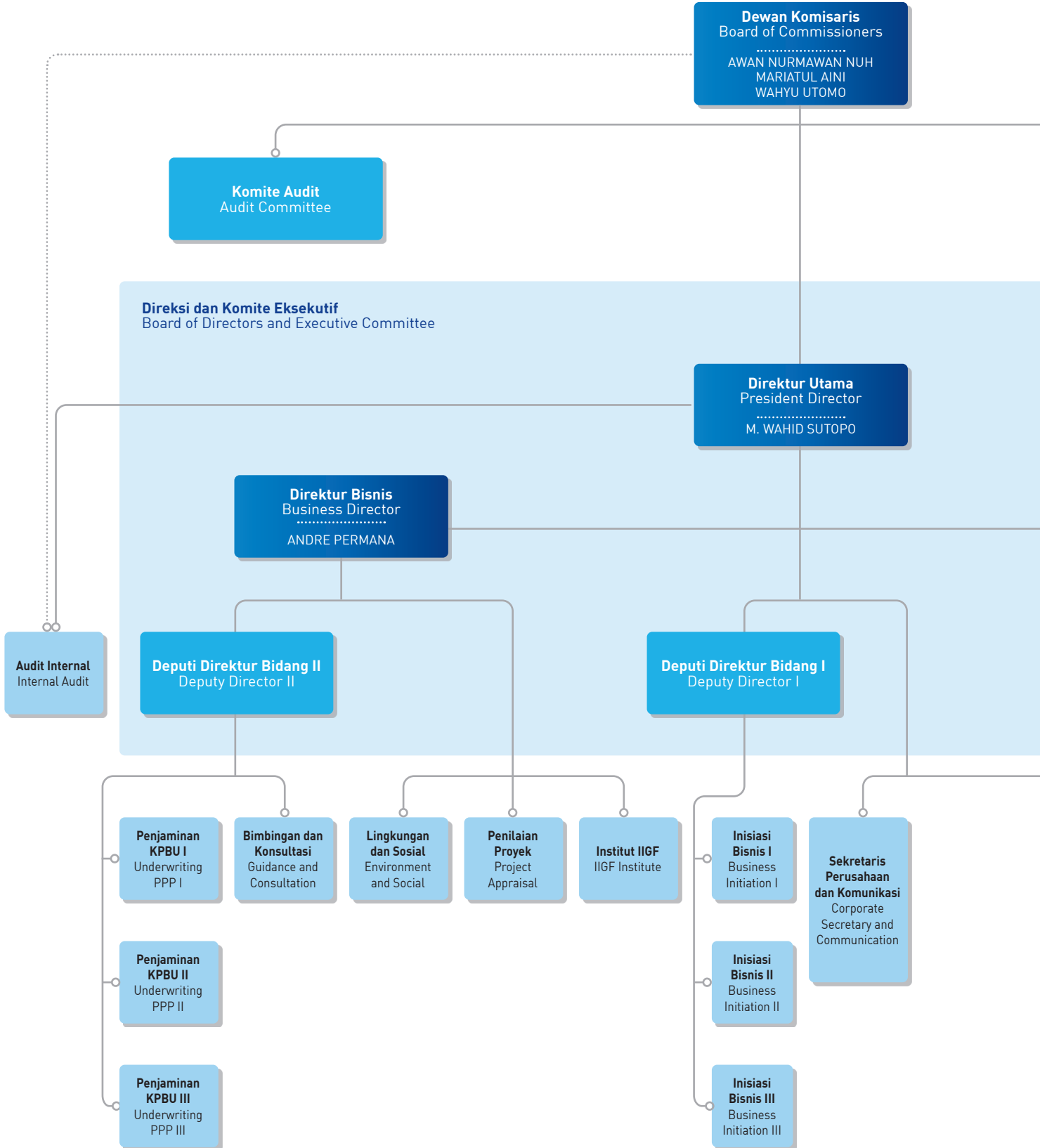
Organizational Structure of the Company as of January 1, 2022

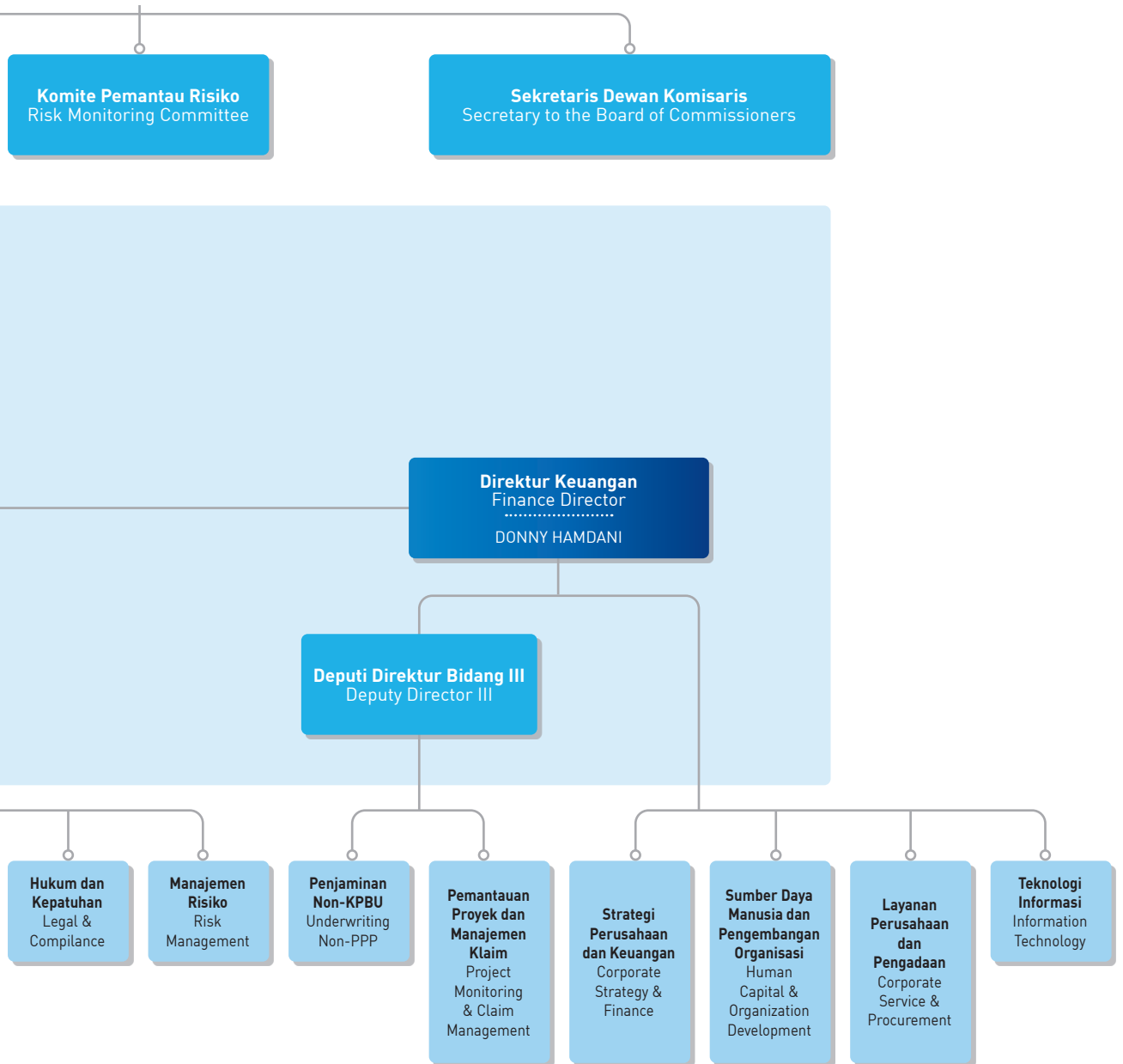




Struktur Organisasi Perseroan per 18 Maret 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-004/PII-BOD/0322 tentang Struktur Organisasi Perseroan

The Company's Organizational Structure as of March 18, 2022. Based on the Company' Board of Directors Decree Letter No. SK-004/PII-BOD/0322 Regarding Organizational Structure of the Company







PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Iqbal Islami
Komisaris
Commissioner

Awan Nurmawan Nuh
Komisaris Utama
President Commissioner

Mariatul Aini
Komisaris
Commissioner

Independensi Komisaris Independen

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, bahwa Komisaris Independen diwajibkan keberadaannya bagi BUMN yang menerbitkan efek di bursa efek. Saat ini Perseroan merupakan BUMN yang belum mencatatkan sahamnya di bursa efek.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Namun demikian, dalam proses penyusunan Laporan Tahunan ini, terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan, yaitu pada tanggal 31 Januari 2023.

Independence of Independent Commissioner

Based on the provisions in Article 4 paragraph 4 of the Minister of Finance Regulation No. 197/PMK.06/2019 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of Company Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, that Independent Commissioners are required to exist for SOE that issue securities on the stock exchange. Currently the Company is an SOE that has not listed its shares on the stock exchange.

Changes in the Board of Commissioners Composition

In 2022, there were no changes to the composition of the Board of Commissioners. However, in the process of preparing this Annual Report, there was a change in the composition of the Company's Board of Commissioners, as of January 31, 2023.



AWAN NURMAWAN NUH

Komisaris Utama

President Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia West Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Usia Age	54 tahun 54 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Bandung, 26 September 1968 Bandung, September 26, 1968

Periode Jabatan

20 April 2020–19 April 2025, Periode ke-1

Riwayat Penunjukan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 20 April 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 205/KMK.06/2020 untuk masa jabatan sampai dengan 19 April 2025. Jabatan ini merupakan periode ke-1. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan.

Riwayat Pendidikan

- › Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1992).
- › *Master of Business Taxation* dari University of Southern California, Amerika Serikat (1997).

Riwayat Karier

Beliau pernah menjabat berbagai posisi kunci di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI antara lain sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (2009), Direktur Peraturan Perpajakan I (2011), Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (2013), Direktur Ekstensifikasi dan Penilai (2015) dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I (2016), Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan RI (2016-2021).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perseroan:
Tidak ada

Di luar Perseroan:
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (2021-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan.

Term of Office

April 20, 2020-April 19, 2025, 1st Period

Appointment History

Appointed as President Commissioner since April 20, 2020 based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 205/KMK.06/2020 until April 19, 2025. It is the first period for him to serve as the Company's President Commissioner. Previously, he had never served as a member of the Board of Commissioners of the Company.

Education Background

- › Bachelor of Economics from Gadjah Mada University Yogyakarta (1992).
- › Master of Business Taxation from University of Southern California, United States (1997).

Professional Career

He has held various key positions at the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, including Head of the Foreign Investment Tax Service Office III (2009), Director of Taxation Regulations I (2011), Secretary of the Directorate General of Taxes (2013), Director of Extensification and Appraisal (2015) and Head of the Regional Office of the Directorate General of Taxes Central Java I (2016), Expert Staff for Tax Regulation and Law Enforcement at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2016-2021).

Concurrent Positions

Within the Company:
None

Other than the Company:
Inspector General of the Ministry of Finance (2021-present).

Affiliation

He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or with the Board of Directors. He has an affiliated relationship with the Government of the Republic of Indonesia as a shareholder through concurrent positions at the Ministry of Finance.



MARIATUL AINI
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Usia Age	59 tahun 59 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Jakarta, 11 Oktober 1963 Jakarta, October 11, 1963

Periode Jabatan

19 Agustus 2019–18 Agustus 2024, Periode ke-2

Riwayat Penunjukan

Beliau diangkat pertama kali sebagai anggota Komisaris sejak tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 861/KMK.06/2018 untuk masa jabatan sampai dengan 31 Desember 2019. Kemudian beliau diangkat kembali berdasarkan KMK No. 720/KMK.06/2019 untuk masa jabatan sampai dengan 18 Agustus 2024. Jabatan ini merupakan periode ke-2. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan.

Riwayat Pendidikan

- › Insinyur Bidang Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor (1987).
- › *Master of Business Administration* dari University of Wisconsin, Amerika Serikat (1994).

Riwayat Karier

Beliau pernah menjabat berbagai posisi kunci di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI antara lain sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran (2011) dan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (2018). Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2021-sekarang).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perseroan:
Ketua Komite Audit

Di luar Perseroan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2021-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan.

Term of Office

August 19, 2019–August 18, 2024, 2nd Period

Appointment History

She was initially appointed as a member of the Commissioner since December 21, 2018 based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 861/KMK.06/2018 until December 31, 2019. She was reappointed based on KMK No. 720/KMK.06/2019 until August 18, 2024. It is the second period for her to serve as the Commissioner of the Company. Previously, she had never served as a member of the Board of Commissioners of the Company.

Education Background

- › Bachelor of Engineering in Soil Science from Bogor Agricultural University (1987).
- › Master of Business Administration from the University of Wisconsin, United States of America (1994).

Professional Career

She held various key positions at the Directorate General of Budget, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, including Director of Harmonization of Budgeting Regulations (2011) and Director of Non-Tax State Revenue (2018). Currently, she serves as Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2021-present).

Concurrent Positions

Within the Company:
Head of Audit Committee

Other than the Company:
Secretary of Directorate General of Fiscal Balance, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2021-present).

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners or with the Board of Directors. She has an affiliated relationship with the Government of Indonesia as a shareholder through concurrent positions at the Ministry of Finance.



IQBAL ISLAMI*

Komisaris

Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Usia Age	59 tahun 59 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Jakarta, 6 Desember 1963 Jakarta, Desember 6, 1963

Periode Jabatan

31 Januari 2023-30 Januari 2028, Periode ke-1

Riwayat Penunjukan

Beliau diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 33/KMK.06/2023 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri. Jabatan ini merupakan periode ke-1. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Komite Dewan Komisaris Perseroan.

Riwayat Pendidikan

- › Diploma IV (D4) Ekonomi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991).
- › Master (S2) of Business Administration dalam bidang finance dari Case Western Reserve University, Ohio, Amerika Serikat (1994).

Riwayat Karier

Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2016-2020). Sebelum menjabat sebagai Komisaris, Beliau pernah bertugas sebagai anggota Komite Audit kemudian Komite Pemantau Risiko di PT PII (2012-2023). Dalam bidang akademis, Beliau juga tercatat sebagai Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN (1991-2011) dan Widyaiswara BPPK (2011-2016). Manajemen strategik, finance, corporate governance, manajemen risiko dan keuangan negara adalah bidang-bidang yang menjadi keahliannya.

Rangkap Jabatan

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan (2020-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan.

Term of Office

31 January 2023-30 January 2028, 1st Period

Appointment History

He was appointed as a member of the Board of Commissioners on January 31, 2023 based on the Decree of the Minister of Finance Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023 for a term of 5 (five) years, commencing from the date of the Ministerial Decree. This position is his 1st term. Previously he served as member of the Company's Board of Commissioners Committee.

Education Background

- › Diploma IV (D4) Economics in Accounting from the State College of Accountancy (1991).
- › Master of Business Administration in finance from Case Western Reserve University, Ohio, USA (1994).

Professional Career

Currently serving as Secretary to Financial Education and Training Institution, Ministry of Finance. Previously, He served as Head of Education and Training Centre of Budget and Treasury, Ministry of Finance (2016-2020). Prior to serving as Commissioner, He served as Audit Committee then Risk Monitoring Committee at IIGF (2012-2023). In the academic sector, He is also registered as Lecturer at State Finance Polytechnic STAN (1991-2011) and Widyaiswara BPPK (2011-2016). Strategic management, finance, corporate governance, risk management and state finance are his sectors of expertise.

Concurrent Positions

Secretary of the Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance (2020-present).

Affiliation

He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or with the Board of Directors. He has an affiliated relationship with the Government of the Republic of Indonesia as a shareholder through concurrent positions at the Ministry of Finance.

*Diangkat per 31 Januari 2023/Appointed as of January 31, 2023



WAHYU UTOMO*

Komisaris

Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Usia Age	57 tahun 57 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Jakarta, 11 Februari 1964 Jakarta, February 11, 1964

Periode Jabatan

20 April 2020–19 April 2025, Periode ke-1

Riwayat Penunjukan

Beliau diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 20 April 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 205/KMK.06/2020 untuk masa jabatan sampai dengan 19 April 2025. Jabatan ini merupakan periode ke-1. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Indonesia Perseroan.

Riwayat Pendidikan

- › Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987).
- › *Master of Science in Regional Science* dari Cornell University, Amerika Serikat (1999).
- › *Doctorate in Regional Science* dari Cornell University, Amerika Serikat (2002).

Riwayat Karier

Beliau menjabat sebagai Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2016-sekarang) dan Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (2016-sekarang) serta beberapa jabatan lainnya. Sebelumnya beliau pernah menjabat berbagai posisi kunci di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, di antaranya Asisten Deputy Urusan Perumahan, Pertanahan dan Kerja Sama Pemerintah Swasta (2007-2014), Asisten Deputy urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Indonesia-Sulawesi (2005-2007), serta Kepala Bidang Desentralisasi Ekonomi (2002-2005).

Rangkap Jabatan

Di dalam Perseroan:
Ketua Komite Pemantau Risiko

Di luar Perseroan:
Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2016-sekarang), serta Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (2016-sekarang) dan beberapa jabatan lainnya.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Term of Office

April 20, 2020-April 19, 2025, 1st Period

Appointment History

He was appointed as the Commissioner since April 20, 2020 based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 205/KMK.06/2020 until April 19, 2025. It is the first period for him to serve as the Company's Commissioner. Previously, he had never served as a member of the Board of Commissioners of the Company.

Education Background

- › Bachelor of Engineering majoring in Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology (1987).
- › Master of Science in Regional Science from Cornell University, United States of America (1999).
- › Doctorate in Regional Science from Cornell University, United States of America (2002).

Professional Career

He served as Deputy for Coordinating the Acceleration of Infrastructure and Regional Development of the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia (2016-present) and Executive Chairman of the Committee for the Acceleration of Priority Infrastructure Delivery (2016-present) and several other positions. Previously he has held various key positions at the Coordinating Ministry for Economic Affairs Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, including Assistant Deputy for Housing, Land and Public-Private Cooperation (2007-2014), Assistant Deputy for Infrastructure Private Cooperation (2007-2014), Assistant Deputy for Infrastructure and Development of the Indonesia-Sulawesi Region (2005-2007), and Head of Economic Decentralization (2002-2005).

Concurrent Positions

Within the Company:
Head of Risk Monitoring Committee

Other than the Company:
Deputy for Coordination for the Acceleration of Infrastructure and Regional Development of the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia (2016-present), as well as the Chief Executive of the Committee for the Acceleration of Priority Infrastructure Provision (2016-present) and several other positions.

Affiliation

He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. He has affiliation with the Government of the Republic of Indonesia as shareholder through his concurrent position at the Coordinating Ministry for Coordinating Ministry for Economic Affairs.

* Berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris per tanggal 31 Januari 2023./Retired as a member of the Board of Commissioners as of January 31, 2023.



PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Andre Permana
Direktur Bisnis
Business Director

Muhammad Wahid Sutopo
Direktur Utama
President Director

Donny Hamdani
Direktur Keuangan
Finance Director

Perubahan Komposisi Direksi di Tahun 2022

Changes in the Board of Directors' Composition in 2022

Pada tahun 2022, komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan sebagaimana informasi di bawah ini:

In 2022, there were changes in the Company's Board of Directors' composition with the following chronology:

Susunan Direksi per 1 Januari 2022

Board of Directors' Composition as of January 1, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019. Based on the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 890/KMK.06/2019.	4 Desember 2017 – 3 Desember 2022 December 4, 2017 until December 3, 2022	Ke-1 1 st
Andre Permana	Direktur Eksekutif Bisnis Executive Business Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020. Based on the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 – 22 Maret 2025 March 23, 2020 until March 22, 2025	Ke-1 1 st

Susunan Direksi per 17 Januari 2022

Board of Directors' Composition as of January 17, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019. Based on the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 890/KMK.06/2019.	4 Desember 2017 – 3 Desember 2022 December 4, 2017 - December 3, 2022	Ke-1 1 st
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020. Based on the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 – 22 Maret 2025 March 23, 2020 - March 22, 2025	Ke-1 1 st
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022. Based on the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022.	17 Januari 2022 – 16 Januari 2027 January 17, 2022 - January 16, 2027	Ke-1 1 st

Susunan Direksi per 4 Desember 2022

Board of Directors' Composition as of December 4, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 340/KMK.06/2022. Based on the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 340/KMK.06/2022.	4 Desember 2022 – 3 Desember 2027 December 4, 2022 - December 3, 2027	Ke-2 2 nd
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020. Based on the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 – 22 Maret 2025 March 23, 2020 - March 22, 2025	Ke-1 1 st
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022. Based on the Minister of Finance Decree (KMK) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022.	17 Januari 2022 – 16 Januari 2027 January 17, 2022 - January 16, 2027	Ke-1 1 st



MUHAMMAD WAHID SUTOPO

Direktur Utama

President Director

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Usia Age	53 tahun 53 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Jakarta, 17 Juni 1969 Jakarta, June 17, 1969

Periode Jabatan

4 Desember 2022–3 Desember 2027, Periode ke-2

Riwayat Penunjukan

Beliau diangkat pertama kali sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 885/KMK.06/2017 dan dialih tugaskan menjadi Direktur Utama sejak tanggal 29 November 2019 berdasarkan KMK No. 890/KMK.06/2019 untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Bersamaan dengan pengangkatan beliau sebagai Direktur Utama, Dewan Komisaris menunjuk beliau untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek Perseroan dengan kewajiban, tugas, dan kewenangan yang sama, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/KOM/PII/07/2021 tanggal 15 Juli 2021.

Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 340/KMK.06/2022 untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal 4 Desember 2022. Jabatan ini merupakan periode ke-2.

Riwayat Pendidikan

- › Sarjana Teknik jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1993).
- › Magister Manajemen dari International Business IPMI (program bersama dengan Monash University), Jakarta (2002).

Riwayat Karier

Beliau pernah menjabat berbagai posisi kunci antara lain sebagai Direktur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2011-2017), Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017), Komisaris Utama PT PGN ING Indonesia (2015-2016) dan Direktur Eksekutif Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2019) sebelum diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.

Rangkap Jabatan

Di dalam Perseroan:
Tidak ada.

Di luar Perseroan: Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham.

Term of Office

December 4, 2022–December 3, 2027, 2nd Period

Appointment History

Appointed as President Director based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 885/KMK.06/2017 and was reassigned to be the President Director since November 29, 2019 based on KMK Decree No. 890/KMK.06/2019 for a term of 5 years starting on December 4, 2017. This position is the 1st period.

Along with his appointment as President Director, the Board of Commissioners appointed M. Wahid Sutopo (President Director), to carry out his duties as Temporary Acting Executive Finance Director and Project Assessment of the Company with the same obligations, duties, and authorities, as stated in the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-04/KOM/PII/07/2021 dated July 15, 2021.

He was reappointed as President Director based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 340/KMK.06/2022 for 5-year term of office effective from December 4, 2022. This is his second term.

Education Background

- › Bachelor of Engineering majoring in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1993).
- › Master of Management from the Indonesian Management Development Institute (IPMI Business School), Jakarta (2002).

Professional Career

He held various key positions, including Director of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2011-2017), President Commissioner of PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017), President Commissioner of PT PGN ING Indonesia (2015-2016) and Business Executive Director of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2019) before being appointed as President Director of the Company.

Concurrent Positions

Within the Company:
None.

Other than the Company: None

Affiliation

He has no affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or with the Indonesian Government as a shareholder.



ANDRE PERMANA

Direktur Bisnis

Business Director

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Tangerang Selatan, Banten, Indonesia South Tangerang, Banten, Indonesia
Usia Age	46 tahun 46 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Cirebon, 31 Januari 1976 Cirebon, January 31, 1976

Periode Jabatan

23 Maret 2020–22 Maret 2025, Periode ke-1

Riwayat Penunjukan

Beliau diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 23 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020 untuk masa jabatan sampai dengan 5 tahun ke depan. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Riwayat Pendidikan

- › Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (1998).
- › Magister Teknik bidang Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2003).
- › *Doctor of Philosophy* bidang *Risk Management, Project Finance* dari Nanyang Technological University, Singapura (2012).

Riwayat Karier

Melanjutkan karier sebelumnya yang terkait bidang konstruksi dan pengembangan proyek infrastruktur, karier profesional beliau di Perseroan dimulai pada tahun 2010 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Divisi Risk and Compliance, Kepala Divisi Business Development, CEO Office dan terakhir kali menjabat sebagai Executive Vice President Project Appraisal sebelum diangkat sebagai Direktur Perseroan.

Rangkap Jabatan

Di dalam Perseroan:
Tidak ada

Di luar Perseroan:
Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham.

Term of Office

March 23, 2020-March 22, 2025, 1st Period

Appointment History

He was appointed as Director since March 23, 2020 based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020 for 5 years. It is the first period for him to serve as the Company's Director.

Education Background

- › Bachelor of Engineering majoring in Civil Engineering from University of Indonesia (1998).
- › Master of Engineering in Project Management from University of Indonesia (2003).
- › Doctor of Philosophy in Risk Management, Project Finance from Nanyang Technological University, Singapore (2012).

Professional Career

He continued his previous professional career in the field of construction and infrastructure project development. His professional career at the Company began in 2010 and he has held various strategic positions, including Head of Risk and Compliance Division, Head of Business Development Division, CEO Office and most recently as Executive Vice President Project Appraisal before being appointed as Director of the Company.

Concurrent Positions

Within the Company:
None

Other than the Company:
None

Affiliation

He has no affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or with the Indonesian Government as a shareholder.



DONNY HAMDANI
Direktur Keuangan
Finance Director

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Usia Age	44 tahun 44 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Jakarta, 23 September 1978 Jakarta, September 23, 1978

Periode Jabatan

17 Januari 2022–16 Januari 2027, Periode ke-1

Riwayat Penunjukan

Beliau diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 5 tahun ke depan. Jabatan ini merupakan periode ke-1.

Riwayat Pendidikan

› Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (2000).

Riwayat Karier

Beliau merintis karier sebagai auditor selama 11 tahun di KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan (PricewaterhouseCoopers). Kemudian beliau bergabung pertama kali dengan Perseroan pada tahun 2012 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Executive Vice President Corporate Strategy and Finance dan terakhir kali menjabat sebagai Deputy Direktur Keuangan sebelum diangkat sebagai Direktur.

Rangkap Jabatan

Di dalam Perseroan:
Tidak ada

Di luar Perseroan:
Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham.

Term of Office

January 17, 2022-January 16, 2027, 1st Period

Appointment History

He was appointed as Director since January 17, 2022 based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022 for the term of office of up to 5 years. It is the first period for him to serve as the Company's Director.

Education Background

› Bachelor of Economics majoring in Accounting from University of tambahan (2000).

Professional Career

He started his career as an auditor for 11 years at KAP Tanudiredja Wibisana and Rekan (PricewaterhouseCoopers). Afterwards, he joined the Company in 2012 and has held various strategic positions, including Executive Vice President Corporate Strategy and Finance and most recently served as Deputy Finance Director before being appointed as Director.

Concurrent Positions

Within the Company:
None

Other than the Company:
None

Affiliation

Having no affiliation of the Board of Commissioners, the Board Board of Directors or with the Government of Indonesia as a shareholder.

PROFIL DEPUTI DIREKTUR PROFILE OF DEPUTY DIRECTOR



TANTI HIDAYATI
Deputy Direktur Bidang I
Deputy Director I

Kewarganegaraan
Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili
Domicile

Depok, Jawa Barat, Indonesia
Depok, West Java, Indonesia

Usia
Age

50 tahun
50 years old

Riwayat Pendidikan
Education Background

- › Sarjana Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (1991–1995)
- › Bachelor in Agribusiness from Bogor Agricultural University (1991–1995)



PRATOMO ISMUJATMIKA
Deputy Direktur Bidang II
Deputy Director II

Kewarganegaraan
Citizenship

Indonesia
Indonesian

Domisili
Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Usia
Age

47 tahun
47 years old

Riwayat Pendidikan

- › Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994–1999)
- › Magister Manajemen (Keuangan) dari Universitas Gadjah Mada (2001–2003)
- › *Magister of Business Administration* dari Sullivan University (2003–2005)
- › Doktor Ilmu Manajemen (*Candidate*) dari Universitas Padjajaran (2021–sekarang)

Education Background

- › Bachelor of Architecture Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology (1994–1999)
- › Master of Management (Finance) from Gadjah Mada University (2001–2003)
- › Master of Business Administration from Sullivan University (2003–2005)
- › Doctor of Management Science (*Candidate*) from Padjajaran University (2021–present)



MUHAMMAD RIDHO
Deputi Direktur Bidang III
Deputy Director III

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Tangerang Selatan, Banten, Indonesia South Tangerang, Banten, Indonesia
Usia Age	46 tahun 46 years old

Riwayat Pendidikan

- › Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Diponegoro (1993–1998)
- › Research Student, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2002–2003)
- › *Master of Engineering, Urban and Environmental Engineering*, Kyushu University (2003–2005)
- › *Doctor of Engineering, Urban and Environmental Engineering*, Kyushu University (2005–2008), Graduated pada 2010

Education Background

- › Bachelor of Urban and Regional Planning Engineering from Diponegoro University (1993-1998)
- › Research Student, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2002-2003)
- › Master of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2003-2005)
- › Doctor of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2005-2008), Graduated in 2010

DEMOGRAFI KARYAWAN EMPLOYEE DEMOGRAPHY





Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 152 karyawan, dengan komposisi jumlah karyawan tetap sebanyak 136 orang dan karyawan tidak tetap sebanyak 16 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan jumlah karyawan tahun 2021 sebanyak 143 orang. Komposisi karyawan pada tahun 2022 ini telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Perseroan, baik secara kuantitas maupun kualitas kompetensinya. Informasi detail terkait demografi karyawan tersaji dalam tabel-tabel berikut ini:

As of December 31, 2022, the Company has 152 employees, with the composition of 136 permanent employees and 16 non-permanent employees. This number is higher than the number of employees in 2021 of 143 people. The composition of employees in 2022 has been adjusted to the needs of the Company's organization, both in quantity and quality of competence. Detailed information related to employee demographics is presented in the following tables:

Jumlah Karyawan Berdasarkan Work Level

Total Employee Based on Work Level





(orang/people)

Work Level	2021				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Komposisi Composition			Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	
Deputy Director	1	1	2	0,7%	2	1	3	2%	1	50%
Executive leader	3	1	4	2,8%	1	1	2	1,3%	-2	-50%
Senior leader	21	9	30	21,3%	21	9	30	20%	0	0%
Middle level	31	19	50	34,8%	33	26	59	39%	9	18%
Staff	23	34	57	40,4%	24	34	58	38%	1	1,75%
Jumlah/Total	79	64	143	100,0%	81	71	152	100%	9	6,29%

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Total Employee Based on Position Level

(orang/people)

Level Jabatan Position Level	2021				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Komposisi Composition			Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	
EVP	4	2	6	3,5%	3	2	5	3%	-1	-17%
VP SVP	21	9	30	21,3%	21	9	30	20%	0	0%
DSM AVP	18	7	25	17,7%	20	10	30	20%	5	20%
AM-M	24	31	55	38,3%	24	34	58	38%	3	5%
Staff	12	15	27	19,2%	13	16	29	19%	2	7%
Jumlah/Total	79	64	143	100,0%	81	71	152	100%	9	6%



Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Total Employee Based on Educational Level

(orang/people)

Tingkat Pendidikan Educational Level	2021				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Komposisi Composition			Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	
Doktoral Doctoral	3	-	3	2,1%	2	-	2	1,3%	-1	-33%
Pasca Sarjana Post Graduate	38	12	50	35,5%	38	13	51	33,6%	1	2%
Sarjana Undergraduate	37	48	85	59,4%	40	54	94	61,8%	9	10,6%
Diploma	1	4	5	3,5%	1	4	5	3,3%	0	0%
Jumlah Total	79	64	143	100,0%	81	71	152	100%	9	6,29%

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Total Employee Based on Employment Status

(orang/people)

Status Kepegawaian Employment Status	2021				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Komposisi Composition			Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	
Tetap Permanent	73	58	131	91,6%	72	64	136	89%	5	3,8%
Tidak Tetap Contract	6	6	12	8,4%	9	7	16	11%	4	33,3%
Jumlah Total	79	64	143	100,0%	81	71	152	100%	9	6,3%

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Total Employee Based on Age Range

(orang/people)

Rentang Usia Age Range	2021				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Komposisi Composition			Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	
41 – 56 Tahun Years Old	23	8	31	21,3%	26	10	36	23,68%	5	16,13%
31 – 40 Tahun Years Old	42	33	75	52,5%	38	36	74	48,68%	-1	-1,33%
20 – 30 Tahun Years Old	14	23	37	26,2%	17	25	42	27,63%	5	13,51%
Jumlah Total	79	64	143	100,0%	81	71	152	100%	9	6,29%

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Total Employee Based on Gender

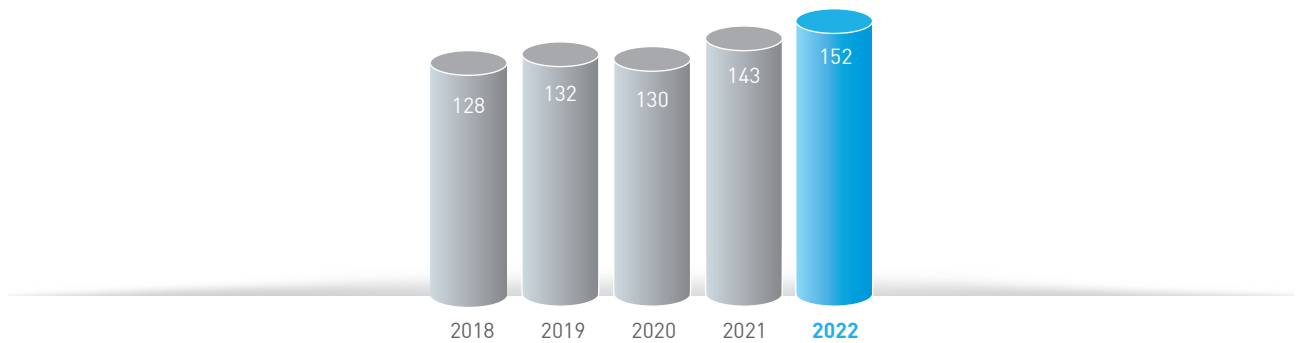
(orang/people)

Jenis Kelamin Gender	2021		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	
Laki-laki Male	79	55,3%	81	53,3%	2	2,53%
Perempuan Female	64	44,7%	71	46,7%	7	10,9%
Jumlah/Total	143	100,0%	152	100%	9	6,29%

Jumlah Karyawan 2018-2022

Total Employee in 2018-2022

(orang/people)



Informasi lebih rinci terkait manajemen SDM dan ketenagakerjaan di Perseroan disajikan pada Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

More detail information on HR and manpower management in the Company is presented in the Sustainability Report as an integral document of this Annual Report.

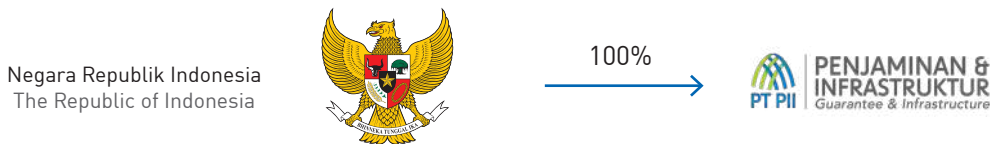


INFORMASI PEMEGANG SAHAM THE SHAREHOLDERS INFORMATION

Sampai dengan 31 Desember 2022, komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022, the Shareholders composition of the Company is as follows:

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	1 Januari 2022 January 1, 2022		31 Desember 2022* December 31, 2022	
	Jumlah Saham Total Share	Persentase Percentage	Jumlah Saham Total Share	Persentase Percentage
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	9.570.000 lembar/shares	100%	10.655.000 lembar/shares	100%



Dengan kepemilikan saham mencapai 100%, Negara Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan dan satu-satunya pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%. Sehingga tidak terdapat pemegang saham lainnya dengan kepemilikan di bawah 5%, serta tidak terdapat Dewan Komisaris, Direksi, karyawan yang memiliki saham Perseroan, baik kepemilikan langsung maupun kepemilikan tidak langsung.

With 100% share ownership, the Republic of Indonesia is the Major and Controlling Shareholder of the Company and the only shareholder with ownership above 5%. So there are no other shareholders with ownership below 5%, as well as there are no Board of Commissions, Board of Directors, employees who own the Company's shares, both through direct and indirect ownership.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, pelimpahan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (Persero) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri BUMN tidak berlaku bagi Perseroan. Dengan demikian, mengacu pada peraturan perundangan tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham Perseroan.

Based on Government Regulation No. 35 of 2009 concerning the Investment of State Capital of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company (Persero) in the Field of Infrastructure Guarantee, the delegation of the position, duties, and authority of the Minister of Finance as Shareholder or General Meeting of Shareholders (GMS) in a Company (Persero) to the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as stipulated in Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Position, Duties, and Authority of the Minister of Finance in a Company (Persero), Public Company (Perum), and Jawatan Company (Perjan) to the Minister of BUMN does not apply to the Company. Thus, referring to these laws and regulations, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia is the Shareholder of the Company.

**Pemerintah Republik Indonesia/
Kepresidenan**
Government of the Republic of
Indonesia/Presidency

Istana Negara
Jl. Medan Merdeka Utara No.3
RT.2/RW.3, Kel. Gambir, Kec. Gambir,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia

**Kantor Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia**
Jl. Veteran No. 17-18
Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta,
Indonesia Telp. +62 21 3845627
Website: www.setneg.go.id

**Kementerian Keuangan Republik
Indonesia**
(Sebagai Pemegang Saham
Perseroan)
The Ministry of Finance of the
Republic of Indonesia
(As Shareholder of the Company)

Kantor Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat 10710, Indonesia
Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME 134
The Ministry of Finance PRIME Service Contact Center 134
Telepon Operator Kantor Pusat/Head Office Operator Phone (021) 3449230
Website: www.kemenkeu.go.id

* Pada tanggal 23 Desember 2022 telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp1,085 triliun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan.
On December 23, 2022 additional share capital of Rp1.085 trillion was deposited, based on Government Regulation No. 53 of 2022 on the Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Company's share capital.

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

As of December 31, 2022, there were no members of the Board of Commissioners and Board of Directors who own the Company's shares, both directly and indirectly.

INFORMASI TENTANG STRUKTUR GRUP/KELOMPOK USAHA SERTA ENTITAS ANAK/ENTITAS ASOSIASI/PERUSAHAAN PATUNGAN/SPECIAL PURPOSE VEHICLE INFORMATION ON GROUP STRUCTURE/BUSINESS GROUP AND SUBSIDIARIES/ASSOCIATES/JOINT VENTURES/SPECIAL PURPOSE VEHICLE

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, entitas Pengendalian Bersama, perusahaan patungan atau *Joint Venture Company* (JV), maupun *Special Purpose Vehicle* (SPV). Sehingga pembahasan dalam subbab ini tidak relevan untuk disajikan.

As of December 31, 2022, the Company had no subsidiaries, associates, Controlling Joint Venture, Joint Venture Company (JV), or Special Purpose Vehicles (SPV). Thus, the discussion in this sub-section is not relevant to be presented.

INFORMASI TENTANG PENCATATAN SAHAM SERTA PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI/EFEK LAINNYA INFORMATION ON SHARE LISTING AND ISSUANCE BONDS/OTHER SECURITIES LISTING

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan tidak melakukan penawaran umum saham dan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek mana pun, serta belum pernah menerbitkan efek dalam bentuk apa pun yang diperdagangkan di bursa mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.

As of December 31, 2022, the Company did not conduct public offering of shares and did not list its shares on any stock exchange, as well as never issued securities of any kind that are traded on any exchange, so there is no information regarding the chronology of issuance and/or listing of other securities from the beginning of issuance to the end of the fiscal year.



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG INSTITUTION AND SUPPORTING PROFESSIONAL

Biro Administrasi Publik

Perseroan per 31 Desember 2022 tidak menerbitkan saham di Bursa Efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Biro Administrasi Publik.

Public Administration Bureau

As of December 31, 2022, the Company did not issue shares on any Stock Exchange, so there is no information regarding the Public Administration Bureau.

Perusahaan Pemeringkat Efek

Perseroan per 31 Desember 2022 tidak menerbitkan saham di Bursa Efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek.

Securities Rating Company

As of December 31, 2022, the Company did not issue shares on any Stock Exchange, so there is no information regarding the Securities Rating Company.

Kantor Akuntan Publik (KAP)

Public Accounting Firm (PAF)

Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA
Izin Praktik Akuntan Publik No. AP.0229

Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 29, RT.4/RW.2, Kuningan, Karet, Setiabudi, Indonesia 12920

Jasa yang Diberikan

Services Provided

Jasa Audit:

Jasa audit laporan keuangan dan jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan *internal control* (PSA 62).

Audit Services:

Financial statements audit services and compliance audit services according to regulations and internal control (PSA 62).

Jasa Non-Audit:

Jasa Perikatan Asuransi atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Non-Audit Services:

Assurance engagement services for the Company's Key Performance Indicators ("KPI"), Directors and the Board of Commissioners.

Periode Penugasan

Tahun 2022

Assignment Period

Year 2022

Biaya

Rp981.852.850

Fee

Rp981,852,850

Konsultan Hukum

Legal Consultant

Nengah Sujana dan Rekan

Nengah Sujana and Partners

Nifarro Park, ITS Tower, Jl. Raya Pasar Minggu No.18, RT.1/RW.1, Kalibata, Pancoran, Jakarta 12740

Jasa yang Diberikan

Services Provided

Pendampingan Hukum :

1. Panggilan Ombudsman Republik Indonesia dan Penanganan Awal Pokok Permasalahan; dan
2. Penerbitan dan/atau Tanggapan Somasi oleh Perseroan.

Legal Assistances as follows:

1. Summons of the Ombudsman of the Republic of Indonesia and Initial Handling of the Subject Matter; and
2. Issuance and/or Response of Somasi by the Company.

Periode Penugasan

Tahun 2022

Assignment Period

Year 2022

Notaris Notary

Arry Supratno, S.H.

Arry Centre, Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69, Jakarta Pusat, Jakarta 10210

Jasa yang Diberikan

Penyusunan Akta Notaris:

1. Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) atas Pengangkatan anggota Direksi Perseroan;
2. Berita Acara RUPS Tahunan (BARUPS) Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021;
3. PKPS atas Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan; dan
4. BARUPS Luar Biasa atas Persetujuan RJP 2023-2027 dan BARUPS Tahunan atas persetujuan RKAP 2023.

Periode Penugasan

Tahun 2022

Services Provided

Preparation of Notarial Deed as follows:

1. Statement of Shareholders' Resolution (PKPS) on the Appointment of the Company's Board of Directors members;
2. Minutes of the Annual GMS (BARUPS) Approval of the Annual Report for the 2021 Financial Year;
3. PKPS on the Reappointment of the Company's Board of Directors members; and
4. Extraordinary BARUPS on the approval for RJP 2023-2027 and Annual BARUPS on the approval of 2023 RKAP.

Assignment Period

Year 2022





INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN THE COMPANY'S WEBSITE

Perseroan senantiasa berupaya untuk memberi akses kepada publik sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip keterbukaan. Situs web menjadi salah satu media yang digunakan oleh Perseroan untuk memberikan informasi perkembangan usaha.

Situs web resmi Perseroan menampilkan informasi tentang pemegang saham, Kode Etik, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Laporan Tahunan, Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Satuan Pengawasan Internal. Khusus mengenai RUPS, informasi yang disajikan di situs web meliputi mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS. Situs web ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pengelolaan situs web dilakukan secara profesional dengan mengacu pada peraturan perundangan terkait.

Seluruh informasi yang tersedia pada situs web Perseroan dimutakhirkan secara berkala agar tetap akurat. Situs web Perseroan dibagi menjadi 10 bagian besar yang terdiri dari:

1. Tentang Kami
2. Tata Kelola Perusahaan
3. Whistleblowing
4. Produk
5. Berita
6. e-Procurement
7. Proyek
8. Manajemen Risiko
9. Keberlanjutan
10. IIGF Institute

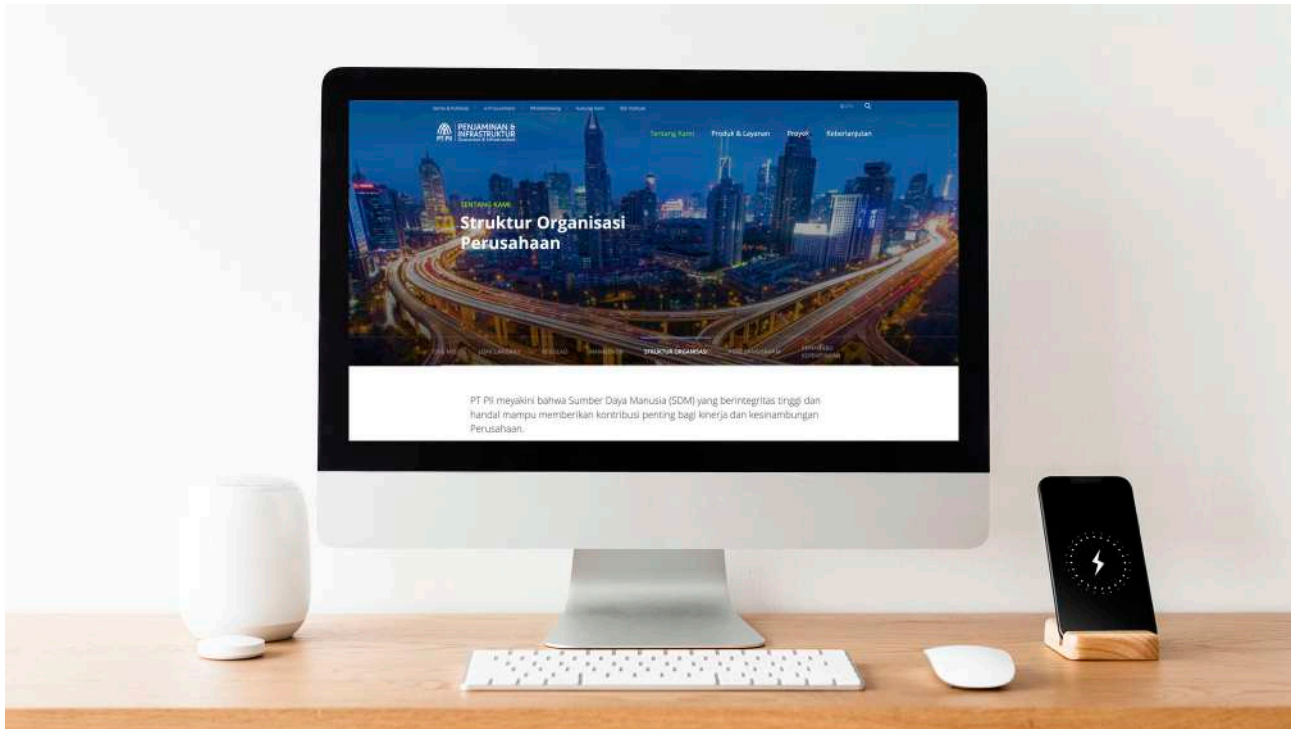
The Company always strives to provide access to the public as the implementation of transparency principle. The Company uses website to provide information on business development.

The official website of the Company presents information on the Shareholders, Code of Conduct, General Meeting of Shareholders (GMS), Annual Report, Profile of Board of Commissioners and Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Directors, Committees, and Internal Monitoring Unit Charter. Specifically regarding the GMS, various information presented on the website includes meeting agenda discussed in the GMS, summary of minutes of GMS, and information on significant dates, such as invitation and date of the GMS. This website is made in Indonesian and English. Website management is carried out professionally with reference to relevant regulations.

All information available on the Company's website is updated regularly to keep it accurate. The Company's website is divided into 10 major sections consisting of the following:

1. About Us
2. Corporate Governance
3. Whistleblowing
4. Products
5. News
6. e-Procurement
7. Project
8. Risk Management
9. Sustainability
10. IIGF Institute

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Struktur grup Perseroan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu The Company's group structure and information on shareholders until the last individual shareholder	✓	Ada, terdapat pada menu "Tentang PT PII" Available in "About IIGF" menu
Isi Kode Etik Code of Conduct Content	✓	Ada, terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan" Available in "Corporate Policy Manual" menu



Uraian <i>Description</i>	Ketersediaan <i>Availability</i>	Keterangan <i>Information</i>
<p>Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan</p> <p>Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes material on the agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the invitation to the GMS, the date of the GMS, the date on which the summary of the minutes of the GMS is announced</p>	✓	Ada, terdapat pada menu "Berita dan Publikasi" Available in "News and Publication" menu
<p>Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial statement (last 5 years)</p>	✓	Ada, terdapat pada menu "Berita dan Publikasi" Available in "News and Publication" menu
<p>Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of Board of Commissioners and Board of Directors</p>	✓	Ada, terdapat pada menu "Tentang Kami" Available in "About Us" menu
<p>Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit Charter</p>	✓	Ada, terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan" Available in "Corporate Policy Manual" menu

✓ = tersedia pada situs Perseroan | x = belum tersedia pada situs web Perseroan
✓ = available on the Company's website | x = unavailable in the Company's website





**SUMBER
DAYA
MANUSIA
HUMAN
RESOURCES**

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu keunggulan kompetitif dalam mendukung tercapainya tujuan Perseroan dan mewujudkan visi dan misi serta rencana kerja berkelanjutan yang telah ditetapkan.

The Company is fully aware that Human Resources (HR) is one of its competitive advantages in supporting goals achievement of the Company and realizing the vision and mission as well as the established sustainable work plans.

ROADMAP PENGELOLAAN SDM

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan senantiasa diselaraskan dengan strategi Perseroan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta mempertimbangkan kebutuhan Perseroan pada saat ini maupun masa yang akan datang. Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan Perseroan, pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) harus berjalan dengan baik dan lebih terarah. Oleh karena itu, Perseroan telah menyusun *Roadmap* SDM periode 2020-2024. *Roadmap* ini merupakan kelanjutan dari *Roadmap* sebelumnya dan telah disesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

HR MANAGEMENT ROADMAP

Human Resource (HR) Management of the Company is always adjusted to the Company's strategy, both in the short and long term, and takes into account current and future organizational needs. As the effort to support the Company's goals achievement, Human Resources (HR) management and development are required to be run well and more focused. Therefore, the Company has prepared an HR Roadmap for the period of 2020-2024. This roadmap is the advancement of the previous one and has been adjusted to the Company's Long Term Plan (RJPP).

Tabel Roadmap Pengelolaan SDM
Table of HR Management Roadmap

TAHUN YEAR	2020	2021	2022	2023	2024	
Fokus Focus	Transformasi Internal Internal Transformation		Pengembangan Berkesinambungan Sustainable Development		Realisasi Dampak Perubahan Realization of Changes Impact	
Tujuan Objectives	<ul style="list-style-type: none"> › Kesiapan fungsi SDM untuk menjalankan peran strategis. › Keterlibatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). › HR function readiness to run the strategic roles. › Involvement in National Economic Recovery (PEN). 		<ul style="list-style-type: none"> › Pengembangan Kompetensi SDM Perseroan (Level Managerial). › Manajemen Talenta berbasis data. › <i>Engagement management</i>. › Perbaikan dan penyesuaian proses bisnis. › The Company's HR Competency Development (Managerial Level). › Data-based Talent Management. › Engagement management. › Improvement and adjustment of business processes. 		<ul style="list-style-type: none"> › Penguatan Kompetensi Kepemimpinan SDM. › <i>Positive employee experience</i>. › Manajemen karier berbasis kompetensi. › <i>Human Capital sebagai Business Partner</i>. › Strengthening of HR Leadership Competency. › Positive employee experience. › Competency-based career management. › Human Capital as Business Partner. 	<ul style="list-style-type: none"> › Mengukur dampak perubahan terhadap organisasi dan pencapaian bisnis. › Measuring the changes impact on the organization and business achievements.



TAHUN YEAR	2020	2021	2022	2023	2024
Prioritas Program Kerja Work Program Priority	<ul style="list-style-type: none"> › Pengembangan Target <i>Operating Model</i> HC dan <i>Organisasi HC</i>. › Ketersediaan Kebijakan dan Proses Bisnis HC (<i>end-to-end</i>). › Penyesuaian KPI guna mengakomodir mandat jangka pendek. › Pembentukan organisasi baru dengan fokus spesifik jangka pendek. › Strategi budaya organisasi. › <i>Employee Engagement</i>. › Development of HC Target Operating Model and HC Organization. › Availability of HC Policies and Business Processes (<i>end-to-end</i>). › KPI adjustment to accommodate the short-term mandates. › Establishment of new organization with specific short-term focus. › Organizational culture strategy. › Employee Engagement. 	<ul style="list-style-type: none"> › Perbaikan Manajemen Kompetensi. › Perbaikan sistem <i>Job Grading</i>. › <i>Man Power Planning</i>. › Internalisasi Budaya Organisasi. › Implementasi HRIS. › Improvement of Competency Management. › Improvement of job grading system. › Manpower Planning. › Internalization of Organizational Culture. › HRIS Implementation. 	<ul style="list-style-type: none"> › Pembuatan kurikulum pelatihan dan pengembangan level manajerial. › Asesmen dan Program Pengembangan level manajerial dan Tim HC. › <i>HR Analytics</i>. › <i>Segmentasi Talenta</i>. › Preparation of training curriculum and managerial level development. › Managerial Level Assessment and Development Program and HC Team. › HR Analytics. › Talent Segmentation 	<ul style="list-style-type: none"> › Pembuatan kurikulum pelatihan dan pengembangan level non-manajerial. › Asesmen dan Program Pengembangan level non-manajerial. › Preparation of training curriculum and non-managerial level development. › Assessment and Development Program for non-managerial level. 	<ul style="list-style-type: none"> › <i>Employer Branding</i>. › <i>Impact Monitoring</i>. › Employer Branding. › Impact Monitoring.

Implementasi *Roadmap* Pengelolaan SDM yang telah dilaksanakan Perseroan pada tahun 2022, yaitu:

1. Perubahan dan penyesuaian Stuktur Organisasi.
2. Pelaksanaan *assessment* kompetensi non-teknis untuk karyawan pangkat VP-SVP.
3. Pelaksanaan Manajemen Karier dengan melakukan promosi internal ke seluruh pangkat.
4. Penyusunan kompetensi teknis karyawan.

The following is HR Management Roadmap implemented by the Company in 2022:

1. Changes and adjustments to the organizational struture.
2. Implementation of non-technical competency assessment for employees with the VP-SVP rank.
3. Implementation carrer management by internal promotions to all level.
4. Competency compilation of technical employee.

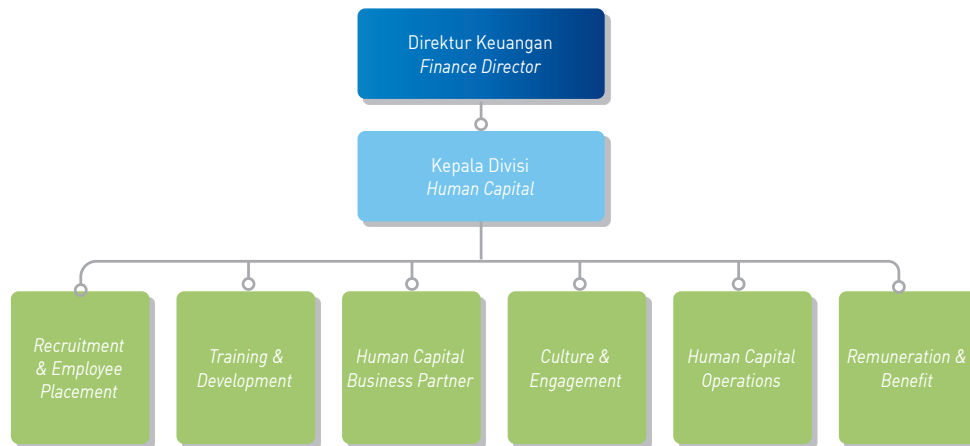
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SDM PERSON IN CHARGE OF HR MANAGEMENT

Perseroan memberikan komitmen dan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan SDM Perseroan dan memastikan pengelolaan SDM dijalankan dengan fokus yang baik agar dapat mendukung tercapainya tujuan Perseroan.

The Company provides great commitment and attention to HR management of the Company and ensures that HR management is carried out with good focus in order to support goals achievement of the Company.

Untuk itu, Perseroan membentuk Divisi Human Capital, sebuah divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SDM Perseroan. Divisi Human Capital dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan.

Therefore, the Company established the Human Capital Division that is responsible for human resources management and development of the Company. The Human Capital Division is led by a Division Head in responsible to the Finance Director.



Adapun tugas, tanggung jawab, peran dan lingkup Divisi Human Capital secara garis besar antara lain:

1. Memastikan pengembangan struktur organisasi sesuai visi, misi, dan strategi Perseroan.
2. Memastikan pemenuhan kebutuhan SDM Perseroan melalui proses seleksi dan rekrutmen SDM yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, pendekatan terkini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan berdasarkan arahan strategis organisasi sehingga program pengembangan kompetensi memenuhi kebutuhan Perseroan maupun individu karyawan.
4. Memastikan terselenggaranya sistem penilaian kinerja yang terstruktur, objektif, dan adil di seluruh unit kerja dalam organisasi.
5. Memastikan terselenggaranya sistem kompensasi dan benefit yang berlandaskan prinsip *internally fair and externally competitive*.
6. Berkontribusi dalam mencapai sasaran unit kerja yang telah ditetapkan serta melakukan pengembangan berkelanjutan setiap tahun.
7. Menginternalisasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai perusahaan.

Generally, the duties, responsibilities, roles and scope of work of the Human Capital Division are as follows:

1. Actively contributing in increasing the optimization and productivity of work units.
2. Ensuring the fulfillment of the Company's HR needs through HR selection and recruitment process according to the established procedures, based on the latest approaches and applicable laws and regulations.
3. Ensuring the effectiveness of development program implementation based on the organization strategic direction so that the competency development program meets the Company and employees' needs.
4. Ensuring the implementation of a structured, objective and fair performance appraisal system in all work units within the organization.
5. Ensuring the implementation of a compensation and benefit system in line with internally fair and externally competitive principles.
6. Contributing to achieve the established work unit targets and carrying out continuous annual development.
7. Internalizing the corporate culture following the corporate values.



8. Memastikan uraian tugas, spesifikasi pekerjaan, dan pengklasifikasian pekerjaan tersedia dalam menunjang tugas dan tanggung jawab karyawan.
9. Memastikan data dan informasi karyawan yang akurat dan termuktahir.
10. Berkontribusi aktif dalam meningkatkan optimalisasi dan produktivitas unit kerja.

Divisi Human Capital melaksanakan pengelolaan SDM dengan berfokus pada 6 (enam) fungsi, yaitu:

- **Recruitment & Employee Placement**

Fungsi rekrutmen dan penempatan karyawan dalam Divisi *Human Capital* berperan besar dan terus menjadi fokus utama di Perseroan seiring dengan perluasan mandat Perseroan dan kondisi lingkungan bisnis yang dinamis. Tantangan terbesar dalam fungsi ini adalah mendapatkan SDM yang potensial dalam waktu yang cukup singkat.

- **Training and Development**

Perseroan melalui fungsi *Training and Development* terus berupaya melaksanakan pengembangan kompetensi SDM yang berkualitas, baik teknis dan non teknis guna menyelaraskan dengan strategi dan pengembangan bisnis Perseroan. Pengembangan SDM didasarkan pada rencana pengembangan karyawan (*Individual Development Plan*) dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelatihan yang telah dijalankan oleh karyawan.

- **Human Capital Business Partner**

Peran penting dari fungsi ini adalah menyelaraskan perkembangan bisnis Perseroan dengan kapasitas organisasi dan pengembangan SDM yang mumpuni. Struktur organisasi yang efektif dan *agile* didukung dengan kejelasan uraian tugas dan pengembangan SDM, baik melalui pelatihan, rotasi, mutasi, penilaian kinerja, serta pengembangan karier dapat menunjang implementasi strategi bisnis Perseroan.

- **Culture and Engagement**

Perseroan perlu memastikan adanya nilai budaya maupun lingkungan kerja yang baik bagi karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya di dalam lingkungan Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan mengelola perubahan dan menginternalisasikan nilai budaya guna menciptakan peningkatan produktivitas, *ownership*, dan kinerja Perseroan. Hal ini merupakan bagian dari peran fungsi *Culture and Engagement*.

- **Human Capital Operations**

Fungsi dari *Human Capital Operations* di antaranya meliputi fungsi administratif dan *employee relation management*. Fungsi administratif yang dilakukan, yaitu pengelolaan data karyawan, mempersiapkan dokumen kontrak karyawan serta mengelola sistem HRIS yang ada di Perseroan. Fungsi *employee relation* ini bertanggung jawab untuk menciptakan suasana lingkungan kerja internal yang positif.

- **Remuneration and Benefit**

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki serta daya saing Perseroan, maka Perseroan memberikan remunerasi dan manfaat yang sesuai kepada karyawannya. *Remuneration and Benefit* berperan besar dalam pengelolaan remunerasi karyawan serta benefit kesejahteraan karyawan lainnya, yang meliputi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) serta asuransi.

8. Ensuring that job descriptions, job specifications, and job classifications are available to support the employees duties and responsibilities.
9. Ensuring accurate and up-to-date employee data and information.
10. Actively contributing in increasing the optimization and productivity of work units.

Human Capital Division carries out HR management by focusing on 6 (six) functions as follows:

- **Employee Recruitment & Placement**

The Company keeps focussing on the employee recruitment and placement function within the Human Capital Division which takes a major role in line with the expansion of the Company mandate and dynamic business environment conditions. The biggest challenge in this function is obtaining potential human resources in a relatively short time.

- **Training and Development**

Through Training and Development function, the Company continues to strive to develop quality HR competencies, both technical and non-technical, in order to align with business strategy and development of the Company. HR development is based on an Individual Development Plan and continuously evaluates the training that has been carried out by employees.

- **Human Capital Business Partners**

The important role of this function is to align the Company's business development with the organizational capacity and development of the qualified human resources. An effective and agile organizational structure supported by clear job descriptions and HR development, both through training, rotation, transfer, performance appraisal, and career development is able to support business strategy implementation of the Company.

- **Culture and Engagement**

The Company needs to ensure that there are cultural values and a good work environment for employees to carry out their work within the Company. In this case, the Company manages changes and internalizes cultural values in order to create increased productivity, ownership and performance of the Company. This is part of the role of the Culture and Engagement function.

- **Human Capital Operations**

Human Capital Operations functions is include administrative functions and employee relations management. Administrative functions performed include managing employee data, preparing employee contract documents and managing the HRIS system in the Company. The employee relations function is responsible for creating positive internal work environment.

- **Remuneration and Benefits**

The Company provides appropriate remuneration and benefits to its employees to maintain and improve human resources quality and competitiveness. Remuneration and Benefits takes a major role in managing employee remuneration and other employee welfare benefits, which include the Health and Employment Social Security Management Agency (BPJS), Financial Institution Pension Fund (DPLK) and insurance.

MANAJEMEN SDM HR MANAGEMENT

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis di masa depan dan dinamika yang bergerak begitu cepat, Perseroan tentu membutuhkan bibit-bibit talenta unggul yang senantiasa dapat diandalkan untuk mendukung kemajuan organisasi. Selain mengandalkan program pengembangan karyawan, Perseroan juga melaksanakan program rekrutmen dan seleksi karyawan untuk menjaring talenta potensial yang ada di pasar tenaga kerja.

Kegiatan seleksi karyawan yang diselenggarakan Perseroan senantiasa dilakukan secara transparan dan terbuka bagi siapa pun tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan tertentu, sepanjang kandidat yang bersangkutan memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Tahapan ini menjadi penting dalam hal pengelolaan SDM karena pada proses inilah Perseroan mendapatkan kandidat yang sesuai dengan budaya dan tujuan strategis yang hendak dicapai Perseroan.

Selama tahun 2022, Perseroan berhasil merekrut 17 orang karyawan baru, baik yang berstatus *pro-hire* maupun *fresh graduates*, yang diharapkan dapat menjadi tumpuan perkembangan bisnis Perseroan dan penerus di masa depan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Peningkatan kompetensi karyawan menjadi hal penting, sehingga Perseroan berupaya menjadi fasilitator bagi karyawan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan yang mendukung perkembangan kariernya. Program pengembangan kompetensi disesuaikan dengan *Individual Development Plan* setiap karyawan yang mencakup kompetensi teknis dan non teknis.

Program pengembangan kompetensi karyawan Perseroan dilaksanakan berdasarkan Model Kompetensi (*Competency Model*) dan kesempatan yang terbuka bagi setiap karyawan. Perseroan membuka kesempatan bagi setiap karyawan untuk mengajukan diri menjadi peserta pelatihan dengan mengajukan persyaratan administrasi tertentu dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan divisi/atasan masing-masing dengan mempertimbangkan kebutuhan tugas, rencana pengembangan kompetensi dan pengembangan usaha. Perseroan memastikan tidak terjadinya tindakan diskriminasi dalam memperlakukan karyawan sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja yang *excellence*.

Program pengembangan kompetensi karyawan yang dilaksanakan oleh Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan secara merata, baik untuk kemampuan umum maupun

Recruitment Policy and Implementation

In facing various business challenges and dynamics that are moving quickly, the Company certainly needs superior talent novices that are reliable to support progress of the Company's organization.. Apart from relying on employee development program, the Company also implements employee recruitment and selection programs to capture the best talent in the labor market.

Employee selection activities organized by the Company are always carried out transparently and open to everyone regardless of gender, ethnicity, religion, race and certain groups, as long as the candidate concerned meets the qualifications and requirements set by the Company. This stage is important in terms of HR management since it is in this process that the Company obtains candidates according to the culture and goals to be achieved by the Company.

During 2022, the Company managed to recruit 17 new employees, both those with pro-hire status and fresh graduates, who are expected to become the foundation for the Company's business development and the future's successors.

Competency Development Policy and Implementation

Improving employee competence is important, so that the Company seeks to be the facilitator for the employees in participating the competency development programs. The programs are expected to improve employees' competency which will support career development. The competency development program is adjusted to each employee's training needs analysis which includes technical and non-technical competencies.

Employee competency development programs of the Company are conducted based on the Competency Model and the opportunity is open to every employee. The Company opens opportunities for every employee to apply for participating on the trainings by submitting certain administrative requirements and obtaining approval from the respective division head/superior by considering tasks requirements, competency development plans and business development. The Company guarantees that there is no discrimination in treating its employees in order to create fair and honest treatment which in accordance with each potential, ability, experience and skills to achieve excellent performance.

Employee competency development program conducted by the Company are expected to be able to increase employees' competence evenly, both for general abilities and special abilities



kemampuan khusus yang diperlukan masing-masing karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dan terbuka untuk mengikuti program pengembangan.

Program pengembangan kompetensi karyawan, yang diselenggarakan oleh Divisi Human Capital Perseroan, dikategorikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (1) *inhouse training*; (2) *public training*; dan (3) *knowledge sharing*. Program pengembangan kompetensi karyawan yang dilaksanakan pada tahun 2022, tersaji pada tabel berikut ini:

needed by each employee to improve their performance. Every employee has equal opportunity and is open to participate in development programs.

Employee competency development programs held by the Company's Human Capital Division is categorized into 3 (three) classifications, namely (1) in-house training; (2) public training; and (3) knowledge sharing. Employee competency development program implemented in 2022 is presented on the following table:

Uraian Description	Jumlah Kegiatan Pelatihan Total Training Activities	Total Peserta Total Participants	Rata-rata Peserta per Pelatihan Average Participants per Training
<i>In House Training</i>	6	107	18
<i>Public Training</i>	53	79	1
<i>Knowledge Sharing</i>	9	154	13

Tabel Pelaksanaan *In House Training*

Table of In House Training Implementation

No.	Pelatihan	Training
1	Persiapan CP3P <i>Foundation Batch 3</i> tahun 2022	Preparation for Batch 3 CP3P Foundation in 2022
2	Konsinyering dan Sertifikasi CP3P Level <i>Foundation Batch 3</i> tahun 2022	Consignment and Certification for Batch 3 CP3P Level Foundation in 2022
3	Persiapan Sertifikasi CP3P Level <i>Preparation Batch 1</i> Internal Tahun 2022	Preparation for Batch 1 Internal CP3P Level Preparation Certification in 2022
4	Sertifikasi CP3P Level <i>Preparation Batch 1</i> Internal Tahun 2022	Preparation for Batch 1 Internal CP3P Level Certification for 2022
5	Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi <i>Risk Officer</i> QRMO	Preparation of Risk Management Certification for QRMO Risk Officers
6	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko bagi <i>Risk Officer</i> QRMO	Risk Management Certification Examination for QRMO Risk Officers

Tabel Pelaksanaan *Public Training*

Table of Public Training Implementation

No.	Pelatihan	Training
1	Pembiayaan Infrastruktur	Infrastructure Financing
2	SLA untuk Proyek KPBU perumahan	SLA for Housing PPP Project
3	Pelatihan <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	Training on Analytical Hierarchy Process (AHP)
4	Webinar <i>Green Economy Outlook 2022 "Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy"</i>	Webinar on Green Economy Outlook 2022 "Direction of Indonesian Policies and Challenges in Realizing a Green Economy"
5	<i>Compliance Management System ISO 37301 2021 and Certification</i>	Compliance Management System ISO 37301 2021 and Certification
6	<i>Assessing the Bankability of a Geothermal Prospect in Exploration Phase</i>	Assessing the Bankability of a Geothermal Prospect in Exploration Phase
7	Sertifikasi HPTI	HPTI Certification
8	<i>Fundamentals of Land Value Capture</i>	Fundamentals of Land Value Capture
9	<i>Delivering digital transformation: Challenges and Opportunities in Financial Industry</i>	Delivering digital transformation: Challenges and Opportunities in Financial Industry
10	<i>Employee Engagement Summit 2022</i>	Employee Engagement Summit 2022
11	Fungsi <i>Oversight</i> Terhadap Audit Eksternal	Oversight Function of External Audit

No.	Pelatihan	Training
12	<i>Implementing GRC (with CGRCP Certification)</i>	Implementing GRC (with CGRCP Certification)
13	Sertifikasi Kompetensi Ahli Manajemen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	Certification for Goods/Services Procurement Contract Management Expert Competency
14	<i>Certified Contract Management Specialist-CCMS</i>	Certified Contract Management Specialist- CCMS
15	<i>Workshop Standar Audit Internal & Kode Etik Profesi oleh Yayasan Pengembangan Internal Audit (YPIA)</i>	Workshop on Internal Audit Standards & Professional Code of Conducts by Internal Audit Development Foundation (YPIA)
16	<i>Transit Oriented Development (TOD) Forum</i>	Transit Oriented Development (TOD) Forum
17	Indonesia <i>Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi T20 "Equitable Risk Allocation"</i>	Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) 23 rd Edition T20 "Equitable Risk Allocation"
18	<i>Workshop Implementasi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara</i>	Workshop on Implementation of State Financial Risk Management
19	<i>Training Dual ERMCP&QRMP</i>	Training on Dual ERMCP&QRMP
20	<i>Building Digital Capability in Organization and Creating Leaders from Within & Leader as a Coach</i>	Building Digital Capability in Organization and Creating Leaders from Within & Leader as a Coach
21	<i>Winning Customers' Hearts and Creating "Startup" Culture & Ecosystem in Organization</i>	Winning Customers' Hearts and Creating "Startup" Culture & Ecosystem in Organization
22	<i>Smart Corporate Financing and Legal and Ethical Aspects in Business Partnership</i>	Smart Corporate Financing and Legal and Ethical Aspects in Business Partnership
23	<i>Advanced Financial Modelling and Valuation</i>	Advanced Financial Modelling and Valuation
24	<i>Workshop Stakeholders Engagement & Communications Strategy in a Changing World</i>	Workshop Stakeholders Engagement & Communications Strategy in a Changing World
25	<i>Advanced Financial Modelling and Valuation</i>	Advanced Financial Modelling and Valuation
26	Pengenalan dan <i>Sharing</i> HRIS Perseroan	Introduction and Sharing of the Company's HRIS
27	Pelatihan <i>Infrastructure Business Case</i>	Training on Infrastructure Business Case
28	Seminar Nasional Ekonomi Islam dan <i>Stadium Generale "Peran Ekonomi syariah dalam pembaganunan infrastruktur ekonomi nasional yang berkelanjutan"</i>	Islamic Economics National Seminar and Generale Stadium "The Role of Islamic Economics in the development of sustainable national economic infrastructure"
29	<i>Change Agent Development Program</i>	Change Agent Development Program
30	<i>Certified Salary Structure Designer (CSSD)</i>	Certified Salary Structure Designer (CSSD)
31	Doktrin <i>Fiduciary Duty</i>	Fiduciary Duty Doctrine
32	<i>Exam AWS Certified Cloud Practitioner</i>	Exam AWS Certified Cloud Practitioner
33	<i>Legal Drafting</i>	Legal Drafting
34	<i>Strengthening Public and Private Collaboration For Better Infrastructure</i>	Strengthening Public and Private Collaboration For Better Infrastructure
35	<i>The credit landscape for bank and private credit lenders in APAC</i>	The credit landscape for bank and private credit lenders in APAC
36	<i>Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar</i>	Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar
37	<i>The Speed of Trust Foundations</i>	The Speed of Trust Foundations
38	Esensial Manajemen Proyek	Project Management Essentials
39	<i>Citywide Inclusive Sanitation and Faecal Sludge Management (CWIS)</i>	Citywide Inclusive Sanitation and Faecal Sludge Management (CWIS)
40	<i>Financial Services Accounting and Tax</i>	Financial Services Accounting and Tax
41	<i>IIA Indonesia National Conference "Impactful Internal Audit In a Changing World"</i>	IIA Indonesia National Conference "Impactful Internal Audit In a Changing World"
42	<i>Workshop Nasional Online</i>	Workshop National Online
43	<i>Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Lanjutan</i>	Qualified Internal Auditor (QIA) Advance Level
44	<i>People Matters Employee Experience (EX) Indonesia Conference 2022</i>	People Matters Employee Experience (EX) Indonesia Conference 2022
45	<i>Infrastructure Investment and Financing</i>	Infrastructure Investment and Financing
46	<i>Growing Infrastructure: Enabling & Structuring for Private Sector Module 1 & CP3P Certification</i>	Growing Infrastructure: Enabling & Structuring for Private Sector Module 1 & CP3P Certification



No.	Pelatihan	Training
47	Finance For Non - Finance Professionals	Finance For Non - Finance Professionals
48	General Affair Management	General Affair Management
49	Understanding Successful PPP Project	Understanding Successful PPP Project
50	Certified HR Business Partner	Certified HR Business Partner
51	Program Secondment 2022	Program Secondment 2022
52	ESG Trends & Economic Outlook	ESG Trends & Economic Outlook
53	Webinar How To Face The Trends in Project Management	Webinar on How To Face The Trends in Project Management

Tabel Pelaksanaan Knowledge Sharing

Table of Knowledge Sharing Implementation

No.	Pelatihan	Training
1	Introductory Workshop on Understanding Successful PPP Project	Introductory Workshop on Understanding Successful PPP Project
2	Workshop on Housing PPP SLA	Workshop on Housing PPP SLA
3	Konsultasi Publik: Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 3 tahun 2022 tentang IKN	Public Consultation: the Regulation Draft for Implementing Law No. 3 of 2022 concerning IKN
4	Sharing Session PT Bursa Efek Indonesia (Pengenalan Pasar Modal & Insight Market Sektor Infrastruktur di Pasar Modal)	PT Bursa Efek Indonesia Sharing Session (Introduction to the Capital Market & Insight Market for Infrastructure Sector in the Capital Market)
5	Sosialisasi SEOJK mengenai relaksasi terhadap perusahaan publik sehubungan dengan Covid-19	FSA Circular Dissemination regarding relaxation of public companies related to Covid-19
6	Infrastructure-Financing Structures, Instruments and Incentives Short Course	Infrastructure-Financing Structures, Instruments and Incentives Short Course
7	ORASI (Obrolan Investasi untuk Negeri) Bersama SMV Kemenkeu : Jalankan Hobi Tak Lupa Investasi	ORASI (Investment Chat for the Nation) with the Ministry of Finance's SMV: Practicing Hobby Don't Forget the Investment
8	Awareness Training BCMS ISO 22301:2019	Awareness Training BCMS ISO 22301:2019
9	Workshop Stakeholders Engagement & Communications Strategy in a Changing World	Workshop on Stakeholders Engagement & Communications Strategy in a Changing World

Sepanjang tahun 2022 Perseroan telah menginvestasikan dana untuk pendidikan dan pelatihan karyawan sebesar Rp1.101 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp902,04 juta. Peningkatan biaya ini terjadi karena 20% pada tahun 2022, kondisi sudah kembali normal dan pelaksanaan pelatihan secara *offline* sudah mulai dilaksanakan.

Throughout 2022, the Company invested Rp1,101 billion in employees' education and trainings. This amount is higher compared to 2021 which reached Rp902.04 million. This increase in costs is due to This costs increase was caused by 20% in 2022, where the there is condition recovery to normal and offline training has started to be implemented.

Tabel Perbandingan Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan Perseroan Tahun 2021-2022

Table of Comparison of the Company Employee Competency Development Costs for 2021-2022

	Realisasi 2022 (Rp-juta) 2022 Realization (Rp-million)	Anggaran 2022 (Rp-juta) 2022 Budget (Rp-million)	Penyerapan Anggaran 2022 (%) 2022 Budget Absorption (%)	Realisasi 2021 (Rp-juta) 2021 Realization (Rp-million)	Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2022 (%) 2021 Realization Against 2022 Realization (%)
Investasi Pelatihan dan Pendidikan Investment in Training and Education	1.101	2,549	68.94%	902	22%

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier

Perseroan berkomitmen untuk memberi kesempatan kepada setiap karyawan dalam pengembangan kariernya. Perseroan telah menetapkan jenjang karier yang jelas dan pasti melalui jalur fungsional maupun struktural. Pengembangan karier karyawan Perseroan bertujuan untuk:

Policy and Implementation of Career Development

The Company is committed to providing opportunities for every employee in developing their career. The Company established clear and definite career paths through functional and structural paths. The Company's employee career development program has purposes as follow:

1. Membantu pencapaian prestasi atau tujuan individu sebagai bentuk hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tujuan Perseroan.
2. Meningkatkan produktivitas, motivasi, dan loyalitas karyawan.
3. Membantu karyawan memahami dan mengembangkan potensi dan keahliannya, sehingga mampu menciptakan iklim kerja positif.
4. Mengurangi tingkat *turnover*.

Perseroan melaksanakan *review* tengah tahun atas pencapaian kinerja seluruh karyawan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *monitoring* untuk mencapai target kinerja individu, divisi, dan korporasi. Perseroan melalui Divisi Human Capital juga tetap berupaya untuk mengimplementasikan budaya *coaching* sebagai salah satu bentuk Pengembangan SDM seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga telah ditetapkan komposisi program pengembangan *hard competency* dan *soft competency* sesuai dengan tingkat jabatan.

Divisi Human Capital melakukan penyempurnaan kebijakan secara berkala dan optimalisasi pelaksanaan praktik ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme SDM akan menentukan masa depan Perseroan.

Penilaian Kinerja

Perseroan memiliki sistem penilaian kinerja karyawan yang terintegrasi dan menyeluruh serta terdokumentasi dengan baik agar dapat digunakan sebagai *tools* untuk membantu masing-masing karyawan dalam mencapai potensi terbaik mereka. Kinerja karyawan dinilai oleh atasan langsung dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan target individual menggunakan *Key Performance Indicators* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC) atau disebut juga dengan BSC KPI. Kemudian, dalam rangka *monitoring* pencapaian kinerja individu, divisi dan Perseroan, Divisi Human Capital juga melakukan evaluasi kinerja tengah tahun.

Hasil penilaian kinerja karyawan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan oleh Divisi Human Capital untuk menentukan program pengembangan dan pelatihan yang dibutuhkan selanjutnya, optimalisasi penempatan karyawan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, pemberian *reward and punishment*, penentuan remunerasi, dan perencanaan suksesi karyawan yang berpotensi tinggi untuk diangkat ke posisi manajemen puncak.

Strategi dan Kebijakan Remunerasi

Dalam sistem pengelolaan SDM, remunerasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam upaya menarik (*attract*), memotivasi (*motivate*), dan mempertahankan (*retain*) karyawan-karyawan terbaik dalam rangka penyediaan SDM yang berkualitas.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang dinamis, responsif, kompetitif, adil dan seimbang, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kebijakan penerapan remunerasi di lingkungan Perseroan didasarkan atas kinerja Perseroan dan karyawan, yang disesuaikan dengan strategi Perseroan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Assisting to the achievement of individual and corporate goals as reciprocal relationship that is beneficial for the employees' welfare and the Company's goals.
2. Increasing employee productivity and loyalty.
3. Assisting the employees to understand their potential and expertise, so as to create a positive work climate.
4. Reducing employee turnover.

The Company reviews the mid-year performance achievements of the entire employees. It was conducted as a form of monitoring the achievement of individual, divisional and corporate performance targets. The Company through its Human Capital Division also keeps striving to implement a coaching culture as the HR Development as implemented in previous years. In addition, the composition of the hard competency and soft competency development programs has also been determined according to the position level.

Human Capital Division periodically improves the policies and optimizes the implementation of employment practices in order to improve the quality, competence and professionalism of HR which will determine the Company future.

Performance Appraisal

The Company has an integrated yet comprehensive and well-documented employee performance appraisal system to be used as facility to assist each employee in achieving their best potential. Employee performance is assessed by the immediate supervisor with reference to the achievement of individual goals and targets using *Balanced Score Card* (BSC)-based *Key Performance Indicators* (KPI) or also known as BSC KPI. Then, in order to monitor individual, divisional and corporate performance achievements, the Human Capital Division also evaluated the mid-year performance.

Performance evaluation results of the employees are then used as a basis for consideration by the Human Capital Division to determine the required development and training programs, optimize the placement of employees based on their competencies, provide rewards and punishments, determine remuneration, and plan for the employees succession with high potential to be appointed to other top management position.

Remuneration Strategy and Policy

In HR management system, remuneration is an important aspect in order to attract, motivate and retain the best employees in the context of providing quality human resources.

The Company is committed to implementing dynamic, responsive, competitive, fair and balanced remuneration system, which is implemented following the applicable regulations. The remuneration policy within the Company is based on the Company's and employees' performance, which is adjusted to the Company's short and long term strategy.



Perseroan menerapkan sistem remunerasi karyawan yang kompetitif dan dipastikan telah memenuhi ketentuan tingkat upah minimum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Remunerasi juga disusun dengan mempertimbangkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku seperti ketenagakerjaan, maupun melakukan *benchmark* dengan organisasi sejenis lainnya. Terkait hal tersebut, Perseroan telah menetapkan standar penggajian berdasarkan pemeringkatan Karyawan dan jenjang jabatan yang disandarkan kepada *remuneration survey* dalam industri sejenis dengan memperhatikan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dalam rangka mengupayakan kesejahteraan setiap karyawan, Perseroan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan dengan memperhatikan *gap* rasio gaji seluruh karyawan untuk menghindari terjadinya kesenjangan yang terlalu tinggi. Dapat dipastikan bahwa seluruh karyawan Perseroan telah mendapatkan remunerasi yang sesuai dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya sistem remunerasi yang baik ini, diharapkan dapat menjadi salah satu strategi retensi karyawan untuk meningkatkan loyalitas mereka kepada Perseroan, dan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan Perseroan karena setiap karyawan akan bekerja secara maksimal dalam mencapai rencana kerja Perseroan.

Struktur remunerasi karyawan Perseroan senantiasa disesuaikan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan unsur kompetitif dengan eksternal dan unsur *fairness* dalam penerimaan pendapatan karyawan sesuai dengan masing-masing level dan kinerja karyawan terkait. Secara umum, setiap karyawan Perseroan berhak atas beberapa komponen remunerasi sebagai berikut:

1. Gaji pokok;
2. Tunjangan Tetap (tunjangan jabatan, perumahan, komunikasi dan transportasi);
3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
4. Tunjangan Cuti Tahunan;
5. Tunjangan Cuti Besar;
6. Tunjangan Pakaian; dan
7. Tunjangan Profesional.

The Company implements competitive employee remuneration system and ensures that it meets the applicable minimum wage rate requirements as stipulated in the statutory provisions. Remuneration is also prepared by taking into account the applicable laws and regulations such as employment, as well as benchmarking with other similar organizations. In this regard, the Company has set standard of remuneration based on employee rankings and position levels based on remuneration surveys in similar industries considering the Labor Law and Provincial Minimum Wage Regulations (UMP).

In the effort of every employee welfare, the Company establishes the employee remuneration policy by taking into account the gap in the salary ratio of the entire employees to avoid overly high gaps. It could be confirmed that all the Company's employees have received remuneration according to their respective positions and functions. With this good remuneration system, it is expected to become one of the employee retention strategies to increase their loyalty to the Company, and result in positive impacts on the Company's growth since every employee will work optimally in achieving the Company's work plan.

Employee remuneration structure of the Company is constantly adjusted every year taking into account the competitive element with external parties and the element of fairness in receiving employee income following each level and performance of the related employees. In general, each employee of the Company is entitled to the following remuneration components:

1. Basic salary;
2. Fixed allowances (position, housing, communication and transportation allowances);
3. Religious holiday allowance;
4. Annual Leave Allowances;
5. Considerable Leave Allowances;
6. Clothing Allowance; and
7. Professional Allowance.

SURVEI KETERIKATAN KARYAWAN EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY

Perseroan menilai bahwa karyawan memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis Perseroan. Pengembangan diri karyawan tentu akan membawa dampak bagi pertumbuhan bisnis Perseroan. Oleh sebab itu, penting bagi Perseroan untuk mengetahui tingkat keterikatan karyawan secara personal terhadap Perseroan sebagai tempat pengembangan kariernya.

Survei keterikatan karyawan telah dilaksanakan di Perseroan pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keterikatan karyawan terhadap Perseroan agar karyawan merasa puas dan bangga bekerja di Perseroan.

Pada tahun 2022, Survei Keterikatan Karyawan diikuti oleh 148 karyawan dengan hasil survei keterikatan dengan skor 77. Hasil survei ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2021 dengan skor 61.

The Company considers that employees have greatly important role for business continuity of the Company. Employees' self-development will certainly bring impacts on the business growth of the Company. Therefore, it is important for Perseroan to figure out the level of employees' engagement personally with the Company as a place for their career development.

Employee engagement surveys have been conducted at the Company in the last few years. It aimed at identifying and evaluating employee engagement level with the Company so that employees feel satisfied and proud of working for the Company.

In 2022, the Employee Engagement Survey attended by 148 employees with score 77 engagement survey results. The survey results are higher when compared to the survey results in 2021 which reached score 61.

PROGRAM PENSIUN PENSION PROGRAM

Perseroan telah memiliki program pensiun bagi seluruh karyawan dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Usia pensiun karyawan ditetapkan 56 tahun, dengan waktu kerja terakhir jatuh pada akhir bulan saat karyawan berusia 56 tahun.
2. Dalam menjaga efisiensi dan efektivitas bisnis Perseroan serta memberikan kesempatan untuk pengembangan potensi diri karyawan di luar Perseroan, maka Perseroan dapat menentukan atau memberikan kesempatan pensiun dini kepada karyawan. Di samping itu, karyawan juga dapat mengajukan pensiun dini sebagai aspirasi individu setelah masa kerja 10 tahun dengan usia minimal 50 tahun dengan persetujuan Direksi.
3. Pengajuan pensiun diatur dalam SK Direksi.

Program bagi Karyawan yang akan Memasuki Masa Pensiun

Perseroan memiliki kebijakan terkait masa pensiun karyawan. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan SK Direksi, yang antara lain mengatur tentang fleksibilitas waktu kerja, pelatihan dan hak-hak serta *benefit*.

The Company has pension plan for all employees with the following conditions:

1. The retirement age of employees is 56 years, with the last working time effective at the end of the month when the employee is 56 years old.
2. In maintaining the efficiency and effectiveness of the Company's business and providing opportunities to develop the employees' potential outside the Company, the Company can determine or provide early retirement opportunities for the employees. In addition, employees may also apply for early retirement on their will after 10 years of service with a minimum age of 50 years upon the approval of the Board of Directors.
3. Pension applications are regulated in the Board of Directors' Decree.

Program for Employee Entering Retirement Period

The Company has a policy related to employee retirement. The policy is established following the Board of Directors' Decree which regulates, among other, flexibility in working time, training, rights and benefits.



Di samping itu, seluruh karyawan Perseroan juga didaftarkan pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun Karyawan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menjadi salah satu program persiapan pensiun bagi karyawan. Sebagai tambahan bekal pensiun, Perseroan juga menyediakan pelatihan bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun agar mereka lebih siap dalam menghadapi masa pensiun mereka.

Furthermore, the entire employees of the Company also take part in the Old Age Security (JHT) and Employee Pension Benefits programs managed by Employment BPJS. Those become the retirement preparation program for the employees. Apart from retirement provisions, the Company also provides training for employees who are getting into retirement so as to be better prepared for retirement.

TURNOVER KARYAWAN EMPLOYEE TURNOVER

Dari tahun ke tahun, Perseroan selalu berupaya menjaga tingkat *turnover* karyawan agar tetap terkendali pada batas yang wajar sehingga tidak mengganggu proses pencapaian tujuan Perseroan. Perseroan menyadari bahwa tingkat perputaran karyawan menjadi tantangan yang tidak terhindarkan dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya strategi retensi yang tepat untuk meningkatkan loyalitas karyawan.

Every year, the Company always strives to keep the employee turnover rate under control at a reasonable level so as not to become the obstacle in the process of achieving the Company's goals. The Company realizes that the employee turnover rate is the unavoidable challenge in an organization. Therefore, it is necessary to have an appropriate retention strategy to increase employee loyalty.

Perseroan melakukan *review* secara berkala terhadap kebijakan pengelolaan SDM yang dimiliki agar tetap relevan dengan dinamika bisnis yang terjadi dan mampu menjawab kebutuhan karyawan. Dengan diterapkannya kebijakan pengelolaan SDM yang tepat dan terjalannya hubungan antar karyawan yang harmonis, Perseroan mampu mengendalikan tingkat perputaran karyawan pada angka yang relatif rendah setiap tahunnya.

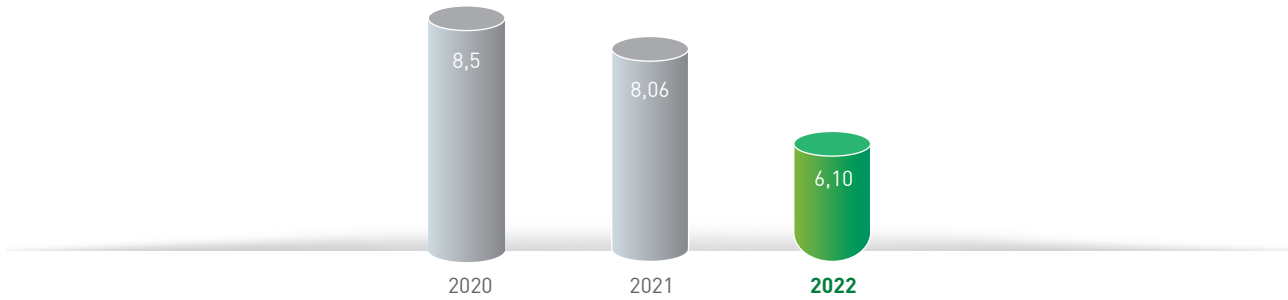
The Company periodically reviews HR management policies so as to remain relevant to the current business dynamics and are able to respond to employees' needs. With the implementation of appropriate HR management policies and the establishment of harmonious industrial relations, the Company is able to control the employee turnover rate at a relatively low rate every year.

Informasi lebih detail terkait tingkat *turnover* karyawan Perseroan pada 2 (dua) tahun terakhir tersaji pada tabel di bawah ini:

More detailed information regarding the Company's employee turnover rate in the last 2 (two) years is presented in the table below:

Penjelasan Explanation	2022	2021
Pensiun/Pension	-	-
Meninggal Dunia/Passed Away	-	1
Mengundurkan diri/Resign	9	12
Diberhentikan/Dismissed	-	-
Jumlah Karyawan/Total Employees	151	143
Rasio Turnover/Turnover Ratio	6,10%	8,06%

Rasio Turnover 2020-2022 (%)
Turnover Ratio in 2020-2022



Untuk mengendalikan tingkat *turnover* karyawan, Perseroan secara rutin melaksanakan beberapa hal berikut ini:

1. Meningkatkan *engagement* karyawan melalui beberapa program kebersamaan seperti *Company Gathering*, Pertandingan antar karyawan dan *Townhall Meeting* Direksi bersama Karyawan.
2. Mengupayakan jenjang dan pengembangan karier untuk setiap karyawan.
3. Memberikan fasilitas dan peluang yang luas untuk belajar melalui *public training* dan *scholarship*.
4. Memberikan fasilitas kesehatan dan tunjangan bagi karyawan dan keluarga.

To control the employee turnover rate, the Company routinely carries out the following efforts:

1. Increasing employee engagement through several joint programs such as Company Gathering, Competitions between employees and Townhall Meetings of Directors with the Employees.
2. Striving for career paths and development for each employee.
3. Providing extensive facilities and opportunities to learn through public training and scholarships.
4. Providing health facilities for employees and their families.

BPJS KETENAGAKERJAAN EMPLOYMENT BPJS

Perseroan telah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Sampai dengan akhir tahun 2022, seluruh karyawan Perseroan telah ikut serta dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.

The Company has implemented Republic of Indonesia Government Regulation No. 46 of 2015 concerning the Implementation of the Old Age Security Program and the Pension Guarantee Program following the Government Regulation no. 45 of 2015 concerning Implementation of the Pension Guarantee Program. Until the end of 2022, all Perseroan employees have participated in the BPJS Employment Program.



INTERNALISASI BUDAYA KERJA

INTERNALIZATION OF WORK CULTURE

Budaya kerja Perseroan yaitu InTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* dan *Excellence*) telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam seluruh kegiatan usaha Perseroan. Revitalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang sudah ada senantiasa dilakukan untuk memastikan kesesuaian nilai-nilai tersebut dalam mendukung pencapaian-pencapaian Perseroan dalam jangka panjang.

Revitalisasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan program-program budaya yang melibatkan karyawan terpilih dari level Staf sampai Executive Vice President (EVP). Pada tahun 2022 Program Internalisasi Budaya Kerja yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Program Inovasi

Setiap Divisi selama satu tahun didorong untuk membuat dan mengimplementasikan program terobosan baru yang dapat berdampak baik pada percepatan proses kerja, *engagement* karyawan, serta pengembangan bisnis Perseroan.

2. Program e-Learning: Udemmy Business untuk Perseroan

Program *e-Learning* ini dijalankan sepanjang tahun 2022 dengan tujuan mendorong budaya *Think Big* pada Karyawan serta mengajak seluruh Karyawan mengoptimalkan penggunaan Udemmy sebagai *platform* belajar daring. Melalui program ini, kami juga memberikan apresiasi dan predikat "*Pll Champion*" kepada karyawan yang paling aktif mengembangkan diri melalui Udemmy.

3. Program Employee Engagement Lainnya

Program-program kebersamaan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* karyawan kepada Perseroan, antara lain:

- Company Gathering*: Bali Starcation
- PT Pll 17-an
- #IIGFansKenalProyek: *Goes To Semarang*
- #IIGFansSehatBareng: *Tiba-Tiba Olahraga*
- #IIGFansSehatBareng: *Burn Your Calories*
- #IIGFansBerbagi: Donor Darah Pll

The Company's work culture, namely InTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* and *Excellence*) is the inseparable part of all business activities of the Company. Revitalization of the existing organizational cultural values is always carried out to ensure the suitability of these values in supporting the Company's long-term achievements.

This revitalization is followed up with the preparation of cultural programs involving the selected employees from the Staff level to the Executive Vice President (EVP) level. In 2022, the implemented Work Culture Internalization Program includes the following:

1. Innovation Program

For one year, each Division is encouraged to create and implement new breakthrough programs that is able to bring positive impacts on accelerating work processes, employee engagement, and developing business of the Company.

2. E-Learning Program: Udemmy Business for the Company

This e-Learning program will be implemented throughout 2022 with the purpose of encouraging a *Think Big* culture among employees and inviting all employees to optimize the use of Udemmy as an online learning platform. Through this program, we also give appreciation and the title "*Pll Champion*" to employees who are most actively developing themselves through Udemmy.

3. Other Employee Engagement Programs

Other joint programs purposed to increase employee engagement with the Company, including:

- Company Gathering* : Bali Starcation
- IIGF 17
- #IIGFansKnowProject : *Goes To Semarang*
- #IIGFansSehatBareng: *Suddenly Sports*
- #IIGFansSehatBareng : *Burn Your Calories*
- #IIGFansSharing: *Pll Blood Donation*

HUBUNGAN INDUSTRIAL INDUSTRIAL RELATIONSHIP

Perseroan terus berupaya menghadirkan lingkungan kerja yang terbuka, positif, dan progresif untuk meningkatkan hubungan industri yang harmonis, dinamis, dan adil antara Perseroan sebagai pihak pemberi kerja dengan para karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Pengelolaan hubungan industrial pada lingkup Perseroan senantiasa menjunjung tinggi hak dan kewajiban karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berbagai kesempatan, manajemen membuka komunikasi dan forum diskusi bersama dengan karyawan untuk membahas isu-isu di bidang ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan kapan pun sesuai dengan kebutuhan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan terciptanya hubungan kerja yang sehat maka produktivitas kerja dan *engagement* masing-masing karyawan juga akan meningkat. Dalam mewujudkan hubungan kerja yang harmonis tersebut, Perseroan juga menghormati hak karyawan untuk berserikat dan berkumpul.

Komitmen Perseroan untuk membangun dan memelihara Hubungan Industrial yang sehat dan harmonis sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang sehat dan konstruktif antara karyawan, Perseroan dan Pemerintah (Tripartit), dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan dan Perseroan. Komunikasi secara berkala dan berkesinambungan antara Perseroan dengan karyawan sangat dibutuhkan dalam membangun dan memelihara hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja.

Perseroan akan secara konsisten melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan Perseroan serta berkomitmen untuk menindaklanjuti keluhan terkait masalah ketenagakerjaan yang diajukan kepada Perseroan dengan sebaik-baiknya. Perseroan juga berkomitmen untuk memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier secara adil, wajar, dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Beberapa pendekatan telah dilakukan oleh Perseroan dalam upaya menciptakan suasana kerja yang terbuka, positif dan progresif untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis, antara lain dengan menyelenggarakan *townhall meeting* yang melibatkan seluruh karyawan atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan *Senior Leaders*. Melalui kegiatan tersebut Perseroan berusaha memfasilitasi dan memberi ruang bagi karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya.

The Company keeps striving to present an open, positive and progressive work environment to improve harmonious, dynamic and fair industrial relations between the Company as the employer and employees as one of the main stakeholders. Industrial relations management within the scope of the Company always upholds the employees' rights and obligations as stipulated in the Company Regulations and applicable laws and regulations.

On various occasions, the management opens communication and discussion forums with employees to discuss issues in the field of employment. These activities are carried out at any time required. The Company believes that by creating a sound working relationship, work productivity and engagement of each employee will also increase. In realizing this harmonious working relationship, the Company also respects the employees' rights on associating and assembling.

The Company's commitment to build and maintain the sound and harmonious Industrial Relations as a healthy and constructive working relations system among the employees, the Company and the Government (Tripartite), is carried out with the purpose of increasing the productivity and welfare of employees and the Company. Periodic and continuous communication between the Company and employees is needed in building and maintaining harmonious industrial relations within the work environment.

The Company will consistently evaluate and improve the Company's policies and is committed to following up complaints related to employment issues submitted to the Company as well as possible. The Company is also committed to implementing a fair, reasonable, and consistent system of recruitment, promotion and career development based on competence following the Company needs.

The Company has taken several approaches in the effort to create an open, positive and progressive work atmosphere to create sound and harmonious industrial relations, including by holding townhall meetings involving all employees or Focus Group Discussions (FGD) involving Senior Leaders. Through these activities, the Company seeks to facilitate and provide space for employees to be able to convey their aspirations.



PRAKTIK K3 OHS PRACTICE

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan hal penting bagi Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan praktik K3. Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah dilaksanakan Perseroan selama ini utamanya berfokus pada pencapaian tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*.

Dalam upaya mencapai hal tersebut, Perseroan melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengatur tentang pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan SMK3 di Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Perseroan meyakini dengan penerapan SMK3 yang memadai dan kesadaran terhadap pentingnya SMK3 akan mendukung terwujudnya suasana aman dan nyaman dalam bekerja. Hal tersebut juga diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya insiden kecelakaan kerja. Hal tersebut tercermin dari tidak terjadi kecelakaan di lingkungan kerja Perseroan sepanjang tahun 2022.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan Insan Perseroan dalam situasi Siaga Tanggap Darurat di Lingkungan Perseroan, Perseroan juga memiliki dan telah menjalankan *Standard Operational Procedure* (SOP) Siaga Tanggap Darurat, yang di dalamnya berisi aturan dan penjelasan terkait proses pelaporan keadaan darurat, proses evakuasi serta jenis-jenis keadaan darurat, antara lain seperti keadaan gempa, kerusakan atau gangguan sipil, kebakaran, kegagalan ventilasi, proses evakuasi gedung, serta keadaan darurat lainnya.

Occupational Health and Safety (OHS) is important matter for the Company. Therefore, the Company has a strong commitment to implement OHS practices. The Occupational Health and Safety (OHS) practices that have been implemented by the Company so far have mainly focused on achieving zero accident rate.

In order to achieve it, the Company implements Occupational Safety and Health Management System (OHSMS) which regulates risk control of work activities, including the prevention of work accidents and work-related diseases. OHSMS implementation at the Company is carried out with reference to the Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1996 concerning the Occupational Health and Safety Management System which has been refined by Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Occupational Safety and Health Management System (OHSMS).

The Company believes that adequate OHSMS implementation and awareness on the importance of OHSMS will support the creation of safe and comfortable working atmosphere. This is also expected to reduce and prevent incidents of work accidents. This is reflected in the absence of accidents within the Company's work during 2022.

Moreover, in order to improve the protection of the Company's Personnel in an Emergency Response Alert situation within the Company, the Company also already has and has implemented a Standard Operational Procedure (SOP) for Emergency Response Alert, which contains rules and explanations related to the emergency reporting process, the process evacuation and types of emergencies, such as earthquakes, riots or civil disturbances, fires, ventilation failures, building evacuation processes, and other emergencies.

RENCANA FOKUS PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2023 HUMAN RESOURCES FOCUS DEVELOPMENT PLAN FOR 2023

Perseroan akan terus konsisten melanjutkan program pengembangan SDM yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan, di mana fokus program tahun 2023 adalah:

1. Penguatan struktur organisasi dan jenjang karier yang fleksibel dan adaptif terhadap mandat usaha;
2. Penguatan peran Divisi Human Capital sebagai *Business Partner* Perseroan;
3. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di dalam bidangnya;
4. Peningkatan Kompetensi teknis maupun nonteknis secara berkelanjutan untuk dapat mencapai visi, misi, dan target Perseroan;

The Company will consistently continue the HR development program following the Company's vision and mission, where the focus of the 2023 program is as follows:

1. Strengthening the organizational structures and career paths that are flexible and adaptive to the business mandates;
2. Strengthening the role of the Human Capital Division as the Company's Business Partner;
3. Fulfilling the needs of competent Human Resources in that roles;
4. Increasing technical and non-technical competencies in a sustainable manner to be able to achieve the Company's vision, mission and targets;





5. Peningkatan *engagement* karyawan melalui program-program yang sesuai dengan tuntutan, tantangan dan kondisi kerja saat ini; dan
6. *Talent management* dan *succession planning* yang terstruktur dan menyeluruh dengan memperhatikan kompetensi teknis dan kompetensi nonteknis bagi penguatan SDM.

5. Increasing employee engagement through programs that are in line with current demands, challenges and working conditions; and
6. Structured and comprehensive talent management and succession planning with due regard to technical and non-technical competencies for strengthening human resources.







ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

Kondisi Ekonomi Politik Global

Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global, meski penyebaran Covid-19 mulai menurun. Pemburukan kondisi tersebut menyebabkan koreksi prakiraan pertumbuhan ekonomi global dan menambah ketidakpastian pasar keuangan global. Fragmentasi politik dan ekonomi serta pemburukan gangguan mata rantai pasokan global memperlemah pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran. Eskalasi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang diikuti dengan pengenaan sanksi berbagai negara terhadap Rusia serta perang dagang AS-Tiongkok yang memanas memengaruhi transaksi perdagangan dan menyebabkan gangguan mata rantai pasokan global. Harga komoditas global meningkat, termasuk komoditas energi, pangan, dan logam, sehingga memberikan tekanan pada inflasi global. Fragmentasi politik dan ekonomi serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju menyebabkan perlambatan perekonomian dari sisi permintaan. Pengetatan kebijakan moneter tersebut mendorong perlambatan ekonomi dari sisi permintaan dan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Secara umum perekonomian dunia pada 2022 menghadapi lima tantangan serius yang sangat perlu diwaspadai. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang menurun (*slow growth*). Kedua, inflasi yang sangat tinggi (*high inflation*) dipicu kenaikan harga energi dan pangan global. Ketiga, kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu yang lama (*higher for longer*). Keempat, dolar AS yang sangat kuat (*strong dollar*) sehingga memberikan tekanan depresiasi nilai tukar banyak negara. Kelima, penarikan dana investor global dan mengalihkan ke aset likuid (*cash is the king*). Berbagai tantangan perekonomian global tersebut pada akhirnya menuntut penguatan kerja sama internasional baik skala regional maupun multilateral.

Inisiatif kerja sama internasional berfokus pada upaya mendorong pemulihan dan memperkuat daya tahan ekonomi global dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan global. Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh lembaga internasional, seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *Bank for International Settlements* (BIS), *Financial Stability Board* (FSB), dan lain-lain, maupun kerja sama internasional seperti G20, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang bertujuan agar semua negara dapat pulih bersama dan tumbuh lebih kuat.

Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia telah memimpin negara-negara G20 untuk menyelesaikan pembahasan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan dan menegaskan komitmen untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang meningkat. Enam agenda prioritas Presidensi G20 meliputi: (i) koordinasi dalam normalisasi kebijakan makroekonomi global; (ii) koordinasi dalam pengaturan

Global Political Economy Conditions

Russia-Ukraine geopolitical tensions have resulted in weakening trade transactions, rising commodity prices, and global financial market uncertainty, although the spread of Covid-19 has begun to decline. This worse condition led to a correction in global economic growth forecasts and added to global financial market uncertainty. Political and economic fragmentation and worsening global supply chain disruptions weaken supply-side economic growth. The escalation of Russia-Ukraine geopolitical tensions followed by the imposition of various countries' sanctions on Russia as well as the escalating US-China trade war affected trade transactions and caused global supply chain disruptions. Global commodity prices increased, including energy, food and metal commodities, putting pressure on global inflation. Political and economic fragmentation and aggressive monetary policy tightening in developed economies led to a slowdown in demand-side economies. The tightening of monetary policy has led to a demand-side economic slowdown and increased uncertainty in global financial markets.

In general, the world economy in 2022 faces five serious challenges that need to be concerned. First, declining economic growth (slow growth). Second, very high inflation triggered by rising global energy and food prices. Third, high interest rate policy for a long time (higher for longer). Fourth, the strong dollar that puts pressure on the depreciation of many countries' exchange rates. Fifth, the withdrawal of global investor funds and shifting to liquid assets (cash is the king). The various challenges of the global economy ultimately require strengthening international cooperation both on a regional and multilateral scale.

International cooperation initiatives focus on promoting recovery and strengthening the resilience of the global economy while maintaining the stability of the global economy and financial system. Various policies have been pursued by international institutions, such as the International Monetary Fund (IMF), World Bank, Bank for International Settlements (BIS), Financial Stability Board (FSB), and others, as well as international cooperation such as the G20, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) which aim to enable all countries to recover together and grow stronger.

The Ministry of Finance and Bank Indonesia in the G20 Presidency of Indonesia have led the G20 countries to finalize the discussion of 6 (six) priority agendas of the financial pathway and affirmed the commitment to face the increasing global economic challenges. The six priority agendas of the G20 Presidency include: (i) coordination in the normalization of global macroeconomic policies; (ii) coordination in the regulation and supervision of the



dan pengawasan sistem keuangan untuk mengatasi dampak luka memar (*scarring effect*) pandemi Covid-19; (iii) penguatan kerja sama sistem pembayaran antarnegara dan pengembangan CBDC; (iv) pengembangan kebijakan dalam transisi ekonomi dan keuangan hijau (*green and sustainable finance*); (v) perluasan pengembangan inklusi ekonomi dan keuangan khususnya kepada UMKM, kaum perempuan, dan pemuda; serta (vi) kebijakan lanjutan dalam perpajakan internasional.

[Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2022, Bank Indonesia]

Perekonomian Indonesia

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01% (YoY). Secara *full year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka *pre-covid* yang rata-rata sebesar 5%.

Dari sisi *demand*, mayoritas komponen pengeluaran pada Triwulan IV-2022 tumbuh kuat. Didukung *windfall* komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh *double digit* mencapai 14,93% (YoY). Sementara itu, impor tumbuh 6,25% (YoY) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Lebih lanjut, laju pertumbuhan konsumsi sebagai kontributor utama PDB tercatat sebesar 4,48% (YoY) seiring dengan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,33% (YoY) dan Konsumsi Lembaga *Non Profit* yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 5,70% (YoY). Meski demikian, Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77% (YoY).

Dari sisi *supply*, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di Triwulan IV-2022. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99% (YoY) diikuti oleh Sektor Akomodasi dan Makanan dan Minuman yang tumbuh sebesar 13,81% (YoY) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64% (YoY).

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48% (YoY) dan diikuti oleh Pulau Sumatra 22,04% (YoY) dan Kalimantan 9,23% (YoY). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03% (YoY) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50% (YoY) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

[Sumber: Siaran Pers HM.4.6/40/SET.M.EKON.3/02/2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia]
[Source: Press Release HM.4.6/40/SET.M.EKON.3/02/2023, Indonesian Coordinating Ministry for Economic Affairs]

financial system to overcome the scarring effect of the Covid-19 pandemic; (iii) strengthening cooperation in payment systems between countries and the development of CBDC; (iv) policy development in the transition to green and sustainable finance; (v) expansion of the development of economic and financial inclusion, especially for MSMEs, women, and youth; and (vi) advanced policies in international taxation.

[Source: Indonesia Economic Report 2022, Bank of Indonesia]

Indonesia Economic Condition

Supported by strong national economic fundamentals, Indonesia's domestic economic activity continues to develop even though global conditions are still experiencing ups and downs. The mix of various constructive policies and strategies taken by the Government, one of which is through the Program for Handling Covid-19 and National Economic Recovery (PC-PEN) Program, has been the key to success in driving the pace of the national economy.

This is reflected in Indonesia's economic growth in Q4-2022 which grew solidly by 5.01% (YoY). In the full year, Indonesia's economic growth throughout 2022 also recorded an impressive growth of 5.31% (ctc). This figure exceeded the Government's target of 5.2% (ctc), and returned to the pre-pandemic level of 5%. This growth was much higher than the pre-covid figure which averaged 5%.

From the demand side, the majority of expenditure components in Q4-2022 grew strongly. Supported by the windfall of leading commodities, exports were able to grow double digits reaching 14.93% (YoY). Meanwhile, imports grew by 6.25% (YoY), driven by an increase in imports of capital goods and raw materials. Furthermore, the growth rate of consumption as the main contributor to GDP was recorded at 4.48% (YoY) along with the growth of Gross Fixed Capital Formation (PMTB) of 3.33% (YoY) and Non Profit Institutions that Serve Households (LNPRT) consumption of 5.70% (YoY). However, Government Consumption still contracted by -4.77% (YoY).

On the supply side, all business sectors experienced positive growth in Q4-2022. The Transportation and Warehousing sector was the sector with the highest growth of 16.99% (YoY) followed by the Accommodation and Food and Beverage Sector which grew by 13.81% (YoY) driven by increased community mobility and increased tourist visits both foreign and domestic tourists. The Manufacturing Industry sector as the largest contributor to GDP also recorded positive growth of 5.64% (YoY).

Spatially, all regions in Indonesia continued to strengthen. Java as a contributor to the national economy was able to grow at a high rate of 56.48% (YoY), followed by Sumatra 22.04% (YoY) and Kalimantan 9.23% (YoY). Furthermore, Sulawesi 7.03% (YoY) and Maluku and Papua also grew 2.50% (YoY) along with high exports that occurred mainly due to high demand for superior commodity products abroad.

Industri Konstruksi dan Infrastruktur Nasional Tahun 2022

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,34%; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,85%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,40%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,22%; serta Konstruksi sebesar 9,77%. Walaupun kontribusi sektor konstruksi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 dan 2020 yang masing-masing berkontribusi sebesar 10,44% dan 10,70%, namun sektor konstruksi masih termasuk dalam lima lapangan usaha yang paling berkontribusi dalam perekonomian Indonesia dengan capaian gabungan sebesar 65,58%.

Di Tahun 2022, APBN memiliki tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini didasarkan pada asumsi ekonomi makro yang sebagian besar akan membaik di tahun 2022. Fokus dari tema ini ada pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat, serta reformasi struktural untuk mendorong daya saing Indonesia.

Kebijakan pembangunan infrastruktur di tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar manusia secara layak, peningkatan produktivitas masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas, serta pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), energi, pangan, dan konektivitas.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp365,8 triliun untuk anggaran infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022, turun 14% dibandingkan dengan anggaran 2021. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas dan mendukung penyelesaian proyek prioritas dan strategis.

(Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan)

Indonesia's Construction and Infrastructure Industry in 2022

The structure of Indonesia's GDP by business field at current prices in 2022 showed no significant changes. Indonesia's economy was still dominated by the Manufacturing Industry Business Field at 18.34%; followed by Wholesale and Retail Trade; Car and Motorcycle Repair at 12.85%; Agriculture, Forestry, and Fisheries at 12.40%; Mining and Quarrying at 12.22%; and Construction at 9.77%. Although the contribution of the construction sector has decreased when compared to 2021 and 2020, which contributed 10.44% and 10.70% respectively, the construction sector was still among the five business fields that contributed most to the Indonesian economy with a combined achievement of 65.58%.

In 2022, the state budget has the theme of economic recovery and structural reform. This is based on macroeconomic assumptions that will largely improve in 2022. The focus of this theme is on health support and strengthening public protection, as well as structural reforms to boost Indonesia's competitiveness.

Infrastructure development policy in 2022 is directed to support economic development and basic services to the community. The policy direction is carried out through the provision of basic human needs properly, increasing the productivity of the community and the business world through increased connectivity and mobility, as well as the development of infrastructure supporting economic transformation including Information and Communication Technology (ICT), energy, food, and connectivity.

The government allocated Rp365.8 trillion for the infrastructure budget in the 2022 state budget (APBN), decreased by 14% compared to the 2021 budget. The budget is used to fulfill the availability of basic services, increase productivity and support the completion of priority and strategic projects.

(Source: Central Bureau of Statistics, Ministry of Finance)



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, sejak didirikan 13 tahun yang lalu, PT PII telah mendapatkan beberapa kali perluasan mandat serta penambahan penugasan, melalui penyediaan jaminan yang dilakukan dengan proses yang akuntabel, transparan, dan kredibel.

Melalui PP 55/2020, Pemerintah kembali memberikan perluasan mandat kepada PT PII untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penjaminan Pemerintah yang semakin meningkat serta dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka PT PII diberikan mandat untuk memberikan Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional, serta untuk memberikan penjaminan Pemerintah dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan penjaminan Pemerintah, Pemerintah memandang perlunya penguatan mandat PT PII, khususnya untuk memberikan penjaminan di bidang lainnya selain infrastruktur serta optimalisasi pengawasan dan *monitoring* kegiatan penjaminan dan investasi PII untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 148/PMK.08/2022 tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. PMK ini merupakan penggantian dari PMK No. 95/PMK.08/2017 yang memuat ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, dan tata kelola pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur dan pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur oleh persero. Penjaminan pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PII saat ini telah berkembang tidak hanya terbatas pada proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), namun diberikan pula untuk penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan oleh BUMN.

Selain itu, PT PII dilibatkan secara aktif dalam memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional, salah satunya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), pembangunan proyek infrastruktur di berbagai sektor, dan mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sejalan dengan perluasan mandat dalam Anggaran Dasar dan penugasan Pemerintah kepada PT PII tersebut, kegiatan usaha PT PII membagi bisnis Perseroan terbagi atas 4 (empat) segmen usaha, yang meliputi (1) Segmen Usaha Penjaminan Proyek Infrastruktur; (2) Segmen Usaha Pengelolaan Dana; (3) Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi/*Project Development Facility* (PDF); dan (4) Segmen Usaha Penjaminan Korporasi Padat Karya.

In order to support the acceleration of infrastructure development in Indonesia, since its establishment 13 years ago, IIGF has received several mandate expansions and additional assignments, through the guarantee carried out accountably, transparently, and credibly.

Through PP 55/2020, the Government has again expanded the mandate to IIGF to support Government policies in meeting the increasing need for Government guarantee and in order to support the National Economic Recovery Program (PEN) as a result of the Covid-19 pandemic. Based on the Government Regulation, IIGF is mandated to provide Government Guarantee in the infrastructure sector, carry out activities related to the implementation of Government Guarantee and other activities related to the implementation of project development that supports the national economy, and to provide Government Guarantee in financing in other fields other than infrastructure based on Government assignments.

With the increasing need for Government Guarantee, the Government considers the need to strengthen IIGF mandate, especially to provide Guarantee in other fields other than infrastructure and optimize supervision and monitoring of IIGF guarantee and investment activities for the future. Therefore, the Ministry of Finance (Menkeu) stipulates the Ministry of Finance Regulation (PMK) No. 148/PMK.08/2022 concerning the Scope of Management of Infrastructure Guarantee by Infrastructure Guarantee Agency. This PMK is a replacement for PMK No. 95/PMK.08/2017 which contains further provisions regarding the scope, and governance of the implementation of activities in the context of government Guarantee in the infrastructure sector and financing in other fields other than infrastructure by a persero. Government Guarantee carried out by IIGF have now developed not only limited to Public Private Partnership (PPP) projects, but also provided for infrastructure guarantee implemented by SOEs.

In addition, IIGF is actively involved in ensuring the sustainability of national strategic projects, including the relocation of the National Capital City (IKN), the development of infrastructure projects in various sectors, and supporting the implementation of the National Economic Recovery (PEN) program.

In line with the expansion of the mandate in the Articles of Association and the Government's assignment to IIGF, IIGF's business activities are divided into 4 (four) business segments, which include (1) Infrastructure Project Guarantee Business Segment; (2) Fund Management Business Segment; (3) Project Preparation and Transaction Advisory/Project Development Facility (PDF) Business Segment; and (4) Guarantee for Labor-Intensive Corporate Guarantee Business Segment.

PT PII belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen Operasi dalam laporan keuangannya. Oleh karena itu, penjelasan segmen dibagi berdasarkan struktur pendapatan, yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu pendapatan Penjaminan; Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi; serta Pengelolaan Dana. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai operasi dan bisnis Perseroan.

Segmen PT PII dan Lainnya

- Penjaminan
- Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
- Pengelolaan Dana

Berikut adalah struktur pendapatan yang menggambarkan masing-masing segmen beserta kontribusinya terhadap Perseroan.

Jumlah dan Kontribusi Segmen terhadap Pendapatan

Pendapatan Revenue	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Penjaminan Guarantee	252.574	23,20%	156.529	16,97%	96.045	61,36%
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Project Preparation and Transaction Advisory	41.099	3,77%	29.172	3,16%	11.927	40,89%
Pengelolaan Dana Investments	793.702	72,89%	735.871	79,77%	57.831	7,86%
Pendapatan Lain-Lain Other Income	1.477	0,14%	935	0,10%	542	57,98%
Jumlah Pendapatan Total Revenues	1.088.852	100,00	922.507	100,00%	166.345	18,03%

IIGF has not yet applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 on Operating Segments in its financial statements. Therefore, the segment explanation is divided based on the revenue structure, which is classified into 3 (three) major groups: Guarantee revenue; Project Preparation and Transaction Advisory; and Fund Management. This is intended to provide a clearer picture of the Company's operations and business.

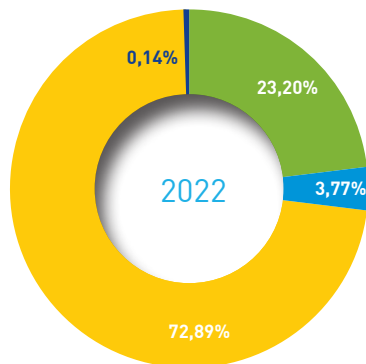
IIGF Segments and Others

- Guarantee
- Project Preparation and Transaction Advisory
- Investments

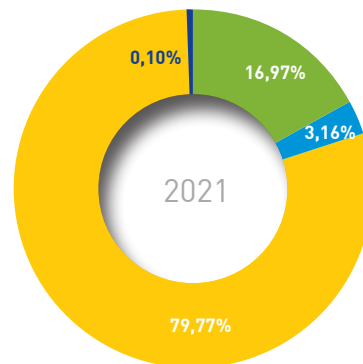
The following is a revenue structure that describes each segment and its contribution to the Company.

Total and Segment Contribution to Revenue

Komposisi Pendapatan Segmen terhadap Jumlah Pendapatan



Segment Revenue Composition to Total Revenue



● Penjaminan/Guarantee
 ● Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi/Project Preparation and Transaction Advisory
● Pengelolaan Dana/Investments
 ● Pendapatan Lain-Lain/Other Income



Walaupun segmen Penjaminan merupakan bisnis utama PT PII, namun pendapatan Pengelolaan Dana merupakan kontributor utama PT PII dengan kontribusi mencapai 72,89% di tahun 2022 dan 79,77% di tahun 2021 terhadap pendapatan.

Kinerja dari masing-masing segmen usaha tersebut dijabarkan pada pembahasan berikut.

SEGMENT PENJAMINAN

Segmen Penjaminan meliputi 2 (dua) kelompok besar kegiatan usaha, yaitu:

1. Penjaminan Infrastruktur yang terbagi ke dalam Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan Non KPBU; dan
2. Non Infrastruktur yang terbagi ke dalam Penjaminan Pelaku Usaha Korporasi dan Penjaminan BUMN.

Uraian masing-masing kegiatan usaha serta profitabilitas segmen Penjaminan dapat dilihat di bawah ini.

Penjaminan Infrastruktur

Kegiatan Operasi dan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, kebutuhan penyediaan infrastruktur di Indonesia hanya dapat terpenuhi sekitar 30% oleh APBN, ditambah lagi dengan dampak pandemi Covid-19 yang menambah tekanan kepada alokasi APBN untuk sektor infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah mengajak Badan Usaha untuk bekerja sama dalam melakukan penyediaan infrastruktur. Salah satu skema kerja sama yang saat ini didorong oleh Pemerintah adalah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti yang tertuang pada Perpres 38/2015 beserta seluruh peraturan & kebijakan turunannya yang menyediakan beberapa *fiscal tools* untuk dapat menarik minat badan usaha.

Mengacu pada Perpres 38/2015, salah satu bentuk *fiscal tools* untuk KPBU adalah Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk dapat memberikan kenyamanan mitra Badan Usaha serta pihak *lenders* dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah.

Sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), PT PII mendapat mandat dari Pemerintah untuk menjalankan kebijakan satu pelaksana (*Single Window Policy*) bagi Pemerintah dalam memberikan Penjaminan Pemerintah dengan memperhatikan kaidah-kaidah manajemen risiko sesuai dengan prinsip dari skema KPBU. Dalam menjalankan kegiatan penjaminan, PT PII berpartisipasi secara aktif sejak tahapan penyiapan proyek KPBU sampai dengan pelaksanaan proyek dan sampai masa konsesi KPBU berakhir. Partisipasi PT PII pada tahapan penyiapan proyek dilakukan melalui kegiatan pendampingan kepada PJKP seperti pelaksanaan *capacity building*, strukturisasi proyek KPBU, dan membantu memastikan kelayakan hukum, teknis, finansial, dan lingkungan dari proyek KPBU. Setelah tahapan penyiapan, PT PII tetap mendampingi pada tahapan operasi dengan melakukan pemantauan proyek melalui *Joint Monitoring Committee* (JMC)/Tim Pemantauan Bersama dengan para pemangku kepentingan seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan kementerian teknis, terutama untuk memantau risiko-risiko proyek yang dialokasikan kepada PJKP. Sebagai bagian dari upaya mitigasi proyek, PT PII juga secara rutin mengadakan rapat atau mengirimkan hasil pemantauan proyek kepada PJKP atau perwakilannya.

Although the Guarantee segment is IIGF's main business, Investments revenue is the main contributor to IIGF with contributions reaching 72.89% in 2022 and 79.77% in 2021 to revenue.

The performance of each business segment is described in the following discussion.

GUARANTEE SEGMENT

The Guarantee Segment includes 2 (two) major groups of business activities, namely:

1. Infrastructure Guarantee which is divided into Government-Public-Private Partnership (PPP) and Non-PPP; and
2. Non-infrastructure which is divided into Corporate Business Guarantee and SOE Guarantee.

A description of each business activity and the profitability of the Guarantee segment can be seen below.

Infrastructure Guarantee

Infrastructure Guarantee Operations and Business Activities

Based on 2019-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN), the need for infrastructure provision in Indonesia can only be met around 30% by the State Budget, coupled with the impact of the Covid-19 pandemic which adds pressure to the State Budget allocation for the infrastructure sector. Therefore, the Government invites Special Purpose Vehicle to work together in providing infrastructure. One of the cooperation schemes currently encouraged by the Government is the Public Private Partnership (PPP) scheme as stipulated in Presidential Regulation 38/2015 and all its derivative regulations & policies that provide several *fiscal tools* to attract Special Purpose Vehicle.

Referring to Presidential Regulation No. 38/2015, one of the *fiscal tools* for PPP is Government Guarantee through the Infrastructure Guarantee Agency to be able to provide comfort to Special Purpose Vehicle (SPV) and lenders in collaborating with the Government.

As an Infrastructure Guarantee Agency (BUPI), IIGF has the mandate from the Government to implement a single window policy for the Government in providing Government Guarantees by taking into account risk management principles based on the principles of the PPP scheme. In carrying out Guarantee, IIGF actively participates from the Public Private Partnership (PPP) project preparation stage to project implementation and until the PPP concession period ends. IIGF's participation in the project preparation stage is carried out through assistance activities to GCA such as the implementation of capacity building, structuring PPP projects, and helping to ensure the legal, technical, financial and environmental feasibility of PPP projects. After the preparation stage, IIGF continues to assist in the operation stage by monitoring the project through the Joint Monitoring Committee (JMC)/Joint Monitoring Team with stakeholders such as the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Finance and technical ministries, especially to monitor project risks allocated to GCA. As part of the project mitigation efforts, IIGF also regularly holds meetings or sends project monitoring results to GCA or its representatives.

Selain itu, PT PII bersama para pemangku kepentingan lainnya secara aktif melakukan pemantauan terhadap risiko proyek yang menimbulkan kewajiban finansial bagi PJPK, misalnya risiko penyerapan air curah oleh PDAM pada proyek SPAM Umbulan dan SPAM Kota Bandar Lampung dikarenakan keterlambatan pembangunan jaringan distribusi, risiko keterlambatan pengadaan tanah pada proyek jalan tol dikarenakan belum dapat diserahkan tanah dari Pemerintah kepada Badan Usaha secara 100% pada batas waktu yang telah ditentukan, maupun kemungkinan adanya risiko politik pada proyek.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 tahun 2020, PT PII dapat mendukung penjaminan 20 sektor proyek infrastruktur dengan skema KPBU yang meliputi:

- Air Minum
- Sistem pengelolaan air limbah terpusat
- Sistem pengelolaan air limbah setempat
- Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
- Konservasi energi
- Pariwisata
- Kesehatan
- Lembaga pemasyarakatan
- Fasilitas perkotaan
- Perumahan rakyat
- Transportal
- Jalan
- Sumber daya air dan irigasi
- Telekomunikasi dan informatika
- Ketenagalistrikan
- Sistem pengelolaan persampahan
- Fasilitas pendidikan
- Sarana dan prasarana olahraga serta kesenian
- Kawasan
- Bangunan Negara

Melalui Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2009, PT PII memperoleh perluasan mandat untuk memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan demikian, penjaminan pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PII tidak lagi terbatas pada proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU. Perluasan mandat tersebut kemudian didukung dengan terbitnya PMK 101/2018 yang mulai berlaku di tahun 2018.

Penjaminan Proyek Baru

Pada 2022, PT PII memberikan penjaminan bagi 12 proyek baru dengan nilai total investasi sebesar Rp184.047 miliar dan nilai maksimu pejaminan sebesar Rp15.143 miliar yang meliputi:

- a. Penjaminan KPBU
 1. Proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap dengan Skema KPBU;
 2. Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dengan Skema KPBU;
 3. Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur; dan
 4. Proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat.
- b. Penjaminan Non-KPBU
 1. Penjaminan Obligasi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional;

In addition, IIGF together with other stakeholders actively monitors project risks that pose financial obligations to GCA, for example the risk of absorption of bulk water by PDAM in the Umbulan SPAM and Bandar Lampung City SPAM projects due to delays in the construction of distribution networks, the risk of delays in land acquisition in toll road projects due to the fact that land from the Government to the Special Purpose Vehicle (SPV) cannot be handed over 100% by the specified deadline, as well as the possibility of political risks in the project.

With reference to the Regulation of the Ministry of National Development Planning No. 2 of 2020, IIGF can support the Guarantee of 20 infrastructure project sectors with PPP schemes which include:

- Drinking Water
- Centralized wastewater management system
- Local wastewater management system
- Oil and gas and renewable energy
- Energy conservation
- Tourism
- Health
- Correctional institutions
- Urban facilities
- Public housing
- Transportation
- Roads
- Water resources and irrigation
- Telecommunications and informatics
- Electricity
- Waste management system
- Education facilities
- Sports and arts facilities and infrastructure
- Area
- State Buildings

Through Government Regulation No. 50 of 2016 on the Amendment to Government Regulation No. 35 of 2009, IIGF obtained an expanded mandate to strengthen its role in supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia. Thus, government Guarantee carried out by IIGF are no longer limited to government infrastructure projects developed under the PPP scheme. The expansion of the mandate was then supported by the issuance of PMK 101/2018 which came into effect in 2018.

New Project Guarantee

In 2022, IIGF provided guarantee for 12 new projects with total investment value of Rp184,047 billion and a maximum value of guarantee of Rp15,143 billion which includes:

- a. PPP Guarantee
 1. Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Toll Road Project with PPP Scheme;
 2. Gilimanuk-Mengwi Toll Road Project with PPP Scheme;
 3. Street Lighting Equipment (APJ) in Madiun Regency, East Java; and
 4. Proving Ground Project of Roadworthiness Testing Center and Motor Vehicle Certification (BPLJSKB) in Bekasi, West Java.
- b. Non-PPP Guarantee
 1. Guarantee of Bond IV of PT Waskita Karya (Persero) Tbk in the context of National Economic Recovery;



2. Penjaminan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Proyek Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah (SREAP);
4. Penjaminan Pinjaman Proyek PLTU Timor-1 (2x50 MW);
5. Penjaminan Pinjaman Bus Listrik KTT G20 dan BTS Bandung & Surabaya PT Industri Kereta Api (Persero);
6. Penjaminan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Perum DAMRI;
7. Penjaminan Kredit Modal Kerja PT Len Industri (Persero); dan
8. Penjaminan Kredit Modal Kerja Talangan Pembayaran Dana Kompensasi dan Subsidi BBM dan LPG 3 Kg.

2. Guarantee of Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero) Tbk in the context of National Economic Recovery;
3. Transmission and Distribution Network Development Project in West Java and Central Java (SREAP);
4. Loan Guarantee for Timor-1 Coal-Fired Power Plant (CFPP) Project (2x50 MW);
5. Loan Guarantee for G20 Summit Electric Bus and BTS Bandung & Surabaya PT Kereta Api Industri (Persero);
6. Guarantee of Working Capital Loans and Investment Loans of Perum DAMRI;
7. PT Len Industri (Persero) Working Capital Loan Guarantee; and
8. Guarantee of Working Capital Loans for the Payment of Compensation and Subsidy Fund for Fuel and LPG 3 Kg.

Kapasitas Penjaminan

Kecukupan atas kapasitas penjaminan menjadi prioritas bagi Pemerintah karena berpengaruh terhadap kredibilitas PT PII di mata investor potensial dalam pengembangan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, kemampuan modal sangat menentukan kapasitas untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek KPBU infrastruktur.

Dalam melakukan penjaminan proyek-proyek infrastruktur, PT PII masih sepenuhnya mengandalkan ekuitas Perseroan berupa PMN yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disetor penuh ke dalam modal dasar Perseroan sebesar Rp9,085 triliun untuk penjaminan proyek infrastruktur, dengan rincian sebagai berikut:

Guarantee Capacity

Adequacy of guarantee capacity is a priority for the Government because it affects the credibility of IIGF in the eyes of potential investors in the development of infrastructure projects. Therefore, capital capability determines the capacity to provide Guarantee for infrastructure PPP projects.

In Guarantee infrastructure projects, IIGF still fully relies on the Company's equity in the form of State Capital Injection (PMN) originating from the State Budget (APBN) and fully paid into the Company's authorized capital of Rp9.085 trillion trillion for infrastructure project Guarantee, with the following details:

Referensi Reference	Jumlah Modal Disetor Total Paid-up Capital	Akumulasi Modal PT PII IIGF Accumulated Capital	Modal Dasar Authorized Capital
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 Government Regulation No. 35 of 2009	Rp1 triliun/trillion	Rp1 triliun/trillion	Rp4 triliun/trillion
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2010 Government Regulation No. 88 of 2010	Rp1 triliun/trillion	Rp2 triliun/trillion	Rp4 triliun/trillion
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2011 Government Regulation No. 55 of 2011	Rp1,5 triliun/trillion	Rp3,5 triliun/trillion	Rp4 triliun/trillion
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2012 Government Regulation No. 68 of 2012	Rp1 triliun/trillion	Rp4,5 triliun/trillion	Rp9 triliun/trillion*
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2016 Government Regulation No. 79 of 2016	Rp1 triliun/trillion	Rp6 triliun/trillion	Rp9 triliun/trillion
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2015 Government Regulation No. 94 of 2015	Rp1,5 triliun/trillion	Rp6 triliun/trillion	Rp9 triliun/trillion
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2017 Government Regulation No. 57 of 2017	Rp1 triliun/trillion	Rp8 triliun/trillion	Rp9 triliun/trillion
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2020 Government Regulation No. 79 of 2020	Rp1,57 triliun/trillion	Rp9,57 triliun/trillion	Rp20 triliun/trillion**
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2022 Government Regulation No. 53 of 2022	Rp1.085 triliun/trillion	Rp10,66 triliun/trillion	Rp20 triliun/trillion

*] Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp9 triliun.
Based on the shareholders' resolution as outlined in notarial deed by Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No. 145 on August 30, 2012, the Government as the shareholder approved the increase of the Company's authorized capital to Rp9 trillion.

**] Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn No. 14 tanggal 19 November 2020., Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun.
Based on the shareholders' resolution as outlined in notarial deed by Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn dated November 19, 2020. the Government as the shareholder approved the increase of the Company's authorized capital to Rp20 trillion.

Secara bertahap PT PII mendapat mandat untuk mengurangi ketergantungan kepada APBN dalam meningkatkan kapasitas penjaminan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("PP 78/2010").

Oleh karenanya, PT PII harus berperan aktif untuk menjalin kerja sama dengan institusi penjaminan lainnya, Lembaga Multilateral, dan Institusi Bilateral dengan tujuan sejenis. Dalam berbagai diskusi yang dilakukan secara intensif dengan para mitra terkait, PT PII melakukan penyusunan kerangka penyediaan dukungan dan penjaminan bersama Pemerintah yang lebih terintegrasi.

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham PT PII melalui KMK 497/2020 menyetujui peningkatan modal dasar PT PII menjadi Rp20 triliun, yang dilanjutkan dengan penambahan PMN kepada PT PII sebesar Rp1,6 triliun berdasarkan PP 79/2020 pada tanggal 30 Desember 2020. Inisiatif ini dilakukan guna memperbaiki struktur modal dan meningkatkan kapasitas PT PII dalam rangka mendukung program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan Pemerintah kepada PT PII.

Hingga 31 Desember 2022, PT PII telah menjamin 49 proyek dengan estimasi nilai proyek sebesar Rp550 triliun yang terdiri dari penjaminan KPBU & Non KPBU sebesar Rp487 triliun, dan penjaminan BUMN PEN sebesar Rp63 triliun. Eksposur penjaminan atas proyek yang dijamin oleh PT PII ialah sebesar Rp95 triliun yang terdiri dari Eksposur KPBU & Non KPBU sebesar Rp87 triliun, dan Eksposur BUMN PEN sebesar Rp8 triliun serta eksposur korporasi PEN sebesar Rp2,78 triliun. Nilai ekuitas PT PII per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15,15 triliun. Dengan demikian, rasio nilai penjaminan terhadap ekuitas PT PII (*gearing ratio*) dengan tidak memperhitungkan PMN sehubungan dengan pelaksanaan penugasan PEN dan PMN yang diterima Perseroan pada akhir bulan Desember 2022 adalah 6,95 kali.

Sampai dengan 31 Desember 2022, untuk sektor usaha penjaminan korporasi padat karya. Perseroan bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai penyokong utama penjaminan korporasi padat karya, telah mendapatkan Nilai Penjaminan atas pinjaman kredit modal kerja korporasi dan disetujui pemberian dukungan *loss limit* oleh Perseroan sebesar Rp8,01 triliun dimana mencakup usaha penjaminan bersama (*co-guarantee*) antara Perseroan dengan LPEI sebesar Rp2,56 triliun.

IIGF gradually received a mandate to reduce dependence on the State Budget in increasing the Guarantee capacity as stated in Presidential Regulation No. 78 of 2010 concerning Infrastructure Guarantee in Public Private Partnership Conducted through Infrastructure Guarantee Agency ("PP 78/2010").

Therefore, IIGF must play an active role in establishing cooperation with other guarantee institutions, Multilateral Institutions, and Bilateral Institutions with similar objectives. In various discussions held intensively with relevant partners, IIGF has developed a framework for providing support and Guarantee with the Government that is more integrated.

In 2020, the Minister of Finance as IIGF Shareholder through KMK 497/2020 approved an increase in IIGF's authorized capital to Rp20 trillion, which was followed by an additional PMN to IIGF of Rp1.6 trillion based on PP 79/2020 on December 30, 2020. This initiative was carried out to increase the capital structure and increase IIGF's capacity in order to support the PEN program and boost the national economy through Government assignments to IIGF.

As of December 31, 2022, IIGF has guaranteed 49 projects with an estimated project value of Rp550 trillion consisting of PPP & Non PPP Guarantee of Rp487 trillion, and BUMN PEN guarantees amounting to Rp63 trillion. The Guarantee exposure of the project guaranteed by IIGF amounted to Rp95 trillion consisting of PPP & Non PPP Exposure of Rp87 trillion, and BUMN PEN exposure of Rp8 trillion and PEN's corporate exposure amounted to Rp2.78 trillion. The value of IIGF's equity as of December 31, 2022 is Rp15.15 trillion. Thus, the ratio of the Guarantee value to IIGF's equity (*gearing ratio*) by not taking into account the PMN in connection with the implementation of the PEN assignment is 6.95 times.

As of December 31, 2022, for the labor intensive corporate guarantee business sector. The Company collaborates with Indonesia Export Financing Agency (LPEI) as the main supporter of labor intensive corporate guarantees, has received Guarantee Value on the corporation working capital credit and approved the support to the Company's loss limit of Rp8.01 trillion covering co-guarantee between the Company and LPEI of Rp2.56 trillion.



Ringkasan Status Proyek Penjaminan KPBU

Summary of PPP Guarantee Projects Status

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp-trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Period (after COD)
1	Pembangkit Listrik Jawa Tengah Central Java Power Plant	Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara dengan kapasitas 2x1000 MW yang terletak di Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah Coal-fired power plant with a capacity of 2x1000 MW located in Ujungnegoro Village, Batang Regency, Central Java Province	66,8	21 tahun/years
2	Palapa Ring Paket Barat Palapa Ring West Package	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian barat Indonesia yang berada di 5 kabupaten/kota dengan panjang kabel laut 1.711 km dan kabel darat 427 km Telecommunication projects with land and sea cable fiber optic systems in the western part of Indonesia in 5 districts/cities with a length of 1,711 km of sea cable and 427 km of land cable	1,2	12 tahun/years
3	Palapa Ring Paket Tengah Palapa Ring Central Package	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian tengah Indonesia yang berada di 17 kabupaten/kota dengan panjang kabel laut 1.797 km, kabel darat 1.289 km dan 7 tower Telecommunication projects with land and sea cable fiber optic systems in the central part of Indonesia in 17 districts/cities with a length of 1,797 km of sea cable, 1,289 km of land cable and 7 towers	1,1	12 tahun/years
4	Palapa Ring Paket Timur Palapa Ring East Package	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian timur Indonesia yang berada di 35 kabupaten/kota dengan panjang kabel laut 4.508 km, kabel darat 2.379 km dan 52 tower Telecommunication projects with land and sea cable fiber optic systems in the eastern part of Indonesia in 35 regencies/cities with 4,508 km of sea cable, 2,379 km of land cable and 52 towers	5,1	12 tahun/years
5	Jalan Tol Batang-Semarang Batang-Semarang Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan panjang 75 km Located in Central Java Province with a length of 75 km	14,0	15 tahun/years
6	Jalan Tol Pandaan-Malang Pandaan-Malang Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang 38,48 km Located in East Java Province with a length of 38.48 km	6,4	15 tahun/years
7	Jalan Tol Manado-Bitung Manado-Bitung Toll Road	Terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan panjang 39 km Located in North Sulawesi Province with a length of 39 km	4,9	15 tahun/years
8	Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Balikpapan - Samarinda Toll Road Samarinda	Terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang total 97,99 km Located in East Kalimantan Province with a total length of 97.99 km	11,9	15 tahun/years
9	SPAM Umbulan SPAM Umbulan	Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas air 4.000 l/detik dan panjang pipa transmisi 92,3 km dari Umbulan ke Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Gresik Drinking water supply project with a water capacity of 4,000 l/sec and a transmission pipeline length of 92.3 km from Umbulan to Pasuruan Regency, Pasuruan City, Sidoarjo Regency, Surabaya City, Gresik Regency	2,1	15 tahun/years
10	Jalan Tol Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (Jakarta - Cikampek II Elevated) Sheikh Mohamed Bin Zayed Toll Road (Jakarta - Cikampek II Elevated)	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 36,4 km Located in West Java Province with a total length of 36.4 km	16,2	15 tahun/years
11	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Cileunyi- Sumedang-Dawuan Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 60,1 km Located in West Java Province with a total length of 60.1 km	8,4	15 tahun/years

No.	Nama Proyek <i>Project Name</i>	Uraian <i>Description</i>	Nilai Proyek (Rp-triliun) <i>Project Value (Rp-trillion)</i>	Durasi Penjaminan (setelah COD) <i>Guarantee Period (after COD)</i>
12	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar Krian-Legundi- Bunder-Manyar Toll Road South	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan total panjang 38,3 km Located in East Java Province with a total length of 38.3 km	12,9	15 tahun/years
13	Jalan Tol Serang-Panimbang Serang-Panimbang Toll Road South	Terletak di Provinsi Banten dengan total 83,7 km Located in Banten Province with a total of 83.7 km	8,6	15 tahun/years
14	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Jakarta-Cikampek II Toll Road South	Terletak di Provinsi Jawa Barat sepanjang 64 km Located in West Java Province along 64 km	14,7	15 tahun/years
15	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Probolinggo-Banyuwangi Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 km Located in East Java Province with a road length of approximately 172.9 km	23,4	15 tahun/years
16	SPAM Lampung SPAM Lampung	Proyek penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung dengan kapasitas air 750 l/detik dan panjang pipa transmisi 22 km Drinking water supply project in Bandar Lampung City with a water capacity of 750 l/sec and a transmission pipe length of 22 km	0,8	15 tahun/years
17	SPAM Semarang Barat SPAM West Semarang	Proyek penyediaan air minum di Kota Semarang dengan kapasitas 1.000 l/detik Drinking water supply project in Semarang City with a capacity of 1,000 l/sec	0,4	15 tahun/years
18	Kereta Api Makassar-Parepare Kereta Api Makassar-Parepare	Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan Area Layanan Sulawesi Selatan meliputi 5 Kabupaten/Kota: Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare Implementation of Public Railway Infrastructure with Areas South Sulawesi services cover 5 Regencies/Cities: Regencies Maros, Pangkajene and Islands District, Barru District, Makassar City and Parepare City	1,0	14 tahun sejak TOK2 14 years after COD 2
19	Satelit Multifungsi Pemerintah Multifunctional Satellite Government	Satelit dengan teknologi HTS (<i>High Throughout Satellite</i>) dengan kapasitas 150 Gbps Satellite with HTS (High Throughout Satellite) technology with a capacity of 150 Gbps	6,4	12 tahun/years
20	Jalan Tol Semarang-Demak Semarang-Demak Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 27 km Located in Central Java Province along 27 km	5,4	15 tahun/years
21	Bandar Udara Komodo Labuan Bajo ¹⁾ Komodo Labuan Bajo Airport*)	Pengembangan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat Development of Komodo Labuan Bajo Airport, West Nusa Tenggara	1,2	14 tahun setelah tanggal efektif 14 years after effective date
22	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Sumatra Selatan Causeway Preservation East Sumatra in South Sumatra Province	Terletak di sisi Timur Jalan Sumatra Selatan di Kota Palembang sepanjang 29,37 km Located on the East side of Jalan Sumatra Selatan in Palembang City along 29.37 km.	1,0	11 tahun/years
23	Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road	Jalan tol ini menghubungkan Kota Solo Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Kulon Progo DIY dengan panjang 96,5 km This toll road connects Solo in Central Java, Yogyakarta, and Kulon Progo in Yogyakarta with a length of 96.5 km	26,6	15 tahun/years

*) Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Penjaminan telah berakhir pada tanggal 14 November 2022.
*) The PPP Agreement and the Guarantee Agreement have expired on November 14, 2022.



No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp-trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Period (after COD)
24	Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Yogyakarta-Bawen Toll Road	Jalan tol ini melalui Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Sleman dengan panjang 75,82 km This toll road passes through Magelang Regency, Magelang City, Semarang Regency, Temanggung Regency, and Sleman Regency with a length of 75.82 km	14,3	15 tahun/years
25	SPAM Pekanbaru SPAM Pekanbaru	Proyek penyediaan air minum di Kota Pekanbaru dengan kapasitas 750 lpd Drinking water supply project in Pekanbaru City with a capacity of 750 lpd	0,5	15 tahun/years
26	SPAM Regional Jatiluhur I SPAM Jatiluhur I Regional	Proyek penyediaan air minum Regional dari Jatiluhur dengan kapasitas 4.750 lpd ke Provinsi DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, dan Kab. Karawang Regional drinking water supply project from Jatiluhur with a capacity of 4,750 lpd to DKI Jakarta Province, Bekasi Regency, Bekasi City, and Karawang Regency	1,7	10 tahun/years
27	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau Preservation of East Sumatra Road in Riau Province	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau Preservation of East Sumatra Road in Riau Province	0,5	11 tahun/years
28	SPAM Regional Karian Serpong SPAM Karian Regional Serpong	Proyek penyediaan air minum Regional dari Bendungan Karian dengan kapasitas 4.850 lpd ke Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Regional drinking water supply project from Karian Dam with a capacity of 4,850 lpd to DKI Jakarta Province, Tangerang City, and South Tangerang City	2,4	15 tahun/years
29	Jembatan Callender Hamilton Callender Hamilton Bridge	Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa Replacement and/or Duplication of Hamilton Callender Bridges on Java Island	2,2	10 tahun/years
30	Proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap dengan Skema KPBU Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Toll Road Project with PPP Scheme	Menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah serta mendukung pariwisata di Jawa Barat dan Jawa Tengah Connecting West Java with Central Java and supporting tourism in West Java and Central Java	56,2	15 tahun/years
31	Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dengan Skema KPBU Gilimanuk-Mengwi Toll Road Project with PPP Scheme	Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memfasilitasi lalu lintas dari Barat ke Timur (dan sebaliknya) Pulau Bali dan sebagai akses kawasan wisata serta kawasan pembangunan strategis yang sedang dikembangkan National Strategic Project (PSN) to facilitate traffic from West to East (and vice versa) of Bali Island and as access to tourist areas and strategic development areas that are being developed	24,6	15 tahun/years
32	Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Street Lighting Equipment (APJ) in Madiun Regency, East Java	Pembangunan baru (tanpa <i>retrofit</i>), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.458 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan New construction (without retrofitting), operation, and maintenance of 7,458 points spread across National Roads, Major District Roads and Urban Roads	0,09	4 tahun/years
33	Proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat Roadworthiness Testing and Certification Center (BPLJSKB) Proving Ground Project in Bekasi, West Java	Fasilitas pengujian di luar ruangan (<i>outdoor test</i>) sesuai dengan standar internasional yang telah mengadopsi <i>United Nations Agreement</i> Outdoor test facilities in accordance with international standards that have adopted the United Nations Agreement	1,7	12 tahun/years

Ringkasan Status Proyek Penjaminan Non KPBU

Summary of Non PPP Guarantee Projects Status

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp-trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Period (after COD)
1	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Mandalika Special Economic Zone (SEZ)	Pengembangan wilayah Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Development of the Mandalika Special Economic Zone Tourism area located in Central Lombok District, Nusa Tenggara Barat.	5,0	35 tahun/years
2	Hydropower Programme	Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Mini Hidro yang terletak di empat provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Papua) dengan total kapasitas 195 MW Hydro and Mini Hydro Power Plants located in four provinces (South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Kalimantan, and Papua) with a total capacity of 195 MW	7,0	15 Tahun Sejak Pinjaman Efektif 15 Years Since Effective Loan
3	PLTP Dieng-2 & Patuha-2	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berlokasi di Dieng Jawa Tengah dan Gunung Patuha Jawa Barat, dengan kapasitas masing-masing sebesar 55 MW Geothermal power plants located in Dieng, Central Java and Gunung Patuha, West Java, with a capacity of 55 MW each	7,4	20 tahun/years
4	Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua dengan skema Result-Based Lending (RBL-KMP) Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network Development Project with Result-Based Lending scheme (RBL-KMP)	Terletak di Kalimantan dan Maluku-Papua, proyek pembangunan jaringan distribusi listrik ini ditargetkan untuk menambah sambungan listrik hingga 6,7 juta pelanggan Located in Kalimantan and Maluku-Papua, this electricity distribution network development project is targeted to add electricity connections to 6.7 million customers	33,2	20 tahun/years
5	Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan skema Result- Based Lending (RBL-SNT) Sulawesi and Nusa Tenggara Distribution Network Development Project with Result- Based Lending (RBL-SNT) scheme	Terletak di Sulawesi dan Nusa Tenggara, target dari Proyek ini adalah peningkatan sambungan listrik sampai dengan 7,7 juta pelanggan Located in Sulawesi and Nusa Tenggara, the Project targets to increase electricity connections to 7.7 million customers	23,0	15 tahun/years
6	Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali Distribution Network Development Project in East Java and Bali	Pembangunan sistem distribusi Jaringan Tegangan Menengah, Jaringan Tegangan Rendah, trafo, dan sambungan di wilayah Jawa Timur dan Bali Construction of distribution systems of Medium Voltage Network, Low Voltage Network, transformers, and connections in the regions of East Java and Bali	19,0	20 tahun/years
7	Penjaminan Pemerintah atas Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2021 dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Government Guarantee for the Third Bonds of PT Waskita Karya (Persero) Tbk of 2021 in the framework of the National Economic Recovery Program	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar obligasi Providing guarantee for the default risk in bonds	1,8	Seri A: 5 tahun Seri B: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 7 years



No.	Nama Proyek <i>Project Name</i>	Uraian <i>Description</i>	Nilai Proyek (Rp-triliun) <i>Project Value (Rp-trillion)</i>	Durasi Penjaminan (setelah COD) <i>Guarantee Period (after COD)</i>
8	Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Government Guarantee for the Loan of PT Waskita Karya (Persero) Tbk in the context of National Economic Recovery	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar bunga pinjaman Provision of Guarantee for the risk of default on loan interest payments	8,1	3 tahun/years
9	Penjaminan Obligasi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Guarantee of Bond IV of PT Waskita Karya (Persero) Tbk in the context of National Economic Recovery	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar obligasi Guarantee the risk of bond default	2,1	Seri A: 5 tahun Seri B: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 7 years
10	Penjaminan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Guarantee of Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero) Tbk in the context of National Economic Recovery	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar bunga pinjaman Provision of Guarantee for the risk of default on loan interest payments	1,2	Seri A: 5 tahun Seri B: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 7 years
11	Penjaminan Proyek Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah (SREAP) Guarantee of Transmission and Distribution Network Development Project in West Java and Central Java (SREAP)	Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap untuk fasilitas <i>charging station</i> kendaraan listrik Gradual development of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure for electric vehicle charging station facilities	44,3	20 tahun/years
12	Penjaminan Pinjaman Proyek PLTU Timor-1 (2x50 MW) Timor-1 CFPP Project Loan Guarantee (2x50 MW)	Pembangunan PLTU yang berlokasi di Dusun Panaf, Desa Luifuleo, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh PT PLN CFPP construction located in Panaf Hamlet, Luifuleo Village, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province carried out by PT PLN	3,7	10 tahun/years
13	Penjaminan Pinjaman Bus Listrik KTT G20 dan BTS Bandung & Surabaya PT Industri Kereta Api (Persero) G20 Summit Electric Bus Loan Guarantee and Bandung & Surabaya BTS PT Industri Kereta Api (Persero)	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar bunga pinjaman 53 unit Bus Listrik KTT G20 dan BTS Bandung & Surabaya Provision of Guarantee for the risk of default on loan interest payments for 53 units of G20 Summit Electric Buses and BTS Bandung & Surabaya	0,2	4 tahun/years
14	Penjaminan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Perum DAMRI Guarantee of Working Capital Loans and Investment Loans of Perum DAMRI	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar bunga atas pinjaman guna peremajaan armada dan <i>maintenance facility</i> Guarantee the risk of default on interest payments on loans for fleet rejuvenation and maintenance facilities	0,1	4 tahun/years

No.	Nama Proyek <i>Project Name</i>	Uraian <i>Description</i>	Nilai Proyek (Rp-triliun) <i>Project Value (Rp-trillion)</i>	Durasi Penjaminan (setelah COD) <i>Guarantee Period (after COD)</i>
15	Penjaminan Kredit Modal Kerja PT Len Industri (Persero) PT Len Industri (Persero) Working Capital Credit Guarantee	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar bunga atas pinjaman Pelaksanaan 3 proyek penugasan dari Kementerian Pertahanan RI Provision of Guarantee for the risk of default on interest payments on loans Implementation of 3 assignment projects from the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia	2,6	4 tahun/years
16	Penjaminan Kredit Modal Kerja Talangan Pembayaran Dana Kompensasi dan Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Working Capital Credit Guarantee for Fuel and LPG 3 Kg Compensation and Subsidy Fund Payment	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar bunga atas pinjaman pembayaran dana kompensasi dan subsidi BBM dan LPG 3 Kg Provision of Guarantee for the risk of default on interest payments on loans for compensation funds and fuel subsidies and LPG 3 Kg	47,2	2 tahun/years

Appraisal Penjaminan

Dalam menetapkan kelayakan proyek KPBU dari aspek teknis dan finansial sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan (Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010 serta peraturan perubahannya yang terkait), PT PII mengacu pada proses *appraisal* penjaminan yang bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi yang komprehensif atas dokumen Usulan Penjaminan proyek yang disampaikan oleh PJPK. Adapun proses *appraisal* proyek KPBU mengacu pada Kerangka Evaluasi *Appraisal* yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu, dimana PT PII melakukan evaluasi kelayakan proyek KPBU atas berbagai macam aspek, yaitu teknis, finansial, ekonomi, risiko, kapasitas PJPK, hukum, serta lingkungan dan sosial. Adapun proses evaluasi yang dilakukan merupakan proses evaluasi berbasis risiko, dimana risiko-risiko dari tiap aspek yang dievaluasi akan diidentifikasi, dianalisis, dialokasikan ke pihak yang paling mampu mengendalikan risiko, serta dimitigasi. Proses *appraisal* juga dapat memanfaatkan keahlian dari pihak-pihak yang independen untuk meningkatkan kualitas evaluasi sehingga diharapkan *output* dari proses *appraisal* dapat meningkatkan keberlangsungan dan bankabilitas proyek KPBU yang akan dijamin. Terkait dengan proses *appraisal* untuk proyek Non-KPBU, PT PII mengacu pada masing-masing regulasi terkait fasilitas penjaminan yang akan diberikan dimana secara umum proses *appraisal* akan dilakukan terhadap aspek hukum, finansial, teknis dan risiko. Dalam proses *appraisal* ini, Divisi *Project Appraisal*, yang berada di bawah Direktur Bisnis, ditunjuk sebagai koordinator dari proses *appraisal* penjaminan.

Hingga akhir Desember 2022, proses appraisal telah dilakukan terhadap 6 proyek KPBU dan 7 proyek Non-KPBU. Dimana untuk keenam proyek KPBU yang dilakukan evaluasi mencakup sektor jalan tol, persampahan, konservasi energi, dan transportasi darat, sedangkan proses evaluasi untuk ketujuh proyek non-KPBU dilakukan terhadap fasilitas pinjaman BUMN yang bergerak di sektor kelistrikan, migas, transportasi, manufaktur, konstruksi dan pertahanan.

Guarantee Appraisal

In determining the feasibility of PPP projects from the technical and financial aspects as stipulated in the regulations (Perpres 78/2010 and PMK 260/2010 and their related amendments), IIGF refers to the Guarantee appraisal process which aims to conduct a comprehensive evaluation of the project Guarantee Proposal document submitted by GCA. The PPP project appraisal process refers to the Appraisal Evaluation Framework which can be updated from time to time, where IIGF evaluates the feasibility of PPP projects on various aspects, namely technical, financial, economic, risk, GCA capacity, legal, and environmental and social. The evaluation process carried out is a risk-based evaluation process, where risks from each aspect evaluated will be identified, analyzed, allocated to the party best able to control the risk, and mitigated. The appraisal process can also utilize expertise from independent parties to improve the quality of the evaluation so that it is expected that the output of the appraisal process can improve the sustainability and bankability of the PPP project to be guaranteed. Regarding the appraisal process for Non-PPP projects, IIGF refers to each regulation related to the Guarantee facility to be provided where in general the appraisal process will be carried out on legal, financial, technical and risk aspects. In this appraisal process, the Project Appraisal Division, which is under the Business Director, is appointed as the coordinator of the Guarantee appraisal process.

Until the end of December 2022, the appraisal process has been carried out on 6 PPP projects and 7 Non-PPP projects. Where for the six PPP projects that were evaluated included the toll road, waste, energy conservation, and land transportation sectors, while the evaluation process for the seven non-PPP projects was carried out on SOE loan facilities engaged in the electricity, oil and gas, transportation, manufacturing, construction and defense sectors.

No	Proyek KPBU <i>PPP Project</i>	No	Proyek Non- KPBU <i>Non-PPP Project</i>
1	Jalan Tol Akses Patimban Patimban Toll Road Access	1	Penjaminan Pinjaman Proyek PLTU Timor-1 (2x50 MW) PT PLN Timor-1 CFPP Project Loan Guarantee (2x50 MW) PT PLN



No	Proyek KPBU PPP Project	No	Proyek Non- KPBU Non-PPP Project
2	Proving Ground BPLJSKB Bekasi	2	Penjaminan Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya Bond IV and Sukuk Mudharabah I Guarantee PT Waskita Karya
3	Alat Penerangan Jalan Kabupaten Madiun Street Lighting Equipment Madiun Regency	3	Penjaminan Pinjaman PT INKA PT INKA Loan Guarantee
4	Jalan Tol Kamal – Teluknaga - Rajeg Kamal - Teluknaga - Rajeg Toll Road	4	Penjaminan Pinjaman Perum DAMRI Perum DAMRI Loan Guarantee
5	TPPAS Regional Legok Nangka Legok Nangka Regional TPPAS	5	Penjaminan Pinjaman PT Len Industri PT Len Industri Loan Guarantee
6	Tol Kediri - Tulungagung Kediri - Tulungagung Toll Road	6	Penjaminan Obligasi V dan Sukuk Mudharabah II PT Waskita Karya Bond V and Sukuk Mudharabah II Guarantee PT Waskita Karya
		7	Penjaminan Pinjaman PT Pertamina PT Pertamina Loan Guarantee

PORTOFOLIO PENJAMINAN PROYEK INFRASTRUKTUR - KPBU

Sektor Jalan dan Jembatan

Proyek Jalan Tol Batang-Semarang



Lokasi Location	Provinsi Jawa Tengah Central Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp14,0 triliun/trillion
PJPK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jasamarga Semarang Batang
Tahapan Proyek Project Sections	Beroperasi sejak 21 Januari 2019 Operating since January 21, 2019

Proyek Tol Batang-Semarang merupakan salah satu proyek infrastruktur jalan tol skema KPBU pertama yang diberikan penjaminan oleh Pemerintah melalui PT PII. Proyek Jalan sepanjang 75 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur yang memiliki nilai investasi sebesar Rp14,0 triliun.

Pada tanggal 27 April 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Jasamarga Semarang Batang menandatangani Perjanjian Kerja Sama Proyek di Kantor Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Semarang Batang dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

INFRASTRUCTURE PORTFOLIO OF INFRASTRUCTURE PPP PROJECT GUARANTEE

Road and Bridge Sector

Batang-Semarang Toll Road Project

The Batang-Semarang Toll Road Project is one of the first PPP scheme toll road infrastructure projects to be guaranteed by the Government through IIGF. The 75 km long road project which is part of the Trans-Java Toll Road that will connect Merak, Banten to Banyuwangi, East Java has an investment value of Rp14.0 trillion.

On April 27, 2016, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) as the Government Contracting Agency (GCA) and the Special Purpose Vehicle (SPV) PT Jasamarga Semarang Batang signed the PPP Agreement at the Ministry of Finance Office. At the same time, the Guarantee Agreement between PT Jasamarga Semarang Batang and IIGF and the Recourse Agreement between IIGF and the Ministry of Public Works and Housing were also signed.

Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang

Pandaan-Malang Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Jawa Timur East Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp6,4 triliun/trillion
PJKP GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jasamarga Pandaan Malang
Tahapan Proyek Project Sections	Seksi 1-3 beroperasi sejak 13 Mei 2019 Seksi 4 beroperasi sejak 30 Oktober 2019 Seksi 5 beroperasi sejak 2 April 2020 Sections 1-3 have been operating since May 13, 2019 Section 4 has been operating since October 30, 2019 Section 5 has been operating since April 2, 2020

Proyek KPBU Jalan Tol Pandaan-Malang merupakan bagian dari rencana koridor jalan utara-selatan di Provinsi Jawa Timur sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan dengan panjang 38,48 km. Ruas jalan tol ini akan melalui tiga daerah penting di Jawa Timur yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Dengan demikian, ruas jalan tol ini akan menjadi arteri utama dari banyak alternatif ruas jalan non-tol yang menghubungkan kawasan utara dengan kawasan selatan wilayah Jawa Timur.

The Pandaan-Malang Toll Road PPP project is part of the north-south road corridor plan in East Java Province as a continuation of the Gempol-Pandaan toll road section with a length of 38.48 km. This toll road will pass through three important areas in East Java, namely Pasuruan Regency, Malang Regency and Malang City. Thus, this toll road section will become the main artery of many alternative non-toll roads connecting the northern region with the southern region of East Java.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek ini dilaksanakan antara Kementerian PUPR selaku PJKP dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Jasamarga Pandaan Malang. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Pandaan Malang dengan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

The signing of the Project Cooperation Agreement was carried out between the Ministry of Public Works and Housing as the GCA and the Special Purpose Vehicle (SPV) PT Jasamarga Pandaan Malang. In addition, the Guarantee Agreement between PT Jasamarga Pandaan Malang and IIGF and the Recourse Agreement between IIGF and the Ministry of Public Works and Housing were also signed.

Proyek Jalan Tol Manado-Bitung

Manado-Bitung Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Sulawesi Utara North Sulawesi Province
Nilai Proyek Project Value	Rp4,9 triliun/trillion
PJKP GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jasamarga Manado Bitung
Tahapan Proyek Project Sections	Operasi Parsial Seksi 1 dan 2 A beroperasi sejak 28 September 2020 Partially Operating Section 1 and 2 A have been operating since September 28, 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Pelabuhan Bitung akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor dari dan ke wilayah provinsi Sulawesi Utara ("PP 32/2011"). Oleh karena itu, Pemerintah berupaya merealisasikan rencana tersebut melalui Proyek Jalan Tol Manado-Bitung dengan nilai investasi mencapai Rp4,95 triliun. Dengan panjang 39 km, proyek jalan tol ini terbagi ke dalam dua seksi, yaitu seksi I sepanjang 14 km dari Manado-Airmadidi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam proses pembangunannya dan seksi II sepanjang 25 km

Based on Presidential Regulation No. 32 of 2011 concerning the Masterplan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development 2011-2025, Bitung Port will be developed into a port serving import-export activities to and from the North Sulawesi province ("PP 32/2011"). Therefore, the Government seeks to realize the plan through the Manado-Bitung Toll Road Project with an investment value of Rp4.95 trillion. With a length of 39 km, this toll road project is divided into two sections, namely section I along 14 km from Manado-Airmadidi which is the responsibility of the government in the construction process and section II along 25 km which is built by the Special Purpose Vehicle



yang dibangun oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP). Proyek ini dikerjakan dengan skema SBOT (*Supported Build Operate Transfer*) dengan masa konsesi 40 tahun, dimana Pemerintah menyediakan bantuan berupa dukungan konstruksi untuk seksi I sepanjang 14 km untuk membuat Proyek ini layak secara finansial.

Keberadaan proyek yang terletak di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Provinsi Sulawesi Utara dan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu tempuh dan mengurangi risiko-risiko kecelakaan untuk wilayah Sulawesi Utara.

(SPV). The project is carried out under the SBOT (*Supported Build Operate Transfer*) scheme with a 40-year concession period, in which the Government provides assistance in the form of construction support for the 14 km section I to make the Project financially viable.

The project, which is located in North Minahasa Regency and Bitung City, aims to improve accessibility between regions in North Sulawesi Province and is expected to increase travel time efficiency and reduce accident risks for the North Sulawesi region.

Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

Balikpapan-Samarinda Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Kalimantan Timur East Kalimantan Province
Nilai Proyek Project Value	Rp11,9 triliun/trillion
PJK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
Tahapan Proyek Project Sections	Seksi 2, 3 dan 4 beroperasi sejak 17 Desember 2019 Seksi 1 dan 5 beroperasi sejak Agustus 2021 Sections 2, 3 and 4 have been operating since December 17, 2019 Sections 1 and 5 have been operating since August 2021

Tertletak di wilayah administratif Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,99 km ini terdiri dari 5 seksi. Konstruksi seksi 1 dan 5 merupakan tanggung jawab Pemerintah, sedangkan konstruksi seksi 2-4 merupakan tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana (BUP) (PT Jasamarga Balikpapan Samarinda). Nilai proyek ini mencapai Rp11,9 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Located in the administrative areas of Balikpapan City, Kutai Kartanegara Regency and Samarinda City, the 97.99 km Balikpapan-Samarinda Toll Road project consists of 5 sections. The construction of sections 1 and 5 is the responsibility of the Government, while the construction of sections 2-4 is the responsibility of the Special Purpose Vehicle (SPV), (PT Jasamarga Balikpapan Samarinda). The project value reaches Rp11.9 trillion with an Guarantee period of more than 15 years after COD.

Ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda merupakan salah satu koridor penting bagi lalu lintas pergerakan orang dan barang di Provinsi Kalimantan Timur, dan merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) jalan tol yang masuk ke dalam rencana sistem transportasi Provinsi Kalimantan Timur.

The Balikpapan-Samarinda toll road is one of the important corridors for the movement of people and goods in East Kalimantan Province, and is 1 (one) of 7 (seven) toll roads included in the East Kalimantan Province transportation system plan.

Keberadaan ruas tol Balikpapan-Samarinda tersebut dapat menjadi alternatif menyelesaikan permasalahan jalur lalu lintas yang padat dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan. Selain itu, Pembangunan ruas tol ini juga diharapkan meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan meningkatkan layanan/ akses mobilisasi bagi warga Kalimantan Timur.

The existence of the Balikpapan-Samarinda toll road can be an alternative to solve the problem of congested traffic lanes and increase the efficiency of travel time. In addition, the construction of this toll road is also expected to increase social and economic growth in the East Kalimantan region and improve mobilization services/access for East Kalimantan residents.

Proyek Jalan Tol Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (Jakarta - Cikampek II Elevated)

Sheikh Mohamed Bin Zayed Elevated Toll Road Project (Jakarta - Cikampek II Elevated)



Lokasi Location	Provinsi Jawa Barat West Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp16,2 triliun/trillion
PJPK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
Tahapan Proyek Project Sections	Beroperasi sejak 12 Desember 2019 Operated since December 12, 2019

Proyek jalan tol Jakarta - Cikampek II Elevated sepanjang 36,4 km ini memiliki nilai investasi sebesar Rp16,2 triliun. Proyek ini dibangun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan merupakan proyek tol yang diberikan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII sebagai pelaksana *single window policy*.

The 36.4 km Jakarta - Cikampek II Elevated toll road project has an investment value of Rp16.2 trillion. This project is built through the Public Private Partnership (PPP) scheme and is a toll project that is given a Government Guarantee through IIGF as the implementer of the single window policy.

Pada tanggal 5 Desember 2016, Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama proyek. Sementara itu, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek dan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII dilakukan secara bersamaan pada 22 Februari 2017.

On December 5, 2016, the Ministry of Public Works and Housing as GCA and PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek as the Special Purpose Vehicle (SPV), signed a project cooperation agreement. Meanwhile, the signing of the Guarantee Agreement between IIGF and PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek and the Recourse Agreement between the Ministry of Public Works and Housing and IIGF was carried out simultaneously on February 22, 2017.

Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar

Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Jawa Timur East Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp12,9 triliun/trillion
PJPK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Waskita Bumi Wira
Tahapan Proyek Project Sections	Operasi Parsial Seksi 1, 2 dan 3 beroperasi sejak 19 November 2020 Partially Operating Sections 1, 2 and 3 have been operating since November 19, 2020

Terletak di Provinsi Jawa Timur, Proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar sepanjang 38,3 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp12,9 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Located in East Java Province, the 38.3 km Krian-Legundi-Bunder-Manyar toll road project has an investment value of Rp12.9 trillion with an Guarantee period of more than 15 years after COD.

Pada tanggal 5 Desember 2016, Kementerian PUPR selaku PJPK dan PT Waskita Bumi Wira selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Proyek di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Waskita Bumi Wira dan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII secara bersamaan dilakukan pada 22 Februari 2017.

On December 5, 2016, the Ministry of Public Works and Housing as GCA and PT Waskita Bumi Wira as the Special Purpose Vehicle (SPV), signed the Project Cooperation Agreement at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. Meanwhile, the signing of the Guarantee Agreement between IIGF and PT Waskita Bumi Wira and the Recourse Agreement between the Ministry of Public Works and Housing and IIGF were simultaneously carried out on February 22, 2017.



Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang

Serang-Panimbang Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Banten Banten Province
Nilai Proyek Project Value	Rp8,6 triliun/trillion
PJK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Wijaya Karya Serang Panimbang
Tahapan Proyek Project Sections	Operasi Parsial Seksi 1 beroperasi sejak 16 November 2021 Partially Operating Section 1 has been operating since November 16, 2021

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020, proyek jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 83,7 km yang terletak di Provinsi Banten sepanjang 83,7 km ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi sebesar Rp8,6 triliun.

As stated in Presidential Regulation No. 109 of 2020, the 83.7 km Serang-Panimbang toll road project located in Banten Province is one of the National Strategic Projects with an investment value of Rp8.6 trillion.

Pada tanggal 22 Februari 2017, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PUPR dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR dilakukan secara bersamaan.

On February 22, 2017, the signing of the Cooperation Agreement between the Ministry of Public Works and Housing and PT Wijaya Karya Serang Panimbang, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Wijaya Karya Serang Panimbang, and the Recourse Agreement between IIGF and the Ministry of Public Works and Housing were carried out simultaneously.

Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Jawa Barat West Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp8,4 triliun/trillion
PJK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Citra Karya Jabar Tol
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Terletak di Provinsi Jawa Barat, Proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sepanjang 60,1 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp8,4 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Located in West Java Province, the 60.1 km Cileunyi-Sumedang-Dawuan toll road project has an investment value of Rp8.4 trillion with an Guarantee period of more than 15 years after COD.

Pada tanggal 22 Februari 2017, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PUPR dengan PT Citra Karya Jabar Tol, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Citra Karya Jabar Tol, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

On February 22, 2017, a Cooperation Agreement between the Ministry of Public Works and Housing and PT Citra Karya Jabar Tol, an Guarantee Agreement between IIGF and PT Citra Karya Jabar Tol, and a Recourse Agreement between IIGF and the Ministry of Public Works and Housing were signed.

Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi

Probolinggo-Banyuwangi Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Jawa Timur East Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp23,4 triliun/trillion
PJKP GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
Tahapan Proyek Project Sections	Pra-konstruksi Pre-construction

Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ini memiliki nilai investasi mencapai Rp23,4 triliun dengan masa durasi penjaminan adalah sampai dengan 15 tahun setelah COD. Jalan tol ini akan melewati 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 km. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat mendorong kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Banyuwangi.

The Probolinggo-Banyuwangi Toll Road Project has an investment value of Rp23.4 trillion with an Guarantee period of more than 15 years after COD. This toll road will pass through 3 (three) regencies, namely Probolinggo, Situbondo, and Banyuwangi regencies with a road length of around 172.9 km. The existence of this toll road is expected to encourage the smooth flow of goods and people to and from Banyuwangi.

Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan

Jakarta-Cikampek II South Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Jawa Barat West Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp14,7 triliun/trillion
PJKP GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jasamarga Japek Selatan
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Proyek jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan sepanjang 64 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp14,7 triliun dengan masa durasi penjaminan adalah sampai dengan 15 tahun setelah COD.

The 64 km Jakarta-Cikampek II South toll road project has an investment value of Rp14.7 trillion with an Guarantee period of more than 15 years after COD.

Pembangunan proyek jalan tol Jakarta Cikampek II Selatan berawal di sekitar *interchange* Jatiasih, masuk ke wilayah Kota Bekasi dan berakhir di sekitar *interchange* Sadang, Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

The construction of the Jakarta Cikampek II South toll road project starts around the Jatiasih interchange, enters the Bekasi City area and ends around the Sadang interchange, Purwakarta Regency, West Java Province.

Proyek Jalan Tol Semarang-Demak

Semarang-Demak Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Jawa Tengah Central Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp5,4 triliun/trillion
PJKP GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction



Berlokasi di Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, proyek ini memiliki panjang jalan tol 27 km dengan nilai investasi sebesar Rp5,4 triliun yang ditanggung oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP). Proyek berskema KPBU ini meliputi Pembangunan dan Pengoperasian Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut.

Located in Semarang City to Demak Regency, Central Java, this project has a toll road length of 27 km with an investment value of Rp5.4 trillion borne by the Special Purpose Vehicle (SPV). This PPP scheme project includes the construction and operation of the Semarang-Demak Toll Road which is integrated with the Sea Wall.

Pada tanggal 23 September 2019, Menteri PUPR dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PT PPSD) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. Selain itu, di saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT PPSD, dan penandatanganan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII.

On September 23, 2019, the Minister of PUPR and PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PT PPSD) signed a Cooperation Agreement. In addition, at the same time the Guarantee Agreement between IIGF and PT PPSD was also signed, and the signing of the Recourse Agreement between the Ministry of Public Works and Housing and IIGF.

Proyek Jalan Non Tol Lintas Timur Sumatra di Provinsi Sumatra Selatan (Jalintim Sumsel)

Sumatra East Cross Non Toll Road Project in Sumatra Province South (Jalintim South Sumatra)



Lokasi Location	Provinsi Sumatra Selatan South Sumatra Province
Nilai Proyek Project Value	Rp1 triliun/trillion
PJKK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jalintim Adhi Abipraya
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Pada tanggal 3 Agustus 2020 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJKK dengan PT Jalintim Adhi Abipraya selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jalintim Adhi Abipraya dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

On August 3, 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Housing as GCA and PT Jalintim Adhi Abipraya as the Special Purpose Vehicle (SPV). On the same occasion, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Jalintim Adhi Abipraya and the Recourse Agreement between IIGF and the Ministry of Public Works and Housing were also signed.

Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan Non-tol di Indonesia, serta mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui PT PII. Ruang lingkup skema KPBU Proyek ini meliputi Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan pada masa konstruksi serta masa layanan dan Pembiayaan Proyek oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP).

The South Sumatra Jalintim Preservation PPP Project is the first PPP project in the Non-toll Road sector in Indonesia, and received a Government Guarantee through IIGF. The scope of this PPP Project scheme includes Technical Planning, Construction Implementation, Operation and Maintenance during the construction period and the service period and Project Financing by the Special Purpose Vehicle (SPV).

Dengan nilai investasi sebesar Rp982 miliar, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara, serta penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan nilai waktu tempuh.

With an investment value of Rp982 billion, this project is expected to have a major impact on economic improvement through increased connectivity between regions, especially those used as logistics, tourism, access roads to ports and airports, as well as savings in Vehicle Operating Costs (BOK) and the value of travel time.

Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo

Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Central Java Province and DI Yogyakarta
Nilai Proyek Project Value	Rp26,6 triliun/trillion
PJPK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jogjasolo Marga Makmur
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo sepanjang 96,5 km ini dibangun dengan skema kerja sama *Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT) dengan masa konsesi selama 40 tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pembangunan proyek infrastruktur jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antara Solo, Yogyakarta, dan Kulon Progo, termasuk melayani akses Bandara NYIA Kulon Progo, meningkatkan pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol serta menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

The 96.5 km Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road project was built under the *Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT) cooperation scheme with a concession period of 40 years since the Notice to Proceed (SPMK). The construction of this toll road infrastructure project aims to improve accessibility between Solo, Yogyakarta and Kulon Progo, including serving access to NYIA Kulon Progo Airport, increasing the development of areas traversed by toll roads and supporting increased regional economic growth.

Pada tanggal 9 September 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jogjasolo Marga Makmur selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jogjasolo Marga Makmur dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

On September 9, 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Housing as GCA and PT Jogjasolo Marga Makmur as the Special Purpose Vehicle (SPV). On the same occasion, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Jogjasolo Marga Makmur and the Recourse Agreement between IIGF and the Ministry of Public Works and Housing were also signed.

Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

Yogyakarta-Bawen Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Central Java Province and DI Yogyakarta
Nilai Proyek Project Value	Rp14,3 triliun/trillion
PJPK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jasamarga Jogja Bawen
Tahapan Proyek Project Sections	Pra-Konstruksi Pre-Construction

Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km ini terletak di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pembangunan proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah dan Yogyakarta serta meningkatkan konektivitas antar wilayah, terutama akses Semarang-Yogyakarta.

The 75.82 km Yogyakarta-Bawen Toll Road project is located in Central Java and DI Yogyakarta. The construction of this project is expected to have a major impact on increasing regional economic growth in Central Java and Yogyakarta and improving connectivity between regions, especially Semarang-Yogyakarta access.

Pada tanggal 13 November 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Bawen selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jogja Bawen dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

On November 13, 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Housing as GCA and PT Jasamarga Jogja Bawen as the Special Purpose Vehicle (SPV). On the same occasion, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Jasamarga Jogja Bawen and the Recourse Agreement between IIGF and the Ministry of Public Works and Housing were also carried out.



Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau

Eastern Sumatra Road Preservation Project in Riau Province



Lokasi Location	Provinsi Riau Riau Province
Nilai Proyek Project Value	Rp0,5 triliun/trillion
PJPK GCA	Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Director General of Bina Marga, Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Adhi Jalintim Riau
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau adalah proyek KPBU kedua di sektor Jalan Non-tol di Indonesia. terdapat 3 (tiga) jalan yang akan dipreservasi di Jalintim Riau dengan total seluruhnya mencapai 43 kilometer, yaitu Jalan Simpang Kayu Ara (Pekanbaru)-Batas Kabupaten Pelalawan, Jalan Batas Pelalawan-Sikijang Mati, dan Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago. Selain itu, dilakukan perbaikan 4 unit jembatan sepanjang 60 meter di Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago serta pembangunan 1 unit fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

The East Sumatra Road Preservation Project in Riau Province is the second PPP project in the Non-toll Road sector in Indonesia. there are 3 (three) roads to be preserved on the Riau Jalintim with a total of 43 kilometers, namely Simpang Kayu Ara (Pekanbaru)-Pelalawan Regency Border Road, Pelalawan-Sikijang Mati Border Road, and Sikijang Mati-Simpang Lago Road. In addition, 4 units of 60-meter-long bridges on Sikijang Mati-Simpang Lago Road were repaired and 1 unit of Motor Vehicle Weighing Implementation Unit (UPPKB) facility was built.

Pada 12 April 2021 telah dilakukan penandatanganan perjanjian penjaminan atas Proyek Jalintim Riau setelah sebelumnya telah ditandatangani perjanjian KPBU pada Proyek Jalintim Sumatra Selatan pada 3 Agustus 2020.

On April 12, 2021, Guarantee agreement was signed for the Riau Jalintim Project after previously signing a PPP agreement on the South Sumatra Jalintim Project on August 3, 2020.

Proyek Jembatan Callender Hamilton

Callender Hamilton Bridge Project



Lokasi Location	Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Banten, West Java, Central java, and East Java Provinces
Nilai Proyek Project Value	Rp2,2 triliun/trillion
PJPK GCA	Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Director General of Bina Marga, Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Baja Titian Utama
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Proyek Jembatan *Callender Hamilton* (CH) merupakan proyek penggantian dan/atau duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa dengan lingkup penggantian 33 unit jembatan dengan panjang eksisting 2.452,9 meter untuk koridor Jalan Nasional; duplikasi tanpa penggantian jembatan terhadap 4 unit jembatan dengan panjang eksisting 430 meter; duplikasi dengan penggantian jembatan terhadap 1 unit jembatan dengan panjang eksisting 50 meter; serta pengoperasian dan pemeliharaan untuk seluruh jembatan.

The Callender Hamilton (CH) Bridge Project is a project to replace and/or duplicate the CH Bridge in Java with the scope of replacing 33 bridge units with an existing length of 2,452.9 meters for the National Road corridor; duplication without bridge replacement of 4 bridge units with an existing length of 430 meters; duplication with bridge replacement of 1 bridge unit with an existing length of 50 meters; and operation and maintenance for all bridges.

Pada 6 Desember 2021 telah dilakukan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek Jembatan CH ini.

On December 6, 2021, the agreement was signed regarding the Government Guarantee for the CH Bridge project.

Proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap

Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah West Java and Central Java Provinces
Nilai Proyek Project Value	Rp56,2 triliun/trillion
PJPK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Jasamarga Gedebage Cilacap
Tahapan Proyek Project Sections	Pra Konstruksi Pre-Construction

Pada tanggal 31 Januari 2022, PT PII telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Regres untuk proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

On January 31, 2022, IIGF has signed a Guarantee and Recourse Agreement for the Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Toll Road Public Private Partnership (PPP) project at the Auditorium of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR).

Proyek jalan tol sepanjang 206,65 km yang melintasi Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cilacap (Jawa Barat – Jawa Tengah) ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara serta penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan nilai waktu tempuh, termasuk manfaat tidak langsung berupa peningkatan lapangan kerja dengan adanya pembangunan proyek. Adapun proyek ini memiliki masa konsesi selama 40 tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

The 206.65 km toll road project that crosses Bandung Regency, Garut Regency, Tasikmalaya Regency, Tasikmalaya City, Ciamis Regency, Pangandaran Regency, Cilacap Regency (West Java - Central Java) is expected to encourage economic growth through increased connectivity between regions, especially those used as logistics, tourism, access roads to ports and airports as well as savings in Vehicle Operating Costs (BOK) and travel time values, including indirect benefits in the form of increased employment due to project development. The project has a concession period of 40 years since the Notice to Proceed (SPMK).

Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi

Gilimanuk-Mengwi Toll Road Project



Lokasi Location	Provinsi Bali Bali province
Nilai Proyek Project Value	Rp24,6 triliun/trillion
PJPK GCA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Housing
Badan Usaha Company	PT Tol Jagat Kerthi Bali
Tahapan Proyek Project Sections	Pra Konstruksi Pre-Construction

Proyek Jalan Tol sepanjang 96,84 km ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi lalu lintas dari Barat ke Timur (dan sebaliknya) Pulau Bali dan sebagai akses kawasan wisata serta kawasan pembangunan strategis yang sedang dikembangkan.

This 96.84 km toll road project is designated as a National Strategic Project (PSN) based on the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2021 which aims to facilitate traffic from West to East (and vice versa) of Bali Island and as access to tourist areas and strategic development areas that are being developed.

Kementerian Keuangan telah memberikan alternatif dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dan juga *fiscal tools* salah satunya penjaminan pada proyek ini melalui PT PII serta PT Tol Jagat Kerthi Bali dan konsorsium yang terlibat sehingga proyek ini dapat berhasil ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2022. Proyek ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan juga berdampak pada tersedianya lapangan kerja dan peningkatan pemulihan ekonomi nasional.

The Ministry of Finance has provided alternatives in encouraging the acceleration of infrastructure development through PPP schemes and also fiscal tools, one of which is guaranteeing this project through IIGF and PT Tol Jagat Kerthi Bali and the consortium involved so that this project can be successfully signed on March 8, 2022. This project is expected to benefit the community and also have an impact on the availability of employment and increased national economic recovery.



Sektor Telekomunikasi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018, dan juga termasuk Proyek Prioritas Nasional, Proyek Palapa Ring adalah salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional dan merupakan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Sistem Komunikasi Serat Optik ke-57 kota/kabupaten yang belum terlayani.

Dengan estimasi jangkauan wilayah sepanjang 8.871 km, proses pengadaan proyek dibagi menjadi tiga paket yaitu, Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur. Proyek ini ditargetkan mampu mendistribusikan jaringan *broadband* dengan kecepatan 10 Mbps di daerah pedesaan dan 20 Mbps di daerah perkotaan.

Proyek Palapa Ring Paket Barat



Lokasi Location	Bengkalis, Kepulauan Meranti, Natuna, Kepulauan Anambas, Lingga Bengkalis, Meranti Islands, Natuna, Anambas Islands, Lingga
Nilai Proyek Project Value	Rp1,2 triliun/trillion
PJKP GCA	Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communications and Informatics
Badan Usaha Company	PT Palapa Ring Barat
Tahapan Proyek Project Sections	Beroperasi sejak 2 Maret 2018 Operating since March 2, 2018

Pada tanggal 29 Februari 2016, penandatanganan Perjanjian Kerja sama dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku PJKP dan PT Palapa Ring Barat selaku BUP di Kantor Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Ring Barat serta Perjanjian Regres antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan PT PII. Pada tanggal 10 November 2016, *financial close* proyek ini tercapai di mana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku *lender* menyalurkan kredit senilai Rp875 miliar kepada BUP.

Proyek Palapa Ring Paket Tengah



Lokasi Location	Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi, Provinsi Maluku, Provinsi NTT, Provinsi Papua Barat East Kalimantan Province, Sulawesi Province, Maluku Province, NTT Province, West Papua Province
Nilai Proyek Project Value	Rp1,1 triliun/trillion
PJKP GCA	Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communications and Informatics
Badan Usaha Company	PT Len Telekomunikasi Indonesia
Tahapan Proyek Project Sections	Beroperasi sejak 21 Desember 2018 Operating since December 21, 2018

Telecommunications Sector

As stated in Presidential Regulation No. 56 of 2018, and also included as a National Priority Project, the Palapa Ring Project is one of the National Strategic Infrastructure Projects and is the construction of a national fiber optic backbone network. The Government Multifunction Satellite Project is designed and implemented using the Sea Cable Communication System and Optical Fiber Communication System to 57 cities/regencies that have not been served.

With an estimated coverage area of 8,871 km, the project procurement process is divided into three packages, namely, the West Package, Central Package, and East Package. The project is targeted to be able to distribute broadband networks with speeds of 10 Mbps in rural areas and 20 Mbps in urban areas.

Palapa Ring West Package Project

On February 29, 2016, the signing of the Cooperation Agreement was carried out between the Ministry of Communication and Informatics (Kemenkominfo) as GCA and PT Palapa Ring Barat as BUP at the Ministry of Finance Office. At the same time, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Palapa Ring Barat and the Recourse Agreement between the Ministry of Communications and Informatics and IIGF were also signed. On November 10, 2016, the financial close of this project was achieved where PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as lender disbursed credit worth Rp875 billion to SPV.

Palapa Ring Central Package Project

Pada tanggal 4 Maret 2016, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama proyek senilai Rp1,1 triliun dilakukan antara Kemenkominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia. Pada kesempatan yang sama, PT PII yang merupakan pelaksanaan *single window policy* penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur juga menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Tengah.

On March 4, 2016, the signing of the PPP Agreement for the Rp1.1 trillion project was carried out between the Ministry of Communications and Informatics as the Government Contracting Agency (GCA) and PT Len Telekomunikasi Indonesia. On the same occasion, IIGF, which is the single window policy for providing government Guarantees for infrastructure projects, also signed the Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the Palapa Ring Central Package project.

Proyek Palapa Ring Paket Timur

Palapa Ring East Package Project



Lokasi Location	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat East Nusa Tenggara, Maluku, Papua, and West Papua Provinces
Nilai Proyek Project Value	Rp5,1 triliun/trillion
PJPK GCA	Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communications and Informatics
Badan Usaha Company	PT Palapa Timur Telematika
Tahapan Proyek Project Sections	Beroperasi sejak 29 Agustus 2019 Operating since August 29, 2019

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018, proyek ini merupakan proyek Infrastruktur Strategis Nasional, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

As stated in Presidential Regulation No. 56 of 2018, this project is a National Strategic Infrastructure project, which is also categorized as a National Priority Project.

Pada 29 September 2016 bertempat di Istana Negara, disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Timur Telematika selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kemenkominfo selaku PJPK.

On September 29, 2016 at the State Palace, witnessed by President RI Joko Widodo, Coordinating Minister for Economy, Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, an Guarantee Agreement was signed between IIGF and PT Palapa Timur Telematika as the Special Purpose Vehicle (SPV) and a Recourse Agreement between IIGF and Kemenkominfo as GCA.

Setelah penandatanganan tersebut, bertempat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Paket Timur dan juga penyerahan Surat Efektif Penjaminan oleh PT PII pada 29 Maret 2017.

After the signing, at the Ministry of Communications and Informatics, the Financial Close of the Palapa Ring East Package Project was held and also the submission of the Guarantee Effective Letter by IIGF on March 29, 2017.

Satelit Multifungsi Pemerintah

Government Multifunction Satellite



Lokasi Location	Tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia Spread across the region of the Republic of Indonesia
Nilai Proyek Project Value	Rp6,4 triliun/trillion
PJPK GCA	Kementerian Komunikasi dan Informatika Ministry of Communications and Informatics
Badan Usaha Company	PT Satelit Nusantara Tiga
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Satelit Multi Fungsi merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur.

The Multi-function Satellite is the fourth PPP project in the telecommunications sector to receive a government Guarantee through IIGF after the Palapa Ring West, Central, and East Packages.



Pada tanggal 3 Mei 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK dan PT Satelit Nusantara Tiga selaku BUP melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah. Pada saat yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Satelit Nusantara Tiga serta Perjanjian Regres antara Kemenkominfo dengan PT PII.

Proyek ini diharapkan dapat bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat luas, di antaranya untuk sektor pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan keamanan, pemerintah daerah, juga khususnya sektor keuangan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), dalam rangka mengakselerasi realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.

Sektor Ketenagalistrikan

PLTU Jawa Tengah/Central Java Power Plant



Lokasi Location	Kab. Batang–Provinsi Jawa Tengah Batang Regency-Central Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp66,8 triliun/trillion
PJPK GCA	PT PLN (Persero)
Badan Usaha Company	PT Bhimasena Power Indonesia
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

PLTU Jawa Tengah merupakan proyek infrastruktur skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Pemerintah RI (Kementerian Keuangan) sesuai Perpres 78/2010. Proyek ini merupakan langkah pemerintah untuk menyediakan kebutuhan listrik yang dibutuhkan masyarakat. Proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW ini berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan nilai investasi sebesar US\$4 miliar atau lebih dari Rp40 triliun tersebut, proyek tersebut akan dibangun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) dengan skema *Build Own Operate Transfer* selama masa konsesi 25 tahun.

Pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT BPI selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) serta Perjanjian Regres dengan PT PLN (Persero) sebagai PJPK. Pada bulan Juni 2016, *Financial Close* proyek ini dilaksanakan di Istana Negara yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

On May 3, 2019, the Ministry of Communication and Information as GCA and PT Satelit Nusantara Tiga as BUP signed a Cooperation Agreement for the Government Multifunction Satellite Project. At the same time, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Satelit Nusantara Tiga and the Recourse Agreement between the Ministry of Communication and Informatics and IIGF were also signed.

This project is expected to be useful and enjoyed by the wider community, including for the education, health, political, legal and security sectors, local governments, as well as especially the financial sector to support the acceleration of digitalization of ultra-micro financing (UMi) distribution, in order to accelerate the realization of inclusive finance throughout Indonesia.

Electricity Sector

Central Java CFPP/Central Java Power Plant

Central Java CFPP is the first PPP scheme infrastructure project that was successfully realized by obtaining a joint Guarantee facility by IIGF and the Government of Indonesia (Ministry of Finance) in accordance with Perpres 78/2010. This project is the government's step to provide the electricity needed by the community. The 2 x 1,000 MW coal-fired power plant project is located in Batang Regency, Central Java. With an investment value of US\$4 billion or more than Rp40 trillion, the project will be built by a consortium of PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) with a Build Own Operate Transfer scheme for a concession period of 25 years.

On October 6, 2011, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT BPI as the Special Purpose Vehicle (SPV) and a Recourse Agreement with PT PLN (Persero) as the GCA. In June 2016, the Financial Close of the project was held at the State Palace witnessed by President of the Republic of Indonesia Joko Widodo, Coordinating Minister for Economic Affairs (as Chairman of the Committee for the Acceleration of Priority Infrastructure Delivery), Minister of National Development Planning, Minister of Finance and Minister of Energy and Mineral Resources, Minister of State-Owned Enterprises and Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning.

Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun

Street Lighting Equipment (APJ) Project in Madiun Regency



Lokasi Location	Kabupaten Madiun Madiun Regency
Nilai Proyek Project Value	Rp89 miliar/billion
PJKP GCA	Pemerintah Kabupaten Madiun Madiun District Government
Badan Usaha Company	PT Tri Tunggal Madiun Terang
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Proyek APJ di Kabupaten Madiun ("Proyek") merupakan pembangunan infrastruktur Alat Penerangan Jalan yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha ("KPBU")/*Public-Private Partnership* ("PPP"). Ruang lingkup Proyek meliputi pembangunan baru (tanpa *retrofit*), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik yang tersebar antara lain 1.604 titik di jalan Nasional (arteri), 5.603 titik di jalan Kabupaten (lokal) dan 252 titik di jalan perkotaan (lingkungan). Nilai investasi Proyek sebesar Rp100.650.782.338 dengan masa konstruksi selama 9 bulan dan periode kerja sama sampai dengan 10 tahun sejak tanggal operasi komersial.

The APJ Project in Madiun Regency (the "Project") is a road lighting infrastructure development implemented under the Public-Private Partnership ("PPP") scheme. The scope of the Project includes new construction (without retrofit), operation, and maintenance of 7,459 points spread among others 1,604 points on National roads (arterial), 5,603 points on District roads (local) and 252 points on urban roads (neighborhood). The investment value of the Project is Rp100,650,782,338 with a construction period of 9 months and a cooperation period of up to 10 years from the date of commercial operation.

Proyek ini menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek. Hal ini diharapkan dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU. Selain itu, dukungan PT PII kepada proyek ini juga merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung *green infrastructure*, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

This project shows IIGF's commitment in supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia for various project scales. This is expected to increase the number of other infrastructure projects to be carried out under the PPP scheme. In addition, IIGF's support for this project is also a commitment to support projects with energy saving benefits in order to support green infrastructure, and be able to have a significant impact on the community, especially in Madiun Regency, East Java.

Sektor Air Minum

Water Supply Sector

Proyek SPAM Umbulan-Jawa Timur

Umbulan SPAM Project-East Java



Lokasi Location	Provinsi Jawa Timur East Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp2,1 triliun/trillion
PJKP GCA	Pemerintah Provinsi Jawa Timur East Java Provincial Government
Badan Usaha Company	PT Meta Adhya Tirta Umbulan
Tahapan Proyek Project Sections	Beroperasi sejak 31 Januari 2021 Operating since January 31, 2021

Untuk mengatasi krisis air dan memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mencari jalan keluar melalui pemanfaatan mata air Umbulan yang terdapat di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mata air Umbulan dipilih karena kemampuannya untuk memproduksi 4.000 liter/detik dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,8 juta jiwa di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dan sekitarnya.

To overcome the water crisis and meet the increasing needs of the community, the East Java Provincial Government is trying to find a way out through the utilization of Umbulan spring located in Umbulan Village, Winongan District, Pasuruan Regency. Umbulan spring was chosen because of its ability to produce 4,000 liters/second and can meet the clean water needs of 1.8 million people in Surabaya City, Sidoarjo Regency, Gresik Regency, Pasuruan Regency and Pasuruan City and surrounding areas.



Proyek SPAM Umbulan dibangun dengan menggunakan skema KPBU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku PJPK dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Nilai investasi Proyek SPAM Umbulan mencapai Rp2,057 triliun dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp818 miliar dari Kementerian Keuangan.

Pada 21 Juli 2016, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan Perjanjian Regres dengan Gubernur Jawa Timur untuk Proyek SPAM Umbulan. Proyek ini merupakan sektor air dan proyek daerah pertama yang diberikan penjaminan Pemerintah melalui PT PII.

The Umbulan SPAM project was built using a PPP scheme between the East Java Provincial Government as the GCA and PT Meta Adhya Tirta Umbulan as the Special Purpose Vehicle (SPV). The investment value of the Umbulan SPAM Project reached Rp2.057 trillion and obtained Feasibility Support of Rp818 billion from the Ministry of Finance.

On July 21, 2016, IIGF signed an Guarantee Agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan and a Recourse Agreement with the Governor of East Java for the Umbulan SPAM Project. This project is the first water sector and regional project to be granted a Government Guarantee through IIGF.

Proyek SPAM Kota Bandar Lampung



Lokasi Location	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Bandar Lampung City, Lampung Province
Nilai Proyek Project Value	Rp0,8 triliun/trillion
PJPK GCA	PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Local Water Supply of Way Rilau Bandar Lampung
Badan Usaha Company	PT Adhya Tirta Lampung
Tahapan Proyek Project Sections	Beroperasi sejak 13 Agustus 2020 Operating since August 13, 2020

Bandar Lampung City SPAM Project

Proyek SPAM Kota Bandar Lampung diinisiasi karena Kota Bandar Lampung memerlukan peningkatan dan penyediaan air minum. PDAM Way Rilau baru melayani sekitar 20% dari total penduduk Kota Bandar Lampung. Selain rendahnya tingkat pelayanan PDAM Way Rilau, kendala kontur pada Kota Bandar Lampung yang berbukit-bukit juga mengakibatkan pendistribusian air minum belum merata. Nilai investasi SPAM Kota Bandar Lampung mencapai Rp750 miliar dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp258,8 miliar dari Kementerian Keuangan.

Perjanjian Kerjasama antara PDAM Way Rilau selaku PJPK dan PT Adhya Tirta Lampung selaku BUP telah ditandatangani pada 14 Februari 2018. Pada kesempatan yang sama, PT PII juga telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres. *Financial Close* Proyek telah tercapai pada 13 Agustus 2018 dan Proyek telah mulai beroperasi sejak 13 Agustus 2020.

The Bandar Lampung City SPAM project was initiated because Bandar Lampung City needed to improve and supply drinking water. PDAM Way Rilau only serves about 20% of the total population of Bandar Lampung City. In addition to the low level of service of PDAM Way Rilau, the hilly contours of Bandar Lampung City also resulted in the uneven distribution of drinking water. The investment value of Bandar Lampung City SPAM reached Rp750 billion and obtained Feasibility Support of Rp258.8 billion from the Ministry of Finance.

The Cooperation Agreement between PDAM Way Rilau as GCA and PT Adhya Tirta Lampung as SVP was signed on February 14, 2018. On the same occasion, IIGF also signed the Guarantee Agreement and Recourse Agreement. Financial Close of the Project has been achieved on August 13, 2018 and the Project has started operating since August 13, 2020.

Proyek SPAM Semarang Barat



Lokasi Location	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Semarang City, Central Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp0,4 triliun/trillion
PJPK GCA	Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Regional Water Supply Tirta Moedal Semarang
Badan Usaha Company	PT Air Semarang Barat
Tahapan Proyek Project Sections	Beroperasi sejak 22 Mei 2021 Operating since May 22, 2021

West Semarang SPAM Project

Proyek SPAM Semarang Barat berkapasitas 1.000 liter/detik dibangun berdasarkan skema KPBU antara Perumda Air Minum Tirta Moedal selaku PJKP dengan PT Air Semarang Barat selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Nilai proyek SPAM Semarang Barat sebesar Rp417 miliar tanpa menggunakan Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan. Area pelayanan SPAM Semarang Barat ditargetkan untuk melayani 3 (tiga) Kecamatan yang terbagi dalam 5 (lima) zona wilayah layanan, yaitu Kecamatan Tugu (zona 1), sebagian Kecamatan Ngaliyan (zona 2 dan 3), serta Kecamatan Semarang Barat (zona 4 dan 5).

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memperluas cakupan sambungan perpipaan air minum dengan penambahan Sambungan Rumah (SR) kurang lebih 37.000 SR, sehingga total SR yang dapat dilayani mencapai sekitar 71.500 SR pada tahun 2030. Banyaknya SR yang saat ini belum terlayani dikarenakan keterbatasan dana dan sumber air baku yang tersedia di dalam Kota Semarang.

PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat pada 23 November 2018. Adapun *Financial Close* proyek ini dicapai pada tanggal 22 Mei 2019.

The West Semarang SPAM project with a capacity of 1,000 liters/second was built under a PPP scheme between Perumda Air Minum Tirta Moedal as the GCA and PT Air Semarang Barat as the Special Purpose Vehicle (SPV). The value of the West Semarang SPAM project is Rp417 billion without the use of Feasibility Support from the Ministry of Finance. The West Semarang SPAM service area is targeted to serve 3 (three) sub-districts which are divided into 5 (five) service area zones, namely Tugu Sub-district (zone 1), parts of Ngaliyan Sub-district (zones 2 and 3), and West Semarang Sub-district (zones 4 and 5).

The project aims to improve service performance and expand the coverage of drinking water pipeline connections by adding approximately 37,000 household connections (SR), so that the total SR that can be served reaches approximately 71,500 SR by 2030. The number of SRs that are currently unserved is due to limited funds and raw water sources available in Semarang City.

IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Air Semarang Barat and a Recourse Agreement with PDAM Tirta Moedal for the West Semarang SPAM Project on November 23, 2018. The Financial Close of this project was achieved on May 22, 2019.

Proyek SPAM Pekanbaru

Pekanbaru SPAM Project



Lokasi Location	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Pekanbaru City, Riau Province
Nilai Proyek Project Value	Rp0,5 triliun/trillion
PJKP GCA	Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru
Badan Usaha Company	PT PP Tirta Madani
Tahapan Proyek Project Sections	Fase A – Operasi (30 September 2022) Fase B - Konstruksi Phase A - Operating (September 30, 2022) Phase B - Construction

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru merupakan proyek pembangunan dan pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru berkapasitas 750 lpd dengan nilai investasi sebesar Rp499 miliar. Proyek SPAM Kota Pekanbaru merupakan proyek *Rehabilitate-Build-Operate-Transfer* (RBOT), di mana untuk Fase A telah beroperasi pada tanggal 30 September 2022 dan untuk Fase B sedang dalam tahap konstruksi.

The Pekanbaru City Water Supply System Project is a construction and operation project of the Pekanbaru City Water Supply System with a capacity of 750 lpd with an investment value of Rp499 billion. The Pekanbaru City SPAM project is a Rehabilitate-Build-Operate-Transfer (RBOT) project, where Phase A has been operating on September 30, 2022 and Phase B is currently under construction.

Saat ini, Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru baru dapat melayani sekitar 9,3% dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Proyek SPAM Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan Sambungan Langanan (SL) sebanyak ± 48.500 SL sehingga dengan pelanggan saat ini dapat mencapai kurang lebih 60.000 SL. Dengan demikian, Proyek SPAM Kota Pekanbaru dapat meningkatkan jumlah pelanggan Perumdam Kota Pekanbaru hingga hampir 4 kali lipat dari kondisi SL saat ini.

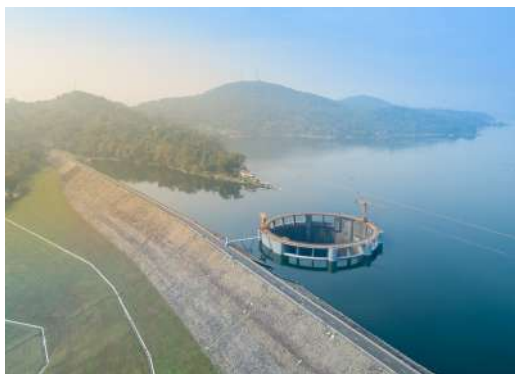
Currently, Perumdam Tirta Siak Pekanbaru City can only serve around 9.3% of the Pekanbaru City population. The Pekanbaru City SPAM Project is expected to increase the Subscription Connection (SL) by ± 48,500 SL so that the current customers can reach approximately 60,000 SL. Thus, the Pekanbaru City SPAM Project can increase the number of Pekanbaru City Perumdam customers to almost 4 times the current SL condition.

Pada tanggal 16 Desember 2020, penandatanganan Perjanjian Kerja sama, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek SPAM Pekanbaru dilaksanakan secara bersamaan.

On December 16, 2020, the signing of the Cooperation Agreement, Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the Pekanbaru SPAM Project was carried out simultaneously.



Proyek SPAM Regional Jatiluhur I



Lokasi Location	Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang DKI Jakarta Province, Bekasi City, Bekasi Regency, and Karawang Regency
Nilai Proyek Project Value	Rp1,7 triliun/trillion
PJPK GCA	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pendelegasian kepada Dirjen Cipta Karya Minister of Public Works and Housing, delegation to Director General of Human Settlements
Badan Usaha Company	PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I merupakan proyek kerja sama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur di mana area pelayanannya akan mencakup Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Proyek dengan kapasitas 4.750 liter/detik ditargetkan akan menyalurkan air minum ke-380.000 sambungan rumah.

Pada 19 Februari 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama, Perjanjian Penjaminan dan untuk Proyek *unsolicited* ini telah mencapai *financial close* pada 1 April 2022 dan diberikan penjaminan oleh PT PII dimana durasi penjaminannya adalah 10 tahun sejak COD.

Jatiluhur I Regional SPAM Project

Jatiluhur I Regional SPAM Project is a cooperation project between the Ministry of Public Works and Public Housing and PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur where the service area will cover DKI Jakarta Province, Bekasi City Government, Bekasi Regency Government, and Karawang Regency Government. The project with a capacity of 4,750 liters/second is targeted to deliver drinking water to 380,000 house connections.

On February 19, 2021, the Cooperation Agreement, Guarantee Agreement were signed and for this unsolicited project, it has reached financial close on April 1, 2022 and is guaranteed by IIGF where the Guarantee period is 10 years from COD.

Proyek SPAM Regional Karian Serpong



Lokasi Location	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan DKI Jakarta Province, Tangerang City, and South Tangerang City
Nilai Proyek Project Value	Rp2,4 triliun/trillion
PJPK GCA	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pendelegasian kepada Dirjen Cipta Karya Minister of Public Works and Housing, delegation to Director General of Human Settlements
Badan Usaha Company	PT Karian Water Services
Tahapan Proyek Project Sections	Pra Konstruksi Pre-Construction

Proyek SPAM Regional Karian Serpong merupakan proyek antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT Karian Water Services yang mencakup area Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Proyek penyediaan air minum regional dari Bendungan Karian dengan kapasitas 4.600 liter/detik ini ditargetkan akan menyalurkan air minum ke 539.400 sambungan rumah.

Pada 29 April 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama dan Perjanjian Penjaminan, dan untuk Perjanjian Regres ditandatangani pada 30 April 2021. Proyek SPAM Karian Serpong merupakan proyek ke-6 di sektor air minum yang diberikan penjaminan dan memiliki durasi penjaminan selama 15 tahun sejak COD.

Karian Serpong Regional SPAM Project

The Karian Serpong Regional SPAM Project is a project between the Ministry of Public Works and Public Housing and PT Karian Water Services which covers the areas of DKI Jakarta Province, Tangerang City Government, and South Tangerang City Government. The regional drinking water supply project from the Karian Dam with a capacity of 4,600 liters/second is targeted to distribute drinking water to 539,400 house connections.

On April 29, 2021, the Cooperation Agreement and Guarantee Agreement were signed, and the Recourse Agreement was signed on April 30, 2021. The Karian Serpong SPAM project is the 6th project in the drinking water sector to be granted a Guarantee with 15 years from COD.

Sektor Transportasi

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare



Lokasi Location	Makassar – Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Makassar–Parepare, South Sulawesi Province
Nilai Proyek Project Value	Rp1,0 triliun/trillion
PJKP GCA	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
Badan Usaha Company	PT Celebes Railway Indonesia
Tahapan Proyek Project Sections	TOK 1 – Operasi (12 Oktober 2022) TOK 2 - Konstruksi TOK 1 - Operating (October 12, 2022) TOK 2 - Construction

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare merupakan proyek pertama sektor transportasi di lingkup Kementerian Perhubungan RI. Proyek KPBU ini mengadopsi skema *Build Operate Transfer* (BOT)/'Bangun Guna Serah' dengan nilai investasi sebesar Rp989 miliar, dengan masa kerja sama 16 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial 1. Proyek dengan skema *Availability Payment* (AP) ini akan melayani area meliputi 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dilakukan antara PJKP dengan PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) pada tanggal 5 April 2019. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT CRI, dan penandatanganan Perjanjian Regres antara PJKP dengan PT PII.

Proyek Bandar Udara Komodo Labuan Bajo



Lokasi Location	Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province
Nilai Proyek Project Value	Rp1,2 triliun/trillion
PJKP GCA	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
Badan Usaha Company	PT Cinta Airport Flores
Tahapan Proyek Project Sections	Perjanjian Kerja sama dan Perjanjian Penjaminan telah berakhir pada tanggal 14 November 2022 The Cooperation Agreement and the Guarantee Agreement have ended on November 14, 2022

Proyek Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo merupakan proyek pengembangan Bandar Udara pertama di Indonesia yang menggunakan skema KPBU dan mendapatkan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII.

Pengembangan Bandar Udara ini bertujuan untuk mengembangkan daerah prioritas pariwisata Labuan Bajo yang merupakan salah satu destinasi Bali Baru serta untuk memperluas konektivitas nasional dan internasional. Proyek ini berlokasi di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai proyek mencapai Rp1,2 triliun.

Transportation Sector

Makassar-Parepare Railway Project

The Makassar-Parepare Railway Project is the first project in the transportation sector within the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. This PPP project adopts the Build Operate Transfer (BOT) scheme with an investment value of Rp989 billion, with a cooperation period of 16 years after Commercial Operation Date 1. The project with Availability Payment (AP) scheme will serve an area covering 5 regencies/cities in South Sulawesi Province, namely Maros Regency, Pangkajene and Islands Regency, Barru Regency, Makassar City and Parepare City.

The signing of the Cooperation Agreement was carried out between GCA and PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) on April 5, 2019. At the same time, the Guarantee Agreement between IIGF and PT CRI was also signed, and the signing of the Recourse Agreement between GCA and IIGF.

Komodo Labuan Bajo Airport Project

The Komodo Airport project in Labuan Bajo is the first airport development project in Indonesia to use the PPP scheme and obtain a Government Guarantee through IIGF.

This airport development aims to develop the tourism priority area of Labuan Bajo which is one of the New Bali destinations and to expand national and international connectivity. The project is located in West Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT) with a project value of Rp1.2 trillion.



Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan PT Cinta Airport Flores, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Cinta Airport Flores serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian Perhubungan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2020.

The signing of the Cooperation Agreement between the Ministry of Transportation and PT Cinta Airport Flores, the Guarantee Agreement between IIGF and PT Cinta Airport Flores and the Recourse Agreement between IIGF and the Ministry of Transportation was held on February 7, 2020.

Proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi

Proving Ground Project for Roadworthiness Testing and Certification Motor Vehicles (BPLJSKB) in Bekasi



Lokasi Location	Provinsi Jawa Barat West Java Province
Nilai Proyek Project Value	Rp1,7 triliun/trillion
PJKP GCA	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
Badan Usaha Company	PT Indonesia International Automotive Proving Ground
Tahapan Proyek Project Sections	Pra Konstruksi Pre-Construction

Pengembangan *Proving Ground* BPLJSK Bekasi merupakan proyek KPBU *Solicited* yang bertujuan sebagai tempat sertifikasi dan pengujian kendaraan yang mengadopsi standar *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE) untuk peraturan kendaraan internasional yang terdiri dari trek kecepatan tinggi, pengujian rem, pengujian suara, pengujian sidelap dan fasilitas testing lainnya. Bertlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, proyek tersebut menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) dengan periode kerja sama selama 17 tahun yang terdiri dari 2 tahun masa konstruksi dan 15 tahun masa operasi serta bentuk kerja sama meliputi *Design - Built - Finance - Maintainance - Transfer* (DBFMT).

The development of the BPLJSK Bekasi Proving Ground is a *Solicited* PPP project that aims to serve as a vehicle certification and testing site that adopts the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) standards for international vehicle regulations consisting of high-speed tracks, brake testing, sound testing, sideslip testing and other testing facilities. Located in Bekasi Regency, West Java, the project uses an availability payment scheme with a 17-year cooperation period consisting of 2 years of construction and 15 years of operation and the form of cooperation includes *Design - Built - Finance - Maintainance - Transfer* (DBFMT).

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT PII, dan PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022.

The signing of the cooperation agreement between the Ministry of Transportation, IIGF, and PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) was carried out on October 31, 2022.

PORTOFOLIO PENJAMINAN PROYEK INFRASTRUKTUR – NON KPBU INFRASTRUCTURE PORTFOLIO OF INFRASTRUCTURE PROJECT GUARANTEE - NON PPP

Sektor Pariwisata

Tourism Sector

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Mandalika Special Economic Zone (SEZ)



Lokasi Location	Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province
Nilai Proyek Project Value	Rp5,0 triliun/trillion
Nilai Pinjaman Loan Value	USD248,4 juta/million
BUMN - Terjamin SOE - Guaranteed	Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
Kreditur/Penerima Jaminan Creditor/Collateral Receiver	Asian Infrastructure Investment Bank
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Sebagai salah satu bagian dari program pengembangan pariwisata Indonesia, proyek Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar yang berkelanjutan untuk pengembangan tujuan wisata baru di wilayah Mandalika, Lombok. Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

As one part of Indonesia's tourism development program, the Mandalika SEZ Tourism Area Development project aims to provide sustainable basic infrastructure for the development of a new tourist destination in the Mandalika region of Lombok, Central, West Nusa Tenggara (NTB) Province.

Nilai investasi untuk Proyek ini diperkirakan sebesar USD316,5 juta (Rp4,5 triliun) dengan rencana pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank sebesar USD248,4 juta.

The investment value for this Project is estimated at USD316.5 million (Rp4.5 trillion) with planned financing from the Asian Infrastructure Investment Bank of USD248.4 million.

Dengan menerapkan konsep *eco-green* dan *event based destination*, pembangunan dan pengembangan proyek di atas lahan seluas 1.175 Ha ini meliputi pengembangan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) antara lain: jaringan jalan, jaringan air bersih, normalisasi sungai, pengolahan air limbah, tempat pembuangan sampah, jaringan dan fasilitas listrik, dan jaringan dan fasilitas gas.

By applying the concept of *eco-green* and *event based destination*, the construction and development of the project on an area of 1,175 Ha includes the development of basic infrastructure, among others: road networks, clean water networks, river normalization, wastewater treatment, landfills, electricity networks and facilities, and gas networks and facilities.



Sektor Ketenagalistrikan

Hydropower Programme



Lokasi Location	Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Kalimantan, Sulawesi, and Papua
Nilai Proyek Project Value	Rp7,0 triliun/trillion
Nilai Pinjaman Loan Value	EUR294,7 juta/million
BUMN - Terjamin SOE - Guaranteed	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan Creditor/Collateral Receiver	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Sebagai bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019-2027 dan bagian dari Program 35.000 MW Pemerintah, *Hydropower Programme* ini bertujuan di antaranya untuk:

- Meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH).
- Menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) atas penggunaan bahan bakar fosil baik pada saat *base load* dan terutama pada saat beban puncak serta peningkatkan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) kepada pelanggan di sistem terkait.

Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung oleh PT PLN (Persero) dari KfW Bank sebesar EUR294,7 juta untuk pembiayaan 6 (enam) sub proyek di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Pada tanggal 5 September 2019, PT PLN (Persero) dan KfW menandatangani Perjanjian Pinjaman yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT PLN (Persero) serta Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dan KfW atas pinjaman langsung tersebut.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2 & Patuha 2



Lokasi Location	Dieng & Patuha
Nilai Proyek Project Value	Rp7,4 triliun/trillion
Nilai Pinjaman Loan Value	USD335 juta/million
BUMN - Terjamin SOE - Guaranteed	PT Geo Dipa Energi (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan Creditor/Collateral Receiver	Asian Development Bank
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Proyek ini merupakan salah satu wujud upaya penyediaan listrik melalui pendayagunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) panas bumi yang direncanakan dapat mulai beroperasi pada tahun 2025.

Electricity Sector

Hydropower Programme

As part of the 2019-2027 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) and part of the Government's 35,000 MW Program, the *Hydropower Programme* aims to:

- Increase the electrification ratio in Central and Eastern Indonesia with the construction of Hydropower Plants (PLTA) over Mini Hydropower Plants (PLTMH).
- Reducing the cost of production (BPP) for the use of fossil fuels both during base load and especially during peak load and improving the Level of Service Quality (TMP) to customers in the relevant system.

This project utilizes a direct loan scheme by PT PLN (Persero) from KfW Bank amounting to EUR294.7 million to finance 6 (six) sub-projects in the Kalimantan, Sulawesi and Papua regions.

On September 5, 2019, PT PLN (Persero) and KfW signed a Loan Agreement followed by the signing of a Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PT PLN (Persero) and an Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and KfW for the direct loan.

Dieng 2 & Patuha 2 Geothermal Power Plant (GTPP)

This project is one of the efforts to provide electricity through the utilization of geothermal New Renewable Energy (EBT) which is planned to commence operating in 2025.

Pada tanggal 19 Agustus 2020 PT PII dan PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") menandatangani perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB) untuk proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2, yang meliputi Penandatanganan Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement* antara GeoDipa dan ADB, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan GeoDipa.

Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung dari ADB kepada GeoDipa sebesar USD335 juta untuk membiayai pembangunan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dengan masing-masing kapasitas sebesar 55 MW. Penjaminan Proyek ini telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman pada 21 September 2020.

Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP)

On August 19, 2020 IIGF and PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") signed an agreement with the Asian Development Bank (ADB) for the Dieng Unit 2 and Patuha Unit 2 Geothermal Power Plant (PLTP) Development project, which includes the signing of a Loan Agreement between GeoDipa and ADB, the signing of a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and the signing of a Guarantee Implementation Agreement between IIGF and GeoDipa.

This project uses a direct loan scheme from ADB to GeoDipa amounting to USD335 million to finance the construction of Dieng Unit 2 PLTP and Patuha Unit 2 PLTP with a capacity of 55 MW each. This Project Guarantee has been effective simultaneously with the effectiveness of the Loan Agreement on September 21, 2020.

Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network Development Project with Result-Based Lending Scheme (RBL-KMP)



Lokasi Location	Kalimantan dan Maluku-Papua Kalimantan and Maluku-Papua
Nilai Proyek Project Value	Rp33,2 triliun/trillion
Nilai Pinjaman Loan Value	USD600 juta/million
BUMN - Terjamin SOE - Guaranteed	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan Creditor/Collateral Receiver	Asian Development Bank
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua merupakan proyek infrastruktur ketenagalistrikan dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP) yang berlokasi di Kalimantan, Maluku, dan Papua, dan ditargetkan untuk menambah sambungan listrik untuk 6,7 juta pelanggan.

The Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network Development Project is an electricity infrastructure project with Result-Based Lending Scheme (RBL-KMP) located in Kalimantan, Maluku, and Papua, and is targeted to add electricity connections for 6.7 million customers.

Proyek ini merupakan bagian dari program jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") 2019-2028.

This project is part of the long-term program as stated in the 2019-2028 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN").

Keberadaan proyek ini nantinya diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional khususnya di Wilayah Timur Indonesia, meningkatkan kualitas hidup di Indonesia Timur melalui penggunaan listrik berkelanjutan serta mempromosikan tenaga surya dan penggunaan energi bersih.

The existence of this project is expected to support the Government's efforts in increasing the National Electrification Ratio, especially in Eastern Indonesia, improving the quality of life in Eastern Indonesia through the use of sustainable electricity and promoting solar power and the use of clean energy.

Pada tanggal 16 Desember 2020, PT PII dan PLN melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB) untuk Proyek RBL-KMP, yang meliputi Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN. Sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2020 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PLN dengan ADB.

On December 16, 2020, IIGF and PLN signed an agreement with the Asian Development Bank (ADB) for the RBL-KMP Project, which included an Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and the signing of a Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PLN. Previously on December 8, 2020, a Loan Agreement was signed between PLN and ADB.



Proyek Pengembangan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Skema Result-Based Lending (RBL-SNT)

Sulawesi and Nusa Tenggara Distribution Development Project with Result-Based Lending Scheme (RBL-SNT)



Lokasi Location	Sulawesi dan Nusa Tenggara Sulawesi and Nusa Tenggara
Nilai Proyek Project Value	Rp23,0 triliun/trillion
Nilai Pinjaman Loan Value	USD310 juta/million
BUMN - Terjamin SOE - Guaranteed	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan Creditor/Collateral Receiver	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Berlokasi di Sulawesi dan Nusa Tenggara, Proyek RBL-SNT ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi dengan menjalankan program melistriki 433 desa di Wilayah Timur Indonesia, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan strategi peningkatan akses listrik melalui perluasan jaringan listrik sehingga pada akhirnya dapat mendorong pencapaian target rasio elektrifikasi nasional 100% pada tahun 2021. Dengan pembiayaan sebesar USD310 juta dari KfW kepada PLN, proyek ini ditargetkan dapat meningkatkan sambungan listrik sampai dengan 7,7 juta pelanggan.

Located in Sulawesi and Nusa Tenggara, the RBL-SNT Project is one of the Government's efforts to increase the Electrification Ratio by implementing a program to electrify 433 villages in Eastern Indonesia, especially underdeveloped, frontier, and outermost (3T) areas with a strategy to increase access to electricity through the expansion of electricity networks so that it can ultimately encourage the achievement of the national electrification ratio target of 100% by 2021. With financing of USD310 million from KfW to PLN, this project is targeted to increase electricity connections to 7.7 million customers.

Selain itu, pembangunan proyek ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan dan pengembangan sosial di wilayah Indonesia Timur; meningkatkan keandalan sistem, efisiensi sistem distribusi, dan pelayanan kelistrikan; serta memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi.

In addition, the construction of this project is expected to contribute to sustainable economic and social development in the Eastern Indonesia region; improve system reliability, distribution system efficiency, and electricity services; and meet the needs of electrical energy in the Nusa Tenggara and Sulawesi regions.

Pada tanggal 16 Desember 2020, PT PII dan PLN menandatangani perjanjian dengan Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW") untuk proyek RBL-SNT yang meliputi penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII, dan KfW, dan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN. Sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2022, PLN dan KfW telah menandatangani perjanjian.

On December 16, 2020, IIGF and PLN signed an agreement with Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW") for the RBL-SNT project which includes the signing of a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and KfW, and the signing of a Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PLN. Previously on December 8, 2022, PLN and KfW had signed an agreement.

Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali

Distribution Network Development Project in East Java and Bali



Lokasi Location	Jawa Timur dan Bali East Java and Bali
Nilai Proyek Project Value	Rp19,0 triliun/trillion
Nilai Pinjaman Loan Value	USD310 juta/million
BUMN - Terjamin SOE - Guaranteed	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan Creditor/Collateral Receiver	Asian Development Bank
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Sistem kelistrikan wilayah Jawa Timur dan Bali merupakan sistem yang terinterkoneksi dengan sistem Jawa-Bali untuk melayani kebutuhan listrik di Jawa Timur, Madura, dan Bali.

The East Java and Bali electricity system is an integrated system with the Java-Bali system to serve electricity needs in East Java, Madura, and Bali.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2019-2028, diperkirakan bahwa sampai dengan tahun 2024 akan ada penambahan pelanggan sekitar 713 ribu pelanggan dengan tambahan penjualan sebesar 13,9 TWh (TerraWatt hour). Dalam rangka mendukung tercapainya target tersebut, PT PLN perlu memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem distribusi melalui penambahan jaringan ataupun *uprating trafo*.

Dalam hal ini, komitmen Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") untuk mendukung PT PLN dalam mengembangkan jaringan distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali, direalisasikan melalui pendanaan senilai AS\$310 juta untuk pembiayaan non-material distribusi utama pada pembangunan jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, trafo, dan sambungan pelanggan. Selain itu, Kementerian Keuangan dan PT PII juga turut serta memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan pada pinjaman dari AIIB tersebut. Pada tanggal 10 Februari 2021, perjanjian pinjaman dan perjanjian penjaminan telah ditandatangani.

Proyek Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah

As stated in PT PLN's 2019-2028 Electricity Supply Business Plan, it is estimated that until 2024 there will be an additional 713 thousand customers with additional sales of 13.9 TWh (TerraWatt hour). In order to support the achievement of these targets, PT PLN needs to improve and increase the efficiency and reliability of the distribution system through network additions or transformer upratings.

In this case, the commitment of the Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") to support PT PLN in developing distribution networks in the East Java and Bali regions is realized through funding worth US\$310 million for non-material financing of the main distribution in the construction of medium voltage networks, low voltage networks, transformers, and customer connections. In addition, the Ministry of Finance and IIGF also participated in providing support in the form of Guarantees for the loan from AIIB. On February 10, 2021, the loan agreement and Guarantee agreement were signed.

Transmission and Distribution Network Development Project in West Java and Central Java



Lokasi Location	Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah West Java and Central Java Provinces
Nilai Proyek Project Value	Rp44,3 triliun/trillion
Nilai Pinjaman Loan Value	US\$600 juta/million
BUMN - Terjamin SOE - Guaranteed	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan Creditor/Collateral Receiver	Asian Development Bank
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

Dalam upaya mencapai target penjualan dan penambahan pelanggan, Regional Jawa Madura Bali telah merencanakan program investasi jangka menengah dan pendek melalui penambahan kapasitas aset distribusi. Selain untuk mencapai sasaran penjualan, program investasi lainnya juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional distribusi, di antaranya dengan penambahan jaringan tegangan menengah serta penambahan jumlah atau kapasitas transformator distribusi.

In an effort to achieve sales targets and additional customers, the Java Madura Bali Region has planned a medium and short-term investment program through the addition of distribution asset capacity. In addition to achieving sales targets, other investment programs are also aimed at improving the efficiency and reliability of distribution operations, including by adding medium voltage networks and increasing the number or capacity of distribution transformers.

PLN juga telah mempersiapkan beberapa program strategis untuk mendukung visi pemerintah untuk peningkatan energi terbarukan dengan target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025, di antaranya dengan program konversi energi sisi pelanggan, khususnya pada penggunaan peralatan rumah tangga dan kendaraan bertenaga listrik. Untuk itu, telah direncanakan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap untuk fasilitas *charging station* kendaraan listrik.

PLN has also prepared several strategic programs to support the government's vision to increase renewable energy with a target EBT mix of 23% in 2025, including a customer-side energy conversion program, especially in the use of household appliances and electric-powered vehicles. For this reason, the development of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure has been planned in stages for electric vehicle charging station facilities.

Pelaksanaan program tersebut melalui pendanaan pinjaman (*loan*) dari ADB sebesar USD600 juta. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pendapatan penjualan di Sub Regional JBB dan JBT, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kualitas dan keandalan sistem transmisi dan distribusi yang tinggi. Pada tanggal 19 Mei 2022 PT PII dan PLN melaksanakan penandatanganan perjanjian

The implementation of the program is funded through a loan from ADB amounting to USD600 million. With the implementation of this program, it is expected to increase capacity and sales revenue in the JBB and JBT Sub-Regions, as well as increase customer satisfaction through high quality and reliability of transmission and distribution systems. On May 19, 2022 IIGF and PLN signed an agreement with the Asian Development Bank (ADB), which



dengan Asian Development Bank (ADB), yang meliputi Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN. Sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PLN dengan ADB untuk pendanaan Proyek SREAP.

included an Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and the signing of an Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PLN. Previously, on December 31, 2021, a Loan Agreement was signed between PLN and ADB for funding the SREAP Project.

Proyek Pembangunan PLTU Timor-1 (2x50 MW)

Timor-1 CFPP Development Project (2x50 MW)



Lokasi Location	Dusun Panaf, Desa Luifuleo, Kabupaten Kupang Panaf Hamlet, Luifuleo Village, Kupang Regency
Nilai Proyek Project Value	Rp3,7 triliun/trillion
Nilai Pinjaman Loan Value	Rp2.750 miliar/billion
BUMN - Terjamin SOE - Guaranteed	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan Creditor/Collateral Receiver	Sindikasi Bank Permata dan Bank Muamalat Bank Permata and Bank Muamalat Syndication
Tahapan Proyek Project Sections	Konstruksi Construction

PLTU Timor-1 merupakan salah satu proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga uap yang sudah direncanakan di dalam Rencana Usulan Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030. Saat ini kebutuhan sistem Timor (Kupang – Soe – Kefamenanu – Atambua) merupakan sistem yang paling besar di PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dapat terserap beban puncak 98,4 MW atau 42,46% dari jumlah daya terpasang sebesar 231,73 MW per tanggal 11 Februari 2021.

Timor-1 CFPP is one of the steam power plant development projects that have been planned in the 2021 - 2030 Electricity Supply Proposal Plan (RUPTL). Currently, the Timor system (Kupang - Soe - Kefamenanu - Atambua) is the largest system in the PLN East Nusa Tenggara (NTT) Region, which can absorb a peak load of 98.4 MW or 42.46% of the total installed power of 231.73 MW as of February 11, 2021.

Penambahan kapasitas daya di Provinsi NTT dilakukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Untuk Pulau Timor yang merupakan sistem ketenagalistrikan terbesar di NTT, penambahan kapasitas daya listrik diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan yang relatif cukup tinggi. Penambahan kapasitas ini juga diperlukan mengingat akan berakhirnya sewa pembangkit *Leased Marine Vessel Power Plant* (LMVPP) berbahan bakar minyak dengan kapasitas 60 MW pada bulan Desember 2021. Pembangunan PLTU Timor-1 menjadi satu-satunya langkah untuk memenuhi target sistem kelistrikan aman (*reserve margin* >30%) dalam jangka waktu yang dekat. Tanpa PLTU Timor-1, maka sistem akan berada pada status Siaga, (*reserve margin* <30%) dan meningkatnya risiko pemadaman jika terjadi gangguan atau pemeliharaan. Pembangkit listrik di NTT didominasi oleh bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan tingginya Biaya Pokok Produksi (BPP). PLTU Timor-1 menjadi pembangkit *baseload* dengan BPP rendah (indikasi BPP PLTU Timor-1 sebesar Rp1.228,51/kWh), sehingga berpotensi menurunkan BPP dan menjaga pasokan daya di Sistem Timor.

Additional power capacity in NTT Province is carried out to increase the electrification ratio. For Timor Island, which is the largest electricity system in NTT, additional power capacity is needed to anticipate the relatively high growth in demand. This additional capacity is also necessary given the expiration of the lease of the oil-fired *Leased Marine Vessel Power Plant* (LMVPP) with a capacity of 60 MW in December 2021. The construction of Timor-1 CFPP is the only step to meet the target of a secure electricity system (*reserve margin* >30%) in the near future. Without Timor-1 CFPP, the system will be on Standby status, (*reserve margin* <30%) and the risk of outages increases in the event of disruption or maintenance. Power generation in NTT is dominated by fuel oil (BBM) which results in high Cost of Production (BPP). Timor-1 CFPP is a baseload plant with low BPP (indicative BPP Timor-1 CFPP of Rp1,228.51/kWh), so it has the potential to reduce BPP and maintain power supply in the Timor System.

Pada tanggal 28 Desember 2022, PT PII dan PLN menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN yang selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2022 telah diterbitkan Surat Jaminan Pemerintah atas Penjaminan Proyek PLTU Timor-1 oleh Direktur Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2022, PLN dan Sindikasi Bank Permata dan Bank Muamalat telah menandatangani perjanjian pinjaman atas pendanaan Proyek PLTU Timor-1.

On December 28, 2022, IIGF and PLN signed an Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PLN, which then on December 29, 2022 was issued a Government Guarantee Letter for the Guarantee of the Timor-1 PLTU Project by the Director General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance. Previously on December 8, 2022, PLN and the Syndicate of Permata Bank and Muamalat Bank signed a loan agreement for the funding of the Timor-1 CFPP Project.

PENJAMINAN KORPORASI PADAT KARYA

LABOR-INTENSIVE CORPORATE GUARANTEE

Kegiatan Penjaminan Korporasi Padat Karya

Sejak tahun 2020, PT PII sebagai salah satu SMV Menteri Keuangan mendapatkan perluasan mandat untuk dapat lebih berkontribusi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui skema penjaminan untuk pelaku usaha korporasi, atau juga disebut korporasi padat karya. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap masyarakat.

Rincian pemberian perluasan mandat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Juli 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Pada tanggal 24 Agustus 2020, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 43/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, dimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) dalam rangka Penjaminan langsung oleh Pemerintah terkait Pelaksanaan Program PEN Pemerintah dapat menugaskan Perseroan.
3. Pada tanggal 26 Oktober 2020 telah terbit Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional dimana Pemerintah memberikan Jaminan kepada Lembaga Keuangan dalam membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong perekonomian nasional berupa pembiayaan dalam bentuk pinjaman kepada BUMN, BUMD dan/atau Pemerintah Daerah melalui BUPI.
4. Pada tanggal 13 November 2020, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sehubungan dengan penugasan PT PII dalam skema penjaminan korporasi padat karya sebagai berikut:
 - a. KMK No. 522/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam Melaksanakan Penjaminan Bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
 - b. KMK No. 523/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Dukungan *Loss Limit* Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Labor-intensive Corporate Guarantee Activities

Since 2020, IIGF as one of the Ministry of Finance's SMVs has received an expanded mandate to be able to further contribute to the National Economic Recovery (PEN) program through an Guarantee scheme for corporate business actors, or also called labor-intensive corporations. This is part of the Government's policy to deal with the impact caused by the Covid-19 pandemic on society.

The details of the mandate expansion are as follows:

1. On July 28, 2020, Minister of Finance Regulation No. 98 /PMK.08 /2020 concerning Procedures for Government Guarantees for Corporate Business Actors through the Designated Infrastructure Guarantee Agency in the context of Implementing the National Economic Recovery Program was issued.
2. On August 24, 2020, Government Regulation No. 43/2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 23 of 2020 concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program in the context of Supporting State Financial Policies for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19) and/or Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and National Economic Rescue was issued, where it is stated in Article 17 paragraph (2) in the context of direct Guarantees by the Government related to the implementation of the PEN Program, the Government can assign the Company.
3. On October 26, 2020, Presidential Regulation No. 103 of 2020 concerning Central Government Guarantees for Development Financing in the context of Encouraging the National Economy and/or the National Economic Recovery Program was issued where the Government provides Guarantees to financial institutions in financing development activities in the context of encouraging the national economy in the form of financing in the form of loans to SOE, Municipally-owned Enterprises and / or Regional Governments through BUPI.
4. On November 13, 2020, a Minister of Finance Decree (KMK) was issued in connection with the assignment of IIGF in the labor-intensive corporate Guarantee scheme as follows:
 - a. KMK No. 522/KMK.08/2020 concerning Assignment to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) in Carrying out Joint Guarantee with the Indonesian Export Financing Agency for Corporate Business Actors in the context of Implementing the National Economic Recovery Program.
 - b. KMK No. 523/KMK.08/2020 concerning the Assignment to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) to Carry out Loss Limit Support for Government Guarantees in the Context of Implementing the National Economic Recovery Program.



Menindaklanjuti penugasan berdasarkan KMK tersebut, telah ditandatangani perjanjian kerja sama antar para pihak sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama No. PRJ-428/PR/2020 - 009/P-LLPEN/DRU/1120 antara Kementerian Keuangan dan PT PII pelaksanaan penugasan pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 19 November 2020.
2. Perjanjian Kerja Sama No. 565/PKS/12/2020 - 010/P-LLPEN/DRU/1220 antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII sehubungan dengan pelaksanaan dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 15 Desember 2020.
3. Perjanjian Kerja Sama No. PRJ-553/PR/2020 - 011/P-PBPEN/DRU/1220 antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT PII sehubungan dengan pelaksanaan penugasan penjaminan bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 23 Desember 2020.
4. Perjanjian Kerja Sama No. 046/PKS/02/2021 - 001/P-PBPEN/DRU/0221 antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII sehubungan dengan Pelaksanaan Penjaminan Bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 15 Februari 2021.

Pada tanggal 30 Desember 2020, PT PII telah menerima tambahan PMN sebesar Rp1,57 triliun sebagai bentuk dukungan kapasitas dalam rangka pelaksanaan dukungan *loss limit* dan penjaminan korporasi padat karya.

Untuk memberikan relaksasi atas program penjaminan korporasi padat karya kepada pelaku usaha, terdapat berbagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan maupun Perjanjian Kerja sama antara PT PII (Persero) dengan pihak eksternal pada tahun 2022 yang meliputi:

1. Telah dilakukan Addendum Perjanjian Kerja Sama No. 008/ADDPKS/01/2022-010-01/P-LLPEN/DRU/0122 antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII terkait Pelaksanaan Dukungan *Loss Limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 28 Januari 2022.
2. Pada tanggal 29 Maret 2022 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 98/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
3. Telah dilakukan Addendum Perjanjian Kerja Sama No. PRJ-252/PR/2022-011-01/P-PBPEN/DRU/0622 antara Kementerian Keuangan dan PT PII terkait Pelaksanaan Penjaminan Bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 9 Juni 2022.
4. Telah dilakukan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama No. PRJ-251/PR/2022-009-02/P-LLPEN/DRU/0622 antara Kementerian Keuangan dan PT PII terkait Pelaksanaan

Following up on the assignment based on the KMK, a cooperation agreement was signed between the parties as follows:

1. Cooperation Agreement No. PRJ-428/PR/2020 - 009/P-LLPEN/DRU/1120 between the Ministry of Finance and IIGF for the implementation of the assignment to provide loss limit support in the context of Government Guarantee for the National Economic Recovery Program on November 19, 2020.
2. Cooperation Agreement No. 565/PKS/12/2020 - 010/P-LLPEN/DRU/1220 between the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank) and IIGF in connection with the implementation of loss limit support in the context of Government Guarantee for Corporate Business Actors in the context of implementing the National Economic Recovery Program on December 15, 2020.
3. Cooperation Agreement No. PRJ-553/PR/2020 - 011/P-PBPEN/DRU/1220 between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and IIGF in connection with the implementation of joint Guarantee assignments in the context of Government Guarantee for the National Economic Recovery Program on December 23, 2020.
4. Cooperation Agreement No. 046/PKS/02/2021 - 001/P-PBPEN/DRU/0221 between the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank) and IIGF in connection with the Implementation of Joint Guarantee in the context of Government Guarantee for Corporate Actors in the context of Implementing the National Economic Recovery Program on February 15, 2021.

On December 30, 2020, IIGF has received an additional PMN of Rp1.57 trillion as a form of capacity support in the context of implementing loss limit support and labor-intensive corporate Guarantees.

To provide relaxation of the labor-intensive corporate Guarantee program to business actors, there are various changes to the Minister of Finance Regulation and the Cooperation Agreement between IIGF (Persero) and external parties in 2022 which include:

1. Addendum to Cooperation Agreement No. 008/ADDPKS/01/2022-010-01/P-LLPEN/DRU/0122 between the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank) and IIGF regarding the Implementation of Loss Limit Support in the framework of Government Guarantee for Corporate Business Actors in the context of Implementing the National Economic Recovery Program on January 28, 2022.
2. On March 29, 2022, Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 27/PMK.08/2022 concerning the Second Amendment to PMK 98/2020 concerning Procedures for Government Guarantees for Corporate Business Actors through the Designated Infrastructure Guarantee Agency in the context of Implementing the National Economic Recovery Program was issued.
3. Addendum to Cooperation Agreement No. PRJ-252/PR/2022-011-01/P-PBPEN/DRU/0622 between the Ministry of Finance and IIGF regarding the Implementation of Joint Guarantee in the context of Government Guarantee for the National Economic Recovery Program on June 9, 2022.
4. The Second Addendum to the Cooperation Agreement No. PRJ-251/PR/2022-009-02/P-LLPEN/DRU/0622 between the Ministry of Finance and IIGF regarding the Assignment of

Penugasan Pemberian Dukungan Loss Limit dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 9 Juni 2022.

5. Telah dilakukan Addendum Ketiga Perjanjian Kerja Sama No. PRJ-404/PR/2022-009-03/P-LLPEN/DRU/0922 antara Kementerian Keuangan dan PT PII terkait Pelaksanaan Penugasan Pemberian Dukungan *Loss Limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 19 September 2022.
6. Telah dilakukan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama No. 221/ADDPKS/11/2022-010-02/P-LLPEN/DRU/1122 antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII terkait Pelaksanaan Dukungan *Loss Limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 14 November 2022.
7. Telah dilakukan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama No. 222/ADDPKS/11/2022-001-02/P-PBPEN/DRU/1122 antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII terkait Pelaksanaan Penjaminan Bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 14 November 2022.

Sesuai PMK 98/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 27/2022, peran serta fungsi PT PII dalam Skema Penjaminan Korporasi Padat Karya meliputi:

1. Verifikator data transaksi dan tagihan pembayaran IJP penjaminan. PT PII melaporkan kepada Kementerian Keuangan hasil verifikasi administratif terhadap data transaksi penjaminan dan perhitungan IJP penjaminan yang diajukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Kementerian Keuangan.
2. Penyedia dukungan *loss limit*. Apabila terjadi klaim yang melebihi *threshold*, LPEI mengajukan klaim *loss limit* kepada PT PII. Klaim *loss limit* adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh PT PII kepada Penjamin (LPEI) sehubungan dengan dukungan *loss limit*.
3. Penyedia Penjaminan Bersama (*Co-Guarantor*). Dalam kondisi pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak berorientasi ekspor, maka Penjaminan Pemerintah akan dilakukan secara bersama oleh LPEI dan PT PII.
4. Pengelolaan hak tagih atas klaim yang telah dibayarkan oleh Penjamin (Regres) untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman dalam hal terjadi klaim pada porsi dukungan *loss limit* dan Penjaminan Bersama dengan menunjuk pihak selaku *recovery agent* and *collecting agent* atas nama Penjamin.
5. Pemantauan atas Pengelolaan Regres yang dilakukan Penjamin, yaitu dengan melakukan pemantauan intensif atas proses pemulihan hak tagih piutang penjaminan, jika terdapat pembayaran klaim penjaminan.

Providing Loss Limit Support in the context of Government Guarantee for the National Economic Recovery Program was carried out on June 9, 2022.

5. Third Addendum to Cooperation Agreement No. PRJ-404/PR/2022-009-03/P-LLPEN/DRU/0922 between the Ministry of Finance and IIGF regarding the Implementation of the Assignment of Providing Loss Limit Support in the context of Government Guarantee for the National Economic Recovery Program on September 19, 2022.
6. The Second Addendum to Cooperation Agreement No. 221/ADDPKS/11/2022-010-02/P-LLPEN/DRU/1122 between the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank) and IIGF regarding the Implementation of Loss Limit Support in the context of Government Guarantee for Corporate Business Actors in the context of Implementing the National Economic Recovery Program on November 14, 2022.
7. The Second Addendum to Cooperation Agreement No. 222/ADDPKS/11/2022-001-02/P-PBPEN/DRU/1122 between Indonesia Eximbank and IIGF related to the Implementation of Joint Guarantee in the context of Government Guarantee for Corporate Actors in the context of Implementing the National Economic Recovery Program on November 14, 2022.

Based on PMK 98/2020 as amended by PMK 27/2022, the roles and functions of IIGF in the Labor-Intensive Corporate Guarantee Scheme include:

1. Verifier of transaction data and payment bills for IJP Guarantees. IIGF reports to the Ministry of Finance the results of administrative verification of Guarantee transaction data and calculation of Guarantee IJP submitted by the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) to the Ministry of Finance.
2. Loss limit support provider. In the event of a claim that exceeds the threshold, LPEI submits a loss limit claim to IIGF. A loss limit claim is an amount of money that must be paid by IIGF to the Guarantor (LPEI) in connection with loss limit support.
3. Joint Guarantee Provider (Co-Guarantor). In the condition that the guaranteed corporate business actors are not export-oriented, the Government Guarantee will be carried out jointly by LPEI and IIGF.
4. Management of collection rights on claims that have been paid by the Guarantor to fulfill payment obligations on loans in the event of a claim on the portion of loss limit support and Co-Guarantee by appointing a party as a recovery agent and collecting agent on behalf of the Guarantor.
5. Monitoring of Regression Management carried out by the Guarantor, namely by conducting intensive monitoring of the process of recovering receivables, if there is an Guarantee claim payment.



Produktivitas Penjaminan Korporasi Padat Karya

Selama tahun 2022, LPEI telah menerbitkan penjaminan tambahan (baru) Korporasi padat karya sebanyak 8 penjaminan senilai Rp2,15 triliun dengan cakupan penjaminan sebesar Rp1,58 Triliun disetujui untuk diberikan dukungan *loss limit* oleh Perseroan. Termasuk di dalam penjaminan tersebut, Perseroan sebagai penyedia penjaminan bersama telah memberikan 3 penjaminan sebesar Rp700 miliar dengan cakupan porsi penjaminan sebesar Rp384 miliar.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Nilai Penjaminan yang telah diperoleh sebesar Rp7,58 triliun dengan cakupan penjaminan sebesar Rp5,58 triliun termasuk cakupan porsi Penjaminan Bersama PT PII sebesar Rp2 triliun dari total transaksi sebanyak 86 penjaminan terdiri dari 18 Bank dan 72 Terjamin yang telah berpartisipasi serta disetujui untuk diberikan dukungan *loss limit* oleh Perseroan.

Productivity of Labor Intensive Corporate Guarantee

During 2022, LPEI has issued additional guarantees for (new) Labor-intensive corporations totaling 8 guarantees worth Rp2.15 trillion covering guarantee of Rp1.58 trillion approved for loss limit support by the Company. Included in these guarantees, the Company as a joint guarantee provider has provided 3 guarantees amounting to Rp700 billion with a guarantee portion coverage of Rp384 billion.

As of December 31, 2022, the Guarantee Value that has been obtained is Rp7.58 trillion with a guarantee coverage of Rp5.58 trillion including the coverage of IIGF's Joint Guarantee portion of Rp2 trillion from a total transaction of 86 guarantees consisting of 18 Banks and 72 Guarantees that have participated and approved for loss support have participated and approved to be given loss limit support by the Company.

PENJAMINAN BUMN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

SOE GUARANTEE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING THE NATIONAL ECONOMIC RECOVERY PROGRAM

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program ini diluncurkan oleh Pemerintah untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional.

PEN dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah dimana dalam pelaksanaannya, skema penjaminan dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Pada tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 ("PP 23/2020") tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagai langkah inisiasi penerapan program PEN. Berdasarkan Pasal 17 PP 23/2020 tersebut, Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Penjaminan, yang mana dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dalam rangka penjaminan langsung oleh Pemerintah.

Menyusul penerbitan PMK No. 98/PMK.08/2020 mengenai Penjaminan Korporasi Padat Karya, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 22 Desember 2020. Sesuai dengan mandat dari Kementerian Keuangan, PT PII dapat berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau mendapatkan penugasan dalam rangka program PEN.

Portfolio Penjaminan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program PEN

Penjaminan Obligasi III PT Waskita Karya (Persero)

Informasi Penjaminan/Guarantee Information

Nilai Obligasi Bond Value	Rp1,8 triliun/trillion
BUMN Terjamin Guaranteed SOE	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Wali Amanat Trustee	PT Bank Mega Tbk
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	5 dan 7 tahun 5 and 7 years

The National Economic Recovery Program (PEN) aims to protect, maintain, and improve the economic capacity of business actors from the real sector and the financial sector in running their businesses. This program was launched by the Government to support state financial policies in the context of saving the national economy.

PEN is implemented through State Equity Participation (PMN), placement of funds and/or Government investment, and/or Guarantee activities with a scheme determined by the Government where in its implementation, the Guarantee scheme can be carried out directly by the Government and/or through one or several designated Infrastructure Guarantee Agency.

On 11 May 2020, the Government issued Government Regulation No. 23 of 2020 ("PP 23/2020") on the Implementation of the National Economic Recovery Program to Support State Financial Policies for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or to Deal with Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and National Economic Rescue as an initiation step for the implementation of the PEN program. Based on Article 17 of PP 23/2020, the Government can assign an Infrastructure Guarantee Agency, which is carried out based on a Decree of the Ministry of Finance in the context of direct Guarantee by the Government.

Following the issuance of PMK No. 98/PMK.08/2020 concerning Labor Intensive Corporate Guarantees, the Ministry of Finance also issued PMK No. 211/PMK.08/2020 concerning Procedures for Providing Government Guarantees for State-Owned Enterprises in the Context of Implementing the National Economic Recovery Program on December 22, 2020. In accordance with the mandate from the Ministry of Finance, IIGF can collaborate with the Ministry of Finance to provide Government Guarantees to SOEs affected by the Covid-19 pandemic and/or receive assignments in the framework of the PEN program.

SOE Guarantee Portfolio in the Implementation of the PEN Program

Third Bond Guarantee of PT Waskita Karya (Persero)



Kinerja operasional dan likuiditas PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita") mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Kondisi ini berdampak terhadap profil risiko kredit Waskita yang semakin meningkat sehingga berakibat pada penurunan kredit oleh lembaga pemeringkat. Pada akhirnya pihak perbankan secara bertahap mengurangi dukungan pendanaan kepada Waskita.

Oleh karena itu, Waskita berencana menerbitkan obligasi dalam rangka *refinancing* dan pemenuhan kebutuhan modal kerja. Agar rencana tersebut dapat tercapai, Waskita membutuhkan dukungan berupa penjaminan untuk meningkatkan peringkat obligasi sehingga dapat menarik minat investor pasar modal dan dapat mengoptimalkan penerbitan obligasi yang dilakukan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan terhadap risiko gagal bayar atas bunga dan pokok obligasi III Waskita Karya tahun 2021. Pada tanggal 16 September 2022, pihak-pihak terkait telah menandatangani Perjanjian Wali Amanat, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan.

Penjaminan Pinjaman PT Waskita Karya (Persero)

Informasi Penjaminan/Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Rp8,1 triliun/trillion
BUMN Terjamin Guaranteed SOE	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kreditur Creditor	Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, PT Bank BJB Syndication of PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, PT Bank BJB
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	3 tahun + 2 tahun (<i>revolving loan</i>) 3 years + 2 years (<i>revolving loan</i>)

Agar kondisi perusahaan semakin membaik, Waskita terus melakukan upaya restrukturisasi keuangan secara menyeluruh, salah satunya adalah melalui penjaminan pemerintah atas pinjaman dan obligasi/sukuk. Untuk menambah modal kerja, Waskita memperoleh pinjaman dari sindikasi Bank dalam negeri yang modalnya akan digunakan untuk membiayai 148 proyek penugasan dari Pemerintah dalam rangka program PEN.

Untuk meningkatkan kelayakan dalam rencana pinjaman dari pihak Perbankan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek yang dikerjakan dan pemenuhan kewajiban Waskita, maka dibutuhkan penjaminan pemerintah. Jaminan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi program restrukturisasi keuangan Waskita. Pada tanggal 25 Oktober 2021, Waskita dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, sedangkan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021.

The operational performance and liquidity of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita") has decreased as a result of the prolonged Covid-19 pandemic. This condition has an impact on Waskita's credit risk profile which has increased, resulting in a credit downgrade by rating agencies. In the end, banks gradually reduced funding support to Waskita.

Therefore, Waskita plans to issue bonds in order to refinance and fulfill working capital needs. In order for the plan to be achieved, Waskita needs support in the form of guarantees to improve the bond rating so that it can attract capital market investors and can optimize the bond issuance. In this case, the Ministry of Finance and IIGF provide Guarantee support against the risk of default on the interest and principal of Waskita Karya Bonds III in 2021. On September 16, 2022, the related parties have signed the Trustee Agreement, Guarantee Agreement, and Guarantee Implementation Agreement.

Loan Guarantee of PT Waskita Karya (Persero)

In order to improve the company's condition, Waskita continues to make comprehensive financial restructuring efforts, one of which is through government guarantees for loans and bonds/*sukuk*. To increase working capital, Waskita obtained loans from a syndicate of domestic banks whose capital will be used to finance 148 projects assigned by the Government in the framework of the PEN program.

To increase the feasibility of a loan plan from the Bank in order to complete the projects undertaken and fulfill Waskita's obligations, a government Guarantee is required. This government Guarantee is expected to provide a significant boost to Waskita's financial restructuring program. On October 25, 2021, Waskita and the Creditor signed the Loan Agreement, while the Guarantee Agreement and Guarantee Implementation Agreement were signed on October 29, 2021.

Penjaminan Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero)

Bond IV and Sukuk Mudharabah I Guarantee of PT Waskita Karya (Persero)

Informasi Penjaminan/Guarantee Information

Nilai Obligasi dan Sukuk Bond and Sukuk Value	Obligasi/Bond IV Rp2,1 triliun/trillion Sukuk I Rp1,2 triliun/trillion
BUMN Terjamin Guaranteed SOE	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Wali Amanat Trustee	PT Bank KB Bukopin Tbk
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	5 dan 7 tahun 5 and 7 years

Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Tahun 2022 dengan Jaminan Pemerintah merupakan bagian dari strategi penyehatan keuangan Waskita yang terintegrasi dan saling berkaitan serta merupakan penjaminan atas surat utang Waskita dalam Rangka PEN Tahap II yang merupakan tahap lanjutan dari penerbitan Obligasi III dengan Penjaminan Pemerintah yang telah ditandatangani pada 16 September 2021.

Waskita Bond IV and Sukuk Mudharabah I of 2022 with Government Guarantee are part of Waskita's integrated and interrelated financial restructuring strategy and are Guarantees for Waskita's debt securities in the Phase II PEN Framework which is a follow-up stage to the issuance of Bond III with Government Guarantee which was signed on September 16, 2021.

Penerbitan obligasi dan sukuk tersebut dalam Rangka *refinancing* dan pemenuhan kebutuhan modal kerja Waskita. Dalam upaya pemberian dukungan kepada Waskita, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan terhadap risiko gagal bayar atas bunga dan pokok Obligasi IV dan Sukuk I Waskita tahun 2022 yang pada tanggal 22 April 2022 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Wali Amanat, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan oleh Waskita, Kementerian Keuangan, PT PII dan Waliamanat.

The issuance of bonds and *sukuk* is for the purpose of refinancing and meeting Waskita's working capital needs. In an effort to provide support to Waskita, the Ministry of Finance and IIGF provide Guarantee support against the risk of default on the interest and principal of Waskita Bond IV and Sukuk I in 2022, which on April 22, 2022, the Trustee Agreement, Guarantee Agreement, and Guarantee Implementation Agreement were signed by Waskita, the Ministry of Finance, IIGF and the Trustee.

Penjaminan Pinjaman Bus Listrik PT Industri Kereta Api (Persero)

PT Industri Kereta Api (Persero) Electric Bus Loan Guarantee

Informasi Penjaminan/Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Rp0,2 triliun/trillion
BUMN Terjamin Guaranteed SOE	PT Industri Kereta Api (Persero)
Kreditur Creditor	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	4 tahun/years

Bertepatan dengan diselenggarakannya rangkaian agenda KTT G-20, dimana Indonesia untuk pertama kalinya memegang Presidensi G-20, yang digelar di Provinsi Bali. Kementerian Perhubungan menyelenggarakan pengadaan penyediaan layanan transportasi umum bus listrik untuk mendukung Program G-20. Operator yang ditunjuk untuk menyediakan layanan bus listrik adalah Perum DAMRI. Perum DAMRI melalui LOA pada bulan Februari dan April 2022 telah menunjuk PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA) untuk menyediakan bus listrik sebanyak 53 unit. Setelah dioperasikan pada KTT G-20, bus listrik tersebut selanjutnya akan dioperasikan di Kota Bandung sebanyak 1 koridor (14 unit) dan Kota Surabaya sebanyak 2 koridor (39 unit) dengan skema *Buy The Service* (BTS).

Coinciding with the G-20 Summit agenda, with Indonesia holding the G-20 Presidency for the first time, which was held in Bali Province. The Ministry of Transportation organized the procurement of the provision of electric bus public transportation services to support the G-20 Program. The operator appointed to provide electric bus services is Perum DAMRI. Perum DAMRI through LOA in February and April 2022 has appointed PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA) to provide 53 units of electric buses. After being operated at the G-20 Summit, the electric buses will then be operated in Bandung City for 1 corridor (14 units) and Surabaya City for 2 corridors (39 units) with the Buy The Service (BTS) scheme.



Dalam upaya pemberian dukungan penyediaan bus listrik kepada PT INKA, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan yang dimana pada tanggal 30 Desember 2022 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian, yang meliputi Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Muamalat, yang sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PT INKA dengan Bank Muamalat untuk pendanaan pengadaan 53 unit bus listrik.

In an effort to provide support for the provision of electric buses to PT INKA, the Ministry of Finance and IIGF provide Guarantee support where on December 30, 2022 an agreement was signed, which included an Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF and Bank Muamalat, which previously on December 30, 2022 a Loan Agreement was signed between PT INKA and Bank Muamalat for funding the procurement of 53 electric bus units.

Penjaminan Pinjaman Perum DAMRI

Perum DAMRI Loan Guarantee

Informasi Penjaminan/Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Rp0,1 triliun/trillion
BUMN Terjamin Guaranteed SOE	Perum DAMRI
Kreditur Creditor	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	4 tahun/years

Perum DAMRI merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa angkutan penumpang. Pandemi Covid-19 menyebabkan sektor transportasi darat mengalami tekanan yang cukup sulit dikarenakan masyarakat membatasi mobilitas mereka demi pencegahan penularan dari Covid-19 mengakibatkan penurunan drastis pada jumlah penumpang. Oleh sebab itu, DAMRI memanfaatkan fasilitas pinjaman dengan Penjaminan Pemerintah sebagai upaya memperkuat basis komersial perusahaan.

Perum DAMRI is a state-owned enterprise engaged in passenger transportation services. The Covid-19 pandemic has caused the land transportation sector to experience considerable pressure as people limit their mobility to prevent transmission of Covid-19 resulting in a drastic decrease in the number of passengers. Therefore, DAMRI utilized a loan facility with a Government Guarantee as an effort to strengthen the company's commercial base.

Pinjaman dari Bank Mandiri kepada DAMRI akan difokuskan untuk mengembangkan trayek Angkutan Bandara dan Angkutan Antarkota melalui peremajaan armada di 35 trayek antarkota dan bandara yang terpilih karena memiliki *traffic* penumpang yang baik, serta mengembangkan Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan (*Maintenance Facility*). Pada tanggal 30 Desember 2022, DAMRI dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan DAMRI ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2022.

The loan from Bank Mandiri to DAMRI will be focused on developing Airport Transport and Inter-City Transport routes through fleet rejuvenation in 35 inter-city and airport routes selected for having good passenger traffic, as well as developing a Vehicle Maintenance Facility. On December 30, 2022, DAMRI and the Creditor signed a Loan Agreement, then the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF and Bank Mandiri, and the signing of the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and DAMRI were signed on December 30, 2022.

Penjaminan Pinjaman PT Len Industri (Persero)

PT Len Industri (Persero) Loan Guarantee

Informasi Penjaminan/Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Rp2,6 triliun/trillion
BUMN Terjamin Guaranteed SOE	PT Len Industri (Persero)
Kreditur Creditor	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; dan Bank/Lembaga Keuangan Lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; and other Banks/Financial Institutions
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	4 tahun/years

PT Len Industri (PT Len) pada tahun 2021 s.d. 2022 menerima surat penunjukan proyek strategis dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam rangka kemandirian penyediaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) oleh Industri Dalam Negeri. Penunjukan dari Kementerian Pertahanan ini selain

PT Len Industri (PT Len) in 2021 to 2022 received a letter of appointment for strategic projects from the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia in the context of independence in the provision of Defense System Main Equipment (Alutsista) by the Domestic Industry. The appointment from the Ministry of Defense

untuk menjalankan 3 proyek tersebut sekaligus sebagai bentuk dukungan PT Len terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk menunjang pelaksanaan penunjukan atas 3 (tiga) proyek di atas PT Len membutuhkan fasilitas kredit perbankan, baik *Cash Loan* (CL) maupun *Non Cash Loan* (NCL). Oleh sebab itu, PT Len mengajukan permohonan pembiayaan fasilitas pinjaman dengan jaminan Pemerintah. Pada tanggal 30 Desember 2022, PT Len dan pihak Kreditor menandatangani Perjanjian Pinjaman, selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT Len ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2022.

Penjaminan Pinjaman PT Pertamina (Persero)

Informasi Penjaminan/Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Rp47,2 triliun/trillion
BUMN Terjamin Guaranteed SOE	PT Pertamina (Persero)
Kreditor Creditor	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; dan/and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	2 tahun/years

Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga (PPN) melaksanakan penugasan kegiatan *Public Service Obligation* (PSO) penyediaan dan pendistribusian kuota volume penyalur Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus (JBKP). Mengacu pada PMK No. 159/PMK.02/2022, dalam pelaksanaan penugasan kegiatan PSO, Pertamina dapat memperoleh Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah atas kekurangan penerimaan Pertamina akibat selisih Harga Jual Eceran (HJE). Namun berdasarkan kondisi *eksisting* pembayaran Dana Kompensasi yang dilakukan oleh Pemerintah baru dapat diselesaikan pada rata-rata 3 tahun. Terjadinya penundaan pembayaran Dana Kompensasi menyebabkan defisit pada *Operating Cash Flow* (OCF). Atas hal tersebut, Pertamina melakukan proses penyediaan KMK Dana Kompensasi dan Subsidi dengan debitur Bank Mandiri, BNI dan BRI dalam rangka upaya menjaga *cashflow* dalam mencegah terjadinya disrupti operasional. Namun, fasilitas kredit yang diberikan oleh ketiga Bank tersebut sudah hampir mencapai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditentukan oleh OJK. Dengan memperhatikan kondisi BMPK Himbara, opsi yang dapat diupayakan oleh Pertamina adalah permohonan Fasilitas KMK Penjaminan Pemerintah melalui Program PEN dari Kementerian Keuangan atas Fasilitas KMK tersebut, sehingga ketentuan BMPK tersebut dapat dikecualikan.

is in addition to carrying out these 3 projects as well as a form of PT Len's support for the National Economic Recovery Program (PEN).

To support the implementation of the appointment of the 3 (three) projects above, PT Len requires bank credit facilities, both Cash Loan (CL) and Non Cash Loan (NCL). Therefore, PT Len applied for loan facility financing with a Government Guarantee. On December 30, 2022, PT Len and the Creditor signed a Loan Agreement, then the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF and Bank Mandiri, and the signing of the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PT Len were signed on December 30, 2022.

Loan Guarantee of PT Pertamina (Persero)

Pertamina through Pertamina Patra Niaga (PPN) carries out the assignment of *Public Service Obligation* (PSO) activities to provide and distribute quota volume distributors of Certain Fuel Types (JBT) and Special Fuel Types (JBKP). Referring to PMK No. 159/PMK.02/2022, in carrying out the assignment of PSO activities, Pertamina can obtain Fuel Oil Compensation Funds from the Government for Pertamina's revenue shortfall due to the difference in Retail Selling Price (HJE). However, based on the existing conditions, the Compensation Fund payments made by the Government can only be completed on average of 3 years. The delay in payment of the Compensation Fund causes a deficit in the Operating Cash Flow (OCF). For this reason, Pertamina carried out the process of providing KMK for Compensation and Subsidy Funds with debtors Bank Mandiri, BNI and BRI in order to maintain cash flow in preventing operational disruptions. However, the credit facilities provided by the three banks have almost reached the Maximum Legal Lending Limit (LLL) determined by OJK. Taking into account the condition of Himbara's LLL, the option that can be pursued by Pertamina is to apply for a Government Guarantee KMK Facility through the PEN Program from the Ministry of Finance for the KMK Facility, so that the LLL provisions can be exempted.



Pertamina mengajukan permohonan Fasilitas KMK Penjaminan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pada tanggal 30 Desember 2022, Pertamina dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi (Bank Mandiri, BNI dan BRI), selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan Pertamina ditandatangani secara bersamaan pada tanggal 30 Desember 2022.

Pertamina applied for the Government Guarantee KMK Facility through the National Economic Recovery Program (PEN) and on December 30, 2022, Pertamina and the Creditors signed the Syndicated Credit Agreement (Bank Mandiri, BNI and BRI), then the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF and Bank Mandiri, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and Pertamina were signed simultaneously on December 30, 2022.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Penjaminan

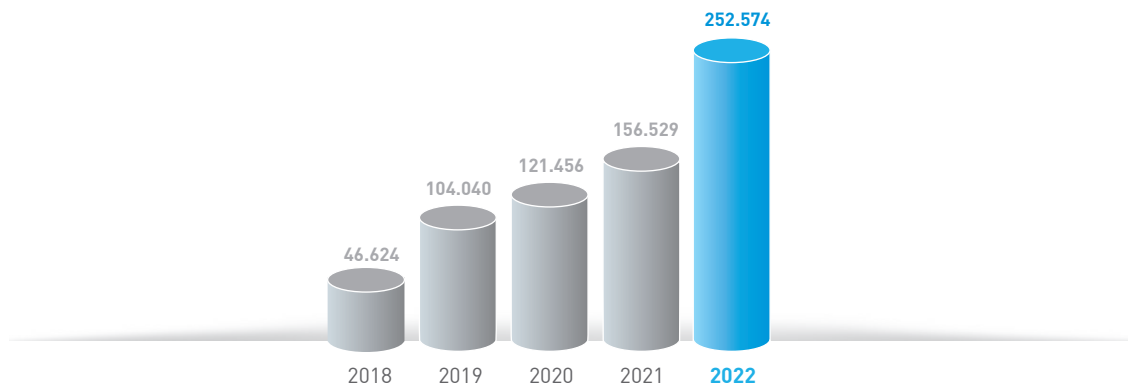
Melalui ketiga kegiatan usaha di atas, di tahun 2022 pendapatan yang diperoleh segmen penjaminan sebesar Rp252,57 miliar, meningkat sebesar Rp96,04 miliar atau 61,36% dari tahun 2021 yang sebesar Rp156,5 miliar.

Profitability and Financial Performance of Guarantee Segment

Through the three business activities above, the revenue earned by the guarantee segment amounted to Rp252.57 billion in 2022, an increase of Rp96.04 billion or 61.36% from 2021 which amounted to Rp156.5 billion.

Pendapatan Penjaminan (Rp juta)

Guarantee Revenue (Rp-million)



SEGMENT USAHA PENYIAPAN PROYEK DAN PENDAMPINGAN TRANSAKSI PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF) BUSINESS SEGMENT

Dengan pengalaman lebih dari 13 tahun, PT PII telah menjalankan peran serta usaha terbaiknya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui Penjaminan Pemerintah yang diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur melalui skema KPBU. Perkembangan dan pertumbuhan industri infrastruktur di Indonesia menuntut PT PII untuk terus adaptif terhadap kemajuan zaman dan berinovasi serta berkembang dalam menjalankan perannya demi mencapai hasil yang optimal serta pemerataan infrastruktur di Indonesia.

Kegiatan Operasi dan Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi

Pada tahun 2018, PT PII mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kegiatan usaha di samping memberikan jaminan pada proyek infrastruktur, yaitu dengan terlibat dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 180 tahun 2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Berdasarkan peraturan tersebut, PT PII mulai menjalankan segmen usaha baru yakni Penyiapan dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU dimana PT PII terlibat secara menyeluruh di dalam proses penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU dari hulu ke hilir. Kegiatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang dikenal sebagai *Project Development Facility* (PDF) merupakan salah satu pengembangan aktivitas kegiatan Perseroan sesuai dengan rencana arah pengembangan Perseroan tahun 2018-2022. Adapun proyek-proyek yang dapat menerima fasilitas PDF adalah proyek KPBU Prioritas, Proyek KPBU Kilang Minyak, dan/atau Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan PDF dimaksud, PT PII telah menyiapkan struktur yang berorientasi pada Proyek serta menjaga independensi pengambilan keputusan di masing-masing fungsi (*Segregation of Function*) melalui pembentukan Divisi Inisiasi Bisnis yang didukung oleh dua hal, yaitu:

- Pengawasan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan penugasan tersebut dengan bekal pengalaman Proyek Infrastruktur selama PT PII beroperasi; dan
- Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam pengelolaan transaksi.

Melalui kegiatan PDF, PT PII terlibat sejak tahap perencanaan melalui pendampingan untuk membantu PJKP menyusun kajian prastudi kelayakan dan dokumen lelang sebelum proyek dilaksanakan. Dari sisi transaksi proyek, PT PII mendampingi PJKP dari mulai penyiapan transaksi hingga mencapai tahap pembiayaan (*financial close*). Dengan keterlibatan PT PII sejak awal penyiapan proyek, dapat meningkatkan kepastian keberhasilan transaksi dengan pihak investor yang berujung pada kepastian pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan efisien.

With more than 13 years of experience, IIGF has carried out its best role and efforts in infrastructure development in Indonesia through Government Guarantees provided to infrastructure projects through the PPP scheme. The development and growth of the infrastructure industry in Indonesia requires IIGF to continue to be adaptive to the times and innovate and develop in carrying out its role in order to achieve optimal results and equitable distribution of infrastructure in Indonesia.

Operations and Business Activities of Project Development Facility (PDF)

In 2018, IIGF had the opportunity to carry out business activities in addition to providing guarantees for infrastructure projects by engaging in project preparation and transaction advisory. This is in accordance with the Ministry of Finance Regulation No. 180 of 2020 concerning Facilities for PPP Project Preparation and Transaction Implementation in the Provision of Infrastructure.

Based on this regulation, IIGF began to run a new business segment, namely PPP Project Preparation and Transaction Advisory with IIGF being thoroughly involved in the process of providing infrastructure through the PPP scheme from upstream to downstream. Project preparation and transaction advisory activities known as *Project Development Facility* (PDF) is one of the developments of the Company's activities in accordance with the Company's development direction plan for 2018-2022. The projects that can receive PDF facilities are Priority PPP projects, Oil Refinery PPP Projects, and/or other PPP Projects that meet the criteria as stipulated in the regulation.

In implementing the PDF activities, IIGF has prepared a project-oriented structure and maintained the independence of decision making in each function (*Segregation of Function*) through the establishment of the Business Initiation Division which is supported by two things, namely:

- Competent human resources to carry out the assignment with the experience of Infrastructure Projects during IIGF's operation; and
- Good Corporate Governance infrastructure in transaction management.

Through PDF activities, IIGF has been involved since the planning stage through assistance to help GCA prepare pre-feasibility studies and tender documents before the project is implemented. In terms of project transactions, IIGF assists GCA from the start of transaction preparation to reach the financial close stage. With IIGF's involvement from the beginning of project preparation, it can increase the certainty of successful transactions with investors which leads to the certainty of quality and efficient infrastructure development.



Pelaksanaan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi

Hingga akhir tahun 2022, PT PII telah menerima penugasan untuk pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk 9 (sembilan) proyek aktif, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pembangunan Proyek *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi

Sesuai dengan Keputusan Menteri No. 7 Tahun 1988, Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan pelaksana uji tipe kendaraan bermotor.

BPLJSKB sudah memiliki sejumlah fasilitas peralatan uji modern dengan total 15 unit peralatan uji yang telah diakui dan mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Namun demikian, BPLJSKB belum mempunyai fasilitas *outdoor test* yaitu *proving ground* yang mengacu kepada standard ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (ASEAN MRA) yang mengadopsi sebagian standar *United Nation Regulation* (UNR) sebagai standar yang diakui secara regional/global.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berencana untuk mengadakan kawasan *Proving Ground* Bekasi melalui skema KPBU untuk mendapatkan hasil pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan mengacu kepada standar internasional hingga dapat meningkatkan keselamatan berkendara guna meminimalkan angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor ketidaklaikan kendaraan bermotor dan dapat mengurangi emisi yang disebabkan oleh polusi dari kendaraan bermotor. Skema KPBU dinilai tepat dengan melibatkan partisipasi Badan Usaha dalam pembangunan, pengadaan, perawatan fasilitas dan peralatan pengujian tipe kendaraan.

Untuk ke depannya, fasilitas yang dimiliki oleh BPLJSKB akan semakin lengkap dengan adanya fasilitas uji kendaraan bermotor dalam ruangan (*indoor test*) maupun di luar ruangan (*outdoor test*).

Informasi Proyek/Project Information

PJPK GCA	Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Director General of Land Transportation, Ministry of Transportation
Lokasi Proyek Project Location	Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Bekasi Regency, West Java
Skema Proyek Project Scheme	DBFMT
Lingkup KPBU Scope of PPP	<ul style="list-style-type: none"> › Merancang dan pembangunan Fasilitas Pengujian dan Fasilitas Penunjang; › Pengadaan Peralatan Pengujian dan Fasilitas Penunjang; › Pemeliharaan Fasilitas; dan › Peningkatan kapasitas (pelatihan). › Design and construction of Testing Facilities and Supporting Facilities; › Procurement of Testing Equipment and Supporting Facilities; › Facility Maintenance; and › Capacity building (training).
Mekanisme Pengembalian Investasi Return on Investment Mechanism	<i>Availability Payment</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp1,98 triliun/trillion

Implementation of Project Preparation and Transaction Advisory

As of the end of 2022, IIGF has received assignments for the implementation of project preparation and transaction advisory for 9 (nine) active projects, as described below.

Construction of the Bekasi BPLJSKB Proving Ground Project

In accordance with Ministerial Decree No. 7 of 1988, the Roadworthiness Testing & Certification Center for Motor Vehicles under the Directorate General of Land Transportation is the executor of motor vehicle type tests.

BPLJSKB already has a number of modern test equipment facilities with a total of 15 units of test equipment that have been recognized and accredited by the National Accreditation Committee. However, BPLJSKB does not yet have an outdoor test facility, namely a proving ground that refers to the ASEAN Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA) standard which adopts some United Nation Regulation (UNR) standards as regionally/globaly recognized standards.

To meet these needs, the Directorate General of Land Transportation plans to procure the Bekasi Proving Ground area through a PPP scheme to obtain more accurate motor vehicle type testing results and refer to international standards so as to improve driving safety to minimize the number of accidents caused by motor vehicle unfitness factors and can reduce emissions caused by pollution from motor vehicles. The PPP scheme is considered appropriate by involving the participation of Special Purpose Vehicle in the development, procurement, maintenance of vehicle type testing facilities and equipment.

In the future, the facilities owned by BPLJSKB will be more complete with the presence of indoor and outdoor motor vehicle test facilities.

Masa Kerja Sama Cooperation Period	17 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi) 17 years (including 2 years of construction)
Tahapan Sections	Tahap Transaksi (Proses <i>Financial Close</i>) Transaction Phase (Financial Close Process)

Sejak diterbitkannya KMK Penugasan pada tanggal 19 Juli 2019, PT PII secara resmi ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi. Saat ini telah dilakukan penandatanganan perjanjian KPBU pada tanggal 31 Oktober 2022 antara Kementerian Perhubungan RI dan PT Indonesia International Automotive Proving Ground sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP), kemudian status Proyek saat ini sedang dalam tahapan perolehan pembiayaan (*Financial Close*).

Since the issuance of the KMK Assignment on July 19, 2019, IIGF has been officially assigned by the Ministry of Finance to provide advisory services for the Preparation and Transaction of the PPP Project for the Construction of the BPLJSKB Bekasi Proving Ground. Currently, a PPP agreement has been signed on October 31, 2022 between the Indonesian Ministry of Transportation and PT Indonesia International Automotive Proving Ground as the Special Purpose Vehicle (SPV), then the Project status is currently in the stage of Financial Close.

Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Badung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 ("Perda Badung No. 26/2013") dan RT/RW Provinsi Bali tahun 2009-2029 sebagai acuan kebijakan penataan ruang pada Provinsi Bali, proyek JLS Badung dibangun untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Badung sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjati diri budaya Bali melalui sinergi pengembangan Wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan dan berlandaskan Tri Hita Karana.

Construction of Badung South Ring Road

In accordance with the Badung Regency Regional Regulation No. 26 of 2013 concerning the Regional Spatial Plan of Badung Regency 2013-2033 ("Badung Regional Regulation No. 26/2013") and the Bali Provincial Spatial Plan 2009-2029 as a reference for spatial planning policies in the Province of Bali, the Badung JLS project was built to support the spatial planning of the Badung Regency area as a National Activity Center and an international tourism destination that is quality, competitive and has Balinese cultural identity through the synergy of developing the North Badung, Central Badung and South Badung Regions in a sustainable manner and based on Tri Hita Karana.

Proyek ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat berupa:

The project is expected to accelerate development and provide economic and social benefits to the community in the form of:

- Peningkatan kesempatan kerja dimana secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan penduduk atas pendapatan yang dihasilkan dari Proyek ini;
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tersambungannya akses jalan sehingga dapat membuka daerah baru untuk tujuan pariwisata;
- Berkurangnya tingkat kemiskinan; serta
- Dukungan terhadap kelancaran lalu lintas sehingga waktu tempuh antar wilayah dan mobilitas pengendara menjadi lebih singkat dan efektif, yang selanjutnya juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

- Increasing employment opportunities which will directly improve the welfare of the population on the income generated from this Project;
- Increasing Regional Original Revenue (PAD) by connecting road access so that it can open new areas for tourism destinations;
- Reducing poverty levels; and
- Support for smooth traffic so that travel time between regions and driver mobility becomes shorter and more effective, which in turn will also support economic growth in this area.

Informasi Proyek*/Project Information*

PJPK GCA	Bupati Badung Badung Regent
Lokasi Proyek Project Location	Kabupaten Badung, Bali Badung Regency, Bali
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer</i> (DBFOMT)



Lingkup KPBU Scope of PPP	<p>Ruang lingkup Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Menyusun DED untuk seluruh sarana dan prasarana jalan dalam lingkup KPBU. › Membangun sarana dan prasarana jalan dalam lingkup KPBU. › Membiayai pembangunan proyek yang diperlukan terkait pekerjaan yang dilakukan. › Mengoperasikan sarana dan prasarana jalan. › Pemeliharaan sarana dan prasarana jalan. › Serah terima seluruh aset kepada PJPK di akhir masa konsesi. <p>The scope of the Special Purpose Vehicle (SPV) is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Prepare DED for all road facilities and infrastructure within the scope of PPP. › Build road facilities and infrastructure within the scope of PPP. › Financing the construction of projects required related to the work carried out. › Operating road facilities and infrastructure. › Maintenance of road facilities and infrastructure. › Handover all assets to GCA at the end of the concession period. <p>Segmen yang menjadi ruang lingkup KPBU adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Segmen 2 sepanjang 6,3 km termasuk 1 km terowongan. › Segmen 4 sepanjang 5,6 km. <p>The segments that are the scope of PPP are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Segment 2 along 6.3 km including 1 km tunnel. › Segment 4 along 5.6 km.
Mekanisme Pengembalian Investasi Return on Investment Mechanism	<i>Availability Payment</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp2,3 triliun/trillion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Period of Cooperation	15 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi) 15 years (including 2 years of construction)
Tahapan Sections	Penyiapan Proyek (Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan) Project Preparation (Pre-feasibility Study Final Report)

* Berdasarkan FBC Akhir Jalan Lingkar Selatan Badung (2022)
* Based on Final FBC of Badung South Ring Road (2022)

Pada tanggal 16 September 2020, PT PII telah menerima Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai Penugasan PDF Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Badung. Selanjutnya, penandatanganan Perjanjian Penugasan Fasilitas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi KPBU Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Badung antara Kementerian Keuangan dan PT PII dilakukan pada tanggal 22 September 2020. Dengan demikian, PT PII secara resmi berkewajiban untuk melaksanakan tahapan-tahapan pada tahapan penyiapan dan transaksi yang diperlukan untuk memastikan Proyek dapat direalisasikan. Pada tanggal 30 Desember 2020, PT PII telah menerbitkan *Confirmation to Proceed* (CTP) untuk Proyek KPBU Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung, Laporan Awal FBC telah diselesaikan pada tanggal 5 November 2021 dan Laporan Akhir FBC telah diselesaikan pada tanggal 20 Desember 2022.

Pada tanggal 7 Juli 2022, PJPK telah menyampaikan surat No. 620/4780/SETDA/PUPR terkait permohonan pengakhiran fasilitas PDF kepada Menteri Keuangan disebabkan oleh kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Badung yang mengalami kontraksi akibat Covid-19, yang kemudian disetujui oleh PDPPI melalui surat No. S-385/PR/2022 tanggal 26 Agustus 2022 terkait penyampaian Pengakhiran Fasilitas PDF Proyek dan menyampaikan bahwa PT PII berhak mendapatkan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan *opportunity return* sebagaimana ketentuan yang berlaku.

On September 16, 2020, IIGF received the Ministry of Finance Decree (KMK) regarding the Assignment of the Badung South Ring Road Development PDF. Furthermore, the signing of the Badung South Ring Road Development Project PPP Advisory Facility Assignment Agreement between the Ministry of Finance and IIGF was carried out on September 22, 2020. Thus, IIGF is officially obliged to carry out the stages in the preparation and transaction stages needed to ensure the Project can be realized. On December 30, 2020, IIGF has issued Confirmation to Proceed (CTP) for the Badung Regency South Ring Road Development PPP Project, the FBC Preliminary Report was completed on November 5, 2021 and the FBC Final Report was completed on December 20, 2022.

On July 7, 2022, GCA has submitted letter No. 620/4780/SETDA/PUPR regarding the request for termination of the PDF facility to the Ministry of Finance due to the condition of the fiscal capacity of Badung Regency which has contracted due to Covid-19, which was then approved by PDPPI through letter No. S-385/PR/2022 on August 26, 2022 regarding the submission of the Termination of the Project PDF Facility and conveyed that IIGF is entitled to reimbursement of all costs incurred and opportunity return as applicable provisions.

Pembangunan Bandar Udara Singkawang

Berada di Provinsi Kalimantan Barat (kurang lebih 153 km dari Ibukota Provinsi, Kota Pontianak), kota Singkawang memiliki masyarakat yang beragam dan harmonis yang berkontribusi terhadap keunikan Singkawang. Hal ini yang menjadikannya sebagai tujuan wisata budaya dan religi yang potensial. Selain itu, Kota Singkawang juga memiliki berbagai peluang investasi antara lain seperti industri 4.0, logistik (hub), depo gas, pertanian dan budidaya perairan (akuakultur) hingga kawasan hunian.

Dengan berbagai alasan tersebut, Proyek Bandara Singkawang menjadi salah satu proyek nasional yang akan menggunakan skema KPBU sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen Hubud 2020-2024 dan termasuk dalam Program Prioritas Kota Singkawang tahun 2018-2022.

Rencana Induk Nasional Bandar Udara dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2019 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional memuat rencana lokasi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi Bandar Udara Singkawang, dimana Proyek KPBU Bandar Udara Singkawang dikategorikan sebagai Bandar Udara Pengumpan dengan Klasifikasi 4C. Keberadaan bandar udara ini diharapkan mampu mengaktifkan pertumbuhan ekonomi dan membantu meminimalkan waktu perjalanan, mengingat sebagian besar masyarakat menggunakan Bandara Supadio Pontianak (PNK) untuk bepergian ke daerah masing-masing.

Informasi Proyek/Project Information

PJPK GCA	Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Director General of Civil Aviation, Ministry of Transportation
Lokasi Proyek Project Location	Kota Singkawang, Kalimantan Barat Singkawang City, West Kalimantan
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFO/MT)</i>
Lingkup KPBU Scope of PPP	<ul style="list-style-type: none"> › Menyusun DED untuk seluruh fasilitas dalam lingkup KPBU. › Membangun fasilitas lingkup KPBU untuk sisi udara, darat, termasuk fasilitas pendukung. › Membiayai seluruh dana yang diperlukan terkait pekerjaan yang dilakukan. › Mengoperasikan fasilitas bandara. › Pemeliharaan aset infrastruktur. › Serah terima seluruh aset kepada PJPK di akhir masa konsesi. › Prepare DED for all facilities within the scope of PPP. › Build PPP scope facilities for air, land, including supporting facilities. › Finance all necessary funds related to the work carried out. › Operate airport facilities. › Maintenance of infrastructure assets. › Handover all assets to GCA at the end of the concession period.
Mekanisme Pengembalian Investasi Return on Investment Mechanism	<i>User Charge</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp1,6 triliun*/trillion*
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Period of Cooperation	33 tahun (termasuk 3 tahun konstruksi) 33 years (including 3 years of construction)
Tahapan Sections	Penyiapan Proyek (Finalisasi Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan) Project Preparation (Finalization of the Final Report of the Pre-Feasibility Study)

*] dalam proses analisis lebih lanjut pada Laporan Akhir
in the process of further analysis in the Final Report

Singkawang Airport Development

Located in West Kalimantan Province (approximately 153 km from the Provincial Capital, Pontianak City), the city of Singkawang has a diverse and harmonious society that contributes to the uniqueness of Singkawang. This makes it a potential cultural and religious tourism destination. In addition, Singkawang City also has various investment opportunities such as industry 4.0, logistics (hub), gas depot, agriculture and aquaculture to residential areas.

For these various reasons, the Singkawang Airport Project is one of the national projects that will use the PPP scheme as stated in the Directorate General of Civil Aviation's Strategic Plan 2020-2024 and included in the Singkawang City Priority Program 2018-2022.

The National Airport Master Plan in the Decree of the Ministry of Transportation No. 166 of 2019 concerning the National Airport Order contains a plan for the location, use, hierarchy and classification of Singkawang Airport, where the Singkawang Airport PPP Project is categorized as a Feeder Airport with Classification 4C. The existence of this airport is expected to be able to activate economic growth and help minimize travel time, considering that most people use Supadio Pontianak Airport to travel to their respective regions.



Pada tanggal 31 Januari 2020, PJPK mengajukan permohonan fasilitas PDF kepada Menteri Keuangan yang kemudian disetujui pada tanggal 6 September 2020 melalui surat Menteri Keuangan perihal persetujuan atas permohonan fasilitas PDF untuk Proyek. Pada tanggal 23 November 2020, Kemenkeu dan PJPK menandatangani kesepakatan induk untuk menindaklanjuti proses pemberian PDF. Pada tanggal 13 Januari 2021, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan. Selanjutnya, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian penugasan antara Kemenkeu dan PT PII pada tanggal 12 April 2021 dan perjanjian pelaksanaan antara PT PII dengan Kementerian Perhubungan selaku PJPK pada tanggal 14 April 2021.

Pada Maret 2022, PJPK merencanakan pembangunan untuk target operasi minimum beserta fasilitas penunjang oleh Pemerintah (*brownfield*) sehingga diajukan perpanjangan PDF oleh PJPK kepada Kemenkeu melalui surat No. AU.108/9/17/DRJU.DBU-2022 pada tanggal 22 September 2022. Kemenkeu telah menyetujui usulan Perpanjangan PDF selama 15 bulan hingga 23 Juni 2024 melalui surat No. S-556/PR/2022 pada 27 November 2022.

Pembangunan SPAM Regional Wosusokas Tahap II

Sebagai salah satu target pembangunan untuk wilayah Jawa Tengah, pembangunan SPAM Regional Wosusokas merupakan upaya pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam hal penyediaan air bersih bagi masyarakat. SPAM Regional Wosusokas sendiri terbagi ke dalam 2 (dua) tahapan, di mana Tahap I dibangun melalui APBN-*Loan* dan Tahap II direncanakan melalui skema KPBU. Proyek SPAM Wosusokas Tahap II rencananya akan memiliki kapasitas debit air sebesar 700 l/det dan *clear well* 2.500 m³ dengan rencana wilayah pelayanan meliputi Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta.

Informasi Proyek/Project Information*

PJPK GCA	PT Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah (Perseroda)
Lokasi Proyek Project Location	Kab. Sukoharjo dan Kota Surakarta, Jawa Tengah Sukoharjo Regency and Surakarta City, Central Java
Skema Proyek Project Scheme	<i>Build-Operate-Transfer</i> (BOT) - <i>User Tariff</i>
Lingkup KPBU Scope of PPP	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan kapasitas 700 l/det. • Pembangunan <i>clear well</i> 2.500 m³. • Pembangunan Jaringan Pipa Utama dan Jembatan Pipa. • Construction of a water treatment plant with a capacity of 700 l/det. • Construction of a 2,500 m³ clear well. • Construction of Main Pipe Network and Pipe Bridge.
Mekanisme Pengembalian Investasi Return on Investment Mechanism	<i>User Tariff</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp1,2 triliun/trillion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Period of Cooperation	20 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi) 20 years (including 2 years of construction)
Wilayah Pelayanan Service Area	Kab. Sukoharjo (200 l/det) Kota Surakarta (500 l/det) Sukoharjo Regency (200 l/sec) Surakarta City (500 l/sec)
Tahapan Sections	Penyiapan Proyek (Finalisasi Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan) Project Preparation (Finalization of the Final Report of the Pre-Feasibility Study)

* berdasarkan FBC Awal SPAM Regional Wosusokas (2022)
based on Initial FBC SPAM Wosusokas Regional (2022)

On January 31, 2020, GCA submitted an application for the PDF facility to the Ministry of Finance which was subsequently approved on September 6, 2020 through the Ministry of Finance's letter regarding the approval of the application for the PDF facility for the Project. On November 23, 2020, MoF and GCA signed a master agreement to follow up the PDF granting process. On January 13, 2021, the Ministry of Finance issued a Ministry of Finance Decree regarding a special assignment to IIGF as the implementing SOE. Furthermore, an assignment agreement was signed between the Ministry of Finance and IIGF on April 12, 2021 and an implementation agreement between IIGF and the Ministry of Transportation as GCA on April 14, 2021.

In March 2022, GCA planned the construction for the minimum operation target along with supporting facilities by the Government (*brownfield*) so that the PDF extension was proposed by GCA to the Ministry of Finance through letter No. AU.108/9/17/DRJU.DBU-2022 on September 22, 2022. Ministry of Finance has approved the proposed PDF Extension for 15 months until June 23, 2024 through letter No. S-556/PR/2022 on November 27, 2022.

Construction of Wosusokas Regional SPAM Phase II

As one of the development targets for the Central Java region, the construction of the Wosusokas Regional SPAM is an effort to fulfill the Government's obligations in terms of providing clean water to the community. Wosusokas Regional SPAM itself is divided into 2 (two) stages, where Phase I is built through APBN-*Loan* and Phase II is planned through a PPP scheme. The Wosusokas SPAM Phase II project is planned to have a water discharge capacity of 700 l/det and a *clear well* of 2,500 m³ with a service area plan covering Sukoharjo Regency and Surakarta City.

Dengan terdapatnya Proyek KPBU SPAM Regional Wosusokas Tahap II dalam Peraturan Presiden No. 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah, maka prioritas kebutuhan akan Proyek dapat segera dilaksanakan. Saat ini, Proyek termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional dimana proyek/program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha tersebut bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pada tanggal 22 September 2020, Kementerian Keuangan menyetujui Permohonan fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respon atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJPK ke Kementerian Keuangan tanggal 30 Juli 2020. Pada tanggal 26 April 2021, Kemenkeu dan PJPK kemudian menandatangani kesepakatan induk dan menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada 27 Mei 2021. Selanjutnya, perjanjian penugasan dan perjanjian pelaksanaan fasilitas masing-masing telah ditandatangani pada 26 Juli 2021 dan 30 Juli 2021 dan menjadi dasar pelaksanaan fasilitas hingga saat ini.

Pembangunan Rusunawa Cisaranten

Sehubungan dengan kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan untuk menutupi *backlog* perumahan, Pemerintah berupaya menyediakan perumahan yang lebih baik bagi warga Bandung. Rencana tersebut direalisasikan melalui proyek Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung ("Rusunawa Cisaranten") dimana pembangunannya direncanakan melalui skema KPBU.

Informasi Proyek/Project Information*

PJPK GCA	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("PUPR") Ministry of Public Works and Housing ("PUPR")
Lokasi Proyek Project Location	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung, Jawa Barat Cisaranten Bina Harapan Village, Bandung City, West Java
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer</i> (DBFOMT)
Lingkup KPBU Scope of PPP	<ul style="list-style-type: none"> › Penyusunan <i>basic design</i> Rusun 5 tower › Pembangunan Rusunawa, Fasum, dan Fasos pendukung › Pembiayaan › Pengoperasian dan pemeliharaan bangunan Rusun dan Fasum dan Fasos › Serah terima seluruh aset kepada PJPK di akhir masa konsesi. › Preparation of basic design of 5 tower flats. › Construction of flats, supporting facilities and social facilities. › Financing. › Operation and maintenance of Flats and Public facilities, and Social Facilities buildings. › Handover of all assets to GCA at the end of the concession period.
Mekanisme Pengembalian Investasi Return on Investment Mechanism	<i>Availability Payment</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp585 miliar/billion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Period of Cooperation	16 tahun 3 bulan – termasuk 3 bulan prakonstruksi, 12 bulan konstruksi dan 15 tahun (O&M) 16 years 3 months - including 3 months pre-construction, 12 months construction and 15 years (O&M)
Tahapan Sections	Penyiapan Proyek (Penyusunan Laporan Awal Kajian Akhir Prastudi Kelayakan) Project Preparation (Preparation of Preliminary Report of Final Feasibility Study)

* berdasarkan *Draft* Laporan Awal FBC Proyek Rusun Cisaranten (2022)
based on *Draft* FBC Preliminary Report of Cisaranten Flat Project (2022)

With the registration of the Wosusokas Phase II Regional SPAM PPP Project in Presidential Regulation No. 79 of 2019 concerning the Acceleration of Regional Economic Development in Central Java Province, the priority needs for the Project can be implemented immediately. Currently, the Project is included in the National Strategic Project category where projects/programs implemented by the Government, Regional Governments, and/or special purpose vehicle are strategic in nature to increase growth and equitable development with the aim of improving community welfare and regional development.

On September 22, 2020, the Ministry of Finance approved the Request for PDF facility for the Project in response to the PDF Request letter previously sent by GCA to the Ministry of Finance on July 30, 2020. On April 26, 2021, the Ministry of Finance and GCA then signed a master agreement and issued KMK regarding the special assignment to IIGF as the implementing SOE on May 27, 2021. Subsequently, the assignment agreement and facility implementation agreement were signed on July 26, 2021 and July 30, 2021 respectively and form the basis for the implementation of the facility to date.

Construction of Rusunawa Cisaranten

In connection with the needs of the growing population and to cover the housing backlog, the Government seeks to provide better housing for Bandung residents. The plan is realized through the Bandung City Bina Harapan Cisaranten Low-cost Apartment project ("Rusunawa Cisaranten") with construction being planned through a PPP scheme.



Pada tanggal 5 Juli 2021, Kementerian Keuangan menyetujui Fasilitas PDF untuk Proyek tersebut sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJPK ke Kementerian Keuangan tanggal 30 Maret 2021. Kemenkeu dan PJPK kemudian menandatangani kesepakatan induk pada tanggal 23 September 2021 dan diterbitkannya KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada 19 Oktober 2021. Selanjutnya, perjanjian penugasan dan perjanjian pelaksanaan fasilitas masing-masing telah ditandatangani pada 13 Desember 2021 dan 14 Desember 2021. Saat ini proyek dalam proses penyusunan Laporan Awal Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (FBC).

Pembangunan Rusunawa di KEK Sei Mangkei

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara berencana untuk membangun rumah susun guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal untuk para pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan masyarakat yang akan direlokasi akibat adanya program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara atau bencana di Kabupaten Simalungun. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk merespons kebutuhan hunian tersebut adalah dengan melakukan pembangunan Rusunawa di KEK Sei Mangkei melalui skema KPBU.

Informasi Proyek/Project Information*

PJPK GCA	Gubernur Sumatra Utara Governor of North Sumatra
Lokasi Proyek Project Location	Kab. Simalungun, Sumatra Utara Simalungun Regency, North Sumatra
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)</i>
Lingkup KPBU Scope of PPP	<ul style="list-style-type: none"> › Penyusunan detail <i>design</i>, pembiayaan, dan pembangunan Rusunawa, Fasum dan Fasos pendukung; › Pengoperasian bangunan Rusunawa; › Pengoperasian Fasum dan Fasos; dan › Pemeliharaan bangunan Rusunawa, Fasum dan Fasos, dan jalan akses di dalam kawasan › Preparation of detailed design, financing, and construction of low-cost apartment, supporting Public facilities and Social Facilities; › Operation of the low-cost apartment building; › Operation of Public facilities and Social Facilities; and › Maintenance of low-cost apartment buildings, Public facilities and Social Facilities, and access roads in the area.
Mekanisme Pengembalian Investasi Return on Investment Mechanism	<i>Availability Payment</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp163 – Rp523 miliar/billion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Period of Cooperation	17 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi) 17 years (including 2 years of construction)
Tahapan Sections	Penyiapan Proyek (Finalisasi Laporan Awal Kajian Akhir Prastudi Kelayakan) Project Preparation (Finalization of Preliminary Report of Final Feasibility Study)

* berdasarkan Draft Laporan Awal FBC Proyek Rusunawa Sei Mangkei (2022)
based on FBC Preliminary Report Draft of Sei Mangkei Low-Cost Apartment Project (2022)

On July 5, 2021, the Ministry of Finance approved the PDF Facility for the Project in response to the PDF Request letter previously sent by GCA to the Ministry of Finance on March 30, 2021. The Ministry of Finance and GCA then signed a master agreement on September 23, 2021 and KMK was issued regarding the special assignment to IIGF as the implementing SOE on October 19, 2021. Furthermore, the assignment agreement and facility implementation agreement were signed on December 13, 2021 and December 14, 2021, respectively. Currently, the project is in the process of preparing the Preliminary Report of the Final Feasibility Study (FBC).

Construction of Low-Cost Apartment in Sei Mangkei KEK

The North Sumatra Provincial Government plans to build flats to meet the housing needs of workers in the Sei Mangkei Special Economic Zone (SEZ) and people who will be relocated due to the North Sumatra Provincial Government program or disasters in Simalungun Regency. The effort made by the North Sumatra Provincial Government to respond to these housing needs is to carry out the construction of low-cost apartment in Sei Mangkei SEZ through a PPP scheme.

Pada tanggal 23 Maret 2021, Kementerian Keuangan menyetujui Fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJPK kepada Kementerian Keuangan tanggal 2 Juli 2020. Pada tanggal 22 Oktober 2021 Kemenkeu dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk, kemudian Kemenkeu menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada tanggal 26 November 2021. Saat ini proyek dalam proses penyusunan Laporan Awal Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (FBC).

Pembangunan TPAS Regional Piyungan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ("Pemda DIY") saat ini sedang mempersiapkan Proyek Pengembangan TPAS Regional Piyungan ("Proyek") di lahan baru (± 5,8 ha) yang akan diadakan melalui skema KPBU dengan mempertimbangkan saat ini TPA eksisting (± 10 ha) yang sudah penuh dan telah ditutup pada tahun 2022, selain itu TPA Transisi (± 2 ha) yang dibangun tahun 2022 diproyeksikan hanya akan dapat digunakan hingga tahun 2025.

Proyek akan berupaya untuk mencapai tujuan berikut:

- a. Menyediakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dan praktik terbaik internasional.
- b. Melibatkan pembiayaan swasta untuk investasi modal untuk pembiayaan Proyek mengingat kapasitas fiskal PJPK yang terbatas.
- c. Membawa pengalaman teknologi dan manajemen internasional ke dalam Proyek dan melakukan transfer pengalaman teknologi dan manajemen internasional ke dalam perekonomian Indonesia.
- d. Meningkatkan manfaat sosial ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat setempat.
- e. Meningkatkan penanganan sampah residual yang membutuhkan penimbunan dengan kualitas yang dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:
 - Mengurangi volume lindi tambahan yang harus diolah.
 - Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
 - Mengurangi potensi adanya agen penularan penyakit.
 - Mengurangi masalah gangguan bau yang dapat mengganggu warga dan menurunkan nilai tanah.

On March 23, 2021, the Ministry of Finance approved the PDF Facility for the Project in response to the PDF Request letter previously sent by GCA to the Ministry of Finance on July 2, 2020. On October 22, 2021, the Ministry of Finance and GCA signed the Master Agreement, then the Ministry of Finance issued KMK regarding the special assignment to IIGF as the implementing SOE on November 26, 2021. Currently the project is in the process of preparing the Preliminary Report of the Final Feasibility Study (FBC).

Development of Piyungan Regional Landfill

The Regional Government of Yogyakarta Special Region ("DIY Regional Government") is currently preparing the Piyungan Regional Landfill Development Project ("Project") on new land (± 5.8 ha) to be procured through a PPP scheme considering that the existing landfill (± 10 ha) is already full and will be closed in 2022, and the Transitional Landfill (± 2 ha) built in 2022 is projected to be usable only until 2025.

The project will seek to achieve the following objectives:

- a. Provide sustainable waste management using environmentally friendly waste treatment technologies in accordance with existing regulations in Indonesia and international best practices.
- b. Engage private financing for capital investment for Project financing given the GCA's limited fiscal capacity.
- c. Bringing international technology and management experience into the Project and transferring international technology and management experience into the Indonesian economy.
- d. Enhance socio-economic and environmental benefits for local communities.
- e. Improve the handling of residual waste that requires landfilling with a quality that can result in the following benefits:
 - Reducing volume of additional leachate that must be treated.
 - Reducing greenhouse gas (GHG) emissions.
 - Reducing the potential presence of disease transmission agents.
 - Reducing odor problems that can disturb residents and reduce land value.

Informasi Proyek*/Project Information*

PJPK GCA	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Governor of the Special Region of Yogyakarta
Lokasi Proyek Project Location	Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Sitimulyo Village, Piyungan District, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)</i>
Lingkup KPBU Scope of PPP	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan desain, pembiayaan, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan infrastruktur penunjang; dan • Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah dan infrastruktur penunjang. • Design, financing, and construction of waste treatment facilities and supporting infrastructure; and • Operation and maintenance of waste treatment facilities and supporting infrastructure.



Mekanisme Pengembalian Investasi Return on Investment Mechanism	<i>Tipping Fee</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp460 miliar - Rp784 miliar/Rp460 billion – Rp784 billion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Period of Cooperation	21,5 tahun (termasuk 1,5 tahun konstruksi) 21.5 years (including 1.5 years of construction)
Tahapan Sections	Penyiapan Proyek (Finalisasi Laporan Awal Kajian Akhir Prastudi Kelayakan) Project Preparation (Finalization of Preliminary Report of Final Feasibility Study)

* berdasarkan *Draft* Laporan Awal FBC Proyek TPAS Piyungan (2022)
based on the FBC Initial Report Draft of the Piyungan TPAS Project (2022)

Pada tanggal 12 Juli 2021, Kementerian Keuangan menyetujui Fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang telah dikirimkan oleh PJKP. Pada tanggal 29 November 2021 Kemenkeu dan PJKP menandatangani Kesepakatan Induk, kemudian Kemenkeu menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada tanggal 16 Desember 2021. Saat ini proyek dalam proses penyusunan Laporan Awal Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (FBC).

On July 12, 2021, the Ministry of Finance approved the PDF Facility for the Project in response to the PDF Request letter submitted by GCA. On November 29, 2021, the Ministry of Finance and GCA signed the Master Agreement, then the Ministry of Finance issued KMK regarding the special assignment to IIGF as the implementing SOE on December 16, 2021. Currently the project is in the process of preparing the Preliminary Report of the Final Feasibility Study (FBC).

Pembangunan Jaringan Gas Kota Batam

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Indonesia bertujuan untuk mendukung program pemerintah untuk mewujudkan bauran energi gas bumi hingga 33% di Tahun 2025. Upaya ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah dalam membangun kedaulatan dan kemandirian di bidang energi yang secara bertahap berdampak terhadap berkurangnya subsidi Pemerintah yang bersumber dari APBN, mewujudkan ketahanan energi nasional serta mendukung program diversifikasi energi dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, dengan pengalihan penggunaan LPG tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg.

Batam City Gas Network Development

The development of natural gas networks for households in Indonesia aims to support the government's program to achieve a natural gas energy mix of up to 33% in 2025, this effort is also a form of support for the Government's policy in building sovereignty and independence in the energy sector which gradually has an impact on reducing government subsidies sourced from the state budget, realizing national energy security and supporting energy diversification programs in reducing dependence on LPG imports, by transferring the use of 3 kg, 12 kg, and 50 kg LPG cylinders.

Dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2019, jumlah konsumsi LPG bersubsidi di Kota Batam terus meningkat dari 28,991 MT hingga mencapai 36,412 MT atau meningkat sekitar 5,0% per tahun. Hal ini berdampak terhadap subsidi LPG dari Pemerintah yang turut meningkat dari Rp139 miliar di tahun 2015 menjadi Rp201,6 miliar di tahun 2019 atau sekitar 9,6% per tahun. Berdasarkan data tersebut, terdapat potensi pengembangan jaringan gas rumah tangga di Kota Batam dengan menggunakan sumber daya nasional dan sekaligus berperan sebagai substitusi besaran subsidi yang diberikan Pemerintah. Oleh karena itu, rencana pengembangan jaringan gas rumah tangga di Kota Batam melalui skema KPBU merupakan salah satu alternatif skema yang dapat dipertimbangkan.

In the period of 2015 to 2019, the amount of subsidized LPG consumption in Batam City continued to increase from 28,991 MT to reach 36,412 MT or an increase of about 5.0% per year. This has an impact on LPG subsidies from the Government which also increased from Rp139 billion in 2015 to Rp201.6 billion in 2019 or about 9.6% per year. Based on these data, there is a potential for the development of household gas network in Batam City using national resources and at the same time acting as a substitute for the amount of subsidy provided by the Government. Therefore, the plan to develop household gas network in Batam City through PPP scheme is one of the alternative schemes that can be considered.

Informasi Proyek/Project Information

PJKP GCA	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Ministry of Energy and Mineral Resources
Lokasi Proyek Project Location	Kota Batam Batam City
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer</i> (DBFO/MT)
Lingkup KPBU Scope of PPP	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Infrastructure Development of Natural Gas Distribution Network for Households

Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp2,98 triliun/trillion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Period of Cooperation	30 tahun/years
Tahapan Sections	Penyiapan Proyek (Kajian Hukum dan Kelembagaan) Project Preparation (Legal and Institutional Studies)

Pada tanggal 7 September 2021, Persetujuan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga Kota Batam telah diberikan sebagai respons atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek yang sebelumnya dikirimkan pada tanggal 9 Juni 2021.

PT PII telah mengirimkan Kajian Kesiapan PT PII dalam melaksanakan penugasan PDF untuk kedua kota, Batam dan Palembang. Kajian tersebut memuat pemahaman mengenai kebutuhan Proyek, rencana pengembangan kajian di bidang hukum, teknis, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, risiko, dukungan dan rencana tindak lanjut. Selain itu, PT PII juga menyampaikan rencana pengelolaan sumber daya untuk mendukung penugasan tersebut terkait rencana waktu, sumber daya manusia, dan kebutuhan sinkronisasi proyek di 2 lokasi berbeda tersebut. Sebagai upaya meminimalisir kemungkinan hambatan terhadap progres proyek bagi PJPK, PT PII juga telah memasukkan kajian awal identifikasi kebutuhan regulasi.

Pada tanggal 10 Juni 2022, Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk, kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PII selaku BUMN pelaksana Penugasan pada tanggal 15 Juli 2022. KMK menyatakan bahwa proyek jaringan gas Batam diharapkan bisa menyelesaikan masalah regulasi terlebih dahulu sehingga diberikan periode 30 bulan untuk hanya menyelesaikan tahapan penyiapan PDF terlebih dahulu. Saat ini proyek sedang dalam penyusunan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) dan penyusunan Kajian Hukum dan Kelembagaan.

Pembangunan Jaringan Gas Kota Palembang

Sebagai Ibukota Sumatra Selatan, kota Palembang merupakan pusat perekonomian dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak dan gas bumi, batu bara, perkebunan kelapa sawit, karet, dan *pulp*. Keberadaan infrastruktur jaringan pipa gas bumi dan potensi pasar pengguna jaringan gas menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk membangun jaringan gas rumah tangga dengan skema KPBU di Kota Palembang.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah telah memberikan persetujuan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga Kota Palembang pada tanggal 7 September 2021 yang merupakan respons dari Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek bersamaan dengan kota Batam pada tanggal 9 Juni 2021.

On September 7, 2021, the approval for the Application for Facility for Preparation and Implementation of PPP Project Transaction for the Construction of Gas Distribution Network for Households in Batam City was given in response to the Application for Facility for Preparation and Implementation of Project Transaction previously submitted on June 9, 2021.

IIGF has submitted a Study of IIGF's Readiness to carry out PDF assignments for both cities, Batam and Palembang. The study contains an understanding of the Project needs, study development plans in the legal, technical, economic, environmental, institutional, risk, support and follow-up plans. In addition, IIGF also submitted a resource management plan to support the assignment related to time plans, human resources, and project synchronization needs in the 2 different locations. In an effort to minimize possible obstacles to project progress for GCA, IIGF has also included an initial study of identifying regulatory needs.

On June 10, 2022, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement, then the Ministry of Finance issued a KMK regarding a special assignment to PII as the implementing SOE on July 15, 2022. The KMK states that the Batam gas network project is expected to resolve the regulatory issues first so a 30-month period is given to only complete the PDF preparation stage first. Currently, the project is in the preparation of Inception Report and Legal and Institutional Studies.

Palembang City Gas Network Development

As the capital city of South Sumatra, Palembang is an economic center with abundant natural resources such as oil and gas, coal, oil palm, rubber and pulp plantations. The existence of natural gas pipeline infrastructure and the potential market for gas network users are the basis for the Government's consideration to build a household gas network under the PPP scheme in Palembang City.

As previously explained, the Government has approved the Application for Facility for Preparation and Implementation of PPP Project Transactions for the Construction of Gas Distribution Networks for Households in Palembang City on September 7, 2021, which is a response to the Application Letter for Submission of Facility for Preparation and Implementation of Project Transactions together with Batam city on June 9, 2021.



Informasi Proyek/Project Information

PJPK GCA	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Directorate General of Oil and Gas (DG Oil and Gas)
Lokasi Proyek Project Location	Rp3,2 triliun/trillion
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer</i> (DBFO/MT)
Lingkup KPBU Scope of PPP	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Infrastructure Development of Natural Gas Distribution Network for Households
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp3,21 triliun/trillion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Period of Cooperation	30 tahun/years
Tahapan Sections	Penyiapan Proyek (Penyusunan Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan) Project Preparation (Preparation of Assignment Agreement and Implementation Agreement)

Pada tanggal 10 Juni 2022, Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk bersamaan dengan proyek jaringan gas Batam. Namun dikarenakan proses kajian dan penyusunan regulasi nasional hanya dimasukkan dalam PDF jaringan gas Batam, jaringan gas Palembang mengalami penundaan dan akhirnya diberikan amandemen Kesepakatan Induk pada tanggal 3 November 2022 disusul dengan KMK pada 28 November 2022. Amandemen ini membuat jaringan gas Palembang memiliki periode 48 bulan untuk tahapan penyiapan dan transaksi. Proyek Palembang diharap dapat berjalan paralel namun tetap mengacu pada hasil penyusunan regulasi di proyek jaringan gas Batam. Saat ini proyek sedang dalam tahapan penyusunan Perjanjian Penugasan dengan PDPPI dan Perjanjian Pelaksanaan dengan PJPK.

Pelaksanaan Jasa Konsultasi (Advisory)

Di luar segmen usaha penjaminan dan PDF, PT PII telah mengembangkan segmen usaha baru di bidang jasa konsultasi (*advisory*) dengan peran utama menggali konsep dan peluang bisnis, baik dari sisi penugasan jenis baru maupun pelaksanaan jasa konsultasi. *Advisory* PT PII hadir untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pemilik proyek maupun *stakeholders* terkait agar dapat memperoleh pendampingan PT PII sejak tahapan awal proyek serta penguatan analisis utamanya pada aspek struktur dan alokasi risiko yang menjadi *added value* Perseroan. Sebagai bentuk komitmen dan upaya persiapan internal Perseroan untuk dapat terjun dalam bidang *advisory*, PT PII kemudian menyusun suatu Kajian Kesiapan, baik dari sisi kompetensi maupun kompetensi, serta identifikasi pemenuhan persyaratan yang diperlukan agar dapat melaksanakan *advisory* secara optimal.

Pada tahun 2021, PT PII mulai menjalankan kegiatan *advisory* melalui *pilot project* Pelabuhan New Palembang Tanjung Carat dimana Perseroan berperan sebagai "*Project Advisor*" melalui skema penunjukan langsung dari Kementerian Perhubungan c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan hasil keluaran berupa dokumen Identifikasi Proyek dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kesiapan Data Dukung untuk Studi Pendahuluan Proyek dan Studi Pendahuluan Pelabuhan Tanjung Carat. Berikut merupakan beberapa kegiatan *advisory* lainnya yang telah dilakukan Perseroan pada 2021-2022, yakni:

On June 10, 2022, the Ministry of Finance and GCA signed the Master Agreement together with the Batam gas network project. However, due to the national review and regulatory process only included in the Batam gas network PDF, the Palembang gas network was delayed and finally granted an amendment to the Master Agreement on November 3, 2022 followed by KMK on November 28, 2022. This amendment gives the Palembang gas network a 48-month period for the preparation and transaction stages. The Palembang project is expected to run in parallel but still refer to the results of the regulatory preparation in the Batam gas network project. Currently, the project is in the stage of drafting Assignment Agreement with PDPPI and Implementation Agreement with GCA.

Implementation of Advisory Services

Besides the Guarantee and PDF business segments, IIGF has developed a new business segment in the field of advisory services with the main role of exploring business concepts and opportunities, both in terms of new types of assignments and the implementation of consulting services. IIGF Advisory is present to answer the needs and requests of project owners and related stakeholders in order to obtain IIGF's assistance since the early stages of the project as well as strengthening the analysis, especially in the aspects of structure and risk allocation which become the Company's added value. As a form of commitment and the Company's internal preparation efforts to be able to engage in the field of advisory, IIGF then compiled a Readiness Study, both in terms of competition and competence, as well as identification of the fulfillment of the requirements needed in order to carry out advisory optimally.

In 2021, IIGF began carrying out advisory activities through the New Palembang Tanjung Carat Port pilot project where the Company acted as "*Project Advisor*" through a direct appointment scheme from the Ministry of Transportation, c.q. Director General of Sea Transportation with output results in the form of Project Identification documents and Preparation of Evaluation Documents for the Readiness of Supporting Data for Project Preliminary Studies and Preliminary Studies of Tanjung Carat Port. The following are some other advisory activities that have been carried out by the Company in 2021-2022 as follows:

1. Penyusunan Pedoman Kajian Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU;
2. Pendampingan Kementerian Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Laut pada proses pengajuan dan perolehan penugasan *Project Development Facility* (PDF) Proyek KPBU Pelabuhan Tanjung Carat;
3. Pendampingan Kementerian Keuangan dalam penyusunan konsep dan penerbitan kerangka regulasi terkait penugasan fasilitas bentuk baru dalam pengelolaan BMN di wilayah IKN Lama; dan
4. Jasa Konsultansi Proyek Pengembangan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Batu Ampar melalui penyusunan kajian hukum & kelembagaan, analisis struktur, analisis risiko, dan mekanisme *de-risking* Proyek.

Kinerja Keuangan Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi

Pada tahun 2022, pendapatan yang diperoleh segmen usaha penyiapan proyek dan pendampingan transaksi sebesar Rp41,10 miliar, meningkat sebesar Rp11,93 miliar atau 40,89% dari tahun 2021 yang sebesar Rp29,17 miliar.

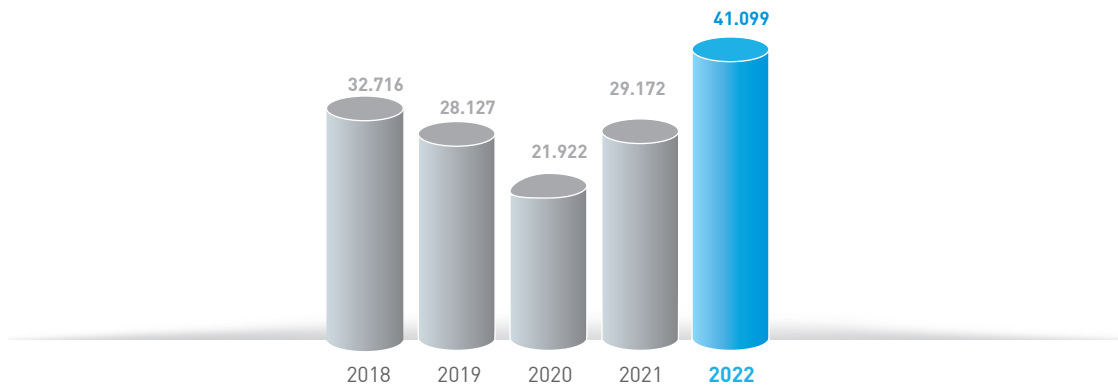
Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (Rp-juta)

1. Preparation of Guidelines for Pre-Feasibility Study of Road and Bridge Projects with PPP Schemes;
2. Assistance to the Ministry of Transportation c.q. Director General of Sea Transportation in the process of submitting and obtaining the assignment of the Project Development Facility (PDF) for the Tanjung Carat Port PPP Project;
3. Assistance to the Ministry of Finance in drafting and issuing a regulatory framework related to the assignment of new forms of facilitation in BMN management in the Old IKN area; and
4. Consultancy Services for the Container Terminal Development Project at Batu Ampar Port through the preparation of legal & institutional studies, structural analysis, risk analysis, and Project de-risking mechanisms.

Financial Performance of Project Preparation and Transaction Advisory Business Segment

In 2022, the revenue earned by the project preparation and transaction advisory business segment amounted to Rp41.10 billion, an increase of Rp11.93 billion or 40.89% from 2021 which amounted to Rp29.17 billion.

Project Preparation and Transaction Advisory Revenue (Rp-million)



SEGMENT PENGELOLAAN DANA INVESTMENT SEGMENT

Kegiatan Operasi dan Usaha Pengelolaan Dana

Dalam segmen Pengelolaan Dana, Perseroan melakukan kegiatan penempatan dana pada instrumen keuangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, di antaranya meliputi instrumen investasi pasar uang, obligasi, dan reksa dana dengan bobot penempatan yang dinamis dilakukan penyesuaian dengan kondisi pasar yang ada untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dengan risiko yang terukur.

Adapun sumber pendapatan usaha PT PII berasal dari aktivitas penjaminan, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi *Project Development Facility*/PDF, serta dari aktivitas pengelolaan dana. Aktivitas pengelolaan dana ini merupakan pendukung proses kegiatan penjaminan dan PDF yang merupakan bisnis inti PT PII. Selain melakukan pengelolaan portofolio instrumen investasi, fungsi pengelolaan dana yang dilakukan meliputi pengelolaan likuiditas keuangan Perseroan dan menjaga kapasitas penjaminan oleh Perseroan.

Kebijakan Strategis dan Produktivitas Pengelolaan Dana

Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, PT PII melakukan penyesuaian strategi pengelolaan dana yang lebih adaptif melalui perubahan bobot portofolio pengelolaan dana, yaitu menambah bobot penempatan pada instrumen obligasi.

Sampai akhir 2022, Perseroan memperoleh pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp793,70 miliar dengan rata-rata tingkat pengembalian bunga sebesar 6,67%, masih lebih tinggi 117 basis poin dibandingkan BI 7D *Repo Rate* pada akhir tahun 2022 sebesar 5,5%. Portofolio investasi Perseroan sampai dengan Desember 2022 terdiri dari investasi atas deposito berjangka 40% dan investasi dengan pendapatan tetap 60%.

Investments Operations and Business Activities

In the Investments segment, the Company conducts fund placement activities in financial instruments that have been stipulated in the provisions, including money market investment instruments, bonds, and mutual funds with dynamic placement weights adjusted to existing market conditions to obtain an optimal rate of return with measurable risk.

The sources of IIGF's business revenue come from Guarantee activities, project preparation and transaction advisory *Project Development Facility*/PDF, as well as from fund management activities. These fund management activities support the process of Guarantee and PDF activities which are IIGF's core business. In addition to managing the investment instrument portfolio, the investments function includes managing the Company's financial liquidity and maintaining the Company's Guarantee capacity.

Strategic Policy and Productivity of investments

In line with the national economic recovery, IIGF adjusted the investments strategy to be more adaptive through changes in the weight of the investment portfolio, namely increasing the weight of placement in bond instruments.

Until the end of 2022, the Company earned income from investments amounted to Rp793.70 billion with an average interest rate of 6.67%, still 117 basis points higher than the BI 7D *Repo Rate* of 5.5% at the end of the year. The Company's investment portfolio as of December 2022 consisted of time deposits 40% and fixed income investments 60%.

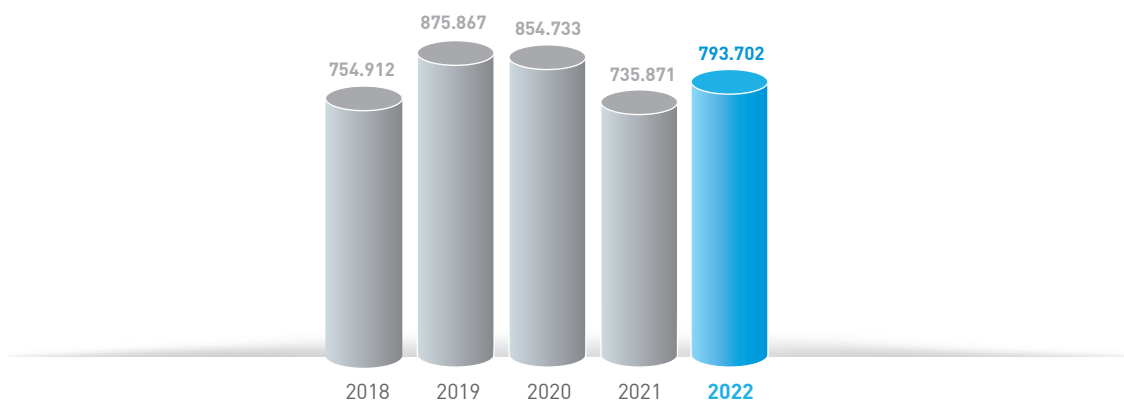


Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Pengelolaan Dana

Komposisi pendapatan dari penjaminan terdiri atas pendapatan provisi dan komisi, pendapatan premi dan pendapatan penjaminan *loss limit*, sedangkan pendapatan dari PDF terdiri dari biaya pelaksanaan penugasan PDF yang telah tercapai penyelesaian dokumen keluarannya sesuai dengan kriteria penagihan dalam Kontrak Penugasan PDF ditambah *opportunity margin*. Sementara itu, pendapatan dari pengelolaan dana diperoleh dari penempatan aset keuangan Perseroan pada berbagai instrumen investasi yang diperkenankan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK No. 95/PMK.08/2017. Beban usaha Perseroan terutama terdiri dari beban penjaminan, beban PDF, beban administrasi dan umum, serta beban pengembangan terkait dengan komunikasi dan sosialisasi bidang usaha Perseroan.

Tahun 2022, Perseroan membukukan pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp793,70 miliar, naik sebesar Rp57,83 miliar atau 7,86% dibandingkan pendapatan pengelolaan dana tahun 2021 sebesar Rp735,87 miliar.

Pendapatan Pengelolaan Dana (Rp-juta)



Profitability and Financial Performance of Fund Management Segment

The composition of revenue from Guarantee consists of fees and commissions, premium income and loss limit Guarantee income, while income from PDF consists of the cost of implementing PDF assignments that have achieved completion of the output document in accordance with the billing criteria in the PDF Assignment Contract plus opportunity margin. Meanwhile, income from investments is derived from the placement of the Company's financial assets in various investment instruments that are permitted in accordance with the provisions required by PMK No. 95/PMK.08/2017. The Company's operating expenses mainly consist of Guarantee Cost, PDF expenses, general and administrative expenses, as well as development expenses related to communication and socialization of the Company's business field.

In 2022, the Company booked income from investments of Rp793.70 billion, an increase of Rp57.83 billion or 7.86% compared to income from investments in 2021 of Rp735.87 billion.

Income from Investments (Rp-million)

SEGMENT LAINNYA OTHER SEGMENTS

Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem infrastruktur, PT PII juga terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman terkait penyediaan proyek infrastruktur di Indonesia, sehingga PT PII dapat mewujudkan visinya untuk menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pengembangan Ekosistem Infrastruktur

Dampak positif dari kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan alternatif mulai terlihat dengan meningkatnya partisipasi investor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Namun demikian, keterbatasan pengetahuan dan kapasitas para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan menjadi tantangan tersendiri untuk penyediaan infrastruktur, khususnya yang menggunakan skema alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Oleh karena itu, PII menjadikan upaya pengembangan ekosistem infrastruktur sebagai salah satu pilar utama kegiatan Perseroan melalui pembentukan IIGF Institute. Inisiatif strategis ini merupakan upaya PT PII untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan melalui diseminasi pemahaman, perencanaan, dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU.

IIGF Institute bertugas untuk menjalankan fungsi *knowledge management* Perseroan, dan memiliki visi utama untuk menciptakan ekosistem pembangunan infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk merealisasikan visi tersebut, kegiatan IIGF Institute berfokus pada Edukasi, Riset, Publikasi, Advokasi Kebijakan dan *Outreach*.

Edukasi

Melalui kegiatan *Capacity Building* dan penyelenggaraan *Certified PPP Professional* (CP3P), pelaksanaan program edukasi bertujuan untuk menyebarkan informasi serta meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan terkait dengan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Untuk menjalankan kegiatan *Capacity Building*, IIGF Institute berkolaborasi dengan Divisi *Guidance and Consultation* yang memegang peran penting sebagai fungsi terdepan dalam berhubungan dengan PJKP dan calon PJKP. Selain dengan pihak internal, IIGF Institute juga menjadi fasilitator pelaksana *capacity building* Kantor Bersama KPBU bekerja sama dengan pihak eksternal di antaranya, dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas serta mitra akademik nasional maupun daerah yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan proyek yang direncanakan.

In order to support the development of the infrastructure ecosystem, IIGF also continues to strive to increase understanding related to the provision of infrastructure projects in Indonesia, so that IIGF can realize its vision to become an active prime mover SOE in accelerating sustainable infrastructure development for improving the quality of life of the Indonesian people.

Infrastructure Ecosystem Development

The positive impact of the Government's policy to accelerate infrastructure development through alternative financing schemes has begun to be seen with the increasing participation of private investors in infrastructure provision. However, the limited knowledge and capacity of stakeholders and policy makers is a challenge for infrastructure provision, especially those using alternative schemes such as Public-Private Partnership (PPP). Therefore, IIGF has made efforts to develop the infrastructure ecosystem as one of the main pillars of the Company's activities through the establishment of IIGF Institute. This strategic initiative is IIGF's effort to increase the capacity of stakeholders through dissemination of understanding, planning, and implementation of infrastructure provision under PPP scheme.

IIGF Institute is tasked with carrying out the Company's knowledge management function, and has a main vision to create a better infrastructure development ecosystem so as to encourage infrastructure development in Indonesia. To realize this vision, IIGF Institute activities focus on Education, Research, Publication, Policy Advocacy and Outreach.

Education

Through Capacity Building activities and the implementation of Certified PPP Professional (CP3P), the implementation of educational programs aims to disseminate information and increase stakeholders' knowledge related to alternative financing for infrastructure development, especially related to the Public Private Partnership (PPP) scheme.

To carry out Capacity Building activities, IIGF Institute collaborates with the Guidance and Consultation Division which plays an important role as the leading function in dealing with GCA and prospective GCA. In addition to internal parties, IIGF Institute also facilitates the implementation of capacity building for PPP Joint Offices in collaboration with external parties, including, in this case, the Ministry of National Development Planning/Bappenas and national and regional academic partners who have knowledge or experience related to the planned project.



Sejalan dengan meredanya pandemi Covid-19, IIGF Institute mulai menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building (CB)* secara tatap muka di tahun 2022 yang meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut:

In line with the easing of the Covid-19 pandemic, IIGF Institute began organizing face-to-face capacity building activities in 2022 which included the following activities:

No	Instansi Agencies	Proyek Projects	Tanggal Date
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Provincial Government of DKI Jakarta	SPAM Djuanda DKI Jakarta	23 - 24 Mar 22
2	Kementerian Luar Negeri Ministry of Foreign Affairs	CB Kemlu - Lokakarya Skema KPBU Hingga Fasilitas Kemudahan Berinvestasi Proyek KPBU CB Ministry of Foreign Affairs - Workshop on PPP Scheme to Facility for Ease of Investing in PPP Projects	5 Apr 22
3	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara Provincial Government	CB KPBU Provinsi Nusa Tenggara Barat CB PPP West Nusa Tenggara Province	12 Mei/May 22
4	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputy for Coordination of Regional Development and Spatial Planning, Coordinating Ministry for Economic Affairs	CB KPBU dan Penjaminan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kemenko Perekonomian CB PPP and National Strategic Project Guarantee (PSN) Coordinating Ministry for Economic Affairs	12 - 13 Mei 22
5	Pemerintah Provinsi Sumatra Utara North Sumatra Provincial Government	CB <i>Kick-Off Meeting</i> Pelaksanaan PDF Proyek KPBU KEK Sei Mangkei Sumatra Utara CB Kick-Off Meeting of PPP Project Implementation PDF SEZ Sei Mangkei North Sumatra	18 Mei/May 22
6	Pemerintah Kota Bitung Bitung City Government	CB Penyusunan Dokumen Pra-Studi Kelayakan Proyek KPBU Pengembangan SPAM Kota Bitung CB Preparation of Pre-Feasibility Study Documents SPAM Bitung City Development PPP Project	30 - 31 Mei/May 22
7	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Universitas Padjadjaran Ministry of Education, Culture, Research, and Technology and Universitas Padjadjaran	CB KPBU Kemendikbudristek dan Kajian Risiko Sektor Rumah Sakit CB PPP Kemendikbudristek and Risk Assessment Hospital Sector	13 Jun 22
8	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Directorate General of State Assets Aceh Region and Aceh Singkil District Government	CB KPBU Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil CB PPP Aceh Singkil District Government	15 Jun 22
9	Universitas Sumatra Utara North Sumatra University	CB KPBU dan Fasilitas Dukungan Pemerintah di Universitas Sumatra Utara CB PPP and Government Support Facility in North Sumatra University	23 Jun 22
10	Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) National Innovation Research Agency (BRIN)	CB KPBU Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) CB PPP National Innovation Research Agency (BRIN)	23 - 25 Jun 22
11	Pemerintah Kota Denpasar Denpasar City Government	CB KPBU SPAM Denpasar CB PPP SPAM Denpasar	7 - 8 Jul 22
12	Universitas Pancasila, Universitas Padjadjaran, dan UNIID Pancasila University, University Padjadjaran, and UNIID	CB Penguatan KPBU di Lingkungan Perguruan Tinggi UNIID CB PPP Strengthening in Higher Education Environment UNIID	21 Jul 22
13	Universitas Brawijaya Brawijaya University	CB KPBU Universitas Brawijaya CB PPP Universitas Brawijaya	2 Ags/Aug 22
14	Pemerintah Provinsi Sumatra Utara North Sumatra Provincial Government	CB KPBU Proyek SPAM Karo Sumatra Utara CB PPP SPAM Karo North Sumatra Project	7 - 8 Sep 22
15	PT Trans Jakarta Propertindo	CB KPBU Transjakarta CB PPP Transjakarta	24 - 25 Okt/Oct 22
16	Pemerintah Kabupaten Madiun Madiun District Government	KPDBU APJ Sarasehan Malang KPDBU APJ Workshop Malang	7 - 8 Nov 22

No	Instansi Agencies	Proyek Projects	Tanggal Date
17	RSUD Moch. Zayn	CB RSUD Moh. Zayn Sampang	22 - 23 Nov 22
18	LRT Jakarta	CB Jakpro LRT Jakarta	6 Des/Dec 22
19	Pemerintah Kabupaten Sukabumi Sukabumi District Government	CB KPBU SPAM Sukabumi CB PPP SPAM Sukabumi	22 Des/Dec 22

Selain kegiatan *capacity building*, IIGF Institute juga berupaya meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di bidang infrastruktur guna memastikan tercapainya peningkatan kapasitas ekosistem infrastruktur atas skema KPBU.

Sejak tahun 2019, IIGF Institute telah resmi menjadi *Accredited Training Organization (ATO)* untuk *Certified PPP Professional (CP3P)* dari *Accredited Professional Manager Globally (APMG)*. Program CP3P merupakan program sertifikasi kompetensi KPBU berstandar internasional yang dikembangkan oleh *World Bank Group (WBG)* bersama *Asian Development Bank (ADB)*, *European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)*, *Islamic Development Bank (IsDB)*, dan *Inter-American Development Bank (IDB)* dan sebagian didanai oleh *Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF)*. Program inovasi dari *World Bank Group (WBG)* tersebut memiliki visi bersama yaitu untuk mencapai peningkatan kinerja PPP secara global.

Pelaksanaan program CP3P bertujuan untuk membekali individu, para pemangku kepentingan, serta para profesional mengenai praktik-praktik terbaik KPBU level internasional. Para peserta yang telah mengikuti program tersebut diharapkan dapat menciptakan *framework* KPBU yang lebih optimal, meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan proyek KPBU yang berkualitas, meningkatkan kapabilitas dalam hal pendampingan penyiapan proyek serta mendapatkan peluang untuk mengembangkan bisnis pada proyek KPBU.

Program Sertifikasi CP3P dapat diikuti oleh kalangan umum dari berbagai disiplin ilmu ataupun sektor, terutama bagi para praktisi/profesional KPBU di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Praktisi KPBU, Investor, Operator dan Lembaga Keuangan, serta Konsultan (Keuangan, Hukum, dan Teknis) yang ingin memperoleh kredensial KPBU yang dapat diakui secara global.

Selama tahun 2022, ATO PT PII melalui IIGF Institute telah melaksanakan kegiatan Program CP3P *Level Foundation* sebanyak 5 *batch* dengan tingkat kelulusan rata-rata 78%, sebagai berikut:

In addition to capacity building activities, IIGF Institute also seeks to increase the capacity of stakeholders in the infrastructure sector to ensure the achievement of infrastructure ecosystem capacity building on PPP schemes.

Since 2019, IIGF Institute has officially become an Accredited Training Organization (ATO) for Certified PPP Professional (CP3P) from Accrediting Professional Managers Globally (APMG). The CP3P program is an international standard PPP competency certification program developed by the World Bank Group (WBG) together with the Asian Development Bank (ADB), European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (IsDB), and Inter-American Development Bank (IDB) and partially funded by the Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF). This innovative program of the World Bank Group (WBG) has a shared vision of achieving improved PPP performance globally.

The implementation of the CP3P program aims to equip individuals, stakeholders, and professionals on international PPP best practices. Participants who have participated in the program are expected to be able to create a more optimal PPP framework, improve their ability to produce quality PPP projects, increase their capabilities in terms of project preparation assistance and get opportunities to develop business on PPP projects.

The CP3P Certification Program can be followed by the general public from various disciplines or sectors, especially for PPP practitioners / professionals in Ministries / Agencies and Local Governments, PPP Practitioners, Investors, Operators and Financial Institutions, and Consultants (Financial, Legal, and Technical) who want to obtain PPP credentials that can be recognized globally.

During 2022, ATO IIGF through IIGF Institute has carried out 5 batches of CP3P Level Foundation Program activities with an average pass rate of 78%, as follows:

No	Kegiatan Events	Peserta Participants
1	<i>Certified PPP Professional (CP3P) Level Foundation Batch 8</i>	Karyawan PT PII IIGF Employees
2	<i>Certified PPP Professional (CP3P) Level Foundation Batch 9</i>	LMAN, Hanafiah Ponggawa & Partners Law Firm, Konsultan
3	<i>Certified PPP Professional (CP3P) Level Foundation Batch 10</i>	Pemkab Karo, Universitas Padjadjaran, Kementerian ESDM, PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), Pemprov Sumatera Utara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, BPK, Pemprov Jawa Timur, Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo Karo regency government, Padjadjaran University, Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Nusantara Industrial Area (KINRA), North Sumatra Provincial Government, Ministry of Environment and Forestry, Ministry Transportation, Audit Board of the Republic of Indonesia, East Java provincial government, Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia, Ministry of Communication and Information



No	Kegiatan Events	Peserta Participants
4	Certified PPP Professional (CP3P) Level Foundation Batch 11	BPKH, Deloitte, Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP) Law Firm, PT. ITS Tekno Sains
5	Certified PPP Professional (CP3P) Level Preparation Batch 1	Karyawan PT PII IIGF Employees

Per 31 Desember 2022, ATO PT PII telah memiliki 8 *Accredited Trainers* dengan rincian 7 *Accredited Trainers* dari internal karyawan dan 1 *Accredited Trainer* dari eksternal yaitu Kementerian PPN/Bappenas. Melalui penyelenggaraan Program CP3P baik Level *Foundation* maupun *Preparation* hingga Desember 2022, ATO PT PII telah memiliki 171 orang yang telah tersertifikasi CP3P Level *Foundation* dimana 94 orang di antaranya merupakan karyawan PT PII serta 14 orang telah tersertifikasi CP3P Level *Preparation*. Adanya personel bersertifikat dan ditunjang dengan pengalaman industri KPBU selama ini, PT PII melalui IIGF Institute semakin kokoh dalam membantu para pemangku kepentingan utama seperti pembuat kebijakan, pemilik proyek, investor, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU.

Selain itu, ATO PT PII juga menorehkan prestasi lainnya yaitu melaksanakan Program CP3P pertama melalui dana hibah dari *International Development Agency* yang diikuti oleh 15 peserta dari berbagai instansi baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Akademisi. ATO PT PII juga memiliki penambahan *Accredited Trainer* pada Level *Preparation* serta secara konsisten melakukan peningkatan kompetensi bagi para *trainer* melalui kegiatan *training*.

Riset dan Publikasi

Sejak tahun 2015 IIGF Institute telah melaksanakan berbagai riset yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti Kementerian dan Lembaga teknis terkait, pemilik proyek, akademisi dan universitas serta Lembaga Non-Pemerintahan. Hasil riset diharapkan dapat menjawab berbagai macam permasalahan yang muncul dari proyek-proyek infrastruktur di berbagai sektor dengan luasnya cakupan masukan dan perspektif dari berbagai pihak. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Indonesia.

Sepanjang tahun 2022, rincian kegiatan riset dan publikasi PT PII adalah sebagai berikut:

1. Riset
 - a. Studi Pendahuluan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Padjadjaran
 - b. Kajian *Small Scale Public-Private Partnership* (PPP)
 - c. Kajian Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Proyek Infrastruktur (Proyek Palapa Ring, SPAM Umbulan, dan KEK Mandalika)
2. Publikasi
 - a. *Journal of Infrastructure Policy and Management* (JIPM) Volume 4
 - b. *Journal of Infrastructure Policy and Management* (JIPM) Volume 5
 - c. *Indonesia Infrastructure Roundtable* (IIR) 23 Case Relevance - *Promoting Resilient Infrastructure and PPP*

As of December 31, 2022, ATO II of IIGF has had 8 Accredited Trainers with details of 7 Accredited Trainers from internal employees and 1 Accredited Trainer from external, namely the Ministry of National Development Planning/Bappenas. Through the implementation of the CP3P Program both at the Foundation and Preparation Levels until December 2022, ATO IIGF has 171 people who have been certified at the CP3P Foundation Level, of which 94 people are IIGF employees and 14 people have been certified at the CP3P Preparation Level. The existence of certified personnel and supported by the experience of the PPP industry so far, IIGF through IIGF Institute is increasingly strong in helping key stakeholders such as policy makers, project owners, investors, academics, media, and other stakeholders to learn more about infrastructure provision through the PPP scheme.

In addition, ATO of IIGF also made another achievement, namely implementing the first CP3P Program through a grant from the International Development Agency which was attended by 15 participants from various agencies including Ministries/Institutions, Local Governments, and Academics. ATO IIGF also has the addition of Accredited Trainers at the Preparation Level and consistently improves the competence of trainers through training activities.

Research and Publication

Since 2015, IIGF Institute has conducted various researches involving stakeholders such as relevant Ministries and technical institutions, project owners, academics and universities as well as Non-Governmental Organizations. The results of the research are expected to answer a wide range of problems arising from infrastructure projects in various sectors with a wide range of inputs and perspectives from various parties. Thus, it can encourage the implementation of better infrastructure development in Indonesia.

Throughout 2022, the details of IIGF's research and publication activities are as follows:

1. Research
 - a. Preliminary Study of State University Hospital of Padjadjaran University
 - b. Small Scale Public-Private Partnership (PPP) Study
 - c. Study on Economic and Social Impact Analysis of Infrastructure Projects (Palapa Ring Project, Umbulan SPAM, and Mandalika SEZ)
2. Publication
 - a. *Journal of Infrastructure Policy and Management* (JIPM) Volume 4
 - b. *Journal of Infrastructure Policy and Management* (JIPM) Volume 5
 - c. *Indonesia Infrastructure Roundtable* (IIR) 23 Case Relevance - *Promoting Resilient Infrastructure and PPPs*

- d. *Value for Money*: Penentuan Skema Pengadaan Infrastruktur
- e. *Compendium Policy Brief Task Force 8 T20*

Advokasi Kebijakan dan Outreach

Untuk memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan, PT PII melalui IIGF Institute menyelenggarakan berbagai kegiatan melalui kolaborasi dengan mitra strategis di level nasional dan internasional untuk mendorong penyusunan dan implementasi kebijakan yang lebih baik antara lain, K/L (Kementerian/Lembaga), Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan Institusi sejenis lainnya.

Hingga akhir tahun 2022, IIGF Institute telah menjalin kerja sama dengan 35 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang tergabung dalam University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID), yaitu wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman serta harmonisasi kebijakan. Melalui UNIID diharapkan dapat mengakomodir seluruh potensi yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi di bidang pembangunan dan penyediaan Infrastruktur.

Sepanjang tahun 2022, kegiatan *outreach* yang dilaksanakan meliputi:

No	Kegiatan Events	Topik/Tema dan Case Study Topic/Theme and Case Study	Universitas Universities
1	Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi T20 23 rd Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) T20 Edition	Equitable Risk Allocation	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University
2	Simposium V - Penguatan KPBU di Lingkungan Perguruan Tinggi Symposium V - Strengthening PPP in Higher Education	Kolaborasi Keilmuan dan Kepakaran Dalam mendukung Infrastruktur Indonesia Scientific Collaboration and Expertise in Support of Indonesian Infrastructure	Universitas Pancasila Pancasila University

Selain itu, terdapat kegiatan Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan.

Sepanjang tahun 2022, PT PII mendukung berbagai kegiatan Kampus Merdeka dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan Events	Topik Kegiatan Topics	Universitas Universities
1	Riset Kampus Merdeka Merdeka Campus Research	Penguatan Kompetensi tentang KPBU dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Strengthening Competence on PPP in Supporting Infrastructure Development in Indonesia	Universitas Padjadjaran Padjadjaran University
2	Praktisi Mengajar Teaching Practitioner	Mata Kuliah Perencanaan Infrastruktur Berkelanjutan Sustainable Infrastructure Planning Course	Universitas Brawijaya Brawijaya Universitas

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Lainnya

Hingga akhir tahun 2022, Perseroan membukukan pendapatan lainnya sebesar Rp935,3 juta, di mana di tahun sebelumnya Perseroan belum membukukan pendapatan lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan, pendapatan lainnya ini diperoleh utamanya dari penyelenggaraan pelatihan CP3P.

- d. *Value for Money*: Determining Infrastructure Procurement Schemes
- e. *Compendium Policy Brief Task Force 8 T20*

Policy Advocacy and Outreach

To expand stakeholder engagement, IIGF through IIGF Institute organizes various activities through collaboration with strategic partners at the national and international levels to encourage better policy formulation and implementation, among others, K/L (Ministries/Institutions), Universities, Research Institutions and other similar Institutions.

As of the end of 2022, IIGF Institute has established cooperation with 35 universities throughout Indonesia, which are members of the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID), which is a forum for sharing information and experiences as well as policy harmonization. Through UNIID, it is hoped that it can accommodate all the potential possessed by each university in the field of infrastructure development and provision.

In 2022, outreach activities carried out include:

In addition, there are Merdeka Campus activities which are part of the Merdeka Belajar policy by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia which provides opportunities for students and female students to hone their abilities according to their talents and interests by going directly to the world of work in preparation for their future careers.

In 2022, IIGF supported various Merdeka Campus activities with the following details:

Profitability and Financial Performance of Other Segments

As of the end of 2022, the Company recorded other income of Rp935.3 million, while in the previous year the Company had not recorded other income. As explained, this other income was derived mainly from the organization of CP3P training.



ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECT

Sejak tahun 2018 PT PII telah melaksanakan kegiatan pendampingan atas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek KPBU melalui penugasan PDF dari Kementerian Keuangan. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan tidak lagi hanya terbatas pada penjaminan KPBU, tetapi juga dapat melakukan pendampingan, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Sesuai dengan mandat Pemerintah yang tertuang dalam PP No. 55/2009, PT PII terus melanjutkan pengembangan perluasan lingkup atas kegiatan usaha dari tahun-tahun sebelumnya dengan memberikan Penjaminan Pemerintah di bidang lainnya selain infrastruktur. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 211/2020") dan PMK 98/2020, PT PII juga berperan serta dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("PMK 30/2021"), PT PII kembali mendapat perluasan mandat untuk memberikan Penjaminan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan PSN dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan PSN.

Strategi Pemasaran

PT PII menjalankan strategi pemasaran melalui koordinasi dan komunikasi aktif dengan Kantor Bersama KPBU, calon PJPK, dan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka pengusahaan proyek KPBU melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan *hybrid* baik secara luring & daring maupun secara daring (*online*).

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, Perseroan juga berupaya memanfaatkan aplikasi dan platform digital untuk mendukung kegiatan pemasaran Perseroan dan sosialisasi mengenai skema KPBU dan peran PT PII kepada pemangku kepentingan.

Untuk mendukung PJPK dalam penyiapan proyek KPBU, PT PII secara aktif telah mempertemukan kebutuhan PJPK dalam penyusunan dokumen studi dengan para lembaga ataupun donor yang dapat memberikan bantuan konsultan dalam pembuatan kajian tersebut. Dengan demikian, kualitas dan kecepatan proyek secara keseluruhan diharapkan dapat mengalami peningkatan.

Since 2018, IIGF has carried out advisory activities for the preparation and implementation of PPP project transactions through PDF assignments from the Ministry of Finance. Thus, the scope of the Company's business activities is no longer limited to PPP Guarantees, but can also provide assistance, both from the preparation stage to transaction implementation.

In accordance with the Government's mandate as stipulated in Government Regulation No. 55/2009, IIGF continues to develop the expansion of the scope of business activities from previous years by providing Government Guarantee in other fields besides infrastructure. In addition, as stipulated in Ministry of Finance Regulation No. 211/PMK.08/2020 concerning Procedures for Providing Government Guarantee for State-Owned Enterprises in the context of Implementing the National Economic Recovery Program ("PMK 211/2020") and PMK 98/2020, IIGF also participates in the National Economic Recovery Program.

Based on the Ministry of Finance Regulation No. 30/PMK.08/2021 concerning Procedures for Providing Central Government Guarantee to Accelerate the Implementation of National Strategic Projects ("PMK 30/2021"), IIGF has again received an expanded mandate to provide Guarantees for political risks that may hinder the implementation of PSN and may have a financial impact on the Special Purpose Vehicle implementing PSN.

Marketing Strategy

IIGF carries out a marketing strategy through active coordination and communication with the PPP Joint Office, prospective GCA, and related stakeholders in the context of PPP project exploitation through a series of hybrid activities (offline and online) as well as online activities.

In line with rapid technological developments, the Company also seeks to utilize digital applications and platforms to support the Company's marketing activities and socialization of the PPP scheme and the role of IIGF to stakeholders.

To support GCA in preparing PPP projects, IIGF has actively brought together the needs of GCA in preparing study documents with institutions or donors who can provide consultant assistance in making these studies. Thus, the overall quality and speed of the project is expected to increase.

Sepanjang tahun 2022, PT PII secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi, pemberian pemahaman, dan pendampingan mengenai skema KPBU dan peran PT PII secara menyeluruh kepada calon PJPK dan potential investor.

Dalam hal pendanaan proyek infrastruktur, di tahun 2022, PT PII juga telah melakukan sosialisasi dan diskusi secara intens dengan pihak perbankan. Melalui kegiatan ini, perbankan diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya akan skema KPBU secara umum dan penjaminan infrastruktur secara khusus. Dengan demikian, minat mereka dalam berinvestasi pada proyek infrastruktur di Indonesia dengan skema KPBU turut meningkat. Selain itu, PT PII terus mendukung perbaikan ekosistem dalam penerapan skema KPBU yang salah satunya dengan mengadakan forum diskusi guna mendapatkan masukan dari investor dan perbankan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Sesuai dengan bidang usaha yang dijalannya, PT PII terus melakukan pemetaan atas potensi Penjaminan Pemerintah dengan tetap mengacu kepada dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Daftar Rencana KPBU/ PPP Book, dokumen perencanaan pemerintah pusat dan daerah, dokumen perencanaan dari sektor infrastruktur terkait, dan sebagainya. Selanjutnya, PT PII akan menyusun *pipeline project* dengan kategori *long list* dan *short list projects* dan merumuskan strategi dengan melakukan analisis terhadap peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh proyek tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pengusahaan sesuai dengan bidang usaha yang dijalani Perseroan hingga akhirnya ditentukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan demi mendukung kesinambungan kinerja usaha sampai pada akhirnya menempatkan posisi Perseroan dalam pasar Penjaminan dan Infrastruktur. Strategi pemasaran tersebut didukung dengan alokasi anggaran dan sumber daya yang efisien, sehingga Perseroan dapat mengimplementasikan rencana dengan lebih terstruktur dan optimal.

Pangsa Pasar

Pada tahun 2022, Strategi *Pipeline* KBPU meliputi *initial project identification*, *scanning*, dan penerapan *skema Pre-screening* terhadap potensi proyek-proyek KBPU dari berbagai sumber yang menghasilkan *Short list & Long list Projects* hingga persiapan pelaksanaan *Screening Project* yang berfokus pada keberlanjutan proyek dan kepastian proyek dapat diterima oleh investor serta lender. Adapun pangsa pasar PT PII meliputi:

1. Kementerian Pusat yang telah melaksanakan proyek KBPU namun masih memiliki rencana proyek lainnya yang akan dilaksanakan dengan menerapkan skema KPBU dan berpotensi mendapat Penjaminan Pemerintah;
2. Pemerintah daerah yang belum pernah melaksanakan pengembangan proyek infrastruktur dengan menerapkan skema KPBU; dan
3. Pemerintah daerah yang telah menerapkan skema KPBU namun masih memiliki rencana proyek lainnya yang berpotensi dilaksanakan dengan menerapkan skema KPBU dan mendapat Penjaminan Pemerintah.

Throughout 2022, IIGF actively carried out socialization activities, provided understanding, and assistance regarding the PPP scheme and the role of IIGF as a whole to prospective GCA and potential investors.

In terms of infrastructure project funding, in 2022, IIGF has also conducted intense socialization and discussions with banks. Through this activity, banks are expected to increase their understanding of the PPP scheme in general and infrastructure Guarantees in particular. Thus, their interest in investing in infrastructure projects in Indonesia with the PPP scheme will also increase. In addition, IIGF continues to support the improvement of the ecosystem in implementing the PPP scheme, one of which is by holding a discussion forum to get input from investors and banks together with the Ministry of Finance and the Ministry of National Development Planning/Bappenas.

In accordance with its line of business, IIGF continues to map the potential for Government Guarantee by referring to documents issued by the Government such as the PPP Plan List / PPP Book, central and regional government planning documents, planning documents from related infrastructure sectors, and so on. Furthermore, IIGF will compile a pipeline project with the categories of long list and short list projects and formulate a strategy by analyzing the opportunities and challenges that will be faced by the project. This needs to be done to support the business in accordance with the field of business undertaken by the Company until finally the activities that need to be carried out in order to support the sustainability of business performance to ultimately position the Company in the Guarantee and Infrastructure market. The marketing strategy is supported by an efficient allocation of budget and resources, so that the Company can implement the plan in a more structured and optimal manner.

Market Share

In 2022, the KBPU Pipeline Strategy includes initial project identification, scanning, and implementation of Pre-screening schemes for potential PPP projects from various sources resulting in Short list & Long list Projects to preparation for Screening Project implementation which focuses on project sustainability and certainty that the project can be accepted by investors and lenders. IIGF's market share includes:

1. Central Ministries that have implemented PPP projects but still have other project plans that will be implemented by applying the PPP scheme and have the potential to receive Government Guarantee;
2. Local governments that have never implemented the development of infrastructure projects by implementing the PPP scheme; and
3. Local governments that have implemented the PPP scheme but still have other project plans that have the potential to be implemented by implementing the PPP scheme and receiving a Government Guarantee.



TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) dengan rekan penanggung jawab adalah Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA, auditor independen, dalam laporannya masing-masing tertanggal 27 Februari 2023 dan 25 Februari 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia.

Analysis and discussion of financial performance in this annual report refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2022 and 2021 which have been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network) with the partner in charge is Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA, independent auditor, in their reports dated February 27, 2023 and February 25, 2022 with unmodified opinion.

The Company's financial statements was prepared in line with Indonesian Financial Accounting Standards (FAS), which include Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountants.

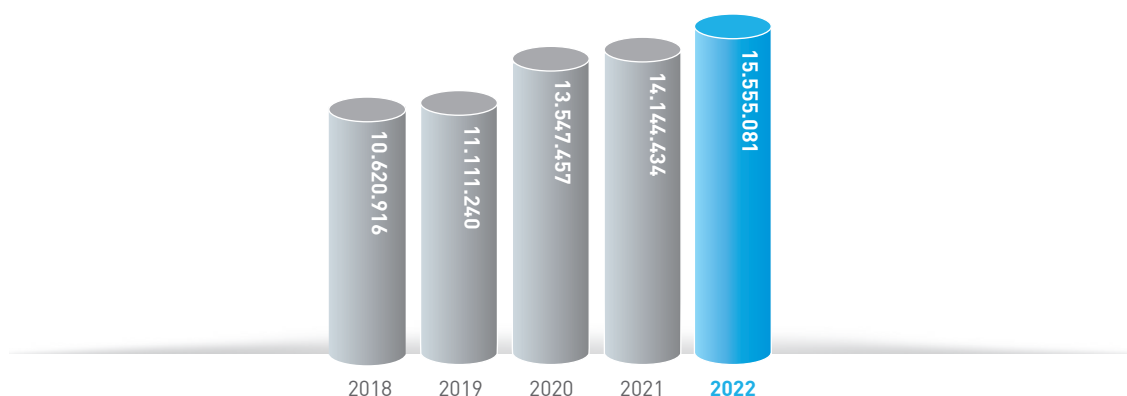
Laporan Posisi Keuangan

Posisi Keuangan Konsolidasian	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Financial Position
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Aset	15.555.081	14.144.434	1.410.647	9,97%	Assets
Liabilitas	401.612	355.720	45.892	12,90%	Liabilities
Ekuitas	15.153.469	13.788.714	1.364.755	9,90%	Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	15.555.081	14.144.434	1.410.647	9,97%	Total Liabilities and Equity

Statements of Financial Position

Aset

Perkembangan Jumlah Aset 2018-2022 (Rp-juta)



Total Aset tahun 2022 mencapai Rp15,56 triliun, mengalami peningkatan 9,97% dibandingkan Total Aset tahun 2021 sebesar Rp14,14 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2018-2022, Total Aset PT PII mengalami peningkatan 7,92%.

ASSETS

Development of Total Assets in 2018-2022 (Rp-million)

IIGF's Total Assets in 2022 reached Rp15.56 trillion, experienced an increase of 9.97% compared to the Total Assets in 2021 of Rp14.14 trillion. At the 2018-2022 Compound Annual Growth Rate (CAGR), IIGF's Total Assets experienced an increase of 7.92%.

Peningkatan jumlah aset terutama disebabkan oleh adanya kenaikan investasi, setelah dikurangi dengan penurunan kas dan setara kas, yang terutama disebabkan oleh PMN yang diterima pada akhir tahun 2022.

The increase in total assets was mainly due to an increase in investments, net of a decrease in cash and cash equivalents, which was mainly due to the PMN received at the end of 2022.

Kinerja Aset 2021-2022

Asset Performance in 2021-2022

Aset	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Assets
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas	134.306	5.893.948	(5.759.642)	(97,72%)	Cash and Cash Equivalents
Investasi	15.008.164	7.948.301	7.059.863	88,82%	Investment
Piutang Usaha	294.720	169.217	125.503	74,17%	Account Receivables
Piutang Lainnya	9.885	10.735	(850)	(7,92%)	Other Receivables
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	2.826	6.734	(3.908)	(58,05%)	Prepaid Expenses and Advances
Aset Tetap	4.896	8.141	(3.245)	(39,86%)	Fixed Assets
Aset Hak Guna	12.573	31.433	(18.860)	(60,00%)	Right-of-Use Assets
Aset tak Berwujud	5.470	3.242	2.228	68,72%	Intangible Assets
Beban Tanggahan	5.663	7.571	(1.908)	(25,20%)	Deferred Expenses
Pajak Dibayar Dimuka	2.015	1.613	402	24,92%	Prepaid Tax
Aset Pajak Tanggahan	69.194	58.130	11.064	19,03%	Deferred Tax Assets
Uang Jaminan yang Dapat Dikembalikan	5.369	5.369	-	0,00%	Refundable Deposits
Jumlah Aset	15.555.081	14.144.434	1.410.647	9,97%	Total Assets

Kas dan Setara Kas

Posisi kas dan setara kas per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp134,31 miliar, turun 97,72% terhadap posisi kas dan setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp5,89 triliun. Penurunan pada kas dan setara kas ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun.

Cash and Cash Equivalents

The position of cash and cash equivalents as of December 31, 2022 was recorded at Rp134.31 billion, decreased by 97.72% to the position of cash and cash equivalents as of December 31, 2021 of Rp5.89 trillion. The decrease in cash and cash equivalents was due to increase in time deposit placement with original maturities more than 3 months up to 1 year period

Investasi

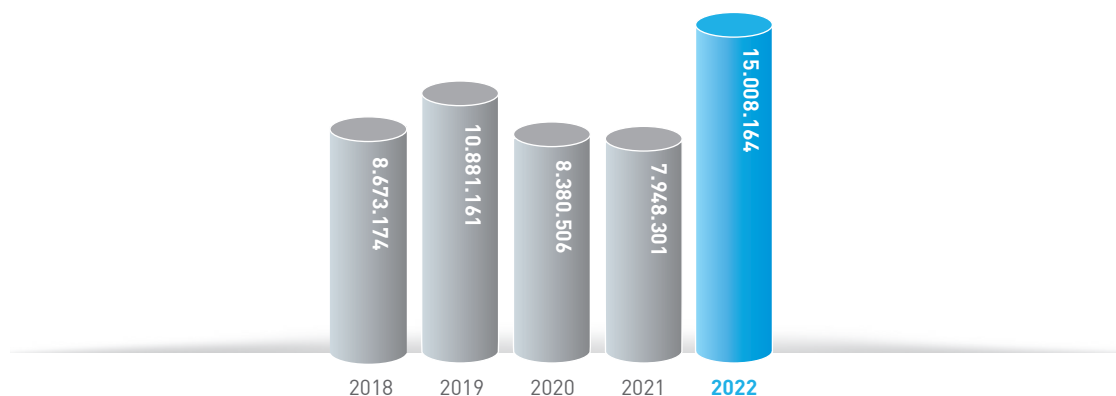
Portofolio investasi Perseroan per 31 Desember 2022 mencapai Rp15 triliun, meningkat 88,82% terhadap posisi investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp7,95 triliun. Kenaikan investasi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun

Investment

The Company's investment portfolio as of December 31, 2022 reached Rp15 trillion, increased by 88.82% against the investment position as of December 31, 2021 of Rp7.95 trillion. The increase in investment was mainly due to an increase in the placement of with original maturities more than 3 months up to 1 year period.

Investasi 2018-2022 (Rp-juta)

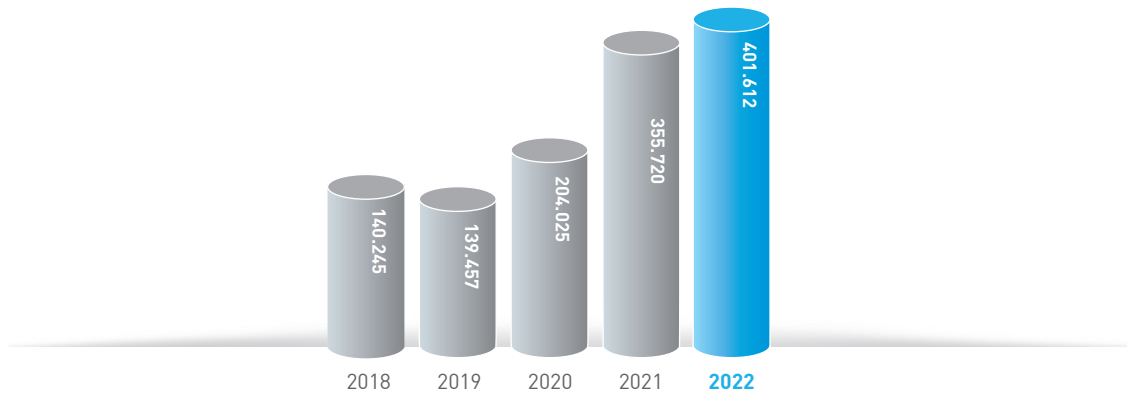
Investment in 2018-2022 (Rp-million)





Liabilitas

Perkembangan Jumlah Liabilitas 2018-2022 (Rp-juta)



Total Liabilitas PT PII tahun 2022 mencapai Rp401,61 miliar, mengalami peningkatan 35,54% dibandingkan Total Liabilitas tahun 2021 sebesar Rp355,72 miliar.

Liabilities

Development of Total Liabilities in 2018-2022 (Rp-million)

IIGF's Total Liabilities in 2022 reached Rp401.61 billion, an increase of 35.54% compared to the Total Liabilities in 2021 of Rp355.72 billion.

Kinerja Liabilitas 2021-2022

Liability Performance in 2021-2022

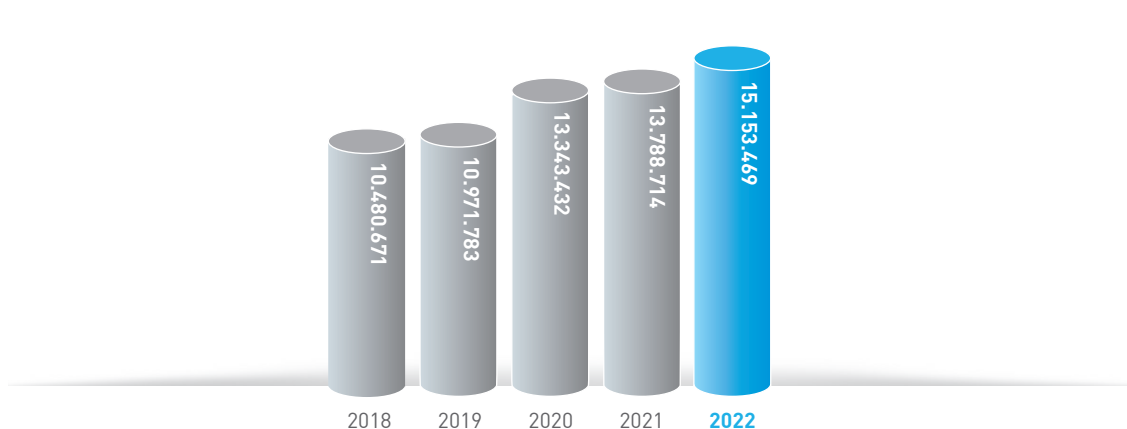
Liabilitas	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Liabilities
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Utang Usaha	9.993	7.373	2.620	35,54%	Account Payables
Utang Pajak	3.780	4.421	(641)	(14,51%)	Tax Payables
Biaya yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain	135.669	65.282	70.387	107,82%	Accrued Expenses, Provisions, and Other Payables
Pendapatan Tangguhan	169.932	171.117	(1.185)	(0,69%)	Unearned Income
Liabilitas Sewa Pembiayaan	8.546	33.504	(24.958)	(74,49%)	Finance Lease Liabilities
Pinjaman Penerusan	55.127	55.127	-	0,00%	Two-step Loans
Liabilitas Imbalan Kerja	18.565	18.896	(331)	(1,75%)	Employee Benefits Obligation
Jumlah Liabilitas	401.612	355.720	45.892	12,90%	Total Liabilities

Kenaikan liabilitas tersebut terutama disebabkan kenaikan pada biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain sebesar Rp70,39 miliar atau 107,82%.

The increase in liabilities was mainly due to an increase in accrued expenses, provisions and other payables of Rp70.39 billion or 107.82%.

Ekuitas

Perkembangan Jumlah Ekuitas 2018-2022 (Rp-juta)



Equity

Development of Total Equity in 2018-2022 (Rp-million)

Total Ekuitas PT PII tahun 2022 mencapai Rp15,15 triliun, mengalami peningkatan 9,90% dibandingkan Total Ekuitas tahun 2021 sebesar Rp13,79 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2018-2022, Total Ekuitas PT PII mengalami pertumbuhan 7,65%.

IIGF's Total Equity in 2022 reached Rp15.15 trillion, an increase of 9.90% compared to Total Equity in 2021 of Rp13.79 trillion. At the 2018-2022 Compound Annual Growth Rate (CAGR), IIGF's Total Equity grew by 7.65%

Kinerja Ekuitas 2021-2022

Equity Performance in 2021-2022

Ekuitas	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Equity
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Modal Saham	10.655.000	9.570.000	1.085.000	11,34%	Share Capital
Laba Belum Direalisasi atas Kepemilikan Aset Keuangan	20.605	300.351	(279.746)	(93,14%)	Unrealized Profit from Financial Assets
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial, Setelah Pajak	5.907	4.229	1.678	39,68%	Profit/(Loss) from Actuarial, Net of Tax
Saldo Laba:					Retained Earnings:
Ditentukan Penggunaannya – Cadangan Wajib	228.769	197.499	31.270	15,83%	Appropriated – Statutory Reserve
Belum Ditentukan Penggunaannya	4.243.188	3.716.635	526.553	14,17%	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	15.153.469	13.788.714	1.364.755	9,90%	Total Equity

Kenaikan posisi ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021 tersebut disebabkan karena adanya penambahan modal saham serta meningkatnya saldo laba.

The increase in the Company's equity position as of December 31, 2021 was due to the addition of share capital and the increase in retained earnings.

Kinerja Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Performance of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Kinerja Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2021-2022

Performance of Profit or Loss and Other Comprehensive Income in 2021-2022

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Profit or Loss and Other Comprehensive Income
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan	1.088.852	922.507	166.345	18,03%	Revenue
Beban Usaha	(386.216)	(333.941)	(52.275)	15,65%	Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	702.636	588.566	114.070	19,38%	Profit Before Income Tax
Manfaat Pajak Penghasilan	11.537	36.836	(25.299)	(68,68%)	Income Tax Benefit
Laba Tahun Berjalan	714.173	625.402	88.771	14,19%	Profit for the Year
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak	(278.069)	6.049	(284.118)	(4.696,94%)	Other Comprehensive (Loss)/Income for the Year, Net of Tax
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	436.104	631.451	(195.347)	(30,94%)	Total Comprehensive Income for the Year

Pendapatan

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bagian "Tinjauan Operasi per Segmen Usaha" dalam bab ini, pendapatan PT PII didapatkan dari pendapatan Penjaminan, pendapatan Pengelolaan Dana, dan pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi.

Revenue

As explained in detail in the "Operating Review per Business Segment" section in this chapter, IIGF's revenue is derived from Guarantee Income from Investments, and revenue from Project Preparation and Transaction Advisory.



Kinerja Pendapatan 2021-2022

Revenue Performance in 2021-2022

Pendapatan	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Revenue
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Penjaminan	252.574	156.529	96.045	61,36%	Revenue from Guarantee
Pendapatan Pengelolaan Dana	793.702	735.871	57.831	7,86%	Income from Investments
Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi	41.099	29.172	11.927	40,89%	Revenue from Project Preparation and Transaction Advisory
Pendapatan Lainnya	1.477	935	542	57,97%	Other Income
Jumlah Pendapatan	1.088.852	922.507	166.345	18,03%	Total Revenue

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,089 triliun, naik 18,03% atau setara dengan Rp166,35 miliar terhadap pendapatan yang dibukukan pada tahun 2021 sebesar Rp922,5 miliar.

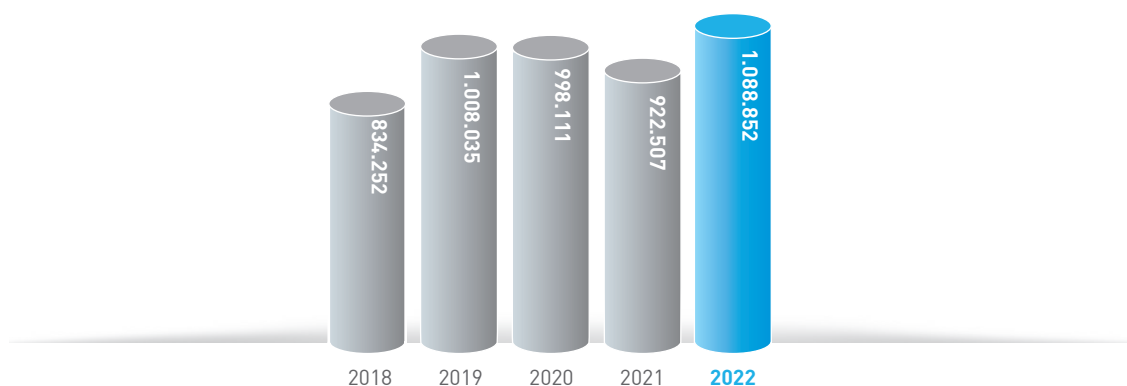
The Company booked revenue of Rp1.089 trillion, increased by 18.03% or equivalent to Rp166.35 billion to the revenue booked in 2021 of Rp922.5 billion.

Kenaikan pendapatan tersebut terutama dikontribusikan oleh pendapatan Pengelolaan Dana yang meningkat 7,86% atau setara dengan Rp57,83 miliar menjadi Rp793,70 miliar. Sementara itu, pendapatan Penjaminan pada tahun 2022 mencapai Rp252,57 miliar, meningkat 61,36% atau setara dengan Rp96,05 miliar terhadap pendapatan Penjaminan yang dibukukan pada tahun 2021 sebesar Rp156,5 miliar, sedangkan pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada tahun 2022 mencapai Rp41,10 miliar, meningkat 40,89% atau setara dengan Rp11,93 miliar terhadap pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi yang dibukukan pada tahun 2021 sebesar Rp29,17 miliar. Untuk Pendapatan Lainnya tercatat sebesar Rp1,48 miliar, naik 57,97% atau Rp542 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp935,3 juta.

The increase in revenue was mainly contributed by income from Investments which increased by 7.86% or equivalent to Rp57.83 billion to Rp793.70 billion. Meanwhile, revenue from Guarantee in 2022 reached Rp252.57 billion, increased by 61.36% or equivalent to Rp96.05 billion to revenue from Guarantee booked in 2021 of Rp156.5 billion, while revenue from Project Preparation and Transaction Advisory in 2022 reached Rp41.10 billion, increased by 40.89% or equivalent to Rp11.93 billion against Project Preparation and Transaction Advisory revenue booked in 2021 of Rp29.17 billion. Other Income was recorded at Rp1.48 billion, increased by 57.97% or Rp542 million from the previous year of Rp935.3 million.

Pendapatan 2018-2022 (Rp-juta)

Revenue in 2018-2022 (Rp-million)



Beban Usaha

Beban usaha Perseroan terdiri atas beban penjaminan, beban administrasi dan umum, beban pengembangan usaha dan beban lainnya.

Operating Expenses

The Company's operating expenses consist of guarantee expense, general and administrative expense, business development expense and other expenses.

Kinerja Beban Usaha 2021-2022

Operating Expenses Performance in 2021-2022

Beban Usaha	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Operating Expenses
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Beban Pajak Final	98.960	115.020	(16.060)	(13,96%)	Final Tax Expenses
Umum dan Administrasi	113.441	79.437	34.004	42,81%	General and Administrative
Penjaminan	82.379	73.413	8.966	12,21%	Guarantee
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi	49.357	34.094	15.263	44,77%	Project Preparation and Transaction Advisory
Pengembangan Usaha	31.258	24.592	6.666	27,11%	Business Development
Beban Bunga Pinjaman	6.404	8.452	(2.048)	(24,23%)	Loan Interest Expense
Penyusutan	4.526	4.427	99	2,24%	Depreciation
Kerugian Penurunan Nilai	2.000	-	2.000	100%	Impairment Losses
Amortisasi	1.774	982	792	80,65%	Amortization
Penghasilan Keuangan, Kotor	(1.816)	(6.083)	4.267	(70,15%)	Gross Financial Revenue
Keuntungan/(Kerugian) Kurs Bersih	(338)	4	(342)	(8550,00%)	Foreign Exchange Net Profit/(Loss)
Lain-lain	(1.729)	(397)	(1.332)	335,52%	Others
Jumlah Beban Usaha	386.216	333.941	52.275	15,65%	Total Operating Expenses

Beban usaha Perseroan di tahun 2022 tercatat sebesar Rp386,22 miliar, naik sebesar Rp52,28 miliar atau 15,65% terhadap beban usaha tahun 2021 sebesar Rp333,94 miliar. Kenaikan beban usaha tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban umum dan administrasi sebesar 42,81% atau setara dengan Rp34 miliar sejalan dengan pencabutan kebijakan PPKM oleh Pemerintah.

Beban pengembangan usaha naik 27,11% menjadi sebesar Rp31,26 miliar dibandingkan Rp24,59 miliar pada tahun 2021. Secara komposisi, posisi beban pengembangan usaha mewakili 8,09% dari total beban usaha Perseroan di tahun 2021.

Beban pajak final, sebagai beban yang memiliki komposisi terbesar terhadap total beban usaha Perseroan di tahun 2022 tercatat sebesar Rp98,96 miliar, turun 13,96% dari tahun 2021 sebesar Rp115,02 miliar. Penurunan beban pajak final terutama disebabkan karena perubahan tarif pajak final atas obligasi.

Sementara itu, beban bunga pinjaman juga turun 24,23% atau sebesar Rp2,05 miliar menjadi sebesar Rp6,40 miliar dibandingkan beban bunga pinjaman tahun 2021 sebesar Rp8,45 miliar. Hal ini disebabkan karena penurunan atas suku bunga pinjaman di tahun 2022.

The Company's operating expenses in 2022 were recorded at Rp386.22 billion, increased by Rp52.28 billion or 15.65% to operating expenses in 2021 of Rp333.94 billion. The increase in operating expenses was mainly due to an increase in general and administrative expenses by 42.81% or equivalent to Rp34 billion in line with the revocation of the PPKM policy by the Government.

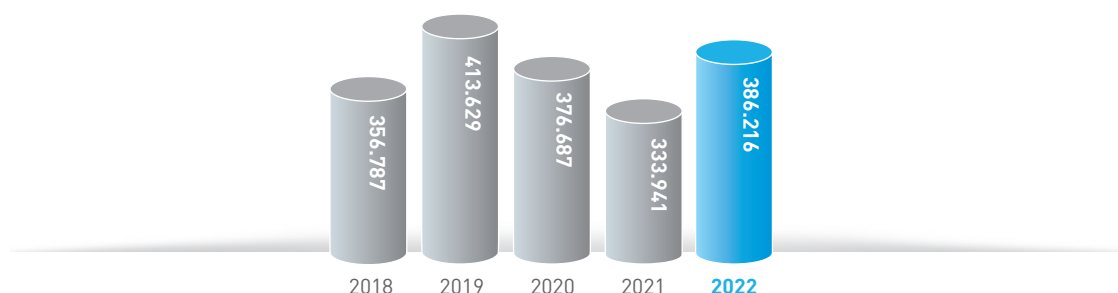
Business development expenses increased by 27.11% to Rp31.26 billion compared to Rp24.59 billion in 2021. In terms of composition, the position of business development expenses represented 8.09% of IIGF's total operating expenses in 2021.

Final tax expense, as an expense that has the largest composition of the Company's total operating expenses in 2022 was recorded at Rp98.96 billion, decreased by 13.96% from 2021 of Rp115.02 billion. The decrease in final tax expense was mainly due to the change in final tax rate on bonds.

Meanwhile, loan interest expense also decreased by 24.23% or Rp2.05 billion to Rp6.40 billion compared to loan interest expense in 2021 of Rp8.45 billion. This was due to the decrease in loan interest rate in 2022.

Beban Usaha 2018-2022 (Rp-juta)

Operating Expenses in 2018-2022 (Rp-million)



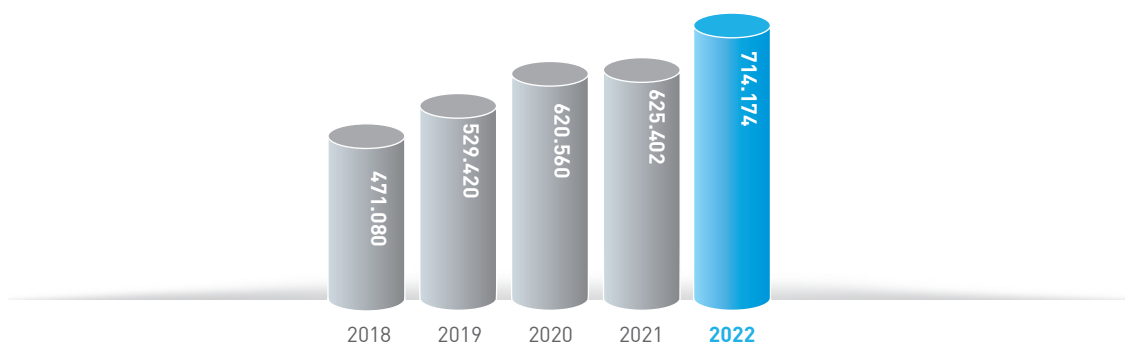


Laba

Laba sebelum pajak penghasilan didapatkan dari akumulasi pendapatan dan beban usaha. Di tahun 2022, Perseroan mencatat kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 19,38% yang utamanya disebabkan kenaikan pada pendapatan pengelolaan dana yang disebabkan peningkatan suku bunga rata-rata pada deposito.

Laba tahun berjalan merupakan laba bersih Perseroan yang didapatkan dari akumulasi laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan. Di tahun 2022, Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp714,17 miliar, meningkat 14,19% atau setara dengan Rp88,77 miliar dibandingkan laba tahun berjalan tahun 2021 sebesar Rp625,4 miliar. Kenaikan laba bersih Perseroan sejalan dengan peningkatan pendapatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Laba Tahun Berjalan 2018-2022 (Rp-juta)



(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain

Di tahun 2022, Perseroan membukukan rugi komprehensif lain sebesar Rp278,07 miliar, sementara di tahun sebelumnya, Perseroan mencatat penghasilan komprehensif lain sebesar Rp6,05 miliar. Hal ini disebabkan karena di tahun 2022, Perseroan membukukan kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Sedangkan total laba komprehensif tahun berjalan merupakan akumulasi dari laba bersih Perseroan dengan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Di tahun 2022, Perusahaan mencatat penurunan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar 30,94% yang utamanya disebabkan adanya penurunan harga pasar obligasi atas penempatan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Profit

Profit before income tax is derived from the accumulated revenues and operating expenses. In 2022, the Company recorded an increase in profit before income tax of 19.38% which was mainly due to an increase in income from investments due to an increase in the average interest rate on deposits.

Profit for the year is the Company's net profit obtained from the accumulated profit before income tax and income tax expense. In 2022, the Company recorded profit for the year of Rp714.17 billion, increased by 14.19% or equivalent to Rp88.77 billion compared to profit for the year 2021 of Rp625.4 billion. The increase in the Company's net profit was in line with the increase in revenue as previously explained.

Profit for the Year in 2018-2022 (Rp-million)

Other Comprehensive Income/(Loss)

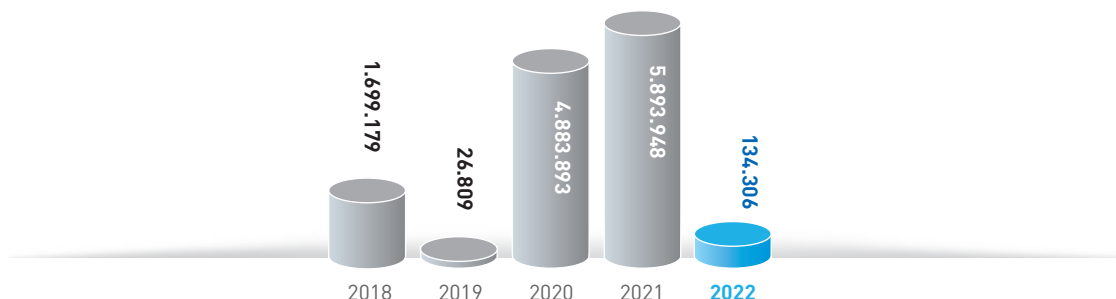
In 2022, the Company recorded other comprehensive loss of Rp278.07 billion, while in the previous year, the Company recorded other comprehensive income of Rp6.05 billion. This was due to the fact that in 2022, the Company recorded financial asset losses measured at fair value through other comprehensive income for the year.

Total Comprehensive Income for the Year

Meanwhile, total comprehensive income for the year is the accumulation of the Company's net income with other comprehensive income for the year. In 2022, the Company recorded a decrease in total comprehensive income for the year by 30.94% which was mainly due to a decrease in the market price of bonds on the placement of investments measured at fair value through other comprehensive income.

Kinerja Arus Kas

Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2018-2022 (Rp-Juta)



Kas dan Setara Kas PT PII di akhir tahun 2022 mencapai Rp134,31 miliar, mengalami penurunan 97,72% dibandingkan Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2021 sebesar Rp5,89 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2018-2022, Kas dan Setara Kas PT PII mengalami penurunan 39,80%.

Cash Flow Performance

Development of Cash and Cash Equivalents at End of Year in 2018-2022 (Rp-Million)

IIGF's Cash and Cash Equivalents at the end of 2022 reached Rp134.31 billion, experienced a decrease of 72% compared to Cash and Cash Equivalents at the end of 2021 of Rp5.89 trillion. At the 2018-2022 Compound Annual Growth Rate (CAGR), IIGF's Cash and Cash Equivalents decreased by of 39.80%.

Kinerja Arus Kas 2021-2022

Arus Kas	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Cash Flow
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	684.034	788.709	(104.675)	(13,27%)	Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(7.344.891)	429.422	(7.774.313)	(1810,41%)	Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	901.215	(208.076)	1.109.291	533,12%	Cash Flow from Financing Activities
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	(5.759.642)	1.010.055	(6.769.697)	(670,23%)	Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	5.893.948	4.883.893	1.010.055	20,68%	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	134.306	5.893.948	(5.759.642)	(97,72%)	Cash and Cash Equivalents at End of Year

Cash Flow Performance in 2021-2022

Arus Kas memberikan gambaran tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran Perseroan dalam suatu periode tertentu. Kenaikan Kas dan Setara Kas PT PII di akhir tahun 2022 dipengaruhi oleh kenaikan arus kas dari aktivitas investasi.

Cash Flow provides an overview of the amount of income and expenditure of the Company in a certain period. The increase in IIGF's Cash and Cash Equivalents at the end of 2022 was influenced by an increase in cash flow from investing activities.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flow from Operating Activities

Kinerja Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2021-2022

Performance of Cash Flow from Operating Activities in 2021-2022

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Cash Flow from Operating Activities
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	702.636	588.566	114.070	19,38%	Profit before Income Tax
Ditambah Unsur yang Tidak Memengaruhi Arus Kas:					Additional items not affecting cash flows:
Beban Penyusutan	4.526	4.427	99	2,24%	Depreciation Expense
Beban Kerugian Penurunan Nilai	2.000	-	2.000	100,00%	Impairment Loss Expense



Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Cash Flow from Operating Activities
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Beban Amortisasi	1.774	982	792	80,65%	Amortization Expense
Beban/(Pendapatan) Penyisihan Imbalan Kerja	3.387	(10.735)	14.122	131,55%	Expense/(Income) from provision for employee benefits obligation
Beban Amortisasi Aset Hak Guna	18.860	18.860	-	0,00%	Right-of-use assets amortisation expense
Beban Bunga Sewa Pembiayaan	2.475	4.318	(1.843)	(42,66%)	Finance Lease Interest Expense
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Dalam Aset dan Liabilitas Operasi	735.658	606.418	129.240	21,31%	Operating Cash Flows before Changes in Operating Assets and Liabilities
Perubahan Dalam Aset dan Liabilitas Operasi:			Changes in Operating Assets and Liabilities		
(Kenaikan)/Penurunan Aset Operasi:			Increase/(Decrease) in Operating Assets:		
Piutang Usaha	(127.503)	(14.027)	(113.476)	808,98%	Account Receivables
Piutang Lainnya	851	2.022	(1.171)	(57,91%)	Other Receivables
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	3.909	(5.587)	9.496	169,97%	Prepaid Expenses and Advances
Beban Tangguhan	1.908	11.593	(9.685)	(83,54%)	Deferred Expenses
Pajak Dibayar Dimuka	(402)	2.257	(2.659)	(117,81%)	Prepaid Tax
(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Operasi:			(Decrease)/Increase in Operating Liabilities:		
Utang Usaha	2.620	4.283	(1.663)	(38,83%)	Account Payables
Utang Pajak	(642)	1.163	(1.805)	(155,20%)	Tax Payables
Biaya Masih Harus dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain	70.387	25.713	44.674	173,74%	Accrued Expenses, Provisions, and Other Payables
Pembayaran Manfaat Imbalan Kerja	(1.567)	(582)	(985)	169,24%	Payment of Employee Benefits
Pendapatan Tangguhan	(1.185)	155.456	(156.641)	(100,76%)	Unearned Income
	(51.624)	182.291	(233.915)	(128,32%)	
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Investasi	684.034	788.709	(104.675)	(13,27%)	Net Cash Flows (Used in)/ Provided from Investing Activities

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2022 sebesar Rp684,04 miliar, menurun sebesar Rp104,67 miliar atau 13,27% terhadap arus kas dari aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp788,7 miliar. Penurunan ini disebabkan utamanya dari penurunan pendapatan tangguhan sehubungan dengan penjaminan *loss limit* dan penjaminan bersama diterima dimuka.

Net cash flows provided by operating activities in 2022 amounted to Rp684.04 billion, decreased by Rp104.67 billion or 13.27% to cash flows from operating activities in 2021 of Rp788.7 billion. This decrease was mainly due to a decrease in unearned income related to loss limit guarantee and co-guarantee received in advance.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flow from Investing Activities

Kinerja Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2021-2022

Performance of Cash Flow from Investing Activities in 2021-2022

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Cash Flow from Investing Activities
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Penempatan Investasi	(7.339.609)	433.563	(7.773.172)	(1792,86%)	Placement for Investment
Pembelian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	(5.282)	(4.141)	(1.141)	27,55%	Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(7.344.891)	429.422	(7.774.313)	(1810,41%)	Net Cash Flows (Used in)/ Provided from Investing Activities

Di tahun 2022, Perseroan mencatat penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp7,34 triliun, sedangkan di tahun sebelumnya Perseroan mencatat perolehan kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp429,4 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penempatan deposito berjangka senilai Rp6,05 triliun.

In 2022, the Company recorded net cash used in investing activities amounting to Rp7.34 trillion, while in the previous year the Company recorded net cash provided by investing activities amounting to Rp429.4 billion. This was mainly due to the placement of time deposits amounting to Rp6.05 trillion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Financing Activities

Kinerja Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2021-2022

Performance of Cash Flow from Financing Activities in 2021-2022

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Cash Flow from Financing Activities
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
Penerimaan Modal Saham	1.085.000	-	1.085.000	100,00%	Share Capital Received
Pembayaran Dividen	(156.351)	(186.168)	29.817	(16,02%)	Dividend Payment
Pembayaran Sewa	(27.434)	(21.908)	(5.526)	25,23%	Payment for Lease
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	901.215	(208.076)	1.109.291	533,12%	Net Cash Flow Provided by/(Used in) Financing Activities

Di tahun 2022, Perseroan membukukan perolehan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp901,22 miliar, sedangkan pada tahun 2021 Perseroan mencatat penggunaan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp208,1 miliar. Hal ini terutama disebabkan pada tahun 2022 Perseroan mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp1,085 triliun yang merupakan kapasitas modal untuk mendukung Program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan Pemerintah.

In 2022, the Company booked net cash provided by financing activities of Rp901.22 billion, while in 2021, the Company recorded net cash used in financing activities of Rp208.1 billion. This was mainly due to the fact that in 2022 IIGF received an additional PMN of Rp1.085 trillion which was a capital capacity to support the PEN Program and boost the national economy through Government assignments.

Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information Review

Kemampuan Profitabilitas Perseroan

Profitability Capability of the Company

PT PII memiliki beberapa rasio yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan menghasilkan laba atau keuntungan serta efisiensi yang dilakukan, sebagai berikut:

IIGF has several ratios that can provide an overview of the ability to generate profits and the efficiency carried out, as follows.

Kinerja Rasio Profitabilitas 2021-2022

Profitability Ratio Performance in 2021-2022

Rasio Profitabilitas	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%)	Profitability Ratio
Rasio Imbal Hasil Aset	5,02%	4,52%	0,50%	Return On Asset (ROA) (%)
Rasio Imbalan Ekuitas	5,14%	4,54%	0,60%	Return On Equity (ROE) (%)
Marjin Laba Operasi	64,53%	63,80%	0,73%	Operating Profit Margin (OPM) (%)
Marjin Laba Bersih	65,59%	67,79%	(2,20%)	Net Profit Margin (NPM) (%)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	35,47%	36,20%	(0,73%)	Operating Expenses to Operating Income (BOPO) (%)

Dari rasio-rasio profitabilitas di atas, dapat terlihat bahwa meskipun pada ROA dan ROE sedikit menurun namun terdapat peningkatan pada OPM dan NPM serta BOPO yang masih terjaga.

From the profitability ratios above, it can be seen that although ROA and ROE decreased slightly, there was an increase in OPM and NPM as well as BOPO which was still maintained.



Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Perseroan menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari Rasio Kas dan Rasio Lancar untuk mengukur kemampuannya dalam memenuhi liabilitas/utang jangka pendek. Rasio Kas menjelaskan kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya melalui kas dan setara kas (aset yang paling likuid) yang dimiliki. Rasio Lancar merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan Perseroan untuk membayar utang dengan menggunakan aset lancar.

Kinerja Rasio Likuiditas 2021-2022

Rasio Likuiditas	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%)	Liquidity Ratio
Rasio Kas (%)	10.132,7	17.959,2	-43,6%	Cash Ratio (%)
Rasio Lancar (%)	8.581,8	17.889,7	-52,0%	Current Ratio (%)

Dari rasio-rasio likuiditas, tingkat likuiditas Perseroan pada tahun 2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio lancar mengalami penurunan dari 17.889,7 menjadi 8.581,8 di tahun 2022, sedangkan rasio kas mengalami penurunan dari 17.959,2 menjadi 10.132,7 di tahun 2022.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Hingga akhir tahun 2022, Perseroan tidak memiliki utang jangka panjang yang substansial untuk mendukung kepemilikan aset. Saldo utang jangka panjang Perseroan berupa pinjaman penerusan senilai Rp55,13 miliar yang dipergunakan untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas dan teknis operasi Perseroan melalui dukungan Bank Dunia (*World Bank*). Selebihnya adalah liabilitas imbalan kerja sebesar Rp18,57 miliar. Pokok pinjaman penerusan akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penarikan pertama dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2034. Selebihnya seluruh kegiatan untuk kepemilikan aset masih dibiayai oleh modal Perseroan.

Tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka Panjang dapat dilihat dari rasio solvabilitas.

Kinerja Rasio Solvabilitas 2021-2022

Rasio Solvabilitas	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) (%)	Solvency Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%)	2,58%	2,51%	0,07	Debt to Asset Ratio (%)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	2,89%	2,58%	0,31	Debt to Equity Ratio (%)

Dengan jumlah utang jangka Panjang yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah aset yang besar, dapat disimpulkan bahwa Perseroan memiliki tingkat solvabilitas yang sangat baik. Tingkat solvabilitas berdasarkan rasio liabilitas terhadap aset dan ekuitas tahun 2022 sebesar 2,58% dan 2,89%.

SOLVENCY

Short-Term Solvency

The Company uses liquidity ratios consisting of Cash Ratio and Current Ratio to measure its ability to fulfill short-term liabilities. Cash Ratio explains the Company's ability to pay off its short-term liabilities through cash and cash equivalents (the most liquid assets) owned. Current Ratio is a ratio used to see the Company's ability to pay debts by using current assets.

Liquidity Ratio Performance in 2021-2022

From the liquidity ratios, the Company's liquidity level in 2022 recorded a decrease compared to the previous year. The current ratio decreased by 17.889,7 to 8.581,8 in 2022, while the cash ratio decreased by 17.959,2 to 10.132,7 in 2022.

Ability to Pay Long-Term Debt

Until the end of 2022, the Company did not have substantial long-term debt to support asset ownership. The balance of the Company's long-term debt is in the form of a Rp55.13 billion two-step loans which is used for the improvement and development of the Company's capacity and technical operations through the support of the World Bank. The rest is employee benefits obligation amounting to Rp18.57 billion. The principal of the two-step loans will be repaid in semi-annual installments after a grace period of 9 (nine) years from the date of the first drawdown and will mature until 2034. The rest of the activities for asset ownership are still financed by the Company's capital.

The level of the Company's ability to fulfill long-term liabilities can be seen from the solvency ratio.

Solvency Ratio Performance in 2021-2022

With the insignificant amount of long-term debt compared to the large amount of assets, it can be concluded that the Company has a very good level of solvency. The solvency level based on the debt to asset ratio and debt to equity ratio in 2022 is 2.58% and 2.89%.

Tingkat Kolektibilitas Piutang Perseroan

Hingga akhir tahun 2022, Piutang Perseroan berasal dari piutang bunga yang berasal dari investasi dalam deposito maupun obligasi, piutang penjaminan, dan piutang PDF. Piutang Perseroan didominasi oleh piutang penjaminan dan piutang bunga yang berasal dari investasi dalam deposito dan obligasi yang mencakup 41,5% dan 42,8% dari total piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian telah dihitung sesuai dengan persyaratan penurunan nilai PSAK 71. Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha sebesar Rp2.000.000.000 mengalami penurunan nilai dan telah dicadangkan sepenuhnya. Piutang penjaminan Perseroan utamanya berasal dari penjaminan infrastruktur di mana 97,7% dari piutang penjaminan tersebut belum jatuh tempo sampai akhir tahun 2022. Selain itu, Perseroan menempatkan deposito dengan mekanisme tender dan penempatan obligasi dengan memperhatikan standar yang diperbolehkan dalam Kebijakan Pengelolaan Dana dan Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.08/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("PMK 95/2017"). Dengan demikian, Perseroan tidak mengalami dinamika pada tingkat kolektibilitasnya baik kolektibilitas piutang jangka pendek maupun jangka panjang.

Struktur Modal dan Kebijakannya

Struktur Modal

Perseroan melakukan pengelolaan modal dalam rangka melindungi kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Dengan demikian, Perseroan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Guna memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, Perseroan melakukan penelaahan dan pengelolaan struktur permodalan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yaitu kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perseroan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis.

Perseroan dapat mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal dengan melakukan penyesuaian jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Aset Perseroan saat ini sebagian besar didanai dari ekuitas Perseroan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Desember 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp1,085 triliun yang telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022. Selain modal ditempatkan, Perseroan memiliki saldo penghasilan komprehensif lainnya dan saldo laba ditahan, sehingga total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2022 sebesar Rp15,15 triliun.

The Company Receivables Collectibility

Until the end of 2022, the Company's receivables come from interest receivables from investments in deposits and bonds, guarantee receivables, and PDF receivables. The Company's receivables are dominated by guarantee receivables and interest receivables from investments in deposits and bonds which include 41.5% and 42.8% of total account receivables. Expected credit loss has been calculated according to impairment requirements of SFAS 71. As of 31 December 2022, account receivables amounting to Rp2,000,000,000 are impaired and have been fully provisioned. The Company's guarantee receivables mainly come from infrastructure guarantee where 97.7% of the guarantee receivables are not due until the end of 2022. In addition, the Company places deposits with a tender mechanism and bond placements by taking into account the standards allowed in the Fund Management Policy and Minister of Finance Regulation No. 95/PMK.08/2017 concerning the Scope and Procedures for Providing Government Guarantees in the Infrastructure Sector by Infrastructure Guarantee Agency ("PMK 95/2017"). Thus, the Company does not experience dynamics in its collectibility, both short-term and long-term receivables collectibility.

Capital Structure and The Policy

Capital Structure

The Company conducts capital management in order to protect its ability to maintain its business continuity. Thus, the Company can continue to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders as well as maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to ensure optimal capital structure and returns for shareholders, the Company reviews and manages its capital structure by considering a number of factors, namely the future capital requirements and capital efficiency of the Company, past and projected future profits, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities.

The Company may maintain or adjust its capital structure by adjusting the amount of dividends distributed to shareholders, returning capital to shareholders, issuing new shares or selling assets to reduce the amount of debt.

The Company's assets are currently mostly funded from the Company's equity in the form of State Capital Participation (PMN) by the Government of the Republic of Indonesia. On December 23, 2022, based on Government Regulation No. 53 of 2022 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Company's share capital, additional share capital of Rp1.085 trillion has been deposited which has been received by the Company on December 23, 2022. In addition to the issued capital, the Company has other comprehensive income balance and retained earnings balance, so that the total equity of the Company as of December 31, 2022 amounted to Rp15.15 trillion.



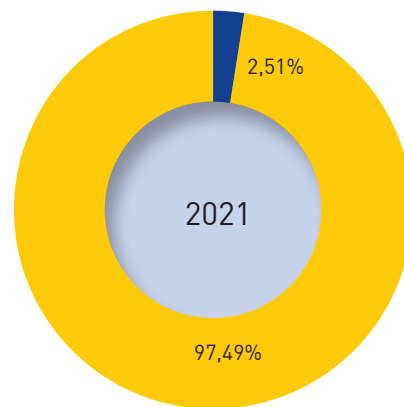
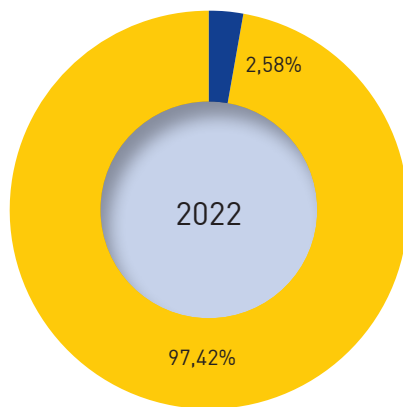
Struktur Modal dan Komposisinya

Capital Structure and the Composition

Struktur Modal Capital Structure	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Liabilitas Liabilities	401.612	2,58%	355.720	2,51%	45.892	12,90%
Ekuitas Equity	15.153.469	97,42%	13.788.714	97,49%	1.364.755	9,90%
Total	15.555.081	100,00%	14.144.434	100,00%	1.410.647	9,97%

Komposisi Struktur Modal

Composition of Capital Structure



● Liabilitas/Liabilities ● Ekuitas/Equity

Hingga akhir tahun 2022, Perseroan tidak memiliki komponen dalam struktur modal yang berbasis utang.

Until the end of 2022, the Company has no debt-based components in its capital structure.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

Kebijakan pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha di masa yang akan datang serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

The capital management policy aims to ensure that the Company has an efficient capital structure, has strong capital to support the current business development strategy and to maintain business continuity in the future as well as to meet the capital adequacy determined by the regulator.

Ikatan Yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Goods Investment

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal.

Until the end of 2022, the Company has no material commitments related to investment in capital goods.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Realisasi investasi barang modal Perseroan di tahun 2022 sebesar Rp1.281 miliar, mengalami penurunan 34,69% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1,96 miliar.

The realization of the Company's investment in capital goods in 2022 amounted to Rp1,281 billion, decrease of 34.69% compared to the realization in 2021 of Rp1.96 billion.

Realisasi Investasi Barang Modal Realization Of Capital Goods Investment	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization Of Capital Goods Investment	1.281	1.962	681	34,69%

Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Pada tahun 2022, tidak terdapat informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Setelah tanggal laporan akuntan, terdapat dua informasi material dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan komposisi Dewan Komisaris

- a. Berdasarkan KMK No. 33/KMK.06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Pemegang Saham memberhentikan Wahyu Utomo dan mengangkat Iqbal Islami sebagai anggota Dewan Komisaris mulai tanggal 31 Januari 2023. Susunan Dewan Komisaris Perseroan sesuai keputusan di atas menjadi sebagai berikut:

	2023	2022
Komisaris Utama President Commissioner	Awan Nurmawan Nuh	Awan Nurmawan Nuh
Komisaris Commissioner	Iqbal Islami	Wahyu Utomo
Komisaris Commissioner	Mariatul Aini	Mariatul Aini

- b. KPBU

Pada tanggal 24 Januari 2023, Perseroan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Akses Patimban selaku badan usaha.

Financial Information which has been Reported Contains Extraordinary and Rare Events

In 2022, there was no financial information which has been reported contains events of the extraordinary character and rarely occur.

Material Information and Facts Subsequent to The Accountant's Reporting Date

After the accountant's reporting date, there are two material information with the following details:

Changes in the composition of the Board of Commissioners

- a. Based on KMK No. 33/KMK.06/2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, the Shareholders dismissed Wahyu Utomo and appointed Iqbal Islami as member of the Board of Commissioners starting January 31, 2023. The composition of the Company's Board of Commissioners in accordance with the above decision is as follows:

- b. PPP

On January 24, 2023, the Company signed a guarantee agreement with PT Jasamarga Akses Patimban as the Special Purpose Vehicle (SPV).

Pencapaian Target Tahun 2022 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan Laba Rugi dan Posisi Keuangan Target RKAP 2022 dan Realisasi 2022, serta Proyeksi RKAP 2023.

2022 Target Achievement and 2023 Performance Projection

Comparison of Profit or Loss and Financial Position of the 2022 RKAP Target and 2022 Realization, and 2023 RKAP Projection.

Uraian (dalam Rp miliar)	Target RKAP 2022 2022 ABOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Target RKAP 2023 2023 ABOP Target	Realisasi 2022: RKAP 2022 2022 Realization: 2022 ABOP [%]	Proyeksi 2023 Terhadap Realisasi 2022 2022 Realization: 2023 ABOP [%]	Description (in Rp billion)
Labas Rugi Komprehensif						Comprehensive Income or Loss
Pendapatan Usaha	1.106,97	1.088,85	1.251,30	98,36%	114,92%	Operating Revenue
Beban Usaha	(508,66)	(386,22)	(478,36)	75,93%	123,86%	Operating Expense
Laba Sebelum Pajak	598,31	702,63	772,94	117,40%	110,01%	Profit before Tax
Manfaat Pajak Penghasilan	3,78	11,54	16,32	305,61%	141,42%	Income Tax Benefits
Laba Tahun Berjalan	602,08	714,17	789,27	118,62%	110,52%	Profit for the Year
Laba komprehensif tahun berjalan	605,01	436,10	771,16	72,08%	176,83%	Comprehensive Income for the Year



Uraian (dalam Rp miliar)	Target RKAP 2022 2022 ABOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Target RKAP 2023 2023 ABOP Target	Realisasi 2022: RKAP 2022 2022 Realization: 2022 ABOP [%]	Proyeksi 2023 Terhadap Realisasi 2022 2022 Realization: 2023 ABOP [%]	Description (in Rp billion)
Posisi Keuangan						Financial Position
Aset	15.594,69	15.555,08	16.247,15	99,75%	104,45%	Assets
Liabilitas	259,78	401,61	435,04	154,60%	108,32%	Liabilities
Ekuitas	15.334,91	15.153,47	15.812,11	98,82%	104,34%	Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	15.594,69	15.555,08	16.247,15	99,75%	104,45%	Total Liabilities and Equity

Realisasi pendapatan usaha tahun 2022 tercapai sebesar Rp1,09 triliun atau 98,36% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2022 sebesar Rp1,11 triliun. Sedangkan, untuk target RKAP 2023, PT PII memproyeksikan pendapatan usaha sebesar Rp1,25 triliun atau meningkat 14,92% dari realisasi tahun 2022.

Adapun realisasi laba tahun berjalan 2022 tercapai sebesar Rp714,17 miliar atau 118,62% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2022 sebesar Rp602,08 miliar. Sedangkan untuk target RKAP 2023, PT PII memproyeksikan laba tahun berjalan sebesar Rp789,27 miliar atau tumbuh hingga 10,52% dari realisasi tahun 2022.

Pada posisi keuangan, realisasi aset tahun 2022 tercapai sebesar Rp15,56 triliun atau 99,75% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2022 atas aset sebesar Rp15,59 triliun. Sedangkan untuk target RKAP 2023, PT PII memproyeksikan aset sebesar Rp16,25 triliun atau meningkat 4,45% dari realisasi tahun 2022. Realisasi ekuitas tercapai sebesar Rp15,15 triliun atau 98,82% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2022 atas ekuitas sebesar Rp15,33 triliun. Sedangkan untuk target RKAP 2023, PT PII memproyeksikan ekuitas sebesar Rp15,81 triliun atau tumbuh hingga 4,34% dari realisasi tahun 2022.

Prospek Usaha

Sektor infrastruktur akan tetap prospektif dan masih menjadi kontributor penggerak utama ekonomi dalam negeri di tahun 2023 mengingat hal tersebut merupakan kelanjutan dari proyek-proyek infrastruktur yang mulai menggeliat pasca pandemi Covid-19. Meskipun Pemerintah akan lebih selektif dalam membangun infrastruktur baru, namun pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023 dalam rangka mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045.

Adapun dana yang dialokasikan untuk infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dari Rp365,8 triliun mengalami peningkatan menjadi Rp392 triliun yang sebagian besar akan digunakan untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar. Ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

Pemerintah sendiri telah menetapkan dua prioritas yang berkaitan dengan infrastruktur di 2023, yaitu mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

The realization of operating revenue in 2022 was achieved at Rp1.09 trillion or 98.36% if compared to the 2022 ABOP target of Rp1.11 trillion. Meanwhile, for the 2023 ABOP target, IIGF projects operating revenue of Rp1.25 trillion or an increase of 14.92% from the realization in 2022.

The realization of profit for the year 2022 was achieved at Rp714.17 billion or 118.62% if compared to the 2022 ABOP target of Rp602.08 billion. As for the 2023 ABOP target, IIGF projects profit for the year of Rp789.27 billion or an increase of up to 10.52% from the realization in 2022.

In the financial position, the realization of assets in 2022 was achieved at Rp15.56 trillion or 99.75% if compared to the determination of the 2022 ABOP target for assets of Rp15.59 trillion. As for the 2023 ABOP target, IIGF projects assets of Rp16.25 trillion or an increase of 4.45% from the realization in 2022. The realization of equity reached Rp15.15 trillion or 98.82% if compared to the 2022 ABOP target determination for equity of Rp15.33 trillion. As for the 2023 ABOP target, IIGF projects equity of Rp15.81 trillion or an increase of 4.34% from the 2022 realization.

Business Prospect

The infrastructure sector will remain prospective and still be the main driving contributor to the domestic economy in 2023 considering that it is a continuation of infrastructure projects that have begun to stretch after the Covid-19 pandemic. Although the Government will be more selective in building new infrastructure, infrastructure development is still one of the focuses of government policy in 2023 in order to promote increased productivity for economic transformation towards the vision of an Advanced Indonesia 2045.

The funds allocated for infrastructure in the State Budget (APBN) for the 2023 fiscal year have increased from Rp365.8 trillion to Rp392 trillion, most of which will be used to build basic service infrastructure. The availability of reliable infrastructure is very important to support economic activities and business growth.

The government itself has set two priorities related to infrastructure in 2023, namely accelerating the completion of national priority infrastructure development and encouraging the growth of new economic centers, including the National Capital City (IKN).

Untuk mengantisipasi prospek bisnis di tahun 2023, Perseroan telah bersiap diri mengambil sejumlah langkah strategis yang meliputi:

1. Akan tetap fokus kepada pematapan bisnis Penjaminan baik skema KPBU maupun non KPBU yang tidak hanya terkonsentrasi pada jumlah pemberian dukungan penjaminan namun meningkatkan nilai kebermanfaatannya dengan menciptakan sinergi yang berkesinambungan dengan berbagai *key stakeholder*.
2. Mempersiapkan Perseroan untuk dapat mengoptimalkan kontribusi dan peran Penjaminan Pemerintah dalam pembangunan IKN.
3. Melanjutkan pelaksanaan pemantauan aktif atas proyek-proyek yang telah efektif penjaminan guna dapat mengantisipasi serta memitigasi secara bersama-sama dengan para PJPK.
4. Melaksanakan penugasan sebagai penasihat teknis & penasihat transaksi untuk para PJPK yang memiliki potensi hingga peningkatan kapasitas ekosistem termasuk pelaku usaha di sektor infrastruktur.
5. Mendukung tema yang diusung oleh pemerintah dengan ikut berperan serta dalam program penjaminan korporasi sebagai program pemulihan ekonomi nasional.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan mandat baru yakni mendukung penjaminan proyek-proyek strategis nasional.
7. Eksplorasi potensi pengembangan bisnis dan opsi-opsi perluasan mandat.

Kebijakan Dividen

Dasar Kebijakan tentang Pembagian Dividen

PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara, di mana modal ditempatkan dan disetor adalah 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham. Dengan demikian, pembagian dividen sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Republik Indonesia. Besaran dividen yang didistribusikan kepada Pemegang Saham ditentukan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan selaku RUPS dan kuasa pemegang Saham.

Pembagian Dividen Di Tahun 2021 dan 2022

Pada tahun 2022, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 22 tanggal 20 Juni 2022, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2022 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2021 sejumlah Rp156.350.534 yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2022.

Pada tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 23 Juli 2021, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 23 Juni 2021 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2020 sejumlah Rp186.168.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2021.

To anticipate the business prospects in 2023, the Company has prepared to take a number of strategic measures which include:

1. Continue to focus on strengthening the Guarantee business, both PPP and non-PPP schemes, which are not only concentrated on the amount of guarantee support but increase the value of benefit by creating sustainable synergies with various key stakeholders.
2. Preparing the Company to be able to optimize the contribution and role of Government Guarantee in the development of IKN.
3. Continue the implementation of active monitoring of projects that have effective guarantees in order to anticipate and mitigate together with the GCAs.
4. Carry out assignments as technical advisors & transaction advisors for GCA that have the potential to increase ecosystem capacity, including business actors in the infrastructure sector.
5. Support the theme promoted by the government by participating in the corporate guarantee program as a PEN Program.
6. Optimize the implementation of the new mandate, namely supporting the guarantee of national strategic projects.
7. Exploration of potential business development and mandate expansion options.

Dividend Policy

Policy Basis on Dividend Distribution

IIGF is a State-Owned Enterprise, where the issued and paid-up capital is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia as the shareholder. Thus, dividends are fully entitled to the Government of the Republic of Indonesia. The amount of dividends distributed to Shareholders is determined based on the decision of the Ministry of Finance as the GMS and the proxy of Shareholders.

Dividend Distribution in 2021 and 2022

In 2022, based on Notarial Deed Arry Supratno, S.H., No. 22 dated June 20, 2022, the Shareholders through the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on June 20, 2022 approved the distribution of dividends for the 2021 amounting to Rp156,350,534 which was paid on June 29, 2022.

In 2021, based on Notarial Deed No. 07 of Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dated July 23, 2021, the Shareholders through the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on June 23, 2021 approved the distribution of dividends for the 2020 amounting to Rp186,168,000 which was paid on July 6, 2021.

Keterangan	2022	2021	Description
Total Dividen (Rp juta)	156.351	186.168	Total Dividend (Rp million)
Jumlah Saham (lembar)	10.655.000	9.570.000	Total Shares (share)
Rasio Pembayaran Dividen	22%	30%	Dividend Payment Ratio
Dividen per Saham (Rp)	0,01	0,02	Dividend per Share
Tanggal Pengumuman Dividen	20 Juni/June 2022	23 Juni/June 2021	Date of Dividend Announcement
Tanggal Pembayaran Dividen	29 Juni/June 2022	6 Juli/July 2021	Date of Dividend Payment



Kronologis Pembagian Dividen

Kronologis pembagian dan pembayaran Dividen tunai dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

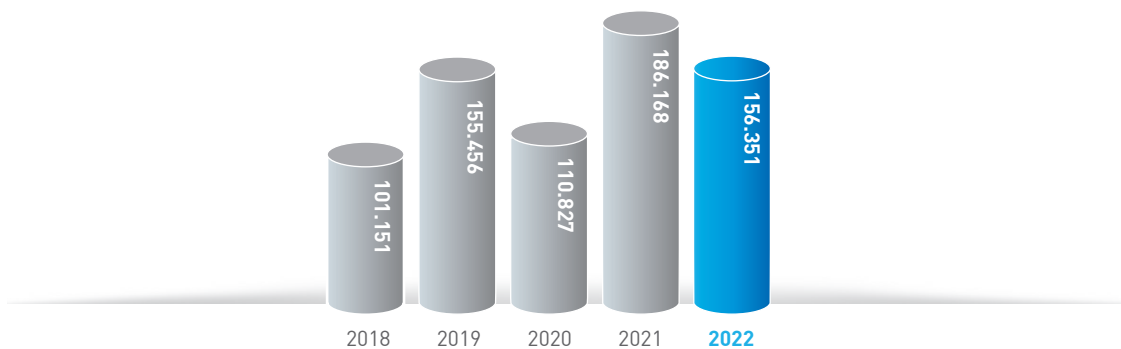
Chronology of Dividend Distribution

The chronology of cash dividend distribution and payment in the last 5 (five) years is as follows:

Tahun Pembagian Year of Distribution	Tahun Buku Fiscal Year	Tanggal Pengumuman Date of Announcement	Tanggal Pembayaran Date of Payment	Dividen Tunai yang Dibagikan (Rp-juta) Cash Dividend Distributed (Rp-million)
2022	2021	20 Juni 2022 June 20, 2022	29 Juni 2022 June 29, 2022	156.351
2021	2020	23 Juni 2021 June 23, 2021	6 Juli 2021 July 6, 2021	186.168
2020	2019	12 Juni 2020 June 12, 2020	22 Juni 2020 June 22, 2020	110.827
2019	2018	23 Mei 2019 May 23, 2019	20 Juni 2019 June 20, 2019	155.456
2018	2017	23 Mei 2018 May 23, 2018	22 Juni 2018 June 22, 2018	101.151

Perkembangan Dividen Tunai yang Dibagikan Tahun 2018-2022 (Rp-juta)

Development of Cash Dividends Distributed in 2018-2022 (Rp-million)



Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hingga akhir tahun 2022, Perseroan tidak melakukan penawaran umum saham dan/atau penerbitan efek lainnya di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Until the end of 2022, the Company did not conduct a public offering of shares and/or issuance of other securities on the Indonesia Stock Exchange. Therefore, there is no information on the realization of the use of proceeds from the public offering.

Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat informasi dan fakta material terkait investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal.

Investment, Expansion, Divestment, Acquisition or Debt Restructuring

Throughout 2022, there was no material information and facts related to investment, expansion, divestment, acquisition or debt/capital restructuring.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Kebijakan tentang Pihak Afiliasi/Berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (revisi 2010), tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Policy on Affiliated/Related Parties

The Company conducts transactions with related parties as defined in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 7 (revised 2010), on "Related Party Disclosures" which is defined, among others:

1. Entitas di bawah pengendalian PT PII;
2. Entitas asosiasi;
3. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
4. Entitas di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam angka 3 di atas;
5. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
6. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Adapun sifat pihak berelasi antara lain:

1. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perseroan.
2. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perseroan.
3. BUMN merupakan pihak berelasi oleh karena merupakan entitas sepengendali oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1. Entities under the control of IIGF;
2. Associated entity;
3. Investors who have voting rights, which provides such investors with a significant influence;
4. Entities under the control of the investor described in number 3 above;
5. Key employees and their family members; and
6. Entities controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government.

The nature of related parties include:

1. The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company.
2. Board of Directors are the people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company.
3. SOE is a related party as it is a jointly controlled entity by the Government of the Republic of Indonesia.

Nama Pihak Afiliasi/Berelasi yang Bertransaksi dan Sifat serta Tujuan Transaksi

Name of Affiliated/Related Parties in Transaction and Nature as well as Objective of Transaction

Entitas Entity	Hubungan Relation	Sifat dan Tujuan Transaksi Nature and Objective of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	Pemegang saham Shareholder	Investasi; piutang usaha; pinjaman penerusan; beban yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain; pendapatan; beban bunga. Investment; accounts receivables; two-step loans; accrued expenses, provisions and other payables; revenue; interest expense.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Kas dan setara kas; investasi; piutang usaha; pendapatan Cash and cash equivalents; investment; accounts receivable; revenue
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Kas dan setara kas; investasi; pendapatan Cash and cash equivalents; investment; revenue
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Kas dan setara kas; investasi; piutang usaha; pendapatan Cash and cash equivalents; investment; accounts receivable; revenue
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Kas dan setara kas; investasi; piutang usaha; pendapatan Cash and cash equivalents; investment; accounts receivable; revenue
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Kas dan setara kas; investasi; piutang usaha; pendapatan Cash and cash equivalents; investment; accounts receivable; revenue
PT Bank BNI Syariah	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Kas dan setara kas; pendapatan Cash and cash equivalents; revenue
PT Bank Syariah Mandiri	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
PT Bank Syariah Indonesia	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Kas dan setara kas; piutang usaha Cash and cash equivalents; account receivables
PT Pegadaian (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; piutang usaha; pendapatan Investment; account receivables; revenue
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; piutang usaha; pendapatan Investment; account receivables; revenue
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; piutang usaha; pendapatan Investment; account receivables; revenue



Entitas <i>Entity</i>	Hubungan <i>Relation</i>	Sifat dan Tujuan Transaksi <i>Nature and Objective of Transaction</i>
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; piutang usaha; pendapatan Investment; account receivables; revenue
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; piutang usaha; beban yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain; pendapatan Investment; accounts receivable; accrued expenses, provisions and other payables; revenue
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; piutang usaha; pendapatan Investment; account receivables; revenue
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; piutang usaha; pendapatan Investment; account receivables; revenue
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; pendapatan Investment; revenue
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; piutang usaha; pendapatan Investment; account receivables; revenue
PT Angkasa Pura (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; pendapatan Investment; revenue
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; piutang usaha; pendapatan Investment; account receivables; revenue
PT Aneka Tambang Tbk	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; pendapatan Investment; revenue
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; pendapatan Investment; revenue
PT Marga Lingkar Jakarta	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; pendapatan Investment; revenue
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; pendapatan Investment; revenue
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Investasi; pendapatan Investment; revenue
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Piutang usaha; pendapatan Account receivables; revenue
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas sepengendali/BUMN Company under common control/SOE	Piutang usaha; pendapatan Account receivables; revenue
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	Manajemen kunci Key management	Kompensasi dan remunerasi Compensation and remuneration

Saldo dan Transaksi Pihak Afiliasi/Berelasi

Saldo dan transaksi pihak afiliasi/berelasi di tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Balances and Transactions of Affiliated/Related Parties

Balances and transactions of affiliated/related parties in 2022 and 2021 were as follows:

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Balance of Related Parties in Assets
			2022 (%)	2021 (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)	
Kas dan setara kas	113.693	3.606.569	0,73%	25,5%	(3.492.876)	(96,85%)	Cash and cash equivalents
Investasi	13.189.144	7.004.281	84,79%	49,5%	6.184.863	88,30%	Investment
Piutang usaha	216.946	98.035	1,39%	0,7%	118.911	121,29%	Account receivables
Total Aset dari Pihak-pihak Berelasi	13.519.783	10.708.885	86,92%	75,7%	2.810.898	26,25%	Total Assets from Related Parties
Total Aset	15.555.081	14.144.434			1.410.647	9,97%	Total Assets

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Liabilitas Percentage of Total Liabilities		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Balance of Related Parties in Liabilities
			2022 (%)	2021 (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)	
Pinjaman Penerusan	55.127	55.127	13,73%	15,50%	-	0,00%	Two-step Loans
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	7.903	-	1,97%	-	7.903	100,00%	Accrued expenses, provisions and other payables
Total Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi	63.030	55.127	15,69%	15,50%	7.903	14,34%	Total Liabilities from Related Parties
Total Liabilitas	401.612	355.720			45.892	12,90%	Total Liabilities

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Pendapatan Percentage of Total Revenue		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Related Party Transactions in Revenue
			2022 (%)	2021 (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)	
Pendapatan dari pihak-pihak Berelasi	886.975	726.101	81,46%	78,7%	160.874	22,16%	Revenue from related parties
Total Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi	886.975	726.101	81,46%	78,7%	160.874	22,16%	Total Revenues from related parties
Total Pendapatan	1.088.852	922.507			166.345	18,03%	Total Revenues

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Usaha	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Beban Percentage of Total Expenses		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Related Party Transactions in Operating Expenses
			2022 (%)	2021 (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)	
Beban penjaminan	7.903	-	2,05%	-	7.903	100,00%	Guarantee expense



Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Usaha	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Beban Percentage of Total Expenses		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Related Party Transactions in Operating Expenses
			2022 (%)	2021 (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase Percentage (%)	
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)	
Beban bunga	3.928	4.135	1,02%	1,24%	(207)	(5,01%)	Interest expense
Kompensasi dan remunerasi manajemen kunci	21.817	18.624	5,65%	5,58%	3.193	17,14%	Compensation and remuneration of key management
Total Beban Usaha dari Pihak-pihak Berelasi	33.648	22.759	8,71%	6,8%	10.889	47,84%	Total Operating Expenses from Related Parties
Total Beban Usaha	386.216	333.941			52.275	15,65%	Total Operating Expenses

Kebijakan Perseroan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi serta Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Seluruh transaksi pihak berelasi/afiliasi di atas merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), Perseroan telah mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 7 (Revisi 2015).

Di tahun 2022, tidak terdapat transaksi material terkait transaksi pihak berelasi. PT PII bukan merupakan perusahaan yang memperdagangkan ekuitasnya kepada umum. Seluruh saham PT PII dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian seluruh transaksi telah diketahui oleh pemegang saham.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Di tahun 2022, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Implikasi terhadap Perusahaan Implication to the Company
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Law Number 3 Year 2022 concerning State Capital	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, Dan Pindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Government Regulation Number 17 Year 2022 concerning the Funding and management of Budget for the Preparation, Construction and Transfer of State Capital As Well As the Administration of Special Capital Region of the Nation	Sebagai dasar dan Pedoman bagi Perseroan selaku Badan Usaha Penjamin Infrastruktur yang ditugaskan pemerintah untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara As the foundation and guideline for IIGF as an Infrastructure Guarantee Agency assigned by the government to support the development of infrastructure in State Capital area
3.	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara Government Regulation Number 62 Year 2022 concernign the Authority of State Capital	

Company Policy Regarding the Review Mechanism of Transactions and Fulfillment of Related Regulations and Provisions

All related party/affiliated transactions above are affiliated transactions that are conducted in order to generate operating revenues and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously. As stated in the Audited Financial Statements for the 2022 fiscal year audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC), the Company has disclosed transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2015).

In 2022, there were no material transactions related to related party transactions. IIGF is not a company that trades its equity to the public. All shares of IIGF are owned by the Republic of Indonesia. Therefore, all transactions have been recognized by the shareholders.

Changes in Laws and Regulations

In 2022, there were several regulatory changes that significantly impacting the Company as disclosed in the following table:

No.	Nama Peraturan <i>Name of Regulation</i>	Implikasi terhadap Perusahaan <i>Implication to the Company</i>
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara Minister of Finance Regulation Number 139/PMK.08/2022 Year 2022 concerning the Facility for the Preparation and Realization of Transaction in the Utilization of State Assets and/or Transfer of State Assets for the Preparation, Construction and Transfer of State Capital	
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya Minister of Finance Regulation Number 146/PMK.06/2022 Year 2022 concerning the Preparation of Review, Reporting, Monitoring, and Evaluation of State Equity in State Companies and Other Legal Institutions.	Sebagai pedoman Perseroan dalam menyampaikan Laporan penggunaan Penyertaan Modal Negara As a guideline for IIGF in submitting Report on the use of State Equity
6.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Ministry of Manpower Regulation Number 18 Year 2022 concerning the Determination of Minimum Wage of 2022	Sebagai dasar Perseroan dalam pengaturan dan penetapan upah karyawan As a basis for IIGF in setting and determining employee wages
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Ministry of Finance Regulation Number 148/PMK.08/2022 Year 2022 concerning the Scope of Management of Government Guarantee by Infrastructure Guarantee Agency	Sebagai dasar dan Pedoman Perseroan selaku Bada Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam pelaksanaan Penjaminan Pemerintah pusat bersama Pemerintah As a basis and guideline for IIGF as an Infrastructure Guarantee Agency in exercising central Government Guarantee with the Government
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Government Regulation Number 53 Year 2022 concerning Addition of the State Capital of the Republic of Indonesia into Corporate Share Capital of the Company	Penambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Perseroan sebesar Rp1.085.000.000.000,00 (satu triliun delapan puluh lima miliar rupiah), perubahan Anggaran Dasar terkait Modal Perseroan. Addition of State Equity to IIGF of Rp1,085,000,000,000.00 (one trillion eighty five billion rupiah), changes to Articles of Association related to IIGF's Capital.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah penerapan dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang relevan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontijensi dan asset kontijensi tentang kontrak memberatkan – Biaya memenuhi kontrak";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa".

Dampak terhadap Laporan Keuangan

Implementasi dari standar-standar atau regulasi tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Perusahaan mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari

Changes in Accounting Policy

The following is the adoption of the relevant new and revised Financial Accounting Standards ("FAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") effective from January 1, 2022:

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent asset related to onerous contracts – Cost of fulfilling the contract";
- Amendments to PSAK 71: "Financial instruments"; and
- Annual adjustment to PSAK 73: "Leases".

Impact on Financial Statements

The implementation of these standards and regulations did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact on the current or prior year financial statements.

Regarding the DSAK IAI press release "Compensation Attribution in the Service Period" in April 2022, the Company changed the policy related to the attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in SFAS 24 for the



program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021. Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material terhadap Perseroan, sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan pada tahun berjalan.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan di Tahun 2022

Sebagaimana kita ketahui, isu terkini dalam penyelenggaraan Infrastruktur di Indonesia yakni adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada keterbatasan aktivitas hingga anggaran yang dipandang dapat berpotensi memengaruhi bisnis Perseroan akibat adanya kemungkinan tidak berjalannya proyek sesuai rencana, namun dengan keterbatasan kondisi yang ada Perseroan terus mendukung pengembangan infrastruktur dan pendampingan penjaminan diawal sehingga lingkup KPBU dan penjaminan yang diselenggarakan tetap bisa optimal dan diupayakan untuk tidak terlalu membebani anggaran PJP. Selain itu, Perseroan turut berperan serta melalui penjaminan untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Atas hal tersebut, tidak terdapat hal-hal yang dianggap dan berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan pada tahun 2022. Hal ini didasarkan atas metode perencanaan strategis yang digunakan Perseroan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Sehubungan dengan perkembangan pandemi Covid-19, Perseroan telah melakukan penilaian atas dampak pandemi Covid-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Perseroan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Perseroan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Perseroan ataupun menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Sebagai Badan Usaha Penjamin, Perseroan berperan sebagai Risk Manager dalam penyelenggaraan infrastruktur yang mana Perseroan memiliki acuan alokasi risiko yang dapat dijadikan panduan dalam pengembangan infrastruktur. Pengelolaan risiko merupakan ruh utama Perseroan sehingga bagi kelangsungan bisnis Perseroan, tentu pengelolaan risiko menjadi hal utama. Perseroan memiliki Divisi Manajemen Risiko dan membentuk tim *Risk Officer* di setiap divisi untuk mengelola dan meng-*update* risiko Perseroan maupun risiko bisnis dalam sebuah *risk register* dalam rangka pengelolaan risiko bisnis.

Atas *assessment* yang dilakukan tersebut dan sejalan dengan tahun sebelumnya, manajemen masih meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

general fact pattern of pension programs based on Law on Job Creation No. 11/2020 and Government Regulation 35/2021. The impact of the change in calculation is immaterial to the Company, therefore the impact of the changes is recorded entirety in the current year financial statements.

Information on Business Continuity

Matters that have the Potential to Significantly Affect the Company's Business Continuity in 2022

As we know, the current issue in the implementation of Infrastructure in Indonesia is the Covid-19 pandemic which has an impact on activity limitations to the budget which is considered to have the potential to affect IIGF's business due to the possibility of not running the project as planned, however, with the limited conditions that exist, IIGF continues to support infrastructure development and guarantee assistance at the beginning so that the scope of PPP and guarantees organized can still be optimal and strive not to burden the GCA budget too much. In addition, IIGF participated through guarantees for the national economic recovery program.

For this reason, there are no matters that are considered and have the potential to significantly affect the Company's business continuity in 2022. This is based on the strategic planning method used by the Company to evaluate strengths, weaknesses, opportunities, and threats.

Management Assessment of Matters that have the Potential to Significantly Affect the Company's Business Continuity

In connection with the development of the Covid-19 pandemic, the Company has conducted an assessment of the impact of the Covid-19 pandemic on the Company's operating and business plans. Based on the assessment, the Company does not expect any material uncertainties that would cause significant losses to the Company's business and operations or raise significant doubts about the Company's ability to continue as a going concern.

Assumptions Used by Management in Assessing Matters that Have the Potential to Significantly Affect the Company's Business Continuity

As a Infrastructure Guarantee Agency, IIGF has a role as Risk Manager in the implementation of infrastructure where IIGF has a risk allocation reference that can be used as a guide in infrastructure development. Risk management is the main spirit of IIGF so that for the continuity of the Company's business, certainly risk management is the main concern. IIGF has the Risk Management Division and establishes the Risk Officer team in each division to manage and update the Company's risks and business risks in a risk register in the context of business risk management.

Based on the assessment conducted and in line with the previous year, management still believes that there are no matters that have the potential to significantly affect business continuity of the Company.





**TATA KELOLA
PERUSAHAAN
YANG BAIK
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE**

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK COMMITMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan serta membangun suatu lingkungan bisnis yang profesional, transparan, berintegritas, dan efisien yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai perusahaan.

Sebagaimana perkembangan penerapan GCG, Perusahaan menempatkan GCG dalam koridor pembangunan berkelanjutan atau *sustainability development*, yang diharapkan dapat berdampak positif baik bagi Perseroan sendiri maupun bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi usahanya. Dengan penyelenggaraan operasional yang berbasis pada tata kelola perusahaan yang baik dan *best practices* ini, Perusahaan berharap dapat berkontribusi pada terciptanya suatu iklim usaha yang mengakomodir persaingan yang sehat di Indonesia serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu bagi Perseroan, implementasi GCG yang mengedepankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku universal disertai penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif diharapkan akan memfasilitasi setiap elemen untuk melaksanakan tugasnya sesuai etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta membangun hubungan industrial yang berlandaskan etika antara pemangku kepentingan dan perusahaan.

Prinsip GCG

Prinsip GCG yang diadopsi ke dalam sistem dan struktur GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)**
Prinsip keterbukaan ini diterapkan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai Perusahaan.
- **Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)**
Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan menetapkan kejelasan fungsi, wewenang, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ Perusahaan, guna mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- **Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
Prinsip pertanggungjawaban diwujudkan melalui kepatuhan Perusahaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, termasuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.
- **Prinsip Kemandirian (*Independency*)**
Prinsip kemandirian diwujudkan melalui penyelenggaraan pengurusan Perusahaan yang profesional serta bebas

The Company applies Good Corporate Governance (GCG) as part of the Company's commitment to protecting the stakeholders' interests and building a professional, transparent, integrity, and efficient business environment to increase and optimize the corporate value.

The Company develops GCG implementation by placing GCG in the corridor of sustainable development, which is expected to bring positive impacts both for the Company and for the community and environment around the business location. By organizing operations based on good corporate governance and best practices, the Company hopes to contribute to the creation of a business climate that accommodates healthy competition in Indonesia and sustainable economic growth and stability that can provide maximum benefits for the entire community.

Furthermore, the Company applies GCG implementation that prioritizes the application of universally applicable corporate governance principles accompanied by the implementation of effective supervision and control system, so that it is expected to facilitate each element to carry out its duties according to work ethics and responsible decision making, support integrity in financial reporting, proper risk management, and build industrial of ethics-based relationship between the stakeholders and the Company.

GCG Principles

GCG principles adopted into GCG system and structure of the Company, are as follows:

- **Transparency Principle**
Applying transparency in the decision-making process as well as in disclosing material and relevant information on the Company.
- **Accountability Principle**
Applying accountability in establishing clarity of functions, authorities, implementation and accountability of each organ of the Company, aiming to achieve sustainable performance.
- **Responsibility Principle**
Actualizing responsibility through the Company compliance with various applicable laws and regulations and sound corporate principles, including the responsibilities to the surrounding community and environment.
- **Independency Principle**
Actualizing independency through the implementation of professional Company management without conflict of interests



benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip korporasi.

• **Prinsip Kewajaran (Fairness)**

Prinsip keadilan dan kesetaraan ini diterapkan dengan melindungi kepentingan serta memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di atas secara berkesinambungan diharapkan dapat membangun suatu fundamental bisnis yang kuat dan berdaya saing bagi Perseroan sehingga Perusahaan dapat terus menjaga prospek pertumbuhan kinerja untuk jangka panjang bagi para *Stakeholders* dan membangun citra positif sebagai perusahaan yang akuntabel di mata publik luas.

Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG

Secara umum, penerapan GCG di lingkungan Perseroan menjadi bagian dari strategi transformatif untuk membangun sebuah korporasi yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan GCG memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan untuk membangun daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, agar dapat menjaga eksistensi dan pertumbuhan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien serta efektif selain juga memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ dalam Perseroan;
3. Mengatur hubungan kerja antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial yang tinggi;
5. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional;
6. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *Stakeholders*;
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
8. Memperbaiki Budaya Kerja Perseroan; dan
9. Meningkatkan citra baik Perseroan.

Dasar Hukum Penerapan GCG

Untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung secara efektif, Perseroan telah menerapkan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait implementasi GCG, yaitu di antaranya:

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya;
3. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws, regulations and corporate principles.

• **Fairness Principle**

Applying the principle of fairness and equality by protecting the interests and fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements as well as applicable laws and regulations.

The Company implements the above GCG principles on an ongoing basis so as to build strong and competitive business fundamentals, to be able to continue to maintain long-term performance growth prospects for the Stakeholders and to build positive image as an accountable company for the wider community.

Objectives and Benefits of GCG Implementation

In general, GCG implementation within the Company is part of transformative strategy to establish healthy and sustainable corporation. Therefore, GCG implementation has the following goals and objectives:

1. Optimizing the Company's value to build strong competitiveness both nationally and internationally, to maintain the existence and sustainable growth;
2. Encouraging professional, efficient and effective Company management as well as empowering functions and increasing the independence of organs within the Company;
3. Arranging the working relationship among the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Board of Directors;
4. Encouraging every decision-making and its implementation based on high moral values, the applicable laws and regulations as well as social responsibility;
5. Creating professional human resources;
6. Increasing accountability to the stakeholders;
7. Preventing irregularities in the Company management;
8. Improving the Company's Work Culture; and
9. Improving good image of the Company.

Legal Basis of GCG Implementation

To ensure effective implementation, the Company applied GCG following the laws and regulations that serve as the legal basis for GCG implementation, including:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2003 concerning the State Finance;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning the State-Owned Enterprises;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning the Limited Liability Companies;
4. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises as amended by Government Regulation No.45 of 2005 on the Establishment, Expulsion, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises;

5. Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, dan perubahannya melalui:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 197/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
 10. Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; dan
 11. Anggaran Dasar Perseroan.
 12. Keputusan Menteri Keuangan No. 556/KMK.01/2020 terkait pedoman pengelolaan komunikasi di lingkungan Kemenkeu.
 13. Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.06/2018 terkait Pelaporan, Perubahan dan Pemantauan Penggunaan tambahan PMN di lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No.35 of 2009 concerning the Participation of Capital of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company (Persero) in the Field of Infrastructure Guarantee as the latest amendment by Government Regulation of the Republic of Indonesia No.55 of 2020 concerning the Second Amendment to Government Regulation of the Republic of Indonesia No.35 of 2009 concerning the Participation of Capital of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company (Persero) in the Field of Infrastructure Guarantee;
 6. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 28/PMK.06/2013 concerning Preparation, Submission and Amendment of Long-Term Plans and Work Plans and Budgets of the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
 7. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
 8. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 78/PMK.06/2015 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, and the amendments through:
 - a. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 59/PMK.06/2016 concerning Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 78/PMK.06/2015 concerning the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
 - b. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 135/PMK.06/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Finance Number 78/PMK.06/2015 concerning Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
 9. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 197/PMK.06/2019 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
 10. Decree of the Minister of Finance No. 505/KMK.06/2020 concerning Guidelines for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance; and
 11. Article of Association of the Company.
 12. Decree of the Minister of Finance 556/2020 regarding guidelines for communication management within the Ministry of Finance.
 13. Regulation of the Minister of Finance 182/2018 related to Reporting, Modification and Monitoring the Use of additional PMN within the Ministry of Finance.



IMPLEMENTASI TATA KELOLA DI TAHUN 2022

GCG IMPLEMENTATION IN 2022

Perseroan memiliki komitmen untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas penerapan GCG di segenap aspek Perseroan. Sepanjang tahun 2022, sejumlah inisiatif implementasi GCG telah dilaksanakan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen, yakni antara lain:

1. Internalisasi *Code of Conduct* dalam berbagai kesempatan kepada seluruh karyawan Perseroan, baik karyawan lama maupun karyawan baru serta pembaharuan Pakta Integritas Tahunan karyawan;
2. Penyampaian pernyataan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi melalui pembaruan Pakta Integritas dan Komitmen Penerapan GCG;
3. Pelaksanaan *Assessment GCG Tahun Buku 2022* yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
4. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi terhadap sejumlah *area of improvement* sesuai hasil *Assessment GCG Tahun Buku 2021*;
5. Penguatan penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai sarana pengaduan pelanggaran sekaligus pengendalian internal;
6. Pelaksanaan *stakeholders survey* guna memperoleh *feedback* dari *Stakeholders* terkait kinerja Perseroan;
7. Pelaksanaan *survey* kepuasan terhadap para vendor/rekanan Perseroan;
8. Pelaksanaan sosialisasi program pengendalian gratifikasi dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) Perseroan kepada seluruh karyawan maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perseroan;
9. Partisipasi dalam ajang penghargaan terkait GCG; dan
10. Pemutakhiran atas kebijakan terkait GCG yaitu *Board Manual* dan Kebijakan Kode Etik.

Prestasi Perseroan dalam Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Tahun 2022

Atas komitmen kuat Perseroan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di tahun 2022, maka Perseroan di tahun 2022 berhasil meraih sejumlah penghargaan penting yaitu:

1. PPP Agency of The Year 2022 (*The Asset Triple A Awards*)
2. TOP GRC #4 Star, *Special Appreciation of TOP GRC Award* dan *The Most Committed GRC Leader* (TOP GRC Award 2022)
3. *Indonesia Best CEO Awards Employee Choice's 2022* (*The Iconomics Best CEO Award 2022*)
4. *The Most Sustainable Infrastructure Financing Institution* (CNBC Award 2022)
5. *Winner: Risk Champion, Runner UP: GRC Awards dan Risk Educator* (*Asian Risk Awards*)
6. *Social Innovation: Program CSR Budi Daya Magot* (*Environment dan Social Innovation Award 2022*)
7. *Top Digital Implementation, Top Special Recognition dan Top Leader on Digital Implementation – TOP Digital Award 2022*

The Company is committed to driving sustainable business growth through improving the quality of GCG implementation in all aspects of the Company. Throughout 2022, GCG implementation initiatives conducted, both independently and assisted by independent parties, including:

1. Internalization of the Code of Conduct on various occasions to all employees of the Company, both old and new employees and new employees as well as the renewal of the Employee Annual Integrity Pact;
2. Submission of commitment statements to the Board of Commissioners and the Board of Directors through the updated Integrity Pact and Commitment to Implementing GCG;
3. Implementation of 2022 GCG Assessment by Finance and Development Supervisory Agency (BPKP);
4. Followed up on recommendations for areas of improvement in the GCG implementation based on the 2021 GCG Assessment results;
5. Strengthened the implementation of the Violation Reporting System as facility for reporting violation as well as internal control;
6. Undertook stakeholder surveys to obtain feedback from the stakeholders related to the Company performance;
7. Undertook satisfaction survey on the vendors/partners of the Company;
8. Dissemination of the Company's gratification control program and whistleblowing system to the entire employees and the third parties cooperating with the Company; and
9. Participated in award events related to GCG.
10. Updating of GCG-related policies, namely the Board Manual and Code of Ethics Policy.

The Company's Achievements for the Implementation of Good Corporate Governance in 2022

Based on the Company's strong commitment in implementing Good Corporate Governance in 2022, the Company won a number of important awards in 2022, including:

1. PPP Agency of The Year 2022 (*The Asset Triple A Awards*)
2. TOP GRC #4 Star, *Special Appreciation of TOP GRC Award* and *The Most Committed GRC Leader* (TOP GRC Award 2022)
3. *Indonesia Best CEO Awards Employee Choice's 2022* (*The Iconomics Best CEO Award 2022*)
4. *The Most Sustainable Infrastructure Financing Institution* (CNBC Award 2022)
5. *Winner: Risk Champion, Runner UP: GRC Awards dan Risk Educator* (*Asian Risk Awards*)
6. *Social Innovation: Program CSR Budi Daya Magot* (*Environment & Social Innovation Award 2022*)
7. *Top Digital Implementation, Top Special Recognition dan Top Leader on Digital Implementation – TOP Digital Award 2022*

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

ASSESSMENT OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Perseroan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penerapan GCG sebagai bagian dari kepatuhan terhadap PMK 88/2015. Evaluasi atas penerapan GCG dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
4. Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

Kriteria Penilaian

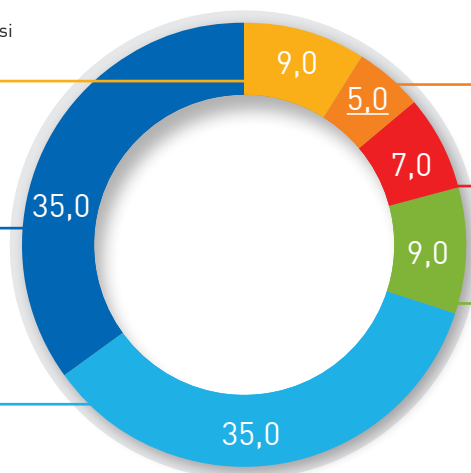
Kriteria yang digunakan dalam mengukur efektivitas penerapan GCG berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan yang terdiri dari 6 (enam) aspek pokok yaitu:

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter

Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Information Disclosure and Transparency

Direksi
Board of Directors

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



IIGF periodically monitors and evaluates GCG implementation as part of compliance with PMK 88/2015. GCG implementation is evaluated in order to:

1. Testing and assessing GCG implementation through the elaboration of the conditions of GCG implementation and comparison with the predetermined indicators and testing parameters.
2. Providing overview of the measurement results by assessing GCG implementation along with recommendations for proposed improvements, in order to reduce the gap between the level of practice and the indicators and testing parameters.
3. Monitoring the consistency of GCG implementation within the Company's organizational environment, as well as obtaining input for the improvement and development of GCG policies.
4. Encouraging more professional, transparent and efficient Company management, as well as empowering functions and increasing the independence of the Company's Organs.

Assessment Criteria

The criteria used in measuring the effectiveness of GCG implementation are based on the Decree of the Minister of Finance No. 505/KMK.06/2020 concerning Guidelines for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in Company Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance which consists of 6 (six) main aspects, namely:

Testing Aspect/Indicator/Parameter

Aspek Lainnya
Other Aspects

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan
Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
Shareholders and GMS/Capital Owners



Pihak Penilai Independen

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, Perseroan harus melakukan pengukuran teradap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bentuk:

1. Penilaian, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun; dan
2. Evaluasi, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Penilaian atas penerapan GCG Perseroan Tahun Buku 2022 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat No. S-54/PII/DK/1222.

Skor Penilaian *Assessment* atas Penerapan GCG di Perseroan

Seiring perkembangan bisnis dan infrastruktur serta *soft structure* GCG Perseroan, hasil penilaian atas penerapan GCG dalam 5 (lima) tahun terakhir disampaikan berikut ini:

Tahun Year	Skor <i>Assessment</i> GCG GCG Assessment Score	Kualitas Quality	Pelaksana Penilai Assessor
2022	88,170	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2021	89,060	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2020	89,120	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2019	89,082	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2018	86,709	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency

Pelaksanaan Penilaian atas Penerapan GCG Tahun 2022

Pelaksanaan penilaian atas penerapan GCG Perseroan Tahun Buku 2022 dilaksanakan oleh pihak independen, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan perolehan skor 88,170 dan predikat penilaian "Sangat Baik". Adapun rincian hasil penilaian dan perbandingan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Independent Appraisal Party

Based on the Regulation of the Minister of Finance No.88/PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, the Company must measure the implementation of Good Corporate Governance in the form of:

1. Assessment, which is a program to identify the implementation of Good Corporate Governance in Persero through measurement of the implementation and application of Good Corporate Governance in Persero which is carried out periodically every 1 (one) year; and
2. Evaluation, namely a program to describe the follow-up to the implementation and implementation of Good Corporate Governance in the Persero carried out in the following year after the assessment as referred to in letter a, which includes an evaluation of the assessment results and follow-up on improvement recommendations.

Assessment of the Company's GCG implementation for Financial Year 2022 conducted GCG implementation in 2022 is carried out by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) in accordance with the approval of the Board of Commissioners through Letter No. S-54/PII/DK/1222.

Assessment Score of GCG Implementation Assessment at the Company

As the business and infrastructure development as well as the Company's GCG *soft structure*, assessment results of GCG implementation in the latest 5 (five) years are as follows:

Implementation of 2022 GCG Implementation Assessment

The assessment of the Company's GCG implementation for the fiscal year 2022 was carried out by an independent party, namely the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with a score of 88.170 and an assessment predicate of "Very Good". The details of the assessment results and comparison with the previous year are as follows:

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter <i>Testing Aspect/Indicator/Parameter</i>	Bobot <i>Weight</i>	Capaian Tahun 2022 <i>2022 Achievement</i>		Capaian Tahun 2021 <i>2021 Achievement</i>	
		Skor <i>Score</i>	% Pencapaian <i>% Achievement</i>	Skor <i>Score</i>	% Pencapaian <i>% Achievement</i>
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment towards the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance</i>	7	6,670	95,291	6,810	97.282
Pemegang Saham dan RUPS <i>Shareholders and GMS</i>	9	8,575	95,275	8.362	92.907
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35	32,061	91,603	32.109	91.739
Direksi <i>Board of Directors</i>	35	31,343	89,551	32.238	92.110
Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9	8,687	96,526	8.708	96.753
Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	+5	0,833	16,667	0.833	-
Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>	100	88,170	-	89,060	-
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG <i>GCG Implementation Quality Classification</i>			Sangat Baik <i>Very Good</i>		

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Description: 0-50: Poor | 50-60: Inadequate | 60-75: Satisfactory | 75-85: Good | 85-100: Very Good

Rekomendasi Area of Improvement (AoI) GCG Perseroan Tahun Buku 2022

Penilaian atas penerapan GCG Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 menghasilkan 28 rekomendasi dengan area perbaikan/penyempurnaan Area of Improvement (AoI) yang terdiri dari:

The Company' GCG Area of Improvement (AoI) Recommendations Financial Year 2022

Assessment of the implementation of GCG for the Financial Year 2022 which was carried out in 2023 resulted in 28 recommendations with areas of Area of Improvement (AoI) consisting of:

No. Aspek 1	Aspek 1
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance
1 Perseroan belum memutakhirkan Pedoman Gratifikasi secara berkala	The Company has not updated the Gratification Guidelines regularly
2 Perseroan belum memutakhirkan Pedoman Whistleblowing System (WBS) secara berkala	The Company has not updated the Whistleblowing System (WBS) Guidelines regularly.
Aspek 2	Aspek 2
Pemegang Saham dan RUPS	Shareholders and GMS
1 Ketentuan tentang rangkap jabatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris belum memuat pengaturan mengenai jumlah jabatan maksimal dan jenis jabatan yang boleh dirangkap oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila jabatan tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan	The provisions regarding concurrent positions of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not yet contain arrangements regarding the maximum number of positions and types of positions that may be concurrently held by members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners if the position does not cause a conflict of interest.
Aspek 3	Aspek 3
Dewan Komisaris	Board of Commissioners
1 Dewan Komisaris belum sepenuhnya meaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris pada RKAP belum selaras dengan yangtercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris. Selain itu, RKAP belum memuat program kerja pelatihan Dewan Komisaris secara spesifik sesuai analisis kebutuhan.	The Board of Commissioners has not fully implemented the training program in order to improve the competence of members of the Board of Commissioners in the RKAP has not been aligned with that contained in the Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners. In addition, the RKAP does not contain a specific training work program for the Board of Commissioners according to the needs analysis.



2	Dewan Komisaris belum sepenuhnya memberikan saran dan arahan tentang kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.	The Board of Commissioners has not fully provided advice and direction on the company's information technology system policy and its implementation.
3	Dewan Komisaris belum sepenuhnya memberikan saran dan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	The Board of Commissioners has not fully provided advice and direction on accounting policies and the preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK).
4	Dewan Komisaris belum sepenuhnya memberikan saran dan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	The Board of Commissioners has not fully provided advice and direction on procurement policies and their implementation.
5	Dewan Komisaris belum sepenuhnya mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	The Board of Commissioners has not fully supervised and monitored the compliance of the Board of Directors in implementing the provisions of laws and regulations and agreements with third parties.
6	Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris yang tercantum pada Keputusan Dewan PT PII Nomor KEP-04/KOM/PII/08/22 tanggal 14 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris PT PII berbeda dengan uraian pada Pedoman Dewan Komisaris 2022.	The description of the duties and functions of the Secretary to the Board of Commissioner listed in IIGF Board Decision Number KEP-04/KOM/PII/08/22 dated 14 June 2022 concerning the Extension of the Term of Office of the Secretary of the Board of Commissioners of IIGF is different from the description in the 2022 Board of Commissioners Guidelines.
7	Sekretaris Dewan Komisaris belum sepenuhnya melaksanakan tertib administrasi dari sisi penyimpanan dan penyusunan agenda surat terutama untuk surat masuk	Secretary to the Board of Commissioner has not fully implemented orderly administration in terms of storage and preparation of letter agendas, especially for incoming letters.
8	Komite Dewan Komisaris belum menyusun risalah rapat untuk setiap rapat.	Committees of the Board of Commissioners have not prepared meeting minutes for each meeting.
9	Laporan Triwulanan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris belum memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan.	Quarterly reports of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners do not contain a comparison of the realization of activities with the annual work program.
Aspek 4 Direksi		Aspect 4 Board of Directors
1	Perseroan belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang didukung dengan aplikasi komputer.	The Company does not yet have a performance measurement system supported by computer applications.
2	Perseroan belum memiliki program penghargaan untuk unit dan individu	The Company does not yet have a reward program for units and individuals.
3	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman karyawan terkait RJPP dan RKAP (hasil kuisioner 77,00)	Lack of socialization and understanding of employees regarding RJPP and RKAP (questionnaire results 77.00).
4	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman karyawan terkait Kebijakan <i>Reward and Punishment</i> di Perseroan (hasil kuisioner 73,00)	Lack of socialization and understanding of employees regarding the Reward and Punishment Policy in the Company (questionnaire result 73.00).
5	Perseroan belum memiliki rencana kerja untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah kaitannya dengan TJSL	The Company does not yet have a work plan to implement partnership programs with micro, small and medium enterprises in relation to CSR.
6	Rendahnya realisasi Pelatihan bagi anggota Direksi sesuai dengan anggaran pelatihan anggota Direksi	Low realization of training for members of the Board of Directors in accordance with the training budget for members of the Board of Directors.
7	Perseroan belum melakukan <i>mapping</i> atas rencana kerja kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi	The Company has not mapped out a work plan for training activities for members of the Board of Directors.
8	Rencana rapat dan agenda Direksi belum dimuat dalam RKAP	The meeting plan and agenda of the Board of Directors have not been included in the RKAP.
9	Perseroan belum mencantumkan kebijakan kompensasi dalam hal Standar Pelayanan Minimum dan Mutu tidak terpenuhi di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)	The Company has not included a compensation policy in the event that the Minimum Service and Quality Standards are not met in the Standard Operating Procedures (SOP).
10	Perseroan belum memasukan audit atas teknologi informasi ke dalam Rencana Kerja Audit Internal	The Company has not included information technology audit in the Internal Audit Work Plan.
11	Perseroan belum melakukan evaluasi program K3	The Company has not evaluated the OHS program.
12	Perseroan belum melakukan evaluasi terhadap kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan secara tertulis	The Company has not evaluated the quality of the Corporate Secretary function in writing.
Aspek 5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi		Aspect 5 Information Disclosure and Transparency

1	Persepsi tingkat efektivitas pengelolaan laman/situs web perusahaan masih kurang baik (hasil kuisioner 79,00).	Perception of the level of effectiveness of the management of company pages/websites is still not good (questionnaire results 79.00).
2	Persepsi tingkat kemudahan akses dan pengunduhan terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam teman/situs web perusahaan masih kurang baik (hasil kuisioner 75,00).	The perceived level of ease of access and download of important company policies and information provided on the company's friends/website is still not good (questionnaire result 75.00).
3	Laporan tahunan 2021 disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara terpisah pada dua laporan.	The 2021 annual report is presented in Bahasa Indonesia and English separately in two reports.
4	Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan 2021 belum sepenuhnya memuat kriteria sesuai yang ditentukan KMK 505/2020 serta uraian mengenai perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan belum menjelaskan tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perseroan.	The description of activities and costs incurred in relation to corporate social responsibility in the 2021 annual report does not fully contain the criteria as specified by KMK 505/2020 and the description of important cases being faced by the company does not explain its effect on the company's financial condition.

Area perbaikan tersebut kemudian ditetapkan sebagai rencana aksi perbaikan/penyempurnaan yang menjadi fokus perhatian dari pihak manajemen dan membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar dapat meningkatkan penerapan praktik GCG sesuai *best practices* yang terus berkembang.

Tindak Lanjut Rekomendasi Area of Improvement GCG Perseroan Tahun Buku 2021

Perseroan telah menindaklanjuti hasil GCG Assessment tahun buku 2021 sesuai rekomendasi yang diberikan penilai independen. Status tindak lanjut sesuai rekomendasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The areas of improvement were then determined as action plans that become the focus of attention attention of the management and requires commitment from all commitment from all relevant parties to be implemented seriously in order to to improve the implementation of GCG practices in accordance with best practices which continues to evolve.

Follow-up on Recommendations for the Company's GCG Area of Improvement in 2021

The Company has followed up on the results of the GCG Assessment in 2021 in accordance with the recommendations provided by the independent assessor. The follow-up status according to the recommendations as of December 31, 2022 is as follows:

Aspek Aspects	Jumlah AOI Total AOI	Penyelesaian AOI AOI Settlement	Persentase Percentage
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	3	3	100%
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	5	5	100%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	24	24	100%
Direksi Board of Directors	12	12	100%
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	5	5	100%
Total	49	49	100%



STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

STRUCTURE AND MECHANISM OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan GCG yang efektif di lingkungan Perseroan didukung oleh keselarasan dari 3 (tiga) aspek sistem tata kelola (*governance system*), yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Governance Structure merupakan aspek vital yang menentukan keberhasilan penerapan tata kelola sehingga penerapan tata kelola dapat mencapai tujuan dan sasaran dari para Pemangku Kepentingan Perseroan, baik itu pemegang saham, karyawan, masyarakat maupun lingkungan.

Perseroan telah memiliki Struktur Tata Kelola Perusahaan yang telah memadai yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perseroan. Perseroan juga dilengkapi oleh infrastruktur Tata Kelola yang mendukung penyelenggaraan tata kelola secara efektif, yaitu antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tata tertib yang mengatur kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Lebih lanjut mengenai Struktur Tata Kelola Perusahaan, Perseroan telah menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1, yang mengatur organ-organ utama Perseroan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

Berikut penjelasan fungsi masing-masing organ:

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Effectiveness GCG implementation within the Company is supported by the alignment of 3 (three) aspects of the governance system, namely *governance structure*, *governance process* and *governance outcome*.

Governance Structure is vital aspect to determine the success of governance implementation so as to be able to achieve the objectives and targets of the Company's Stakeholders, including the shareholders, employees, communities or the environment.

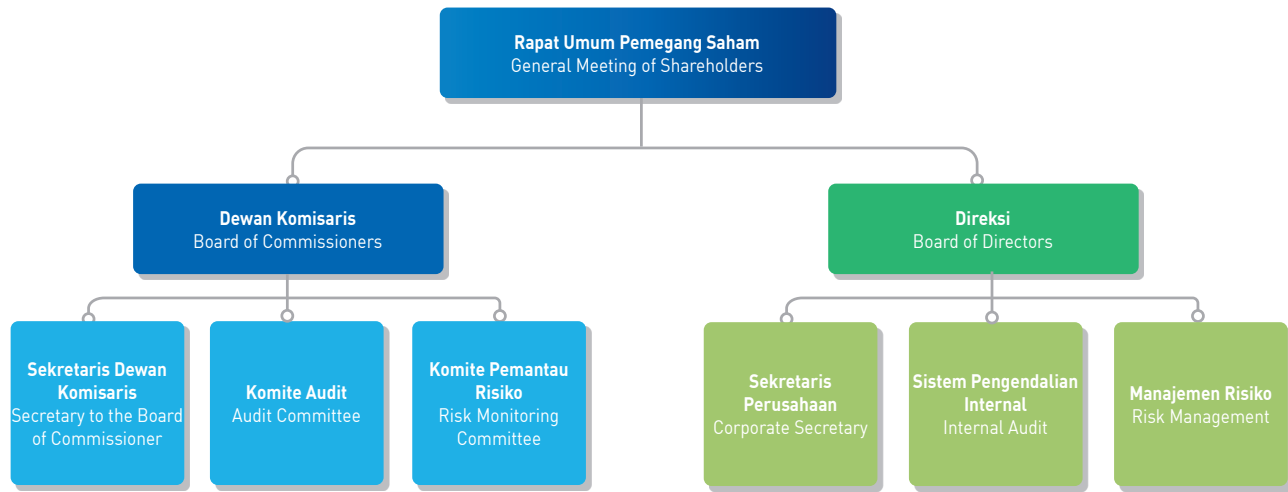
IIGF has adequate Corporate Governance Structure, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees and Work Units of the Company. The Company is also equipped with Governance infrastructure that supports the implementation of governance effectiveness, including policies and procedures, management information systems and rules that regulate the clarity of the main duties and functions of respective organizational structure.

Furthermore, IIGF adjusted the Corporate Governance Structure to the provision of Law No. 40 Year 2007 Chapter I on General Provisions Article 1, which regulates the main organs of the Company, consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors

The following is an explanation of the function of each organ:

1. General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is a Company Organ that has authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association.
2. The Board of Commissioners is the Company's Organ in charge of general and/or specific supervision following the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.
3. The Board of Directors is the Company's Organ that is authorized and fully responsible for the management and business activities for the Company interests according to the purposes and objectives of the Company and representing the Company, both inside and outside the court following the provisions of the Articles of Association.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Perseroan Structure of Corporate Governance of the Company



Sementara itu, kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan Perseroan tentunya memfasilitasi sekaligus memastikan seluruh *Governance Process* berjalan efektif sehingga memberikan *Governance Outcome* sesuai dengan ekspektasi segenap pemangku kepentingan.

Perseroan kemudian memantau secara menyeluruh penerapan ketiga aspek *governance system* tersebut ke setiap proses perencanaan, pengembangan, dan operasional bisnis Perseroan. Pembaruan maupun pengembangan struktur dan mekanisme Tata Kelola dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan serta *best practices* yang ada sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perseroan.

Didukung dengan struktur dan infrastruktur GCG yang andal menjadikan Proses/Mekanisme Tata Kelola (*governance mechanism*) dapat terlaksana dengan baik dan bebas dari benturan kepentingan. *Governance mechanism* merupakan pengaturan, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Berikut pedoman kebijakan dan aturan pelaksanaan sistem tata kelola perusahaan di Perseroan:

Meanwhile, the adequacy of IIGF's Corporate Governance structure and infrastructure certainly facilitates and ensures that the entire Governance Process runs effectively so as to provide Governance Outcome in line with the expectations of all stakeholders.

Furthermore, IIGF thoroughly monitors the implementation of the three aspects of the governance system into every process of planning, development, and business operations of the Company. Governance structures and mechanisms are updated and developed based on the existing laws and regulations as well as the best practices as part of the commitment to improving the quality of GCG implementation within IIGF.

Supported by a reliable GCG structure and infrastructure, the Governance Mechanism can be carried out properly without any conflict of interests. Governance mechanism is a clear arrangement, procedure and relationship among the parties making the decision and the parties controlling (supervision) of the decision.

The following are policy guideline and rules for the implementation of corporate governance system at IIGF:

Pedoman Guidelines	Dasar Peraturan Regulatory Basis	Isi Contents
Pedoman Tata kelola Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> › Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 berikut perubahannya; › Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 berikut perubahannya; › Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 berikut perubahannya; › Peraturan Menteri Keuangan No. 28/ PMK.06/2013; › Peraturan Menteri Keuangan No. 88/ PMK.06/2015; › Peraturan Menteri Keuangan No. 78/ PMK.06/2015 berikut perubahannya; › Anggaran Dasar Perseroan. 	Kebijakan dan prosedur sebagai landasan operasional penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) oleh segenap Organ Perseroan dan Insan Perseroan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I: Pendahuluan 2. BAB II: Organ Perusahaan 3. BAB III: Manajemen Risiko 4. BAB IV: Tata Kelola Pengendalian Internal 5. BAB V: Tata Kelola Informasi 6. BAB VI: Tata Kelola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Perusahaan 7. BAB VII: Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 8. BAB VIII: Pengukuran dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 9. BAB IX: Penutup



Pedoman Guidelines	Dasar Peraturan Regulatory Basis	Isi Contents
Code of Corporate Governance	<ul style="list-style-type: none"> › Law of the Republic of Indonesia No. 17 Year 2003; › Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003; › Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 and its amendments; › Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 Year 2005 and its amendments; › Government Regulation No. 35 of 2009 and its amendments; › Minister of Finance Regulation No. 28/ PMK.06/2013; › Minister of Finance Regulation No. 88/ PMK.06/2015; › Minister of Finance Regulation No. 78/ PMK.06/2015 and its amendments; › Article of Association of the Company 	<p>Policies and procedures as the operational basis implementation of the principles of Good Corporate Governance Good Corporate Governance (GCG) principles by all Company Organs and People.</p> <p>Company, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHAPTER I: Introduction 2. CHAPTER II: Company Organs 3. CHAPTER III: Risk Management 4. CHAPTER IV: Internal Control Governance 5. CHAPTER V: Information Governance 6. CHAPTER VI: Governance of Relationships with Stakeholders Stakeholders of the Company 7. CHAPTER VII: Long-term Plan and Work Plan Work Plan and Company Budget 8. CHAPTER VIII: Measurement and Reporting Implementation of Good Corporate Governance 9. CHAPTER IX: Closing
<p>Pedoman Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>)</p> <p>Work Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors (<i>Board Manual</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 berikut perubahannya; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 berikut perubahannya; › Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 berikut perubahannya; › Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 berikut perubahannya; › Peraturan Menteri Keuangan No. 88/ PMK.06/2015; › Peraturan Menteri Keuangan No. 28/ PMK.06/2013; dan › Anggaran Dasar Perseroan. › Law of the Republic of Indonesia No. 19 Year 2003 and its amendments; › Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 and its amendments; › Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 Year 2005 and its amendments; › Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 Year 2009 and its amendments; › Regulation of the Minister of Finance No. 88/ PMK.06/2015; › Regulation of the Minister of Finance No. 28/ PMK.06/2013; › Article of Association of the Company. 	<p>Tata laksana kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur mengenai pelaksanaan hubungan kerja antar Dewan Komisaris dan Direksi beserta organ di bawahnya masing-masing, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I: Pendahuluan 2. BAB II: Dewan Komisaris 3. BAB III: Direksi 4. BAB IV: Tata Hubungan Kerja Antar Organ Perusahaan 5. BAB V: Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan <p>Work Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which regulate the implementation of the work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors and their respective organs, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHAPTER I: Introduction 2. CHAPTER II: Board of Commissioners 3. CHAPTER III: Board of Directors 4. CHAPTER IV: Work Relationship Mechanism Among Corporate Organs 5. CHAPTER V: Assessment, Evaluation and Reporting on the Implementation of Good Corporate Governance
Kebijakan Kode Etik Code of Conduct	<ul style="list-style-type: none"> › Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015; › Anggaran Dasar Perseroan; › Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) Perseroan. › Regulation of the Minister of Finance No. 88/ PMK.06/2015; › Articles of Association of the Company; › Guidelines for Good Corporate Governance [Code of GCG] of the Company; 	<p>Tata aturan hubungan internal Perseroan (organ Perseroan dan pegawai) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dalam menjalankan bisnis di Perseroan. Adapun isinya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I: Pendahuluan 2. BAB II: Pernyataan Nilai Perusahaan 3. BAB III: Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan 4. BAB IV: Petunjuk Pelaksanaan 5. BAB V: Pelaporan dan Sanksi Pelanggaran 6. BAB VI: Penutup <p>Work Guidelines for the Company's internal relations (the Company's organs and employees) and relations with the stakeholders in running the Company's business. The contents include the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHAPTER I: Introduction 2. CHAPTER II: Statements of Corporate Values 3. CHAPTER III: Code of Conduct and Business Ethics 4. CHAPTER IV: Instruction for Implementation 5. CHAPTER V: Reporting and Sanction for Violations 6. CHAPTER VI: Closing

Pedoman Guidelines	Dasar Peraturan Regulatory Basis	Isi Contents
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	<ul style="list-style-type: none"> › Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 berikut perubahannya; › Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 berikut perubahannya; › Peraturan Menteri Keuangan No. 88/ PMK.06/2015; dan › Anggaran Dasar Perseroan. › Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2003 › Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 › Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 › Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 of 2005; › Regulation of the Minister of Finance No. 88/ PMK.06/2013; › The Company's Articles of Association. 	<p>Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I : Pendahuluan 2. BAB II : Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang 3. BAB III : Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan 4. BAB IV : Tata Kerja dan Prosedur Kerja 5. BAB V : Penganggaran dan Pembiayaan 6. BAB VI : Penutup <p>Work reference and guidelines for IIGF's Audit Committee in performing duties and authorities are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHAPTER I : Introduction 2. CHAPTER II : Duties, Responsibilities, and Authorities 3. CHAPTER III : Scheme of Employment Relationship, Membership and Term of Office 4. CHAPTER IV : Work Guidelines and Procedures 5. CHAPTER V : Budgeting and Financing 6. CHAPTER VI : Closing
Piagam Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Charter	<ul style="list-style-type: none"> › Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 berikut perubahannya; › Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 berikut perubahannya; › Peraturan Menteri Keuangan No. 88/ PMK.06/2015; dan › Anggaran Dasar Perseroan. › Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2003 on State Finances › Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 › Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 and its amendments; › Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 Year 2005 and its amendments; › Regulation of the Minister of Finance No. 88/ PMK.06/2015; › The Company's Articles of Association. 	<p>Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I : Pendahuluan 2. BAB II : Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang 3. BAB III : Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan 4. BAB IV : Tata Kerja dan Prosedur Kerja 5. BAB V : Penganggaran dan Pembiayaan 6. BAB VI : Penutup <p>Work reference and guidelines for IIGF's Risk Monitoring Committee performing duties and authorities are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHAPTER I : Introduction 2. CHAPTER II : Duties, Responsibilities, and Authorities 3. CHAPTER III : Scheme of Employment Relationship, Membership and Term of Office 4. CHAPTER IV : Work Guidelines and Procedures 5. CHAPTER V : Budgeting and Financing 6. CHAPTER VI : Closing
Piagam Audit Internal Internal Audit Charter	<ul style="list-style-type: none"> › Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 berikut perubahannya; › Anggaran Dasar Perseroan; dan › Surat Keputusan Direksi Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. SK-002/DIR/GEN/08/2010 tentang Operating Manual Perseroan. › Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 Year 2009 and its amendments; › The Company's Articles of Association; and › The Company's Board of Directors Decree No. SK-002/ DIR/GEN/08/2010 concerning the Operating Manual of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). 	<p>Prosedur operasi Audit Internal dalam menjalankan fungsinya melakukan penelaahan dan pengujian operasional Perseroan sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I : Pendahuluan 2. BAB II : Struktur, Persyaratan, dan Independensi Auditor Internal 3. BAB III : Cakupan, Kewenangan, Tanggung Jawab Auditor 4. Bab IV : Proses Penugasan Audit Internal 5. Bab V : Penutup <p>Operational procedures of Internal Audit in running function to review and audit IIGF's operations as business organization, which in general covers the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHAPTER I : Introduction 2. CHAPTER II : Structure, Requirements, and Independence of Internal Auditor 3. CHAPTER III : Scope, Authority, Responsibilities of Auditor 4. CHAPTER IV : Assignment Process of Internal Audit 5. CHAPTER V : Closing



Pedoman Guidelines	Dasar Peraturan Regulatory Basis	Isi Contents
<p>Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Policy</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007; › Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2016; › Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> Tahun 2008; › Anggaran Dasar Perseroan; dan › Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) Perseroan. › Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999, as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001; › Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2006; › Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007; › Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 50 of 2016; › Guideline for Violations Reporting System (<i>Whistleblowing System</i>) of the National Committee of Governance Policies 2008; › The Company's Articles of Association; › Guidelines for Good Corporate Governance (Code of GCG) of the Company. 	<p>Merupakan pedoman yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran yang disampaikan terhadap Perseroan. Isi dari Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I : Pendahuluan 2. BAB II : Pelaporan Pelanggaran 3. BAB II : Penanganan Pelaporan Pelanggaran 4. BAB IV : Perlindungan Pelapor 5. BAB V : Sosialisasi dan Penegakan <p>Guidelines which regulate the mechanism for violations reporting addressed to IIGF. The contents of the Guideline for Whistleblowing System are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHAPTER I : Introduction 2. CHAPTER II : Violations Reporting 3. CHAPTER III : Violations Reporting Management 4. CHAPTER IV : Protection for the Whistleblower 5. CHAPTER V : Dissemination and Enforcement
<p>Pedoman Gratifikasi Gratification Policy</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002; › Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007; › Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2016; › Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.09/2017; › Anggaran Dasar Perseroan; › Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perseroan; › Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Perseroan; dan › Pedoman Kode Etik Perseroan. › Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 as amended to Law of the Republic of Indonesia no. 20 of 2001; › Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2002; › Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007; › Government Regulation No. 35 of 2009 as amended by Government Regulation No. 50 of 2016; › Regulation of the Minister of Finance Number 7/PMK.09/2017; › The Company's Articles of Association; › Guidelines of Good Corporate Governance (Code of GCG) of The Company; › Guidelines of Whistleblowing System, the Company; and › Code of Conduct, the Company. 	<p>Pedoman ini terkait dengan penerimaan dan pemberian segala bentuk gratifikasi, batasan, serta pelaporan penerimaan dan pemberian yang berlaku bagi Insan Perseroan dan seluruh <i>Stakeholders</i>. Isi dari pedoman sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I : Pendahuluan 2. BAB II : Ketentuan Umum Gratifikasi 3. BAB III : Penutup <p>The guidelines refer to the acceptance and giving of all forms of gratifications, limitations, as well as reporting of gratifications, that apply to all personnel of the Company and its stakeholders. The contents of the guidelines are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHAPTER I : Introduction 2. CHAPTER II : General Provisions of Gratification 3. CHAPTER III : Closing

Pedoman Guidelines	Dasar Peraturan Regulatory Basis	Isi Contents
Pedoman Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Guidelines	<ul style="list-style-type: none"> › Peraturan Menteri Keuangan No. 88/ KMK.06/2015; › COSO <i>Internal Control – Integrated Framework</i> (2013); › Anggaran Dasar Perseroan; dan › Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) Perseroan. › Regulation of the Minister of Finance Number 88/ KMK.06/ 2015; › COSO Internal Control – Integrated Framework (2013); › The Company’s Articles of Association; and › Code of Good Corporate Governance (Code of GCG) of the Company. 	<p>Pedoman pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan di lingkungan Perseroan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I : Pendahuluan 2. BAB II : Implementasi Sistem Pengendalian Internal 3. BAB III : Tugas dan Tanggung Jawab <hr/> <p>Guidelines for implementing internal control applied within the Company, which includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHAPTER I : Introduction 2. CHAPTER II : Implementation of Internal Control System 3. CHAPTER III : Duties and Responsibilities

Proses bisnis yang terdiri kebijakan, pedoman, prosedur dan instruksi kerja ditinjau dan dievaluasi secara berkala oleh Perseroan untuk menjaga relevansinya dengan perkembangan bisnis Perseroan. Sementara itu, kebijakan bisnis disusun dengan memerhatikan metodologi, *best practices*, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika diperlukan, dapat melibatkan karyawan Perseroan untuk menyerap aspirasi dan ide-ide melalui penyelenggaraan *focus group discussion*. Dokumen proses bisnis juga dirumuskan melalui sinergi antara unit bisnis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses bisnis tertentu dengan unit khusus penyiapan dokumen proses bisnis (*Organization Design*).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ dengan kewenangan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan penting yang memprioritaskan kepentingan Perseroan serta dilakukan secara wajar dan transparan. Kewenangan RUPS tidak didelegasikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilaksanakan mengacu pada ketentuan antara lain:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya;
- Peraturan Menteri Keuangan No.88/ PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
- Keputusan Menteri Keuangan No.505/ KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; dan
- Anggaran Dasar Perseroan.

Hak dan Wewenang RUPS

Sesuai tercantum dalam PMK No.88/PMK.06/2015 disebutkan bahwa hak RUPS, antara lain:

- Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
- Memperoleh informasi material mengenai Persero, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;

Business processes consist of policies, guidelines, procedures and work instructions that are regularly review and evaluated by IIGF to maintain the relevance to business development of the Company. Meanwhile, business policies are formulated by considering methodologies, best practices, applicable laws and regulations, and if necessary, able to involve Company employees to absorb aspirations and ideas through focus group discussions. Business process documents are also prepared through the synergy of business units responsible for the implementation of certain business processes with a special unit for preparing business process documents (*Organization Design*).

GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

According to the Company’s Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ of authority in the decision-making process that prioritises the Company interests and is carried out in a fairly and transparently. The GMS has authorities that are not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits stipulated in the Company’s Articles of Association as well as the applicable laws and regulations.

The organization of the Company’s GMS is carried out in accordance with provisions among others:

- Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies;
- Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises; and State-Owned Enterprises and its amendments;
- Minister of Finance Regulation No. 88/ PMK.06/2015 regarding Implementation of Good Corporate Governance in Company (Persero) under the Guidance and Supervision Minister of Finance;
- Minister of Finance Decree No. 505/ KMK.06/2020 on Guidelines for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance Implementation of Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance; and
- Articles of Association of the Company..

Rights and Authorities of GMS

As stated in PMK No.88/PMK.06/2015, the rights of the GMS include:

- Attend and vote in the GMS, provided that one share entitles the holder to cast one vote;
- Obtaining material information about the Company, in a timely, measured and regular manner;



- Menerima pembagian dari keuntungan Persero yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; dan
- Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga dalam PMK No.88/PMK.06/2015 bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundangan dan/atau anggaran dasar.

Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahun 2021

Pada tahun 2021 PT PII melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang terdiri dari RUPS Tahunan mengenai Laporan Tahunan Perseroan dan RUPS Tahunan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun 2022 dengan informasi keputusan dan realisasinya sebagai berikut:

- Receive a distribution of the Company's profits intended for Shareholders in the form of dividends, and the remaining assets from liquidation, proportional to the number of shares owned; and
- Other rights based on the articles of association and laws and regulations.

It is also stated in PMK No.88 / PMK.06 / 2015 that the GMS has authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the laws and regulations and / or the articles of association.

Follow-up to the 2021 GMS Decision

In 2021, IIGF held a General Meeting of Shareholders consisting of Annual GMS regarding the Annual Report and Annual GMS regarding the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022 with the following information decisions and their realization as follows:

RUPS Tahun 2021 AGM 2021	Keputusan Decision	Realisasi Realization
RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 Annual General Meeting of Shareholders Approval of Annual Report for the Financial Year 2020	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk: <ol style="list-style-type: none"> Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020; Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan. Approved the Company's Annual Report for the Financial Year 2020 including: <ol style="list-style-type: none"> Ratifying the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2020; Granting full release and discharge (<i>acquitt et de charge</i>) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that have been carried out during the 2020 Financial Year, as long as such actions not a criminal offense and reflected in the Annual Report including the Company's Financial Statements. 	<p>Seluruh keputusan telah direalisasikan di tahun 2021, sehingga tahun 2022 tidak terdapat realisasi.</p> <p>All decisions have been realized in 2021, so that in 2022 there is no realization.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 untuk dialokasikan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> Cadangan wajib sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih Perseroan dengan nilai pembulatan sebesar Rp. 31.028.000.000 (tiga puluh satu miliar dua puluh delapan juta Rupiah); Dividen sebesar 30% (tigapuluh persen) dari laba bersih Perseroan dengan nilai pembulatan Rp. 186.168.000.000 (seratus delapanpuluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta Rupiah); dan Sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan. Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Approved the use of the Company's net profit for the fiscal year 2020 to be allocated as: <ul style="list-style-type: none"> Mandatory reserve of 5% (five percent) from the Company's net profits with a rounding value of Rp31,028,000,000 (thirty one billion twenty eight million Rupiah); Dividend of 30% (thirty percent) from the Company's net profits with a rounding value of Rp186,168,000,000 (one hundred eighty six billion one hundred sixty eight million Rupiah); and The remaining are allocated as reserved funds. Payment of dividends to be made immediately in accordance with applicable laws and regulations. 	

RUPS Tahun 2021 AGM 2021	Keputusan Decision	Realisasi Realization
	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan bahwa penetapan keputusan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun buku 2020 akan ditetapkan secara terpisah melalui keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler. Determines that the decision to adjust the salary/honorarium and allowances/facilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021 as well as the payment of tantiem based on the performance of the financial year 2020 will be determined separately through Shareholders' decision which will be carried out circularly. 	
RUPS Tahunan Persetujuan RKAP Tahun 2022 Annual General Meeting of Shareholders Approval of RKAP Year 2022	Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2022 serta Kontrak Kinerja Direksi dan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022. Approve and ratify the Company's Work Plan and Budget of the Company Year 2022 as well as the Board of Directors' Performance Contract of the Board of Directors and Performance Contract of the Board of Commissioners of the Company Year 2022.	Seluruh keputusan telah direalisasikan di tahun 2021, sehingga tahun 2022 tidak terdapat realisasi. All decisions have been realized in 2021, so that in 2022 there is no realization.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2022

Pada tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. RUPS Tahunan untuk Meminta Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022

Tanggal Pelaksanaan Date	Tempat Pelaksanaan Place
20 Juni 2022 June 20, 2022	Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10 Meeting Room of Directorate General of State Assets, Syafrudin Prawiranegara Building 10 th Floor

GMS Implementation in 2022

In 2022, the Company held 3 (three) GMS with the following details:

a. Annual GMS for Approval to Annual Report for 2022 Fiscal Year

Agenda
<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021; dan Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021. Penetapan keputusan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021; dan Penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022 serta pembayaran Tantiem berdasarkan kinerja Tahun Buku 2021.
<ol style="list-style-type: none"> Approval for 2021 Fiscal Year Annual Report, including: <ol style="list-style-type: none"> Ratification of the Company's Financial Statements for 2021 Fiscal Year. Granted full settlement and release (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions carried out during the 2021 Fiscal Year. Determination of the decision to use the Company's Net Profit for the 2021 Fiscal Year; and; Determination of salary/honorarium and allowances/facilities for the Company's Board of Commissioners and for the 2022 Fiscal Year as well as the payment of tantiem based on the performance on 2021 Fiscal Year.



Peserta	Participants
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rionald Silaban, SH Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selaku Kuasa Pemegang Saham 2. Meirijal Nur, SE Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 3. Awan Nurmawan Nuh Komisaris Utama 4. Mariatul Aini Komisaris 5. Wahyu Utomo Komisaris 6. Muhammad Wahid Sutopo Direktur Utama 7. Donny Hamdani Direktur Keuangan 8. Andre Permana Direktur Bisnis 9. Adinugroho Dwiutomo Kepala Subdit KND IV 10. Arry Supratno, S.H. Notaris 11. Lucy Luciana Suhenda KAP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rionald Silaban, SH Director General of State Assets of the Ministry of Finance Republic of Indonesia, as Authorized Shareholder 2. Meirijal Nur, SE Director of Separated State Assets, Directorate General of State Assets State Assets, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia 3. Awan Nurmawan Nuh President Commissioner 4. Mariatul Aini Commissioner 5. Wahyu Utomo Commissioner 6. Muhammad Wahid Sutopo President Director 7. Donny Hamdani Finance Director 8. Andre Permana Business Director 9. Adinugroho Dwiutomo Head of Subdit KND IV 10. Arry Supratno, S.H. Notary 11. Lucy Luciana Suhenda KAP
Keputusan	Keputusan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021; dan b. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan. 2. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp625.402.136.000 (enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk dialokasikan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. Cadangan wajib sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp31.270.106.800 (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah); b. Dividen sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp156.350.534.000 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah); dan c. Sisanya sebesar Rp437.781.495.200 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan. Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3. Penetapan keputusan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2021 akan ditetapkan secara terpisah melalui keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the Company's Annual Report for the Financial Year 2021 including: <ol style="list-style-type: none"> a. Ratifying the Company's Financial Statements for the Financial Year 2021; and b. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervision and management actions that have been carried out during the Financial Year 2021, as long as such actions are not criminal offenses and are reflected in the Annual Report including the Company's Financial Statements Company. 2. Approved the use of net profit for the 2021 financial year in the amount of IDR 625,402,136,000 (six hundred twenty five billion, four hundred and two million, one hundred and thirty-six thousand rupiah) to be allocated as: <ol style="list-style-type: none"> a. Mandatory reserve amounting to 5% (five percent) of net profit or amounting to net profit or amounting to Rp31,270,106,800 (thirty one billion two hundred seventy million one hundred and six thousand eight hundred rupiah); b. Dividends amounting to 25% (twenty-five percent) of net profit or amounting to net income or amounting to Rp156,350,534,000 (one hundred and fifty six billion three hundred and fifty million five hundred and thirty-four thousand rupiah); and c. The remaining amount of Rp437,781,495,200 (four hundred and thirty-seven billion seven hundred eighty-one million four hundred ninety-five thousand two hundred rupiah) shall be designated as retained earnings. Payment of dividends to be made immediately in accordance with applicable laws and regulations. 3. Determination of the decision to adjust the salary/honorarium and allowances/facilities of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners Fiscal Year 2022 as well as tantiem payment based on the performance in 2021 will be determined separately through decision of the Shareholders which will be made by circular

Realisasi	Realization
Per 31 Desember 2022, seluruh keputusan hasil RUPS untuk Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 telah sepenuhnya ditindaklanjuti dan direalisasikan.	As of December 31, 2022, all resolutions of the GMS for the Company's Annual Report for the Financial Year 2021 have been fully followed up and realized.

b. RUPS Luar Biasa untuk Meminta Persetujuan atas RJP Tahun 2023 – 2027

b. Extraordinary GMS to Request Approval of Company's Long Term Plan Year 2023 -2027

Tanggal Pelaksanaan Date	Tempat Pelaksanaan Place	Agenda
15 Desember 2022 December 15, 2022	Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10 Meeting Room of Directorate General of State Assets, Syafrudin Prawiranegara Building 10 th Floor	Persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perseroan Tahun 2023 - 2027 Approval of the Company's Long Term Plan 2023 - 2027

Peserta	Participants
1. Rionald Silaban, SH Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selaku Kuasa Pemegang Saham	1. Rionald Silaban, SH Director General of State Assets of the Ministry of Finance Republic of Indonesia, as Authorized Shareholder
2. Meirijal Nur, SE Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	2. Meirijal Nur, SE Director of Separated State Assets, Directorate General of State Assets State Assets, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
3. Tri W. Retno Mulyani Direktur Hukum dan Humas	3. Tri W. Retno Mulyani Director of Law and Public Relations
4. Dodok Dwi Handoko Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas KND	4. Dodok Dwi Handoko Restructuring, Privatization and Effectiveness Reviewer KND
5. Awan Nurmawan Nuh Komisaris Utama	5. Awan Nurmawan Nuh President Commissioner
6. Mariatul Aini Komisaris	6. Mariatul Aini Commissioner
7. Wahyu Utomo Komisaris	7. Wahyu Utomo Commissioner
8. Muhammad Wahid Sutopo Direktur Utama	8. Muhammad Wahid Sutopo President Director
9. Donny Hamdani Direktur Keuangan	9. Donny Hamdani Finance Director
10. Andre Permana Direktur Bisnis	10. Andre Permana Business Director
11. Adinugroho Dwiutomo Kepala Subdit KND IV	11. Adinugroho Dwiutomo Head of Sub Directorate of KND IV
12. Hendro Nugroho Kepala Seksi KND IV	12. Hendro Nugroho Section Head of KND IV
13. Yunan Novaris EVP Corporate Secretary & Communication PT PII	13. Yunan Novaris EVP Corporate Secretary & Communication IIGF
14. Arry Supratno, S.H. Notaris	14. Arry Supratno, S.H. Notary

Keputusan	Decision
Menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perseroan Tahun 2023 – 2027 yang diajukan oleh Direksi.	Approved and ratified the Company's Long Term Plan 2023 - 2027 proposed by the Board of Directors.

Realisasi	Realization
Per 31 Desember 2022, seluruh keputusan RUPS LB untuk Rencana Jangka Panjang Perseroan Tahun 2023 – 2027 telah ditindaklanjuti dan direalisasikan.	As of December 31, 2022, all resolutions of the extraordinary GMS for the Company's Long Term Plan 2023 - 2027 have been followed up and realized.



c. RUPS Tahunan untuk Meminta Persetujuan atas RKAP Tahun Buku 2023

c. Annual GMS to Request Approval of Company's Work Plan and Budget for Fiscal Year 2023

Tanggal Pelaksanaan <i>Date</i>	Tempat Pelaksanaan <i>Place</i>	Agenda
15 Desember 2022 December 15, 2022	Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10 Meeting Room of Directorate General of State Assets, Syafrudin Prawiranegara Building 10 th Floor	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2023; Persetujuan atas Kontrak Kinerja Manajemen Perseroan Tahun 2023; dan Persetujuan atas Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023. <ol style="list-style-type: none"> Approval of the Company's Work Plan and Budget Year 2023; Approval of the Company's Management Performance Contract Year 2023; and Approval of the Performance Contract of the Company's Board of Commissioners Year 2023.

Peserta	Participants
1. Rionald Silaban, SH Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selaku Kuasa Pemegang Saham	1. Rionald Silaban, SH Director General of State Assets of the Ministry of Finance Republic of Indonesia, as Authorized Shareholder
2. Meirijal Nur, SE Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	2. Meirijal Nur, SE Director of Separated State Assets, Directorate General of State Assets State Assets, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
3. Tri W. Retno Mulyani Direktur Hukum dan Humas	3. Tri W. Retno Mulyani Director of Law and Public Relations
4. Dodok Dwi Handoko Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas KND	4. Dodok Dwi Handoko Restructuring, Privatization and Effectiveness Reviewer KND
5. Awan Nurmawan Nuh Komisaris Utama	5. Awan Nurmawan Nuh President Commissioner
6. Mariatul Aini Komisaris	6. Mariatul Aini Commissioner
7. Wahyu Utomo Komisaris	7. Wahyu Utomo Commissioner
8. Muhammad Wahid Sutopo Direktur Utama	8. Muhammad Wahid Sutopo President Director
9. Donny Hamdani Direktur Keuangan	9. Donny Hamdani Finance Director
10. Andre Permana Direktur Bisnis	10. Andre Permana Business Director
11. Adinugroho Dwiutomo Kepala Subdit KND IV	11. Adinugroho Dwiutomo Head of Sub Directorate of KND IV
12. Hendro Nugroho Kepala Seksi KND IV	12. Hendro Nugroho Section Head of KND IV
13. Yunan Novaris EVP Corporate Secretary & Communication PT PII	13. Yunan Novaris EVP Corporate Secretary & Communication IIGF
14. Arry Supratno, S.H. Notaris	14. Arry Supratno, S.H. Notary

Keputusan	Decision
Menyetujui dan mengesahkan: 1. Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2023; 2. Persetujuan atas Kontrak Kinerja Manajemen Perseroan Tahun 2023; dan 3. Persetujuan atas Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023	Approve and ratify: 1. Approval of the Company's Work Plan and Budget Company Year 2023; 2. Approval of the Company's Management Performance Contract Year 2023; and 3. Approval of the Board of Commissioners Performance Contract Company Year 2023

Realisasi	Realization
Per 31 Desember 2022, seluruh keputusan hasil RUPS untuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2023 telah sepenuhnya ditindaklanjuti dan direalisasikan.	As of December 31, 2022, all resolutions of the GMS for Company's Work Plan and Budget Year 2023 have been fully followed up and realized.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif dan bertindak secara independen dalam melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan Perseroan, jalannya kepengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan. Sesuai dengan fungsi pengawasan yang diembannya tersebut, Dewan Komisaris juga bertugas memastikan Perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG di segenap aspek bisnisnya serta di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.

Landasan/Dasar Hukum

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Menteri Keuangan No.88/ PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan berikut peraturan pelaksanaannya
3. Peraturan Menteri Keuangan No.197/ PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
4. Peraturan Menteri Keuangan No.106/ PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan

Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 197/ PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perseroan di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan lain yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai suatu board memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang akuntansi, keuangan, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan industri asuransi, pemahaman regulasi serta manajemen dan pengendalian risiko.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjabat untuk periode selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

In accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, the Board of Commissioners is collectively responsible and acts independently in carrying out general and/or specific oversight of the Company's policies, the course of the Company's management and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company. In accordance with its supervisory function, the Board of Commissioners is also in charge of ensuring that the Company has implemented GCG principles in every business aspect at all organization levels of the Company.

Legal Foundation/Base

1. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies
2. Minister of Finance Regulation No. 88/ PMK.06/2015 regarding Implementation of Good Corporate Governance in Company (Persero) under the Guidance and Supervision Minister of Finance and its implementing regulations
3. Minister of Finance Regulation No. 197/ PMK.06/2019 regarding Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners of the Company (Persero) under Guidance and Supervision of the Minister of Finance
4. Minister of Finance Regulation No. 106/ PMK.06/2017 regarding Performance Management of the Board of Directors and Board of Commissioners of Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance; and
5. Articles of Association of the Company

Term of Office of the Board of Commissioners

Members of the Company's Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS and have fulfilled the general and specific requirements stipulated in Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 197/ PMK.06/2019 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners Members of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, the Company's Articles of Association, and other applicable provisions. All members of the BOC as a board have the core competencies required to ensure the effectiveness of the BOC. These competencies include accounting, finance, strategic abilities, business understanding, managerial experience and depth, insurance industry knowledge, regulatory understanding and risk management and control.

Members of the Company's Board of Commissioners serve for a period of period of 5 (five) years, and may be reappointed for 1 (one) term of office. Members of the Board of Commissioners at any time may be dismissed by resolution of the GMS with stating the reason.



Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dimana salah satunya ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Hingga per tanggal 31 Desember 2022, susunan keanggotaan Dewan Komisaris adalah berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Position Period
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris Utama President Commissioner	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 205/KMK.06/2020. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 205/KMK.06/2020.	20 April 2020 s.d. 19 April 2025 April 20, 2020 until April 19, 2025	Ke-1 First period
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	Diangkat pertama kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 861/KMK.06/2018 dan diangkat kembali melalui KMK No. 720/KMK.06/2019. Appointed for the first time based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 861/KMK.06/2018 and reappointed through KMK No. 720/KMK.06/2019.	19 Agustus 2019 s.d. 18 Agustus 2024 August 19, 2019 until August 18, 2024	Ke-2 Second period
Wahyu Utomo	Komisaris Commissioner	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 205/KMK.06/2020. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 205/KMK.06/2020.	20 April 2020 s.d. 19 April 2025 April 20, 2020 until April 19, 2025	Ke-1 First period

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 33/KMK.06/2023 tanggal 31 Januari 2023, terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Januari 2023

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris Utama	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 205/KMK.06/2020. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 205/KMK.06/2020.	20 April 2020 s.d. 19 April 2025 April 20, 2020 until April 19, 2025	Ke-1
Mariatul Aini	Komisaris	Diangkat pertama kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 861/KMK.06/2018 dan diangkat kembali melalui KMK No. 720/KMK.06/2019. Appointed for the first time based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 861/KMK.06/2018 and reappointed through KMK No. 720/KMK.06/2019.	19 Agustus 2019 s.d. 18 Agustus 2024 August 19, 2019 until August 18, 2024	Ke-2
Iqbal Islami	Komisaris	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 33/KMK.06/2023. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023.	31 Januari 2023 s.d. 30 Januari 2028 January 31, 2023 until January 30, 2028	Ke-1

Profil singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan 2022 ini.

The Board of Commissioners' Composition

In 2022, the Company's Board of Commissioners consists of 3 (three) members, including a President Commissioner. As of December 31, 2022, the membership composition of the Board of Commissioners is as follows:

Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia Indonesia No. 33/KMK.06/2023 dated January 31, 2023, there is a change in the composition of the Board of Commissioners. With Thus, the composition of the Board of Commissioners membership as of January 31, 2023 is as follows:

Composition of the Board of Commissioners as of January 31, 2023

Brief profile of each Board of Commissioners member is available in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter of this 2022 Annual Report.

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan individu profesional yang telah memenuhi persyaratan minimum untuk diangkat sebagai Komisaris Independen, yaitu tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau mengambil keputusan yang objektif semata-mata demi kepentingan Perseroan. Komisaris Independen ditunjuk untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam rangka menjaga independensi dan akuntabilitas Perseroan.

Hingga per tanggal 31 Desember 2022, Pemegang Saham Perseroan belum mensyaratkan adanya Komisaris Independen mengingat keberadaannya belum diperlukan di Perseroan. Namun, Perseroan tetap mengedepankan independensi dan profesionalitas sebagai aspek utama yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris guna meminimalisir benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan memastikan setiap keputusan diambil seobjektif mungkin tanpa pengaruh dari pihak manapun.

Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Pedoman Dewan Komisaris yang terakhir diperbaharui pada tahun 2022. *Board Manual* dan Pedoman Dewan Komisaris disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Pokok-pokok yang diatur dalam dokumen-dokumen tersebut secara umum terkait ketentuan mengenai hubungan kerja, komunikasi, dan aktivitas antara organ Perseroan. Pedoman tersebut membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan Perseroan yang berbasis praktik bisnis terbaik dan prinsip-prinsip GCG dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan.

Berikut pokok-pokok yang dimuat dalam *Board Manual* yang berhubungan dengan Dewan Komisaris:

1. Organisasi
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris
3. Pedoman Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
4. Pedoman Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris
5. Rapat Dewan Komisaris
 - a. Pengertian
 - b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
6. Pedoman Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
7. Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
8. Organ Pendukung Dewan Komisaris
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko

Independent Commissioner

Independent Commissioners are professional individuals who have met the minimum requirements to be appointed as Independent Commissioners, which are not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and the controlling Shareholders, and free from business or other relationships that may affect their ability to act independently or make objective decisions solely in the interests of the Company. Independent Commissioners are appointed to strengthen the implementation of the Board of Commissioners' supervisory function in order to maintain the Company's independence and accountability.

As of December 31, 2022, the Company's Shareholders is not yet required an Independent Commissioner since its existence is not yet needed in the Company. However, the Company continues to prioritize independence and professionalism as the main aspects that must be possessed by the Board of Commissioners members in order to minimize conflict of interests in decision making and to ensure that every decision is taken as objectively as possible without influence from any party.

Board Charter

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners are regulated further in the Board Manual and the Board of Commissioners Charter which was last updated in 2022. The Board Manual and Board of Commissioners' Guidelines are prepared based on the principles of corporate law, the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, direction by the Shareholders and the best practices of Good Corporate Governance.

The main points regulated in these documents are generally related to provision regarding working relationships, communication and activities among the Company's organs. These guidelines assist the Board of Commissioners in running their supervisory duties over the Company management based on the best business practices and GCG principles in an effort to achieve the Company's vision and mission.

The contents of the Board Manual related to the Board of Commissioners are as follows:

1. Organization
2. Duties, Authorities and Obligations of the Board of Commissioners
3. Guidelines for Division of Duties, Authorities and Responsibilities of the Board of Commissioners
4. Guidelines for Supervisory Policy of the Board of Commissioners
5. Board of Commissioners Meetings
 - a. Definition
 - b. Board of Commissioners Meetings Holding
6. Guidelines for Decision-Making of the Board of Commissioners
7. Guidelines for Performance Assessment of the Board of Commissioners
8. Supporting Organs of the Board of Commissioners
 - a. Audit Committee
 - b. Risk Monitoring Committee



Ketentuan lanjutan dari Board Manual yang diakomodir dalam Pedoman Dewan Komisaris adalah pedoman pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Pedoman pelaksanaan tugas umum Dewan Komisaris
2. Pedoman pembagian tugas Dewan Komisaris
3. Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas rancangan RJP yang disampaikan kepada Direksi.
4. Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas rancangan RKAP atau perubahan RKAP yang disampaikan kepada Direksi
5. Pedoman pelaksanaan tugas pemberian arahan Dewan Komisaris
6. Pedoman pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris
7. Tugas terkait potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris
8. Tugas terkait praktik tata kelola perusahaan yang baik Perseroan

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama memiliki kedudukan yang setara, namun Komisaris Utama dalam kapasitasnya sebagai *primus inter pares* bertugas mengoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan operasional.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan meliputi antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/ atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - d. Mengetahui segala kebijakan dan Tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;

Further provisions of the Board Manual that are accommodated in the Board of Commissioners' Board of Commissioners Manual are the guidelines for the implementation of duties, namely:

1. Guidelines for the implementation of the general duties of the Board of Commissioners
2. Guidelines for the division of duties of the Board of Commissioners
3. Guidelines for the implementation of the duties of the Board of Commissioners in approving the RJP draft submitted to the Board of Directors. submitted to the Board of Directors.
4. Guidelines for the implementation of the duties of the Board of Commissioners in approval of the draft RKAP or changes to the RKAP submitted to the Board of Directors
5. Guidelines for the implementation of the Board's directive duties Commissioners
6. Guidelines for the implementation of supervisory duties of the Board of Commissioners
7. Tasks related to potential conflicts of interest involving Board of Commissioners
8. Tasks related to good corporate governance practices Company

Duties and Authorities of the Board of Commissioners

Each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner has an equal position, but the President Commissioner in his capacity as *primus inter pares* is in charge of coordinating the activities of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners does not participate in making operational decisions.

The Duties, Authorities and Obligations of the Board of Commissioners are set forth in the Company's Articles of Association include, among others:

1. The Board of Commissioners has the duty to supervise management policies, the course of management in general both regarding the Company and the Company's business conducted by the Board of Directors as well as providing advice to Board of Directors, including supervision of the implementation of the Company's the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget of the Company as well as the provisions of the Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as laws and regulations which applicable laws and regulations, for the benefit of Company and as per with the purposes and objectives of the Company.
2. The Board of Commissioners is authorized to:
 - a. View books, letters, and other documents, examine cash for verification purposes and other other documents, examine cash for verification purposes and other letters securities and inspect assets of the Company;
 - b. Entering the grounds, buildings and offices which are used by the Company;
 - c. Request explanations from the Board of Directors and/ or other officials regarding all issues concerning the management of the Company;
 - d. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
 - e. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners Meeting;
 - f. Appoint and dismiss the secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary;

- g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - h. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
 - i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
 - j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - k. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
- a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perseroan;
 - b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
 - g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - i. Membentuk Komite Audit;
 - j. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - k. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - l. Melaporkan kepada Perseroan mengenai sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - m. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- g. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of these Articles of Association;
 - h. Establishing other Committees in addition to the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the ability of the company;
 - i. Use experts for certain matters and within period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
 - j. Performing management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with provisions of these Articles of Association;
 - k. Attend the Meeting of the Board of Directors and provide views on matters that are discussed;
 - l. Carry out other supervisory authority as long as not in conflict with the laws and regulations, Articles of Association, and/or decision of the General Meeting of Shareholders;
3. The Board of Commissioners is obliged to:
- a. Provide advice to the Board of Directors in the management of Company;
 - b. Examining and reviewing as well as signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Articles of Association;
 - c. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholder regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget regarding reasons for the Board of Commissioners to sign the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget Company;
 - d. Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issue deemed important for the management of the Company;
 - e. Report immediately to the General Meeting of Shareholders if there are symptoms of declining performance of the Company;
 - f. Examining and reviewing the periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign annual report;
 - g. Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested;
 - h. Prepare an annual work program and include it in Company's Work Plan and Budget;
 - i. Establish an Audit Committee;
 - j. Proposing the Public Accountant to the General Meeting of Shareholders;
 - k. Taking minutes of the Board of Commissioners Meeting and keeping copies thereof;
 - l. Reporting to the Company regarding his/her shares and/or or his/her family in the Company and other companies;
 - m. Provide a report on the supervisory duties that have been performed during the past fiscal year to the General Meeting of Shareholders;



- n. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 5. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- 6. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- 7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 5 apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- n. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties, to the extent not contrary to the laws and regulations, Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- 4. In carrying out their duties, each member of the Board of Commissioners must:
 - a. Comply with the Articles of Association and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, and fairness;
 - b. Being in good faith, prudent and responsible in carrying out supervisory and advisory duties advice to the Board of Directors for the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
- 5. Each member of the Board of Commissioners shall be personally liable for the Company's losses if he/she is guilty or negligent in carrying out his/her duties.
- 6. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of the Board of Commissioners, the responsibility as referred to applies jointly and severally to each member of the Board of Commissioners.
- 7. Members of the Board of Commissioners shall not be liable for losses as referred to in they can prove:
 - a. Has conducted supervision in good faith and prudence for the interests of the Company and in number 5 if accordance with the purposes and objectives of the Company;
 - b. Has no direct or indirect personal interest in the management actions of the Board of Directors which results in loss; and
 - c. Has provided advice to the Board of Directors to prevent the incidence or continuation of such losses.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris Tahun 2022

Division of Duties of the Board of Commissioners in 2022



Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM PII/04/2020 tanggal 28 April 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan No. KEP-01/KOM PII/02/2023 tanggal 9 Februari 2023, yaitu sebagai berikut:

The division of duties among members of the Board of Commissioners is carried out based on the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-02/KOM PII/04/2020 dated April 28, 2020 as last amended with No. KEP-01/KOM PII/02/2023 dated February 9, 2023, which is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris Utama President Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan seluruh tugas Dewan Komisaris; dan Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi. <ol style="list-style-type: none"> Coordinating the overall Board of Commissioners duties; and Carrying out duties related to the remuneration and nomination policy
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai Ketua Komite Audit; Bidang <i>Internal Audit, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communication, CEO Office, IIGF Institute, Corporate Strategy and Finance, Treasury and Investment, Human Capital, and Corporate Service & Procurement</i>; dan Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi. <ol style="list-style-type: none"> Also serving as the Head of Audit Committee; Matters that are related to Internal Audit, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communication, CEO Office, IIGF Institute, Corporate Strategy and Finance, Treasury & Investment, Human Capital, and Corporate Service and Procurement; Carrying out duties related to remuneration and nomination policy
Wahyu Utomo	Komisaris Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko; Bidang <i>Guidance and Consultation, Guarantee, Environment and Social, Inisiasi Bisnis, Manajemen Risiko Korporasi, Manajemen Risiko Proyek dan Klaim, Penilaian Proyek, dan Penjaminan non KPBU</i>; dan Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi. <ol style="list-style-type: none"> Also serving as the Head of Risk Monitoring Committee; Matters that are related to Guidance and Consultation, Guarantee, Environment and Social, Business Initiation, Enterprise Risk Management, Project and Claim Risk Management, Project Appraisal, and Non-PPP Guarantee; Carrying out duties related to the remuneration and nomination policies.
Iqbal Islami*	Komisaris Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko; Bidang <i>Guidance & Consultation, Guarantee, Environment & Social, Inisiasi Bisnis, Manajemen Risiko Korporasi, Manajemen Risiko Proyek dan Klaim, Penilaian Proyek, dan Penjaminan non KPBU</i>; dan Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi. <ol style="list-style-type: none"> As the Head of the Risk Monitoring Committee; Areas of Guidance & Consultation, Guarantee, Environment & Social, Business Initiation, Corporate Risk Management, Project and Claims Risk Management, Project Appraisal, and Non PPP Guarantee; and Carry out tasks related to remuneration and nomination policies.

* Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 33/KMK.06/2023 tanggal 31 Januari 2023 menggantikan Wahyu Utomo
Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023 dated January 31, 2023 replacing Wahyu Utomo

Pengembangan Kompetensi dan Program Pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris Baru

Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi guna menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya dan dalam memberikan nasihat yang relevan terhadap rencana strategis yang disiapkan Direksi Perseroan.

Kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris pada tahun 2022 tersaji pada bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan 2022 ini.

Selain peningkatan kompetensi, Perseroan juga melakukan Program Pengenalan Perusahaan bagi setiap anggota Dewan Komisaris baru agar anggota Dewan yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pokok-pokok bahasan dalam program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru meliputi:

Competency Development and Company Orientation Program for New Member of the Board of Commissioners

The Company provides the widest possible opportunity for the Board of Commissioners members to participate in competency development programs that is intended to improve the insight and knowledge of the Board of Commissioners that can support the implementation of its duties, functions and responsibilities and in providing relevant advice on the strategic plan prepared by the Company's Board of Directors.

Training and competency development activities participated in by the Board of Commissioners in 2022 is presented in the Company Profile chapter of this 2022 Annual Report.

Apart from the competency development, the Company also conducts the Orientation Program for each new member of the Board of Commissioners so that the Board member concerned is able to perform duties and responsibilities optimally.

The orientation program for new members of the Board of Commissioners include the following:



1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Perseroan tidak melakukan Program Pengenalan Perusahaan pada tahun 2022, dikarenakan tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru di periode tersebut.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian arahan serta nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengurusan Perseroan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku. Melalui kegiatan pengawasan yang komprehensif, Dewan Komisaris turut memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan sehingga Perseroan mampu memberikan imbal jasa yang memuaskan dan sesuai ekspektasi para Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya.

Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Realisasi Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022 Realization of the Board of Commissioners Work Program in 2022

No.	Uraian Kegiatan <i>Activity</i>	Jadwal <i>Schedule</i>	Realisasi <i>Realization</i>
Aspek Perencanaan Planning Aspect			
1	Penyusunan dan penetapan usulan RKA Dewan Komisaris Th 2023 Preparation and ratification of the 2023 RKA of the Board of Commissioners	Agustus August	Rancangan RAB dan RKA disusun pada bulan Agustus 2022 dan disampaikan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris No. S-40/PII/DK/0822 tanggal 30 Agustus 2022 The 2023 RAB and RKA Drafts were prepared in August 2022 and submitted to the Board of Directors through the Board of Commissioners Letter No.S-40/PII/DK/0822 dated August 30, 2022
2	Penyusunan dan penetapan usulan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Th 2023 Preparation and determination of the proposed Performance Contract of the Board of Commissioners of 2023	September	usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2023 dikirimkan kepada RUPS melalui surat Dewan Komisaris No. S-47/PII/DK/1022 tanggal 26 Oktober 2022 dan ditetapkan saat RUPS Persetujuan RKAP Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 The 2023 Performance Contract (IKU) Proposal Draft of the Board of Commissioners was submitted to the GMS through the Board of Commissioners Letter No. S-47/PII/DK/1022 dated October 26, 2022 and was ratified at the GMS during the Approval of the Company's 2022 RKAP on December 15, 2022

1. Implementation of GCG principles by the Company.
2. An overview of the Company related to the objectives, characteristic and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues.
3. Information related to delegated authority, internal and external audit of internal control systems and policies, including Audit Committee.
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the prohibited matters.

The Company did not hold Orientation Program in 2022 since there was no new member of the Board of Commissioners during the period.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2022

Throughout 2022, the Board of Commissioners carried out a number of activities as part of the implementation of the duties and responsibilities of supervising and providing direction and advice to the Board of Directors in the Company management. These activities were carried out by the Board of Commissioners according to the applicable laws and regulations as well as internal regulations of the Company. Through comprehensive supervisory activities, the Board of Commissioners also ensures the achievement of the predetermined performance targets so that the Company is able to provide satisfactory returns and meet the expectations of Shareholders and other Stakeholders.

Report on supervisory duties implementation of the Board of Commissioners during 2022 is as follows:

No.	Uraian Kegiatan Activity	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
3	Penelaahan dan persetujuan atas usulan RKAP 2023 dan atau RJPP PT PII Th 2023-2027 Review and approval on the proposed RKAP 2023 and or RJPP of IIGF of 2023-2027	Oktober October	Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan dan memberikan masukan atas konsep RJPP 2023-2027 kepada Direksi melalui surat nomor S-41/PII/DK/0922 tanggal 13 September 2022 yang telah seluruhnya diakomodasi oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memberikan tanggapan atas RJPP 2023-2027 kepada RUPS melalui surat no S-44//PII/DK/1022 tanggal 12 Oktober 2022 The Board of Commissioners has reviewed and provided feedback on the concept of the 2023-2027 RJPP to the Board of Directors through letter no S-41//PII/DK/0922 dated September 13, 2022 which has been fully accommodated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also provided response on the 2023-2027 RJPP to the GMS through letter no S-44//PII/DK/1022 dated October 12, 2022
4	Penyampaian tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP 2023 dan atau RJPP PT PII Th 2023-2027 Submission of the Board of Commissioners' feedback to the GMS on the RKAP 2023 and or RJPP Drafts of IIGF of 2023-2027	Oktober-November October-November	
Aspek Pengawasan Supervisory Aspect			
5	Respons atas permohonan tanggapan/ penjelasan dari Direksi/RUPS Response on the request for feedback/ explanation from the Board of Directors/GMS	Paling lambat 14 hari setelah permohonan tanggapan/ penjelasan dari Direksi/RUPS di terima lengkap No later than 14 days after the request for feedback/explanation from the Board of Directors/GMS were fully received	Seluruh permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS telah ditanggapi tepat waktu, paling lambat 14 hari setelah permohonan tanggapan/ penjelasan dari Direksi/RUPS diterima lengkap All request for feedback/explanation from the Board of Directors/GMS have been responded on time, at the latest 14 days after the request for feedback/ explanation from the Board of Directors/GMS were fully received
6	Pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Komisaris Organization of routine monthly meeting of the Board of Commissioners	Bulanan Monthly	Selama periode Tahun 2022 telah dilaksanakan rapat rutin Dewan Komisaris sebanyak 13 kali dan rapat rutin gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 15 kali During the 2022 period, 13 regular meetings of the Board of Commissioners and 15 joint-meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors have been held.
7	Pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ke-3 Supervision on the Board of Directors' compliance towards Laws and Regulations as well as Agreement with 3 rd Party	November	Rapat terkait kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ke-3 telah dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2022 Meeting on the Board of Directors' compliance towards Laws and Regulations as well as Agreement with 3 rd Parties was held on August 2022.
8	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Supervision/provision of advice on the internal control system and the implementation	Februari February	Rapat berkala dengan divisi IA dan RM mengenai sistem pengendalian internal yang dilaksanakan setiap triwulanan Regular meeting with IA and RM division regarding internal control system is held in every quarter
9	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan SDM dan pelaksanaannya Supervision/provision of advice on the HC policies and the implementation	Maret March	Update progress atas pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan SDM beserta pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda <i>highlight</i> laporan management perseroan Progress update on the supervision and provision of advice regarding HC policies and the implementation is conducted regularly in every month during the joint-meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors with the agenda of highlight of management report of the Company.



No.	Uraian Kegiatan Activity	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
10	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya Supervision/provision of advice on procurement policies and the implementation	September	Telah dilaksanakan rapat dewan komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya pada bulan Juni tahun 2022 The Board of Commissioners meeting was held to discuss procurement policies and the implementation on June 2022.
11	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan TI dan pelaksanaannya Supervision/provision of advice on IT policies and the implementation	Maret March	<i>Update</i> progress atas pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan TI dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda <i>highlight</i> laporan management perseroan Progress update on the supervision and provision of advice regarding IT policies and the implementation is conducted regularly in every month during the joint-meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors with the agenda of highlight of management report of the Company.
12	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya Supervision/provision of advice on quality and service policies and the implementation	Agustus August	Pengawasan atas Evaluasi kebijakan mutu dan pelayanan dilakukan pada setiap rapat triwulanan melalui komite pemantau risiko dan divisi monitoring klaim, serta pembahasan juga dilakukan dalam rapat rutin bulanan dengan Direksi Supervision on the Evaluation of quality and service policies is conducted in every quarter through the risk monitoring committee and claim monitoring division, the discussion is also held on monthly routine meeting with the Board of Directors
12	Pengawasan atas efektivitas audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan terkait Supervision on the effectiveness of external and internal audit as well as the implmenetation of audit on related complaints	Agustus August	Rapat berkala setiap triwulanan dengan divisi IA mengenai efektivitas audit eksternal dan internal dilaksanakan Quarterly regular meeting with the IA division on the effectiveness of external and internal audit
13	Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya Supervision on accounting policy and preparation of financial statements and the implementation	Triwulanan Quarterly	Rapat kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan pada bulan September tahun 2022 Meeting on accounting policy and preparation of financial statements was held on September 2022
14	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya Supervision/provision of advice on risk management policies and the implementation	Februari February	Rapat berkala dengan divisi RM mengenai sistem kebijakan manajemen risiko yang dilaksanakan setiap triwulanan Regular meeting with RM division on the risk management policies is held in every quarter
16	Pembahasan gejala penurunan kinerja Discussion on symptoms of performance decline	Bulanan dan sesuai kebutuhan Monthly and based on needs	Pembahasan gejala penurunan kinerja (jika ada dalam 1 bulan berjalan) dilaksanakan setiap bulan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Discussion on the symptoms of performance decline (if any during 1 current month) is held in every month during joint-meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Uraian Kegiatan Activity	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
17	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP Evaluation on the implementation of RKAP	Triwulanan Quarterly	<p>Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2022 pada semester I dan semester II telah disampaikan secara tepat waktu kepada RUPS melalui surat No: S-38/PII/DK/0822 tanggal 16 Agustus 2022, perihal Laporan pengawasan RKAP periode semester I Th 2022, dan</p> <p>Surat No. S-09/PII/DK/0223 tanggal 13 Februari 2023, perihal Laporan pengawasan RKAP periode semester II Th 2022</p> <p>Board of Commissioners' Supervisory Report on the Implementation of 2022 RKAP on the semester I and semester II has been submitted on time to the GMS through letter No. S-38/PII/DK/0822 dated August 16, 2022, concerning the RKAP supervisory report of semester I -2022, and</p> <p>Letter No. S-09/PII/DK/0223 dated February 13, 2023, concerning RKAP supervisory report of semester II -2022</p>
18	Pembahasan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Discussion regarding transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners/GMS	Sesuai kebutuhan Based on needs	Sepanjang tahun 2022 tidak ada transaksi atau tindakan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Throughout 2022, there were no transactions or actions related to the Company's businesses that require approval from the Board of Commissioners
19	Penelaahan pengusulan remunerasi Direksi Review of the remuneration proposal of the Board of Directors	Sesuai permintaan Direksi Based on the Board of Directors' request	Menyampaikan Usulan atas perhitungan tantiem tahun 2021 dan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2022 kepada RUPS pada tanggal 31 Mei 2022 melalui surat No. SR-02/PII/DK/0522 Submit a proposal on the calculation of the 2021 tantiem and the adjustment of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2022 to the GMS on May 31, 2022 through letter No. SR-02/PII/DK/0522
20	Pemantauan kinerja Direksi Monitoring on the performance of the Board of Directors	Bulanan Monthly	Rapat rutin gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengenai laporan management bulanan sepanjang tahun 2022 Regular joint meetings of the Board of Commissioners and Directors on a regular basis regarding monthly management reports throughout 2022
21	Monitoring atas proyek yang telah dijamin Monitoring of guaranteed projects	Sesuai jadwal Divisi Project Monitoring Based on the Project Monitoring Division schedule	Rapat berkala dengan divisi RM mengenai pantauan risiko atas proyek yang telah dijamin yang dilaksanakan setiap triwulanan Regular meetings with the RM Division regarding risk monitoring of guaranteed projects that are carried out quarterly
22	Monitoring atas kegiatan IIGF Institute Monitoring of IIGF Institute activities	Semesteran Every Semester	<i>Update</i> progress atas pengawasan kegiatan IIGF Institute dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda <i>highlight</i> laporan <i>management</i> perseroan Progress updates on the supervision of IIGF Institute activities and their implementation are carried out regularly every month during joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors with the agenda of highlighting the Company's management reports
23	Pemantauan pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris Monitoring on the complaints related to the Company received by the Board of Commissioners	Sesuai kebutuhan Based on needs	Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris Throughout 2022, there were no complaints related to the Company received by the Board of Commissioners



No.	Uraian Kegiatan Activity	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
24	Evaluasi atas kegiatan CSR Evaluation of CSR activities	Semesteran Every Semester	<i>Update</i> progress atas evaluasi kegiatan CSR dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dekom Direksi dengan agenda highlight laporan management perseroan Progress updates on the evaluation of CSR activities are carried out regularly every month during joint meetings of the Board of Commissioners and Directors with the agenda of highlighting the Company's management reports
25	Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan PT PII Tahun 2022 Submission of response to the 2022 Annual Report of IIGF	April	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan PT PII Tahun 2022 telah disampaikan kepada Manajemen pada bulan April 2022 Board of Commissioners' response on the 2022 Annual Report of IIGF has been submitted to the Management on April 2022
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
26	Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Submission of reports on the implementation of the Board of Commissioners duties and responsibilities	Triwulanan Quarterly	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS secara tepat waktu setiap periode Triwulanan Reports on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are submitted to the GMS in a timely manner every quarterly period
27	Penyampaian laporan pengawasan RKAP Tahun 2022 Submission of 2022 RKAP supervisory report	Semesteran Every Semester	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2022 pada semester I dan semester II telah disampaikan secara tepat waktu kepada RUPS melalui surat No: S-38/PII/DK/0822 tanggal 16 Agustus 2022, perihal Laporan pengawasan RKAP periode semester I Th 2022, dan Surat No. S-09/PII/DK/0223 tanggal 13 Februari 2023, perihal Laporan pengawasan RKAP periode semester II Th 2022 Board of Commissioners' Supervisory Report on the Implementation of 2022 RKAP on the semester I and semester II has been submitted on time to the GMS through letter No. S-38/PII/DK/0822 dated August 16, 2022, concerning the RKAP supervisory report of semester I -2022, and Letter No. S-09/PII/DK/0223 dated February 13, 2023, concerning RKAP supervisory report of semester II -2022
28	Penyampaian laporan realisasi capaian IKU Dewan Komisaris Submission of KPI achievement report of the Board of Commissioners	Triwulanan Quarterly	Laporan realisasi capaian IKU Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS secara tepat waktu setiap periode Triwulanan KPI achievement report of the Board of Commissioners has been submitted to the GMS on time in every quarter
Aspek Monitoring & Evaluasi Penerapan GCG Monitoring & Evaluation of GCG Implementation Aspect			
29	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2021 Monitoring the follow up implementation of GCG AOI recommendation by BPKP in 2021	Januari January	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2021 dilaksanakan per semester sepanjang tahun 2022. Seluruh AOI Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti sampai dengan Desember tahun 2022 Monitoring the follow up implementation of GCG AOI recommended by BPKP in 2021 was conducted every semester throughout 2022. All of the Board of Commissioners' AOIs have been followed up until December 2022

No.	Uraian Kegiatan Activity	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
30	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2022 oleh BPKP assessment on the implementation of GCG in 2022 by BPKP	Januari January	Penilaian penerapan GCG Tahun 2022 oleh BPKP telah selesai dilaksanakan berdasarkan berita acara exit meeting assessmen atas penerapan GCG PT PII Tahun 2022 dengan nilai skor keseluruhan adalah 88,17 assessment on the implementation of GCG in 2022 by BPKP has been conducted based on the assessment report on the implementation of GCG in 2022 by BPKP on the exit meeting assessment on the implementation of GCG at IIGF in 2022 with overall score of 88.17
31	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2022 Monitoring the follow up implementation of GCG AOI recommended by BPKP in 2022	Semesteran Every semester	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2022 dilaksanakan pada tahun 2023 per semester Monitoring the follow up implementation of GCG AOI recommended by BPKP in 2022 was conducted in every semester of 2023
Aspek Audit atas Laporan Keuangan Financial Statements Audit Aspect			
32	Pengadaan KAP Untuk Audit LK Th 2022 Procurement of KAP to Audit the 2022 Financial Statements	April-Mei April-May	Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada RUPS usulan penunjukan KAP untuk Melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 melalui surat No. S-42/PII/DK/0922 tanggal 28 September 2022 The Board of Commissioners has submitted to the GMS the proposal for the appointment of KAP to Conduct a General Audit of the Financial Statements of the Company for the 2022 Fiscal Year through letter No. S-42/PII/DK/0922 dated September 28, 2021
33	Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK Th 2022 kepada RUPS Proposal on the appointment of KAP to audit the 2022 Financial Statements to the GMS	Juni June	
Aspek Lainnya Other Aspects			
34	Penelaahan atas pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris Review on complaints received by the Board of Commissioners	Sesuai kebutuhan/ pengaduan Based on needs/ complaints	Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris Throughout 2022, there were no complaints received by the Board of Commissioners
35	Peningkatan kompetensi Anggota Dewan Komisaris Improving the competency of the Board of Commissioners	Sesuai jadwal Based on schedule	Sepanjang tahun 2022 Pelatihan dan Seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris baik di dalam maupun luar negeri dihadiri secara virtual throughout 2022, the Board of Commissioners has attended both domestic and abroad trainings and seminars virtually



Keputusan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2022

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris telah mengeluarkan keputusan Dewan Komisaris. Pelaksanaan keputusan Dewan Komisaris tersebut dimonitor oleh Organ Dewan Komisaris dan Organ Direksi.

Hingga 31 Desember 2022, Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Decree and Recommendation by the Board of Commissioners in 2022

As part of the implementation of duties and functions, the Board of Commissioners has issued a Decree. The implementation of the Decree is monitored by the Board of Commissioners' Organs and the Board of Directors' Organs.

As of December 31, 2022, the Board of Commissioners had issued Board of Commissioners Decree with as follows details:

Surat Keputusan Dewan Komisaris yang Diterbitkan Sepanjang Tahun 2022 The Board of Commissioners Decree Throughout 2022

No.	Nomor Surat Keputusan Decree No.	Tanggal Date	Perihal Subject
1	KEP-01/KOM/PII/01/2022	18 Januari 2022 18 January 2022	Komitmen Perseroan terhadap Anti Penyuapan dan Pembentukan Struktur Organisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Di PT PII The Company's commitment to Anti-Bribery and the Establishment of Organizational Structure based on SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in IIGF
2	KEP-02/KOM/PII/03/2022	15 Maret 2022 15 March 2022	Perubahan atas Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan PT PII No. 011/SK/PII-BOD/1220 dan KEP-07/KOM/PII/12/2020 tentang Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT PII Amendment to Joint-Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of IIGF No. 011/SK/PII-BOD/1220 and KEP-07/KOM/PII/12/2020 concerning Whistleblowing Management Team in IIGF
3	KEP-03/KOM/PII/06/2022	20 Juni 2022 20 June 2022	Pengangkatan Sebagai Staf Sekretaris Dewan Komisaris PT PII (Persero) an. Ludovikus Agwin Primana Appointment of Ludovikus Agwin Primana as a Secretary Staff of the Board of Commissioners of IIGF
4	KEP-04/KOM/PII/08/2022	14 Agustus 2022 14 August 2022	Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris PT PII an. Muhamad Nahdi Extension of Service of Muhamad Nahdi as a Secretary of the Board of Commissioners of IIGF
5	KEP-05/KOM/PII/09/2022	1 Oktober 2022 1 Oktober 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT PII an. Ahmad Ghufroon Dismissal and Appointment of Ahmad Ghufroon as a Member of Risk Monitoring Committee of IIGF
6	KEP-06/KOM/PII/09/2022	1 Oktober 2022 1 Oktober 2022	Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PII an. Ferry Irawan Appointment of Ferry Irawan as a Member of Audit Committee of IIGF
7	KEP-07/KOM/PII/12/2022	16 Desember 2022 16 December 2022	Penetapan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Organ Dekom PT PII Tahun 2023 Determination of the Work Plan of the Board of Commissioners and its Organs of IIGF 2023
8	KEP-08/KOM/PII/12/2022	30 Desember 2022 30 December 2022	SKB Pengesahan Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) SKB Ratification of Work Procedure for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual)
9	KEP-09/KOM/PII/12/2022	30 Desember 2022 30 December 2022	Pengesahan kebijakan kode etik Ratification of code of conduct

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 2 (dua) Komite, yakni:

1. Komite Audit.
2. Komite Pemantau Risiko.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian atas kinerja masing-masing komite di bawah Dewan Komisaris tersebut. Hasil penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip GCG. Untuk periode tahun buku 2022, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta Piagam Komite Audit. Pelaksanaan kinerja Komite Audit juga diukur dari tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Audit Perseroan telah melaksanakan rapat khusus Komite Audit sebanyak 13 kali serta telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dirinci lebih lanjut di bagian pembahasan Komite Audit pada bab ini dari Laporan Tahunan ini.
- b. Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris meningkatkan kualitas pengawasan melalui pemberian nasihat profesional kepada Dewan Komisaris terkait pengelolaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Untuk periode tahun buku 2022, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta Piagam Komite Pemantau Risiko. Pelaksanaan kinerja Komite Pemantau Risiko juga diukur dari tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan rapat khusus Komite Audit sebanyak 14 kali serta telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagaimana dirinci di bagian pembahasan Komite Pemantau Risiko pada bab ini dari Laporan Tahunan ini.

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Board Manual PT PII dan Pedoman Dewan Komisaris memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Dewan Komisaris secara berkala menyelenggarakan Rapat Internal Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Komite, serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Sepanjang tahun 2022, tanggal, agenda, dan peserta Rapat internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners implements supervisory duties with the assistance of committees under the Board of Commissioners consist of 2 (two) Committees, namely:

1. Audit Committee.
2. Risk Management Monitoring Committee.

The Board of Commissioners assessed the performance of each committee under the Board of Commissioners in 2022. Performance assessment results of the committees under the Board of Commissioners are as follows:

- a. Audit Committee was established to strengthen the implementation of the Board of Commissioners supervisory function on IIGF management following the GCG principles. For 2022 fiscal year, the Company's Audit Committee carried out its duties and responsibilities based on the applicable laws and regulations as well as Audit Committee Charter. Audit Committee performance is also measured by the attendance rate at meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company's Audit Committee held 13 times special meetings and carried out a number of activities as the implementation of its duties and responsibilities as further detailed in the Audit Committee section in this chapter of this Annual Report.
- b. The Risk Monitoring Committee is established in order to improve the quality of supervision by professionally advising the Board of Commissioners on the management of Enterprise Risk Management (ERM). For 2022 fiscal year, Audit Committee carried out its duties and responsibilities based on the prevailing laws and regulations and the Risk Monitoring Committee Charter. The Risk Monitoring Committee performance is also measured by its attendance rate at meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors. The Company's Risk Monitoring Committee held 14 times special meetings and carried out a number of activities that are part of the implementation of its duties as detailed in the Risk Monitoring Committee section in this chapter of this Annual Report.

Realization of Internal Meetings of the Board of Commissioners

IIGF's *Board Manual* and the Board of Commissioners Guidelines contain provisions regarding the organization of Board of Commissioners meetings. The Board of Commissioners must hold a meeting at least once a month. The Board of Commissioners periodically organizes Internal Meetings of the Board of Commissioners, including joint Committee meetings, as well as Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors.

Throughout 2022, the dates, agendas, and participants of the Internal Meetings of the Board of Commissioners were as follows:



No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance		
			ANN	MA	WU
1	18 Jan 22	<ul style="list-style-type: none"> Laporan <i>Management</i> periode Desember Tahun 2021 Reviu atas SKB Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Evaluasi atas RKAP Th 2021 dan Pelaksanaan RKAP Tahun 2022 Evaluasi atas capaian IKU Dekom Tahun 2021 	✓	✓	✓
2	16 Feb 22	<ul style="list-style-type: none"> <i>Monitoring</i> AOI GCG PII Th 2020 & <i>update progress Assessment</i> GCG <i>Update</i> proses audit laporan keuangan dan IKU BOC BOD oleh PWC Persetujuan IKU Individu Direksi th 2022 Perubahan struktur organisasi fase 1 <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> periode Januari 2022 	✓	✓	✓
3	16 Mar 22	<ul style="list-style-type: none"> <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> periode Februari 2022 Gejala Penurunan Kinerja Pembahasan surat tanggapan perubahan Struktur Organisasi PT PII Laporan Tahunan PT PII Tahun 2021 	✓	✓	✓
4	19 Apr 22	<ul style="list-style-type: none"> <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> periode Maret 2022 Gejala Penurunan Kinerja Evaluasi capaian IKU Dekom & Direksi periode triwulan I tahun 2022 	✓	✓	✓
5	25 Mei 22	<ul style="list-style-type: none"> <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> periode April 2022 Gejala Penurunan Kinerja periode April 2022 	✓	✓	✓
6	21 Jun 22	<ul style="list-style-type: none"> <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> periode Mei 2022 Gejala Penurunan Kinerja periode Mei 2022 Usulan Perubahan RKAP dan IKU Korporasi tahun buku 2022 	✓	✓	✓
7	26 Jul 22	<ul style="list-style-type: none"> <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> periode Juni 2022 Gejala Penurunan Kinerja periode Juni 2022 Progres tindak lanjut AOI tahun 2021 <i>Update</i> Implementasi Program CSR <i>Update</i> RJPP 2023 – 2027 Evaluasi capaian IKU Dekom & Direksi periode triwulan II tahun 2022 	x	✓	✓
8	29 Ags 22	<ul style="list-style-type: none"> <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> periode Juli 2022 Gejala Penurunan Kinerja periode Juli 2022 Pembahasan RKAT & IKU Dekom tahun 2023 	✓	✓	✓
9	12 Sep 22	<ul style="list-style-type: none"> Telaah Dewan Komisaris atas penyampaian RJP PT PII (Persero) periode 2023-2027 	✓	✓	✓
10	12 Okt 22	<ul style="list-style-type: none"> Telaah Dewan Komisaris atas penyampaian Rancangan RKAP PT PII (Persero) Tahun 2023 	✓	✓	✓
11	18 Okt 22	<ul style="list-style-type: none"> <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> periode September 2022 Gejala Penurunan Kinerja periode September 2022 Evaluasi capaian IKU Dekom & Direksi periode triwulan III tahun 2022 	✓	✓	✓
12	24 Nov 22	<ul style="list-style-type: none"> <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> periode Oktober 2022 Gejala Penurunan Kinerja periode Oktober 2022 	✓	✓	✓
13	21 Des 22	<ul style="list-style-type: none"> <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> periode November 2022 Gejala Penurunan Kinerja periode November 2022 	✓	✓	✓
Persentase kehadiran			92%	100%	100%

ANN : Awan Nurmawan Nuh
MA : Mariatul Aini
WU : Wahyu Utomo

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Sepanjang tahun 2022, rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terlaksana sebanyak 15 kali. Berikut tanggal, agenda, dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut, sebagai berikut:

Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors

Throughout 2022, 15 joint-meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors have been held. The following are the date, agenda, and attendance rate of the Board of Commissioners and Board of Directors the meetings:

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Dekom BoC Attendance			Kehadiran Direksi BoD Attendance		
			MA	ANN	WU	MWS	ANP	DHA
1	19 Januari/ January 2022	Highlight Laporan <i>Management</i> periode Desember 2021 Highlight of Management Report of December 2021	√	√	√	√	√	√
2	23 Februari/ February 2022	1. Update Human resources (perubahan struktur organisasi & diskusi hasil <i>Engagement survey</i>) 2. Laporan <i>Management</i> Januari 2022 3. Gejala penurunan kinerja (surat RUPS No..S-8/KN/KN.3/2022) 1. Human Resources update (changes to organizational structure & discussion on Engagement Survey results) 2. Management Report of January 2022 3. Signs of performance decline (GMS letter No. S-8/KN/KN.3/2022)	√	√	√	√	√	√
3	29 Maret/ March 2022	Highlight Laporan <i>Management</i> periode Februari 2022 Highlight of Management Report of February 2022	√	√	√	√	√	√
4	25 April 2022	1. Laporan <i>Management</i> & gejala penurunan kinerja Maret 2022 2. Update <i>progres</i> klaim SPAM lampung 1. Management Report & sings of performance decline in March 2022 2. update on the progress of SPAM Lampung claim	√	√	√	√	√	√
5	27 Mei/May 2022	Highlight Laporan <i>Management</i> 3. Gejala Penurunan Kinerja periode April 2022 4. Agenda <i>Confidential</i> dan terbatas BOC BOD mengenai kajian tantiem dan remunerasi BOC BOD PT PII 1. Highlight of Management Report 2. Signs of Performance Decline in April 2022 Period 3. Confidential and limited agenda of BOC and BOD concerning the review of tantiem and remuneration of IIGF's BOC BOD	√	√	√	√	√	√
6	29 Juni/June 2022	Highlight Laporan <i>Management</i> periode Mei 2022 Highlight of Management Report of May 2022	√	x	√	√	√	√
7	28 Juli/July 2022	1. Laporan <i>Management</i> Periode Juni 2022 2. Gejala penurunan kinerja periode Juni 2022 1. Management Report of June 2022 Period 2. Signs of Performance decline in June 2022 period	√	√	√	√	√	√
8	10 Agustus/ August 2022	Pembahasan surat Direksi terkait Rencana Penyampaian Permintaan Persetujuan RUPS atas Usulan Program Kerja Baru di luar RKAP Tahun Buku 2022. Discussion on the Board of Directors' letter regarding the Plan to Submit Request for Approval to GMS on the Proposed New Work Program outside the 2022 Fiscal Year RKAP	√	√	√	√	√	√
9	30 Agustus/ August 2022	Highlight Laporan <i>Management</i> Periode Juli 2022 Highlight of Management Report of July 2022	√	√	√	√	√	√
10	14 September 2022	Pembahasan Penyampaian RJPP PT PII (Persero) Tahun 2023-2027 Discussion on the Submission of IIGF RJPP of 2023-2027	√	√	√	√	√	√
11	24 September 2022	Persetujuan RJPP PT PII Tahun 2023-2027 & <i>Site Visit</i> Proyek Jembatan Batam Bintang Approval of IIGF RJPP of 2023-2027 and Site Visit of Batam Bintang Bridge Project	√	√	√	√	√	√



No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Dekom BoC Attendance			Kehadiran Direksi BoD Attendance		
			MA	ANN	WU	MWS	ANP	DHA
12	25 Oktober/ October 2022	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan CSR PT PII sampai dengan periode September 2022 dan Prognosa sampai dengan akhir tahun 2022 Evaluation to the Implementation of IIGF CSR Activities as of September 2022 and Prognosis as of the end of 2022	✓	✓	x	✓	x	✓
13	28 Oktober/ October 2022	1. Persetujuan RKAP PT PII tahun 2023 2. <i>Highlight</i> Laporan <i>Management</i> Periode September 2022 3. Evaluasi Kebijakan Akuntansi 1. Approval of IIGF RKAP of 2023 2. Highlight of Management Report of September 2022 3. Evaluation of Accounting Policy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	25 November 2022	1. <i>Highlight</i> Laporan Management Periode Oktober 2022 2. Persiapan RUPS RKAP th buku 2023 3. Persiapan HUT PT PII 1. Highlight of Management Report of October 2022 2. Preparation of 2023 fiscal year RKAP GMS 3. Preparation of IIGF's Anniversary	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	23 Desember/ December 2022	<i>Highlight</i> Laporan Management Periode November tahun 2022 Highlight of Management Report of November 2022	✓	✓	✓	✓	x	✓
Presentase Kehadiran Attendance percentage			100%	94%	94%	100%	88%	100%

ANN: Awan Nurmawan Nuh | MA: Mariatul Aini | WU: Wahyu Utomo MWS: Muhammad Wahid Sutopo | ANP: Andre Permana | DHA: Donny Hamdani

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Attendance of the Board of Commissioners in the GMS

No	RUPS GMS	Tanggal Date	Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of the Board of Commissioners		
			ANN	MA	WU
1	RUPS Tahunan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 Annual GMS Annual Report of the Company for the Fiscal Year 2021	20 Juni 2022 June 20, 2022	✓	✓	✓
2	RUPS Luar Biasa Rencana Jangka Panjang Perseroan Tahun 2023 - 2027 Extraordinary GMS of the Company's Long-Term Plan Year 2023 - 2027	15 Desember 2022 December 15, 2022	✓	✓	✓
3	RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2023 Annual GMS Company Work Plan & Budget (RKAP) Year 2023	15 Desember 2022 December 15, 2022	✓	✓	✓

ANN: Awan Nurmawan Nuh | MA: Mariatul Aini | WU: Wahyu Utomo

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2022 Board of Commissioners' Training in 2022

Nama Name	Program Pelatihan Training Program	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Venue
Awan Nurmawan Nuh Mariatul Aini Wahyu Utomo	Webinar: Forum GRC <i>Road to Hakordia</i> Batasan Gratifikasi dan Perlindungan Hukum terhadap <i>Whistleblower</i> Webinar: GRC Forum <i>Road to Hakordia</i> Limits of Gratification and Legal Protection Legal Protection for <i>Whistleblower</i>	1 Desember/ December 2022	<i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) Kementerian Keuangan	<i>Online</i>
Awan Nurmawan Nuh Mariatul Aini Wahyu Utomo	<i>The Joint Workshop of IIGF & IsDB</i> <i>Group "Delivering Social Infrastructure</i> <i>Through PPP: Case Study of PPP Hospital</i> <i>Development in Turkey"</i>	20 Desember/ December 2022	IsDB Group & PT PII	<i>Online</i>

Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris Baru

Pada tahun 2022, tidak ada pergantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris baru. Dengan demikian, Program Pengenalan Perseroan tidak dilakukan.

Introduction Program for New Board of Commissioners

In 2022, there were no replacement and/or appointment of a new Board of Commissioners. Therefore, the Company's Introduction Program was not conducted.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pengaturan mengenai penilaian kinerja Dewan Komisaris tercantum di dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah menetapkan IKU Dewan Komisaris dan secara reguler RUPS juga menerima laporan *self-assessment* dari Dewan Komisaris atas pencapaian/realisasi dari seluruh IKU. IKU ini merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. Realisasi IKU Dewan Komisaris tahun 2022 telah direview oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan dilaporkan kepada RUPS melalui surat No. S-12/PII/DK/0223 tanggal 24 Februari 2023.

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Arrangements regarding the performance appraisal of the Board of Commissioners listed in Article 24 of the Regulation of the Minister of Finance No. 88/PMK.06/2015 and Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017 concerning Performance Management of the Board of Directors and Board Commissioner at the Limited Liability Company (Persero) below Guidance and Supervision of the Minister of Finance. Based on Regulation of the Minister of Finance, General Meeting of Shareholders Shares (GMS) has set the KPI for the Board of Commissioners and on a regular basis the GMS also receives self-assessment reports from Board of Commissioners for the achievement/realization of all KPIs. KPI is a measure of the assessment of the success of implementation duties and responsibilities of supervision and giving advice Board of Commissioners. Realization of KPI for the Board of Commissioners in 2022 has been reviewed by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) and reported to the GMS by letter No. S-12/PII/DK/0223 dated 24 February 2023.



Kategori Performansi Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Main Performance Indicator	Bobot Weight	Target 2022 2022 Target	Realisasi Realization	Capaian IKU Scope	Nilai Kinerja Performance Value
A Pengawasan (Bobot 60%) A Monitoring (Weight of 60%)	A1 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik A1 Implementation of Good Corporate Governance	A1.1 Hasil Penilaian Independen atas Penerapan GCG pada PT PII Tahun 2021. A1.1 Independent Assessment Result of GCG Implementation of IIGF in 2021	10%	86,00	88,17	102,52%	10,25%
		A2 Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris yang Efektif A2 Monitoring and Implementation of Effective Board of Commissioners Duties	20%	90%	98%	109,06%	21,81%
	A2.1 Persentase arahan Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti oleh Direksi A2.1 Percentage of the Board of Commissioners direction that is followed up by the Board of Directors	15%	4 Kali/ Times	4 Kali/ Times	100,00%	15,00%	
	A2.2 Jumlah pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal A2.2 Total supervision over the implementation of followup recommendations on examination results by both internal auditors and external auditors	15%	95%	100%	105,26%	15,79%	
	A2.3 Persentase pemberian tanggapan (respons) atas permohonan persetujuan/rekomendasi dari Direksi yang tepat waktu A2.3 Percentage of responses to requests for approval/recommendations from the the Board of Directors on time						
B Pelaporan (Bobot 40%) B Reporting (Weight of 40%)	B1	B1.1	10%	100%	118%	117,50%	11,75%
		B1.2	10%	100%	115%	115,00%	11,50%
		B1.3	10%	100%	105%	105,00%	10,50%
		B1.4	10%	100%	100%	100,00%	10,00%
			100,00%				

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tugas dan tanggung jawab secara kolegal terkait kepengurusan Perseroan. Bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perseroan, Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengelola Perseroan atas kepentingan Perseroan merealisasikan visi dan misi. Direksi juga memiliki peran vital dalam memastikan keberlangsungan aktivitas bisnis serta operasional Perseroan, memastikan kinerja optimal dan nilai tambah optimal bagi Pemegang Saham. Selain menjalankan tugas secara kolegal, anggota Direksi juga dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan departemen yang dipimpinnya.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan berikut peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan berikut perubahannya;
4. Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Masa Jabatan Direksi

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan ketentuan bahwa RUPS dapat memberhentikananya sewaktu-waktu.

Komposisi Direksi

Sebagai Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan, maka penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham tunggal Perseroan dan mengacu pada peraturan perundangan serta Anggaran Dasar Perseroan. Jumlah anggota Direksi Perseroan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.

The Articles of Association and prevailing laws and regulations stipulate that the Board of Directors is the Company's organ carrying out duties and responsibilities collegially related to the Company management. Acting and representing for and on behalf of the Company, the Board of Directors are fully responsible for managing the Company for the benefit of the Company in achieving its vision and mission. The Board of Directors also has vital role in ensuring the sustainability of the Company's business activities and operations, ensuring optimal performance and optimal added value for the Shareholders. In addition to carrying out their duties collegially, the Board of Directors' members may also carry out tasks and make decisions following their respective department.

Legal Basis:

1. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and its amendments;
2. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in Company Implementation of Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance and the following its implementing regulations;
3. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 78/PMK.06/2015 on Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance and its amendments;
4. Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017 regarding Performance Management of the Board of Directors and Board of Commissioners of Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance; and
5. Articles of Association of the Company.

Term of Office of the Board of Directors

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the term of office of for members of the Board of Directors is set at 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office, provided that the GMS may dismiss them at any time.

Composition of the Board of Directors

As a State-Owned Enterprise under the Ministry of Finance, the appointment, removal and dismissal of members of the Board of Directors is carried out through a Decree of the Minister of Finance as the representative of the Government of the Republic of Indonesia as the sole shareholder of the Company and refers to laws and regulations and the Company's Articles of Association. The number of members of the Board of Directors of the Company adjusts to the needs and development of the Company.



Pada tahun 2022, terjadi perubahan komposisi Direksi PT PII dengan diangkatnya Donny Hamdani sebagai Direktur Keuangan efektif sejak tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022. Sebelumnya melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/KOM/PII/07/2021 tanggal 15 Juli 2021, Dewan Komisaris menunjuk Muhammad Wahid Sutopo untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Sementara Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek.

Seluruh Direksi Perseroan merupakan individu profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Per tanggal 31 Desember 2022, komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Position Period
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 890/KMK.06/2019.	4 Desember 2017 s.d. 3 Desember 2022 December 4, 2017 until December 3, 2022	Ke-1 First
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 340/KMK.06/2022. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No.340/KMK.06/2022.	4 Desember 2022 s.d. 3 Desember 2027 December 4, 2022 until December 3, 2027	Ke-2 Second
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020.	23 Maret 2020 s.d. 22 Maret 2025 March 23, 2020 until March 22, 2025	Ke-1 First
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022.	17 Januari 2022 s.d. 16 Januari 2027 January 17, 2022 until January 16, 2027	Ke-1 First

* Muhammad Wahid Sutopo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek sampai dengan tanggal 16 Januari 2022/Muhammad Wahid Sutopo was appointed as Acting Executive Finance Director and Project Appraisal until January 16, 2022

** Donny Hamdani ditunjuk sebagai Anggota Direksi PT PII per 17 Januari 2022/Donny Hamdani was appointed as Member of the Board of Directors of IIGF as of January 17, 2022

Profil singkat dari masing-masing anggota Direksi Perseroan disajikan pada bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2022 ini.

Profile of each member of the Company's Board of Directors is available in the Board of Directors' Profile section, in the Company Profile chapter of this 2022 Annual Report.

Pedoman Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi merujuk pada Pedoman Tata Laksana Kerja yang disusun berdasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan dan berlaku mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Pedoman Tata Laksana Kerja yang menjadi landasan kerja Direksi saat ini adalah berdasarkan dokumen yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Direksi No. 007/SK/PII-

In 2022, there was a change in the composition of the IIGF Board of Directors with the appointment of Donny Hamdani as Finance Director effective as of January 17, 2022 based on the Decree of Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022. Previously through the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-04/KOM/PII/07/2021 dated July 15, 2021, the Board of Commissioners appointed Muhammad Wahid Sutopo to carry out the duties as President Director and concurrently Acting Executive Finance Director and Project Appraisal.

All Directors of the Company are professional individuals who have met the requirements to be appointed as members of the Company's Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations.

As of December 31, 2022, the composition of the Company's Board of Directors was as follows:

Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual)

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Guidelines prepared based on the applicable regulations and provisions for the Company and are binding for each member of the Board of Directors.

The Work Procedure Guidelines that serves as the basis for the current work of the Board of Directors is according to the documents stipulated through a Joint Decree between the

BOD/1222 dan Dewan Komisaris No. KEP-08/KOM/PII/12/2022 tentang Pengesahan Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Penyusunan dan penerapan *Board Manual* bertujuan untuk:

1. Memberikan kejelasan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing organ Perseroan;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ; dan
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Pokok-pokok yang diatur dalam *Board Manual* Direksi antara lain adalah:

1. Ketentuan Umum
2. Pembagian Tugas Direksi
3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
4. Rapat dan Pengambilan Keputusan Direksi
5. Benturan kepentingan
6. Kekosongan jabatan dan pelimpahan wewenang
7. Pemberhentian sementara dan pengunduran diri Direksi
8. Organ Pendukung Direksi
9. Pelaporan
10. Penilaian Kinerja

Sebagai bagian dari komitmen Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Direksi menerapkan *Board Manual* guna menjaga hubungan kerja yang harmonis untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Perseroan.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Terkait pengelolaan dan pengurusan Perseroan, maka Direksi mengemban tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi berwenang untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan kekuasaan Perseroan;
 - b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
 - d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan

Board of Directors No. 007/SK/PII-BOD/1222 and the Board of Commissioners No. KEP-08/KOM/PII/12/2022 concerning the Ratification of Guidelines Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The objectives of Board Manual preparation and implementation are as follows:

1. Providing clarity on the main duties, functions and authorities of each organ of the Company;
2. Improving the quality and effectiveness of working relationships among organs; and
3. Implementing GCG principles.

Board Manual for the Board of Directors regulates the following main points:

1. General Provisions
2. Division of Duties of the Board of Directors
3. Duties, Authorities and Obligations of the Board of Directors
4. Meeting and Decision Making of the Board of Directors
5. Conflict of interest
6. Vacancies and delegation of authority
7. Temporary dismissal and resignation of the Board of Directors
8. Supporting Organs of the Board of Directors
9. Reporting
10. Performance Appraisal

As part of the commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the implementation of GCG principles, the Board of Directors implements the Board Manual to create a harmonious working relationship to support the realization of the Company's Vision and Mission.

Duties, Authorities and Obligations of the Board of Directors

Related to the management and administration of the Company, the Board of Directors has the following duties, responsibilities and authorities as follows:

1. The Board of Directors is in charge in carrying out all actions related to management of the Company for the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside the court on all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and/or further restrictions or further directions agreed by the Shareholders based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Directors is authorized to:
 - a. Determine the Company's management policies;
 - b. Regulate the delegation of the power of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company in and out of court;
 - c. Regulate the transfer of authority of the Board of Directors to one or more employees of the Company, both individually and collectively or to someone else to represent the Company in and out of the court;
 - d. Regulate the provisions regarding the employment of the Company, including the determination of salary, pensions



- hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
 - g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
3. Direksi berkewajiban untuk:
- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
 - e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 - g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;
 - h. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
 - i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf butir d dan e ayat ini dan dokumen Perseroan lainnya;
- or old age pensions and other income for the Company's employees based on the applicable laws and regulations. The provision of determining salary, pension or old age pensions and other income of employees exceeding the obligation stipulated in the laws and regulations must obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders;
- e. Appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's personnel regulations and applicable laws and regulations;
 - f. Appoint and dismiss the Corporate Secretary;
 - g. Perform all actions and other deeds regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, as well as representing the Company in and out of court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association and/or the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Directors is obligated to:
- a. Endeavor and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes and objectives and business activities;
 - b. Prepare the Company Long-Term Plan, Company's Work Plan and Budget, and its amendments as well as submit it to the Board of Commissioners and Shareholders for ratification by the General Meeting of Shareholders;
 - c. Provide an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan as well as Company's Work Plan and Budget;
 - d. Prepare the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, and Minutes of the Board of Directors' Meeting;
 - e. Prepare the Annual Report as a form of accountability for the Company management as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents;
 - f. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit them to the Public Accountant for audit;
 - g. Submit the Annual Report including the Financial Statements to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification, as well as a report on the Company's rights that are not recorded in the books, among others, as a result of the write-off of receivables;
 - h. Provide an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report;
 - i. Submit the Balance Sheet and Income Statement that have been approved by the General Meeting of Shareholders to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of laws and regulations;
 - j. Submit reports on changes in the composition of the Shareholders, the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister in charge of Law and Human Rights;
 - k. Maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of the Meeting of the Board of Directors, Annual Report and financial documents of the Company as referred to in points d and e of this paragraph and other Company's documents;

- l. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
 - m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
 - o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
 - q. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) organisasi Perseroan; dan
 - r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
 5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang telah diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaklumi disetujui oleh Rapat Direksi.

Pembagian Tugas Direksi

Pelaksanaan tugas Direksi dibagi sesuai jabatan dan fungsi anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 006/SK/PII-BOD/0522 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi Perseroan, meliputi antara lain:

- l. Keep at the domicile of the Company: Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of the Meeting of the Board of Directors, Annual Report and financial documents of the Company and other Company documents;
 - m. Arrange the accounting system in accordance with the Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage and supervision;
 - n. Provide periodic reports in accordance with the manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders;
 - o. Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties;
 - p. Provide explanations on all matters asked or requested by the members of the Board of Commissioners and the Shareholders;
 - q. Prepare and stipulate the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of the Company's organization; and
 - r. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in these Articles of Association and those stipulated by the General Meeting of Shareholders based on laws and regulations.
3. In carrying out their duties, the Board of Directors is obliged to devote their full energy, thoughts, attention and dedication to the duties, obligations and achievement of the Company's objectives.
 4. In carrying out their duties, members of the Board of Directors have to comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations as well as must carry out the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.
 5. Each member of the Board of Directors must in good faith and with full responsibility perform their duties for the interests and business of the Company with due observance of the applicable laws and regulations.
 6. Each member of the Board of Directors is personally liable if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties for the interest and business of the Company, unless the member of the Board of Directors concerned can prove that:
 - a. The loss was not caused by their fault or their negligence;
 - b. Has carried out management in good faith and prudence for the interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
 - c. Has no conflict of interest either directly or indirectly over the management actions that resulted in the loss; and
 - d. Has taken actions to prevent the incidence or continuation of such loss.
 7. Actions conducted by member of the Board of Directors other than those decided by the Meeting of the Board of Directors shall be the personal responsibility of the person concerned until such actions are approved by the Meeting of the Board of Directors.

Division of Duties of the Board of Directors

The duties of the Board of Directors are divided according to the position and function of members of the Board of Directors as stipulated in the Board of Directors Decree No. 006/SK/PII-BOD/0522 on the Division of Duties and Authorities of the Board of Directors, including of the Company, including among others:



Direktur Utama

1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama yang dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya.
2. Pengurusan/pengelolaan Perseroan oleh anggota Direksi lainnya sesuai tugas pokok Perseroan dan/atau penugasan lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direktur Bisnis dan Direktur Keuangan.
4. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi pengawasan intern, sekretariat perusahaan, manajemen risiko, hukum dan kepatuhan serta inisiasi bisnis dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Utama sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi.
5. Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi.

Direktur Keuangan

1. Mewakili Perseroan untuk kegiatan terkait fungsi yang ada pada garis komando Direktur Keuangan sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi atau berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya.
2. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi keuangan dan perbendaharaan, investasi, sumber daya manusia, pengembangan organisasi, layanan perusahaan, pengadaan, teknologi informasi, penjaminan non-KPBU dan pemantauan proyek dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Keuangan sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi.
3. Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi.

Direktur Bisnis

1. Mewakili Perseroan untuk kegiatan terkait fungsi yang ada pada garis komando Direktur Bisnis sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi atau berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya.
2. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi bimbingan dan konsultasi bisnis, penilaian proyek (baik teknis, finansial, maupun lingkungan dan sosial), penjaminan KPBU dan edukasi pemangku kepentingan serta pengembangan ekosistem bisnis dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Bisnis sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi.
3. Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi.

President Director

1. The President Director is entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company provided that all such actions of the President Director have been approved by the Board of Directors Meeting or other applicable provisions.
2. Management of the Company by other members of the Board of Directors in accordance with the Company's main duties and/or other assignments in accordance with the policies set by General Meeting of Shareholders and/or Articles of Association of the Company.
3. Supervise the implementation of the duties of the Business Director and Finance Director.
4. Lead and supervise the implementation of tasks related to the internal control function, corporate secretarial, risk management, legal and compliance, as well as business initiation and other functions that are in the line of command of the President Director in accordance with the Decree of the Board of Directors on Organizational Structure.
5. Provide input, consideration or suggestions in determining the Company's strategy, policy and/or decision making of the Board of Directors.

Finance Director

1. Represent the Company for activities related to functions that are in the line of command of the Finance Director in accordance with Decree of the Board of Directors on Organizational Structure or based on decision of the Board of Directors Meeting or other applicable provisions.
2. Lead and supervise the implementation of tasks related to the functions of finance and treasury, investment, human resources, organizational development, corporate services, procurement, information technology, non-PPP guarantee and monitoring of projects and other functions that are in the command line of the Finance Director in accordance with the Board of Directors Decree on Organization Structure.
3. Provide input, consideration or suggestions in determining the Company's strategy, policy and/or decision making of the Board of Directors.

Business Director

1. Representing the Company for activities related to functions that are in the line of command of the Business Director in accordance with the Decree of the Board of Directors on Organizational Structure or based on the decision of Board of Directors Meeting or other applicable provisions.
2. Lead and supervise the implementation of tasks related to the functions of business guidance and consultation business, project appraisal (both technical, financial, as well as environmental and social), PPP guarantee and stakeholder education as well as business ecosystem development. stakeholders as well as business ecosystem development and other functions that are in the line of command of the Business Director in accordance with the Decree of the Board of Directors on Organizational Structure.
3. Provide input, consideration or suggestions in determining the Company's strategy, policy and/or decision making of the Board of Directors.

Rapat Direksi

Board Manual memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan rapat internal Direksi. Direksi wajib menyelenggarakan rapat internal secara berkala sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan, serta berkewajiban hadir dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Keputusan yang diambil dalam setiap rapat Direksi berdasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat, atau melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.

Sepanjang tahun 2022, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 73 kali. Agenda, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut disampaikan dalam tabel berikut:

No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tanggal Rapat Meeting Date	MWS	ANP	DHA*
1	Pembahasan <i>Preliminary Appraisal Result</i> (PAR) PLTU Timor-1 Discussion on Preliminary Appraisal Result (PAR) PLTU Timor-1	12 Januari/January 2022	✓	✓	x
2	Laporan Manajemen Periode Desember 2021 Management Report of December 2021 Period	17 Januari/January 2022	✓	✓	✓
3	Laporan Manajemen Periode Januari 2022 Management Report of January 2022 Period	14 Februari/February 2022	✓	✓	✓
4	Laporan Manajemen Periode Januari 2022 (Lanjutan) Management Report of January 2022 Period (Continuation)	16 Februari/February 2022	✓	✓	✓
5	Pembahasan PAR Jalan Tol Akses Patimban PAR Discussion on Patimban Toll Road Access	18 Januari/January 2022	✓	✓	✓
6	Pembahasan <i>Signing</i> Jalan Tol Gedebage - Tasik - Cilacap Discussion on the Signing of Gedebage - Tasik - Cilacap Toll Road	26 Januari/January 2022	✓	✓	✓
7	Pembahasan PAR <i>Proving Ground</i> Bekasi PAR Discussion on Proving Ground Bekasi	7 Februari/February 2022	✓	✓	✓
8	Pembahasan PAR Alat Penerangan Jalan (APJ) Madiun PAR Discussion on Street Light Equipment (APJ) Madiun	2 Maret/March 2022	✓	✓	✓
9	Pembahasan <i>Signing</i> Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi Discussion on the Signing of Gilimanuk - Mengwi toll Road	4 Maret/March 2022	✓	✓	✓
10	<i>Kick-off</i> Penyusunan RJPP Kick-off RJPP Preparation	7 Maret/March 2022	✓	✓	✓
11	Pembahasan <i>Structuring</i> dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) APJ Madiun Discussion on Guarantee Structuring and Fee (IJP) of APJ Madiun	8 Maret/March 2022	✓	✓	✓
12	Laporan Manajemen Periode Februari 2022 Management Report of February 2022 Period	16 Maret/March 2022	✓	✓	✓
13	Pembahasan <i>Update</i> Jalan Tol Akses Patimban Discussion on the Update of Patimban Toll Road Access	18 Maret/March 2022	✓	✓	✓
14	Pembahasan PAR Penjaminan Obligasi PT Waskita Karya PAR Discussion on Obligation Guarantee of PT Waskita Karya	22 Maret/March 2022	✓	✓	✓
15	Penerbitan <i>Draft Guarantee Agreement</i> (GA) <i>Proving Ground</i> Bekasi Issuance of Draft Guarantee Agreement (GA) of Proving Groud Bekasi	23 Maret/March 2022	✓	✓	✓
16	Pembahasan <i>Update</i> Jalan Tol Akses Patimban Discussion on the Update of Patimban Toll Road Access	23 Maret/March 2022	✓	✓	✓
17	Laporan Manajemen Periode Februari 2022 (Lanjutan) Management Report of February 2022 Period (Continuation)	29 Maret/March 2022	✓	✓	✓
18	Pembahasan <i>In Principal Approval</i> (IPA) Jalan Tol Akses Patimban Discussion on In Principal Approval (IPA) of Patimban Toll Road Access	31 Maret/March 2022	✓	✓	✓
19	Laporan Manajemen Periode Maret 2022 Management Report of March 2022 Period	14 April 2022	✓	✓	✓

Board of Directors' Meeting

The Board Manual contains provisions regarding the organization of Internal meetings of the Board of Directors. The Board of Directors must hold an internal meeting on a regular basis at least once every month, as well as being obliged to attend the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Decisions made in every meeting is based on the principle of deliberation for consensus, or through a majority voting mechanism.

Throughout 2022, the Board of Directors held 73 times meetings. Agenda, attendance, and recapitulation of the level of attendance of the Board of Directors in these meetings are presented in the following table:



No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tanggal Rapat Meeting Date	MWS	ANP	DHA*
20	Laporan Manajemen Periode Maret 2022 (Lanjutan) Management Report of March 2022 Period (Continuation)	18 April 2022	✓	✓	✓
21	Pembahasan Penyesuaian Pengaturan Persetujuan Dokumentasi Tim Proyek KPBU Discussion on the Adjustment to the Documentation Approval Setting of PPP Project	21 April 2022	✓	✓	✓
22	Pembahasan Pembayaran Klaim SPAM Lampung Discussion on the Payment of SPAM Lampung Claim	21 April 2022	✓	✓	✓
23	Pembahasan <i>Signing</i> Penjaminan Obligasi PT Waskita Karya Discussion on the Signing of Obligation Guarantee of PT Waskita Karya	21 April 2022	✓	✓	✓
24	Pembahasan <i>Signing</i> Penjaminan Obligasi PT Waskita Karya (Lanjutan) Discussion on the Signing of Obligation Guarantee of PT Waskita Karya (Continuation)	22 April 2022	✓	✓	✓
25	Pembahasan <i>Update & Structuring</i> APJ Madiun Discussion on Update & Structuring of APJ Madiun	28 April 2022	✓	✓	✓
26	Laporan Manajemen Periode April 2022 Management Report of April 2022 Period	12 Mei/May 2022	✓	✓	✓
27	Pembahasan <i>Signing Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central Java)</i> Discussion on Signing Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central Java)	16 Mei/May 2022	✓	✓	✓
28	Pembahasan PAR Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg PAR Discussion on Kamal - Teluknaga - Rajeg Toll Road	19 Mei/May 2022	✓	✓	✓
29	Pembahasan PAR Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg (Lanjutan) PAR Discussion on Kamal - Teluknaga - Rajeg Toll Road (Continuation)	20 Mei/May 2022	✓	✓	✓
30	Laporan Manajemen Periode April 2022 (Lanjutan) Management Report of April 2022 Period	24 Mei/May 2022	✓	✓	✓
31	Pembahasan IPA APJ Madiun Discussion on IPA APJ Madiun	9 Juni/June 2022	✓	✓	✓
32	Laporan Manajemen Periode Mei 2022 Management Report of May 2022 Period (Continuation)	15 Juni/June 2022	✓	✓	✓
33	Laporan Manajemen Periode Mei 2022 (Lanjutan) Management Report of May 2022 Period (Continuation)	23 Juni/June 2022	✓	✓	✓
34	Laporan Manajemen Periode Mei 2022 (Lanjutan) Management Report of May 2022 Period (Continuation)	29 Juni/June 2022	✓	✓	✓
35	Pembahasan IPA Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg Discussion on IPA of Kamal - Teluknaga - Rajeg Toll Road	29 Juni/June 2022	✓	✓	✓
36	Pembahasan PAR TPPAS Legok Nangka PAR Discussion of TPPAS Legok Nangka	5 Juli/July 2022	✓	✓	✓
37	Pembahasan PAR TPPAS Legok Nangka (Lanjutan) PAR Discussion of TPPAS Legok Nangka (Continuation)	11 Juli/July 2022	✓	✓	✓
38	Pembahasan PAR TPPAS Legok Nangka (Lanjutan) PAR Discussion of TPPAS Legok Nangka (Continuation)	13 Juli/July 2022	✓	✓	✓
39	Laporan Manajemen Periode Juni 2022 Management Report of June 2022 Period	18 Juli/July 2022	✓	✓	✓
40	Pembahasan IPA <i>Proving Ground</i> Bekasi Discussion on IPA of Proving Ground Bekasi	5 Agustus/August 2022	✓	✓	✓
41	Laporan Manajemen Periode Juli 2022 Management Report of July 2022 Period	15 Agustus/August 2022	✓	✓	✓
42	Penyusunan RJPP PT PII Periode 2023 - 2027 Preparation of IIGF's RJPP of 2023 2027 Period	16 Agustus/August 2022	✓	✓	✓
43	Penyusunan RJPP PT PII Periode 2023 - 2027 (Lanjutan) Preparation of IIGF's RJPP of 2023 2027 Period (Continuation)	17 Agustus/August 2022	✓	✓	✓

No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tanggal Rapat Meeting Date	MWS	ANP	DHA*
44	Finalisasi Rancangan RJPP Tahun 2023 – 2027 Finalization of RJPP Draft of 2023 2027 Period	22 Agustus/August 2022	✓	✓	✓
45	Laporan Manajemen Periode Juli 2022 (Lanjutan) Management Report of July 2022 Period (Continuation)	23 Agustus/August 2022	✓	✓	✓
46	Laporan Manajemen Periode Juli 2022 (Lanjutan) Management Report of July 2022 Period (Continuation)	24 Agustus/August 2022	✓	✓	✓
47	Pembahasan <i>Signing APJ Madiun</i> Discussion on the Signing of APJ Madiun	12 September 2022	✓	✓	✓
48	Pembahasan Tindak Lanjut Klaim SPAM Lampung Discussion on the Follow Up to SPAM Lampung Claim	16 September 2022	✓	✓	✓
49	Laporan Manajemen Periode Agustus 2022 Management Report of August 2022 Period	16 September 2022	✓	✓	✓
50	Laporan Manajemen Periode Agustus 2022 (Lanjutan) Management Report of August 2022 Period (Continuation)	22 September 2022	✓	✓	✓
51	Pembahasan dan Persetujuan RKAP Tahun Buku 2023 dan Kontrak Kinerja Direksi Tahun Buku 2023 Discussion and Approval of 2023 Fiscal Year RKAP and Performance Contract of the Board of Directors for the Fiscal Year of 2023	28 September 2022	✓	✓	✓
52	Pembahasan dan Persetujuan RKAP Tahun Buku 2023 dan Kontrak Kinerja Direksi Tahun Buku 2023 (Lanjutan) Discussion and Approval of 2023 Fiscal Year RKAP and Performance Contract of the Board of Directors for the Fiscal Year of 2023 (Continuation)	30 September 2022	✓	✓	✓
53	Laporan Manajemen Periode September 2022 Management Report of September 2022 Period	18 Oktober/October 2022	✓	✓	✓
54	Lanjutan Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris atas RKAP Tahun Buku 2023 Discussion on the Follow Up to the Board of Commissioners' Instruction on the 2023 Fiscal Year RKAP	24 Oktober/October 2022	✓	✓	✓
55	Pembahasan <i>Signing Guarantee Agreement dan Regres Agreement Proving Ground Bekasi</i> Discussion on the Signing Guarantee Agreement and Regress Agreement of Proving Ground Bekasi	25 Oktober/October 2022	✓	✓	✓
56	Pembahasan Update Amandemen PKS SPAM Karian Serpong Discussion on the Amendment Update of PKS SPAM Karian Serpong	26 Oktober/October 2022	✓	✓	✓
57	Laporan Manajemen Periode September 2022 (Lanjutan) Management Report of September 2022 Period (Continuation)	27 Oktober/October 2022	✓	✓	✓
58	Update Pengakhiran SPK Proyek Labuan Bajo Finalization Update of SPK Project Labuan Bajo	16 November 2022	✓	✓	✓
59	Laporan Manajemen Periode Oktober 2022 Management Report of October 2022 Period	16 November 2022	✓	✓	✓
60	Laporan Manajemen Periode Oktober 2022 (Lanjutan) Management Report of October 2022 Period (Continuation)	18 November 2022	✓	✓	✓
61	Pembahasan PAR Proyek KPBU Jalan Tol Kediri - Tulungagung PAR Discussion of PPP Project of Kediri – Tulungagung Toll Road	28 November 2022	✓	✓	✓
62	Persiapan Pra-RUPSLB Persetujuan RJP 2023-2027 dan Pra-RUPST RKAP 2023 Preparation of Pre EGSM Approval of 2023-2027 RJP and Pre-AGMS 2023 RKAP	28 November 2022	✓	✓	✓
63	Pembahasan <i>Draft GA</i> Proyek KPBU Jalan Tol Kediri - Tulungagung (Lanjutan) Discussion on the GA Draft of PPP Project of Kediri – Tulungagung Toll Road (Continuation)	2 Desember/December 2022	✓	✓	✓
64	Rencana Evaluasi Permohonan Penjaminan Pinjaman PT INKA dan Perum DAMRI Evaluation Plan for the Loan Guarantee Request of PT INKA and Perum DAMRI	6 Desember/December 2022	✓	✓	✓



No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tanggal Rapat Meeting Date	MWS	ANP	DHA*
65	Rencana Evaluasi atas Permohonan Penjaminan Obligasi IV Sukuk I Mudharabah Waskita Evaluation Plan on the Request of Guarantee for Bond IV Sukuk I Mudharabah Waksita	19 Desember/December 2022	✓	x	✓
66	IPA Proyek KPBU TPPAS Legok Nangka IPA of PPP Project of TPPAS Legok Nangka	20 Desember/December 2022	✓	x	✓
67	Laporan Manajemen Periode November 2022 Management Report of November 2022 Period	21 Desember/December 2022	✓	x	✓
68	Rencana Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman PT Pertamina (Persero) Government Plan to Guarantee the Loan of PT Pertamina (Persero)	23 Desember/December 2022	✓	x	✓
69	Rencana Evaluasi Penjaminan Pinjaman PT LEN Industri (Persero) Evaluation Plan for the Loan Guarantee of PT LEN Industri (Persero)	26 Desember/December 2022	✓	x	✓
70	Update Proyek KPBU TPPAS Legok Nangka Update on PPP Project of TPPAS Legok Nangka	27 Desember/December 2022	✓	x	✓
71	Rencana <i>Signing</i> Penjaminan PLTU Timor 1 Plan of Signing PLTU Timor 1 Guarantee	28 Desember/December 2022	✓	x	✓
72	Rencana <i>Signing</i> Proyek KPBU Jalan Tol Akses Patimban Plan of Signing PPP Project of Patimban Toll Road Access	28 Desember/December 2022	✓	x	✓
73	Persetujuan <i>Signing</i> Penjaminan Pinjaman PT Len Industri (Persero), PT INKA, Perum DAMRI dan PT Pertamina (Persero) Approval to the Signing of Loan Guarantee of PT Len Industri (Persero), PT INKA, Perum DAMRI and PT Pertamina (Persero)	30 Desember/December 2022	✓	✓	✓
			73	65	72
Total Kehadiran (%) Total Attendance (%)			100%	89%	99%

Keterangan:

MWS : Muhammad Wahid Sutopo
ANP : Andre Permana
DHA* : Donny Hamdani (menjabat per 17 Januari 2022)
Appointed as of January 17, 2022

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, Direksi hadir pada Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 15 kali. Adapun data pelaksanaan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris termasuk informasi mengenai agenda dan kehadiran adalah sebagaimana diungkapkan pada bagian rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Joint Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners

In 2022, the Board of Directors attended the Joint-Meetings with the Board of Commissioners for 15 times. The data of the Joint-Meetings between the Board of Directors and Board of Commissioners including the information regarding the agenda and attendance are as disclosed in the chapter of joint-meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Kehadiran Direksi dalam RUPS

Attendance of Board of Directors in GMS

No	RUPS GMS	Tanggal Date	Kehadiran Direksi dalam RUPS Attendance of the Board of Directors		
			MWS	ANP	DHA
1	RUPS Tahunan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 Annual GMS Annual Report of the Company for the Financial Year 2021	20 Juni 2022 June 20, 2022	✓	✓	✓
2	RUPS Luar Biasa Rencana Jangka Panjang Perseroan Tahun 2023 - 2027 Extraordinary GMS of the Company's Long-Term Plan Year 2023 - 2027	15 Desember 2022 December 15, 2022	✓	✓	✓
3	RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2023 Annual GMS Company Work Plan & Budget (RKAP) Year 2023	15 Desember 2022 December 15, 2022	✓	✓	✓

Pelatihan Direksi Tahun 2022

Perseroan memberikan perhatian besar pada peningkatan kapasitas maupun wawasan bagi para anggota Direksi agar Direksi dapat senantiasa beradaptasi terhadap lanskap bisnis yang semakin kompetitif, serta memberikan kesempatan untuk membangun jaringan untuk lebih memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi dan meningkatkan kinerja Perseroan. Kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi pada tahun 2022, antara lain:

Board of Directors Training in 2022

The Company pays great attention to improving capacity and insight for the members of the Board of Directors so that Board of Directors can always adapt to the increasingly competitive business landscape, as well as providing opportunities for increasingly competitive business landscape, as well as providing opportunities to network to further empower the resources within the organization and improve the Company's performance. Competency enhancement activities participated by the Board of Directors in 2022, among others:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pelatihan Training Program	Tgl Pelatihan Training Date	Penyelenggara Pelatihan Training organizer	Tempat Pelatihan Training Venue
M. Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	<i>Business Forum Advancing Government Guarantee and Blended Finance to Promote Sustainable and Resilient Infrastructure Development</i>	28 Maret 2022 28 March 2022	DJPPR Kementerian Keuangan DJPPR Ministry of Finance	Online
		<i>Plenary Session Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth</i>	28 Maret 2022 28 March 2022	DJPPR Kementerian Keuangan DJPPR Ministry of Finance	Online
		<i>Fitch on Indonesia 2022 Exit Strategy after the Pandemic - Part 2</i>	23 Maret 2022 23 March 2022	Fitch Ratings	Online
		Webinar Infrastruktur untuk Indonesia "Kolaborasi Ekosistem Infrastruktur untuk mendorong Pemulihan Ekonomi dan Mendukung Pembangunan Berkelanjutan"	2 Maret 2022 2 March 2022	Lembaga Manajemen Aset Negara ("LMAN") State Assets Management Agency ("LMAN")	Online
		Infrastructure for Indonesia Webinar "Collaboration of Infrastructure Ecosystem to encourage Economic Recovery and Support Sustainable Development]			
		<i>Mandiri Investment Forum 2022 - Recapturing the Growth Momentum</i>	9 Februari 2022 9 February 2022	Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas Bank Mandiri and Mandiri Sekuritas	Online
		<i>7th Asia Sustainable Infrastructure Finance Leaders Dialogue</i>	7 Juli 2022 7 July 2022	The Asset	Four Seasons Hotel, Singapore
<i>Special Event Toward G20 Summit "Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity</i>	10-11 Oktober 2022 10-11 October 2022	Kementerian Keuangan dan Special Mission Vehicle ("SMV") Ministry of Finance and Special Mission Vehicle ("SMV")	The Convene, Washington DC		



Nama Name	Jabatan Position	Program Pelatihan Training Program	Tgl Pelatihan Training Date	Penyelenggara Pelatihan Training organizer	Tempat Pelatihan Training Venue
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	<i>Business Forum Advancing Government Guarantee and Blended Finance to Promote Sustainable and Resilient Infrastructure Development</i>	28 Maret 2022 28 March 2022	DJPPR Kementerian Keuangan DJPPR Ministry of Finance	<i>Live from:</i> Indonesia Pavilion, Expo 2020 Dubai
		<i>Plenary Session Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth</i>	28 Maret 2022 28 March 2022	DJPPR Kementerian Keuangan DJPPR Ministry of Finance	<i>Live from:</i> Indonesia Pavilion, Expo 2020 Dubai
		<i>IsDB Group Private Sector Forum in Sharm El Sheikh</i>	1-7 Juni 2022 1-7 June 2022	IsDB Group	Tonoto Lamborghini International Convention Center, Sharm El Sheikh
		<i>Special Event Toward G20 Summit "Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity"</i>	10-11 Oktober 2022 10-11 October 2022	Kementerian Keuangan dan Special Mission Vehicle ("SMV") Ministry of Finance and Special Mission Vehicle ("SMV")	The Convene, Washington DC
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	<i>Business Forum Advancing Government Guarantee and Blended Finance to Promote Sustainable and Resilient Infrastructure Development</i>	28 Maret 2022 28 March 2022	DJPPR Kementerian Keuangan DJPPR Ministry of Finance	<i>Online</i>
		<i>Plenary Session Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth</i>	28 Maret 2022 28 March 2022	DJPPR Kementerian Keuangan DJPPR Ministry of Finance	<i>Online</i>
		<i>Special Event Toward G20 Summit "Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity"</i>	10-11 Oktober 2022 10-11 October 2022	Kementerian Keuangan dan Special Mission Vehicle ("SMV") Ministry of Finance and Special Mission Vehicle ("SMV")	<i>Online</i>

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru

Perseroan menyelenggarakan Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru sesuai ketentuan dalam KMK No. 505 Tahun 2020. Pada tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) Program Pengenalan Perseroan bagi Direktur Keuangan, beliau diangkat sebagai Direktur sejak tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 5 tahun ke depan.

Company Introduction Program for the new member of Board of Directors

The Company holding a Corporate Introduction Program for the New Board of Directors in accordance with the provisions in KMK No. 505 of 2020. In 2022, the Company held 1 (one) Orientation Program for the Board of Finance Director; he was appointed as Director since January 17, 2022 based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022 for a term of office up to the next 5 years.

Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2022

Board of Directors Performance Appraisal Year 2022

Hasil Penilaian Kinerja Direktur Utama Tahun 2022

President Director Performance Appraisal Results in 2022

Direktur Utama/President Director								
Kategori Performan Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian IKU KPI Achievement	Bobot Capaian Weight of Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
A Korporasi (75%) A Corporation (75%)	F1 Optimalisasi nilai pemegang saham/ <i>Shareholder value</i> F1 Optimization of shareholder value	Margin laba bersih Net profit margin	7,00%	Persentase Percentage	54%	66%	120	8,40%
	F2 Penjaminan yang berkelanjutan F2 Sustainable guarantee	Nilai eskposur penjaminan dibandingkan dengan ekuitas (<i>gearing ratio</i>) Exposure value of guarantee compared to equity (<i>gearing ratio</i>)	7,00%	Rasio Ratio	6,6	6,95	105,30%	7,37%
	F3 Optimalisasi Sinergi BUMN/ Lembaga Kementerian Keuangan F3 Optimization of Synergy between SOEs/Ministry of Finance Institutions	Kegiatan <i>Joint Program</i> yang melibatkan seluruh BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Joint-Program involving all SOEs/Institutions under the Ministry of Finance	6,50%	Proyek/Program Project/Program	1	2	120%	7,80%
	C1 Pemahaman <i>Stakeholders</i> yang efektif C1 Effective Stakeholders understanding	Pencapaian tingkat Pemahaman PJKP dan <i>Stakeholders</i> lainnya yang baik Achievement good level of Understanding of GCA and other Stakeholders	6,50%	Indeks Index	3,75	4,28	114,13%	7,42%
	C2 Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi C2 High market reputation and trust level	<i>Rating</i> Perusahaan <i>Sovereign</i> Sovereign Company Rating	6,50%	<i>Rating</i>	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equal to Indonesian Government's Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equal to Indonesian Government's Rating	100,00%	6,50%
	P1 Enterprise Risk Management yang kuat P1 Strong Enterprise Risk Management	Risiko Korporasi yang terkendali Controlled Corporate Risk	10,00%	Persentase Percentage	7%	7,5%	107,14%	10,71%
	P2 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik P2 Implementation of Good Corporate Governance	Tata Kelola perusahaan yang baik (<i>GCG score</i>) Good Corporate Governance (<i>GCG score</i>)	10,00%	GCG Score	86	88,17	102,52%	10,25%



Direktur Utama/President Director								
Kategori Performan Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian IKU KPI Achievement	Bobot Capaian Weight of Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9=[4x8]
	P3 Optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran P3 Optimization and efficiency of budget use	BOPO	7,00%	Persentase Percentage	46%	36%	120,00%	8,40%
	L1 Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas L1 quality and integrated human resources management	1. Peningkatan indeks <i>Engagement</i> karyawan yang optimal 1. Improving an optimal employee engagement index 2. Pembentukan <i>talent pool</i> untuk <i>leadership pipeline</i> 2. Establishment of talent pool for leadership pipeline	6,00%	Score Engagement (absolut) Engagement Score (absolute)	72,5%	77%	106,21%	6,37%
	L2 Pengembangan Teknologi informasi yang sistematis dan andal L2 Development of a systematic and reliable Information Technology	Pelaksanaan <i>review IT Master Plan</i> tepat waktu dan peningkatan <i>IT Maturity</i> Perseroan melalui implementasi ERP Implementation IT Master Plan Review on time and improvement of the Company's IT Maturity through the implementation of ERP	6,00%	<i>IT Maturity Score</i>	Q3	Q3 (<i>Go Live</i> ERP: 25 Juli/ July 2022)	120,00%	7,20%
B Individu (25%) B Individual (25%)	I1 Penjaminan yang berkelanjutan I1 Sustainable guarantee	Jumlah penerbitan penjaminan Total issuance of guarantee	7,50%	Perjanjian Agreement	11	12	109,09%	8,18%
	I2 Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang efektif I2 Preparation of an effective project and transaction advisory	Penyelesaian <i>Milestone</i> penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara tepat waktu dan <i>leverage</i> biaya penugasan yang optimal Completion of assignment milestone on the preparation of project and counselling of transaction on time and optimal cost of assignment leverage	7,50%	Indeks index	3,75	3,50	93,33%	7,00%

Direktur Utama/President Director

Kategori Performan <i>Performance Category</i>	Sasaran Strategis <i>Strategic Target</i>	Indikator Kinerja Utama <i>Key Performance Indicator</i>	Bobot <i>Weight</i>	Satuan <i>Unit</i>	Target	Realisasi <i>Realization</i>	Capaian IKU KPI <i>Achievement</i>	Bobot Capaian <i>Weight of Achievement</i>
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
	I3 Keselarasan Rencana Jangka Panjang dengan Tujuan Perseroan I3 Alignment of Long-Term Plan and the Company's Goals	1 Penyampaian Pemutakhiran RJPP kepada RUPS 1 Submission of RJPP Update to GMS	5,00%	Tanggal date	30 – Sep – 22	30 – Sep – 22	100,00%	5,00%
	I4 Pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik I4 Implementation of Good Corporate Governance	1 Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Utama 1 Completion of follow up on internal and audit findings of the Main Directorate	2,50%	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Follow up on audit result	90%	100%	111,11%	2,78%
		2 Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Utama 2 Completion of follow-up in accordance with the direction of the Commissioner of the Main Directorate	2,50%	Penyelesaian Arahan Komisaris Fulfillment of the Board Commissioners' direction	95%	93%	97,72%	2,44%
							100,00%	108,32%



Hasil Penilaian Kinerja Direktur Keuangan Tahun 2022 Finance Director Performance Appraisal Results in 2022

Direktur Keuangan/Finance Director								
Kategori Performan Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2022	Realisasi Realization	Capaian IKU KPI Achievement	Bobot Capaian Weight of Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
A Korporasi (75%) A Corporation (75%)	F1 Optimalisasi nilai pemegang saham/ <i>Shareholder value</i> F1 Optimization of shareholder value	Margin laba bersih Net profit margin	7,00%	Persentase Percentage	54%	66%	120,00%	8,40%
	F2 Penjaminan yang berkelanjutan F2 Sustainable guarantee	Nilai eskposur penjaminan dibandingkan dengan ekuitas (<i>gearing ratio</i>) Exposure value of guarantee compared to equity (<i>gearing ratio</i>)	7,00%	Rasio Ratio	6,6	6,95	105,30%	7,37%
	F3 Optimalisasi Sinergi BUMN/Lembaga Kementerian Keuangan F3 Optimization of Synergy between SOEs/Ministry of Finance Institutions	Kegiatan <i>Joint Program</i> yang melibatkan seluruh BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Joint-Program involving all SOEs/Institutions under the Ministry of Finance	6,50%	Proyek Project	1	2	120%	7,80%
	C1 Pemahaman <i>Stakeholders</i> yang efektif C1 Effective Stakeholders understanding	Pencapaian tingkat pemahaman PJPk dan <i>Stakeholders</i> lainnya yang baik Achievement good level of Understanding of GCA and other Stakeholders	6,50%	Indeks Index	3,75%	4,28	114,13%	7,42%
	C2 Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi C2 High market reputation and trust level	<i>Rating</i> Perusahaan <i>Sovereign</i> Company Rating	6,50%	<i>Rating</i>	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equal to Indonesian Government's Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equal to Indonesian Government's Rating	100,00%	6,50%

Direktur Keuangan/Finance Director

Kategori Performan <i>Performance Category</i>	Sasaran Strategis <i>Strategic Target</i>	Indikator Kinerja Utama <i>Key Performance Indicator</i>	Bobot <i>Weight</i>	Satuan <i>Unit</i>	Target 2022	Realisasi <i>Realization</i>	Capaian IKU KPI <i>Achievement</i>	Bobot Capaian <i>Weight of Achievement</i>
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
	P1 Enterprise Risk Management yang kuat P1 Strong Enterprise Risk Management	Risiko Korporasi yang terkendali Controlled Corporate Risk	10,00%	Persentase Percentage	7%	7,5%	107,41%	10,71%
	P2 Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang Baik P2 Implementation of Good Corporate Governance	Tata kelola perusahaan yang baik (GCG Score) Good Corporate Governance (GCG score)	10,00%	GCG Score	86	88,17	102,52%	10,25%
	P3 Optimalisasi dan efisiensi penggunaan P3 Optimization and efficiency of budget use	BOPO	7,00%	Persentase Percentage	46%	36%	120,00%	8,40%
	L1 Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegras L1 quality and integrated human resources management	1. Peningkatan indeks <i>engagement</i> karyawan yang optimal 1. Improving an optimal employee engagement index	6,00%	Score <i>Engagement</i> (absolut) Engagement Score (absolute)	72,5%	77%	106,21	6,37%
		2 Pembentukan <i>talent pool</i> untuk <i>leadership pipeline</i> 2 Development of talent pool for leadership pipeline	2,50%	Persentase percentage	100,0%	100,0%	100,00%	2,50%
	L2 Teknologi informasi yang sistematis dan handal L2 Development of a systematic and reliable Information Technology	Pelaksanaan <i>review IT Master Plan</i> tepat waktu dan peningkatan <i>IT Maturity</i> Perseroan melalui implementasi ERP Implementation IT Master Plan Review on time and improvement of the Company's IT Maturity through the implementation of ERP	6,00%	Waktu Time	Q3	Q3 (<i>Go Live</i> ERP: 25 Juli/July 2022)	120,00%	7,20%



Direktur Keuangan/Finance Director

Kategori Performan Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2022	Realisasi Realization	Capaian IKU KPI Achievement	Bobot Capaian Weight of Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
B Individu (25%) B Individual (25%)	I1 Penjaminan yang berkelanjutan I1 Sustainable guarantee	Jumlah penerbitan Penjaminan Non-KPBU dan lainnya Total issuance of guarantee to PPPs and others	7,50%	Perjanjian Agreement	4	8	120,00%	9,00%
	I2 Pengelolaan risiko penjaminan yang efektif I2 Effective management of guarantees	Tingkat pengendalian risiko klaim atas proyek yang masuk dalam kategori aman Level of control of claim risk on projects that are categorized as safe	5,00%	Persentase Percentage	91%	93%	102,71%	5,14%
	I3 Optimalisasi kapasitas penjaminan I3 Optimization of guarantee capacity	Penyelesaian kajian terkait co-guarantee/re-guarantee dan proses bisnis dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kapasitas penjaminan Completion of co-guarantee/re-guarantee review and business process in the optimization of guarantee capacity	2,50%	Waktu Time	Q3	Q3 (29 Sep 2022)	100%	2,50%
	I4 Keselarasan Rencana Jangka Panjang dengan Tujuan Perseroan I4 Alignment of Long-Term Plan and the Company's Goals	Penyampaian pemutakhiran RJPP kepada RUPS Submission of RJPP Update to GMS	2,50%	Tanggal Date	30-Sep-22	30-Sep-22	100,00%	2,50%
	I5 Pengelolaan Dana yang Optimal I5 Optimal Fund Management	Tingkat capaian pendapatan pengelolaan dana Achievement level of income fund management	2,50%	Basis poin di atas rata-rata suku bunga acuan Point basis of above the average referred interest rate	237	172	72,62%	1,82%

Direktur Keuangan/Finance Director

Kategori Performan Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2022	Realisasi Realization	Capaian IKU KPI Achievement	Bobot Capaian Weight of Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
	I6 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik I6 Implementation of good corporate governance	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Keuangan dan Penilaian Proyek Completion of follow up on internal and external audit results of Finance Directorate and Project Assessment	2,50%	Tindak lanjut hasil pemeriksaan Follow up on audit results	90%	97%	108,02%	2,70%
		Penyelesaian tindak lanjut sesuai Arahan Komisaris Direktorat Keuangan dan Penilaian Proyek Completion of follow-up in accordance with the direction of the Commissioner of the Finance Directorate	2,50%	Penyelesaian Arahan Komisaris Fulfillment of the Board of Commissioners' Direction	95%	100%	104,95%	2,62%
			100,00%				109,20%	



Hasil Penilaian Kinerja Direktur Bisnis Tahun 2022 Results of Business Director Performance Appraisal Year 2022

Direktur Bisnis/Business Director								
Kategori Performan Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2022	Realisasi Realization	Capaian IKU KPI Achievement	Bobot Capaian Weight of Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
A Korporasi (75%) A Corporation (75%)	F1 Optimalisasi nilai pemegang saham/ Shareholder value F1 Optimization of shareholder value	Margin laba bersih Net profit margin	7,00%	Persentase Percentage	54%	66%	120,00%	8,40%
	F2 Penjaminan yang berkelanjutan F2 Sustainable guarantee	Nilai eksposur penjaminan dibandingkan dengan ekuitas (<i>gearing ratio</i>) Exposure value of guarantee compared to equity (<i>gearing ratio</i>)	7,00%	Rasio Ratio	6,6	6,95	105,30%	7,37%
	F3 Optimalisasi Sinergi BUMN/ Lembaga Kementerian Keuangan F3 Optimization of Synergy between SOEs/Ministry of Finance Institutions	Kegiatan Joint Program yang melibatkan seluruh BUMN/ Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Joint-Program involving all SOEs/ Institutions under the Ministry of Finance	6,50%	Proyek/Program 1 Project/Program	2	120,00%	7,80%	
	C1 Pemahaman Stakeholders yang efektif C1 Effective Stakeholders understanding	Pencapaian tingkat Pemahaman PJPK dan Stakeholders lainnya yang baik Achievement good level of Understanding of GCA and other Stakeholders	6,50%	Indeks Index	3,75	4,28	114,113%	7,42%
	C2 Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi C2 High market reputation and trust level	<i>Rating</i> Perusahaan Sovereign Company Rating	6,50%	<i>Rating</i>	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equal to Indonesian Government's Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equal to Indonesian Government's Rating	100,00%	6,50%
	P1 <i>Enterprise Risk Management</i> yang kuat P1 Strong Enterprise Risk Management	Risiko Korporasi Yang terkendali Corporate Risk	10,00%	Persentase Percentage	7%	7,5%	107,14%	10,71%

Direktur Bisnis/Business Director

Kategori Performan Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2022	Realisasi Realization	Capaian IKU KPI Achievement	Bobot Capaian Weight of Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
	P2 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik P2 Implementation of Good Corporate Governance	Tata Kelola perusahaan yang baik (GCG score) Good Corporate Governance (GCG score)	10,00%	Persentase Percentage	86	88,17	102,52%	10,25%
	P3 Optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran P3 Optimization and efficiency of budget use	BOPO	7,00%	Persentase Percentage	46%	36%	120,00%	8,40%
	L1 Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas L1 quality and integrated human resources management	Peningkatan indeks <i>engagement karyawan</i> yang optimal Improving an optimal employee engagement index	6,00%	Score <i>Engagement</i> (absolut) Engagement Score (absolute)	72,5%	77%	106,21%	6,37%
		Pembentukan <i>talentpool</i> untuk <i>leadership pipeline</i> Development of talentpool for leadership pipeline	2,50%	Persentase Percentage	100,00%	100,00%	100,00%	2,50%
	L2 Pengembangan teknologi informasi yang sistematis dan andal L2 Development of a systematic and reliable Information Technology	Pelaksanaan <i>review IT Master Plan</i> tepat waktu dan peningkatan <i>IT Maturity</i> Perseroan melalui implementasi ERP Implementation IT Master Plan Review on time and improvement of the Company's IT Maturity through the implementation of ERP	6,00%	Waktu Time	Q3	Q3 (<i>Go Live</i> ERP: 25 Juli/ July 2022)	120,0%	7,20%



Direktur Bisnis/Business Director

Kategori Performan Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2022	Realisasi Realization	Capaian IKU KPI Achievement	Bobot Capaian Weight of Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
B Individu (25%) B Individual (25%)	I1 Penjaminan yang berkelanjutan I1 Sustainable guarantee	Jumlah penerbitan penjaminan KPBU dan lainnya Total issuance of guarantee to PPPs and others	7,5%	Perjanjian Agreement	7	4	57,14%	4,29%
	I2 Penyediaan Penjaminan yang Prudent I2 Provision of Prudent Guarantees	1 Jumlah pernyataan ketersediaan penjaminan 1. Number of guarantee availability statements	2,50%	Dokumen IPA IPA Document	7	5	71,43%	1,79%
		2 Jumlah proyek yang diselesaikan appraisal 2. Number of appraised projects	2,50%	Memo Evaluasi Evaluation memo	6	6	100,00%	2,50%
	I3 Pengembangan Penjaminan KPBU Daerah yang berkelanjutan I3 Development of sustainable Regional PPP Guarantee	Engagement/ Program pengembangan potensi KPBU Daerah bersama dengan stakeholders terkait Engagement/ development of potential Regional PPP programs with relevant stakeholders	2,50%	Surat permohonan pendampingan KPDBU KPDBU counselling request letter	2	6	120%	3,00%
I4 Penguatan kapasitas dan pemahaman stakeholders berikut ekosistem infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan I4 Strengthening the capacity and understanding of stakeholders as well as the infrastructure ecosystem for a sustainable infrastructure development	Pencapaian tingkat pemahaman stakeholders dan ekosistem infrastruktur yang baik melalui kegiatan edukasi IIGF Institute Achievement of good level of understanding of stakeholders and infrastructure ecosystem through IIGF Institute educational activities	2,5%	Indeks Index	3,5	4,5	120,00%	3,00%	

Direktur Bisnis/Business Director

Kategori Performan Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2022	Realisasi Realization	Capaian IKU KPI Achievement	Bobot Capaian Weight of Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(4x8)
	I5 Keselarasan Rencana Jangka Panjang dengan tujuan Perseroan I5 Alignment of Long-Term Plan and the Company's Goals	Penyampaian pemutakhiran RJPP kepada RUPS Submission of RJPP Update to GMS	2,5%	Tanggal Date	30-Sep-22	30-Sep-22	100,00%	2,50%
	I6 Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik I6 Implementation of good corporate governance	1 Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Bisnis 1 Completion of follow up on internal and external audit results of Business Directorate	2,5%	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Follow Up on Audit Results	90%	100%	111,11%	2,78%
		2 Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Bisnis 2 Completion of follow-up in accordance with the direction of the Commissioner of the Business Directorate	2,5%	Penyelesaian Arahan Komisaris Fulfillment of the Board of Commissioners' Direction	95%	100%	105,26%	2,63%
							100,00%	105,41%

Mekanisme Pengambilan Keputusan di luar Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2022, Direksi telah melakukan pengambilan keputusan terkait kepengurusan Perseroan di luar Rapat Direksi sebanyak 15 Agenda, dengan detail sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Decision-making Mechanism outside the Meeting Board of Directors

Throughout 2022, the Board of Directors has made decisions related to the management of the Company outside the Board of Directors Meeting as many as 15 Agendas, with details as attached in the following table:

No.	Agenda	Tanggal Keputusan Decree Date	MWS	ANP	DHA
1	Pemindahan Lingkup Pekerjaan <i>Monitoring</i> Penjaminan Proyek Non-KPBU dari Divisi yang Membidangi Fungsi <i>Project Monitoring & Claim Management</i> ke Divisi yang Membidangi Fungsi Penjaminan Non-KPBU Transferring the Scope of Duty for Non-PPP Project Monitoring from the Division that Oversees Project Monitoring & Claim Management Function to Division that Oversees Non-PPP Guarantee Function	3 Januari/January	√	√	*



No.	Agenda	Tanggal Keputusan Decree Date	MWS	ANP	DHA
2	<p>Penandatanganan Amandemen Kedua Perjanjian antara Kementerian Keuangan dan Perseroan Tentang Penugasan Khusus kepada Perseroan untuk Melaksanakan Fasilitas dalam Rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek Pengembangan <i>Proving Ground</i> Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha</p> <p>Signing the Second Amendment of Agreement between the Ministry of Finance and the Company Regarding the Special Assignment of the Company to Realize Facility in order to Prepare Project and Transaction Advisory for the Proving Ground Development Project of Bekasi Roadworthiness Test and Motor Vehicle Certification with the Private Public Partnership Scheme</p>	12 Januari/January	√	√	*
3	<p>Penandatanganan Surat Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I</p> <p>Signing the Response Letter on the Request for Approval to the Second Amendment of Public Private Partnership (PPP) System</p>	18 Januari/January	√	√	√
4	<p>Penandatanganan Perjanjian Penugasan Khusus serta Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Rumah Susun Sewa Terintegrasi di Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK") Sei Mangkei</p> <p>Signing the Special Assignment Agreement and the Realization of Project Preparation Facility and Realization of Transaction for Public Private Partnership for Integrated Leased Flats in Special Economic Zone ("KEK") Sei Mangkei</p>	19 Januari/January	√	√	√
5	<p>Penandatanganan Surat Tanggapan atas Pemberitahuan Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Tirta Siak Kota Pekanbaru</p> <p>Signing the Response Letter on the Notification of Second Amendment to the Public Private Partnership (PPP) for the Development of Drinking Water Provision ("SPAM") Tirta Siak, Pekanbaru City</p>	11 Februari/ February	√	√	√
6	<p>Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung antara Perseroan dan PT Indonesia Infrastructure Finance</p> <p>Signing the Partnership Agreement for the Realization of Preparation Facility and Realization of Transaction for the Public Private Partnership of Cisaranten Bina Harapan Leased Flats Bandung Between the Company and PT Indonesia Infrastructure Finance</p>	14 Februari/ February	√	√	√
7	<p>Penandatanganan Perjanjian Penugasan Khusus serta Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek Dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir ("TPA") Sampah Regional Piyungan</p> <p>Signing the Special Assignment Agreement as well as the Realization of Project Preparation Facility and Realization of Transaction of the Public Private Partnership for the Development of Final Disposal Site ("TPA") of Piyungan Region</p>	18 Februari/ February	√	√	√
8	<p>Penandatanganan Surat Tanggapan Atas Pemberitahuan atas Amandemen Ketiga Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru</p> <p>Signing the Response Letter on the Notification of Third Amendment to the Public Private Partnership with Special Purpose Vehicle (SPV)</p>	15 Juni/June	√	√	√

No.	Agenda	Tanggal Keputusan Decree Date	MWS	ANP	DHA
9	Penandatanganan atas Amandemen Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rumah Susun Sewa Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung antara Perseroan dan PT Indonesia Infrastructure Finance Signing the Amendment to Cooperation Agreement on the Realization of Facility Preparation and Realization of Transaction of the Public Private Partnership (KPBU) of Sisaranten Bina Harapan Flats Bandung Between the Company and PT Indonesia Infrastructure Finance	27 Juli/July	√	√	√
10	Penandatanganan Surat Tanggapan atas Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Prasarana Perkertaapian Umum Makassar – Parepare Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Signing the Response Letter on the Second Amendment to the Cooperation Agreement for the Provision of Railways Public Infrastructure Makassar – Parepare with Public Private Partnership Scheme	29 Juli/July	√	√	√
11	Penandatanganan Perjanjian Penugasan Khusus serta Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Batam Signing the Special Assignment Agreement as well as the Realization of Project Preparation Facility and Realization of Transaction Agreement for the Public Private Partnership of the Development of Natural Gas Distribution Network for Households in Batam City	29 Agustus/August	√	√	√
12	Penandatanganan Surat Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Amandemen Keenam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Pandaan Malang Signing the Response Letter on the Request for Approval to the Sixth Amendment of the Consession Agreement of Pandaan Malang Toll Road	7 Oktober/October	√	√	√
13	Penandatanganan Surat Tanggapan atas Amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol pada Tujuh Proyek Ruas Jalan Tol : a. Ruas Jalan Tol Batang-Semarang b. Ruas Jalan Tol Manado-Bitung c. Ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda d. Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang e. Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated f. Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek II g. Ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Signing the Response Letter on the Amendment of Toll Road Concession Agreement on Seven Toll Road Sections: a. Batang-Semarang Toll Road b. Tol Manado-Bitung Toll Road c. Tol Balikpapan-Samarinda Toll Road d. Tol Serang-Panimbang Toll Road e. Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Toll Road f. Tol Jakarta-Cikampek II Toll Road g. Tol Probolinggo-Banyuwangi Toll Road	17 November	√	√	√
14	Penandatanganan Surat Tanggapan atas Amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol pada Tiga Proyek Ruas Jalan Tol : a. Ruas Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar b. Ruas Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Signing the Response Letter on the Amendment of Toll Road Concession Agreement on Three Toll Road Sections: a. Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road b. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road	14 Desember/ December	√	√	√
15	Amendemen Perjanjian untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng-2 dan Patuha-2 Agreement Amendment for the Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development Projects	30 Desember/ December	√	√	√

*Anggota Direksi hanya berjumlah 2 orang yaitu Muhammad Wahid Sutopo dan Andre Permana.

*There are only 2 members of the Board of Directors, namely Muhammad Wahid Sutopo and Andre Permana.

TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

INFORMATION TRANSPARENCY ABOUT THE BOARD COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS



Kebijakan Terkait Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengungkapan informasi hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana uraian di bawah ini:

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Hubungan keluarga dan kepengurusan perusahaan lain oleh anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan selama periode tahun 2022 diungkapkan dalam tabel berikut:

Policy Related to Work Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

The work relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is regulated in the Articles of Association and prevailing laws and regulations. Disclosure of information on the relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as described as follows:

Affiliation of the Board of Directors Members

Family relationship and management of other companies by each member of the Board of Directors with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and Shareholders of the Company during the period of 2022 are disclosed in the following table:

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Organ Perseroan Family Relationship with the Company's Organ						Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain Management Relationship with Other Companies					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi The Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Sebagai Dewan Komisaris Board of Commissioners		Sebagai Direksi The Board of Directors		Sebagai Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Muhammad Wahid Sutopo		√		√		√		√		√		√
Donny Hamdani		√		√		√		√		√		√
Andre Permana		√		√		√		√		√		√

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Pengungkapan hubungan keluarga dan kepengurusan perusahaan lain oleh anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta Pemegang Saham Perseroan selama periode tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut:

Affiliation of the Board of Directors Members

Disclosure of family relationships and management of other companies by each member of the Board of Commissioners with other members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors and Shareholders of the Company during the period of 2022 is illustrated in the following table:

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Organ Perseroan Family Relationship with the Company's Organ						Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain Management Relationship with Other Companies					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi The Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Sebagai Dewan Komisaris Board of Commissioners		Sebagai Direksi The Board of Directors		Sebagai Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Awan Nurmawan Nuh		√		√		√		√		√		√
Mariatul Aini		√		√		√		√		√		√
Wahyu Utomo		√		√		√		√		√		√



KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Untuk memperoleh masukan dan pandangan yang lebih komprehensif dalam rangka pengambilan keputusan yang objektif dan optimal, maka Perseroan memiliki ketentuan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak hanya memperkaya sudut pandang, keberagaman komposisi Dewan Komisaris maupun Direksi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi aspek operasional serta memajukan usaha Perseroan, dan meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan.

Namun demikian, hingga kini, perihal keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan belum memiliki landasan kebijakan formal dalam bentuk tertulis. Oleh karenanya, kebijakan Perseroan terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi adalah menyusun sedemikian rupa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis Perseroan dan struktur organisasi sehingga organ-organ ini dapat saling melengkapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta mendukung pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan akurat sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

To obtain more comprehensive input and views in order to make objective and optimal decisions, the Company has provisions for diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Not only enriching perspectives, the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is expected to provide added value to the operational aspects and advance the Company's business, and improve the quality of Corporate Governance.

However, until now, the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company does not have a formal written policy. Therefore, the Company's policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is to arrange the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with the complexity of the Company's business activities and organizational structure so that these organs can complement each other in carrying out their duties and responsibilities and support effective, precise and accurate decision making in accordance with the goals and objectives to be achieved.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama <i>Name</i>	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Pendidikan Terakhir <i>Latest Education</i>	Bidang Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Usia <i>Age</i>	Gender
Dewan Komisaris/Board of Commissioners					
Awan Nurmawan Nuh (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Indonesia Indonesian	Master (S2) of Business Taxation	Pernah menjabat berbagai posisi kunci di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI antara lain sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (2009), Direktur Peraturan Perpajakan I (2011), Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (2013), Direktur Ekstensifikasi dan Penilai (2015), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I (2016), dan Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan RI (2016). Saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI (2021-sekarang). He held various key positions at the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, including Head of the Foreign Investment Tax Service Office Tiga (2009), Board of Directors of Tax Regulation I (2011), Secretary of the Directorate General of Taxes (2013), Board of Directors of Extensification and Appraisal (2015), Head of the Regional Office of the Directorate General of Taxes Central Java I (2016), and Expert Staff for Tax Regulation and Law Enforcement at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2016). Currently, he serves as Inspector General of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2021-present).	54	Laki-laki Male

Nama <i>Name</i>	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Pendidikan Terakhir <i>Latest Education</i>	Bidang Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Usia <i>Age</i>	Gender
Mariatul Aini (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia Indonesian	Master (S2) of Business Administration	<p>Pernah menjabat berbagai posisi kunci di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI antara lain sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran (2011), Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (2018), dan Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI (2018). Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021-sekarang).</p> <p>She held various key positions at the Directorate General of Budget, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, including Board of Directors of Harmonization of Budgeting Regulations (2011), Director of Non-Tax State Revenue (2018), and Secretary of the Directorate General of Budget, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2018). Currently serves as Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance (2021-present).</p>	59	Perempuan Female
Wahyu Utomo (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia Indonesian	PhD (S3) dalam Regional Science PhD (S3) in Regional Science	<p>Saat ini menjabat sebagai deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2016-sekarang) dan Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (2016-sekarang) serta beberapa jabatan lainnya.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat berbagai posisi kunci di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, di antaranya Asisten Deputi Urusan Perumahan, Pertanahan dan Kerja sama Pemerintah Swasta (2007-2014), asisten deputy urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kalimantan-Sulawesi (2005-2007), serta Kepala Bidang Desentralisasi Ekonomi (2002-2005).</p> <p>Currently serves as deputy for Coordination of Acceleration of Infrastructure and Regional Development Coordinating Ministry for Economic Affairs (2016-present) and Chief Executive Officer of the Committee for the Acceleration of Priority Infrastructure Delivery Committee (2016-present) and other positions.</p> <p>Previously, he held various key positions in Coordinating Ministry for Economic Affairs, including among others, Deputy Assistant for Housing Affairs, Land and Public-Private Partnerships (2007-2014), assistant deputy of deputy for Infrastructure and Regional Development Kalimantan-Sulawesi (2005-2007), and Head of Economic Decentralization (2002-2005).</p>	58	Laki-laki Male
Iqbal Islami* (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia Indonesian	Master (S2) of Business Administration	<p>Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan (2020-sekarang). Sebelum menjabat sebagai komisaris, Beliau pernah bertugas sebagai anggota Komite Audit kemudian Komite Pemantau Risiko di PT PII sejak 1 November 2012 sampai dengan 30 Januari 2023.</p> <p>Sebelum bertugas sebagai anggota Komite Audit di PT PII, beliau juga pernah bertugas sebagai anggota Komite Audit pada dua BUMN dan satu Perusahaan terbuka.</p> <p>Dalam bidang akademis, beliau juga tercatat sebagai Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN sejak tahun 1991. Manajemen strategik, <i>finance, corporate governance</i>, manajemen risiko dan keuangan negara adalah bidang-bidang yang menjadi keahliannya.</p>	58	Laki-laki Male



Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Terakhir Latest Education	Bidang Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Gender
--------------	--------------------------------	--	--	-------------	--------

Currently serves as Secretary of the Financial Education and Training Agency and Training Agency, Ministry of Finance (2020-present). Prior to serving as commissioner, He has served as a member of the Audit Committee then Risk Monitoring Committee at IIGF from November 1, 2012 to January 30, 2023.

Prior to serving as a member of the Audit Committee at IIGF, he also served as a member of the Audit Committee in two BUMNs and one public company.

In the academic field, he is also listed as Lecturer at STAN State Finance Polytechnic since 1991. Strategic management, finance, corporate governance, risk management and state finance are his areas of expertise.

Direksi/The Board of Directors

Muhammad Wahid Sutopo (Direktur Utama) (President Director)	Indonesia Indonesian	Magister (S2) Manajemen Master (S2) of Management	Pernah menjabat berbagai posisi kunci antara lain sebagai Direktur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (2011-2017), Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017), Komisaris Utama PT PGN LNG Indonesia (2015-2016) dan Direktur Eksekutif Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2019). He has held various key positions including as Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (2011-2017), President Commissioner of PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017), President Commissioner of PT PGN LNG Indonesia (2015-2016) and Executive Business Director of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2019).	53	Laki-laki Male
Donny Hamdani (Direktur Keuangan) (Finance Director)	Indonesia Indonesian	Sarjana (S1) bidang Akuntansi Bachelor (S1) in Accounting	Beliau merintis karier sebagai auditor selama 11 tahun di KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan (PricewaterhouseCoopers). Kemudian beliau bergabung pertama kali dengan Perseroan pada tahun 2012 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai <i>Executive Vice President Corporate Strategy and Finance</i> dan terakhir kali menjabat sebagai Deputi Direktur Keuangan sebelum diangkat sebagai Direktur. He started his career as an auditor for 11 years at KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers). Then he first joined IIGF in 2012 and has held various strategic positions including as Executive Vice President Corporate Strategy and Finance and lastly served as Deputy Finance Director before being appointed as Director.	44	Laki-laki Male
Andre Permana (Direktur Bisnis) (Business Director)	Indonesia Indonesian	Doktor (S3) bidang Risk Management, Project Finance Doctoral Management, Project Finance	Melanjutkan profesi sebelumnya yang terkait bidang konstruksi dan pengembangan proyek infrastruktur, karier profesional di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dimulai pada tahun 2010 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Divisi <i>Risk and Compliance</i> , Kepala Divisi <i>Business Development</i> , CEO Office dan terakhir kali menjabat sebagai <i>Executive Vice President Project Appraisal</i> . Continuing a previous profession related to construction and infrastructure project development, a career professional career at PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) began in 2010 and has held various strategic positions including as Head of Risk and Compliance, Head of Business Development Division, CEO Office and most recently served as Executive Vice President Project Appraisal.	46	Laki-laki Male

* Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 33/KMK.06/2023 tanggal 31 Januari 2023, Pemegang Saham memutuskan untuk mengangkat Iqbal Islami sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan Wahyu Utomo
Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023 dated January 31, 2023, the Shareholders decided to appoint Iqbal Islami as a member of the Board of Commissioners replacing Wahyu Utomo

PENILAIAN PENERAPAN GCG PADA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Perseroan melakukan penilaian secara menyeluruh atas efektivitas pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan PMK 88/2015. Penilaian tersebut juga mencakup penilaian penerapan GCG pada aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Hasil pengukuran penerapan GCG pada aspek Dewan Komisaris dan Direksi disajikan pada bagian "Hasil Tata Kelola: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik" pada awal bab ini.

The Company conducts a comprehensive assessment of the effectiveness of GCG implementation within the Company by referring to the provisions of PMK 88/2015. The assessment also includes an assessment of GCG implementation in the aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The results of the measurement of GCG implementation in the aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors are presented in the section "GCG Results: Evaluation, Monitoring, and Improvement of Good Corporate Governance Implementation" section at the beginning of this chapter.

PENILAIAN KINERJA KORPORASI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF CORPORATE

Secara umum, mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui Kementerian Keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja korporasi, penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2022 disampaikan berikut ini:

In general, the mechanism for performance appraisal of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by the Shareholders through the Ministry of Finance by referring to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 106/PMK.06/2017 concerning Performance Management of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance. The results of the evaluation of the achievement of corporate performance, the performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2022 are presented as follows:

Pencapaian Kinerja Korporasi Tahun 2022

Corporate Performance Achievement in 2022

Kategori Performansi Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Main Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2022 2022 Target	Realisasi Realization	Capaian IKU IKU Scope	Nilai Kinerja Performance Value
F Mandat dan Keuangan F Mandate and Finance	F1 Optimalisasi nilai pemegang saham/ shareholder value F1 Optimization of shareholders value	Margin laba bersih Net profit margin	5,0%	Persentase Percentage	54%	66%	120,00%	6,00%
	F2 Penjaminan yang berkelanjutan F2 Sustainable Guarantee	Jumlah penerbitan penjaminan Total guarantee issuance	10,0%	Perjanjian Agreement	11	12,00	109,09%	10,91%



Kategori Performansi Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Main Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2022 2022 Target	Realisasi Realization	Capaian IKU IKU Scope	Nilai Kinerja Performance Value
		Nilai eksposur Penjaminan dibandingkan dengan ekuitas (<i>gearing ratio</i>) Guarantee exposure value against equity (<i>gearing ratio</i>)	7,0%	Rasio Ratio	6,6	6,95	105,30%	7,37%
	F3 Penyediaan Penjaminan yang <i>Prudent</i> F3 Provision of Prudent Guarantee	Jumlah proyek yang diselesaikan appraisal Total completed appraisal project	7,0%	Memo Evaluasi Evaluation Memo	6	6	100,00%	7,00%
	F4 Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang efektif F4 Project preparation and effective transaction advisory	Penyelesaian <i>milestone</i> penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara tepat waktu dan <i>leverage</i> biaya penugasan yang optimum Completion of project preparation and transaction advisory milestone in a timely manner and optimal leverage of assignment fees	5,0%	Indeks Index	3,75	3,5	93,33%	4,67%
	F5 Optimalisasi Sinergi BUMN/ Lembaga Kementerian F5 Optimization of SOE/ Agency Ministry Synergy	Kegiatan <i>joint program</i> yang melibatkan seluruh BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Joint activities program that involving all SOEs/ Institutions under the under the Ministry of Finance Finance	5,0%	Proyek/ Program Project/ Program	1	2	120,00%	6,00%
C Stakeholders	C1 Pemahaman Stakeholders yang efektif C1 Effective Stakeholders Understanding	Pencapaian Tingkat pemahaman PJPK dan Stakeholders lainnya yang baik Good understanding level achievement of GCA and other stakeholders	5,0%	Indeks Index	3,75	4,28	114,13%	5,71%
	C2 Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi C2 High Market reputation and trust level	Rating Perusahaan <i>Sovereign</i> Sovereign Company Rating	5,0%	Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equivalent to Indonesian Government Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equivalent to Indonesian Government Rating	100,00%	5,00%
P Proses Bisnis Internal P Internal Business Process	P1 <i>Enterprise Risk Management</i> yang kuat P1 Strong Enterprise Risk Management	Risiko Korporasi yang terkendali Controlled Corporate Risk	8,0%	Persentase Percentage	7%	7,5%	107,14%	8,57%
	P2 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik P2 Implementation of Good Corporate Governance	Tata Kelola perusahaan yang baik (GCG <i>score</i>) Good Corporate Governance (GCG <i>score</i>)	8,0%	GCG <i>Score</i>	86	88,17	102,52%	8,20%

Kategori Performansi <i>Performance Category</i>	Sasaran Strategis <i>Strategic Target</i>	Indikator Kinerja Utama <i>Main Performance Indicator</i>	Bobot <i>Weight</i>	Satuan <i>Unit</i>	Target 2022 <i>2022 Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	Capaian IKU <i>IKU Scope</i>	Nilai Kinerja <i>Performance Value</i>
	P3 Pengelolaan Risiko Penjaminan yang Efektif <i>P3 Effective Guarantee of Risk Management</i>	Tingkat Pengendalian risiko klaim atas proyek masuk dalam kategori aman <i>The level of claim risk control on the project is in the safe category</i>	10,0%	Persentase <i>Percentage</i>	91%	93%	102,71%	10,27%
	P4 Optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran <i>P4 Optimization and Efficiency of budget use</i>	BOPO	5,0%	Persentase <i>Percentage</i>	46%	36%	120,00%	6,00%
	P5 Optimalisasi kapasitas Penjaminan <i>P5 Optimization of Guarantee capacity</i>	Penyelesaian kajian terkait <i>co-guarantee/re-guarantee</i> dan proses bisnis terkait dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kapasitas penjaminan <i>Completion of studies related to co-guarantee/re-guarantee and related business processes in an effort to optimize the utilization of guarantee capacity</i>	5,0%	Waktu <i>Times</i>	Q3	Q3 (29 Sep 22)	100%	5,00%
L Pembelajaran & Pertumbuhan <i>L Learning & Growth</i>	L1 Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas <i>L1 Quality and integrated human resources management</i>	Peningkatan indeks <i>Engagement</i> karyawan <i>Increased employee engagement index</i>	5,0%	Score <i>Engagement (absolut)</i>	72,5%	77%	106,21%	5,31%
	L1 Quality and integrated human resources management	Pembentukan <i>talent pool</i> untuk <i>leadership pipeline</i> <i>Establishment of talent pool for leadership pipeline</i>	2,5%	Persentase <i>Percentage</i>	100,0%	100,0%	100,00%	2,50%
	L2 Pengembangan Teknologi informasi yang sistematis dan andal <i>L2 Development of systematic and reliable information technology</i>	Pelaksanaan <i>review IT Master Plan</i> tepat waktu dan peningkatan IT <i>maturity</i> Perseroan melalui implementasi ERP <i>Implementation IT Master Plan Review on time and improvement of the Company's IT Maturity through the implementation of ERP</i>	7,5%	Waktu <i>Times</i>	Q3	Q3	120,00%	9,00%
100,00%								107,51%



NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan nominasi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris yang berlaku di Perseroan dilaksanakan dengan merujuk pada PMK 197/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Dalam peraturan tersebut, kandidat anggota Dewan Komisaris harus memenuhi sejumlah kriteria sebagai berikut:

1. Syarat umum:
Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Syarat Khusus:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki integritas dan moral yang baik;
 - c. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
 - d. Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan; dan
 - f. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
3. Syarat Lain:
 - a. Bukan anggota partai politik, pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
 - c. Telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Persero yang bersangkutan, paling kurang 1 (satu) tahun;
 - d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada Persero yang bersangkutan selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Secara sederhana, tahapan nominasi hingga pengangkatan Dewan Komisaris dapat disampaikan di bawah ini.

1. Penjaringan Bakal Calon Dewan Komisaris;
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Dewan Komisaris;
3. Pengajuan Calon Dewan Komisaris oleh Tim UKK;
4. Proses Persetujuan Calon Dewan Komisaris oleh Menteri selaku RUPS melalui Wakil Menteri; dan
5. Penetapan dan Pengangkatan Dewan Komisaris oleh Menteri selaku RUPS.

Nomination of Member of the Board of Commissioners

The nomination and selection policy for members of the Board of Commissioners applicable at IIGF is carried out with reference to PMK 197/2019 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Based on the regulations, candidates for the Board of Commissioners must fulfill a number of criteria as follows:

1. General Requirements:
Individuals who are capable of carrying out legal actions.
2. Special Requirements:
 - a. Physically and mentally healthy;
 - b. Have integrity and good morals;
 - c. Have a strong will and high dedication;
 - d. Understand the problems of the Company management related to one of the management;
 - e. Have adequate knowledge in the Company's business field; and
 - f. Able to provide sufficient time to carry out their duties.
3. Other Requirements:
 - a. Not a member of a political party, administrator of political party, member of the legislature and/or not currently running as a candidate for member of the legislature;
 - b. Not the head/deputy head of the region and/or not currently running as a candidate for the head/deputy head of the region;
 - c. Has not served as member of the Board of Directors of the relevant Persero, for at least 1 (one) year;
 - d. Not currently holding a position which, based on the laws and regulations, any member is prohibited from concurrently serving as a member of the Board of Commissioners, except for signing a statement that he/she is willing to resign from the position if elected as a member of the Board of Commissioners; and
 - e. Not serving as a member of the Board of Commissioners in the relevant Persero for 2 (two) consecutive terms.

In short, the stages of nomination to appointment of the Board of Commissioners can be presented below:

1. Selection of Candidates for the Board of Commissioners;
2. Feasibility and Compliance Test of Candidates for the Board of Commissioners;
3. Submission of Candidates for the Board of Commissioners by the UKK Team;
4. The Approval Process for Candidates for the Board of Commissioners by the Minister as the GMS through the Deputy Minister; and
5. Determination and Appointment of the Board of Commissioners by the Minister as the GMS.

Prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris diawali dengan penyampaian pemberitahuan Dewan Komisaris kepada Direktur Jenderal mengenai anggota Dewan Komisaris dengan masa jabatan yang segera habis/selesai. Tahapan selanjutnya adalah penjurangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dengan tujuan untuk memperoleh Bakal Calon yang berasal dari:

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat Struktural Pemerintah;
4. Pejabat Fungsional Pemerintah; atau
5. Orang perseorangan lain yang dianggap cakap untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.

Untuk Bakal Calon Dewan Komisaris yang berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Kementerian Keuangan, mereka ditetapkan sesuai keputusan Menteri dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Pertimbangan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (TPKOMWAS).

Kemudian dari Bakal Calon yang diajukan, Tim Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) Kementerian Keuangan akan melakukan penilaian yang meliputi aspek penilaian administratif dan wawancara. Hasil penilaian oleh Tim UKK ini lalu dilaporkan kepada Direktur Jenderal untuk kemudian disampaikan kepada Menteri melalui Wakil Menteri dengan mekanisme RUPS. Dalam hal Menteri tidak menyetujui hasil penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris yang diajukan, Direktur Jenderal akan mengulang kembali proses tahapan penjurangan Bakal Calon dan penilaian oleh Tim UKK.

Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris, maka Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih sebelumnya harus menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris. Namun, jika calon anggota Dewan yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir pada batas waktu tersebut.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris terpilih diwajibkan menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas sebagai wujud komitmen seluruh anggota Dewan Komisaris terpilih untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsinya sesuai visi dan misi Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kepentingan Perseroan.

Nominasi Anggota Direksi

Kebijakan terkait nominasi dan tata cara pengangkatan Direksi Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2017 ("PMK 78/2015").

The nomination process for members of the Board of Commissioners begins with the notification of the Board of Commissioners to the Director General regarding members of the Board of Commissioners whose term of office will soon expire. Afterwards, the selection stage is carried out by Director General on behalf of the Minister of Finance with the aim of obtaining prospective candidates from:

1. Former Director of the SOE;
2. Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs;
3. Government structural officials;
4. Government functional officials; or
5. Other individuals deemed qualified to become members of the Board of Commissioners.

Candidates for the Board of Commissioners who come from structural and functional officials of the Ministry of Finance are determined in accordance with the Minister's decision by taking into account the recommendations of the Advisory Team for the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises and the Supervisory Board of Public Service Agencies (TPKOMWAS).

Then, from the prospective candidates submitted, the Ministry of Finance's Fit and Proper Test Team (UKK) will conduct an assessment which includes aspects of administrative assessment and interviews. The results of the assessment by the UKK Team are then reported to the Director General to be submitted to the Minister through the Deputy Minister with the GMS mechanism. In the event that the Minister does not approve the results of the determination of the proposed Candidates for Members of the Board of Commissioners, the Director General will repeat the process of the stages of selecting Candidates and assessment by the UKK Team.

In the appointment of members of the Board of Commissioners, previously elected prospective members of the Board of Commissioners must sign a statement of resignation from other positions that are prohibited from concurrently serving as member of the Board of Commissioners as of the time they are appointed as members of the Board of Commissioners. However, if the prospective member of the Board concerned does not resign within the period stipulated in the laws and regulations, his/her position as a member of the Board of Commissioners will end at the deadline.

In addition, the elected members of the Board of Commissioners are required to sign a statement letter and integrity pact as a form of commitment of all elected members of the Board of Commissioners to carry out their duties, responsibilities and functions in accordance with the company's vision and mission as well as applicable laws and regulations in the interests of the Company.

Nominations for Member of the Board of Directors

Policies related to the nomination and appointment procedures of the Board of Directors The Company is implemented with reference to the Regulation of the Minister of Finance Minister Regulation No. 78/PMK.06/2015 on the Procedure for Appointment and and Dismissal of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance as amended several times, most recently with Minister of Finance Regulation No. 135/PMK.06/2017 ("PMK 78/2015").



Peraturan tersebut juga memuat kriteria bakal calon anggota Direksi, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
2. Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan;
3. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan Perseroan;
4. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya;
5. Memiliki *leadership* yang baik;
6. Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
7. Memiliki integritas dan moral yang baik;
8. Cakap melakukan perbuatan hukum;
9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan; dan
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.

Persyaratan lain untuk dapat dipilih sebagai anggota Direksi, yaitu:

1. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
3. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah, anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN dan/atau perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
4. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi; atau
5. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

Tahapan nominasi hingga pengangkatan Direksi dapat disampaikan di bawah ini:

1. Penjaringan Bakal Calon Direksi oleh DJKN;
2. Penilaian Akhir Bakal Calon Direksi oleh Tim UKK;
3. Pengajuan Calon Direksi kepada oleh Tim Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK);
4. Proses Persetujuan Calon Direksi oleh Menteri selaku RUPS; dan
5. Penetapan dan Pengangkatan Direksi oleh Menteri selaku RUPS.

Tahapan nominasi bagi bakal calon Direksi dimulai dengan penyampaian pemberitahuan oleh Dewan Komisaris kepada Direktur Jenderal mengenai anggota Direksi yang masa jabatannya akan habis/selesai. Kemudian, terdapat tahapan Uji Kelayakan dan Keputusan ("UKK") yang terdiri dari penjaringan Bakal Calon oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

The regulation also includes criteria for candidates of the Board of Directors, as follows:

1. Have an understanding of management and corporate governance;
2. Have the ability to formulate and implement strategic policies in the context of developing the Company;
3. Have the ability to develop the Company;
4. Have adequate expertise and knowledge in the field that will be their responsibility;
5. Have good leadership;
6. Good reputation as long as the person concerned carries out his previous duties;
7. Have integrity and good morals;
8. Capable of carrying out legal actions;
9. Never been declared bankrupt or a member of the Board of Commissioners/the Board of Directors found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the election; dan
10. Never been convicted of a criminal act that was detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to the election.

Other requirements for the Board of Directors's members, namely:

1. not a member of a political party, member of the legislature and/or not currently running as a candidate for member of the legislature;
2. is not the head/deputy head of the region and/or is no currently running as a candidate for the head/deputy head of the region;
3. not currently serving as an official in a central and/or regional government agency/institution, a member of the Board of Commissioners/supervisor in an SOE, a member of the Board of Directors in a SOE and/or a company, unless signing a statement that he is willing to resign from the position if elected as a member of the Board of Directors;
4. not currently holding a position which, based on the laws and regulations, is prohibited from concurrently serving as a member of the Board of Directors, except for signing a statement that he is willing to resign from the position if elected as a member of the Board of Directors; or
5. not serving as the Board of Directors Member in the Company for 2 (two) consecutive periods.

The stages of nomination until the appointment of the Board of Directors can be conveyed below:

1. Selection of the Prospective Board of Directors by DJKN
2. Final Assessment of the Prospective Board of Directors by the UKK Team
3. Submission of Candidates for the Board of Directors to the Fit and Proper Test Team (UKK)
4. Approval Process for Candidates of the Board of Directors by the Minister as the GMS
5. Determination and Appointment of the Board of Directors by the Minister as the GMS

The nomination process starts from notification of the Board of Commissioners to the Director General regarding the Board of Directors' members whose term of office will expire. Afterwards, the Fit and Proper Test (UKK) stage is carried out, which includes the selection of prospective candidates by the Director General of State Assets (DJKN) of the Ministry of Finance and the final

Kementerian Keuangan dan tahapan penilaian akhir oleh Tim UKK. Tim UKK ini diketuai oleh Wakil Menteri Keuangan yang bertindak sebagai Ketua merangkap Anggota, Direktur Jenderal sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Anggota; Direktur Kekayaan Negara bertindak sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Anggota. Dalam menjalankan tugasnya, Tim UKK dapat meminta masukan dari Dewan Komisaris dan/atau pihak lain sebagai narasumber.

Pelaksanaan tahapan penjurangan Bakal Calon ditujukan untuk memperoleh Bakal Calon Direksi. Bakal Calon Direksi Perseroan diseleksi dari:

1. Internal Perseroan, terdiri atas anggota Direksi; dan/atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa.
2. Eksternal Perseroan, dalam hal:
 - a. Dewan Komisaris tidak menyampaikan usulan bakal calon yang berasal dari internal kepada DJKN.
 - b. Dari hasil penilaian akhir oleh Tim UKK terhadap Bakal Calon dari internal Perseroan tidak diperoleh calon yang memenuhi kualifikasi.

Selanjutnya Tim UKK akan melakukan tahapan penilaian akhir yang akan mempertimbangkan berbagai faktor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Tim UKK akan mengajukan calon Direksi yang telah lolos seleksi penilaian akhir kepada Menteri melalui mekanisme RUPS. Calon Direksi akan diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri selaku RUPS.

assessment stage by the UKK Team. The UKK Team is led by the Deputy Minister of Finance as Chair and concurrently Member, Director General as Deputy Chair concurrently Member, Secretary General of the Ministry of Finance as Member; Director of State Assets as Secretary concurrently Member; and Secretary of the Directorate General of State Assets as Member. In carrying out its duties, the UKK Team may request input from the Board of Commissioners and/or other parties as resource persons.

The implementation of Candidates selection aims to obtain the prospective Board of Directors. The Prospective Board of Directors of the Company is selected from:

1. Internal Company, consisting of the Board of Directors' members; and/or officials one level below the Board of Directors or officials who have special achievements.
2. External Company, in terms of:
 - a. The Board of Commissioners did not submit internal candidate proposals to DJKN.
 - b. From the results of the final assessment by the UKK Team on Candidates from within the Company, there are no candidates who meet the qualifications.

The next stage is the final assessment by the UKK Team by considering various factors that have been regulated in the Minister of Finance Regulation. The UKK team will submit prospective the Board of Directors who have passed the final assessment selection to the Minister through the GMS mechanism. Candidates for the Board of Directors will be appointed and determined through a Ministerial Decree as GMS.



REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan memberikan remunerasi kepada Direksi dengan mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, besaran gaji dan tunjangan Direksi dirumuskan dan diajukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk dimintakan persetujuannya. Kewenangan tersebut dapat diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 sedangkan petunjuk teknis tentang kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 200/PMK.06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (PMK 200/2018”).

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Proses penentuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Direksi mengajukan usulan remunerasi Direksi kepada Dewan Komisaris beserta kajiannya.
2. Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi remunerasi melakukan kajian terkait dengan penetapan remunerasi. Kajian ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan dari pihak independen.
3. Dewan Komisaris mempelajari usulan dari Direksi dan pihak independen (jika ada) untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS.
4. RUPS melakukan kajian terhadap usulan dari Dewan Komisaris.
5. RUPS memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2022, struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan PMK 200/2018 terdiri dari:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Remuneration Structure</i>
<ul style="list-style-type: none"> › Gaji dan/atau Honorarium/Salary and/or Honorarium; › Tunjangan/Allowances; › Fasilitas/Facility; › Tantiem/Insentif Kinerja/Tantiem/Performance Incentives; dan/; and › Penghasilan Lainnya/Other Income.

Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company provides remuneration to the Board of Directors by refers to Article 96 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Meanwhile, the amount of salary and benefits of the Board of Directors is formulated and proposed by the Board of Commissioners to the GMS for approval. Authority can be given to the Board of Commissioners based on Article 96 paragraph 2 of Law No. 40 of 2007, while the technical guidelines on the regarding the remuneration policy of the Board of Commissioners and Board of Directors is further regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 200/PMK.06/2018 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance (PMK 200/2018”).

Procedures for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The mechanism for determining remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:

1. The Board of Directors submits a proposal for the remuneration of the Board of Directors to the Board of Commissioners.
2. The Board of Commissioners who carries out the nomination and remuneration functions conducts review related to the determination of remuneration. This review can be conducted by asking for assistance from an independent party.
3. The Board of Commissioners review the proposals from the Board of Directors and independent parties (if any) to be submitted to the GMS.
4. The GMS reviews the proposal from the Board of Commissioners.
5. The GMS shall approve and determine the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Structure and Components of Remuneration for Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2022, structure and components of remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors based on PMK 200/2018 consisted of:

Struktur Remunerasi Direksi <i>The Board of Directors' Remuneration Structure</i>
<ul style="list-style-type: none"> › Gaji dan/atau Honorarium/Salary and/or Honorarium; › Tunjangan/Allowances; › Fasilitas/Facility; › Tantiem/Insentif Kinerja/Tantiem/Performance Incentives; dan/; and › Penghasilan Lainnya/Other Income.

Pengungkapan Indikator untuk Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menentukan skema remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan berpedoman pada keputusan dari RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan yang mencakup aspek-aspek berikut ini:

1. Penghasilan tahun sebelumnya.
2. Tingkat inflasi.
3. Kinerja operasi dan keuangan Perseroan serta pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI).
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, termasuk pertimbangan atas sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
5. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya.
6. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Sesuai surat keputusan tersebut, besaran nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Uraian Description	2022	2021
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	7.086.592	6.196.415
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors	14.730.815	12.427.559
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors	21.817.407	18.623.974

Disclosure of Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In determining remuneration scheme of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Company refers to the decision of the GMS by taking into account the results of the study conducted by the Company which includes the following aspects:

1. Previous year's earnings.
2. Inflation rate.
3. The Company's operational and financial performance as well as the achievement of Key Performance Indicators (KPI).
4. The Company's financial condition and capabilities, including consideration of the Company's long-term goals and strategies.
5. Fairness with other peer companies.
6. Applicable laws and regulations.

Remuneration Transparency of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2022

In accordance with the resolution, the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the above decree is as follows:

Total Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Dasar Pengangkatan dan Profil Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat Muhammad Nahdi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/08/2019 dan diperpanjang masa tugas melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/KOM/PII/08/2022. Sekretaris Dewan Komisaris mengemban tugas pokok untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait kegiatan pengelolaan Perseroan.



SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONER

The Company has appointed a Secretary to the Board of Commissioner who serves as a liaison between the Board of Commissioners and other parties.

Basis of Appointment and Profile of the Secretary to the Board of Commissioner

In 2022, the Company has appointed Muhammad Nahdi to hold the position of Secretary to the Board of Commissioner based on the Board of Commissioners Decree No. KEP-03/KOM/PII/08/2019 and the service was extended based on the Board of Commissioners Decree No. KEP-04/KOM/PII/08/2022. The Secretary to the Board of Commissioner has the main duty to provide administrative and secretarial support to the Board of Commissioners in conducting supervisory duties and providing advice to the Board of Directors in relation to the Company management.

MUHAMMAD NAHDI

Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	48 tahun 48 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Bandung, 20 Maret 1975 Bandung, March 20, 1975
Domisili Domicile	Antapani, Bandung, Jawa Barat Antapani, Bandung, West Java

Periode Jabatan

15 Agustus 2022 s.d 14 Agustus 2025, Periode ke-2

Term of Office

August 15, 2022 to August 14, 2025, Second Period

Riwayat Pendidikan

Master (S2) of Commerce (Advanced) Program Majoring Applied Finance di Business, Economics and Law (BEL) Faculty, University of Queensland, Brisbane, Australia (2006).

Education Background

Master (S2) of Commerce (Advanced) Program Majoring Applied Finance di Business, Economics and Law (BEL) Faculty, University of Queensland, Brisbane, Australia (2006).

Riwayat Profesi

Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penilaian Usaha II/Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis II di Direktorat Penilaian Kekayaan Negara/Direktorat Penilaian, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2007-2012), Kepala Bidang Penilaian di Kantor Wilayah DJKN Riau-Sumatra Barat-Kepulauan Riau, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kepala Sub Direktorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam di Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Professional Career

Previously served as Head of Business Appraisal II/Head of Standardization Section of Business Valuation II at the Directorate of State Assets Valuation/Directorate of Appraisal, DJKN, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2007-2012), Head of Valuation Division at the Regional Office of DJKN Riau-West Sumatra-Riau Islands, DJKN, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and Head of the Sub-Directorate of Standardization of Business Appraisal and Natural Resources at the Directorate of Valuation, Directorate General of State Assets (DJKN), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Rangkap Jabatan

Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) (2017-sekarang).

Concurrent Positions

Currently, he also serves as a Member of the Indonesian Assessment Standards Organizer Committee (KPSPI) (2017-present).

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Secara garis besar, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris;
3. Mengoordinasi tugas-tugas administratif, kesekretariatan dan protokoler Dewan Komisaris;
4. Mengoordinasi dan tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
5. Mengoordinasi penyusunan rancangan anggaran dan menyampaikan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;
6. Mengoordinasi penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham; dan
7. Mengoordinasi dan tindak lanjut atas tugas lain yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite di bawah Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Perseroan memberikan kesempatan Sekretaris Dewan Komisaris untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

Kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 tersaji pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sebagian dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Berikut rincian program kerja Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2022:

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioner

In general, duties of the Secretary to the Board of Commissioner are as follows:

1. Assisting the Board of Commissioners in preparing minutes of the Board of Commissioners' meeting;
2. Coordinating the implementation of Board of Commissioners' meetings
3. Coordinating the administrative, secretarial and protocol duties of the Board of Commissioners;
4. Coordinating and following up on requests and/ or collection of data/information from and/or to the Company's management and external parties that are not covered by the duties of the Committee, including information on regulations and provisions relevant to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
5. Coordinating the preparation of the draft budget and submit the Annual Budget of the Board of Commissioners;
6. Coordinating the preparation of suggestions and opinions regarding the agenda and material of the General Meeting of Shareholders; and
7. Coordinating and following-up on other duties that are not included in the duties of the Committee under the Board of Commissioners.

Competency Development Program for the Secretary to the Board of Commissioner

The Company provides the opportunity for the Secretary to the Board of Commissioner to participate in competency improvement programs to improve their insights and knowledge that support the implementation of the duties of the Secretary to the Board of Commissioner to always be relevant to the latest developments in the Company's business activities.

The competency improvement activities participated by the Secretary to the Board of Commissioner throughout 2022 is presented in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Duties Implementation Report of the Secretary to the Board of Commissioner in 2022

Throughout 2022, the Secretary to the Board of Commissioner has carried out activities as part of the implementation of his duties and responsibilities. The following are details of the work program of the Secretary to the Board of Commissioner in 2022:



Realisasi Program Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2022 Realization of the Secretary to the Board of Commissioner Work Programs in 2022

No.	Uraian Kegiatan Activity	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
Aspek Perencanaan Planning Aspect			
1	Penyusunan dan penetapan usulan RKA Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2023 Preparation and ratification of the 2023 RKA of the Secretary to the Board of Commissioner	Juli-Agustus July-August	Rancangan RAB dan RKA disusun pada bulan Agustus 2023 dan disampaikan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris No. S-40/PII/DK/0822 tanggal 30 Agustus 2022
2	Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris tahun 2023 Preparation of materials for 2023 RKA of the Board of Commissioners	Agustus August	The 2023 RAB and RKA Drafts were prepared in August 2023 and submitted to the Board of Directors through the Board of Commissioners Letter No. S-40/PII/DK/0822 on August 30, 2022
3	Penyiapan bahan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris tahun 2023 Preparation of the proposed Performance Contract (IKU) for the Board of Commissioners in 2023	Agustus-September August-September	Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris tahun 2023 dikirimkan kepada RUPS melalui surat Dewan Komisaris No. S-47/PII/DK/1022 tanggal 26 Oktober 2022 dan ditetapkan saat RUPS Persetujuan RKAP tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 The 2023 Performance Contract (IKU) Proposal Draft of the Board of Commissioners was submitted to the GMS through the Board of Commissioners Letter No. S-47/PII/DK/1022 dated October 26, 2022 and was ratified at the GMS during the Approval of the Company's 2022 RKAP on December 15, 2022
4	Penelaahan atas usulan RKAP 2023 dan/atau RJPP PT PII tahun 2023-2027 Review of the 2023 RKAP and/or RJPP 2023-2027 of IIGF	September-Oktober September-October	Sesdekam telah memberikan reviu atas penelaahan Dekom terkait masukan atas konsep RJPP 2023-2027 kepada Direksi melalui surat No. S-41/PII/DK/0922 tanggal 13 September 2022 yang telah seluruhnya diakomodasi oleh Direksi.
5	Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP 2023 dan atau RJPP tahun 2023-2027 Preparation of the Board of Commissioners' response to the GMS on the 2023 RKAP and or RJPP 2023-2027 Draft	Oktober October	Dekom juga memberikan tanggapan atas RJPP 2023-2027 kepada RUPS melalui surat no S-44//PII/DK/1022 tanggal 12 Oktober 2022 The Secretary of the Board of Commissioners has reviewed the Board of Commissioners' assessment regarding the concept of 2023-2027 RJPP to the Board of Directors through letter No. S-44//PII/DK/1022 dater Oktober 12, 2022
Aspek Pengawasan Supervisory Aspect			
6	Pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris Organization internal meetings of the Board of Commissioners	Bulanan Monthly	Selama periode tahun 2022 telah dilaksanakan rapat rutin Dewan Komisaris sebanyak 13 kali During the 2022 period, 13 regular meetings of the Board of Commissioners
7	Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi Organization joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors	Bulanan Monthly	Selama periode tahun 2022 telah dilaksanakan rapat rutin gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 15 kali During the 2022 period 15 joint-meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors have been held
8	Penelaahan atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaanya Evaluation of quality and service policies as well as the implementation	Agustus August	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi held each month during the joint-meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors
9	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP Evaluation on the implementation of RKAP	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan per semester dan laporan pelaksanaan pengawasan RKAP telah dikirim Dewan Komisaris kepada RUPS Held each semester and the RKAP supervisory report has been submitted by Board of Commissioners to GMS

No.	Uraian Kegiatan Activity	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
10	Evaluasi atas kegiatan CSR Evaluation on CSR activities	Semesteran Every Semester	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Held each month during the internal meetings of the Board of Commissioners and joint-meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors
11	Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute Monitoring on IIGF Institute activities	Mei May	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Held each month during the internal meetings of the Board of Commissioners and joint-meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors
12	Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Review related to transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners/GMS	Sesuai disposi Based on disposition	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris Held each month during the internal meetings of the Board of Commissioners
13	Monitoring atas proyek yang telah dijamin Monitoring on guaranteed projects	Sesuai jadwal divisi monitoring Based on the schedule of monitoring division	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Held each month during the internal meetings of the Board of Commissioners and joint-meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
14	Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Preparation of the duty and responsibility implementation report of the Board of Commissioners	Triwulanan Quarterly	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dikirimkan ke RUPS per periode triwulan tahun 2022 The duty and responsibility implementation reports of the Board of Commissioners have been submitted to the GMS in every quarter of 2022
15	Penyusunan laporan pengawasan RKAP Preparation of RKAP supervision report	Semesteran Every Semester	Laporan pengawasan RKAP telah dikirimkan ke RUPS per periode semesteran The RKAP supervision reports have been submitted to the GMS in every semester
16	Penyusunan laporan realisasi IKU Preparation of IKU realization report	Triwulanan Quarterly	Laporan realisasi IKU telah dikirimkan ke RUPS per periode triwulanan The iKU realization reports have been submitted to the GMS in every quarter
17	Monitoring atas proyek yang telah dijamin Monitoring on guaranteed projects	Bulanan Monthly	Monitoring atas proyek yang telah dijamin dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Monitoring on guaranteed project is held each month during the internal meeting of the Board of Commissioners and joint-meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors
18	Penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris Preparation of activity report of the Board of Commissioners Secretariat	Triwulanan Quarterly	Laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris dilaksanakan per triwulanan Activity report of the Board of Commissioners Secretariat is prepared in every quarter
19	Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan 2021 Submission of the 2021 Annual Report	April	Tanggapan atas Laporan Tahunan 2021 disampaikan sesuai jadwal Response on the 2021 Annual Report has been submitted on schedule



No.	Uraian Kegiatan Activity	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
Aspek Penerapan GCG GCG Implementation Aspect			
20	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOl GCG rekomendasi BPKP tahun 2021 Monitoring the follow up implementation of GCG AOl recommended by BPKP in 2021	Januari January	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOl GCG rekomendasi BPKP Tahun 2021 dilaksanakan per semester sepanjang tahun 2022. Seluruh AOl Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti sampai dengan Desember tahun 2022 Monitoring the follow up implementation of GCG AOl recommended by BPKP in 2021 was conducted every semester throughout 2022. All of the Board of Commissioners' AOl's have been followed up until December 2022
21	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG tahun 2022 oleh BPKP assessment on the implementation of GCG in 2022 by BPKP	Januari January	Penilaian penerapan GCG tahun 2022 oleh BPKP telah selesai dilaksanakan berdasarkan berita pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2022 oleh BPKP acara <i>exit meeting assessment</i> atas penerapan GCG PT PII tahun 2022 dengan nilai skor keseluruhan adalah 88,17 Assessment on the implementation of GCG in 2022 by BPKP has been conducted based on the assessment report on the implementation of GCG in 2022 by BPKP on the exit meeting assessment on the implementation of GCG at IIGF in 2022 with overall score of 88.17
22	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOl GCG rekomendasi BPKP Tahun 2021 Monitoring the follow up implementation of GCG AOl recommended by BPKP in 2021	Semesteran Every Semester	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOl GCG rekomendasi BPKP tahun 2022 dilaksanakan sesuai jadwal Monitoring the follow up implementation of GCG AOl recommended by BPKP in 2022 was conducted based on schedule
23	Pengadaan Penilai GCG tahun 2022 Procurement of GCG Assessor in 2022	November	Dilaksanakan sesuai jadwal Based on schedule
Aspek Lainnya Other Aspects			
24	Pembaharuan <i>Board Manual</i> Updating Board Manual	Oktober-Desember October-December	Reviu pembaharuan <i>board manual</i> & pedoman Dewan Komisaris dilaksanakan bulan Oktober-Desember Review on the update of board manual & Board of Commissioners guidelines is held on October-December
25	Pembahasan draf Annual Report tahun 2022 Discussion on 2022 Annual Report draft	Februari-Maret February-March	Draf <i>Annual Report</i> tahun 2022 dilaksanakan pembahasan bulan Maret-Mei Discussion on the 2022 Annual Report draft was conducted in March-May
26	Peningkatan kompetensi Sesdekom dan Staf Sesdekom Improvement on the competency of the Secretary of the Board of Commissioners and its Staffs	Sesuai jadwal Based on schedule	Sepanjang tahun 2022, pelatihan dan seminar yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris di dalam negeri dihadiri secara virtual Throughout 2022, the trainings and seminars attended by the Secretary to the Board of Commissioner within the country were attended virtually

KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris Perseroan membentuk Komite Audit untuk membantu memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan Komite Audit

Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit memiliki masa jabatan yang tidak lebih dari masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Sementara itu, masa jabatan anggota Komite Audit yang tidak merangkap jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu kali periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan Keanggotaan Komite Audit 2022

Pada tahun 2022, Komite Audit Perseroan beranggotakan 3 (tiga) orang anggota yang salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Ketua Komite Audit juga menjabat anggota Dewan Komisaris pada tahun buku.

Berikut susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2022:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Position Period
Mariatul Aini	Ketua Komite Audit/ Komisaris Head of Audit Committee/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/04/2020 tanggal 28 April 2020 Decree of the Board of Commissioners No. KEP-03/KOM/PII/04/dated April 28, 2020	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners	
Marsiyati	Anggota Komite Audit/Pihak Independen Member of the Audit Committee/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/KOM/PII/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 Decree of the Board of Commissioners No. KEP-05/KOM/PII/06/2020 dated June 17, 2020	17 Juni 2020-16 Juni 2023 June 17, 2020-June 16, 2023	Ke-1 First
Ferry Irawan	Anggota Komite Audit/Pihak Independen Member of the Audit Committee/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/KOM/PII/09/2022 tanggal 1 Oktober 2022 Decree of the Board of Commissioners No. KEP-06/KOM/PII/09/2022 dated October 1, 2022	1 Oktober 2022-30 September 2025 October 1, 2022-September 30, 2025	Ke-1 First

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is established by the Board of Commissioners of the Company to assist in ensuring the effectiveness of the implementation of the duties and to supervise the Board of Commissioners on matters related to financial reports, internal control systems, implementation of internal and external audit functions, as well as compliance with applicable laws and regulations.

Term of Office of the Audit Committee

Members of the Board of Commissioners who concurrently serves as a member of the Audit Committee shall have a term of office not exceeding the term of office of their appointment as a member of the Board of Commissioners as determined by the General Meeting of Shareholders.

Meanwhile, the term of office of Audit Committee members who do not concurrently serves as a member of the Board of Commissioners is set at a maximum of 3 (three) years and can be extended for one more period, without prejudice to the rights of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Membership of the Audit Committee in 2022

In 2022, the Audit Committee of IIGF is consisted of 3 (three) members, one of them acts as Chairman of the Audit Committee. The Chairman of the Audit Committee is also a member of the Board of Commissioners in the fiscal year.

The following is the composition of the Audit Committee as of December 31, 2022:



Profil dari masing-masing anggota Komite Audit dijabarkan berikut ini:

MARIATUL AINI

Ketua Komite Audit/Komisaris

Profil Mariatul Aini sebagai Ketua Komite Audit disajikan pada bagian profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.



Profile of each member of the Audit Committee can be seen below:

MARIATUL AINI

Head of the Audit Committee/Commissioner

Profile of the Head of the Audit Committee, Mariatul Aini, can be seen in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report.

MARSIYATI

Anggota Komite Audit/Pihak Independen Member of Audit Committee/Independent Party

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	47 tahun 47 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Bogor, 24 Juni 1976 Bogor, June 24, 1976
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia

Periode Jabatan

17 Juni 2020 s.d. 16 Juni 2023, Periode ke-1

Riwayat Pendidikan

Magister (S2) bidang Administrasi Publik dari Institut STIAM I (2010).

Riwayat Profesi

Beliau memiliki pengalaman luas di bidang pengawasan dan pembinaan pada *Special Mission Vehicle* di bawah Kementerian Keuangan, bidang analisis investasi Pemerintah, bidang penerapan *risk management* serta manajemen kinerja.

Rangkap Jabatan

Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Term of Office

June 17, 2020 to June 16, 2023, First Periode

Education Background

Master (S2) degree in Public Administration from STIAM I Institute (2010).

Professional Career

She has extensive experience in supervision and development of Special Mission Vehicles under the Ministry of Finance, in the field of Government investment analysis, risk management as well as performance management.

Concurrent Positions

Currently, serves as Section Head of the Directorate of State Assets, the Ministry of Finance.



FERRY IRAWAN

**Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Audit Committee/Independent Party**

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	47 tahun 47 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Depok, 2 Februari 1975 Depok, February 2, 1975
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia

Periode Jabatan

1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2025, Periode ke-1

Term of Office

October 1, 2022 to September 30, 2025, First Period

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan (2000), Magister (S2) (2004) dan Doktor (S3) (2006) bidang Ekonomi Moneter, keduanya diraih dari Universitas Indonesia.

Education Background

Bachelor (S1) in Economics majoring in Financial Management (2000), Master (S2) (2004) and Doctorate (S3) (2006) in Monetary Economics, both achieved from the University of Indonesia.

Riwayat Profesi

Pernah bertugas di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan menangani beberapa isu antara lain Analisis Fiskal, Analisis Moneter, dan Lembaga Keuangan/Neraca Pembayaran juga pernah bertugas pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal yang menangani isu-isu risiko fiskal serta pengelolaannya. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pengajar di Program Pascasarjana/Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Professional Career

He has served at the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance and handled several issues including Fiscal Analysis, Monetary Analysis, and Financial Institutions/Balance of Payments and has also served at the Fiscal Risk Management Center which handles fiscal risk issues and their management. In addition, he is also one of the lecturers at the Postgraduate Program/Master Program in Public Policy Planning, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia.

Rangkap Jabatan

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Concurrent Positions

Expert Staff of Regional Development

Pedoman Kerja Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite Audit yang disusun mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Audit Committee Work Guidelines

The Audit Committee carries out its duties based on the Audit Committee Charter prepared in reference to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation No. 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises, as well as Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Company Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Tujuan pembentukan Komite Audit semata-mata untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, terutama untuk memastikan bahwa Perseroan telah dikelola secara efektif dan efisien oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai maksud dan tujuan pendirian Perseroan sehingga dapat diperoleh hasil dan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lain Perseroan.

The objective of establishing the Audit Committee is solely to support the implementation of the supervisory function by the Board of Commissioners, especially to ensure that IIGF has been managed effectively and efficiently by the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association, and in accordance with the purpose and objectives of the Company's establishment so as to obtain sustainable results and benefits for shareholders and other stakeholders of the Company.

Pengungkapan Independensi Komite Audit

Komite Audit Perseroan menjalankan fungsi sebagai penilai independen yang membantu memastikan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal, efektivitas sistem manajemen risiko, penerapan *good corporate governance*, serta kegiatan lain

Disclosure of the Audit Committee's Independence

The Company's Audit Committee functions as an independent assessor to help ensuring the effectiveness of the implementation of the internal control system, the effectiveness of the implementation of the duties of internal and external auditors, the effectiveness of the risk management system, the implementation



yang termasuk dalam lingkup pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menjamin independensi dan integritas Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam penyampaian pelaporan. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, independensi Komite Audit juga dipastikan oleh penunjukan anggota Komite Audit yang merupakan individu profesional yang memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugasnya serta berintegritas tinggi. Anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya bertindak independen dalam pemberian saran maupun rekomendasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Komite Audit diberikan kewenangan yang sejalan dengan lingkup tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, terutama terkait kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit dimuat dalam Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*), yaitu adalah:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur pengkajian (*review*) yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit

Dalam rangka memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta terhadap penerapan rekomendasi tindak lanjut atas hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses untuk dalam penyajian pelaporan keuangan yang andal. Sehubungan dengan hal itu, Komite Audit memberikan pendapat dan saran/masukan profesional kepada Dewan Komisaris melalui sejumlah kegiatan berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

of good corporate governance, as well as other activities included in the scope of the Board of Commissioners' supervision of company's performance.

In regards to it, the Company guarantees the independence and integrity of the Audit Committee in carrying out its duties and in submitting reports. The accountability report submitted by the Audit Committee to the Board of Commissioners is a manifestation of supervisory accountability for the Company management in implementing the GCG principles.

Directly responsible to the Board of Commissioners, the independence of the Audit Committee is also ensured by the appointment of Audit Committee members who are professional individuals who have competencies that support the implementation of their duties and have high integrity. Audit Committee Members are independent parties who have no affiliated relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Company that may influence their ability to act independently in giving advice or recommendation.

Description of Duties and Responsibilities

To support the effectiveness of its duties, the Audit Committee is given authority in line with the scope of duties, obligations, and responsibilities of the Board of Commissioners according to the Company's Articles of Association, especially for activities that require the attention of the Board of Commissioners.

Provisions concerning the duties and responsibilities of the Audit Committee as stated in the Audit Committee Charter are as follows:

1. Ensuring the effectiveness of internal control system as well as the implementation of duties of external auditors and internal auditors.
2. Providing recommendations on the improvement of management control system and its implementation. Assessing the implementation of activities and audit results conducted by Internal Auditors and external editors.
3. Providing recommendations on the improvement of management control system and its implementation.
4. Ensuring there is a satisfactory review procedure for any information published by the Company.
5. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioner.

Division of Duties and Responsibilities in the Audit Committee Membership

In order to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of external auditors and internal auditors, the Audit Committee monitors and evaluates the planning and implementation of audits and the implementation of follow-up recommendations on audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the process for the presentation of reliable financial reporting. In regards to it, the Audit Committee provides professional opinions and advice to the Board of Commissioners through a number of activities related to but not limited to:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan penerapan sistem pengendalian internal.
2. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas piagam auditor internal.
3. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas rencana audit tahunan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
4. Menyusun kerangka acuan kerja (*term of reference*) bagi pengadaan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dengan standar audit yang berlaku, menilai kinerja dan kualitas hasil audit, dan mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor eksternal terganggu atau terbukti bahwa auditor eksternal tidak melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku.
6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi auditor eksternal yang dilakukan oleh Direksi.
7. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan, standar, dan pedoman akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas proses penyusunan laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah menyajikan secara wajar tentang kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta rencana jangka panjang Perseroan dengan melakukan penelaahan dan evaluasi atas laporan keuangan interim dan tahunan serta laporan manajemen periodik.
10. Melakukan penelaahan atas informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pihak lain dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
12. Melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor anggota Direksi, anggota atau organ Dewan Komisaris.
13. Melakukan pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaan kerja tim investigasi pelaporan pelanggaran, atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor anggota Direksi, anggota atau organ Dewan Komisaris.
14. Menyusun pedoman kerja Komite Audit yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris.
15. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
16. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Program Peningkatan Kompetensi

Perseroan memberikan kesempatan anggota Komite Audit untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas anggota Komite Audit agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

1. Evaluate the policies and implementation of the internal control system.
2. Review and evaluate the internal auditor's charter.
3. Review and evaluate the annual audit plan, implement and report the result of the internal audit, as well as implement follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditors.
4. Establish terms of reference for the procurement of external auditors and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external auditors to be submitted to General Meeting of Shareholders.
5. Supervise and evaluate the suitability of the audit by external auditors with applicable audit standards, assessing the performance and quality of audit result, and proposing work termination with external auditor to the Board of Commissioners if there are strong indications that the independency of external auditor is disrupted or proven that external auditor has not conducted the audit in accordance with applicable auditing standards.
6. Monitor the implementation of follow-up on findings and recommendations of external auditors, which conducted by the Board of Directors.
7. Review and evaluate the conformity of accounting policies, standards, and guidelines with generally accepted financial accounting standards.
8. Monitor and evaluate the process of preparing financial statements to ensure that the financial statements prepared by management have presented fairly regarding the Company's financial condition and its operating result in accordance with applicable financial accounting standards.
9. Monitor and evaluate the preparation and implementation of the Company's annual budget and operational plan as well as the Company's long-term plan by reviewing and evaluating interim and annual financial reports and periodic management reports.
10. Review any information published by the Company to other parties and the Company's compliance with laws and regulations.
11. Ensure there is a satisfactory review procedure for any information published by the Company.
12. Review and examine complaints relating to reported members of the Board of Directors, members or organs of the Board of Commissioners.
13. Supervise and direct the implementation of the investigation team on reporting violations, on complaints relating to the reported members of the Board of Directors, members or organs of the Board of Commissioners.
14. Prepare the work guidelines of the Audit Committee as a reference in conducting their duties and responsibilities and submit them to the Board of Commissioners to be determined through a Decision of the Board of Commissioners.
15. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and the duties of the Board of Commissioners.
16. Perform other duties given by the Board of Commissioners.

Competency Improvement Program

The Company provides opportunities for members of the Audit Committee to participate in competency improvement programs to improve their insight and knowledge that support the implementation of the duties of Audit Committee members to always be relevant to the latest developments in the Company's business activities.



Kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite Audit sepanjang tahun 2022 tersaji pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Penyelenggaraan rapat Komite Audit memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan atau sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh anggota Komite Audit yang hadir.
4. Setiap anggota Komite Audit bebas menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapa pun.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), dan keputusan rapat.
7. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 13 kali. Laporan mengenai agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut disampaikan sebagai berikut:

Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Komite Audit pada Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Date	Agenda	Daftar Kehadiran Attendance List			
			MA	AG	MAR	FI
1	14 Januari 2022 14 Januari 2022	1. Laporan pemantauan divisi IA Periode Q4 th 2021 1. IA division monitoring report of Q4 - 2021 Period	✓	✓	✓	
2	9 Februari 2022 9 Februari 2022	1. Pemantauan atas kemajuan pelaksanaan audit LK tahun 2021 oleh KAP 2. Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG tahun 2020 s.d. semester II tahun 2021 3. <i>Update progress assessment</i> GCG tahun 2021 oleh BPKP 1. Monitoring on the progress of FS 2021 audit 2. Monitoring on the follow up of the GCG AOI improvement of 2022 until semester II of 2021 3. Update of GCG 2021 assessment progress by BPKP	✓	✓	✓	
3	23 Maret 2022 23 Maret 2022	1. Pembahasan AOI GCG tahun 2021 oleh BPKP Aspek Dewan Komisaris 1. Discussion on 2021 GCG AOI by BPKP on BOC Aspect	✓	✓	✓	Belum menjabat Not yet serving
4	22 April 2022	1. Evaluasi Laporan tindak lanjut Internal Audit periode Q1 tahun 2022 2. Evaluasi pelaksanaan <i>assessment</i> GCG PT PII tahun 2021 3. Evaluasi Auditor Eksternal atas pelaksanaan audit LK tahun 2021 1. Evaluation on the Follow up Report of Internal Audit for Q1-2022 2. Evaluation on the implementation of GCG assessment on PT PII in 2021 3. External Auditor Evaluation on the implementation of FS 2021 audit	✓	✓	✓	
5	31 Mei 2022 31 May 2022	1. <i>Update</i> Realisasi & Prognosa Rencana Kerja Divisi Human Capital tahun 2022 1. Update on the Realization & Prognosis of Work Plan of the Human Capital in 2022	✓	✓	✓	
6	24 Juni 2022 24 June 2022	1. Evaluasi SOP Pengadaan 1. Evaluation of Procurement SOP	✓	✓	✓	

The competency improvement activities participated by members of the Audit Committee throughout 2022 is presented in the Company Profile chapter in this Annual Report.

The Audit Committee Meeting

Holding of the Audit Committee meetings has the following requirements as follows:

1. The Audit Committee conducts meeting at least once a month or equal to the minimum requirements for the Board of Commissioners meeting as stipulated in the Articles of Association.
2. Audit Committee meetings can only be held if attended by at least the chairman and one member.
3. The decision of the Audit Committee meeting is considered valid if it is approved by more than half of the members of the Audit Committee who attend the meeting.
4. Each member of the Audit Committee is free to express his professional opinion in the discussion of each meeting agenda without anyone's intervention.
5. The decisions of the Audit Committee meetings shall be based on deliberation for consensus.
6. Each meeting of the Audit Committee is stated in the minutes of the meeting which includes the time and place of the meeting, the agenda of the meeting, the attended participants, the topics discussed, differences of opinion (if any), and the decisions of the meeting.
7. The minutes of the meeting were signed by all members of the Audit Committee who attend the meeting and submitted in written by the Audit Committee to the Board of Commissioners.

Throughout 2022, the Company's Audit Committee has held 13 meetings. Reports on the agenda and minutes of meetings, attendance, as well as a recapitulation of the level of attendance of the Audit Committee in these meetings are presented below:

Recapitulation of Audit Committee Attendance at Audit Committee Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda	Daftar Kehadiran Attendance List			
			MA	AG	MAR	FI
7	12 Juli 2022 12 July 2022	1. Evaluasi Laporan tindak lanjut Internal Audit periode Q2 tahun 2022 1. Evaluation on Follow up Report of Internal Audit of Q2-2022 Period	✓	✓	✓	
8	26 Agustus 2022 26 August 2022	1. Telaah atas kepatuhan Direksi terhadap Anggaran Dasar terkait surat Direksi No. 361/PII/DRU/0822 perihal: Rencana Penyampaian Permintaan Persetujuan RUPS atas Usulan Program Kerja Baru di RKAP 1. Review on the BOD compliance towards the Articles of Association relating to the BOC letter No. 361/PII/DRU/0822 concerning: Plan to Submit Request for GMS Approval on the Proposal of New Work Program in the RKAP	✓	✓	✓	
9	7 September 2022	1. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 1. Accounting policy and preparation of financial statements	✓	✓	✓	
10	6 Oktober 2022 6 October 2022	1. Rencana, progres, tindak lanjut serta <i>lesson learned</i> hasil audit GRC oleh Itjen Kemenkeu 1. Plan, progress, follow up as well as lesson learned from the GRC audit results by the Itjen Kemenkeu	✓	✓	✓	
11	20 Oktober 2022 20 October 2022	1. Evaluasi tindak lanjut rekomendasi divisi Internal Audit periode Q3 tahun 2022 1. Evaluation on the Follow up to the recommendations from the Internal Audit division of Q3-2022 period	✓	Sudah tidak menjabat No longer serving	✓	✓
12	10 November 2022	1. <i>Update</i> persiapan audit LK & IKU tahun 2022 oleh Auditor PwC 1. Update on the preparation of FS & KPI audit of 2022 by PwC Auditor	✓		✓	✓
13	9 Desember 2022 9 December 2022	1. Evaluasi Rencana Kerja Divisi Human Capital sampai dengan semester II tahun 2022 & Proker tahun 2023 1. Evaluation on the Work Plan of the Human Capital Division until semester II of 2022 & Work Program of 2023	✓		✓	✓
Persentase kehadiran/Attendance percentage			100%	100%	100%	100%

Keterangan/Note: MA: Mariatul Aini | AG: Ahmad Ghufroon | MAR: Marsiyati | FI: Ferry Irawan (menjabat per 1 Oktober 2022/Appointed as of October 1, 2022)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, dengan rincian sebagai berikut:

Audit Committee Duties Implementation Report in 2022

Throughout 2022, the Company's Audit Committee has carried out various activities as part of its duties and responsibilities, with details as follows:

Realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2022

Realization of the Audit Committee Work Plan in 2022

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Schedule	Activity
Aspek Perencanaan Planning Aspect			
1	Penyusunan RKA KA Tahun 2023	Juli-Agustus July-August	Preparation of RKA KA 2023
2	Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2023	Agustus August	Preparation of material for the Board of Commissioners' RKA 2023
3	Penyiapan bahan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2023	Agustus-September August-September	Preparation of the proposed Performance Contract (IKU) for the Board of Commissioners for 2023
4	Penelaahan atas usulan RKAP dan atau RJPP PT PII Tahun 2023	September-Oktober September-October	Review of the proposed IIGF RKAP and or RJPP 2023
5	Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP dan atau RJPP Tahun 2023	Oktober October	Preparation of the BOC's responses to the GMS on the 2023 RKAP and or RJPP draft
6	Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal	Desember December	Review on Annual Audit Work Program (PKAT) of Internal Auditor
Aspek Pengawasan Supervisory Aspect			
7	Reviu atas laporan hasil Audit Internal	Triwulanan Quarterly	Review of the Internal Audit Report
8	Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal dan eksternal	Triwulanan Quarterly	Monitor the follow-up to the recommendation of internal and external audit result
9	Penyiapan usulan bahan rapat bulanan Dewan Komisaris	Bulanan Monthly	Preparation of the proposed material for the BOC Monthly Meeting



No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Schedule	Activity
10	Penelaahan atas pengaduan terkait Perseroan	Sesuai disposisi Dewan Komisaris Based on the Board of Commissioners' disposition	Review the complaints related to the Company
11	Penelaahan atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya	Februari February	Review the accounting policies and preparation of financial report and their implementation
12	Penelaahan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-uu-an dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga	November	Review the BOD's compliance to Laws and Regulations as well as Third Party Agreement
13	Evaluasi atas kegiatan CSR	Semesteran Every Semester	Evaluation of CSR Activities
14	Penelaahan atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal	Februari February	Review the policies and implementation of internal control system
15	Penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya	September	Review the procurement policies and their implementation
16	Penelaahan atas gejala penurunan kinerja	Sesuai disposisi Dewan Komisaris Based on the Board of Commissioners' disposition	Review the symptoms of decreasing performance
17	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP	Triwulanan Quarterly	Evaluate the implementation of RKAP
18	Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS	Sesuai disposisi Dewan Komisaris Based on the Board of Commissioners' disposition	Review of transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners/GMS
19	Monitoring atas proyek yang telah dijamin	Bulanan Monthly	Monitor the guaranteed projects
20	Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute	Desember December	Monitor the activities of IIGF Institute
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
21	Penelaahan atas Laporan Bulanan Manajemen ke Dewan Komisaris/Pemantauan kinerja Direksi	Bulanan Monthly	Review the Monthly Management Report to the BOC/Monitor the performance of the BOD
22	Penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulanan ke RUPS	Triwulanan Quarterly	Review the Quarterly Management Report to the GMS
23	Penelaahan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021	April	Review the Company's 2021 Annual Report
Aspek Penerapan GCG GCG Implementation Aspect			
24	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2021	Januari January	Monitoring the follow up implementation of GCG AOI recommended by BPKP in 2021
25	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2022 oleh BPKP	Januari January	assessment on the implementation of GCG in 2022 by BPKP
26	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2022	Semesteran Every Semester	Monitoring the follow up implementation of GCG AOI recommended by BPKP in 2022
Aspek Audit atas Laporan Keuangan Financial Statements Audit Aspect			
27	Pengadaan KAP untuk Audit LK Th 2023	April-Mei April-may	Procurement of KAP to Audit the 2023 Financial Statements
28	Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK tahun 2023 kepada RUPS	Juni June	Proposing the assignment of KAP to audit the 2023 Financial Statements to the GMS
29	Penelaahan rencana audit LK Tahun 2023 oleh KAP	November	Review on the audit plan of 2023 Financial Statements by KAP
30	Pemantauan atas kemajuan pelaksanaan audit LK Tahun 2022 oleh KAP	Januari-Februari January-February	Monitoring the audit progress of the 2022 Financial Statements
31	Penelaahan atas laporan hasil audit LK Tahun 2022 dari KAP	Februari February	Review on the audit report of 2022 Financial Statements from KAP

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Schedule	Activity
Aspek Lainnya Other Aspects			
32	Pembahasan draf <i>Annual Report</i> tahun 2022	Februari-Maret February-March	Discussion on 2022 Annual Report draft
33	<i>Self Assessment</i> Kinerja Komite Audit	Desember December	Self-Assessment of the Audit Committee Performance
34	Peningkatan kompetensi Anggota Komite Audit	Sesuai jadwal Based on schedule	Improve the competency of Audit Committee Members
35	Telaah atas pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris	Sesuai disposisi Dewan Komisaris Based on the Board of Commissioners' disposition	Review on the complaints received by the Board of Commissioners

Kegiatan	Activity
Triwulan I-2022	Quarter I-2022
Selama Triwulan I-IV tahun 2022, Komite Audit telah melakukan berbagai kegiatan baik berupa kegiatan internal maupun kegiatan bersama Dewan Komisaris dan koordinasi/pembahasan bersama Organ manajemen Perseroan serta Organ lain Dewan Komisaris. Kegiatan tersebut antara lain adalah:	During the Quarter I-IV of 2022, the Audit Committee has carried out internal activities with the Board of Commissioners and coordination/discussion with management Organs of the Company as well as other Organs of the Board of Commissioners. The activities are:
<ol style="list-style-type: none"> Rapat Dewan Komisaris, pembahasan Laporan Manajemen Periode Desember 2021 dan Pending Matters, tanggal 18 Januari 2022. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, pembahasan Laporan Manajemen Periode Desember 2021, tanggal 19 Januari 2022. Menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT PII dan Jamdatun, tanggal 20 Januari 2022. Mengikuti <i>Entry Meeting GCG</i> dengan BPKP, tanggal 24 Januari 2022. Menyaksikan pelantikan Direksi PT PII, tanggal 25 Januari 2022. Pembahasan IKU Individu Direksi PT PII Th 2022, tanggal 25 Januari 2022. Menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap, tanggal 31 Januari 2022. Rapat Komite Audit, pembahasan Pemantauan atas kemajuan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahun 2021 oleh KAP, Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG tahun 2020 sampai dengan semester II tahun 2021, <i>Update progress assessment</i> GCG tahun 2021 oleh BPKP, tanggal 9 Februari 2022. Pembahasan Revisi Persetujuan IKU Direksi tahun 2022 dan <i>Self-Assessment</i> GCG PT PII tahun 2021, tanggal 12 Februari 2022. Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi PT PII (Persero) Fase Pertama Tahun 2022, tanggal 14 Februari 2022. Rapat Dewan Komisaris monitoring AOI GCG PII tahun 2020 & <i>update progress Assessment</i> GCG, <i>Update</i> proses audit laporan keuangan dan IKU BOC BOD oleh PWC, persetujuan IKU Direksi tahun 2022. Perubahan struktur organisasi fase 1, <i>Highlight</i> Laporan <i>management</i> periode Januari 2022, tanggal 16 Februari 2022. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Pembahasan Laporan Manajemen Januari 2022, Pembahasan hasil <i>stakeholder engagement survey</i>, Gejala penurunan kinerja, tanggal 23 Februari 2022. 	<ol style="list-style-type: none"> Board of Commissioners meeting, discussion on Management Report of December 2021 Period and Pending Matters, on January 18, 2022. Board of Commissioners and Board of Directors meeting, discussion on Management Report of December 2021 Period, on January 19, 2022. Witnessed the signing of Partnership Contract between IIGF and Jamdatu, on January 20, 2022. Atteded GCG Entry Meeting with BPKP, on January 24, 2022. Witnessed the inauguration of IIGF's Board of Directors, on January 25, 2022. Discussion on the 2022 Individual IKU of IIGF's Board of Directors, on January 25, 2022. Witnessed the Signing of Gedebage Toll Road Concession Contract – Tasikmalaya – Cilacap, on January 31, 2022. Audit Committee Meeting, discussion on the Monitoring of audit progress of the 2021 Financial Statements by KAP, Monitoring the follow up implementation of GCG AOI of 2022 until semester II of 2021, Update progress assessment of 2021 GCG by BPKP, on February 9, 2022. Discussion on the 2022 IKU Approval Revision of the Board of Directors and the 2021 GCG Self Assessment of IIGF, on February 12, 2022. Discussion on the Changes of Organizational Structure of IIGF (Persero) First Phase of 2022, on February 14, 2022. Board of Commissioners' Meeting, monitoring of GCG AOI of IIGF in 2022 & update progress of GCG assessment, Update on financial statements audit process, and IKU BOC BOD by PWC, approval on the 2022 IKU of the Board of Directors. Changes to organizational structure phase 1, Highlight of management report of January, on February 16, 2022. Board of Commissioners and Board of Directors meeting, Discussion on Management Report of January 2022, dlscussion on stakeholder engagement survey results, signs of performance decline, on February 23, 2022.



Kegiatan	Activity
<p>13. Mengikuti <i>Clearance meeting</i> Laporan Keuangan 2021 bersama PWC, tanggal 24 Februari 2022.</p> <p>14. <i>Exit Meeting</i> Penilaian Penerapan GCG PT PII dengan BPKP, tanggal 2 Maret 2022.</p> <p>15. Rapat Dewan Komisaris <i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Februari 2022, Pembahasan surat tanggapan perubahan Struktur Organisasi, tanggal 16 Maret 2022.</p> <p>16. Rapat Komite Audit membahas AOI GCG tahun 2021, tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>17. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Pembahasan Laporan Manajemen Februari 2022, tanggal 29 Maret 2022.</p>	<p>13. Attended Clearance meeting of the 2021 Financial Statements with PWC, on February 24, 2022.</p> <p>14. Exit Meeting on the Assessment of GCG implementation of IIGF with BPKP, on March 2, 2022.</p> <p>15. Board of Commissioners Meeting, Highlight of Management Report in February 2022, Discussion on the response letter on the changes of Organizational Structure, on March 16, 2022.</p> <p>16. Audit Committee Meeting, discussion on GCG AOI of 2021, on March 23, 2022.</p> <p>17. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, Discussion on the Management Report of February 2022, on March 29, 2022.</p>
Triwulan II-2022	Quarter II-2022
<p>1. Rapat Komite Audit, pembahasan Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Internal Audit periode Triwulan I 2022, Evaluasi pelaksanaan <i>assessment</i> GCG PT PII tahun 2021, dan Evaluasi Auditor Eksternal atas pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahun 2021, tanggal 22 April 2022.</p> <p>2. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Pembahasan Laporan Manajemen dan Gejala Penurunan Kinerja Maret 2022 serta update SPAM Bandar Lampung, tanggal 25 April 2022.</p> <p>3. Mengikuti Town Hall Meeting "PT PII Semangat Kembali Fitri", tanggal 19 Mei 2022. Rapat Teknis Organ Dekom, pembahasan AOI GCG, tanggal 20 Mei 2022.</p> <p>4. Rapat Dewan Komisaris pembahasan Laporan Manajemen dan Gejala Penurunan Kinerja April 2022, tanggal 25 Mei 2022.</p> <p>5. Dewan Komisaris dan Direksi pembahasan Laporan Manajemen dan Gejala Penurunan Kinerja April 2022, tanggal 27 Mei 2022.</p> <p>6. Site Visit Dewan Komisaris dan Direksi, proyek jalan tol Solo,-Jogjakarta- Kulonprogo dan jalan tol Jogja-Bawen, tanggal 28 Mei 2022.</p> <p>7. Rapat Komite Audit, pembahasan update Realisasi & Prognosa Rencana Kerja Divisi Human Capital Tahun 2022, tanggal 31 Mei 2022.</p> <p>8. Rapat Teknis Organ Dewan Komisaris, Penelaahan Laporan Tahunan PT PII Tahun 2021, tanggal 2 Juni 2022.</p> <p>9. Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2022 bersama BPKP, tanggal 14 Juni 2022.</p> <p>10. Mengikuti Gladi Resik RUPS Tahunan 2021, tanggal 17 Juni 2022.</p> <p>11. Rapat Teknis Organ Dewan Komisaris, pembahasan rencana usulan revisi RKAP tahun 2022, tanggal 18 Juni 2022.</p> <p>12. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021, tanggal 20 Juni 2022.</p> <p>13. Rapat Dewan Komisaris pembahasan Laporan Manajemen dan Gejala Penurunan Kinerja Mei 2022, tanggal 21 Juni 2022.</p> <p>14. Rapat Komite Audit, pembahasan SOP Pengadaan, tanggal 24 Juni 2022.</p> <p>15. Mengikuti Rakor teknis pengawasan intern peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di Lingkungan BUMN, tanggal 28 Juni 2022.</p> <p>16. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pembahasan Laporan Manajemen dan Gejala Penurunan Kinerja Mei 2022, tanggal 29 Juni 2022.</p>	<p>1. Audit Committee Meeting, discussion on the Evaluation of Internal Audit Follow Up Report of Quarter I-2022, Evaluation on the implementation of GCG assessment of IIGF in 2021, and Evaluation of External Auditor on the audit of 2021 Financial Statements on April 22, 2022.</p> <p>2. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, discussion on Management Report and Signs of Performance Decline as of March 2022 as well as update of SPAM Bandar Lampung, on April 25, 2022.</p> <p>3. Attended Town Hall Meeting "IIGF Semangat Kembali Fitri", on May 19, 2022. Technical Meeting of BOC Organ, discussion on GCG AOI, on May 20, 2022.</p> <p>4. Board of Commissioners Meeting, discussion on Management Report and Signs of Performance Decline as of April 2022, on May 25, 2022.</p> <p>5. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, discussion on Management Report and Signs of Performance Decline as of April 2022, on May 27, 2022.</p> <p>6. Site Visit of the Board of Commissioners and Board of Directors to Solo-Jogjakarta-Kulonprogo toll road and Jogja-Bawen toll road projects, on May 28, 2022.</p> <p>7. Audit Committee Meeting, discussion on the update of Realization & Prognosis of the Human Capital Division 2022 Work Plan, on May 31, 2022.</p> <p>8. Technical Meeting of BOC Organ, Review on IIGF's 2021 Annual Report, on June 2, 2022.</p> <p>9. Attended the National Coordination Meeting of Internal Audit in 2022 with BPKP, on June 14, 2022.</p> <p>10. Attended the Rehearsal of the 2021 Annual GMS, on June 17, 2022.</p> <p>11. Technical Meeting of BOC Organ, discussion on the plan to propose RKAP revision in 2022, on June 18, 2022.</p> <p>12. Attended the Annual General Meeting of Shareholders of 2021 Fiscal Year, on June 20, 2022.</p> <p>13. Board of Commissioners Meeting, discussion on Management Report and Signs of Performance Decline as of May 2022, on June 21, 2022.</p> <p>14. Audit Committee Meeting, discussion of Procurement SOP, on June 24, 2022.</p> <p>15. Attended the technical coordination meeting of internal audit on increasing the use of domestic products (P3DN) in the environment of SOEs, on June 28, 2022.</p> <p>16. Board of Commissioners Meeting, discussion on Management Report and Signs of Performance Decline as of May 2022, on June 29, 2022.</p>

Kegiatan	Activity
Triwulan III-2022	Quarter III-2022
<ol style="list-style-type: none"> Rapat Komite Audit, pembahasan Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Internal Audit periode Triwulan II Tahun 2022, tanggal 12 Juli 2022. Rapat anggota Komite Audit pembahasan AOI GCG s.d. Semester I 2022, evaluasi pelaksanaan CSR s.d. Semester I Tahun 2022 dan <i>update progress</i> penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan, tanggal 16 Juli 2022. Mengikuti <i>Company Gathering</i> PT PII, tanggal 22 s.d. 24 Juli 2022. Rapat Dewan Komisaris pembahasan Laporan Manajemen dan Gejala Penurunan Kinerja Juni 2022, tanggal 25 Mei 2022, penyampaian <i>update</i> hasil pembahasan rapat teknis AOI GCG dan evaluasi pelaksanaan CSR s.d. Semester I 2022, tanggal 26 Juli 2022. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Pembahasan Laporan Manajemen dan Gejala Penurunan Kinerja Juni 2022, tanggal 28 Juli 2022. Rapat anggota Komite Audit pembahasan <i>progress</i> Rencana Jangka Panjang Perseroan, tanggal 29 Juli 2022. Rapat anggota Komite Audit pembahasan <i>progress</i> Rencana Jangka Panjang Perseroan, tanggal 5 Agustus 2022. Rapat Komite Audit bersama Direksi, pembahasan Pemutakhiran Kajian Penambahan PMN PT PII Tahun 2022, tanggal 9 Agustus 2022. Rapat Komite Audit bersama Direksi, Pembahasan surat Direksi terkait Rencana Penyampaian Permintaan Persetujuan RUPS atas Usulan Program Kerja Baru di luar RKAP Tahun Buku 2022, tanggal 10 Agustus 2022. Rapat anggota Komite Audit, pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) PT PII Semester I 2022, tanggal 15 Agustus 2022. Rapat Komite Audit, pembahasan penelaahan atas kepatuhan Direksi terhadap Anggaran Dasar, tanggal 26 Agustus 2022. Rapat Dewan Komisaris pembahasan Laporan Manajemen Juli 2022 dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2023, tanggal 29 Agustus 2022. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pembahasan Laporan Manajemen Juli 2022, tanggal 30 Agustus 2022. Rapat Komite Audit, pembahasan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, tanggal 7 September 2022. Rapat Teknis anggota Komite Audit, pembahasan surat Direksi atas Penyampaian Rancangan RJPP PT PII Tahun 2023-2027, tanggal 10 September 2022. Rapat Dewan Komisaris pembahasan surat tanggapan atas Penyampaian Rancangan RJPP PT PII Tahun 2023-2027, tanggal 12 September 2022. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pembahasan Penyampaian Rancangan RJPP PT PII Tahun 2023-2027, tanggal 14 September 2022. Rapat Dewan Komisaris pembahasan Laporan Manajemen Agustus 2022, tanggal 21 September 2022. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pembahasan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan, laporan Manajemen periode Agustus 2022, serta site visit proyek jembatan Batam-Bintan, tanggal 23 sd. 25 September 2022. 	<ol style="list-style-type: none"> Audit Committee Meeting, discussion on the Evaluation of Internal Audit Follow Up Report of Quarter II-2022, on July 12, 2022. Audit Committee Meeting, discussion on GCG AOI until Semester I of 2022, evaluation on the implementation of CSR until Semester I of 2022 and update on the preparation progress of Company Long-Term Plan, on July 16, 2022. Attended Company Gathering of IIGF, on July 22 – 24, 2022. Board of Commissioners Meeting, discussion on Management Report and Signs of Performance Decline as of June 2022, on May 25, 2022, submission of update results of GCG AOI technical meeting and evaluation of CSR implementation until Semester I- 2022, on July 26, 2022. Board of Commissioners Meeting, discussion on Management Report and Signs of Performance Decline as of April June, on July 28, 2022. Audit Committee Meeting, discussion on the progress of Company Long-Term Plan, on July 29, 2022 Audit Committee Meeting, discussion on the progress of Company Long-Term Plan, on August 5, 2022. Audit Committee Meeting with the Board of Directors, update on the Update to PMN Addition Study of IIGF of 2022, on August 9, 2022. Audit Committee Meeting with the Board of Directors, Discussion on the Board of Directors' letter regarding the Plan to Request Approval from the GMS on the New Work Plan Proposal outside the RKAP of 2022 Fiscal Year, on August 10, 2022. Audit Committee Meeting, discussion on the evaluation to the implementation of Whistleblowing System of IIGF of Semester I-222, on August 15, 2022. Audit Committee Meeting, discussion on the review to the Board of Directors' compliance with the Articles of Association, on August 26, 2022. Board of Commissioners Meeting, discussion on Management Report of July 2022 and discussion on the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of 2023, on August 29, 2022. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, discussion on Management Report of July 2022, on August 30, 2022. Audit Committee Meeting, discussion on accounting policies and preparation of financial statements, on September 7, 2022. Audit Committee Technical Meeting, discussion on the Board of Directors' letter on the Submission of RJPP Draft of IIGF of 2023-2027, on September 10, 2022. Board of Commissioners Meeting, discussion on the response letter on the Submission of RJPP Draft of IIGF of 2023-2027, on September 12, 2022. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, discussion on the Submission of RJPP Draft of IIGF of 2023-2027, on September 14, 2022. Board of Commissioners Meeting, discussion on Management Report of August 2022, on September 21, 2022. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, discussion on the approval to the Company Long-Term Plan, Management Report of August 2022, as well as site visit to Batam-Bintan bridge project, on September 23-25, 2022.



Kegiatan	Activity
Triwulan IV-2022	Quarter IV-2022
<ol style="list-style-type: none"> Rapat Komite Audit, pembahasan rencana, progres, tindak lanjut serta <i>lesson learned</i> hasil audit GRC oleh Itjen Kementerian Keuangan, tanggal 6 Oktober 2022. Rapat anggota Organ Dewan Komisaris pembahasan Rancangan RKAP PT PII Tahun Buku 2023, tanggal 7-8 Oktober 2022. Rapat Dewan Komisaris, pembahasan tanggapan atas rancangan RKAP PT PII Tahun 2023, tanggal 12 Oktober 2022. Rapat Dewan Komisaris pembahasan Laporan Manajemen September 2022, tanggal 18 Oktober 2022. Rapat anggota Komite Audit pembahasan Evaluasi Tindak Lanjut rekomendasi divisi Internal Audit periode Triwulan III tahun 2022, tanggal 20 Oktober 2022. Mengikuti <i>The Joint Workshop of IIGF & IsDB Group "Delivering Social Infrastructure through PPP; Case Study of PPP Hospital Development in Turkey"</i>, tanggal 20 Oktober 2022. Mengikuti Seremonial CSR Pelatihan Kewirausahaan dan Penyerahan Bantuan bagi UMKM berbasis ex-Pekerja Konstruksi PLTU Batang, tanggal 25 Oktober 2022. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan CSR PT PII sampai dengan periode September 2022 dan Prognosa sampai dengan akhir tahun 2022, tanggal 25 Oktober 2022. Mengikuti seremoni Renovasi PAUD sebagai Dukungan Pembelajaran Tatap Muka, tanggal 28 Oktober 2022. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pembahasan Persetujuan RKAP periode Tahun 2023 & <i>Highlight</i> Laporan Manajemen Periode September 2022, tanggal 28 Oktober 2022. Rapat Komite Audit pembahasan update persiapan audit Laporan Keuangan & IKU Tahun 2022 oleh Auditor PwC, 10 November 2022. Mengikuti <i>kick of meeting</i> Audit Laporan Keuangan tahun buku 2022 PT PII [Persero] dengan PwC, tanggal 24 November 2022. Rapat Dewan Komisaris pembahasan Laporan Manajemen Oktober 2022, tanggal 24 November 2022. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pembahasan Laporan Manajemen Periode Oktober 2022, tanggal 25 November 2022. Mengikuti Webinar Forum GRC Road to Hakordia 2022, tanggal 1 Desember 2022. Dewan Komisaris bersama Direksi mengikuti gladi resik RUPS RKAP Tahun 2023 dan RUPSLB RJPP Tahun 2023-2027, tanggal 7 Desember 2022. Rapat Komite Audit pembahasan evaluasi Rencana Kerja Divisi Human Capital sampai dengan semester II tahun 2022 dan program kerja tahun 2023, tanggal 9 Desember 2022. Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan RKAP Tahun Buku 2023 & RJPP periode tahun 2023-2027, tanggal 15 Desember 2022. Rapat Dewan Komisaris pembahasan Laporan Manajemen November 2022, tanggal 21 Desember 2022. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pembahasan Laporan Manajemen Periode November 2022, tanggal 23 Desember 2022. Rapat Organ Dewan Komisaris, pembahasan Evaluasi Rencana Kerja Divisi ENS tahun 2022 dan program kerja tahun 2023, tanggal 23 Desember 2022. Menghadiri acara ulang tahun Perusahaan ke-13, tanggal 30 Desember 2022. 	<ol style="list-style-type: none"> Audit Committee Meeting, discussion on plan, progress, follow up as well as lesson learned of the GRC audit by Inspectorate General of the Ministry of Finance, on October 6, 2022. Meeting of the Board of Commissioners Organ, discussion on IIGF's RKAP Draft of 2023 Fiscal Year, on October 7-8, 2022. Board of Commissioners Meeting, discussion on the response to IIGF's RKAP Draft of 2023, on October 12, 2022. Board of Commissioners Meeting, discussion on Management Report of September 2022, on October 18, 2022. Audit Committee Meeting, discussion on the Evaluation to the Follow Up of recommendation from Internal Audit Division of Quarter III-2022, on October 20, 2022. Attended The Joint Workshop of IIGF & IsDB Group "Delivering Social Infrastructure through PPP; Case Study of PPP Hospital Development in Turkey", on October 20, 2022. Attended CSR Ceremony for Entrepreneurship Training and Distribution of Donation to MSMEs from ex-Construction Workers of PLTU Batang, on October 25, 2022. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, discussion on the evaluation of CSR activity of IIGF as of September 2022 and Prognosis as of the end of 2022, on October 25, 2022. Attended the ceremony of PAU Renovation as a Support to Face-to-Face Training, on October 28, 2022. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, discussion on the Approval to RKAP of 2023 & Highlight of Management Report of September 2022, on October 28, 2022. Audit Committee Meeting, discussion on the update of audit preparation of Financial Statements & IKU of 2022 by PwC Auditors, November 10, 2022. Attended kick off meeting on the Audit of Financial Statements of 2022 fiscal year of IIGF (Persero) with PwC, on November 24, 2022. Board of Commissioners Meeting, discussion on Management Report of October 2022, on November 24, 2022. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, discussion on Management Report of October 2022, on November 25, 2022. Attended the Webinar Forum of GRC Road to Hakordia 2022, on December 1, 2022. Board of Commissioners and Board of Directors attended rehearsal of the 2023 RKAP GMS and the 2023-2027 RJPP EGMS, on December 7, 2022. Audit Committee Meeting, discussion on the evaluation of Human Capital Division Work Plan until semester II of 2022 and the work programs of 2023, on December 9, 2022. General Meeting of Shareholders, Ratification of the 2023 Fiscal Year RKAP & 2023-2027 RJPP, on December 15, 2022. Board of Commissioners Meeting, discussion on Management Report of November 2022, on December 21, 2022. Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, discussion on Management Report of November 2022, on December 23, 2022. Board of Commissioners Organ Meeting, discussion on the Evaluation of ENS Division Work Plan of 2022 and work programs of 2023, on December 23, 2022. Attended the Company's 13th anniversary event, on December 30, 2022.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris juga dibantu Komite Pemantau Risiko yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/KOM/PII/01/2018 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko pada Perseroan tanggal 27 Januari 2018.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko memiliki masa jabatan yang tidak lebih dari masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Sementara itu, masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang tidak merangkap jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu kali periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko 2022

Pada tahun 2022, Komite Pemantau Risiko Perseroan beranggotakan 3 (tiga) orang yang mana salah satunya diangkat menjadi Ketua Komite. Ketua Komite Pemantau Risiko juga menjabat anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku.

Berikut susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 31 Desember 2022:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Wahyu Utomo	Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris Head of Risk Monitoring Committee/Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/04/2020 tanggal 28 April 2020 Board of Commissioners Decree No. KEP-03/KOM/PII/04/2020 dated April 28, 2020	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners	ke-1 First
Iqbal Islami	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Member of Risk Monitoring Committee/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/KOM/PII/01/2018 tanggal 27 Januari 2018 Board of Commissioners Decree No. KEP-01/KOM/PII/01/2018 dated January 27, 2018	1 Februari 2021 s.d. 31 Januari 2024 February 1, 2021 to January 31, 2024	ke-2 Second
Ahmad Ghufron	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Member of Risk Monitoring Committee/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/KOM/PII/009/2022 tanggal 1 Oktober 2022 Board of Commissioners Decree No. KEP-05/KOM/PII/009/2022 dated October 1, 2022	1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2025 October 1, 2022 to September 30, 2025	ke-1 First

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/02/2023 tanggal 9 Februari 2023, Dewan Komisaris mengangkat Belis Siswanto sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Dengan demikian, susunan Komite Pemantau Risiko per 9 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Iqbal Islami	Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris Head of Risk Monitoring Committee/Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM/PII/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 Board of Commissioners Decree No. KEP-02/KOM/PII/02/2023 dated February 9, 2023	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as the Board of Commissioners	ke-1 First

RISK MONITORING COMMITTEE

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is also assisted by the Risk Monitoring Committee established based on the Board of Commissioners Decree No. KEP-01/KOM/PII/01/2018 concerning the Establishment of the Risk Monitoring Committee at IIGF dated January 27, 2018.

Term of Office of the Risk Monitoring Committee

Members of the Board of Commissioners who concurrently serves as a member of the Risk Monitoring Committee has a term of office that does not exceed the term of office of their appointment as a member of the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders.

Meanwhile, the term of office for members of the Risk Monitoring Committee who do not concurrently serves as a member of the Board of Commissioners is set at a maximum of 3 (three) years and can be extended for one more period, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Composition of Risk Monitoring Committee Membership in 2022

In 2022, the Risk Monitoring Committee of IIGF consisted of 3 (three) members, one of which is appointed as Committee's Chairman. The Chairman of the Risk Monitoring Committee is also a member of the Company's Board of Commissioners in the fiscal year.

The following is the composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2022:



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Ahmad Ghufron	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Member of Risk Monitoring Committee/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/KOM/PII/009/2022 tanggal 1 Oktober 2022 Board of Commissioners Decree No. KEP-05/KOM/PII/009/2022 dated October 1, 2022	1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2025 October 1, 2022 to September 30, 2025	Ke-1 First
Belis Siswanto	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Member of Risk Monitoring Committee/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 Board of Commissioners Decree No. KEP-02/KOM/PII/02/2023 dated February 9, 2023	9 Februari 2023 s.d. 8 Februari 2026 February 9, 2023 to February 8, 2026	Ke-1 First

Profil dari masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dijelaskan berikut ini:

Wahyu Utomo

Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris

Profil Wahyu Utomo sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko disajikan pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan 2022 ini.

Iqbal Islami

Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen

Profil Iqbal Islami sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko disajikan pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan 2022 ini.



Periode Jabatan

1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2025, Periode ke-1

Riwayat Pendidikan

Magister (S2) bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (2009). Selain itu memiliki sertifikasi profesi, yaitu *Certified Enterprise Risk Governance* (CERG), *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP), *Certified Risk Management Professional* (CRMP), dan *Certified Strategy Execution Professional* (CSEP).

Riwayat Profesi

Selain bidang audit internal, beliau memiliki pengalaman yang luas pada bidang penerapan *risk management*, *internal control*, *governance*, manajemen kinerja, pengadaan barang dan jasa, transformasi organisasi, serta *oversight committee*. Dalam bidang akademis, beliau juga menjadi dosen paruh waktu di Politeknik Keuangan Negara STAN untuk bidang audit internal dan audit investigasi.

Rangkap Jabatan

Saat ini menjabat sebagai Inspektur VII, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Profile of each member of the Risk Monitoring Committee is presented as follows:

Wahyu Utomo

Head of Risk Monitoring Committee/Commissioner

Profile of the Chairman of the Risk Monitoring Committee, Wahyu Utomo, is presented in the section of the Board of Commissioners profile in the Company Profile chapter of this 2022 Annual Report.

Iqbal Islami

Risk Monitoring Committee/Independent Party

Profile of the Chairman of the Risk Monitoring Committee, Iqbal Islami, is presented in the section of the Board of Commissioners profile in the Company Profile chapter of this 2022 Annual Report.

AHMAD GHUFRON

Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen Risk Monitoring Committee Member/Independent Party

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	51 tahun 51 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Pekalongan, 15 April 1971 Pekalongan, April 15, 1971
Domisili Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Term of Office

October 1, 2022 to September 30, 2025, First Period.

Education Background

Masters (S2) in Accounting from the University of Indonesia (2009). In addition, he has professional certifications, namely Certified Enterprise Risk Governance (CERG), Qualified Risk Governance Professional (QRGP), Certified Risk Management Professional (CRMP), and Certified Strategy Execution Professional (CSEP).

Professional Career

In addition to internal audit, he has extensive experience in the implementation of risk management, internal control, governance, performance management, procurement of goods and services, organizational transformation, and oversight committee. In the academic field, he is also a part-time lecturer at the State Financial Polytechnic STAN for internal audit and investigative audit.

Concurrent Positions

Currently serving as Inspector VII, Inspectorate General, Ministry of Finance.



BELIS SISWANTO

**Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen
Risk Monitoring Committee Member/Independent Party**

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	52 tahun 52 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Kediri, 15 Juni 1970 Kediri, June 15, 1970
Domisili Domicile	Tangerang Selatan, Banten, Indonesia South Tangerang, Banten, Indonesia

Periode Jabatan

9 Februari 2023 s.d. 8 Februari 2026, Periode ke-1

Term of Office

February 9, 2023 to February 8, 2026, First Period

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya (1996), Magister (S2) Ilmu Administrasi, Manajemen Ekonomi Publik dari Universitas Indonesia (2003) Master of Commerce in Economics dari KEIO University (2005)

Education Background

Bachelor (S1) in Economics majoring in Accounting from Brawijaya University (1996), Master of Administrative Science, Management of Public Economy Public from University of Indonesia (2003) Master of Commerce in Economics from KEIO University (2005)

Riwayat Profesi

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, memiliki pengalaman di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1997-2022

Professional Career

He has served as Head of Regional Office Directorate General of Taxes Nusa Tenggara, has experience in the Directorate General of Taxes from 1997-2022

Rangkap Jabatan

Saat ini menjabat sebagai Inspektur I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Concurrent Positions

Currently serves as Inspector I, Inspectorate General, Ministry of Finance.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan untuk pertama kali pada tanggal 15 Maret 2018 dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/PII/KOM/03/2018 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan dan sampai dengan tahun 2022 Piagam Komite Pemantau Risiko sudah diperbaharui menjadi edisi ketiga. Pokok-pokok yang diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko antara lain adalah terkait latar belakang dan dasar pembentukan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, struktur dan persyaratan keanggotaan, rapat, pola kerja, pelaporan, serta masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

Risk Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee is guided by the Risk Monitoring Committee Charter which was established for the first time on March 15, 2018 with reference to the Board of Commissioners Decree No. KEP-03/PII/KOM/03/2018 concerning the Risk Monitoring Committee Charter of IIGF. The main points regulated in the Risk Monitoring Committee Charter include the background and basis of formation, duties, responsibilities and authorities, structure and membership requirements, meetings, work patterns, reporting, and term of office of the Risk Monitoring Committee members.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko mengemban tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perseroan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perseroan, pengendalian intern Perseroan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.
2. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perseroan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.
3. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.
4. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perseroan.
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perseroan.
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam Perseroan.

Duties and Responsibilities

The Risk Monitoring Committee carries out the duties and responsibilities to:

1. Gain an understanding of the Company's risk management which includes various risks faced by the Company, strategies, the Company's risk management system and policies, the Company's internal control, including policies, methodologies and infrastructure.
2. Evaluate various risk measurement models used by the Company and provide suggestion for further improvement.
3. Monitor the conformity of various policies and implementation of the Company's risk management.
4. Monitor various potential risks faced by the Company.
5. Evaluate the Company's various policies on the risk management.
6. Coordinate the implementation and monitor the existence and effectiveness of each component of Enterprise Risk Management (ERM) within the Company.



7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di Perseroan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Pedoman Komite Pemantau Risiko Edisi Ketiga Tahun 2022 mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, yaitu untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama terkait pemantauan dan penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan dalam kaitannya dengan penerapan manajemen risiko, serta memberikan pendapat profesional dan rekomendasi yang berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi manajemen risiko.
3. Melakukan reviu dan evaluasi atas laporan pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat oleh Perseroan.
4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan.
5. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan manajemen risiko.
6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Transparansi Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya bertindak independen dalam pemberian saran maupun rekomendasi.

Program Peningkatan Kompetensi

Perseroan memberikan kesempatan anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas anggota Komite Pemantau Risiko agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

Kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2022 tersaji pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko wajib menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sebanyak 14 kali. Laporan mengenai agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat tersebut disampaikan berikut ini:

7. Measure the effectiveness of each component of ERM that has been implemented in the Company.
8. Conduct other duties assigned by the Board of Commissioners based on the laws and regulations.

Division of Duties and Responsibilities in the Risk Monitoring Committee Membership

Third Edition of Risk Monitoring Committee Charter of 2022, regulating the duties and responsibilities of Risk Monitoring Committee, to assist the Board of Commissioners in conducting its duties and functions, especially related to monitor and evaluate the implementation of good corporate governance within the Company in relation to the implementation of risk management, as well as provide professional opinions and recommendations relating to but not limited to:

1. Evaluate the suitability between risk management policies and the implementation of these policies.
2. Monitor and evaluate the implementation of the duties of the Company's work units in charge of risk management.
3. Review and evaluate the risk management implementation report prepared by the Company.
4. Monitor the adequacy of the processes of identifying, measuring, monitoring, controlling, and risk management information system carried out by the Company.
5. Evaluate the Company's compliance with applicable laws and regulations related to risk management.
6. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Independence of Transparency of Risk Monitoring Committee Members

Risk Monitoring Committee Members are independent parties who have no affiliated relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Company that may influence their ability to act independently in giving advice or recommendation.

Competency Improvement Program

The Company provides opportunities for members of the Risk Monitoring Committee to participate in competency improvement programs to improve their knowledge and insights that support the implementation of the duties of members of the Risk Monitoring Committee to always be relevant to the latest developments in the Company's business activities.

The competency improvement activities attended by members of the Risk Monitoring Committee throughout 2022 can be seen on the Company Profile chapter in this Annual Report.

Risk Monitoring Committee Meeting

According to the Risk Monitoring Committee Charter, the Risk Monitoring Committee must hold regular meetings at least 1 (one) time in a month.

Throughout 2022, the Risk Monitoring Committee held meetings 14 times. Reports on the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the attendance level of the Risk Monitoring Committee in these meetings are presented below:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat Recapitulation of Risk Monitoring Committee Attendance at Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda	Daftar Kehadiran Attendance List			
			WU	II	FI	AG
1	11 Januari 2022 January 11, 2022	1. Laporan Risk Management periode Q4 tahun 2021 1. Risk Management Report of Q4-2021	✓	✓	✓	
2	26 Januari 2022 January 26, 2022	1. Pembahasan integrasi SOP klaim dan regres penjaminan KPBU 1. Discussion on the integration of claim and PPP guarantee regress SOP	✓	✓	✓	Belum menjabat Not yet serving
3	11 Februari 2022 February 11, 2022	1. Progres Inovasi pada tahap <i>screening</i> Penjaminan KPBU dengan divisi GAC 1. Innovation process on the screening stage of PPP Guarantee with GAC division	✓	✓	✓	
4	25 Maret 2022 March 25, 2022	1. Diskusi progress proyek KPDBU APJ Madiun 1. Discussion on the progress of KPDBU APJ project, Madiun	✓	✓	✓	
5	13 April 2022 April 13, 2022	1. Diskusi <i>Progres Final</i> Perjanjian Penjaminan atas proyek KPBU Jalan Tol Akses Patimban 2. Evaluasi kegiatan Divisi Risk Management periode Q1 tahun 2022 1. Discussion on the Final Progress of Guarantee Agreement on PPP project of Patimban Toll Road Access 2. Evaluation on the activity of Risk Management Division in Q1-2022	✓	✓	✓	
6	19 Mei 2022 May 19, 2022	1. Rapat Koordinasi SPAM Umbulan & SPAM Lampung 1. Coordination meeting on SPAM Umbulan & SPAM Lampung	✓	✓	✓	
7	16 Juni 2022 June 16, 2022	1. Portofolio Penjaminan Non KPBU dan Pemantauan Risiko Gagal Bayarnya 1. Non-PPP Guarantee Portfolio and Monitoring on the Risk of Default	✓	✓	✓	
8	8 Juli 2022 July 8, 2022	1. Evaluasi kegiatan <i>Risk Management</i> periode Q2 tahun 2022 2. Reviu Kebijakan dan Progres Teknologi Informasi sampai dengan semester 1 tahun 2022 1. Evaluation on Risk Management activities in Q2-2022 2. Review on Policy and Progress of Information Technology as of the 1 st semester of 2022	✓	✓	✓	
9	22 Agustus 2022 August 22, 2022	1. <i>Structuring</i> Penjaminan dan Persiapan <i>Signing</i> Proyek <i>Proving Ground</i> Bekasi 1. Structuring of Guarantee and Preparation for the Signing of Proving Ground Bekasi Project	✓	✓	✓	
10	20 September 2022 September 20, 2022	1. <i>Update</i> proses pembayaran klaim ke-2 Proyek SPAM Lampung 2. Progres Penjaminan untuk 2 proyek: A. Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg B. Tol JORR Elevated Cikunir Ulujami 1. Update on 2 nd claim payment to SPAM Lampung Project 2. Guarantee Progress on 2 projects: A. Kamal-Teluknaga-Rajeg Toll Road B. JORR Elevated Cikunir Ulujami Toll Road	✓	✓	✓	
11	26 Oktober 2022 October 26, 2022	1. Evaluasi Kinerja <i>Risk Management</i> periode Q3 tahun 2022 1. Evaluation on Risk Management Performance in Q3-2022	✓	✓		✓
12	10 November 2022 November 10, 2022	1. <i>Update Pipeline</i> & progres pendampingan PDF tahun 2022 & 2023 1. Update Pipeline & progress of PDF counselling of 2022 & 2023	✓	✓		✓
13	6 Desember 2022 December 6, 2022	1. Pembahasan dokumen <i>compliance checklist</i> Divisi RM 1. Discussion on compliance checklist document of MR Division	✓	✓		Sudah tidak menjabat No longer serving
14	23 Desember 2022 December 23, 2022	1. Evaluasi Rencana Kerja Divisi ENS tahun 2022 dan Proker tahun 2023 1. Evaluation on the Work Plan of ENS Division of 2022 and 2023 Work Plan	✓	✓		✓



Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 Duties Implementation Report in 2022

No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Schedule
Aspek Perencanaan Planning Aspect		
1	Penyusunan RKA KPR tahun 2023 Preparation of RKA RMC for 2023	Juli-Agustus July-August
2	Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris tahun 2023 Prepare the materials for the BOC's RKA 2023	Agustus August
3	Penyiapan bahan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris tahun 2023 Prepare the proposed Performance Contract (KPI) for the BOC for 2023 Period	Agustus-September August-September
4	Penelaahan atas usulan RKAP dan atau RJPP PT PII tahun 2023 Review of the proposed IIGF RKAP of 2023	September-Oktober September-October
5	Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP dan atau RJPP tahun 2023 Preparation of the Board of Commissioners' response to the GMS on the 2023 RKAP draft	Oktober October
Aspek Pengawasan Supervision Aspect		
6	Pelaksanaan Rapat Bulanan KPR Organization of Monthly RMC Meeting	Bulanan Monthly
7	Monitoring & evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya Monitoring & Evaluation of risk management policies and implementation	Triwulanan Quarterly
8	Pembahasan gejala penurunan kinerja Discussion on indication of performance decline	Sesuai disposisi Dewan Komisaris Based on the Board of Commissioners' disposition
9	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP untuk aspek pengelolaan risiko Evaluating the implementation of RKAP for risk management aspect	Triwulanan Quarterly
10	Pembahasan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Discussion of transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners/GMS	Sesuai disposisi Dewan Komisaris Based on the Board of Commissioners' disposition
11	Mereviu laporan manajemen bulanan dengan fokus pada aspek manajemen risiko Reviewing monthly management reports that focuses on risk management aspects	Bulanan Monthly
12	Monitoring atas proyek yang telah dijamin Monitoring of guaranteed projects	Bulanan Monthly
13	Monitoring atas kegiatan IIGF Institute Monitoring of IIGF Institute activities	Mei & Desember May & December
14	Penelaahan aspek risiko atas pemberian tanggapan (<i>response</i>) kepada Direksi/RUPS Reviewing the risk aspects of providing responses to the Board of Directors/GMS	Sesuai disposisi Dewan Komisaris Based on the Board of Commissioners' disposition
15	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan TI dan pelaksanaannya Monitoring/advising on IT policy and implementation	Maret March
16	Evaluasi atas kegiatan CSR Evaluation on CSR Activity	Juni & Desember June & December
17	Evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun dan dilaksanakan oleh Perseroan Evaluation of risk management policies and strategies developed and implemented by the Company	Juli July
18	Penelaahan kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan fokus pada aspek manajemen risiko Reviewing policies and regulations related to the Company's business activities with a focus on risk management aspects	Mei May

No.	Uraian Kegiatan <i>Description</i>	Jadwal <i>Schedule</i>
19	Penelaahan rencana kerja Divisi Manajemen Risiko tahun 2023 Reviewing the 2023 Risk Management Division's work plan	Desember December
20	Rapat dengan Divisi-Divisi terkait Aspek Risiko dari masing-masing Divisi Meetings with Divisions Related to the Risk Aspect of each Division	Triwulanan Quarterly
21	Pembahasan dengan Divisi Manajemen Risiko Discussion with the Risk Management Division	Triwulanan Quarterly
22	Penelahaan atas Laporan Manajemen Risiko Review of the Risk Management Report	Januari & Juli January & July
23	Pengawasan terhadap Implementasi Penjaminan Korporasi PEN dan skema penjaminan BUMN Supervision of the implementation of the PEN corporate guarantee and the BUMN guarantee scheme	Juli July
Aspek Pelaporan Reporting Aspect		
24	Penyusunan Laporan Triwulanan KPR Preparation of RMC Quarterly Report	Triwulanan Quarterly
Aspek Penerapan GCG GCG Implementation Aspect		
25	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP tahun 2020 Monitoring on follow up of AOI GCG recommendation of BPKP in 2020	Januari January
26	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2021 oleh BPKP Implementation of GCG assessment in 2021 by BPKP	Januari January
27	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP tahun 2021 Monitoring on follow up of AOI GCG recommendation of BPKP in 2021	Juni & Desember June & December
Aspek Lainnya Other Aspects		
28	Pembahasan draf <i>Annual Report</i> tahun 2021 Discussion of 2021 Annual Report draft	Februari-Maret February-March
29	<i>Self assessment</i> kinerja Komite Pemantau Risiko Self-Assessment of Risk Monitoring Committee's Performance	Desember December
30	Peningkatan kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko Improving the Competency of Risk Monitoring Committee Members	Sesuai jadwal Based on schedule

Uraian Kegiatan <i>Description of Activity</i>	
Triwulan I-2022	Quarter 1-2022
a. Pembahasan dengan Divisi Risk Management, Divisi Treasury, Divisi PMCM dan Divisi HCOD mengenai SoP Pembayaran Klaim yang lebih terintegrasi pada tanggal 26 Januari 2022.	a. Discussion with Risk Management Division, Treasury Division, PMCM Division and HCOD Division regarding a more integrated Claim Payment SOP on January 26, 2022.
b. Pembahasan dengan Divisi Guidance and Consultation mengenai "Scanning dan Screening Penjaminan KPBU: Overview dan Progres Inovasi" pada tanggal 11 Februari 2022.	b. Discussion with Guidance and Consultation Division regarding "Scanning and Screening of PPP Guarantee: Overview and Progress of Innovation" on February 11, 2022.
c. Pembahasan dengan Divisi CSF mengenai IKU Individual Direksi 2022 pada tanggal 12 Februari 2022 bersama dengan Organ Dekom lainnya, yaitu Sekretaris Dekom dan Komite Audit.	c. Discussion with CSF Division regarding Individual KPI of the Board of Directors of 2022 on February 12, 2022 with other BoC Organs, including the BoC Secretary and Audit Committee.
d. Pembahasan dengan Divisi Underwriting Penjaminan 3 mengenai Rencana Penjaminan Proyek KPBU Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun dan Percepatan <i>Small Scale</i> KPBU pada tanggal 25 Maret 2022.	d. Discussion with Guarantee Underwriting Division 3 regarding the Guarantee Plan of PPP Project for Street Light Equipment (APJ) of Madiun Regency and Acceleration of Small Scale PPP on March 25, 2022.
e. Pembahasan dengan Divisi Risk Management mengenai Progres Pelaksanaan Agenda Kerja Triwulan 1 pada tanggal 13 April 2022.	e. Discussion with Risk Management Division regarding the Progress of Work Program Implementation of Quarter 1 on April 13, 2022.
Triwulan II-2022/Quarter II-2022	



Uraian Kegiatan	Description of Activity
<p>a. Pembahasan dengan Direktur Eksekutif Bisnis mengenai progres Proyek KPBU Jalan Tol Akses Patimban pada tanggal 13 April 2022;</p> <p>b. Pembahasan dengan Divisi Corsec mengenai Tindak lanjut <i>Area of Improvement</i> GCG 2021 bersama dengan Komite Audit dan Sekretaris Dekom pada tanggal 28 Mei 2022;</p> <p>c. Pembahasan dengan Direksi PT PII, Direksi PT SMI dan Kemenko Perekonomian mengenai <i>update</i> Penjaminan pada Proyek SPAM Umbulan pada tanggal 19 Mei 2022;</p> <p>d. Pembahasan dengan Divisi Penjaminan Non KPBU mengenai Status dan Pemantauan Risiko Penjaminan Non KPBU pada tanggal 16 Juni 2022;</p> <p>e. Pembahasan dengan Divisi CSF mengenai Usulan Revisi RKAP 2022 bersama dengan Komite Audit dan Sekretaris Dekom pada tanggal 18 Juni 2022;</p> <p>f. Pembahasan dengan Divisi Risk Management mengenai Progres Pelaksanaan Agenda Kerja Triwulan II dan Reviu Kebijakan dan <i>Progress</i> Teknologi Informasi sampai dengan Semester I Tahun 2022 pada tanggal 8 Juli 2022.</p>	<p>a. Discussion with Executive Business Director regarding the progress of PPP Project of Patimban Toll Road Access on April 13, 2022;</p> <p>b. Discussion with Corsec Division regarding the Follow Up to GCG Area Of Improvement 2021 with Audit Committee and BoC Secretary on May 28, 2022;</p> <p>c. Discussion with IIGF's BOD, PT SMI BOD and Coordinating Ministry of Economy regarding the update of Guarantee on SPAM Umbulan Project on May 19, 2022;</p> <p>d. Discussion with Non-PPP Guarantee Division regarding the Status and Risk Monitoring of Non-PPP Guarantee on June 16, 2022;</p> <p>e. Discussion with CSF Division regarding the proposed 2022 RKAP Revision with Audit Committee and BOC Secretary on June 18, 2022;</p> <p>f. Discussion with Risk Management Division regarding the progress of Work Program Implementation of Quarter II and Review of Policy and Progress of Information Technology until Semester I of 2022 on July 8, 2022.</p>
Triwulan III-2022/Quarter III-2022	
<p>a. Reviu dan <i>Monitoring</i> Proyek KPBU, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proyek <i>Proving Ground</i> Bekasi pada tanggal 22 Agustus 2022 bersama dengan Direktur Bisnis. 2) Proyek Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg dan Proyek Jalan Tol Jalan Tol JORR Elevated Cikunir Ulujami pada tanggal 20 September 2022 bersama dengan Direktur Bisnis. <p>b. Pembahasan dengan Divisi Corsec mengenai Implementasi CSR Semester 1 pada tanggal 16 Juli 2022 dan Rapat BoC dan BoD untuk pelaksanaan Program CSR triwulan III 2022 pada tanggal 25 Oktober 2022.</p> <p>c. Pembahasan dengan Divisi Risk Management mengenai Evaluasi Pelaksanaan Agenda Kerja Triwulan III pada tanggal 26 Oktober 2022.</p>	<p>a. Review and Monitoring PPP Project, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proving Ground Bekasi Project on August 22, 2022 with the Business Director. 2. Kamal-Teluknaga-Rajeg Toll Road Project and JORR Elevated Cikunir Ulujami Toll Road Project on September 20, 2022 with the Business Director. <p>b. Discussion with Corsec Division regarding the implementation of CSR of Semester I on July 16, 2022 and BoC and BoD Meeting for the implementation of CSR Programs of quarter III-2022 on October 25, 2022.</p> <p>c. Discussion with Risk Management Division regarding the Evaluation of Work Program Implementation of Quarter III on October 26, 2022.</p>
Triwulan IV-2022/Quarter IV-2022	
<p>a. Pembahasan dengan Divisi Risk Management mengenai Evaluasi Pelaksanaan Agenda Kerja Triwulan III Tahun 2022 pada tanggal 26 Oktober 2022;</p> <p>b. Pembahasan dengan Divisi Inisiasi Bisnis mengenai <i>Update</i> Progres PDF Tahun 2022 dan 2023 serta dengan Divisi IT mengenai Reviu IT Master Plan Tahun 2022 pada tanggal 20 November 2022;</p> <p>c. Pembahasan dengan Divisi Risk Management mengenai Dokumen <i>Compliance Checklist</i> pada tanggal 6 Desember 2022;</p> <p>d. Pembahasan dengan Divisi Environmental and Social (ENS) mengenai Evaluasi Rencana Kerja Divisi ENS tahun 2022 dan Program Kerja tahun 2023 pada tanggal 23 Desember 2022;</p> <p>e. Pembahasan dengan Divisi Risk Management mengenai Evaluasi Pelaksanaan Agenda Kerja Triwulan IV tahun 2022 dan Program Kerja tahun 2023 pada tanggal 18 Januari 2023.</p>	<p>a. Discussion with Risk Management Division regarding the Evaluation of Work Program Implementation of Quarter III on October 26, 2022.</p> <p>b. Discussion with Business Initiation Division regarding PDF Progress Update of 2022 and 2023 as well as with the IT Division regarding the Review of IT Master Plan of 2022 on November 20, 2022;</p> <p>c. Discussion with Risk Management Division regarding Compliance Checklist Document on December 6, 2022;</p> <p>d. Discussion with Environmental and Social Division (ENS) regarding the Evaluation of ENS Division's Work Plan of 2022 and 2023 Work Program on December 23, 2022;</p> <p>e. Discussion with Risk Management Division regarding the Evaluation of Work Program Implementation of Quarter IV – 2022 and 2023 Work Program on January 18, 2022;</p>

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION



Hingga diterbitkannya Laporan Tahunan 2022 ini, PT PII tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM/PII/04/2020 tanggal 28 April 2020 tentang pembagian tugas Dewan Komisaris.

As of the publication of this 2022 Annual Report, IIGF has no Nomination and Remuneration Committee. However, the Nomination and Remuneration functions are carried out collectively by all members of the Board of Commissioners in accordance with the Board of Commissioners Decree No. KEP-01/KOM/PII/04/2020 dated April 28, 2020 concerning the segregation of the Board of Commissioners' duties.



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sekretaris Perusahaan

Perseroan membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan dengan tugas utama untuk menjaga citra positif Perseroan dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara Perseroan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan juga memastikan kepatuhan Perseroan dalam memenuhi aspek keterbukaan.

Pejabat Sekretaris Perusahaan dan Dasar Pengangkatan

Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan dilaksanakan oleh Divisi Corporate Secretary and Communication dan dipimpin oleh pejabat setingkat Executive Vice President. Pada tahun 2022, fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Yunan Novaris Arifidianto berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-025/DIR/HC/0821 tanggal 6 September 2021.



Corporate Secretary

The Company established the Corporate Secretary function with the main task to maintain the Company's positive image by establishing good communication and relationship between the Company, shareholders and other stakeholders. The Corporate Secretary also ensures the Company's compliance in fulfilling the disclosure aspect.

Corporate Secretary Officer and Basis of Appointment

The implementation of the Corporate Secretary function is carried out by the Corporate Secretary and Communication Division and is led by an Executive Vice President level official. In 2022, the Corporate Secretary function was held by Yunan Novaris Arifidianto based on the Board of Directors Decree No. SK-025/DIR/HC/0821 dated September 6, 2021.

YUNAN NOVARIS ARIFIDIANTO

Sekretaris Perusahaan dan Komunikasi Corporate Secretary & Communication

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	50 tahun 50 years old
Domisili Domicile	Jatikarya, Bekasi

Periode Jabatan

Menjabat sejak: 6 September 2021

Term of Office

Serving since: September 6, 2021

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1997), saat ini beliau juga sedang menjalankan program Magister (S2) Master of Business Administration di Institut Teknologi Bandung.

Education Background

Bachelor (S1) of Law from Gadjah Mada University (1997), he is also currently running a Master (S2) Master of Business Administration program at the Bandung Institute of Technology.

Riwayat Profesi

Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2013. Sebelumnya, beliau merupakan SVP Guidance and Consultation serta pernah menjabat sebagai SVP Project Legal Service, SVP Project Monitoring and Claim serta SVP Corporate Legal Service. Beliau juga berkarier di beberapa perusahaan di antaranya menjabat sebagai Senior Legal Counsel PT Pertamina (Persero) (2010-2013), Legal Manager and Corporate Secretary PT Infokom Elektrindo member of PT Media Nusantara Citra Tbk (2006-2009), Business Development PT Flash Mobile/Infokom Subsidiary Company (2006-2009), Legal Manager PT Elektrindo Nusantara (2002-2006).

Professional Career

He joined IIGF in 2013. Previously, he was SVP Guidance and Consultation and had serves as SVP Project Legal Service, SVP Project Monitoring and Claim and SVP Corporate Legal Service. He also has a career in several companies including serving as Senior Legal Counsel of PT Pertamina (Persero) (2010-2013), Legal Manager and Corporate Secretary of PT Infokom Elektrindo member of PT Media Nusantara Citra Tbk (2006-2009), Business Development of PT Flash Mobile/Infokom Subsidiary Company (2006-2009), Legal Manager of PT Elektrindo Nusantara (2002-2006).

Rangkap Jabatan

Tidak merangkap jabatan di Perseroan maupun di luar Perseroan.

Concurrent Positions

Not holding concurrent positions in the Company or outside the Company.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berperan dalam menjembatani komunikasi antara organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan *stakeholders*, hubungan kelembagaan serta kepatuhan terhadap hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

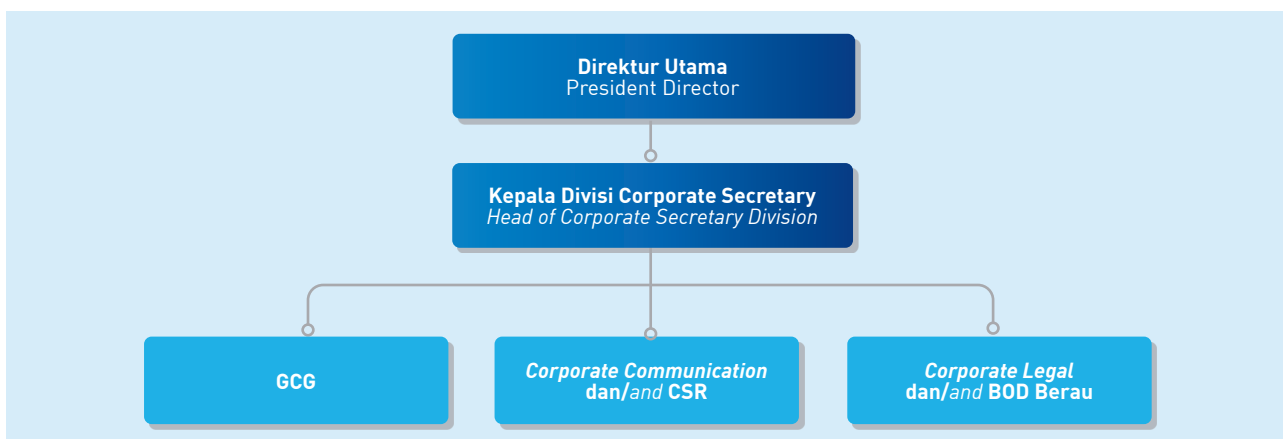
Berikut tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

1. Mengelola kegiatan kesekretariatan Perseroan termasuk mengelola dokumen Perseroan;
2. Pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penguatan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan Perseroan;
3. Penghubung antar Organ Perseroan;
4. Memastikan pelaksanaan pembinaan hubungan dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pemerintah dan non pemerintah, institusi lain, pemegang saham serta *stakeholders* lainnya;
5. Mengawasi kegiatan *corporate branding* di dalam maupun luar lingkungan kerja Perseroan;
6. Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* Perseroan;
7. Pemberian saran hukum kepada Perseroan, termasuk (i) pelaksanaan penyiapan, perumusan, dan penyelesaian peraturan, perjanjian dan kerja sama Perseroan; (ii) inventarisasi dokumentasi hukum; (iii) konsultasi dan bantuan hukum untuk kepentingan Perseroan dan karyawan di dalam maupun di luar pengadilan;
8. Memimpin proses kajian peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap bisnis Perseroan;
9. Memastikan asesmen dan mitigasi risiko telah dilakukan pada Divisi Corporate Secretary and Communication;
10. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Divisi Corporate Secretary and Communication; dan
11. Peningkatan kompetensi SDM Divisi Corporate Secretary and Communication.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan internal Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Garis tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dalam Organisasi Perseroan digambarkan sebagai berikut:



Duties and Responsibilities

The Corporate Secretary plays a role in facilitating communication between the Company's organs, relationships between the Company and stakeholders, institutional relationships and compliance with laws and good corporate governance.

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Managing the Company's secretarial activities including managing the Company's documents;
2. Monitoring and strengthening activities related to the implementation of the principles of Good Corporate Governance within the Company;
3. Serving as a liaison between the Company's Organs;
4. Ensuring the implementation of relationship building with external parties, including government and non-government institutions, other institutions, shareholders and other stakeholders;
5. Supervising corporate branding activities inside and outside the Company's work environment;
6. Coordinating the implementation of the Company's Corporate Social Responsibility activities;
7. Providing legal advice to the Company, including (i) implementation of the preparation, formulation, and completion of the Company's regulations, agreements and cooperation; (ii) inventory of legal documentation; (iii) legal advice and assistance for the benefit of the Company and its employees inside and outside the court;
8. Leading the review process of laws and regulations that affect the Company's business;
9. Ensuring that risk assessment and mitigation have been carried out in the Corporate Secretary and Communication Division;
10. Preparing and supervising the implementation of the annual budget and operational plan for the Corporate Secretary and Communication Division;
11. Improving the competency of HR within the Corporate Secretary and Communication Division.

Organizational Structure and Position of Corporate Secretary

Structurally, the Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors in accordance with the Company's internal regulations. The Corporate Secretary is directly responsible to the President Director.

The line of responsibility of the Corporate Secretary in the Company's Organization is described as follows:



Program Pengembangan Kompetensi

Perseroan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti pejabat Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Program Pelatihan Training Program	Tanggal Pelatihan Training Date	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat Pelatihan Training Venue
Yunan Novaris	Awareness Training BCMS ISO 22301:2019.	2 Juni 2022 June 2, 2022	Divisi Risk Management PT PII Risk Management Division IIGF	Online

Competency Development Program

The Company provides opportunities for the Corporate Secretary to attend various training and competency improvement programs that can support the implementation of the Corporate Secretary function. Information regarding training and competency improvement activities attended by Corporate Secretary officials throughout 2022 are as follows:

Uraian Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Pada tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Berikut rincian kegiatan Sekretaris Perusahaan pada periode tersebut:

Description of Corporate Secretary Duties in 2022

In 2022, the Corporate Secretary has carried out a number of activities that were part of the implementation of duties, responsibilities and functions of the Corporate Secretary. The following are details of the activities of the Corporate Secretary during the period:

Aktivitas/Kegiatan Activities	Keterangan Description
Pengelolaan Dokumen Perseroan Management of the Company's Documents	Kegiatan pengelolaan dokumen Perseroan yang dilakukan di tahun 2022 termasuk dokumen hukum, daftar khusus, dan dokumen korespondensi Perseroan. The Company's document management activities carried out in 2022 including legal documents, special registers, and correspondence documents of the Company.
Penyelenggaraan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Implementation of the Board of Directors' and Board of Commissioners' Meeting and General Meeting of Shareholders (GMS)	Rincian kegiatan penyelenggaraan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta RUPS di tahun 2022 adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> › Rapat Direksi sebanyak 73 kali › Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 15 kali › RUPS Laporan Tahunan Buku 2021 › RUPS Luar Biasa RJP Tahun 2023 – 2027 pada Tanggal 15 Desember 2022 › RUPS RKAP Tahun 2023 pada Tanggal 15 Desember 2022 Details of the implementation of the Board of Directors; and Board of Commissioners' Meetings and GMS in 2022 are as follows: <ul style="list-style-type: none"> › Board of Directors Meetings 73 times › Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors 15 times › AGMS of Annual Report for Financial Year 2021 › Extraordinary GMS of RJP Year 2023 - 2027 on December 15, 2022 › AGMS of RKAP Year 2023 on December 15, 2022
Kewajiban Pelaporan Reporting Obligations	<ul style="list-style-type: none"> › Penyampaian Laporan Manajemen Bulanan kepada Dewan Komisaris. › Penyampaian Laporan Realisasi RKAP Triwulanan kepada Pemegang Saham. › Penyampaian Laporan Pencapaian Indikator Kerja Individual Direksi Triwulanan kepada Dewan Komisaris. › Penyampaian Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2021 kepada para Pemegang Saham. › Penyampaian Buku Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2021 kepada Pemegang Saham dan menayangkan pada situs web Perseroan. › Submission of Monthly Management Reports to the Board of Commissioners. › Submission of Quarterly RKAP Realization Report to Shareholders. › Submission of Quarterly Board of Directors' Individual Work Indicator Achievement Reports to the Board of Commissioners. › Submission of Assessment Report on the Implementation of Good Corporate Governance for 2021 Fiscal Year to Shareholders. › Submission of the Annual Report of 2021 Fiscal Year to Shareholders and the publication in the Company's website.

Aktivitas/Kegiatan Activities	Keterangan Description
Koordinasi Kegiatan terkait penerapan GCG Coordination of Activities related to the GCG implementation	<p>Kegiatan terkait pemenuhan pemberian saran hukum kepada Perseroan yang dilakukan di tahun 2022 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Melakukan pemutakhiran atas <i>Board Manual</i> dan Kebijakan Kode Etik. › Melaksanakan fungsi Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Perseroan. › Pembaruan Pakta Integritas yang dilakukan oleh seluruh Insan Perseroan bekerja sama dengan Divisi Human Capital and Organizational Development (HCOD). › Pembaruan Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi. › Melakukan koordinasi pelaksanaan GCG Assessment Tahun Buku 2021 yang dilakukan oleh BPKP, menyampaikan hasil assessment kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris serta Direksi dan menindaklanjuti rekomendasi <i>Area of Improvement (AoI)</i>. › Melakukan evaluasi dan monitoring tindak lanjut terkait rekomendasi <i>Area of Improvement (AoI)</i>. <p>Activities related to the fulfillment of providing legal advice to the Company in 2022 include:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Updating the Board Manual and the Policy on Code of Ethics. › Implementing the function of the Gratification Control Unit within the Company. › Updating the Integrity Pact which is carried out by all employees of the Company in collaboration with the Human Capital and Human Resources Division. › Updating the Integrity Pact of the Board of Commissioners and Board of Directors. › Coordinating the implementation of GCG Assessment for Financial Year. › Year 2021 conducted by BPKP, submitting the results of the assessment to the Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors. › Assessment to Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors and follow up on Area of Improvement (AoI) recommendations. › Conducting evaluation and monitoring of follow-up related to Area of Improvement (AoI) recommendations.
Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan pemberian saran hukum kepada Perseroan Ensured the compliance with the laws and provide legal advice to the Company	<p>Kegiatan terkait pemenuhan pemberian saran hukum kepada Perseroan yang dilakukan di tahun 2022 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Kajian/Analisa terhadap peraturan perundangan yang berpengaruh terhadap Perseroan; › Pendapat hukum terhadap kondisi/isu yang dihadapi Perseroan; › Penelaahan Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerahasiaan dan Surat Keputusan Direksi; dan › Pembuatan Akta dan pengurusan perizinan Perseroan. <p>Activities related to the fulfillment of providing legal advice to the Company carried out in 2022 including:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Review/Analysis of laws and regulations that affecting the Company; › Legal opinion on conditions/issues faced by the Company; › Review of Cooperation Agreements, Memorandum of Understanding, Non-disclosure Agreement and Decree of the Board of Directors; and › Deed making and licensing of the Company.
Program meningkatkan citra Perseroan (<i>image building</i>) dan hubungan dengan <i>stakeholder</i> <i>The Company's image building program and relationship with stakeholders</i>	<p>Telah dilaksanakan kegiatan terkait komunikasi perusahaan di sepanjang tahun 2022, yaitu di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Publikasi informasi Perseroan melalui media massa dan media sosial; › Penguatan komunikasi dan relasi dengan media dan <i>stakeholders</i>; › Pengelolaan strategi komunikasi Perseroan; › Pelaksanaan kegiatan Perseroan yang melibatkan <i>stakeholders</i> guna memperkuat citra dan reputasi Perseroan; › Pelaksanaan <i>Stakeholder Survey</i>; dan › Pembaruan informasi pada <i>Website</i> Perseroan. <p>Activities related to corporate communication were carried out throughout 2022, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Company publications through mass media and social media; › Strengthening relations with the media and stakeholders; › Management of the Company's communication strategy; › Organizing Company activities with stakeholders that support the strengthening of the Company's image and reputation; › Implementation of Stakeholder Survey; and › Company Website update.
Koordinasi kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perseroan Coordination of Corporate Social Responsibility activities	<ul style="list-style-type: none"> › Divisi <i>Corporate Secretary and Communication</i> telah menyelenggarakan kegiatan CSR yang tepat sasaran sesuai agenda kegiatan CSR Perseroan untuk tahun 2022. › Division of Corporate Secretary and Communication has organized targeted CSR activities in accordance with the Company's CSR activities agenda for 2022.

Keterbukaan Informasi

Perseroan tidak memiliki kewajiban terkait dengan keterbukaan informasi kepada publik sebagaimana perusahaan yang tercatat di bursa efek. Namun demikian, Perseroan melalui *website* Perseroan telah mengungkapkan informasi penting terkait Perseroan serta menyampaikan laporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan, sebagai bentuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, sebagai bagian dari aspek transparansi Perseroan, Perseroan setiap tahun melakukan penyusunan Laporan Tahunan dengan mengacu pada kriteria *Annual Report Award (ARA)* dan secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Information Disclosure

The Company does not have obligations related to information disclosure to the public as companies listed on the stock exchange. However, the Company through the Company's website has disclosed important information related to the Company and submitted reports to regulators in accordance with the provisions applicable to the Company, as a form of implementation of good corporate governance. In addition, as part of the Company's transparency aspect, IIGF compiles an Annual Report every year that refers to the Annual Report Award (ARA) criteria and regularly participates in these activities.



FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT FUNCTION

Perseroan membentuk dan mengembangkan Fungsi Manajemen Risiko yang dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko berperan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem dan kerangka kerja manajemen risiko Perseroan serta memastikan kecukupan penerapan sistem manajemen risiko yang diterapkan di lingkungan Perseroan.

Kebijakan Manajemen Risiko

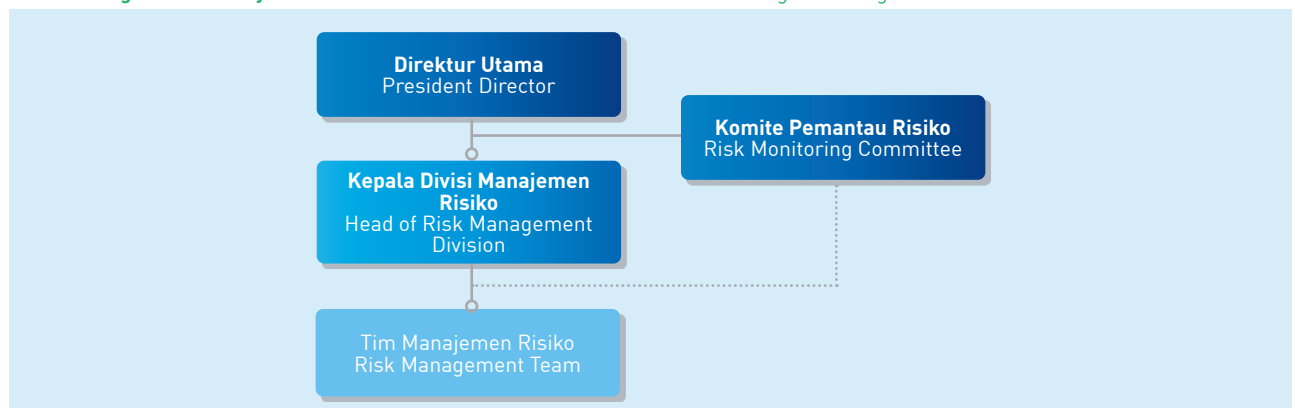
Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan merupakan pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan operasi manajemen risiko guna mencapai Sasaran Jangka Panjang Perseroan yang disusun dalam suatu Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perseroan (*Enterprise Risk Management Framework*). Dokumen Kerangka Kerja tersebut telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK/PII-BOD/0321 tanggal 4 Maret 2021. Penyusunan kerangka kerja tersebut merupakan perwujudan komitmen Perseroan dalam penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, sekaligus menjadi acuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan merumuskan langkah-langkah mitigasi terkait tantangan dan dampak terhadap ketidakpastian, serta memberikan panduan untuk penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai standar internasional ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi Manajemen Risiko dipimpin oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui proses internal.

Berikut bagan yang menggambarkan struktur organisasi Fungsi Manajemen Risiko serta hubungan komunikasi dan pelaporan setiap unsur dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya:

Struktur Organisasi Manajemen Risiko



The Company established the Risk Management Function run by the Risk Management Division. The Risk Management Division is responsible for ensuring the adequate implementation of the risk management system within the Corporate environment.

Risk Management Policy

The Risk Management Policy established by the Board of Directors of the Company is a guideline for the Company in carrying out risk management operations in order to achieve the Company's Long-Term Goals which are compiled in an Enterprise Risk Management Framework. The Framework document has been approved through Board of Directors Decree No. 003/SK/PII-BOD/0321 dated March 4, 2021. The preparation of the framework is a manifestation of the Company's commitment to implementing risk management throughout the organization in a broad and integrated manner, as well as a reference for the organization in identifying, analyzing, assessing and formulating mitigation measures related to challenges and impacts on uncertainty, as well as providing guidance for the implementation of risk management in a systematic and measurable manner in accordance with the international standard ISO 31000: 2018 Risk Management-Guidelines.

Organizational Structure and Position of Risk Management Function

The Risk Management function is led by the Head of Risk Management Division who is appointed and dismissed by the President Director through an internal process.

The following chart illustrates the organizational structure of the Risk Management Function and communication and reporting relationships for each element in carrying out their duties, responsibilities and functions:

Risk Management Organizational Structure

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab fungsionalnya, Kepala Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko untuk memperoleh masukan dan arahan dalam pelaksanaan aktivitas manajemen risiko yang dilaporkan secara berkala. Tim Manajemen Risiko bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Manajemen Risiko.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh individu dan unsur-unsur yang ada di dalam organisasi, sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan masing-masing. Tata Kelola Manajemen Risiko yang diterapkan di Perseroan mengadopsi Model 3 Lini (*Three Lines Model*) yang menunjukkan komitmen kepemimpinan yang tercermin pada setiap struktur dan proses yang ada di organisasi.

Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Perseroan:

1. Dewan Komisaris yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko.
2. Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Keuangan.
3. Divisi Manajemen Risiko yang terdiri dari Kepala Divisi Manajemen Risiko yang dibantu oleh Manager dan *Assistant Manager* Manajemen Risiko).
4. Pemilik Risiko yaitu para Kepala Divisi/*Senior Leaders* yang bertindak sebagai pengelola risiko di setiap divisi.
5. *Risk Officer* yaitu para Manager yang membantu Pemilik Risiko dan Tim di setiap divisi dalam melaksanakan proses manajemen risiko di setiap divisi dengan dukungan Tim Divisi Manajemen Risiko.
6. Seluruh Staf yang mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko di seluruh unit kerja dan divisi masing-masing.

Per tanggal 31 Desember 2022, Divisi Manajemen Risiko didukung oleh 3 (tiga) karyawan yang masing-masing mengemban fungsi-fungsi seperti yang digambarkan pada bagan di atas.

Jabatan <i>Position</i>	Jenjang Pendidikan <i>Education</i>	Jumlah Personel <i>Total Personnel</i>
Kepala Manajemen Risiko/Head of Risk Management	S1/Bachelor Degree	1
Manager Manajemen Risiko/Risk Management Manager	S2/Master Degree	1
Assistant Manager Manajemen Risiko/Risk Management Assistant Manager	S1/Bachelor Degree	1
Jumlah/Total		3

Pejabat Manajemen Risiko dan Dasar Pengangkatan

Direksi telah menunjuk Catur Priyoni untuk menduduki jabatan Kepala Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan No. SK-004/DIR/HC/0220 tanggal 14 Februari 2020.

In carrying out its duties and functional responsibilities, the Head of Risk Management Division is responsible to the President Director and coordinates with the Risk Monitoring Committee to obtain input and direction in the implementation of risk management activities which are reported periodically. The Risk Management Team is directly responsible to the Head of Risk Management Division.

Risk Management Governance Structure

The implementation of Risk Management is part of the responsibility of all individuals and elements within the organization, in accordance with their respective positions, functions and authorities. The Risk Management Governance implemented in the Company adopts the Three Lines Model, which describes leadership commitment that is reflected in every structure and process in the organization.

The Risk Management Governance Structure at IIGF is as follows:

1. Board of Commissioners supported by the Risk Monitoring Committee.
2. Board of Directors consisting of President Director, Business Director and Finance Director.
3. Risk Management Division consisting of the Head of Risk Management Division assisted by Risk Management Manager and Assistant Manager.
4. Risk Owners, namely Division Heads/*Senior Leaders* who act as risk managers in each division.
5. Risk Officers are Managers who assist the Risk Owners and Teams in each division in carrying out the risk management process in each division with the support of the Risk Management Division Team.
6. All Staff who support the implementation of the risk management process in all work units and their respective divisions.

As of December 31, 2022, the Risk Management Division was supported by 3 (three) employees who each carried out the functions as described in the chart above.

Risk Management Officer and Basis of Appointment

The Board of Directors has appointed Catur Priyoni to the position of Head of Risk Management based on Decision Letter No. SK-004/DIR/HC/0220 dated February 14, 2020.



CATUR PRIYONI

Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	50 tahun 50 years old
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Periode Jabatan

Menjabat Sejak: 14 Februari 2020

Term of Office

Serving Since: February 14, 2020

Riwayat Pendidikan

Memiliki beberapa sertifikasi profesi antara lain sertifikasi Qualified Risk Management Governance Professional (QRGP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP-MKS), Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA), Certification in Risk Management Assurance (CRMA) dari The Institute of Internal Auditors dan Indonesia Internal Audit Practitioner IAAP dari The Institute of Internal Auditors, serta Sertifikasi Praktisi dan Profesi Akuntan dari CPA Australia Indonesia Chartered Accountant (CA) dan ASEAN CPA juga Certification of Audit Committee Practices (CACP) dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).

Education Background

- › Bachelor degree (S1) in Accounting from the Faculty of Economics, University of Indonesia (1997).
- › Has several professional certifications including Practitioner and Professional Accountant Certification from CPA Australia and ASEAN CPA, Certification of Audit Committee Practices (CACP), and Certification in Risk Management Assurance (CRMA) from The Institute of Internal Auditors.
- › Registered as an Indonesian Chartered Accountant (CA) with the Indonesian Institute of Accountants (IAI).
- › Has Qualified Risk Management Governance Professional (QRGP) certification from Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Institute (LSP-MKS) and Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) from Enterprise Risk Management Academy (ERMA).

Riwayat Profesi

Bergabung dengan Perseroan sejak 1 Februari 2019 sebagai Kepala Audit Internal dan diangkat sebagai Kepala Manajemen Risiko pada 14 Februari 2020. Sebelumnya, pernah menjabat Kepala Audit Internal pada beberapa perusahaan asuransi *joint venture* yang berafiliasi internasional sebagai Kepala Audit Internal dan *Compliance Advisor* dalam waktu 8 tahun. Pada awal kariernya beliau pernah menjadi Auditor pada beberapa Akuntan Publik yang berafiliasi internasional termasuk *Big 4* selama 10 tahun.

Professional Career

He joined IIGF on February 1, 2019 as Head of Internal Audit and was appointed as Head of Risk Management on February 14, 2020. Prior to joining, he had worked as Head of Internal Audit at several internationally affiliated joint venture insurance companies as Head of Internal Audit and Compliance Advisor for 8 years. At the beginning of his career he was an Auditor at several internationally affiliated Public Accountants including *Big 4* for 10 years.

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Concurrent Positions

None

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memimpin pengembangan kerangka kerja manajemen risiko korporat (*ERM Framework*) yang diimplementasikan melalui Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko Perseroan yang terus dipelihara dan diperbaiki secara berkesinambungan (*Continuous Improvement*);
2. Mendukung proses pengambilan keputusan dalam pemberian penjaminan proyek infrastruktur, terutama dari aspek manajemen risiko Perseroan;
3. Memimpin pelaksanaan proses kajian kepatuhan terhadap peraturan perundangan, kebijakan, dan prosedur standar Perseroan yang berlaku;
4. Melaksanakan dokumentasi dan konsultasi proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh pemilik dan pengelola risiko di setiap divisi; dan
5. Menyusun laporan manajemen risiko secara periodik dan menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Duties and Responsibilities

1. Leading the development of the corporate risk management framework (*ERM Framework*) which is implemented through the Company's Risk Management Process and is continuously maintained and improved (*Continuous Improvement*);
2. Supporting the decision-making process in providing guarantees for infrastructure projects, especially from the aspect of the Company's risk management;
3. Leading the implementation of the compliance review process with applicable regulations, policies and standard procedures of the Company;
4. Carrying out documentation and consultation of risk management processes carried out by risk owners and managers in each division; and
5. Preparing and submitting periodic risk management reports to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee.

Sertifikasi Profesi

Setiap praktisi manajemen risiko di Perseroan telah memiliki sertifikasi profesi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menghadapi tuntutan perkembangan praktik manajemen risiko di industri yang dinamis. Berikut pengungkapan informasi sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan yang bertugas di Divisi Manajemen Risiko hingga akhir tahun 2022:

Professional Certificate

Every risk management practitioner in the Company has the necessary professional certification to support the implementation of their duties and responsibilities in response to the dynamic development of risk management practices in the industry. The following discloses information on professional certifications held by employees serving in the Risk Management Division until the end of 2022:

Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Sertifikasi Total Certificate
<i>Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i> Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) from Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	1
<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP-MKS)</i> Qualified Risk Governance Professional (QRGP) from Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP-MKS)	1
<i>Certification in Risk Management Assurance (CRMA) dari The Institute of Internal Auditors</i> Certification in Risk Management Assurance (CRMA) from the Institute of Internal Auditors	1
<i>Certified Risk Management Professional (CRMP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)</i> Certified Risk Management Professional (CRMP) from Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	1
<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i> Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) from Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	1
<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i> Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) from Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	1
<i>Certified Risk Management Officer (CRM0) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)</i> Certified Risk Management Officer (CRM0) from Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	1
<i>Certification of Audit Committee Practices (CACP) dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)</i> Certification of Audit Committee Practices (CACP) from Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	1
<i>Certified Practicing Accountant (CPA) dari CPA Australia</i> Certified Practicing Accountant (CPA) from CPA Australia	1
<i>ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) dari ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC)</i> ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) from ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC)	1
<i>Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)</i> Chartered Accountant (CA) from Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	1
<i>Certified PPP Professional (CP3P) Foundation Level</i> Certified PPP Professional (CP3P) Foundation Level	1
<i>Certified GRC Professional</i> dari LSP GRK Certified GRC Professional from LSP GRK	1
<i>Certified Internal Audit Executive (CIAE) BATCH VI</i> dari BPKP Certified Internal Audit Executive (CIAE) BATCH VI from BPKP	1



Program Pengembangan Kompetensi

Perseroan memberikan kesempatan kepada personel Divisi Manajemen Risiko untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi Divisi Manajemen Risiko. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti personel Divisi Manajemen Risiko sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Competency Development Program

The Company provides opportunities for Risk Management Division personnel to participate in various competency development activities that can support the implementation of Risk Management Division functions. Information on training and competency improvement activities attended by Risk Management Division personnel throughout 2022 is as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis pendidikan dan Pelatihan Type of education and Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Catur Priyoni (Kepala Divisi Manajemen Risiko) (Head of Risk Management Division)	Sharing Session PT Bursa Efek Indonesia (Pengenalan Pasar Modal & Insight Market Sektor Infrastruktur di Pasar Modal)	8 Maret 2022 March 8, 2022	Divisi Guidance and Consultation PT PII Guidance and Consultation Division of IIGF
	Sharing Session of PT Bursa Efek Indonesia (Introduction to Capital Market & Insight Market on Infrastructure Sector of Capital Market)		
	Delivering digital transformation: Challenges and Opportunities in Financial Industry	20 April 2022 April 20, 2022	ERMA
	Awareness Training BCMS ISO 22301:2019	2 Juni 2022 June 2, 2022	Divisi Risk Management PT PII Risk Management Division of IIGF
	Mobilizing Sustainable Finance and Sustainability Reporting Toward a Green Economy	7 Oktober 2022 October 7, 2022	BPKP & Monash University
	Sertifikasi CIAE BATCH VI CIAE BATCH VI Certification	10 Oktober 2022 October 10, 2022	BPKP
	Risk and Sustainability: Achieving Responsible Growth	26 Oktober 2022 October 26, 2022	ERMA
Dimar Mohammad (Manager Manajemen Risiko) (Risk Management Manager)	Risk Beyond 2022 International Conference on Enterprise Risk Management	8-9 Desember 2022 December 8-9, 2022	ERMA
	CP3P Foundation Program	10-14 Januari 2022 January 10-14, 2022	IIGF Institute
	Certified GRC Professional	27 Mei 2022 May 27, 2022	LSP-GRK
	Awareness Training BCMS ISO 22301:2019.	2 Juni 2022 June 2, 2022	Divisi Risk Management PT PII Risk Management Division of IIGF
	GRC Summit: Sailing In The Multiverse of Uncertainty	25 Agustus 2022 August 25, 2022	CRMS
	Business Continuity Management System ISO 22301	27 Agustus 2022 August 27, 2022	Udemy
Kinanti Ajeng Lestari (Assistant Manager Manajemen Risiko) (Risk Management Assistant Manager)	Financial Modelling and Forecasting Analysis Bootcamp	28 Desember 2022 December 28, 2022	Udemy
	ISO 37301:2021 Compliance Management System Training	17-18 Februari 2022 February 17-18, 2022	Chesna
	Awareness Training BCMS ISO 22301:2019.	2 Juni 2022 June 2, 2022	Divisi Risk Management PT PII Risk Management Division of IIGF
	Webinar Excel for Professional Usage	26 September 2022 September 26, 2022	Dilatih.co
Microsoft Excel – Data Visualization, Excel Charts & Graphs	31 Desember 2022 Desember 31, 2022	Udemy	

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan sejumlah aktivitas yang merupakan bagian dari tugas, tanggung jawab, dan fungsi Manajemen Risiko, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran pada Buku Acuan Alokasi Risiko Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 260/PMK.011/2010, Pasal 11;
2. Melaksanakan *review* atas Dokumen Proses Bisnis PT PII;
3. Melaksanakan verifikasi atas penilaian kepatuhan (*Compliance Check*) untuk memastikan proses penjaminan telah mengikuti prosedur internal (Pedoman/Kebijakan serta Standar Operasional Prosedur (SOP)) yang berlaku;
4. Melaksanakan verifikasi atas penilaian kepatuhan (*Compliance Check*) untuk memastikan proses penempatan dana investasi telah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PMK 95/2017 dan prosedur internal;
5. Melakukan *review* terhadap proses pengadaan barang dan jasa bahwa telah mengikuti ketentuan dan prosedur internal yang berlaku;
6. Penyusunan materi dalam kepesertaan di ajang kompetisi praktik manajemen risiko dan/atau bidang GRC di tingkat nasional maupun internasional;
7. Memfasilitasi proses identifikasi, penanganan, pemantauan dan pelaporan risiko Perseroan secara berkelanjutan dengan melibatkan *Risk Officer* dan *Risk Owner*;
8. Peningkatan atas penilaian tingkat kematangan (maturitas) penerapan Manajemen Risiko yang sesuai dengan peta jalan (*road map*) manajemen risiko korporat;
9. Pengembangan *Business Continuity Management System* (BCMS) sesuai ISO 22301:2019;
10. Penyusunan dan Pengembangan *Early Warning System* (EWS) dan *Key Risk Indicator* (KRI) Risiko Korporasi; dan
11. Implementasi dan Sertifikasi atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diadopsi dari ISO 37001:2016 sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Brief Report on the Implementation of Risk Management Duties and Responsibilities in 2022

Throughout 2022, the Risk Management Division has carried out a number of activities that were part of the duties, responsibilities, and functions of the Risk Management, namely as follows:

1. Updating the Risk Allocation Reference Book Year 2022, in accordance with Regulation of the Minister of Finance R.I. No. 260/PMK.011/2010, Article 11;
2. Carry out a review of IIGF Business Process Documents;
3. Carry out verification of compliance assessment (*Compliance Check*) to ensure that the assurance process has followed internal procedures (Guidelines/Policies and Standard Operating Operating Procedures (SOP) that apply;
4. Carry out verification of compliance assessment (*Compliance Check*) to ensure the investment fund placement process has followed the provisions of the applicable regulations, namely PMK 95/2017 and internal procedures;
5. Conducting a review of the procurement process of goods and services procurement process that has followed the applicable provisions and internal procedures; applicable regulations and internal procedures;
6. Preparation of materials for participation in competitions in the field of risk management practices and/or GRC field at the national and national and international levels;
7. Facilitating the process of identification, handling, monitoring and reporting of Company risks on an ongoing basis by involving *Risk Officer* and *Risk Owner*;
8. Improvement of the maturity level assessment of the of Risk Management implementation in accordance with the corporate risk management road map; (road map) of corporate risk management;
9. Development of *Business Continuity Management System* (BCMS) in accordance with ISO 22301:2019;
10. Preparation and Development of *Early Warning System* (EWS) and *Key Risk Indicators* (KRI) of Corporate Risk; and
11. Implementation and Certification of the Anti-Bribery Management System Bribery Management System (SMAP) adopted from ISO 37001:2016 as part of the commitment to the implementation of Corporate Governance.



MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

Mengemban fungsi sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Perseroan menghadapi perkembangan bisnis yang semakin dinamis, yaitu tidak terbatas pada penjaminan, melainkan juga pendampingan proyek yang dilaksanakan melalui skema KPBU.

Sehubungan dengan hal itu, Perseroan memperkuat penerapan manajemen risiko sebagai langkah awal mitigasi dalam menyiapkan dan melakukan penstrukturan proyek serta proses *monitoring* sepanjang berjalannya proyek. Terutama dalam menstruktur proyek infrastruktur dengan skema KPBU, Perseroan perlu menyusun Acuan Alokasi Risiko yang menjadi acuan PJKP dalam mengalokasikan risiko kepada pihak yang tepat, serta menyusun rencana mitigasi risiko dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dasar Kebijakan Pengelolaan Manajemen Risiko

Dalam rangka menyusun kebijakan manajemen risiko yang komprehensif, Perseroan mengacu pada sejumlah kebijakan terkait manajemen risiko, yaitu antara lain:

- *Operation Manual* Perseroan;
- *Enterprise Risk Management Framework* Perseroan;
- *Standard Operating Procedure (SOP) Risk Management Exercise*;
- *International Organization for Standardization (ISO) 31000:2018 Risk Management Guidelines*; dan
- *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2017, Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance*.

Secara umum, kebijakan Perseroan terkait manajemen risiko dirumuskan dengan mengacu pada Kerangka Manajemen Risiko yang mengadopsi standar ISO 31000:2018. Berdasarkan dokumen tersebut, Kerangka Manajemen Risiko Korporasi Perseroan didefinisikan sebagai berikut:

1. Pembentukan prinsip dan standar umum bagi praktik Manajemen Risiko untuk memungkinkan pemahaman umum atas Manajemen Risiko;
2. Selera dan toleransi risiko (*risk appetite and tolerance*) yang disepakati oleh manajemen dalam menentukan ukuran tingkat risiko;
3. Mengadopsi kerangka manajemen risiko yang mendefinisikan proses manajemen risiko yang diterapkan pada bisnis secara umum; dan
4. Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam implementasi Manajemen Risiko.

Kerangka ini merupakan pendekatan yang terstruktur dan konsisten untuk mengarahkan dan mempersiapkan organisasi agar dapat mengendalikan risiko dan perubahan yang dapat memengaruhi organisasi. Selain itu, Kerangka Manajemen Risiko merupakan pendekatan holistik yang diterapkan dalam pengelolaan berbagai risiko yang dihadapi Perseroan sehingga tetap selaras dengan *risk appetite* Perseroan di tengah situasi bisnis yang semakin dinamis.

Carrying out the function as a provider of contingent fiscal support for infrastructure projects with the Public Private Partnership (PPP) scheme, the Company faces increasingly dynamic business developments, which are not limited to guaranteeing, but also assisting projects implemented through the PPP scheme.

Therefore, the Company has been strengthening the implementation of risk management as an initial mitigation step in preparing and structuring the project as well as the monitoring process throughout the project. Especially in structuring infrastructure projects with the PPP scheme, the Company needs to develop a Risk Allocation Reference that serves as a reference for the GCA in allocating risks to the right parties, as well as developing risk mitigation plans in order to provide infrastructure in accordance with public needs.

Basis of Risk Management Policy

In order to develop a comprehensive risk management policy, the Company refers to a number of policies related to risk management, including:

- IIGF *Operation Manual*;
- IIGF *Enterprise Risk Management Framework*;
- *Standard Operating Procedure (SOP) Risk Management Exercise*;
- *International Organization for Standardization (ISO) 31000:2018 Risk Management Guidelines*; and
- *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2017, Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance*.

In general, the Company's policies related to risk management are formulated with reference to the Risk Management Framework which adopts the ISO 31000:2018 standard. Based on the document, IIGF's Corporate Risk Management Framework is defined as follows:

1. Establishment of common principles and standards for Risk Management practices to enable common understanding of Risk Management;
2. Risk appetite and tolerance agreed by management in determining the size of the risk level;
3. Adoption of a risk management framework that defines the risk management processes applied to the business in general; and
4. Accountability and responsibility in the implementation of Risk Management.

This framework is a structured and consistent approach to direct and prepare the organization to control risks and changes that can affect the organization. In addition, the Risk Management Framework is a holistic approach applied in management of various risks faced by IIGF so that it remains aligned with the Company's risk appetite in the midst of an increasingly dynamic business situation.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Manajemen Risiko

Selain itu, Perseroan juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang menjadi *guideline* dalam menerapkan sistem manajemen risiko di lingkungan Perseroan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- Manajemen Risiko berperan dalam menciptakan dan melindungi nilai Perseroan;
- Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari semua proses organisasi, yang harus diterapkan dalam semua aktivitas, proses dan sistem, dan dipertimbangkan dengan informasi terbaik yang tersedia dalam setiap pengambilan keputusan;
- Manajemen Risiko adalah dinamis, berulang, responsif terhadap perubahan, dan disesuaikan sejalan dengan pencapaian tujuan Perseroan;
- Manajemen Risiko adalah proses yang digerakkan manusia dan budayanya yang secara inklusif dijalankan di seluruh organisasi; dan
- Manajemen Risiko adalah penggerak untuk menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi dan terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Pengawasan Aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan senantiasa mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko, antara lain melalui Laporan Manajemen Risiko dan Pemantauan atas perkembangan mitigasi risiko yang disampaikan setiap semester oleh Divisi Manajemen Risiko kepada Direktur Utama selaku anggota Direksi yang membawahi Divisi Manajemen Risiko. Kemudian, secara berkala Perseroan menyampaikan Laporan Manajemen kepada Dewan Komisaris yang antara lain memuat informasi mengenai perkembangan penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan, termasuk informasi mengenai status tindak lanjut pelaksanaan mitigasi. Laporan dibuat secara komprehensif sehingga memberikan gambaran komitmen dari Perseroan untuk menurunkan tingkat risiko Perseroan.

Selain itu, untuk memperkuat pengelolaan risiko Perseroan, Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi penerapan manajemen risiko serta memberikan masukan dan saran terkait efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Kemudian, secara berkala diadakan rapat dan diskusi bersama yang melibatkan Divisi Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko guna membahas penerapan dan program kerja terkait manajemen risiko dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan.

Tata Kelola Manajemen Risiko

Tata kelola manajemen risiko Perseroan mengadopsi Model 3 lini (*3 Lines Model*) yang menggambarkan hubungan kerja sama dan komunikasi dari seluruh unsur-unsur di Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal, fungsi *Risk Management*, serta para *Risk Owner* dan *Risk Officer* yang berada di setiap divisi. Berikut bagan tata kelola manajemen risiko Perseroan:

Risk Management Principles

Furthermore, IIGF also applies risk management principles as the guidelines in implementing risk management system within the Company, as explained below:

- Risk Management performs a role in creating and protecting the value of the Company;
- Risk Management is an integral part of all organizational processes, which must be applied in all activities, processes and systems, and considered in every decision making;
- Risk Management is dynamic, repetitive, responsive to changes, and adjusted in line with the achievement of the Company's goals;
- Risk Management is a human-driven process in which the culture is carried out inclusively throughout the organization; and
- Risk Management is a driving force for creating an organization that is able to adapt and continue to be developed in a sustainable manner.

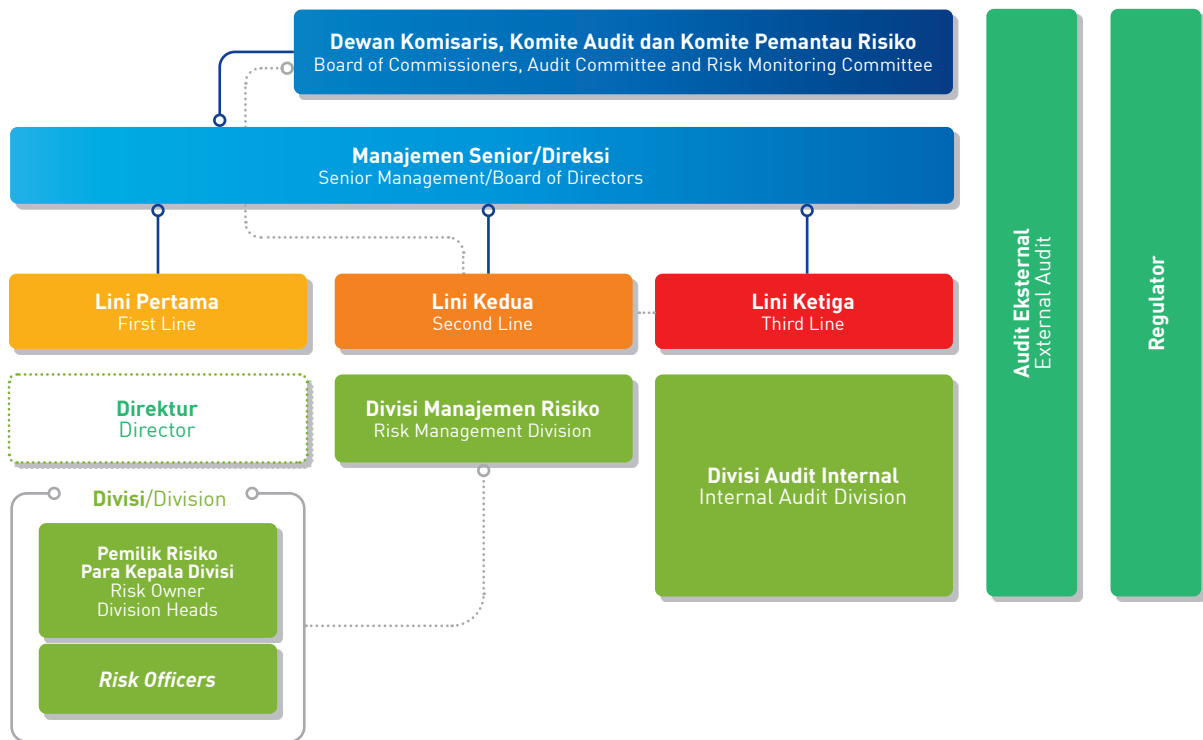
Active Supervision from the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company continuously reviews the effectiveness of risk management implementation, including through the Risk Management Report and Monitoring of risk mitigation progress submitted every semester by the Risk Management Division to the President Director as member of the Board of Directors in charge of the Risk Management Division. Furthermore, IIGF periodically submits Management Reports to the Board of Commissioners which, including information on the progress of the implementation of the risk management system in the Company, as well as information on the status of follow-up on the implementation of mitigation. The report is made comprehensively so as to provide an overview of IIGF's commitment to reduce the Company's risk level.

In addition, to strengthen the Company's risk management, the Board of Commissioners has also established a Risk Monitoring Committee which aims to assist the Board of Commissioners in overseeing the implementation of risk management and providing inputs and suggestions regarding the effectiveness of risk management implementation in the Company. Furthermore, periodically joint meetings and discussions are held involving the Risk Management Division and the Risk Monitoring Committee to discuss the implementation and work programs related to risk management and follow-up on the input submitted.

Risk Management Governance

The Company's Risk Management governance adopts the 3 Lines Model, which involves collaboration and communication of all elements in the Company, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, Internal Audit, Risk Management function, as well as Risk Owners and Risk Officers in each division as described in the following chart:



Tujuan dan Kerangka Kerja Penerapan Enterprise Risk Management (ERM)

Perseroan menerapkan ERM dengan tujuan untuk:

1. Mengembangkan Perseroan menjadi organisasi yang tangguh menghadapi risiko dalam mencapai visi dan misi korporasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap risiko yang melekat dalam semua aktivitas bisnis Perseroan;
2. Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan profil risiko/pengembalian (*risk/return*) yang ditetapkan;
3. Memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menciptakan strategi dan proses yang bijaksana; dan
4. Meningkatkan reputasi Perseroan di mata pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Pernyataan Misi Manajemen Risiko, yaitu *"tone at the top"*, bertujuan untuk mengomunikasikan visi, prinsip-prinsip dan mandat Perseroan dan menegaskan bahwa manajemen puncak Perseroan akan mengarahkan kegiatan Manajemen Risiko di seluruh tingkatan organisasi.

Sementara itu, misi yang ingin dicapai melalui penerapan ERM adalah untuk memahami risiko utama yang dihadapi organisasi dan memfasilitasi proses Manajemen Risiko melalui penyediaan alat dan metodologi yang tepat untuk dapat mengelola risiko secara eksplisit sehingga tercapai tujuan dari penerapan pendekatan yang konsisten dalam pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan.

Objective and Framework of ERM Implementation

The implementation of ERM aims to achieve the following objectives:

1. Developing the Company into a strong and resilient company that can deal with risks in its effort to realize its vision and mission by conducting comprehensive evaluation of the risks inherent in all of the Company's business activities;
2. Supporting the management in making risk-based decisions to achieve a sound business growth by taking into consideration of the established risk/ return profile;
3. Fulfilling the principles of Good Corporate Governance by creating prudent strategy and processes; and
4. Enhancing the Company's reputation in the viewpoints of shareholders.

The Risk Management Mission Statement, *"tone at the top"*, aims to communicate IIGF's vision, principles and mandate and confirms that the Company's top management will direct Risk Management activities at all levels of the organization.

Meanwhile, the mission of ERM implementation is to understand the key risks faced by the organizations and facilitate the Risk Management process by providing the right tools and methodologies to manage risks explicitly so as to achieve the goal of implementing a consistent approach to risk management in IIGF environment.

Bersamaan dengan itu, penerapan ERM juga ditujukan untuk menciptakan organisasi sadar risiko melalui:

1. Pembentukan sistem manajemen berbasis risiko, yang mengelola semua risiko utama melalui praktik dalam semua kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan;
2. Pengelolaan risiko di semua tingkat dalam organisasi;
3. Akuntabilitas yang jelas dan independensi dalam menjalankan tinjauan kepatuhan dan pemantauan seluruh kegiatan (semua pemilik proses bisnis); dan
4. Adopsi standar internasional yang diterima secara luas.

At the same time, ERM implementation is also aimed at creating a risk-conscious organization through:

1. Establishment of a risk-based management system, which manages all major risks through practices in all business activities and decision making;
2. Risk management at all levels in the organization;
3. Clear accountability and independence in conducting compliance review and monitoring of all activities (all business process owners); and
4. Adoption of widely accepted international standards.



Kategori Risiko

Perseroan telah membuat klasifikasi risiko yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Risiko Strategis, mencakup semua risiko yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan strategi.
2. Risiko Finansial, mencakup semua risiko yang terkait dengan risiko pasar dan risiko likuiditas.
3. Risiko Operasional, mencakup semua risiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi bisnis Perseroan.

Taksonomi risiko yang menunjukkan rincian dari sumber risiko yang mungkin terjadi dan definisi risiko yang diklasifikasikan dalam kerangka ERM ini dalam kategori sebagai berikut:

1. Kategori Risiko Strategis

Risiko tersebut dapat terjadi dari kegagalan untuk menentukan dan melaksanakan strategi bisnis Perseroan secara akurat, kegagalan membuat keputusan bisnis secara akurat, atau kegagalan untuk dapat menanggapi perubahan eksternal.

a. Strategi dan Perencanaan

Risiko tersebut muncul akibat penentuan konteks strategi dan isu perencanaan yang lemah dari Perseroan sehingga berpotensi memengaruhi nilai-nilai strategis Perseroan dan performa sebagai sebuah organisasi.

2. Kategori Risiko Keuangan

Kategori ini mengklasifikasikan risiko yang dapat terjadi akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi target pendapatannya, kerugian dari penempatan dana investasi, dan ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan baru, baik dari kreditur ataupun dari pemegang saham.

Risk Category

The Company has made a risk classification which is described as follows:

1. Strategic Risks, including all risks related to strategy planning, implementation, and monitoring.
2. Financial Risk, including all risks associated with market risk and liquidity risk.
3. Operational Risk, including all risks arising from the implementation of the Company's business functions.

A taxonomy of risks showing details of the possible sources of risk and definitions of risks are classified in this ERM framework in the following categories:

1. Strategic Risk Category

Risks arising from inaccurate determination and implementation of the Company's business strategy, inaccuracies in business decisions, or inability to respond to external changes.

a. Strategy and Planning

Risks arising from the weak context of IIGF's strategy and planning issues that might have an impact on IIGF's strategic values and performance as an organization.

2. Financial Risk Category

In this category, risks are classified as risks arising from the IIGF's inability to achieve its revenue targets, losses incurred from fund investments, and IIGF's inability to generate new funding from either creditors or the shareholder.



Sementara itu, risiko-risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan investasi mengacu pada PMK 95/107, yaitu di antaranya:

- a. Risiko Pasar (e.g. tingkat bunga, kurs)
Risiko keuangan dalam sub kategori ini menggabungkan risiko yang dihasilkan dari pergerakan yang merugikan dari faktor pasar yang meliputi suku bunga dan selisih kurs serta harga ekuitas.
 - b. Risiko Likuiditas dan Kredit
Risiko keuangan dalam sub kategori ini berhubungan dengan isu likuiditas dan kredit yang terkait dengan aset dan pendapatan Perseroan.
3. Kategori Risiko Operasional
- Risiko pada kategori ini umumnya terjadi pada pelaksanaan fungsi bisnis Perseroan. Risiko ini fokus pada risiko yang timbul dari orang, sistem, dan proses dimana Perseroan beroperasi (termasuk aktivitas penyediaan penjaminan sebagai bisnis utama Perseroan).
- a. Operasional Umum
Risiko pada sub kategori ini umumnya terkait dengan ketidakmampuan Perseroan untuk mengoperasikan fungsi bisnisnya secara efisien, yang menyebabkan kerugian operasional dari kegiatan di luar penyediaan penjaminan.
 - b. Penyediaan Penjaminan
Risiko pada sub kategori ini mengklasifikasikan risiko operasional yang terkait dengan peran Perseroan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).
 - c. Hukum dan Kepatuhan
Risiko pada sub kategori ini terkait dengan ketidakpatuhan Perseroan sebagai korporasi terhadap standar hukum atau peraturan perundangan yang dapat berdampak pada nilai-nilai strategis dan kinerja Perseroan sebagai sebuah organisasi.

Proses Manajemen Risiko yang Berlaku di Perseroan

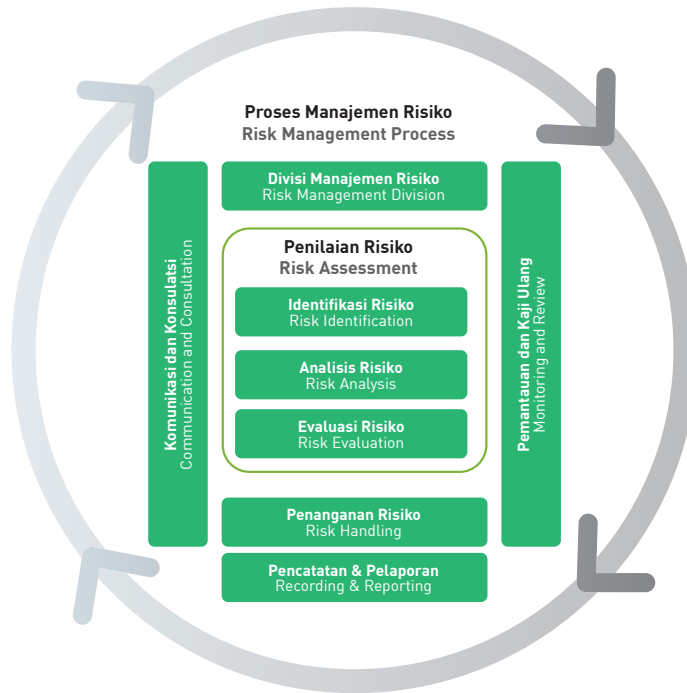
Proses Manajemen Risiko merupakan hal yang tidak kalah penting dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Proses manajemen risiko meliputi penerapan yang sistematis dan berkesinambungan pada kegiatan dan proses komunikasi dan konsultasi, penentuan konteks, penilaian, penanganan, pemantauan dan kaji ulang serta pencatatan dan pelaporan risiko.

Meanwhile, the risks faced by the Company in relation to investment refer to PMK 95/107, including:

- a. Market Risk (e.g. interest rate, exchange rate)
Financial risks in this sub-category incorporate risks resulting from adverse movements in market factors including interest rates and foreign exchange differences as well as equity prices.
 - b. Liquidity and Credit Risk
Financial risks in this sub-category relate to liquidity and credit issues associated with IIGF's assets and income.
3. Operational Risk Category
- Risks in this category usually arise from the execution of the IIGF's business functions. These risks focus on risks arising from people, system or process involved in the Company's operations (including in the provision of guarantee as the Company's core business)
- a. General Operations
General operations risks are usually related to the inability of the IIGF to operate business functions efficiently, leading to operational losses from activities other than the provision of guarantee services.
 - b. Provision of Guarantee
This risk category contains operational risks related to the IIGF's role as Infrastructure Guarantee Agency (BUPI).
 - c. Legal and Compliance
This risk category is related to the IIGF's inability as a corporate institution to comply with legal or regulation standards that might have an adverse impact on the strategic values or performance of the IIGF's as an organization.

Risk Management Process at IIGF

The Risk Management process is an important part of management and decision-making, and is integrated into the organization's structure, operations and processes. The risk management process includes the systematic and continuous implementation of activities and processes for communication and consultation, establishment of context, assessment, treatment, monitoring and review as well as recording and reporting of risk.



Mengacu pada standar ISO 31000:2018, Proses Manajemen Risiko di Perseroan dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Cakupan, Konteks, dan Kriteria

Penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah tahapan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan proses Manajemen Risiko guna mendukung penilaian dan perlakuan risiko secara efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi dan operasional Perseroan. Secara garis besar, proses bisnis yang berjalan di Perseroan saat ini terdiri dari:

- a. Penjaminan KPBU;
- b. Penjaminan Non-KPBU;
- c. Pendampingan Penyiapan dan Transaksi; dan
- d. Pengelolaan penempatan dana (investasi).

Menilik dinamika bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan, terdapat potensi penambahan mandat dan proses bisnis lain yang perlu dikaji dampaknya terhadap strategi, operasi dan keuangan Perseroan.

2. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi adalah tahapan yang dilaksanakan baik secara internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko melalui interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik dalam bentuk rapat berkala, rapat insidental atau *ad hoc*, *Focus Group Discussion* (FGD); dan diskusi reguler antara fungsi Manajemen Risiko dengan para *Risk Owner* dan *Risk Officer*.

3. Penilaian Risiko

Tahapan penilaian risiko mencakup identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dijalankan secara sistematis dengan tujuan untuk menentukan kemungkinan dan dampak terjadinya suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sehingga dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat.

Referring to the ISO 31000:2018 standard, the Risk Management Process at IIGF can be described as follows:

1. Scope, Context, and Criteria

The purpose of setting the scope, context and criteria is to adjust the Risk Management process, so that risk assessment and treatment is carried out effectively and is relevant to the Company's organizational and operating environment. In general, IIGF's current business processes include:

- a. PPP guarantee;
- b. Non-PPP Guarantee;
- c. Preparation and Transaction Advisory; and
- d. Fund placement management (investment)

In line with its business developments and the needs of stakeholders, it is possible that there will be additional mandates and other business processes that need to be assessed for their impact on the Company's strategy, operations and finances.

2. Communication and Consultation

Communication and consultation is a process implemented both internally and externally to ensure the effectiveness of risk management through interaction with stakeholders, either in the form of periodic meetings, incidental or ad hoc meetings, Focus Group Discussions (FGDs); and regular discussions between the Risk Management function and Risk Owners and Risk Officers.

3. Risk Assessment

Risk assessment includes identification, analysis and evaluation of risks that are carried out systematically to determine the possibility and impact of an event that hinders the achievement of organizational goals or objectives so that risk management can be carried out appropriately.



4. Penanganan Risiko
Penanganan risiko adalah tahapan yang dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat yang dapat memberikan manfaat paling optimal bagi Perseroan dalam menghadapi risiko yang teridentifikasi.
5. Pemantauan dan Kaji ulang Risiko
Pemantauan risiko adalah kegiatan pemantauan rutin terhadap kinerja proses Manajemen Risiko atas perencanaan dan harapan atas proses Manajemen Risiko. Sementara itu, kaji ulang risiko merupakan kegiatan peninjauan secara berkala atas kondisi terkini dan pada fokus tertentu.
6. Pencatatan dan Pelaporan Risiko
Proses Manajemen risiko beserta hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat. Pelaporan risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola organisasi yang diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta membantu pemenuhan tugas dan tanggung jawab para Direksi dan Dewan Komisaris.

Penetapan Tingkat Risiko

Perseroan menetapkan tingkat risiko yang mungkin dapat diterima Perseroan dan digunakan dalam pengukuran risiko. Dalam menentukan tingkat risiko Perseroan merujuk pada potensi risiko yang mungkin dapat diterima dan dikelola dengan beberapa pertimbangan tambahan mengenai penanganan risiko, peluang dan manfaat yang akan diperoleh. Berikut matriks tingkat risiko yang akan digunakan dalam evaluasi risiko:

Kemungkinan Risiko <i>Potential Risk</i>	Dampak Risiko dalam Hal Materialisasi Risiko <i>Impact in the Event of Risk Materializing</i>				
	Tidak Signifikan <i>Not Significant</i>	Minor	Sedang <i>Moderate</i>	Mayor <i>Major</i>	Berbahaya <i>Catastrophic</i>
Sangat rendah <i>Very Low</i>	Rendah <i>Low</i>	Rendah <i>Low</i>	Rendah <i>Low</i>	Rendah <i>Low</i>	Menengah <i>Moderate</i>
Rendah <i>Low</i>	Rendah <i>Low</i>	Rendah <i>Low</i>	Menengah <i>Moderate</i>	Menengah <i>Moderate</i>	Menengah <i>Moderate</i>
Sedang <i>Medium</i>	Rendah <i>Low</i>	Menengah <i>Moderate</i>	Menengah <i>Moderate</i>	Tinggi <i>High</i>	Tinggi <i>High</i>
Tinggi <i>High</i>	Menengah <i>Moderate</i>	Menengah <i>Moderate</i>	Tinggi <i>High</i>	Tinggi <i>High</i>	Tinggi <i>High</i>
Sangat tinggi <i>Very High</i>	Menengah <i>Moderate</i>	Tinggi <i>High</i>	Tinggi <i>High</i>	Tinggi <i>High</i>	Tinggi <i>High</i>

Pedoman Penanganan Risiko

Tujuan penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan adalah agar Perseroan dapat melakukan Penanganan Risiko secara tepat sehingga dapat ditentukan aktivitas pengelolaan risiko selanjutnya. Penanganan risiko dipersiapkan dengan memperhatikan selera risiko yang diterjemahkan ke dalam matriks tingkat risiko. Di bawah ini merupakan pedoman penanganan risiko untuk setiap tingkat risiko untuk dijadikan acuan dalam menentukan langkah mitigasi terhadap setiap risiko yang teridentifikasi.

4. Risk Treatment
Risk treatment is the stage conducted to determine appropriate actions that can provide the most optimal benefits for IIGF in dealing with the identified risks.
5. Risk Monitoring and Review
Risk monitoring is a routine monitoring activity to the performance of the Risk Management process on the planning and expectations of the Risk Management process. Meanwhile, risk review is a periodic review of current conditions and a particular focus.
6. Risk Recording and Reporting
The risk management process and its results shall be documented and reported through appropriate mechanisms. Reporting of risks is an integral part of the organizational governance that is implemented to improve the quality of communication with stakeholders, as well as to support the Board of Directors and Board of Commissioners in fulfilling their duties and responsibilities.

Determination of Risk Level

The Company has established a level of risk that may be acceptable to the Company and is used in risk measurement. Moderate risk level refers to a potential risk that may be acceptable with some additional consideration regarding the benefits to be obtained. The following risk level matrix will be used in the risk evaluation:

Guidelines for Risk Treatment

The purpose of implementing a risk management system in the Company is that the Company can manage risks appropriately to determine risk management activities subsequently. Risk handling is prepared by taking into account the risk appetite which is translated into a risk level matrix. Below are risk handling guidelines for each risk level that can be used as a reference in determining mitigation steps for each identified risk.

Tingkat Risiko <i>Risk Level</i>	Penanganan Risiko <i>Risk Treatment</i>
Rendah Low	<ul style="list-style-type: none"> › Menerima risiko dengan pemantauan yang konstan. › Minimal, kontrol detektif dapat ditentukan untuk risiko tersebut. › Penanganan risiko dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan, bila memungkinkan. › Accepting risk with constant monitoring. › At the minimum, detection control could be determined for the risk. › Risk management conducted within 6 (six) months, if possible.
Sedang Medium	<ul style="list-style-type: none"> › Mengurangi tingkat risiko, bila dimungkinkan. › Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut. › Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut. Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan, bila memungkinkan. › Reducing the risk level, if possible. › Prevention control could be determined for the risk. › If the costs of risk management exceed the benefit, accept the risk. Risk management conducted within 3 (three) months, if possible.
Tinggi High	<ul style="list-style-type: none"> › Mengurangi tingkat risiko, bila memungkinkan. › Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut. Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut. › Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan secepatnya, bila memungkinkan. Mensyaratkan pemantauan risiko secara bulanan. › Reducing the risk level, if possible. › If the costs of risk management exceed the benefit, accept the risk. Prevention control could be determined for the risk. › Risk management to be conducted as soon as possible, whenever possible. Requires risk monitoring on a monthly basis.

Risiko-Risiko Utama yang Dihadapi oleh Perseroan

Key Risks Faced by the Company

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan terekspos pada sejumlah risiko utama, di antaranya:

In conducting its business, IIGF is exposed to a number of key risks, including:

Jenis Risiko <i>Type of Risk</i>	Penjelasan Risiko <i>Risk Definition</i>	Pengelolaan dan Penanganan Risiko <i>Risk Management and Mitigation</i>
1. Risiko Pencapaian Target Penjaminan 1. Risk of Guarantee Target Realization	<p>Dalam menjalankan peran sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), Perseroan menghadapi risiko-risiko antara lain terkait dengan target <i>pipeline</i> proyek, termasuk tertundanya/tidak berlanjutnya proyek ke tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan dan perjanjian regres.</p> <p>In carrying out its role as an Infrastructure Guarantee Agency (BUPI), the Company faces risks related to the targets of pipeline projects, including the postponement/discontinuation of project advancement to the guarantee agreement and regress agreement stages.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan suatu kerangka kerja dan metodologi evaluasi penjaminan yang komprehensif, terstruktur dan diterapkan secara disiplin melalui <i>Operation Manual</i>, Pedoman dan SOP terkait proses Penjaminan Infrastruktur. b. Menentukan potensi target proyek sesuai dengan prioritas dan potensi penjaminan (<i>pipeline clustering & screening</i>) dengan komprehensif dan bersinergi dengan pelaksana penyiapan proyek/PDF dan mitra terkait, termasuk menyiapkan antisipasi alternatif <i>pipeline</i> dan PJPK proyek sebagai upaya menjaga pencapaian target penjaminan. c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PJPK, mitra Kantor Bersama KPBU dan instansi pemerintah terkait lainnya untuk sinkronisasi penentuan target dan <i>timeline</i> proyek serta proses penjaminan, utamanya terkait komitmen PJPK dalam kesiapan perangkat, organisasi, pemenuhan/penyelesaian dokumentasi proyek dan proses KPBU sesuai catatan evaluasi penjaminan. d. Memastikan kebutuhan PJPK atas skema Penjaminan untuk Proyek dan pemahaman atas struktur penjaminan yang sesuai kebutuhan calon investor dan lender melalui proses <i>Market Sounding</i>, proses <i>Aanwijzing</i> dan <i>One on One meeting</i> sebelum finalisasi proses lelang. e. Melaksanakan program <i>capacity building</i> dalam rangka membangun pemahaman dan sinergi para <i>stakeholders</i> proyek untuk menyiapkan kapasitas PJPK dalam mengelola proyek dan proses penjaminan. <p>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait pencapaian target penjaminan maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.</p>



Jenis Risiko Type of Risk	Penjelasan Risiko Risk Definition	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Mitigation
		<ul style="list-style-type: none"> a. Developing a framework and methodology for a comprehensive, structured and disciplined guarantee evaluation through Operation Manual, Guidelines and SOP related to Infrastructure Guarantee. b. Determining the potential of project target according to the priority and potential of guarantee (pipeline clustering & screening) comprehensively and in synergy with the project/PDF preparation manager and relevant partners, including preparing alternative project pipelines and GCA in order to assure the achievement of guarantee target. c. Communicating and coordinating with GCA, PPP Office and other relevant government institutions to synchronize the realization of project targets and timeline as well as guarantee process, particularly related to the commitment of GCA in the readiness of instruments, organization, fulfillment/completion of project documentation and PPP process according to the guarantee evaluation notes. d. Ensuring the needs of GCA regarding the Project Guarantee scheme and understanding guarantee structures that are appropriate to the needs of prospective investor and lender through Market Sounding process, Aanwijzing process and One on One meeting before the finalization of tender process. e. Organizing capacity building programs in order to develop understanding and synergy between project stakeholders to prepare the capacity of GCA in managing the project and licensing process. <p>By managing and mitigating risks related to the realization of guarantee targets, the risk level can be managed properly.</p>
<p>2. Risiko Pemrosesan Klaim Penjaminan</p> <p>2. Risk of Guarantee Claim Processing</p>	<p>PT PII memiliki eksposur potensi klaim dalam hal penjaminan yang dilakukan telah dinyatakan efektif. Hal ini berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadinya proses penanganan klaim yang tidak akurat/tidak valid, mengalami keterlambatan dan/atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perseroan juga perlu memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek untuk proses pembayaran klaim.</p> <p>IIGF is exposed to potential claim in the effectiveness of guarantee. This is related to the possibility of inaccurate/invalid management of claims, delayed/non-compliance with the applicable procedures. The Company also needs to ensure the availability of short-term liquidity for claim payment process.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penjabaran <i>Risk Mitigation Plan</i> (RMP) Proyek menjadi <i>Key Risk Indicators</i> (KRI) guna dijadikan dasar pemantauan mitigasi risiko. b. Melakukan pemantauan proyek secara berkala untuk mengidentifikasi potensi keterjadian klaim yang dilaporkan bulanan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. c. Melakukan proses verifikasi internal nilai klaim yang diajukan (melalui Memo Evaluasi Klaim). d. Melakukan <i>monitoring</i> posisi penempatan dana secara berkala untuk mendukung likuiditas terhadap potensi klaim. e. Melakukan simulasi klaim di internal PT PII untuk memperjelas alur serta memastikan kesiapan dalam proses pengelolaan klaim yang rutin. <p>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait pemrosesan klaim maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Defining Project Risk Mitigation Plan (RMP) into Key Risk Indicators (KRIs) as the foundation of monitoring risk mitigation. b. Regularly monitoring projects in order to identify potential claims, the results are reported monthly to the Board of Directors or Board of Commissioners. c. Conducting claim simulation in IIGF's internal to clarify the flows as well as to ensure the readiness of routine claim management processes. d. Conducting internal verification of the proposed claim values (through Claim Evaluation Memo). e. Regularly monitoring the allocation of funds in order to support liquidity to potential claims. <p>By managing and mitigating risks related to claim processing, the risk level can be managed properly.</p>

Jenis Risiko Type of Risk	Penjelasan Risiko Risk Definition	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Mitigation
3. Risiko Hak Tagih Regres 3. Regress Claim Risk	<p>Setelah dilakukannya proses pembayaran klaim, Perseroan juga menghadapi risiko terkait pemulihan pembayaran regres. Risiko ini berkaitan dengan tidak diperolehnya hak regres karena ketidakmampuan PJKP atau BUMN Terjamin untuk membayar regres.</p>	<p>a. Melakukan <i>workshop</i> regres bersama dengan PJKP dan/ atau BUMN Terjamin untuk mengetahui alur, tata cara serta penganggaran regres.</p> <p>b. Memastikan adanya klausul terkait regres yang dituangkan pada Perjanjian Regres dan Perjanjian Pelaksanaan Regres.</p> <p>c. Melakukan <i>monitoring</i> dan proyeksi atas kemampuan finansial PJKP dan/atau BUMN Terjamin dalam membayar regres.</p> <p>d. Melakukan eskalasi kepada pemangku kepentingan terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dll., jika diperlukan.</p> <p>e. Mengupayakan adanya penyusunan suatu regulasi terkait regres kepada PJKP daerah atau BUMD, misalnya dalam bentuk <i>intercept</i> anggaran.</p> <p>f. Memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa di dalam Perjanjian Regres jika terdapat sengketa terkait pembayaran regres.</p>
<p>After completing claim payment, the Company also faces risks regarding the recovery of regress payment. This risk is related to the failure in obtaining regress rights due to the inability of the Guaranteed GCA or SOE to pay regress.</p>	<p>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait hak tagih regres maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.</p> <p>a. Organizing regress workshop with the Guaranteed GCAs and/or SOEs to understand the flows, procedures as well as budgeting of regress.</p> <p>b. Ensuring the existence of regress clause within the Regress Agreement and Regress Implementation Agreement.</p> <p>c. Monitoring and making projection on the financial capability of Guaranteed GCA and/or SOE in paying regress.</p> <p>d. Escalating to relevant stakeholders, including to the Ministry of Home Affairs, Ministry of SOEs, Ministry of Finance, etc, if necessary.</p> <p>e. Striving for the establishment of a regulation related to regress to regional GCA or ROEs, such as in the form of budget <i>intercept</i>.</p> <p>f. Ensuring the existence of dispute settlement mechanism within the Regress Agreement in the event of dispute related to regress payment.</p>	
4. Risiko Ketidapatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku 4. Risk of Non-compliance with the prevailing laws and regulations	<p>Risiko ini berkaitan dengan terdapat tindakan korporasi maupun insan Perseroan yang tidak sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain terdapat peraturan perundang-undangan baru atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak ke Perseroan belum teridentifikasi sedini mungkin, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan atau ketidakpahaman insan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini dapat berakibat sanksi dari Penegak Hukum maupun teguran dari Pemerintah (regulator) atau Pemegang Saham.</p>	<p>a. Melakukan <i>monitoring</i> regulasi dan legal isu yang berdampak langsung pada Perseroan secara bulanan dan melakukan <i>update</i> daftar/<i>list</i> regulasi yang berdampak pada Perseroan.</p> <p>b. Sosialisasi Hukum & Regulasi untuk meningkatkan <i>awareness</i> bagi Insan Perseroan.</p> <p>c. Penggunaan konsultan hukum (jika diperlukan).</p>
<p>This risk is related to corporate and individual actions of the Company that are not in accordance with the prevailing laws and regulations. Some of the causes include new laws and regulations or changes in laws and regulations which have not been identified on time, resulting in ignorance or lack of understanding by the Company's individuals regarding the prevailing regulations. This can result in sanctions from law enforcement or reprimands from the government (regulator) or shareholders.</p>	<p>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait ketidapatuhan hukum dan regulasi maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.</p> <p>a. Monitoring regulations and legal issues that are directly impacting the Company in every month and updating the list of regulations that impact the Company.</p> <p>b. Socializing the Laws & Regulations to improve the awareness of the Company's Individuals.</p> <p>c. Hiring legal consultant (if necessary).</p> <p>By managing and mitigating risks related to non-compliance with law and regulations, the risk level can be managed properly.</p>	



Jenis Risiko Type of Risk	Penjelasan Risiko Risk Definition	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Mitigation
<p>5. Risiko Operasi Dalam Kondisi Pandemi Covid-19</p> <p>5. Operational Risks during the Covid-19 Pandemic</p>	<p>Kondisi pandemi akibat wabah Covid-19 yang berkepanjangan menempatkan Perseroan terekspos pada risiko yang muncul sebagai dampak ketidakpastian akibat memburuknya kondisi ekonomi nasional dan global di tengah keterbatasan mobilitas manusia sebagai bentuk pengendalian atas risiko ancaman penyebaran virus Covid-19 terutama dengan adanya varian-varian baru.</p> <p>In the midst of prolonged Covid-19 pandemic, the Company is also exposed to a uncertain condition due to weak national and global economic conditions amid the restrictions of public mobility as a form of countermeasure to the risks of Covid-19 spread, especially with the occurrence of new variants.</p>	<p>a. Menyiapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan skenario Perencanaan Keberlanjutan Bisnis atau disebut juga dengan <i>Business Continuity Planning</i> (BCP), yang memuat antara lain pemanfaatan teknologi informasi dalam berkomunikasi dan dokumentasi rutin di tengah pembatasan mobilitas guna mempertahankan produktivitas dan keberlangsungan bisnis Perseroan.</p> <p>b. Melakukan analisis <i>stress test</i> dan perhitungan proyeksi untuk mengantisipasi dampak terburuk akibat pandemi.</p> <p>c. Mengadopsi penerapan protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah dan melakukan sosialisasi kewaspadaan dan perilaku hidup sehat selama pandemi berlangsung, termasuk pemberian vaksin bagi insan Perseroan dan keluarganya.</p> <p>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait operasi dalam kondisi pandemi maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.</p> <p>a. Preparing policies, procedures and resources that are needed to carry out the Business Continuity Planning (BCP) scenario, including the use of information technology in communication and routine documentation in order to limit physical interaction while maintaining productivity and business continuity.</p> <p>b. Conducting stress test analysis and calculation of projections to anticipate the worst possibility due to the pandemic.</p> <p>c. Adopting the implementation of health protocols that refer to applicable rules and regulations by campaigning for vigilance and healthy living behavior during the pandemic, including the provision of vaccines for Company personnel and their families.</p> <p>By managing and mitigating risks related to operations during the pandemic, the risk level can be managed properly.</p>
<p>6. Risiko Pasar</p> <p>6. Market Risk</p>	<p>Bisnis Perseroan terekspos pada Risiko Pasar yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga.</p> <p>Namun demikian, Perseroan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perseroan dilakukan menggunakan mata uang fungsional.</p> <p>Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.</p> <p>Aset Perseroan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi Perseroan terutama terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap.</p>	<p>a. Melakukan optimalisasi penempatan dana dengan mengatur jangka waktu penempatan dana menyesuaikan proyeksi pergerakan suku bunga ke depan dan makro ekonomi.</p> <p>b. Pengelolaan portofolio melalui mekanisme tender masih dilakukan oleh Perseroan untuk mendapatkan suku bunga tertinggi yang ditawarkan dan menjaga akuntabilitas penempatan dana.</p> <p>c. Menyusun komposisi penempatan dana (<i>portofolio mix</i>) yang optimal dari tingkat pengembalian dan risiko yang terukur.</p> <p>Karena pada periode berjalan Perseroan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material, maka perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional tidak berdampak signifikan terhadap kinerja laba rugi setelah pajak Perseroan.</p> <p>Investasi Perseroan sebagian besar terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap dan berjangka pendek dengan kategori tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan bunga Perseroan.</p> <p>Kemudian dari sisi liabilitas, Perseroan memiliki pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel yang menggunakan SUN <i>Benchmark</i> dengan tenor 20 tahun. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga juga tidak berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perseroan.</p> <p>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait pasar maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.</p>

Jenis Risiko Type of Risk	Penjelasan Risiko Risk Definition	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Mitigation
	<p>The Company business is exposed to Market Risk arising from changes in foreign currency exchange rates and interest rates.</p> <p>However, the Company has no significant risks related to exchange rate since the Company's main transactions are in functional currencies.</p> <p>Interest rate risk is a risk where cash flows or fair value in the future of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates.</p> <p>The Company's assets exposed with the interest rate risk is investment. The Company's investment comprises of deposits and investment with fixed income.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Optimizing the allocation funds by setting the time limit of fund allocation based on the projection of interest rate movement and macro economy. Managing portfolio through tender mechanism is still conducted by the Company in order to obtain the highest interest rate that can be offered and maintain the accountability of fund allocation. Preparing an optimal composition of fund allocation (mix portfolio) from the return rate and measurable risks. <p>Since the Company does not have material financial assets and financial liabilities in foreign currencies in this period, changes in the exchange rate from foreign currency to functional currency have no significant impact on the Company's profit or loss after tax.</p> <p>The Company's investments are mostly consisting of fixed-income and short-term deposits and investments with available-to-sell and held-to-maturity categories. Changes in the increase or decrease in market interest rates have no significant effect on the Company's interest income.</p> <p>In terms of financial liabilities, the Company has two-step loans with variable interest rates using the SUN Benchmark with a tenor of 20 years. Changes in the increase or decrease in interest rates have no significant effect on the Company's interest expense.</p> <p>By managing and mitigating risks related to market risk, the risk level can be managed properly.</p>
<p>7. Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas</p> <p>7. Credit Risk and Liquidity Risk</p>	<p>Bisnis Perseroan terekspos pada risiko yang timbul karena kegagalan pengembalian investasi, kegagalan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang terjadi akibat gangguan arus kas dan/atau kesulitan pendanaan maupun tidak tertagihnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Sementara itu, Perseroan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan karena memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi yang dikelola.</p> <p>The Company's business is exposed to risks arising from failure to return on investment and the Company's inability to settle its financial obligations as they matured due to cash flow disturbances and/or funding difficulties as well as non-collectible Guarantee Service Fee (IJP). Meanwhile, the Company does not have significant liquidity risk because it has high liquidity in the form of cash and cash equivalents and managed investments.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan investasi berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta mengatur mandat investasi untuk jenis, batasan alokasi, serta kriteria <i>counterparty</i> yang selektif, sesuai regulasi dan kebijakan yang berlaku. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap arus kas perkiraan dan aktual, serta menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan. Mengupayakan dukungan likuiditas dari Kementerian Keuangan dan/ atau Lembaga Keuangan jika dibutuhkan, sebagai langkah <i>contingency plan</i>. Melakukan pemantauan atas kemampuan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) serta profiling atas umur piutang <p>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait kredit dan likuiditas maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> Establishing investment policies based on prudent principles, and regulate investment mandates for types, allocation limits, and selective counterparty criteria, in accordance with applicable regulations and policies. Conducting periodic monitoring of estimated and actual cash flows, as well as adjusting the maturity date profile of financial assets and financial liabilities. Striving for liquidity support from the Ministry of Finance and/or Financial Services Institutions as contingency plan when necessary. Monitoring the ability of Guarantee Service Fee (IJP) payment as well as conducting profiling of the age of receivables. <p>By managing and mitigating risks related to credit and liquidity, the risk level can be managed properly.</p>



Jenis Risiko Type of Risk	Penjelasan Risiko Risk Definition	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Mitigation
<p>8. Risiko Kapasitas Penjaminan</p> <p>8. Risk of Guarantee Capacity</p>	<p>Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan penjaminan, Perseroan senantiasa perlu memastikan kapasitas penjaminan yang dihitung dengan menggunakan pendekatan <i>Gearing Ratio</i>. Risiko ini berkaitan dengan terlampauinya batasan <i>Gearing Ratio</i> sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu PMK No.148/PMK.8/2022 serta selera risiko Perseroan.</p> <p>In carrying out its functions and duties in providing guarantees, the Company is constantly required to ensure the capacity of guarantee which is calculated using the <i>Gearing Ratio</i> approach. This risk is related to the <i>Gearing Ratio</i> exceeding the limit as regulated in the PMK No. 148/PMK.8/2022 as well as the Company's risk appetite.</p>	<p>a. Melakukan kajian kapasitas penjaminan pada saat akan dilakukannya penjaminan untuk suatu proyek sehingga didapatkan gambaran kondisi <i>Gearing Ratio</i>.</p> <p>b. Melakukan seleksi <i>pipeline</i> proyek penjaminan dan proses strukturisasi penjaminan proyek untuk dapat memanfaatkan kapasitas secara optimal.</p> <p>c. Melakukan pemantauan berkala terhadap <i>outlook gearing ratio</i> dan dalam hal indikasi perhitungan <i>Gearing Ratio</i> PT PII mencapai 80% dari batasan regulasi dapat dilakukan upaya penambahan Penyertaan Modal Negara.</p> <p>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait kapasitas penjaminan maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.</p> <p>a. Reviewing the capacity of guarantee when providing guarantee for a project in order to obtain description on the condition of <i>Gearing Ratio</i>.</p> <p>b. Conducting selection on the guarantee project pipeline and project guarantee restructuring process in order to utilize the capacity optimally.</p> <p>c. Conducting regular monitoring on the gearing ratio outlook and in the indication of IIGF's <i>Gearing Ratio</i> reaching 80% of the regulated limits, State Equity Participation can be increased.</p> <p>By managing and mitigating risks related to guarantee capacity, the risk level can be managed properly.</p>
<p>9. Risiko Keamanan Siber (<i>Cybersecurity</i>)</p> <p>9. Cybersecurity Risk</p>	<p>Risiko ini muncul sebagai dampak dari ketidakpastian sistem teknologi informasi. Risiko keamanan siber antara lain meliputi hilangnya kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan informasi, data, sistem informasi atau pengendalian yang berpotensi memberikan dampak merugikan terhadap operasi organisasi dalam hal ini misi, fungsi, citra, atau reputasi serta aset, individu, organisasi lain bahkan suatu negara.</p> <p>This risk arises due to uncertainty in information technology system. Cybersecurity risks are related to the loss of confidentiality, integrity, or availability of information, data, information systems or controls that potentially have a detrimental impact on the organization's operations, especially its mission, function, image, or reputation as well as assets, individuals, other organizations and even a country.</p>	<p>a. Melakukan migrasi proses komunikasi dan penyimpanan data divisi-divisi termasuk <i>email</i> ke dalam ekosistem berbasis <i>Cloud Computing</i> dengan keamanan yang lebih baik dan terintegrasi. Dengan standar SLA untuk <i>up-time</i> dari <i>server cloud</i> yang lebih tinggi dapat meningkatkan ketersediaan data yang dapat diakses oleh para pengguna.</p> <p>b. Melakukan proses <i>security hardening</i>, <i>vulnerability assessment</i>, <i>penetration test</i> dan remediasi dengan dukungan Pusintek Kementerian Keuangan untuk meningkatkan keamanan dari segi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan aplikasi sistem teknologi informasi.</p> <p>c. Melakukan sosialisasi dan menanamkan <i>risk awareness</i> berkelanjutan kepada karyawan mengenai pentingnya menjaga keamanan informasi baik dilakukan di internal maupun bekerja sama dengan Pusintek Kementerian Keuangan.</p> <p>Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait keamanan siber (<i>cybersecurity</i>) maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.</p> <p>a. Migrating communication processes and data storage of divisions, including email into a Cloud Computing-based ecosystem with better and more integrated security. SLA standards for up-time from higher cloud servers can increase the availability of data that can be accessed by users.</p> <p>b. Carry out security hardening processes, vulnerability assessments, penetration tests and remediation with the support of the Ministry of Finance's Center for Research and Technology to improve security of confidentiality, integrity and availability of data and information technology system applications.</p> <p>c. Continuously socializing and cultivating risk awareness to employees regarding information security both internally and in collaboration with the Ministry of Finance's Center for Research and Technology.</p> <p>By managing and mitigating risks related to cybersecurity, the risk level can be managed properly.</p>

Penjelasan Mengenai Sistem Manajemen Risiko yang Diterapkan Perseroan

Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dengan strategi dan proses bisnis. Manajemen risiko diterapkan secara proaktif dan memandang ke depan guna mendukung Perseroan dalam mengantisipasi, memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan.

Perseroan menggunakan pendekatan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management/ERM*) yang disusun secara holistik dan terintegrasi dalam suatu Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perseroan yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko secara efektif dan efisien.

Selain menjalankan peran fungsi Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko Perseroan juga bertugas memberikan pendampingan dan konsultasi terkait proses kepatuhan sebagai bagian dari implementasi GCG dan pengendalian internal.

Description on the Risk Management System Implemented by the Company

The Company implements a risk management system that is integrated with business strategies and processes. Risk management is implemented in a proactive and forward-looking manner to support the Company in anticipating, maximizing added value for shareholders, managing capital comprehensively, and ensuring profitability and sustainable growth of the Company's business.

The Company applies an Enterprise Risk Management (ERM) approach that is organized holistically and integrated in an Enterprise Risk Management Framework that is used as a reference in carrying out risk management activities effectively and efficiently.

In addition to carrying out the role of the Risk Management function, IIGF's Risk Management Division is also tasked with providing assistance and consultation related to compliance processes as part of GCG implementation and internal control.



Jika audit internal dilakukan setelah suatu transaksi dilakukan, maka sebaliknya pengkajian atas kepatuhan (*compliance review*) diterapkan sebagai salah satu alat pengelola risiko sebelum sebuah transaksi dilakukan. Salah satu tugas dari fungsi kepatuhan (*compliance*) adalah memastikan terpenuhinya prasyarat sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa serta proses penjaminan di dalam proyek. Dalam pengawasan aspek kepatuhan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, fungsi kepatuhan bertugas memberikan peringatan dini kepada manajemen terkait potensi risiko yang dapat diterima Perseroan.

If an internal audit is carried out after a transaction has taken place, then a compliance review is applied as one of the risk management tools before a transaction is carried out. One of the tasks of the compliance function is to ensure the fulfillment of pre-requisites in connection with the procurement of goods and services and the guarantee process in the project. In monitoring compliance aspects and conformity with applicable regulations, the compliance function is tasked with providing early warning to management regarding potential risks that may be accepted by the Company.



Penjelasan Mengenai Hasil Telaah yang Dilakukan atas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2022

Untuk mewujudkan pengelolaan risiko yang efektif, Perseroan telah melakukan penilaian atas pelaksanaan manajemen risiko melalui beberapa mekanisme, diantaranya dengan mengakomodir aspek Manajemen Risiko ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Korporasi, audit dengan pendekatan berbasis risiko, *review* implementasi dan pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan secara berkala. Divisi Manajemen Risiko secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko korporat melalui pengawasan dan pemantauan pergerakan tingkat risiko dalam profil risiko Perseroan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Perseroan kemudian melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas perencanaan pengelolaan risiko yang sudah dirumuskan dan diterapkan. Hasil laporan profil risiko ini disampaikan kepada Direksi dan Komisaris secara berkala dengan realisasi KPI penurunan risiko mencapai 7,5% dari target 7% di tahun 2022.

Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

Pada tahun 2022, Divisi Manajemen Risiko telah menyelesaikan proses Penilaian Maturitas Manajemen Risiko yang dilakukan secara mandiri atas hasil tindak lanjut rekomendasi *Risk Maturity* di tahun 2021 dengan adanya penerapan maupun implementasi di beberapa Divisi. Secara umum tingkat maturitas risiko korporat di PT PII untuk periode 2022 adalah *Defined* dengan skor 3,33.

Klasifikasi Tingkat Maturitas Classification of Maturity Levels

5	Optimized	<p>Manajemen risiko ditangani sepenuhnya dan diterapkan dalam aktivitas manajemen sehari-hari. Praktik manajemen risiko yang berteknologi tinggi dan terbaik digunakan untuk semua jenis risiko utama. Manajemen risiko digunakan sebagai pendorong nilai utama yang mendukung pengambilan keputusan dan mengejar peluang. Risiko-risiko, termasuk risiko-risiko yang muncul ke permukaan, diidentifikasi dan dipantau secara proaktif melalui indikator risiko utama dan analisis risiko yang bersifat prediktif. Perseroan berfokus pada pengembangan berkelanjutan dari proses yang sudah dibentuk. Manajemen Risiko menjadi suatu keunggulan kompetitif, antara lain dengan menerapkan manajemen perubahan dan pencegahan.</p>	<p>Risk management is fully handled and implemented in daily management activities. High-tech and best risk management practices are used for all major risk types. The risk management is used as a key value driver that supports decision-making and pursuing opportunities. Risks, including those that arise, are proactively identified and monitored through key risk indicators and predictive risk analysis. The Company focuses on the continuous development of established processes. The risk management becomes a competitive advantage, among others by implementing change management and prevention.</p>
4	Managed	<p>Manajemen risiko perusahaan diterapkan sepenuhnya di seluruh bisnis, diterapkan dan digunakan secara konsisten dalam pengambilan keputusan dan manajemen sehari-hari. Proses manajemen risiko diukur, dievaluasi, dan ditinjau kembali untuk perbaikan berkelanjutan. Risiko terus dianalisis, diukur, dan dikelola dalam Perseroan dengan metode pengukuran kuantitatif/statistik. Prinsip dan kebijakan diterapkan dan laporan agregat disiapkan serta dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Manajemen risiko bersifat proaktif. Indikator Risiko Utama diinventarisir dan dipantau secara konsisten.</p>	<p>Enterprise risk management is fully implemented in all aspects of the business and used consistently in the decision-making process and day-to-day management of the Company. The risk management process is measured, evaluated and reviewed as a form of continuous improvement. The Company continues to analyze, measure and manage risks using quantitative/statistical measurement methods. Principles and policies are applied and aggregate reports are prepared and reported to those responsible for corporate governance. Risk management is proactive. Key Risk Indicators are inventoried and monitored consistently.</p>

Explanation on the Results of the Review Conducted on the Risk Management System in 2022

To establish an effective risk management, IIGF has conducted an evaluation of the implementation of risk management through several mechanisms, including by accommodating aspects of Risk Management into the Corporate Key Performance Indicator (KPI), auditing with a risk-based approach, reviewing implementation and monitoring and reporting to stakeholders on a regular basis. The Risk Management Division periodically evaluates the effectiveness of the corporate Risk Management system through supervision and monitoring of risk level movements in the Company's risk profile. Based on the monitoring results, the Company will then conduct an in-depth analysis of the effectiveness of the risk management plan that has been formulated and implemented. The results of this risk profile report are submitted to the Board of Directors and Commissioners on a regular basis with the realization of the risk reduction KPI reaching 7.5% of target 7% in 2022.

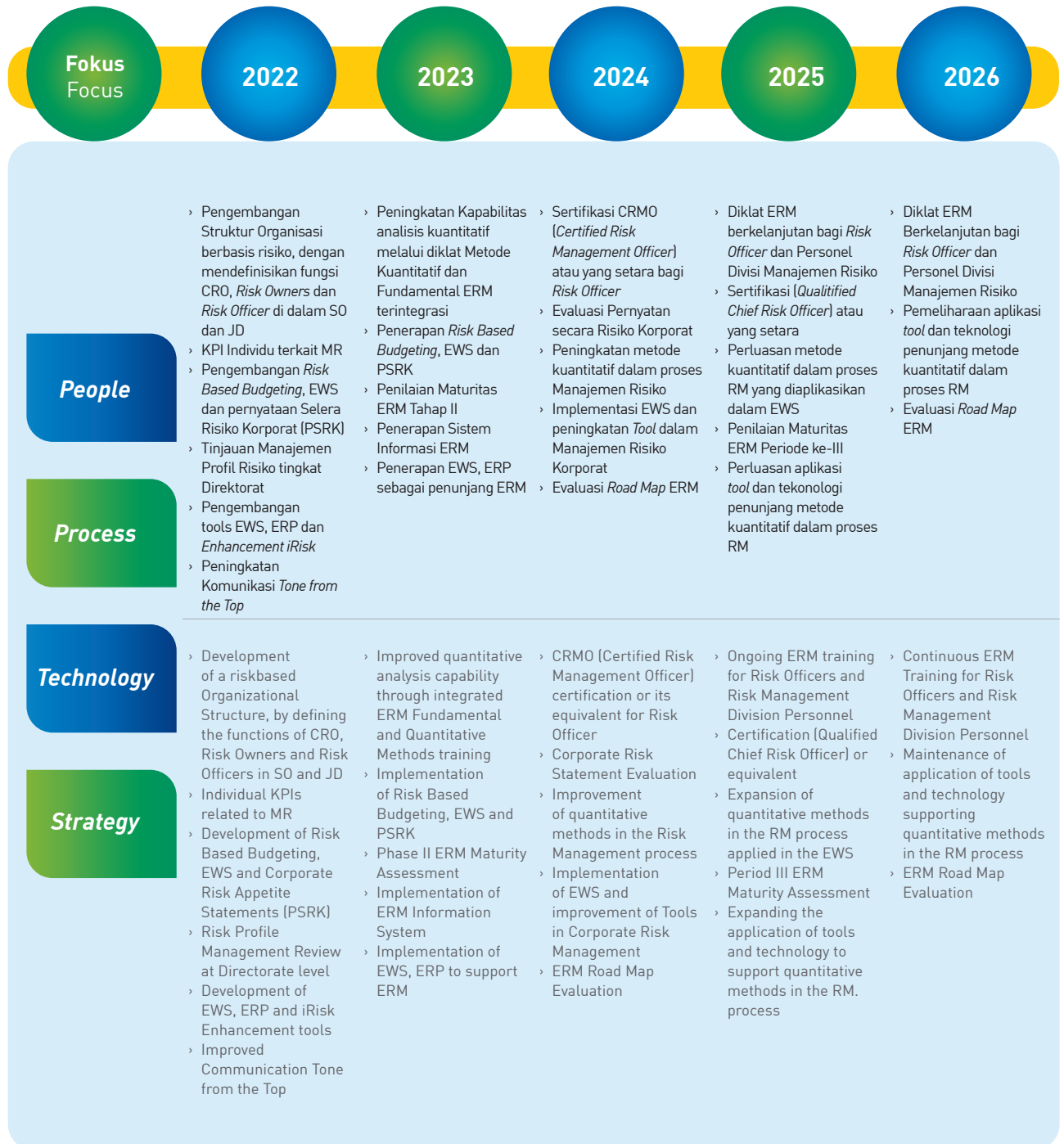
Risk Management Maturity Assessment

In 2022, the Risk Management Division has completed the Risk Management Maturity Assessment process which is carried out independently on the results of the follow-up of Risk Maturity recommendations in 2021 with the application and implementation in several Divisions. In general, the corporate risk maturity level at IIGF for the 2022 period is *Defined* with a score of 3.33.

<p>Defined</p> <p>3</p>	<p>Terdapat kerangka manajemen risiko perusahaan yang mencakup semua risiko utama. Prinsip-prinsip manajemen risiko standar didefinisikan dan didokumentasikan, pelatihan dasar dilakukan. Proses manajemen risiko yang konsisten dengan komunikasi dan akuntabilitas ada di seluruh unit bisnis tetapi tidak semua proses telah diterapkan sepenuhnya. Kegiatan dan proses manajemen risiko telah terdefiniskan dan terstandarisasi serta menjadi bagian dari kegiatan perseroan.</p>	<p>There is an enterprise risk management framework that covers all major risks. Standard risk management principles are defined and documented, basic training is carried out. Consistent risk management processes with communication and accountability exist across business units but not all processes have been fully implemented. Risk management activities and processes have been defined and standardized and become part of the Company's activities.</p>
<p>Repeatable</p> <p>2</p>	<p>Terdapat kesadaran organisasi tentang pentingnya manajemen risiko. Terdapat beberapa prosedur formal untuk beberapa aktivitas manajemen risiko. Terdapat standarisasi proses manajemen risiko yang terbatas dan manajemen risiko masih belum dilakukan secara konsisten untuk setiap jenis risiko dan di setiap unit bisnis. Proses dasar sudah terbentuk dan dilakukan secara berulang dengan menggunakan aplikasi yang sama, namun masih bergantung pada inisiatif berlanjut dari pelaku proses.</p>	<p>There is organizational awareness of the importance of risk management. Some formal procedures have been established for use in some risk management activities. There is limited standardization of risk management process but risk management is still not performed consistently for each type of risk and in each business unit. Basic process has been established and is performed repetitively using the same application, but still depends on the ongoing initiative of the process agent.</p>
<p>Initial</p> <p>1</p>	<p>Kesadaran akan pentingnya manajemen risiko masih minimal atau tidak ada dan tidak ada proses yang diterapkan secara korporat. Manajemen risiko biasanya diserahkan kepada individu dan dilakukan secara <i>ad hoc</i>. Kegiatan manajemen risiko belum terdefiniskan, tidak terdokumentasi, dan tidak terorganisir. Proses bergantung pada kontribusi dari pelaku/individu utama yang dijalankan secara <i>ad hoc</i> dan informal. Manajemen risiko lebih reaktif daripada proaktif.</p>	<p>Awareness of the importance of risk management is minimal or non-existent and no processes are implemented corporately. Risk management is usually left to the individual and is done on an ad hoc basis. Risk management activities are undefined, undocumented, and unorganized. The process relies on contributions from key agent/individuals, who are run on an ad-hoc and informal basis. The risk management is more reactive than proactive.</p>



PETA JALAN MANAJEMEN RISIKO KORPORAT (ERM) ROAD MAP OF CORPORATE RISK MANAGEMENT (ERM)



Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait Hasil Penelaahan atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Direksi dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik manajemen risiko secara berkesinambungan, terutama pada area-area yang mencakup kapabilitas sumber daya, teknologi, dan metodologi yang dikembangkan sesuai *best practice* mengingat tantangan dan tuntutan dunia usaha, termasuk harapan para pemangku kepentingan terus meningkat di tengah situasi ekonomi dan bisnis yang tidak pasti.

Beberapa rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko antara lain dengan sosialisasi dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan ISO 37001:2016. Penerapan SMAP diimplementasikan dengan adanya sertifikasi SMAP di PT PII dengan ruang lingkup Area Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2022 juga dilakukan penyusunan dan pengembangan *Early Warning System* (EWS) dan *Key Risk Indicator* (KRI) Risiko Korporasi.

Selain itu, program pengembangan *Risk Officer* (*Risk Officer Development Program*) yang melibatkan seluruh divisi dilakukan dengan menyelenggarakan sertifikasi *Qualified Risk Management Officer* (QRMO) serta program Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (*Risk Maturity Assessment*) yang telah mulai diterapkan sejak tahun 2021. *Risk Officer Development Program* dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan dan Praktik Penerapan Proses Manajemen Risiko Korporat bersama Divisi Manajemen Risiko, yang mencakup pelaksanaan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) di seluruh divisi dan pelaksanaan program terkait pengelolaan dan pemantauan risiko secara terintegrasi.

Dengan pendampingan oleh Divisi Manajemen Risiko, *Risk Officer* diharapkan dapat meningkatkan perannya untuk membantu para pemilik risiko (*Risk Owner*) dalam mengelola, menjalankan, dan memantau pelaksanaan proses manajemen risiko di setiap divisi dan unit kerja masing-masing. Kemudian, melalui penerapan program *Risk Maturity Assessment*, Perseroan telah merumuskan Peta Jalan (*Road Map*) yang menggambarkan tahapan peningkatan maturitas manajemen risiko Perseroan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Untuk memastikan pencapaian sasaran dari tiap tahapan tersebut, Perseroan melakukan evaluasi secara berkala atas peta jalan Perseroan guna menjaga relevansinya dengan perkembangan dan dinamika manajemen risiko Perseroan.

Hasil pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko melalui penerapan Proses Manajemen Risiko Korporat dengan metodologi *Risk-Control Self Assessment* (RCSA) menunjukkan bahwa pengendalian risiko Perseroan sebagian besar telah sepenuhnya memadai.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the Review of the Adequacy of the Risk Management System

The Board of Commissioners has supervised and monitored the effectiveness of risk management implementation. Based on the results of the monitoring, the Board of Directors is considered to have demonstrated a strong commitment to improving the quality of the implementation of risk management practices on an ongoing basis, especially in areas that include resource capabilities, technology, and methodologies developed in accordance with best practices given the challenges and demands of the business world, including the expectations of stakeholders continue to increase in the middle of uncertain economic and business situations.

Some recommendations for improvements that have been made in an effort to improve the quality of risk management implementation include the socialization and implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) based on ISO 37001: 2016. The implementation of SMAP is implemented with the SMAP certification at IIGF with the scope of the Goods and Services Procurement Area. In 2022, the preparation and development of Early Warning System (EWS) and Corporate Risk Key Risk Indicators (KRI) were also carried out.

In addition, the Risk Officer Development Program involving all divisions is carried out by organizing the Qualified Risk Management Officer (QRMO) certification and the Risk Maturity Assessment program which has been implemented since 2021. The Risk Officer Development Program is implemented through Education and Training and the Practice of Implementing Corporate Risk Management Processes with the Risk Management Division, which includes the implementation of Risk Control Self-Assessment (RCSA) in all divisions and the implementation of programs related to integrated risk management and monitoring.

With assistance by the Risk Management Division, Risk Officer is expected to increase their role to assist the Risk Owners in managing, executing, and monitoring the implementation of risk management processes in each division and work unit. Furthermore, through the implementation of the Risk Maturity Assessment program, the Company has formulated a Road Map that describes the stages of improving the Company's risk management maturity within the next 5 years. To ensure the achievement of the objectives of each stage, the Company periodically evaluates the road map to maintain its relevance to the development and dynamics of the Company's risk management.

Results of supervision over the implementation of risk management through the implementation of the Corporate Risk Management Process with the Risk-Control Self Assessment (RCSA) methodology shows that the Company's risk controls are largely fully adequate.



AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT

Perseroan membentuk Fungsi Audit Internal sebagai mitra strategis yang memberikan masukan profesional, independen, objektif, bertanggung jawab, serta berperan sebagai penasihat yang terpercaya (*trusted advisor*) bagi Direksi dan jajaran Manajemen dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Pembentukan Audit Internal diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan nilai perusahaan melalui layanan audit dan konsultasi berbasis risiko yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan independen.

Pelaksanaan Audit Internal diharapkan dapat membantu Perseroan mendeteksi lebih dini permasalahan dan kelemahan di dalam unit kerja terutama bila terjadi penurunan atau penyimpangan terhadap kinerja dalam rangka mencapai sasaran perseroan khususnya pelaksanaan RKAP tahun berjalan. Hasil penelaahan Audit Internal kemudian dirangkum dan dibuatkan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan jajaran manajemen (*early warning system*).

Pejabat Audit Internal dan Dasar Pengangkatan

Fungsi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Perseroan telah menunjuk Deki Santo Wibowo untuk menjabat Kepala Audit Internal sejak tanggal 5 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-004/DIR/HC/0220 dan Surat Dewan Komisaris SR-01/PII/ DK/0220.



Periode Jabatan

Menjabat Sejak: 5 Maret 2020

The Company established the Internal Audit Function as a strategic partner that provides professional, independent, objective, responsible input, and act as a trusted advisor to the Board of Directors and Management in supporting the achievement of the company's vision, mission and objectives. The establishment of Internal Audit is expected to increase and maintain corporate value through risk-based audit and consulting services that are carried out in a systematic, objective, and independent manner.

The implementation of Internal Audit is expected to assist the Company in detecting problems and weaknesses in the work unit earlier, especially if there is a decrease or deviation in performance in order to achieve the company's goals, especially the implementation of the ABOP for the current year. Results of the Internal Audit review are then summarized and recommendations for improvement are made to the Board of Directors and management (*early warning system*).

Internal Audit Officer and Basis of Appointment

The Internal Audit function is led by the Head of Internal Audit Division who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The Company has been appointed Deki Santo Wibowo to serve as Head of Internal Audit since March 5, 2020 based on Decree of the Board of Directors SK-004/DIR/HC/0220 and Letter of the Board of Commissioners SR-01/PII/ DK/0220.

DEKI SANTO WIBOWO

Kepala Audit Internal Head of Internal Audit

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	46 tahun 46 years old
Domisili Domicile	Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Term of Office

Serving Since: March 5, 2020

Riwayat Pendidikan

- › Sarjana (S1) Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999).
- › Memperoleh *Certified Internal Auditor* (CIA) dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2014), *Certified Public Accountant* (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011), *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP) dari *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) (2013), *Certified Enterprise Risk Governance* (CERG) dari *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) (2017), *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) – *Foundation Certificate* dari Pearson Vue (2019). *Indonesia Internal Audit Practitioner* (IIAP) - dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2022), *Certified Internal Audit Executive* (CIAE) dari BPKP – GIACorpu (2022).

Education Background

- › Bachelor degree (S1) in Accounting from the Faculty of Economics, University of Indonesia (1999).
- › Obtained a *Certified Internal Auditor* (CIA) from *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2014), *Certified Public Accountant* (CPA) from the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) (2011), *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP) from *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) (2013), *Certified Enterprise Risk Governance* (CERG) from *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) (2017), *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) – *Foundation Certificate* from Pearson Vue (2019). *Indonesia Internal Audit Practitioner* (IIAP) - dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2022), *Certified Internal Audit Executive* (CIAE) dari BPKP – GIACorpu (2022).

Riwayat Profesi

Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Organization Development (OD) di Perseroan. Pengalaman di bidang audit dan keuangan termasuk sebagai Auditor Internal maupun Auditor Eksternal selama lebih dari 20 tahun. Karier sebagai Auditor Internal ditempuhnya selama 8 tahun sebagai *ICS Compliance Head*. Sebelum berkarier sebagai Auditor Internal, beliau berkarier di beberapa Kantor Akuntan Publik dan perusahaan terbuka.

Professional Career

Has serves as Head of Organization Development (OD) Division at IIGF. Experience in audit and finance including as an Internal Auditor and External Auditor for more than 20 years. He had a career as an Internal Auditor for 8 years as *ICS Compliance Head*. Prior to his career as an Internal Auditor, he worked in several Public Accounting Firms and publicly listed companies.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Audit Internal

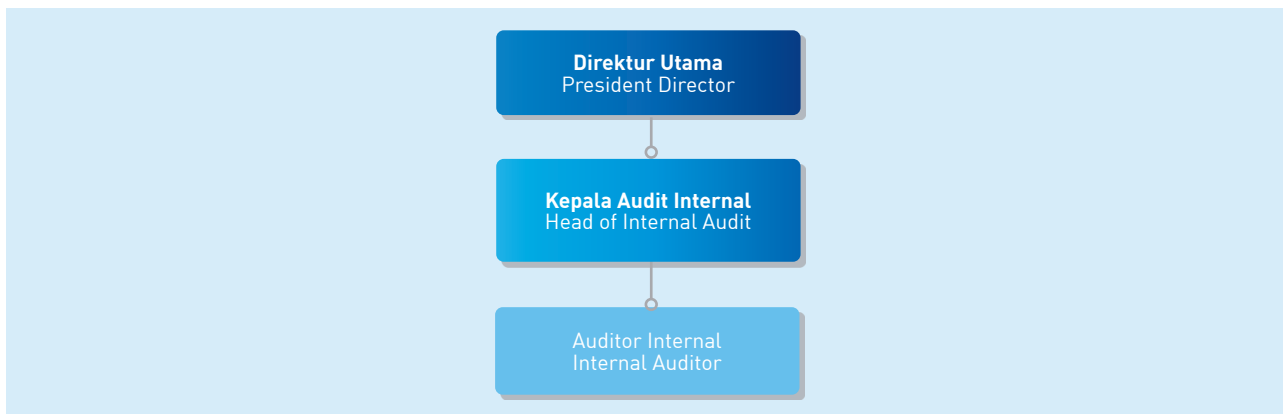
Fungsi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsionalnya, Kepala Divisi Audit Internal mendapatkan masukan dan arahan dari Komite Audit. Auditor yang duduk dalam Divisi Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.

Organizational Structure and Position of Internal Audit

The Internal Audit function is led by the Head of Internal Audit Division who is directly responsible to the President Director. The Head of Internal Audit Division is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. In carrying out his duties and functional responsibilities, the Head of Internal Audit Division receives input and direction from the Audit Committee. Auditors in the Internal Audit Division are directly responsible to the Head of Internal Audit Division.

Struktur Organisasi Internal Audit sebagai berikut:

Organizational Structure of the Internal Audit is as follows:



Divisi Internal Audit dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan atas pelaksanaan proses dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan perusahaan serta memberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan rencana, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi. Sebagai bagian pelaksanaan tugasnya, maka Divisi Internal Audit dapat melakukan pertemuan langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menyampaikan laporan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan hasil dan proses pengawasan.

The Internal Audit function is established to carry out supervisory duties on the implementation of processes and activities of all work units within the Company and provide recommendations for improvement in accordance with the plans, programs and policies set by the Board of Directors. As part of the implementation of its duties, the Internal Audit may conduct direct meetings with the President Director, the Board of Commissioners and the Audit Committee to submit reports on various matters related to the results and process of supervision.



Piagam Audit Intern

Dalam melaksanakan tugasnya, Fungsi Audit Internal Perseroan merujuk pada Piagam Audit Internal terbitan ketiga yang disahkan pada Desember 2019 oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Piagam tersebut disusun mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/PMK/.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pengawasan Menteri Keuangan.

Piagam Audit Internal mengatur lebih lanjut tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh fungsi Audit Internal Perseroan sesuai amanat Dewan Komisaris dan Direksi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara memadai dan efektif.

Prosedur operasi Audit Internal terdiri dari penelaahan dan pengujian operasional Perseroan sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Struktur, Persyaratan, dan Independensi Auditor Internal
- BAB III : Cakupan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Auditor
- BAB IV : Proses Penugasan Audit Internal
- BAB V : Penutup

SDM dan Sertifikasi Profesi

Kualitas hasil pengawasan oleh Audit Internal ditentukan oleh kompetensi SDM-nya. Untuk itu, sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta perkembangan industri. Berikut ini informasi sertifikasi profesi yang dimiliki personel Fungsi Audit Internal hingga akhir tahun 2022:

Jabatan Position	Jumlah Total	Jenjang Pendidikan Education Level		
	(orang) (Person)	D3/D4 Diploma	S1 Bachelor Degree	S2 Master Degree
SVP Internal Audit/Internal Audit SVP	1	-	v	-
AVP Internal Audit/Internal Audit AVP	1	-	-	v
AM Internal Audit/Internal Audit AM	1	-	v	-
Staf Internal Audit/Internal Audit Staff	1	-	v	-
Total	4	0	3	2

Internal Audit Charter

In performing their duties, the Company's Internal Audit Function refers to the third edition of the Internal Audit Charter which was approved in December 2019 by the Board of Directors and Board of Commissioners. The Charter was prepared in reference to the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK/.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in Company Companies (Persero) under the Supervision of the Minister of Finance.

The Internal Audit Charter further regulates the duties, authorities, and responsibilities, as well as the principles that must be implemented by the Company's Internal Audit function in accordance with the mandate of the Board of Commissioners and the Board of Directors as a reference in carrying out its duties adequately and effectively.

Internal Audit operating procedures consist of reviewing and testing IIGF's operations as a business organization, which broadly includes:

- CHAPTER I : Introduction
- CHAPTER II : Structure, Requirements, and Independence of Internal Auditors
- CHAPTER III : Scope, Authority, Responsibilities of Auditor
- CHAPTER IV : Internal Audit Assignment Process
- CHAPTER V : Closing

HR and Professional Certification

The quality of supervision results by Internal Audit is determined by the competence of its human resources. For this reason, professional certification is an important aspect for auditors to understand audit developments, especially related to compliance with laws and regulations and industry developments. The following is information on professional certifications held by personnel of the Internal Audit Function until the end of 2022:

Program Pengembangan Kompetensi

Perseroan memberikan kesempatan kepada personel Audit Internal untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi Audit Internal. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Audit Internal Perseroan sepanjang tahun 2022 telah diungkapkan pada bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan 2022 ini. Sementara itu, kegiatan program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Fungsi Audit Internal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Competency Development Program

The Company provides opportunities for Internal Audit personnel to participate in various competency development activities that can support the implementation of the Internal Audit function. Information regarding training and competency improvement activities participated by the Company's Head of Internal Audit throughout 2022 has been disclosed in the Company Profile chapter of this 2022 Annual Report. Meanwhile, competency development program activities followed by Internal Audit Function employees in 2022 were as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
Deki Santo Wibowo	SVP	Sertifikasi <i>Certified Public-private Partnerships Professional (CP3P) Level Foundation</i> Certified Public-private Partnerships Professional (CP3P) Level Foundation Certification	<i>Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Institute (IIGF Institute)</i>
		<i>Awareness Training BCMS ISO 22301:2019</i>	Divisi <i>Risk and Management</i> PT PII & PT Surveyor Indonesia (Persero) Risk and Management Division of IIGF & PT Surveyor Indonesia (Persero)
		<i>IIA Indonesia National Conference "Impactful Internal Audit In a Changing World"</i>	<i>The Institute of Internal Auditors</i> Indonesia (IIA Indonesia)
		Sertifikasi <i>Certified Internal Audit Executive (CIAE)</i> Certified Internal Audit Executive (CIAE) Certification	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
Oke Darmawireja	AVP	<i>Awareness Training BCMS ISO 22301:2019</i>	Divisi <i>Risk and Management</i> PT PII & PT Surveyor Indonesia (Persero)
		<i>Training Dual Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) & Qualified Risk Management Professional QRMP</i>	<i>Center for Risk Management Studies</i> (CRMS)
		Sertifikasi <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i> Qualified Risk Management Officer (QRMO) Certification	<i>Center for Risk Management Studies</i> (CRMS)
		Standar Audit Internal dan Kode Etik Profesi Internal Audit Standard and Professional Code of Conduct	Yayasan Pengembangan Internal Audit (YPIA)
		<i>Accelerating Digital Transformation and Harnessing ESG Implementation</i>	Yayasan Pengembangan Internal Audit (YPIA)
Ken Auva Maulida	Manager	<i>Workshop Standar Audit Internal & Kode Etik Profesi oleh Workshop Internal Control COSO 2013</i> Internal Audit Standard & Professional Code of Conduct Workshop by Internal Control COSO 2013 Workshop	Yayasan Pengembangan Internal Audit (YPIA)
		Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Lanjutan</i> Advanced Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	Yayasan Pengembangan Internal Audit (YPIA)
Faisal Dita Nurulloh	Staff	Sertifikasi <i>Certified Public-private Partnerships Professional (CP3P)</i> Certified Public-private Partnerships Professional (CP3P) Certification	IIGF Institute
		Pengenalan Pasar Modal & <i>Insight Market</i> Sektor Infrastruktur di Pasar Modal Introduction to Capital Market & Infrastructure Market Insight in Capital Market	PT Bursa Efek Indonesia
		Seminar Nasional Internal Auditor dan <i>Master Class</i> National Seminar on Internal Auditor and Master Class	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal BUMN (FKSPI BUMN) SOEs Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI BUMN)
		Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar</i> Basic Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)



Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal Tahun 2022

Sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Fungsi Audit Internal Perseroan telah melaksanakan sejumlah kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi Internal Audit Perseroan telah melaksanakan sejumlah kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Audit atas Proses *Monitoring* Proyek KPBU SPAM Pekanbaru
- Audit atas Proses Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi KPBU
- Audit atas Proses Penjaminan Pinjaman Proyek *Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central)*
- Audit atas Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Tingkat Entitas Tahun 2022

Selain tugas di atas sepanjang tahun 2022 Divisi Internal Audit juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Belanja dan Investasi Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021.
 - Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Periode Tahun 2022.
 - Pemutakhiran Data Entitas Pemeriksaan Periode Tahun 2022.
2. Pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 - Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI).
 - Penilaian *Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX)*.
 - Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Divisi Internal Audit PT PII Periode 2021.
 - Audit atas Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Kredit Modal Kerja (IJP KMK) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021.
 - Reviu Optimalisasi Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
3. Pendampingan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
 - Evaluasi atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian/Kepatuhan.
4. Pendampingan dalam pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT PII tahun 2022, IKU Korporasi, Direksi dan Dewan Komisaris serta kepatuhan oleh Kantor Akuntan Publik.
5. Melaksanakan Penilaian Kapabilitas Divisi Internal Audit Periode 2021.
6. Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal maupun eksternal.
7. Melaksanakan pelaporan kegiatan audit dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit kepada Komite Audit per triwulan.
8. Berperan aktif mendukung tim Sekretaris Perusahaan dalam meyakinkan kelancaran pelaksanaan evaluasi dan penilaian *Good Corporate Governance (GCG)* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Internal Audit Duties and Responsibilities Implementation Report in 2022

As an implementation of its duties and responsibilities, the Internal Audit Division of the Company has carried out a number of activities.

The Company's Internal Audit Division has carried out a number of activities with details as follows:

- Audit of the Monitoring Process of SPAM Pekanbaru PPP Project
- Audit of PPP Project Preparation and Transaction Advisory process
- Audit on Loan Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central) Project Loan Guarantee Process
- Audit on the Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP)
- Evaluation of Internal Control System Implementation Entity Year 2022

In addition to the above tasks throughout 2022, the Internal Audit Division was also involved in the following activities:

1. Assistance to the Supreme Audit Agency (BPK)
 - Examination with Specific Purposes on Revenue, Expenditure and Investment from 2019 to Semester I of 2021.
 - Follow-up Monitoring of Audit Recommendations BPK Period 2022.
 - Updating Audit Entity Data for the Year Period 2022.
2. Assistance from the Financial and Development Supervisory Agency Development (BPKP)
 - Review of Increased Use of Domestic Products (P3DN) in the framework of Proud to be Made in Indonesia (BBI).
 - Assessment of Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX).
 - Quality Assurance of Capability Self-Assessment IIGF Internal Audit Division 2021 Period.
 - Audit of Payment of Fees for Capital Credit Guarantee Services Working Capital Credit Guarantee Payment (IJP KMK) in the context of National Economic Recovery (PEN) Year 2021.
 - Review of Optimizing the Utilization of Public Private Partnership (PPP).
3. Assistance to the Inspectorate General of the Ministry of Finance
 - Evaluation of Governance, Risk Management, and Control/Compliance.
4. Assistance in conducting audits on IIGF's 2022 Financial Statements, Corporate KPIs, Board of Directors and Board of Commissioners and compliance by the Public Accounting Firm.
5. Carrying out an Internal Audit Division Capability Assessment 2021 Period.
6. Carry out follow-up monitoring activities on internal and external audit recommendations.
7. Reporting audit activities and monitoring follow-up of audit recommendations to the Audit Committee per quarterly.
8. Actively support the Corporate Secretary team in ensuring the smooth implementation of evaluation and assessment of Good Corporate Governance (GCG) evaluation and assessment by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

9. Penyelenggaraan Webinar Forum GRC 2022: Batasan Gratifikasi dan Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower*.
10. Pemutakhiran Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara.

Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Divisi Internal Audit

Untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola Perseroan yang baik, Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas Divisi Internal Audit di Perseroan, sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2022 Divisi Internal Audit menyelesaikan penilaian mandiri kapabilitas Divisi Internal Audit Periode 2021 mengacu pada Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atas hasil penilaian mandiri tersebut dilakukan penjaminan kualitas oleh BPKP yang kemudian menerbitkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Divisi Internal Audit PT PII Periode 2021. Berdasarkan hasil penjaminan kualitas oleh BPKP, kapabilitas Divisi Internal Audit PT PII Periode 2021 berada pada level 3 (*integrated*) dengan catatan. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan Divisi Internal Audit PT PII telah menunjukkan bahwa Praktik Profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, Divisi Internal Audit mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

9. Organization of GRC 2022 Forum Webinar: Limits of Gratification and Legal Protection of Whistleblowers.
10. Updating of State Loss Settlement Guidelines.

Quality Assurance Report on Self-Assessment Internal Audit Division Capability Self-Assessment

To accelerate the improvement of the quality of good corporate governance quality of good corporate governance, the Board of Directors is obliged to maintain and evaluate quality of the Internal Audit Division in the Company, as a form of Company's commitment to realize this, in 2022 the Internal Audit Division completed a self-assessment of the capability self-assessment of the Internal Audit Division for the 2021 Period referring to Technical Guidelines for Self-Assessment of SPI Capability issued by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), on and Development (BPKP), on the results of the self-assessment the results of the self-assessment are carried out quality assurance by BPKP which then issued a Quality Assurance Report on the Capability Self-Assessment of IIGF Internal Audit Division 2021 Period. Based on the results of quality assurance by BPKP, capability of IIGF's Internal Audit Division for the 2021 Period is at level 3 (*integrated*) with notes. at level 3 (*integrated*) with notes. With these results it can be concluded that IIGF's Internal Audit Division has shown that Professional Practices and internal audit have been established. that Professional Practices and internal audits have been established uniformly and have been aligned with standards, the Internal Audit Division is able to assess the efficiency, effectiveness, and economy of the company. The Internal Audit Division is able to assess the efficiency, effectiveness, and economy of a program/activity and is able to provide consulting on governance.



AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK EXTERNAL AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANT

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan PT PII dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik

1. Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit.
Tindak lanjut Komite Audit:
 - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit eksternal.
 - Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris melakukan telaah atas rekomendasi Komite Audit, melakukan pembahasan dengan organ Dewan Komisaris dan calon auditor eksternal/Akuntan Publik.
3. Dewan Komisaris menyampaikan surat rekomendasi kepada Pemegang Saham.
4. Penetapan Akuntan Publik oleh RUPS. [Jika Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk auditor eksternal/Akuntan Publik, maka Dewan Komisaris akan melakukan penunjukan auditor eksternal/Akuntan (Publik)].

Daftar Akuntan Publik

Sebagai komitmen pengungkapan kepatuhan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 28 Februari 2008, berikut informasi mengenai KAP Laporan Keuangan Perseroan dalam 5 (lima) tahun berturut-turut.

Daftar Akuntan Publik Dalam Periode 2018-2022

Periode Period	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Lingkup Penugasan Scope of Assignment	Jasa Lainnya Other Services	Komisi yang Dibayarkan Fee
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partner (PricewaterhouseCoopers) Permission No. KEP-241/KM.1/2015	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA Izin Praktik Akuntan Publik No. AP.0229 Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA License of Public Accountant No. AP.0229	Jasa audit laporan keuangan Audit services of financial statements	Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris. Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62) as well as Assurance Engagement services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors and Board of Commissioners.	Rp981.852.850

The Company has appointed an external auditor/public accountant from a reputable Public Accounting Firm to carry out an independent oversight function on the financial aspects of IIGF.

Mechanism of Appointment to Determination of Public Accountant

1. Submission of directives and assignments from the Board of Commissioners to the Audit Committee.
Follow-up of the Audit Committee:
 - Evaluating the implementation of the external audit.
 - Submitting a report to the Board of Commissioners.
2. The Board of Commissioners reviews the recommendations of the Audit Committee, conducts discussions with the Board of Commissioners organs and prospective external auditors / Public Accountants.
3. The Board of Commissioners submits a recommendation letter to the Shareholders.
4. Determination of the Public Accountant by the GMS. [If the Shareholders authorize the Board of Commissioners to appoint the external auditor/Public Accountant, then the Board of Commissioners will appoint the external auditor/Public Accountant].

List of Public Accountants

As a commitment to disclose compliance with the Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 dated February 28, 2008, the following is information regarding the KAP of Financial Reports of the Company in 5 (five) consecutive years.

List of 2018-2022 Public Accountants

Periode Period	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Lingkup Penugasan Scope of Assignment	Jasa Lainnya Other Services	Komisi yang Dibayarkan Fee
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partner (PricewaterhouseCoopers) Permission Number: KEP-241/KM.1/2015	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA Izin Praktik Akuntan Publik No. AP.0229 Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA License of Public Accountant No.AP.0229	Jasa audit laporan keuangan Audit services of financial statements	Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris. Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62) as well as Assurance Engagement services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors and Board of Commissioners.	Rp865.000.000
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partner (PricewaterhouseCoopers) Permission Number: KEP-241/KM.1/2015	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA Izin Praktik Akuntan Publik No. AP.0229 Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA License of Public Accountant No. AP.0229	Jasa audit laporan keuangan Audit services of financial statement	Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris. Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62) as well as Assurance Engagement services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors and Board of Commissioners.	Rp860.000.000
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partner (PricewaterhouseCoopers) Permission Number: KEP-241/KM.1/2015	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA Izin Praktik Akuntan Publik No. AP.0222 Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA License of Public Accountant No. AP.0222	Jasa audit laporan keuangan Audit services of financial statement	Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris. Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62) as well as Assurance Engagement services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors and Board of Commissioners.	Rp864.000.000
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partner (PricewaterhouseCoopers) Permission Number: KEP-241/KM.1/2015	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA Izin Praktik Akuntan Publik No. AP.0222 Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA No.Izin License of Public Accountant No. AP.0222	Jasa audit laporan keuangan Audit services of financial statement	Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris. Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62) as well as Assurance Engagement services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors and Board of Commissioners.	Rp800.000.000



SISTEM PENGENDALIAN INTERN INTERNAL CONTROL SYSTEM

Perseroan menerapkan 2 (dua) aspek pengendalian internal, yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Kerangka kerja pengendalian internal yang berlaku di Perseroan mengadopsi COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)-*Internal Control Integrated Framework*. Sebagaimana diatur dalam COSO, pengendalian internal merupakan sebuah sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

COSO – *Internal Control Framework* terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian, yakni meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*); dan
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Penerapan sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2022 yang mengacu pada COSO dijelaskan berikut ini:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
Aspek Lingkungan Pengendalian merupakan suatu kondisi dalam perusahaan yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian berdampak pada kesadaran akan pentingnya penerapan pengendalian oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan serta menjaga lingkungan pengendalian yang mengarah pada terbentuknya perilaku positif dan kondusif untuk memfasilitasi penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen yang sehat dalam lingkungan kerjanya. Upaya tersebut diwujudkan melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal perusahaan yang efektif.
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
Aspek Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian proses, yang terdiri dari pengidentifikasi, pengenalan, penelaahan, dan penilaian pengelolaan risiko yang terkait dengan usaha dan bisnis Perseroan. Penilaian risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang teridentifikasi terhadap

The Company's internal control is applied to 2 (two) aspects, namely operational control and financial control. The internal control framework applicable at IIGF adopts the COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)-*Internal Control Integrated Framework*. As stipulated in COSO, internal control is a system or process carried out by the Board of Commissioners, the Board of Directors, management, and employees in a company, to provide reasonable assurance regarding the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with applicable laws and regulations.

COSO - *Internal Control Framework*, consists of 5 (five) control components, namely:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication; and
5. Monitoring.

Throughout 2022, the Company implemented an internal control system that refers to the COSO as follows:

1. Control Environment
Control Environment is a condition in a company that influences the effectiveness of internal control. The control environment influences the awareness of the importance of control by the people involved in it.

The Management shall create and maintain the control environment that lead to positive and conducive behavior to the implementation of a sound internal control and management system in the work environment. It is realized through:

- a. Enforcement of integrity and ethical values.
 - b. Commitment to competency.
 - c. Conducive leadership.
 - d. Establish an organizational structure that suits the company/organization needs.
 - e. Delegation of appropriate authority and responsibilities.
 - f. The formulation and application of sound policies regarding the development of human resources.
 - g. The realization of the role of an effective internal control apparatus in a company.
2. Risk Assessment
Risk assessment is a process of identifying, recognizing, analyzing and assessing risk management related to the Company's business and activities. Risk assessment is carried out to determine the impact of identified risks on the achievement of the Company's goals and objectives as

pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan sebagai acuan dalam mengembangkan kegiatan pengendalian yang diperlukan dalam meminimalkan risiko. Proses penilaian risiko dimulai dengan menetapkan maksud dan tujuan Perusahaan yang jelas dan konsisten, mengidentifikasi secara efisien dan efektif terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar Perusahaan dan terakhir melakukan analisis untuk mengetahui dampak dari risiko serta pengendalian yang diperlukan.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan Pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa arahan pimpinan untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi telah dilakukan selama proses penilaian risiko.

Kebijakan pengendalian dirumuskan untuk memberikan arah kegiatan yang seharusnya dikerjakan serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan prosedur. Prosedur dalam hal ini adalah rangkaian urutan tindakan, yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dengan menggunakan peralatan dan waktu tertentu dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kegiatan pengendalian diselenggarakan dengan memperhatikan ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi Perusahaan, dan setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Diutamakan pada kegiatan pokok Perseroan.
- b. Harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Perseroan atau bisnis inti Perseroan.
- d. Seluruh kegiatan memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara tertulis.
- e. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan.

Selain itu, untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan bisnis yang ada, Perseroan melakukan evaluasi atas rangkaian kegiatan pengendalian yang diterapkan. Rangkaian kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. *Review* atas kinerja Perseroan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik aset.
- e. Penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Pelaksanaan atau otorisasi atas kejadian dan transaksi.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya yang dimiliki.
- j. Dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah dan digunakan untuk menjadi referensi bagi pengambilan keputusan sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perseroan. Sementara itu, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

a reference in developing the control activities needed to minimize risk. Risk assessment begins with the establishment of clear and consistent goals and objectives of the Company, identifying the risks efficiently and effectively that may hinder the achievement of these objectives, both from inside and outside of the Company and analyzing to determine the impact of the risks and controls needed.

3. Control Activities

Control activities are the third element of internal control. Control activities are policies and procedures, which can assist the Company in ensuring the implementation of leaders' directives to reduce the risks that have been identified during the risk assessment process.

Policies are made to direct what should be done and serve as a basis for the preparation of procedures. The procedure is a sequence of actions, carried out by one or several people with certain equipment and time in carrying out certain activities. Control activities are carried out according to the size, complexity, nature of the Company's duties and functions, at least have the following characteristics:

- a. Prioritized on the main activities of the Company.
- b. Must be linked to the risk assessment process.
- c. The control activities chosen are adjusted to the specific nature of the Company or its core business.
- d. All activities have policies and procedures established in written.
- e. The established policies and procedures must be implemented.

In addition, to ensure its relevance to existing business developments, the Company evaluates the set of control activities implemented. The series of control activities consist of:

- a. Review of the Company's performance.
- b. Development of human resources.
- c. Control over management of information system.
- d. Control over physical assets.
- e. Determination and review of indicators and performance measures.
- f. Segregation of duties.
- g. Authorization of transactions and important events.
- h. Accurate and timely achievement of transactions and events.
- i. Restricted access to resources and their records.
- j. Good documentation of internal control system as well as important transactions and events.

4. Information and Communication

Information is data that has been processed and used for decision making in carrying out the duties and functions of the Company. Communication is the process of delivering messages or information using certain symbols or signs both directly and indirectly to get feedback.



Dengan demikian, sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan yang terstruktur dan sistematis mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib menyampaikan laporan yang memiliki informasi yang relevan serta akurat dan andal baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa internal serta eksternal. Informasi tersebut harus disimpan dan kemudian dikomunikasikan kepada pimpinan Perseroan dan jajaran terkait lainnya di seluruh Perseroan yang memerlukan dalam bentuk yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan (*monitoring*) adalah proses penilaian yang dilakukan atas kualitas sistem pengendalian internal perusahaan, termasuk menerapkan fungsi Audit Internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi. Pemantauan dilaksanakan secara berkesinambungan, serta melalui evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit dan *review* lainnya.

Pemantauan berkelanjutan terdiri dari kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, komparasi, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, evaluasi terpisah berupa kegiatan penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu yang mempertimbangkan hasil penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah dapat diselenggarakan secara mandiri, *review*, dan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian internal serta mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Perusahaan. Divisi Internal Audit membantu Direktur Utama untuk menilai keandalan dan kecukupan pengendalian internal Perseroan dan tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan perundangan (*compliance*), keandalan pelaporan keuangan (*reporting*), serta efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan (*operation*), tetapi juga aspek lainnya yang berdampak pada tata kelola perusahaan (*governance*). Profil mengenai Kepala Divisi Internal Audit dapat dilihat pada bagian Audit Internal dari Laporan Tahunan ini.

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai.

The information and communication system is a process of presenting reports on operational, financial activities as well as adherence and compliance with the laws and regulations. The Company shall have relevant and reliable information, both financially and non-financially, related to internal and external events. The information must be recorded and disseminated to the Company's leaders and others who may need it within the Company in certain forms that allow the person concerned to carry out internal control and operational responsibilities.

5. Monitoring

Monitoring is the process of evaluating the quality of the Company's internal control system, including the Internal Audit function at every level and unit in the organizational structure. Monitoring is carried out continuously, through separate evaluations, and follow-up on audit recommendations and other reviews.

Continuous monitoring is carried out through routine management activities, supervision, comparison, reconciliation, and other actions related to the implementation of duties. Separate evaluation is an assessment of the quality of the performance of the internal control system with a specific scope and frequency based on risk assessment and the effectiveness of ongoing monitoring procedures. Separate evaluations are conducted through self assessment, review, and testing of the effectiveness of internal control system, and are carried out by considering the scope and frequency of the evaluation, methodology, and resources.

Internal Control System Implementer

The Board of Directors is responsible for implementing internal control system to achieve the Company's objectives. of the Company. The Internal Audit Division assists the President Director to assess the reliability and adequacy of the Company's internal controls and not only limited to compliance with of the Company and is not only limited to compliance with laws and regulations (compliance), the reliability of financial reporting (reporting), as well as the efficiency and effectiveness of the Company's operations. but also other aspects that have an impact on the Company's performance on corporate governance. Profile of the Head of Internal Audit Division can be found in the Internal Audit section of this Annual Report. section of this Annual Report.

Evaluation of the Implementation of the Internal Control System

The Board of Commissioners and Board of Directors are committed to ensuring that corporate governance is well implemented as a basis for the basis for achieving the goal of maintaining and increasing the value of the of the company. One of the implementations of good corporate governance implementation is to ensure that the internal control system system has been implemented adequately.

Pada tahun 2022, evaluasi atas *Entity Level Control* dilaksanakan pada 28 Oktober sampai dengan 9 Desember 2022, dengan ruang lingkup penilaian meliputi seluruh proses pengendalian tingkat entitas (*Entity Level Control*) yang terdapat di dalam lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selama periode tahun 2022.

Berikut penjelasan metodologi yang digunakan untuk menilai kecukupan penerapan sistem pengendalian internal tingkat entitas:

1. Penelaahan dokumen dan data;
2. Observasi dan wawancara dengan manajemen dan karyawan; dan
3. Survei penerapan dengan manajemen dan karyawan.

Berdasarkan hasil penilaian (evaluasi) tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Perseroan telah dilaksanakan secara baik.

Studi Banding/Benchmarking

Dalam rangka untuk mengukur dan membandingkan kinerja terhadap aktivitas atau kegiatan serupa pada unit kerja yang sejenis pada perusahaan lain, PT PII telah mengikuti Konferensi Nasional Audit Internal yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia).

Selain itu PT PII juga aktif sebagai pengurus dan anggota dari Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Badan Usaha Milik Negara (FKSPI BUMN).

Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, Divisi Audit Internal melakukan pemantauan dan menindaklanjuti tanggapan atas rekomendasi dari hasil audit internal & eksternal melalui prosedur peninjauan dan verifikasi atas perkembangan status tindakan perbaikan yang dijalankan oleh unit kerja terkait.

Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk menilai objektivitas pelaksanaan rekomendasi temuan dan melakukan verifikasi atas keakurasian data baik tertulis maupun fisik di lapangan sehubungan laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh unit kerja terkait.

Perseroan akan mendistribusikan Dokumen Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara berkala setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mendapatkan perhatian dari pihak manajemen. Pelaksanaan rekomendasi hasil audit internal di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Pada semester 2 tahun 2022, PT PII telah menyelesaikan pemenuhan seluruh rekomendasi tindak lanjut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pendapatan, Belanja, dan Investasi Tahun 2019 s.d. Semester I tahun 2021 pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) No. 12/LHP/XV/02/2022 tertanggal 11 Februari 2022.

In 2022, evaluation of Entity Level Control was carried out in October 28 to December 9, 2022, with the scope of the assessment covering all entity level control processes within PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) during the 2022 period.

The following is an explanation of the methodology used to assess the adequacy of the implementation of the entity-level internal control system:

1. Review of documents and data;
2. Observation and interviews with management and employees; and
3. Implementation survey with management and employees.

Based on results of the assessment (evaluation) in 2022, it was concluded that the implementation of the Company's internal control system has been running well in accordance with the objectives of implementing internal control.

Comparative Study/Benchmarking

In order to measure and compare performance against similar activities or activities in similar work units similar work units in other companies, IIGF has participated in the National Conference on Internal Audit organized by National Internal Audit Conference organized by The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia).

In addition, IIGF is also active as an administrator and member of the Forum for Communication of Internal Audit Units of State-Owned Enterprises (FKSPI BUMN).

Monitoring of the Follow-up on Findings

To ensure the effectiveness of the implementation of the internal control system, the Internal Audit Division monitors and follows up on responses to recommendations from internal & external audit results through review and verification procedures on the progress of the status of corrective actions carried out by the relevant work units.

This monitoring activity aims to assess the objectivity of the implementation of the recommendation findings and verify the accuracy of both written and physical data in the field in connection with the follow-up report submitted by the relevant work unit.

The Company will distribute the Follow-up Report Document on Internal and External Audit Recommendations to the President Director and Audit Committee periodically at least once every 3 (three) months to get the attention of the management. The implementation of internal audit recommendations in 2022 was as follows:

1. Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI)
In the 2nd semester of 2022, IIGF has completed fulfillment of all follow-up recommendations related to the Results of Examination with Specific Purposes (PDTT) on Revenues, Expenditures, and Investments for the Year 2019 up to Semester I of 2021 at PT Penjaminan Infrastruktur I of 2021 at PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) No. 12/LHP/XV/02/2022 dated February 11, 2022.



2. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) Sampai dengan semester 2 tahun 2022, PT PII telah menyelesaikan 90% rekomendasi tindak lanjut yang harus diselesaikan di 2022 terkait Laporan Hasil Evaluasi atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian/Kepatuhan pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) No. LAP-21/IJ.5/2022 tertanggal 18 November 2022.

2. Inspectorate General of the Ministry of Finance (Itjen Kemenkeu) As of the 2nd semester of 2022, IIGF has completed 90% of follow-up recommendations that must be completed in 2022 related to the Evaluation Report on Governance, Risk Management, and Control/Compliance on PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) No. LAP-21/IJ.5/2022 dated November 18, 2022.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait Hasil Penelaahan atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

Divisi Internal Audit merupakan Satuan Pengendali Internal yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi untuk memastikan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di PT PII. Divisi Internal Audit juga membantu Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dalam hal *monitoring* serta evaluasi atas kinerja dan proyek yang telah dijamin oleh PT PII.

Internal Audit is an Internal Control Unit established in order to support the implementation of the duties of the Board of Directors to ensure the effectiveness of the implementation of the internal control system at IIGF. The Internal Audit Unit also assists the Board of Commissioners and/or the Audit Committee in monitoring and assessing performance and projects that have been guaranteed by IIGF.

Pada tahun 2022, Internal Audit telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sesuai rencana penugasan yang disusun di awal tahun 2022. Berikut rincian kegiatan Internal Audit selama periode tersebut:

In 2022, Internal Audit has carried out a number of activities as part of the implementation of its duties in accordance with the assignment plan prepared at the beginning of 2022. The following are details of Internal Audit activities during the period:

1. Membantu Komite Audit dalam melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan auditor eksternal dan internal.
2. Melakukan pendampingan selaku koordinator audit atau penugasan lain yang dilakukan oleh auditor eksternal.
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepanitiaan penyelenggaraan *Workshop Forum Governance Risk and Compliance (GRC) 2022* berkerja sama dengan *Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan*.
4. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan melakukan Audit Internal atas Implementasi SMAP.

1. Assist the Audit Committee in monitoring and evaluation of follow-up findings of external and internal auditors,
2. Assisting as audit coordinator or other assignments conducted by external auditors.
3. Actively participate in committee activities organizing Governance Risk and Compliance (GRC) Forum Workshop 2022 in cooperation with Special Mission Vehicle (SMV) Ministry of Finance.
4. Actively participated in the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) by conducting an Internal Audit on the SMAP Implementation.

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat kasus kerugian negara pada PT PII sehingga tidak terdapat penyelesaian kerugian negara yang memerlukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut.

Throughout 2022 there were no cases of state losses at IIGF so that there are no state loss settlements that require follow-up monitoring and evaluation.

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF SIGNIFICANT CASES AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Permasalahan Hukum

Perkara yang Dihadapi Perseroan

Pada tahun 2022, Perseroan menghadapi/tidak menghadapi permasalahan hukum yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Permintaan keterangan dari Ombudsman RI

Sebagai bentuk tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh PT Motomo Karya Persada terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Perseroan. Selanjutnya pada 7 Juni 2022, Ombudsman menyampaikan hasil Laporan Akhir Pemeriksaan dengan kesimpulan akhir bahwa tidak ditemukannya maladministrasi dan permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan tidak berdampak terhadap kondisi keuangan Perseroan.

2. Somasi kepada Perseroan dari PT Motomo Karya Persada

Pada 12 Desember 2022, PT Motomo Karya Persada melalui kuasanya menyampaikan somasi kepada Perseroan berkaitan dengan klaim kewajiban Perseroan kepada PT Motomo Karya Persada, Somasi ini selanjutnya telah ditanggapi oleh Perseroan melalui kuasanya yang pada intinya menjelaskan bahwa Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun kepada PT Motomo Karya Persada dan permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan tidak berdampak terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Perkara yang Dihadapi Entitas Anak

Hingga per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki entitas anak sehingga Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai perkara hukum yang melibatkan Entitas Anak.

Perkara yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2022, Direksi maupun Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak menghadapi perkara hukum.

Sanksi Administrasi dari Regulator

Hingga 31 Desember 2022, Perseroan tidak menerima sanksi administrasi dari Regulator dalam bentuk apapun.

Legal Issue

Cases Faced by the Company

In 2022, the Company faced/did not face any legal issues which are further described as follows:

1. Request for information from Ombudsman RI

As a form of following-up the settlement of public reports/complaints submitted by PT Motomo Karya Persada regarding alleged maladministration by IIGF. Furthermore, on June 7, 2022, the Ombudsman submitted the results of the Final Inspection Report with the final conclusion that no maladministration was found by IIGF and legal issues faced by the Company have no impact on the Company's financial condition.

2. Somation to IIGF from PT Motomo Karya Persada

On December 12, 2022, PT Motomo Karya Persada through its attorney submitted a subpoena to IIGF regarding IIGF's liability claim to PT Motomo Karya Persada, this subpoena was subsequently responded by IIGF through its attorney which basically explained that IIGF did not have any obligation to PT Motomo Karya Persada and legal issues faced by the Company have no impact on the Company's financial condition.

Cases Faced by Subsidiaries

As of December 31, 2022, IIGF did not have any subsidiaries so that the Company not provide information regarding legal cases involving subsidiaries.

Cases Faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors

Throughout 2022, there were no legal cases involving the incumbent Board of Directors or Board of Commissioners.

Administrative Sanctions from Regulators

Until December 31, 2022, the Company did not receive any administrative sanctions from the Regulator in any form.



AKSES DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN ACCESS TO THE COMPANY'S DATA AND INFORMATION

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan pengungkapan informasi terkini terkait Perseroan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara tepat waktu, akurat serta lengkap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan komitmen Perseroan untuk melaksanakan prinsip transparansi informasi. Perseroan dalam hal ini telah memberikan akses seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan dan investor untuk memperoleh informasi tentang Perseroan melalui situs resmi korporat, <https://ptpii.co.id/>.

Informasi pada situs web Perseroan

Melalui situs web Perseroan, para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi berikut ini:

1. Informasi pemegang saham;
2. Isi kode etik;
3. Informasi RUPS yang terdiri dari mata acara, ringkasan risalah RUPS, informasi tanggal pengumuman RUPS dan tanggal ringkasan RUPS diumumkan;
4. Profil Dewan komisaris dan Direksi; dan
5. Piagam Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite dan unit audit internal.

Siaran Pers

Sebagai bagian dari transparansi informasi, Perseroan juga menerbitkan siaran pers yang memuat informasi penting terkait kegiatan Perseroan dan dapat diakses melalui situs Perseroan.

Berikut rincian siaran pers yang diterbitkan sepanjang tahun 2022:

No	Tanggal Date	Judul Title
1	20 Januari 2022 January 20, 2022	Press Release Kegiatan PT PII bersama Jamdatun Press Release - IIGF's Activity with Jamdatun
2	30 Januari 2022 January 30, 2022	Press Release PT PII Berikan Penjaminan pada Proyek Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap Press Release - IIGF Provides Guarantee for Gedebage Tasikmalaya Cilacap Toll Road Project
3	8 Maret 2022 March 8, 2022	Press Release Penandatanganan Proyek Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi Press Release - the Signing of Gilimanuk – Mengwi Toll Road Project
4	13 Maret 2022 March 13, 2022	Press Release Program CSR Urban Farming Press Release - Urban Farming CSR Program
5	19 April 2022 April 19, 2022	Press Release Indonesia Best CEO Awards 2022 Press Release - Indonesia Best CEO Awards 2022
6	19 Mei 2022 May 19, 2022	Press Release Penandatanganan Proyek SREAP Press Release - the Signing of SREAP Project

The Company is committed to disclosing the latest information related to the Company to shareholders and other stakeholders in a timely, accurate and complete manner in accordance with applicable laws and regulations.

Disclosure of information to all stakeholders is the Company's commitment to implement the principle of information transparency. The Company in this case has provides the widest possible access for stakeholders and investors to obtain information about the Company through the official corporate website, <https://ptpii.co.id/>.

Information on the Company's website

Through the Company's website, stakeholders can obtain the following information:

1. Shareholder information;
2. Contents of the code of ethics;
3. GMS information consisting of agenda, summary of the minutes of the GMS, information on the date of the announcement of the GMS and the date on which the summary of the GMS was announced;
4. Profile of the Board of commissioners and the Board of Directors; and
5. Charter of the Board of Commissioners, the Board of Directors, committees and internal audit unit.

Press Conference

As part of information transparency, IIGF also issues press releases containing important information related to the Company's activities and can be accessed through the Company's website.

The following are details of press releases issued throughout 2022:

No	Tanggal Date	Judul Title
7	29 Mei 2022 May 29, 2022	<i>Press Release - Kemenkeu dan PT PII Program CSR Proyek KPBU TPA Sampah Regional Piyungan</i> Press Release – Ministry of Finance and IIGF CSR Program on PPP Final Disposal Site Project at Piyungan Region
8	26 April 2022 April 26, 2022	<i>Press Release - PT PII Bersama Pemprov Jawa Timur Berpartisipasi Mendorong Pemulihan Perekonomian Masyarakat di Jawa Timur</i> Press Release – IIGF and East Java Regional Government Participate in Encouraging Economic Recovery of the Community
9	1 Juli 2022 July 1, 2022	<i>Pembuatan Materi Green Economic Forum</i> Preparation of Green Economic Forum Material
10	14 Juni 2022 June 14, 2022	<i>Siaran Pers Bersama Kemenkeu, Kementerian BUMN dan PT PII Workshop "Implementasi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atas Penjaminan BUMN dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur"</i> Joint Press Release between the Ministry of Finance, Ministry of SOEs and IIGF Workshop "Implementation of State Financial Risk Management on SOE Guarantee for the Acceleration of Infrastructure Development
11	6 Juli 2022 July 6, 2022	<i>Press Release "PPP Agency of the Year 2022" The Asset Awards 2022</i>
12	7 Juli 2022 July 7, 2022	<i>Press Release Indonesia Infrastructure Roundtable ke-23 Yogyakarta</i> Press Release – 23 th Indonesia Infrastructure Roundtable, Yogyakarta
13	13 Juli 2022 July 13, 2022	<i>Materi Brief Sheet Media Luncheon</i> Brief Sheet Media Luncheon Material
14	20 Juli 2022 July 20, 2022	<i>Press Release Simposium V UNIID 2022 - Kolaborasi Keilmuan dan Kepakaran dalam Mendukung Infrastruktur</i> Press Release – Symposium V UNIID 2022 – Scientific and Expertise Collaboration in Supporting Infrastructure
15	19 September 2022 September 19, 2022	<i>Press Release Penandatanganan Proyek Pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) Madiun</i> Press Release – Signing of Street Light Construction Project (APJ) Madiun
16	20 September 2022 September 20, 2022	<i>Press Release Seremonial Program CSR Pengolahan Sampah Bio Konversi DIY</i> Press Release – Ceremonial CSR Program on Bio-Conversion Waste Management, DIY
17	9 Oktober 2022 October 9, 2022	<i>Joint Press Release Kemenkeu SMV T20 Special Event Washington DC PT SMI PT PII IIF</i>
18	18 Oktober 2022 October 18, 2022	<i>Press Release Sebagai Bagian T20 PT PII Dukung Penuh Presidensi G20</i> Press Release - As Part of T20, IIGF Fully Supports the G20 Presidency
19	18 Oktober 2022 October 18, 2022	<i>Press Release IIGF Fully Support G20 Presidency</i>
20	24 Oktober 2022 October 24, 2022	<i>Press Release Sinergi PT PII PT BPI dan Pemkab Batang terkait Program CSR</i> Press Release – Synergy between IIGF PT BPI and Batang Regional Government related to CSR Program
21	16 September 2022 September 16, 2022	<i>Materi interview Talkshow Focus on Infra Evening Up "Kebut Pembangunan Infrastruktur untuk Pemulihan Ekonomi" bersama CNBC</i> Interview Material of Talkshow Focus on Infra Evening Up "Accelerating Infrastructure Development for Economic Recovery" with CNBC
22	30 Oktober 2022 October 30, 2022	<i>Press Statement Menteri Keuangan RI Proyek KPBU Proving Ground Bekasi</i> Press Statement – Ministry of Finance RI on the PPP Project Proving Ground Bekasi
23	30 Oktober 2022 October 30, 2022	<i>Joint Press Release Kemenkeu Kemenhub PT PII Proving Ground</i>
24	1 November 2022 November 1, 2022	<i>Materi Interview PT PII Road to CNBC Indonesia Award 2022 "The Best Transportation & Infrastructure"</i> Interview Material of IIGF Road to CNBC Indonesia Award 2022 "The Best Transportation & Infrastructure"
25	7 November 2022 November 7, 2022	<i>Joint Press Release PT PII USAID Sharing Session KPBU APJ FIN</i>



No	Tanggal Date	Judul Title
26	8 November 2022 November 8, 2022	<i>Press Release</i> BPIW Kementerian PUPR Kolaborasi dengan PT PII dalam Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR Berbasis Pendekatan Pengembangan Wilayah Press Release – BPIW Ministry of PUPR Collaborating with IIGF in the Planning and Programming of PUPR Infrastructures
27	14 November 2022 November 14, 2022	<i>Press Release</i> "Launching of ESG Framework and Manual - Journey to ESG Implementation for Infrastructure Financing in Indonesia bersama Kemenkeu, PT PII & IIF" Press Release "Launching of ESG Framework and Manual - Journey to ESG Implementation for Infrastructure Financing in Indonesia with the Ministry of Finance, IIGF & IIF"
28	9 Desember 2022 December 9, 2022	<i>Press Release</i> "PT PII Raih ASEAN RISK AWARD 2022" Press Release "IIGF Obtained ASEAN RISK AWARD 2022"
29	14 Desember 2022 December 14, 2022	<i>Press Release</i> Program CSR Zero TB Yogyakarta Press Release – CSR Program on Zero TB, Yogyakarta
30	15 Desember 2022 December 15, 2022	<i>Press Release</i> Program CSR Program Beasiswa Guru di 5 Wilayah Indonesia bersama Sampoerna Foundation Press Release – CSR Program on Teacher Scholarship in 5 Indonesian Areas with Sampoerna Foundation
31	23 Desember 2022 December 23, 2022	<i>Press Release</i> Program CSR Pemberdayaan Ekonomi untuk Masyarakat Desa bersama Baznas Press Release – CSR Program on Economic Empowerment for Villagers with Baznas
32	22 Desember 2022 December 22, 2022	<i>Press Release</i> Program CSR "Semua Bisa Makan" Press Release – CSR Program "Everyone Can Eat"
33	30 Desember 2022 December 30, 2022	Materi Publikasi Kaleidoskop Pencapaian PT PII selama tahun 2022 di Bisnis Indonesia Material Publication of Achievement Kaleidoscope of IIGF throughout 2022 in Indonesian Business
34	30 Oktober 2022 October 30, 2022	<i>Storyboard</i> Proyek <i>Proving Ground</i> BPLJSKB Bekasi Storyboard of Proving Ground BPLJSKB Bekasi Project
35	30 Oktober 2022 October 30, 2022	<i>Press Statement</i> Direktur Utama PT PII Proyek KPBU <i>Proving Ground</i> Bekasi Press Statement of the President Director of IIGF on PPP Project Proving Ground Bekasi
36	30 Oktober 2022 October 30, 2022	<i>Press Statement</i> Menteri Perhubungan RI Proyek KPBU <i>Proving Ground</i> Bekasi Press Statement of the Minister of Transportation of RI on PPP Project Proving Ground Bekasi
37	15 November 2022 November 15, 2022	Konten Narasi Agenda Kalender 2023 2023 Calendar Agenda Content Narration
38	22 Juli 2022 July 22, 2022	Narasi Video <i>Project Data Base</i> Project Data Base Video Narration
39	22 Juli 2022 July 22, 2022	Narasi Video WBS WBS Video Narration



Media Massa Mass Media

Sebagai bagian dari penegakan prinsip transparansi, PT PII juga senantiasa membangun hubungan yang baik dengan surat kabar dengan tingkat sirkulasi nasional dalam rangka penyebaran informasi yang perlu diketahui oleh publik.

As part of upholding the principle of transparency, IIGF always builds good relationships with newspapers with a national circulation level in order to disseminate information that needs to be known by the public.



Kontak Perusahaan Company Contact

Perseroan telah membangun jalur komunikasi dua arah yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi terkait Perseroan, termasuk di antaranya terkait dengan pengaduan atas layanan yang diberikan oleh Perseroan yaitu:

The Company has established two-way communication channels that can be utilized by stakeholders who need information related to the Company, including related to complaints about the services provided by Company, namely:

Kantor Pusat Head Office

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place 7th-8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18
Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12710 - Indonesia

+62 21 5795 0550

PT PII – Persero

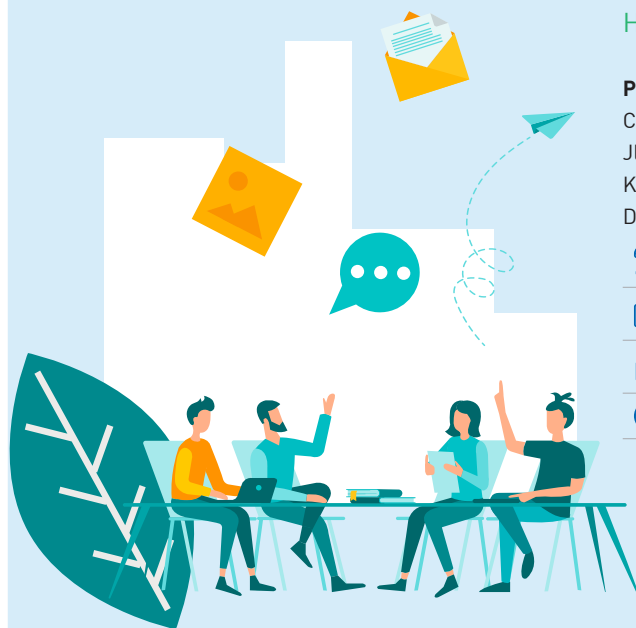
+62 21 5795 0040

@pii_persero

info@iigf.co.id

@PII_Persero

www.iigf.co.id





TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Pengembangan Teknologi Informasi (TI), terutama di era digital, semakin penting untuk dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Di era pandemi, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan prioritas bagi banyak perusahaan, tak terkecuali Perseroan, guna membangun komunikasi di saat penegakan kebijakan *social distancing* oleh pemerintah.

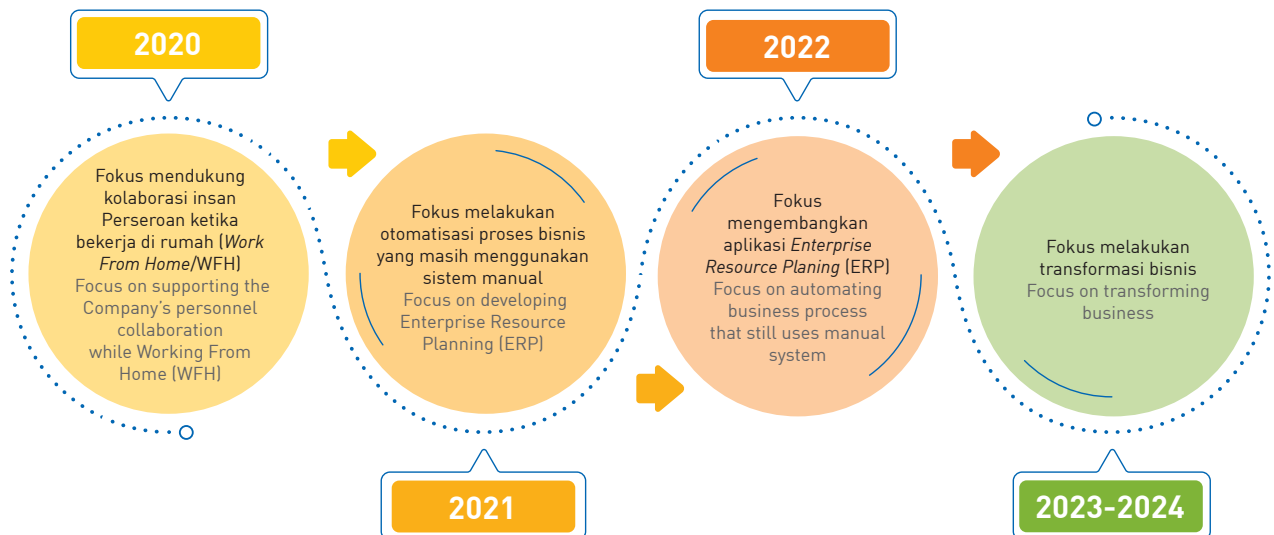
Oleh karenanya, Perseroan memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Teknologi Informasi melalui *upgrading* sarana dan prasarana TI, khususnya terkait keamanan penggunaan TI agar dapat bekerja secara optimal terutama saat menghadapi serangan siber (*cyber attack*). *Cyber Security* menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh Perseroan terkait pengelolaan Teknologi Informasi. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) data sebagai hal yang semakin krusial saat ini yang didukung oleh perangkat yang memadai.

Pemanfaatan Teknologi Informasi diharapkan mampu meningkatkan dan memudahkan proses bisnis Perseroan dan mendukung operasional Perseroan sejalan dengan visi dan misi Perseroan.

Roadmap Pengelolaan Teknologi Informasi

Guna memberikan arah pengembangan yang jelas terkait pengelolaan Teknologi Informasi di Perseroan, sebuah *Information Technology Master Plan* (ITMP) telah disusun sebagai acuan pengembangan teknologi informasi serta diimplementasikan pada jangka waktu periode 2018-2023, dengan *review* terakhir dilakukan tahun 2022.

Bagan berikut ini menggambarkan tahapan *roadmap* pengelolaan TI Perseroan:



Information Technology (IT) development, especially in the digital era, is increasingly important to be conducted in order to support the smooth running of the Company's operational activities. In the pandemic era, the use of information technology is a priority need for many companies, including IIGF, to build communication during the enforcement of social distancing policies by the government.

Therefore, the Company pays great attention to the development of Information Technology through upgrading IT facilities and infrastructure, especially related to the security of IT usage so that it can work optimally, especially when facing cyber attacks. One of the risks faced by IIGF is related to the management of Information Technology. For this reason, IIGF is committed to ensuring the confidentiality, integrity and availability of data as an increasingly crucial matter at this time supported by adequate equipment.

The Information Technology usage is expected to be to improve and facilitate the Company's business processes and support the Company's operations in line with the vision and mission of IIGF.

Information Technology Management Roadmap

In order to provide a clear development direction related to Information Technology management in IIGF, an Information Technology Master Plan (ITMP) has been prepared as a reference for information technology development as well as implemented in the 2018-2023 period, with the last review carried out in 2022.

The following chart illustrates the stages of the Company's IT management roadmap:

Penanggung Jawab Pengelolaan Teknologi Informasi

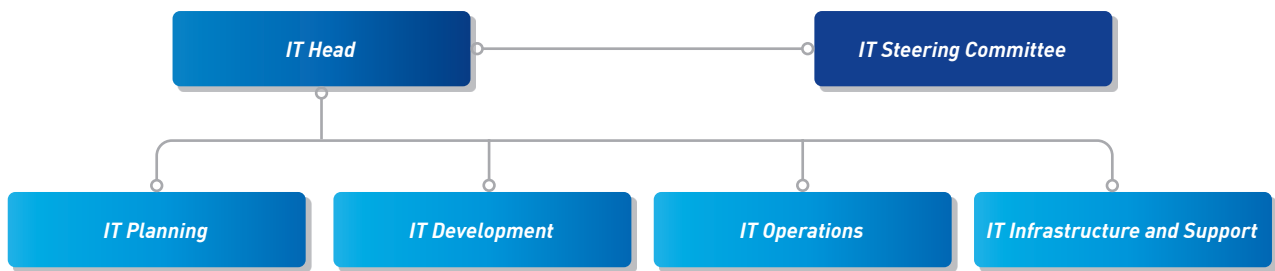
Secara struktural, pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Perseroan adalah Divisi CSP-IT. Pengelolaan TI dilaksanakan bersama dengan Komite Pengarah TI dalam rangka implementasi ITMP. Pengelolaan TI juga terbagi ke dalam bagian-bagian yang khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola teknologi informasi. Bagian-bagian yang dimaksud adalah Perencanaan TI, Pengembangan TI, Operasional TI serta bagian sarana dan pendukung.

Sementara itu, Perseroan telah membentuk Komite Pengarah TI dengan Direktur Utama sebagai *team leader* Komite Pengarah TI.

Person in Charge of Information Technology Management

Structurally, the party responsible for managing information technology within the Company is the CSP-IT Division. IT management is carried out together with the IT Steering Committee in the framework of ITMP implementation. IT management is also divided into sections specifically responsible for the implementation of information technology governance. Such sections are IT Planning, IT Development, IT Operations and Facilities and Support.

Meanwhile, the Company has established an IT Steering Committee with the President Director as the team leader of the IT Steering Committee.



Komite Pengarah TI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

The IT Steering Committee has duties and responsibilities as follows:

Jabatan Position	Deskripsi Pekerjaan Job Description
Team Leader	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui prosedur dan kebijakan pemantauan Master Plan TI. Bertanggung jawab atas penyelesaian rencana kegiatan yang tercantum dalam <i>Roadmap</i> TI. Menyampaikan keterbukaan informasi atas nama Komite Pengarah TI.
Team Leader	<ul style="list-style-type: none"> Approving the IT Master Plan monitoring procedures and policies. Responsible for the completion of the planned activities listed in the IT Roadmap. Delivering information disclosure on behalf of the IT Steering Committee.
Team Leader	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan telaah untuk memastikan investasi dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan dan prioritas bisnis yang tertuang dalam Master Plan TI. Memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan Kebijakan TI di lingkungan Perseroan. Melakukan <i>review</i> terhadap kinerja Tata Kelola TI secara periodik. Memberikan persetujuan terhadap inisiatif dan rencana investasi TI untuk mendukung layanan TI kepada <i>user</i> dan <i>customer</i>. Mengidentifikasi perwakilan yang akan ditugaskan di Komite Pengarah TI serta pihak berwenang bila ada eskalasi masalah terkait Proyek TI. Memberikan data/informasi terkait tren TI ke depan. Menyampaikan masalah utama terkait proyek TI maupun kemampuan para pihak dalam Proyek dalam memenuhi kewajiban kontraknya. Menganalisis dan mengajukan kebutuhan untuk menggunakan jasa konsultan atau ahli terkait dengan Proyek TI. Membuat anggaran tahunan Komite Pengarah TI. Memfasilitasi penyelesaian masalah dengan pihak terkait TI.
Team Leader	<ul style="list-style-type: none"> Conducting a review to ensure that investments are made effectively and efficiently based on business needs and priorities as stated in the IT Master Plan. Monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of IT Policies in the Company's environment. Conducting periodic reviews of IT Governance performance. Approving IT investment initiatives and plans to support IT services to users and customers. Identifying representatives who will be assigned to the IT Steering Committee as well as authorities in case of escalation of issues related to IT Projects. Providing data/information related to future IT trends. Conveying information on major issues related to the IT project and the ability of the parties to the Project to fulfill their contractual obligations. Analyzing and proposing the need to use the services of consultants or experts related to IT Projects. Preparing annual IT Steering Committee budget. Facilitating problem solving with IT related parties.



Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Perseroan telah melakukan sejumlah inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran *roadmap* pengelolaan TI. Sesuai dengan IKU Perseroan, Perseroan berencana melakukan implementasi ERP sebagai aplikasi terintegrasi yang akan mendukung kelancaran proses operasional Perseroan. Namun demikian, proses pengadaan aplikasi ERP mencakup banyak proses internal, proses *assessment*, kajian *risk management*, *approval*, dan sebagainya. Pada tahun 2021, Perseroan telah menyelesaikan proses *assessment* sampai proses pengadaan untuk proyek implementasi ERP (*procure to pay*) dengan target *live* pada Q3 2022.

Selain itu, Perseroan juga telah mengembangkan dan mengimplementasikan platform kolaborasi berbasis *cloud* yang memungkinkan insan Perseroan untuk mengakses dokumen kerja dari mana saja dan kapan saja dengan jaminan *uptime* 99,9% serta didukung oleh keamanan data Perusahaan kelas dunia. Insan Perseroan kini dapat tetap melakukan koordinasi kerja lintas divisi bahkan dengan pihak eksternal, *online meeting and conference*, webinar, *email*, serta penyimpanan dokumen secara aman dan terintegrasi.

Strategi dan Kebijakan serta Pengembangan Teknologi Informasi Perusahaan Tahun 2022

Perseroan berhasil mengimplementasikan "Digitalisasi" ke dalam Perseroan melalui fungsi Teknologi Informasi. Dalam Digitalisasi, disadari perlunya dukungan internal baik dari level pengguna hingga manajemen, serta dukungan ekosistem teknologi oleh pihak-pihak dengan kemampuan lebih untuk memitigasi risiko untuk mengembangkan layanan dan memberikan tingkat layanan terbaik untuk keberhasilan bisnis. *Journey* Digitalisasi yang berhasil digabungkan dan diimplementasikan dalam inisiatif-inisiatif Perseroan sepanjang tahun 2022 antara lain:

Integrated Information Technology

The Company has carried out a number of initiatives in order to support the achievement of IT management roadmap goals. In accordance with the Company's KPI, the Company's plans to implement ERP as an integrated application that will support the Company's smooth operational processes. However, the ERP application procurement process includes many internal processes, assessment processes, risk management studies, approvals, and etc. In 2021, IIGF has completed the assessment process to the procurement process for the ERP implementation project (*procure to pay*) with a live target in Q3 2022.

In addition, IIGF has also developed and implemented a cloud-based collaboration platform that allows the Company's personnel to access work documents from anywhere and anytime with a 99.9% uptime guarantee and supported by world-class Company data security. IIGF personnel can now continue to coordinate work across divisions and even with external parties, online meetings and conferences, webinars, emails, and document storage in a secure and integrated manner.

Strategy and Policy as well as Development of Corporate Information Technology in 2022

IIGF has succeeded in implementing "Digitalization" into the Company through the Information Technology function. In Digitalization, it is recognized the need for internal support both from the user level to management, as well as technology ecosystem support by parties with more capabilities to mitigate risks to develop services and provide the best level of service for business success. The Digitalization Journey that was succeeded in being incorporated and implemented in the Company's initiatives throughout 2022 include:

1. Penggunaan Microsoft 365 ecosystem untuk *Productivity tools* di perusahaan.
2. Implementasi *Digital Signature* dari PSRE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik).
3. Implementasi ERP sebagai *backend* utama pengelolaan keuangan dan pengadaan perusahaan.
4. Pengembangan *website* IIGF Institute.
5. Peningkatan keamanan cyber melalui penerapan *Single sign On, multi factor authentication, mobile device management*, dan peningkatan *IT security awareness*.
6. Peningkatan peran pihak *Managed Service* untuk membantu pengelolaan *end user device, IT operational*, dan keamanan data dan infrastruktur perusahaan.

Rencana Pengembangan TI ke Depan

Ke depannya Perseroan berencana untuk melanjutkan Digitalisasi yang sudah berjalan dengan baik di Perseroan. Pada tahun 2023 Perseroan berencana melakukan penyusunan IT Master Plan 2023-2027 untuk menggantikan IT Master Plan periode sebelumnya yang sudah selesai dilaksanakan, serta dalam rangka mendukung alignment RJPP dengan rencana IT Perseroan. Di sisi Infrastruktur dan keamanan, Perseroan tetap berkomitmen meningkatkan layanan dan keamanan data center melalui penguatan kritikal melalui implementasi teknologi infrastruktur terkini. Di sisi layanan aplikasi untuk pegawai, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan *end user experience* dan automasi proses manual melalui implementasi lanjutan *Stakeholder and Project Database* yang lebih terintegrasi antar divisi, peningkatan layanan automasi *E-Office* dan *Digital Signature*, peningkatan layanan *general service* melalui *mobile apps*, dan pengembangan lainnya.

1. Use of Microsoft 365 ecosystem for Productivity tools in the company.
2. Implementation of Digital Signature from PSRE (Electronic Certification Provider).
3. Implementation of ERP as the main backend of financial management and company procurement.
4. IIGF Institute website development.
5. Improve cyber security through the implementation of Single sign On, multi factor authentication, mobile device management, and improve IT security awareness.
6. Improve the role of Managed Service to assist in managing end user devices, IT operations, and data security and company infrastructure.

Future IT Development Plan

In the future, IIGF plans to continue the Digitalization that is already running well in the Company. In 2023, IIGF plans to prepare an IT Master Plan 2023-2027 to replace the IT Master Plan for the previous period which has been completed, and in order to support the alignment of RJPP with the Company's IT plans. In terms of infrastructure and security, IIGF remains committed to improving data center services and security through critical strengthening through the implementation of the latest infrastructure technology. In terms of application services for employees, IIGF is committed to continuing to improve end user experience and automation of manual processes through the continued implementation of a more integrated Stakeholder and Project Database between divisions, improving E-Office and Digital Signature automation services, improving general service services through mobile apps, and other developments.



KODE ETIK PERUSAHAAN

CODE OF CONDUCT

Sebagai bagian dari pelaksanaan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("Good Corporate Governance" atau GCG"), Perseroan telah merumuskan Kode Etik Perseroan yang merupakan salah satu elemen penting yang berlaku mengikat bagi seluruh karyawan Perseroan, termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman Kode Etik Perseroan merupakan sekumpulan komitmen etika perilaku yang disusun dan digunakan sebagai pedoman untuk memengaruhi, membentuk, mengatur dan bertingkah laku berdasarkan prinsip kesadaran etis (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Perumusan Kode Etik Perseroan ini semakin penting mengingat dinamika bisnis yang ada senantiasa membutuhkan integritas, komitmen profesionalitas dan keunggulan dalam hal nilai-nilai perusahaan yang mewakili aspirasi Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Mitra Usaha, Pemasok (*Suppliers*), Kreditur, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pada tahun 2022 Perseroan melakukan pemutakhiran atas Kebijakan Kode Etik Perseroan yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 008/SK/PII-BOD/1222 dan No. KEP-09/KOM/PII/12/2022 tentang Pengesahan Kebijakan Kode Etik Perseroan.

Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan sebagai Fondasi bagi Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan memiliki nilai-nilai budaya yang dikenal sebagai InTIME, yakni *Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* dan *Excellence*. Nilai-nilai budaya ini mencerminkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lingkungan organisasi Perseroan.

Berikut penjabaran masing-masing nilai budaya Perseroan:

Nilai-Nilai Utama: InTIME

Integrity/Integritas

1. Bekerja dengan standar etika tertinggi.
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan.
3. Mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain.
4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas.
5. Mentaati aturan Perseroan.
6. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan.

As part of the implementation of Good Corporate Governance ("GCG") practices, the Company has formulated IIGF's code of ethics which is one of the important elements that is binding for all employees of the Company, including the Board of Directors and the Board of Commissioners. IIGF's Code of Ethics is a set of ethical behavioral commitments that are compiled and used as guidelines to influence, shape, regulate and behave based on the principles of ethical sensibility, ethical reasoning, and ethical conduct as part of efforts to realize the Company's vision, mission, and values.

The formulation of IIGF's Code of Ethics is increasingly important considering that the existing business dynamics always require integrity, professional commitment and excellence in terms of corporate values that represent the aspirations of Employees, the Board of Directors, Board of Commissioners, Shareholders, Business Partners, Suppliers, Creditors, Communities, and other Stakeholders.

In 2022, the Company updated its Code of Conduct which was issued based on the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company No. 008/SK/PII-BOD/1222 and No. KEP-09/KOM/PII/12/2022 concerning the Ratification of the Company's Code of Conduct.

Corporate Values and Culture as the Foundation of the Code of Ethics and Guidelines of Conduct

In addition, to support the implementation of their duties and responsibilities, IIGF has cultural values known as InTIME, namely *Integrity, Teamwork, Thinking Big, Mutual Trust* and *Excellence*. These cultural values reflect the principles applied in the Company's organizational environment.

The following is a description of each of the Company's cultural values:

Key Values: InTIME

Integrity

1. Work to the highest ethical standards.
2. Be honest with yourself and others in all matters.
3. Prioritize the interests of the Company over personal, group and/or other parties' interests.
4. Maintain commitment in carrying out tasks.
5. Comply with the Company rules.
6. Be Responsible for all actions.

Teamwork/Kerja Sama

1. Beroperasi sebagai sebuah tim.
2. Memberi kontribusi keterampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim.
3. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perseroan.

Think Big/Berpikiran Luas

1. Memiliki pemikiran luas dan mutakhir.
2. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi Perseroan dan bagi pemangku kepentingan.
3. Menggali secara terus-menerus ide-ide baru untuk perkembangan Perseroan.
4. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Mutual Trust/Saling Percaya

1. Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal Perseroan maupun dengan mitra Perseroan.
2. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan.
3. Memercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis.

Excellence/Keunggulan

1. Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan.
2. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus.
3. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan.

Pokok-Pokok dalam Pedoman Kode Etik Perseroan

Pokok-pokok yang diatur dalam Pedoman Kode Etik meliputi:

1. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Nilai-nilai Perseroan;
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan;
4. Benturan Kepentingan;
5. Etika Profesional dalam Bekerja;
6. Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan;
7. Keterlibatan dalam aktivitas politik;
8. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja;
9. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;
10. Pelaporan keuangan;
11. Memberi dan menerima hadiah, jamuan dan sumbangan;
12. Komitmen terhadap Perlindungan Aset Perseroan dan Kerahasiaan Informasi; dan
13. Mekanisme penegakan Kebijakan Kode Etik Perusahaan termasuk pelaporan dan sanksi atas pelanggaran.

Pengungkapan Pemberlakuan Kode Etik

Perseroan mewajibkan setiap Insan Perusahaan tanpa terkecuali untuk menerapkan Kode Etik Perusahaan. Setiap tahun, seluruh pegawai dan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Pernyataan Kepatuhan Tahunan yang merupakan pernyataan komitmen untuk mematuhi Kode Etik Perusahaan. Bagi karyawan baru, Perseroan akan membagikan kepada

Teamwork

1. Operate as a team.
2. Contribute skills and knowledge for the benefit of the team.
3. Prioritize the interests of the team to achieve the Company's goals.

Think Big

1. Have broad and up-to-date thinking.
2. Consider various alternatives for better results for the Company and for stakeholders.
3. Continuously explore new ideas for the development of the Company.
4. Open to various developments in the work environment for the best results while continue to adhere to the principles of Good Corporate Governance.

Mutual Trust

1. Uphold business ethics with all components within the Company and the Company's stakeholders.
2. Consistently meet the promised service standards.
3. Trust and respect one another in good faith to earn the trust of colleagues and business partners.

Excellence

1. Commit to be the best in all endeavors.
2. Strive to make continuous improvements.
3. Have in-depth knowledge to support work activities and deliver results that exceed expectations.

Principles in IIGF Code of Ethics Guidelines

The principles regulate in the Code of Ethics Guidelines include:

1. Statement of Commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Corporate Values;
3. Compliance with the Laws and Regulations;
4. Conflict of Interest;
5. Professional Ethics at Work;
6. Ethics in Engaging with Stakeholders;
7. Involvement in political activities;
8. Commitment to the Environment, Occupational Health and Safety;
9. Equal working opportunities and promotions;
10. Financial reporting;
11. Giving and receiving gifts, entertainment and donations;
12. Commitment towards the Protection of the Company's Assets and Confidentiality of Information; and
13. The mechanism for upholding the Company's Code of Ethics, including reporting and sanctions for violations.

Disclosure of the Enforceability of the Code of Ethics

The Company requires all Company's personnel without exception to implement the Company's Code of Ethics. Every year, all IIGF employees and including the Board of Directors and Board of Commissioners sign the Annual Compliance Statement which is a statement of commitment to comply with the Company's Code of Ethics. For new employees, the Company will distribute to them the



mereka pedoman Kode Etik Perusahaan dan mewajibkannya untuk menandatangani pernyataan komitmen kepatuhan atas Kode Etik Perusahaan.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, Perseroan mensosialisasikan nilai-nilai Perseroan yang terkandung dalam Kode Etik kepada seluruh pegawai dalam berbagai kesempatan.

Penegakkan Kode Etik

Selain mensosialisasikan pokok-pokok Kode Etik, Perseroan terus memantau penerapannya dan menerapkan mekanisme *reward* dan *punishment* terhadap seluruh karyawan, termasuk jajaran manajemen, sebagai bagian dari penegakkan Kode Etik Perseroan.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan memberikan sanksi tegas bagi Insan Perseroan yang terbukti melanggar Kode Etik Perusahaan. Namun di sisi lain, Perseroan juga memberikan hak membela diri kepada Insan Perseroan yang diduga melakukan pelanggaran untuk menyampaikan penjelasannya sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.

Atas setiap laporan dugaan pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya, maka sanksi akan diberikan dengan mempertimbangkan bobot pelanggaran dan menentukan pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi, yang sesuai dengan kebijakan internal Perseroan atau ketentuan yang berlaku.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan di Tahun 2022

Pada Tahun 2022 tidak terjadi pelanggaran Kode Etik di lingkungan Perseroan.

Company's Code of Ethics guidelines and require them to sign a statement of commitment to compliance with the Company's Code of Ethics.

To ensure the effectiveness of its implementation, the Company disseminates the Company's values contained in the Code of Ethics to all employees on various occasions.

Enforcement of the Code of Ethics

In addition to disseminating the main points of the Code of Ethics, the Company continues to monitor their implementation and implement reward and punishment mechanisms for all employees, including management, as part of the enforcement of the Company's Code of Ethics.

Sanctions for Violations of the Code of Ethics

The Company provides strict sanctions for Company personnel who are proven to have violated the Company's Code of Ethics. On the other hand, the Company also provides the right of self-defense to Company personnel who are suspected of committing violations to convey their explanations so that they can be taken into consideration in determining the form of disciplinary consequences to be given.

For each report of suspected violations that can be proven true, sanctions will be given by considering the weight of the violation and determining the party authorized to execute sanctions, which are in accordance with the Company's internal policies or applicable regulations.

Number of Code of Ethics Violations and Sanctions Handed Out in 2022

In 2022 there were no violations of the Code of Ethics within the Company.

BUDAYA PERUSAHAAN CORPORATE CULTURE

Untuk pembahasan budaya perusahaan dapat dilihat di bab Profil Perusahaan.

For a discussion of corporate culture, the Company can refer to the Company Profile chapter.

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI ANTI-GRATIFICATION POLICY

Program Pengendalian Gratifikasi Perseroan diterapkan sejalan dengan penegakan Kode Etik Perseroan dan menjadi bagian penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan selalu mengedepankan pengelolaan Perseroan yang amanah, serta menjunjung tinggi prinsip transparan dan akuntabilitas sehingga memastikan pengelolaan usaha yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penerapan kebijakan gratifikasi ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai GCG utama Perseroan, yakni *integrity* dan *transparency*, kepada seluruh pegawai agar timbul pemahaman untuk menjalankan tugasnya sesuai etika bisnis terbaik, rasa saling percaya dan tanggung jawab saat berinteraksi dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan.

Guna mewujudkan pengelolaan bisnis Perseroan yang bersih, sehat dan akuntabel, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. SK- 005/BOD/CSC/1018 dan No. KEP-10/KOM/PII/10/2018. Pedoman tersebut mengatur lebih lanjut penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembentukan pedoman gratifikasi adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Insan Perseroan untuk memahami, mencegah, dan menanggulangi gratifikasi di lingkungan Perseroan;
2. Sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan dalam mewujudkan pola bisnis yang sehat dan terpercaya, dengan berdasar pada pengelolaan Perseroan yang penuh amanah, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Menghindari benturan kepentingan dari pihak tertentu yang diwujudkan melalui kebijakan formal; dan
4. Mewujudkan pengelolaan Perseroan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengendalian Gratifikasi mencakup hal-hal yang terkait dengan penerimaan dan pemberian segala bentuk gratifikasi, klasifikasi tindakan gratifikasi, batasan, serta pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi yang diberlakukan terhadap Insan Perseroan dan seluruh *stakeholders*.

Prinsip Dasar

Agar dapat mencerminkan komitmen Perseroan dalam hal penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Pedoman Pengendalian Gratifikasi disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

Anti-gratification policy is implemented in line with the enforcement of the Company's Code of Ethics and is an important part of implementing good corporate governance. IIGF always upholds the trustworthy management of the Company, and upholds the principles of transparency and accountability so as to ensure business management that is free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). The implementation of the gratification policy is aimed at instilling the Company's main GCG values, namely integrity and transparency to all employees so that there is an understanding to carry out their duties according to the best business ethics, mutual trust and responsibility when interacting with customers, vendors, partners and all stakeholders.

In order to realize a clean, healthy and accountable management of the Company's business, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company have issued Gratification Control Guidelines as outlined in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. SK- 005/BOD/CSC/1018 and No. KEP-10/KOM/PII/10/2018. The guidelines further regulate the implementation of gratification control in IIGF environment.

Purposes and Targets

The purpose and target of the establishment of gratuity guidelines are:

1. As a guideline for Company's personnel to understand, prevent and control gratification within the Company;
2. As a form of the Company's responsibility in realizing a sound and trusted business, based on a trustworthy, transparent and accountable management in accordance with the principles of Good Corporate Governance;
3. Avoiding conflicts of interest with certain parties, which are regulated through formal policies; and
4. Creating a corporate management devoid of all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN)

Scope

Scope of the guidelines are matters related to the acceptance and granting of all forms of gratification, classification of acts of gratuity, limitation, and reporting that apply to Company's personnel and all stakeholders.

Basic Principles

In order to reflect the Company's commitment in upholding the principles of Good Corporate Governance, the Gratification Control Guidelines are drafted with regard to the following principles:



1. Transparansi

Prinsip keterbukaan ini tercermin dengan adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan Perseroan. Mekanisme pelaporan tersebut merupakan sarana bagi Insan Perseroan untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku Insan Perseroan.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban dari Insan Perseroan yang telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian yang tidak wajar dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkannya kepada fungsi yang diberikan kewenangan untuk mengelola laporan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

3. Independensi

Bagi penerima gratifikasi yang melaporkan hasil penerimaan gratifikasi, prinsip independensi ini ditunjukkan dengan sikap menolak pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

Perlindungan Pelapor

Perseroan berkomitmen menjaga kerahasiaan pelaporan gratifikasi yang disampaikan. Sedangkan terkait dengan pelaporan pelanggaran atas ketentuan pengendalian gratifikasi Perseroan, Perseroan memberikan perlindungan terhadap pelapor berdasarkan ketentuan pelaporan pelanggaran yang berlaku di Perseroan.

Media Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan gratifikasi Perseroan dapat dilakukan melalui media email kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dengan alamat: up.gratifikasi@iigf.co.id

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Perseroan telah melakukan sosialisasi atas kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan melalui berbagai kegiatan, antara lain *workshop*, portal internal, dan *website* Perseroan. Pada tahun 2022, Perseroan bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan *Special Mission Vehicle* lainnya di bawah Kementerian Keuangan mengikuti rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) sebagai bentuk sosialisasi kepada pihak eksternal atas komitmen pengendalian gratifikasi Perseroan.

Sosialisasi yang berkesinambungan ini diharapkan akan membangun kesadaran dan komitmen di antara seluruh Insan Perseroan untuk mendukung penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Laporan Pengendalian Gratifikasi 2022

Pada tahun 2022, laporan terkait indikasi pelanggaran gratifikasi yang diterima Unit Pengendali Gratifikasi adalah sebagai berikut:

1. Transparency

The principle of transparency is reflected in the mechanism for reporting the acts of gratuity within IIGF. The reporting mechanism is designed to be a medium for the Company's personnel to examine and guarantee the validity of the gratification obtained in connection with their position in the Company.

2. Accountability

The principle of accountability is implemented as a form of obligation of the Company's personnel who have been given the mandate to carry out their duties and authorities in their positions, not to accept improper gifts in any form related to their position and to report such gifts to the authorized functions that manage reports of gratification which are considered as bribery.

3. Independence

For recipients of gratuities who report the results of receiving gratuities, the principle of independence is indicated by the attitude of refusing gifts in any form related to their position or reporting the receipt of gratuities that are considered bribes.

Whistleblower Protection

The Company is committed to maintaining the confidentiality of of gratuities submitted. Meanwhile, related to reporting violations of the provisions of gratification control provisions, the Company provides protection to whistleblower based on the provisions of whistleblowing that applicable in the Company.

Gratification Reporting Media

The Company's gratification reporting can be done through the media email to the Gratification Control Unit with the address: up.gratifikasi@iigf.co.id

Dissemination of Gratification Control

The gratification control policy has been disseminated to the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees through workshops, internal portals, and the Company's website. In 2022, the Company synergized with the Commission for Corruption Eradication Commission and other Special Mission Vehicles under the Ministry of Finance participated in a series of World Anti-Corruption Day events World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) as a form of socialization to external parties on the commitment to gratification control. to external parties on the commitment to control gratuities Company.

This continuous dissemination is expected to build awareness and commitment among all Company personnel to support the implementation of the Gratification Control Guidelines.

Gratification Control Report in 2022

In 2022, reports related to indications of gratification violations received by the Gratification Control Unit were as follows:

Jenis Laporan Gratifikasi Type of Gratification Report	Jumlah Laporan Total Report	Status Laporan Report Status
Laporan Penerimaan Gratifikasi Gratuity Receipt Report	3	diserahkan kepada panti sosial/pihak yang membutuhkan handed over to social homes/people in need
Laporan Penolakan Gratifikasi Gratuity Refusal Report	Nihil/Nil	

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN ANTI-CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY POLICY

Penerapan Kebijakan Anti Korupsi dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Kode Etik Perseroan. Penegakan Kebijakan Anti Korupsi di lingkungan Perseroan didukung oleh kebijakan terkait benturan kepentingan, *whistleblowing system* dan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bab ini dari Laporan Tahunan 2022.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen atas anti korupsi dan anti penyuapan, Perseroan juga menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sejak tahun 2021, Perseroan mempersiapkan proses penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan merujuk pada standar yang berlaku, yaitu SNI ISO 37001:2016. Pada tahun 2022 Perseroan telah melaksanakan proses sertifikasi SMAP dan pada tanggal 30 Maret 2022 Perseroan mendapatkan sertifikat penerapan SMAP dari PT Chesna dan berlaku sampai dengan 29 Maret 2025. Sertifikat SMAP yang telah diperoleh Perseroan adalah untuk ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa. Adapun untuk hal ini, maka pada tahun 2023 dan 2024 Perseroan selanjutnya perlu untuk melaksanakan audit *surveillance* SMAP guna memastikan bahwa komitmen Perseroan dalam penerapan SMAP masih dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan sasaran SMAP yang ditetapkan, sehingga Perseroan tetap berhak menyangand sertifikat ISO tersebut.

Untuk memastikan efektivitas penegakannya, maka Perseroan telah mensosialisasikan kebijakan anti korupsi dan anti penyuapan secara berkala serta memanfaatkan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan mengajak dan mengimbau seluruh insan Perseroan untuk mendukung upaya pencegahan penyuapan dengan menunjukkan sikap integritas tinggi dan komitmen menjalankan prinsip 4 No's, yaitu *No Bribery, No Kick Back, No Gifts, dan No Luxurious Hospitality*.

The implementation of the Anti-Corruption Policy is carried out as part of the implementation of the Company's Code of Ethics. Enforcement of the Anti-Corruption Policy within IIGF is supported by policies related to conflict of interest, *whistleblowing system* and policies related to gratification control as described earlier in this chapter of the 2022 Annual Report.

In addition, as a form of commitment to anti-corruption and anti-bribery, the Company also implements the Anti-Bribery Management System. Since 2021, the Company has prepared the process of implementing the Anti-Bribery Management System (ABMS) withreferring to the applicable standard, namely SNI ISO 37001: 2016.In 2022, the Company has carried out the SMAP certification process and on March 30, 2022 the Company received a certificate of SMAP implementation from PT Chesna and is valid until March 29, 2025. SMAP certificate that has been obtained by The Company is for the scope of Goods & Services Procurement. As for this, then in 2023 and 2024 the Company will then need to carry out a SMAP *surveillance* audit to ensure that the Company's commitment in implementing SMAP is still carried out consistently and in accordance with SMAP objectives set, so that the Company is still entitled to hold the to hold the ISO certification.

To ensure the effectiveness of its enforcement, the Company has socialized anti-corruption and anti-bribery policies regularly and utilized the commemoration of World Anti-Corruption Day by inviting and calling on all Company's people to support efforts to prevent bribery by showing an attitude of high integrity and commitment to implementing the 4 No's principle, namely No Bribery, No Kick Back, No Gifts, and No Luxurious Hospitality.



KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan bisnisnya, Perseroan telah menerbitkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perseroan agar dapat dilakukan secara profesional, mandiri, transparan dan bertanggung jawab dalam upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kebijakan umum terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan bertujuan untuk:

- a. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab Perseroan, Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.
- c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang industri dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengutamakan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN, dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.

Perseroan telah menetapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan transparan di lingkungan Perseroan. Dalam merumuskan SMAP, Perseroan mengadopsi ISO 37001:2016 sebagai standar yang perlu diterapkan Perseroan dalam upayanya mencegah praktik penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Perseroan dalam hal ini telah mensosialisasikan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di kalangan karyawan maupun calon mitra penyedia barang dan jasa agar dapat dipahami dan dilaksanakan sehingga praktik-praktik korupsi ataupun praktik yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dapat sedapat mungkin dihindari. Dokumen berupa Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa juga dapat diakses secara luas pada *website* Perseroan, www.ptpii.co.id, yaitu pada bagian publikasi manual kebijakan Perseroan. Dokumen ini antara lain memuat tujuan dan sasaran, kebijakan umum, etika pengadaan, tahapan pengadaan barang/jasa, ketentuan penerimaan barang/jasa, panel penyedia jasa konsultansi, dan tanda bukti perjanjian.

Sementara itu, guna memastikan efektivitas pelaksanaannya, Direksi bersama-sama Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan. Dengan demikian, manajemen Perseroan dapat turut memastikan bahwa seluruh prosedur pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

To fulfill their operational and business needs, the Company has also issued the Goods and Services Procurement Guidelines which aims to regulate the implementation of goods/services procurement within the Company in order to be carried out professionally, independently, transparently and responsibly in an effort to support the acceleration of infrastructure development in Indonesia.

The general policy related to the procurement of goods and services within the Company aims to:

- a. Simplify provisions and procedures to accelerate the decision-making process in Goods/Services Procurement;
- b. Increase the professionalism, independence and responsibility of the Company, Procurement Officer/Committee and Goods/Services Provider;
- c. Prioritize the use of domestic production, national design and engineering, and expand opportunities to small businesses in order to encourage the growth of domestic industries, as long as the quality, price, and purpose can be accounted for, while taking into account the provisions of the applicable laws and regulations; and
- d. Prioritize synergies between SOEs, subsidiaries of SOEs and/or affiliated companies of SOEs or between subsidiaries of SOEs and/or between affiliated companies of SOEs, in order to increase business or economic efficiency.

The Company has established an Anti-Bribery Management System (ABMS) to support the implementation of effective, efficient and transparent procurement of goods and services within the Company. In formulating the SMAP, the Company adopts ISO 37001:2016 as a standard that needs to be applied by the Company in its efforts to prevent the practice of bribery, corruption, collusion and nepotism in the implementation of goods and services procurement.

The Company in this matter has disseminated the Goods and Services Procurement Guidelines to employees as well as prospective partners of goods and services providers so that they can be understood and implemented so that corrupt practices or practices that can cause conflicts of interest are avoided as much as possible. The document in the form of Goods and Services Procurement Guidelines can also be widely accessed on the Company's website, www.ptpii.co.id, namely in the publication section of the Company's policy manual. This document contains, among others, goals and objectives, general policies, procurement ethics, stages of goods/services procurement, terms of acceptance of goods/services, panel of consultancy service providers, and proof of agreement.

Meanwhile, to ensure the effectiveness of its implementation, the Board of Directors together with the Board of Commissioners supervises the implementation of policies related to the procurement of goods and services within the Company. Accordingly, the Company's management can ensure that all procurement procedures are in accordance with the prevailing laws and regulations.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN KREDITUR CREDITOR RIGHTS AND INTERESTS PROTECTION POLICY

Perseroan senantiasa berupaya membina hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini adalah para kreditor berdasarkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, dan saling menghormati, serta memberi perlakuan yang sama bagi para kreditor. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor dan menghormati hak dan kewajiban antara Perseroan dan kreditor sesuai kesepakatan berdasarkan perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran dan keterbukaan, diantaranya:

1. Berkomitmen melaksanakan klausul perjanjian dengan sebaik-baiknya.
2. Menyediakan informasi yang aktual dengan memperhatikan kebijakan penyediaan informasi yang berlaku di Perseroan.
3. Mematuhi covenant yang berlaku selama perjanjian, apabila ada.

The Company always strives to foster good relations with all stakeholders, including in this case the creditors based on commitment, trust, honesty and mutual respect, as well as giving equal treatment, and mutual respect, as well as providing equal treatment for creditors. The Company is committed to fulfill its obligations to creditors and to respect the rights and obligations between the Company and creditors according to the agreement based on agreements that prioritize the principles of fairness and transparency, including:

1. Committed to implementing the agreement clause as well as possible. as well as possible.
2. Providing actual information with due regard to information provision policy applicable in the Company.
3. Comply with the covenants that apply during the agreement, if any. if any.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) STATE OFFICIAL ASSETS REPORT (LHKPN)

Kebijakan LHKPN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan telah merumuskan pedoman mengenai pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-024/DIR/COS/HR/0817 tentang Penetapan Kebijakan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Ketentuan tersebut mengatur secara jelas mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaan, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

Pengelolaan LHKPN

Perseroan menunjuk Unit Pengelola LHKPN atau disebut sebagai UPL Pengelola pelaksanaan LHKPN di lingkungan Perseroan. Perseroan juga menunjuk Senior Vice President Corporate Service sebagai Koordinator UPL dengan dibantu oleh Admin Instansi dan Admin Unit, yaitu karyawan yang ditunjuk berdasarkan surat tugas. Tugas Koordinator UPL dalam hal ini meliputi:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan *monitoring* dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN para wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN.

LHKPN Policy

As a State-Owned Enterprise, IIGF has formulated guidelines regarding the implementation of the State Organizer's Asset Report (LHKPN) which is further regulated through the Board of Directors Decree No. SK-024/DIR/COS/HR/0817 concerning Determination of State Organizer's Asset Report Management Policy (LHKPN) of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). The provisions clearly regulate the Company employees who are required to report their assets, submission procedures, management work units, and sanctions that can be imposed for employees who fail to meet their reporting obligations.

LHKPN Administrator

The Company appoints the LHKPN Administrator Unit or referred to as UPL to manage the implementation of LHKPN within IIGF. The Company also appoints the Senior Vice President Corporate Service as the UPL Coordinator with the assistance of the Agency Admin and Unit Admin, which are employees appointed based on a letter of assignment. The duties of the UPL Coordinator in this case include:

1. Coordinating with the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK) related to monitoring and evaluation of the compliance of LHKPN mandatory reporters in reporting and announcing LHKPN.



2. Mengingatkan wajib lapor untuk mematuhi kewajiban penyampaian pengelolaan data wajib lapor.
3. Melakukan monitor terhadap Admin Instansi dan Admin Unit dalam melakukan pengelolaan data wajib lapor.
4. Memberikan atau melaksanakan koordinasi terkait pendampingan pengisian LHKPN bagi wajib lapor.
5. Mengusulkan pemberian sanksi hukuman disiplin bagi wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN atau terlambat menyampaikan LHKPN.

Wajib Lapor LHKPN

Sesuai kebijakan, Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Perseroan, yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi

Berikut pengungkapan informasi mengenai komitmen penyampaian LHKPN oleh pejabat Perseroan di tahun 2022:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lapor Submission Date
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris Utama/President Commissioner	31 Desember/December 2022
Mariatul Aini	Komisaris/Commissioner	31 Desember/December 2022
Wahyu Utomo	Komisaris/Commissioner	31 Desember/December 2022
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama/President Director	31 Desember/December 2022
Andre Permana	Direktur Bisnis/Business Director	31 Desember/December 2022
Donny Hamdany	Direktur Keuangan/Finance Director	31 Desember/December 2022

2. Reminding LHKPN mandatory reporters to comply with the obligation for the mandatory LHKPN data submission.
3. Monitoring the Institution Administrator and Unit Administrator in managing the mandatory data report.
4. Providing assistance or coordinating with the LHKPN mandatory reporters regarding report filling.
5. Proposing disciplinary sanctions for LHKPN mandatory reporters who failed or were late to submit their LHKPN.

LHKPN Mandatory Reporters

According to the policy, Mandatory LHKPN Reporters are Structural Officials within IIGF, namely:

1. Member of the Board of Commissioners
2. Member of the Board of Directors

The following discloses information concerning the commitment to submit LHKPN by the Company officials in 2022:

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

INFORMATION ON EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen semata-mata ditujukan sebagai pemberian *reward* dan membangun loyalitas di antara karyawan yang kompeten terhadap Perseroan. Namun mengingat status Perseroan sebagai yang belum mencatatkan sahamnya di bursa efek maka Perseroan hingga akhir tahun 2022 tidak pernah melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen [ESOP/MSOP].

The implementation of stock ownership program by employees and/or management is solely intended to reward and build loyalty among competent employees to the Company. However, considering the Company's status as a State-Owned Enterprise that has yet to list its shares in the stock exchange, until the end of 2022, the Company has never conducted employee and/or management stock option program [ESOP/MSOP].

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perseroan mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) sebagai rangkaian kebijakan Perseroan dalam memberantas terjadinya praktik korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya. Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan WBS, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) sesuai Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 April 2018.

Berdasarkan pedoman tersebut, penerapan WBS di lingkungan Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari Pemangku Kepentingan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai.
2. Mendorong setiap Insan Perseroan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan/melaporkan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur operasi, kebijakan manajemen dan hal-hal lainnya yang dipandang dapat merugikan/membahayakan Perseroan.
3. Meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Perseroan apabila mekanisme pengendalian internal untuk mencegah pelanggaran tidak berjalan dengan baik.
4. Meningkatkan keyakinan kepada setiap Insan Perseroan dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai adanya perlindungan dari hukuman, tindakan balasan dan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran, dengan berdasarkan itikad baik dan bukti memadai.
5. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas.
6. Meningkatkan efektivitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pengendalian internal, dan kinerja pegawai maupun organisasi.

Prinsip Dasar Pelaporan

Beberapa aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran oleh pelapor adalah:

1. Integritas dan Profesionalisme

Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran manajemen Perseroan harus berkomitmen dan mendukung sepenuhnya penerapan sistem pelaporan pelanggaran di lingkungan Perseroan, sehingga tidak memberikan celah bagi Insan Perseroan untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas suatu keputusan/jabatan.

2. Kerahasiaan Data dan Asas Praduga Tak Bersalah

Perseroan harus menyiapkan mekanisme dan prosedur yang memadai untuk memproses laporan dari masyarakat dan karyawan terkait dengan pelanggaran, penyimpangan,

The Company developed a Whistleblowing System (WBS) as a series of Company policies in eliminating the occurrence of corrupt practices, bribery, and other fraudulent practices. To support the effectiveness of the WBS implementation, the Company has compiled and established the Whistleblowing System (WBS) Guidelines in accordance with the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of IIGF dated April 26, 2018.

Based on the guidelines, the implementation of WBS within the Company has an objective as follows:

1. Be an implementation guideline in handling violation reporting from Stakeholders to ensure the implementation of an effective violation reporting settlement mechanism in an adequate period of time.
2. Encourage every employee of the Company and other stakeholders to submit/report about violations and/or deviations from the code of ethics, law, standard operating procedures, management policies and other matters deemed to be detrimental/harmful to the Company.
3. Minimize the possibility of risks that can harm the Company if the internal control mechanism to prevent violations does not work properly.
4. Increase confidence in every the Company's Person and other stakeholders regarding the existence of protection from punishment, retaliation and or unfair and unfair treatment to the Reporting Party if the person concerned discloses a violation, based on good faith and adequate evidence.
5. Support the realization of a culture of openness, accountability and integrity.
6. Improve the effectiveness of Good Corporate Governance, internal control and performance of employees and organizations.

Basic Principles of Reporting

Several basic aspects that must be considered in submitting reports of suspected violations by the whistleblower are:

1. Integrity and Professionalism

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all levels of Company management must be committed and fully support the implementation of a violation reporting system within the Company, so as not to provide a chance for the Company's personnel to commit violations, deviations and abuse of authority over a decision/position.

2. Data Confidentiality and Presumption of Innocence

The Company shall prepare mechanisms and procedures that are adequate to process reports from the public and employees related to violations, deviations, and abuse of authority that



dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan Perseroan. Perseroan juga harus dapat menjamin kerahasiaan informasi dan memberikan perlindungan bagi seseorang yang dinilai tidak bersalah sampai terdapat bukti-bukti yang memverifikasi dugaan pelanggaran tersebut.

3. Keadilan

Perseroan harus menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam mengelola pelaporan pelanggaran dan penyimpangan yang diterima, baik menyangkut karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris.

4. Itikad Baik

Pengungkapan/pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari pada kehendak buruk/fitnah.

Mekanisme Penyampaian Laporan

Perseroan telah menetapkan jalur-jalur resmi untuk mengomunikasikan laporan dugaan pelanggaran. Laporan yang diterima akan dikelola oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Persero). Apabila pelapor menarik kembali laporan yang telah dilakukan, maka Pelapor wajib memberikan alasan terkait pembatalan pelaporan tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelapor anonim (tanpa identitas).

Saluran Pelaporan Pelanggaran

Fasilitas dan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yaitu:

1. Website: www.ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran
2. Surat yang ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dengan alamat sebagai berikut:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place, Lantai 7
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.18
Jakarta 12710 - Indonesia
3. Email: pelaporan@iigf.co.id
4. Kotak Surat Masuk TP3

Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

Perseroan memiliki kebijakan yang jelas serta tidak memihak sehubungan pelaporan yang diterima melalui sistem WBS dan memberikan jaminan kerahasiaan data pelapor sebagai bentuk perlindungan dari potensi retaliasi.

Perlindungan bagi pelapor dapat berupa:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan.
2. Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.

occur within the Company. The Company shall also provide confidentiality of information and protection for a person who is considered innocent until there is evidence that verifies the alleged violation.

3. Fairness

The Company shall uphold the principle of equality in managing the reporting of violations and deviations received, involving employees, the Board of Directors, as well as the Board of Commissioners.

4. Good Faith

Disclosure/reporting should be conducted in good faith and not as a personal complaint on a particular company policy (grievance) or based on bad will/slander.

Mechanism of Report Submission

The Company has established official channels for communicating reports of alleged violations. The reports received will be managed by the Whistleblowing Management Team (TP3) as established in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of IIGF. If the whistleblower withdraws the report that has been made, the whistleblower is required to provide reasons related to the cancellation of the report. This provision does not apply to anonymous (unidentified) whistleblowers.

Violation Reporting Channel

Facilities and communication media that can be used for submitting reports of alleged violations namely:

1. website: www.ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran
2. Letter addressed to the Whistleblower Management Team with the following address:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Capital Place Building 7th Floor,
Jl. General Gatot Subroto Kav 18,
Jakarta 12170, Indonesia;
3. E-mail: pelaporan@iigf.co.id
4. TP3 Incoming Mailbox

Protection for the Whistleblower and the Reported Party

The Company has a clear and impartial policy concerning reports that are received through the WBS system and guarantees the confidentiality of the whistleblower's data as a form of protection from potential retaliation.

Protection for whistleblowers may include:

1. The identity of the Whistleblower is guaranteed by the Company to be kept confidential.
2. The Company guarantees the protection of the Whistleblower from all forms of threats, intimidation, or improper actions from any party as long as the Whistleblowers maintain the confidentiality of the reported violation to any party.
3. Protection of Whistleblowers also applies to parties conducting investigations and parties providing information related to the complaint/disclosure.

Bentuk perlindungan bagi Pelapor dari potensi retaliasi, seperti misalnya:

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan;
4. Intimidasi dalam segala bentuknya; dan/atau
5. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya (*personal file record*).

Bagi pelapor yang tidak berkenan identitasnya diungkapkan, maka Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pribadinya, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilaporkan, dan hanya akan membuka identitas pelapor jika pelaporan diteruskan ke pengadilan atau menghadapi proses hukum yang memerlukan kesaksian lebih lanjut dari Pelapor.

Sosialisasi WBS

PT PII telah melakukan sosialisasi kepada Insan Perseroan dan para pemangku kepentingan dalam rangka memberikan pemahaman tentang WBS yang dikelola secara independen.

Sosialisasi WBS yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 antara lain :

1. Company Gathering PT PII 2022

PT PII melaksanakan *Company Gathering* pada 22 Juli 2022 sebagai upaya meningkatkan *engagement* dengan berbagai macam kegiatan yang salah satunya adalah sosialisasi pedoman sistem pelaporan pelanggaran kepada karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris PT PII. Materi disampaikan oleh Ketua dan Anggota TP3 yaitu Marsiyati dari Komite Audit dan Deki Santo Wibowo dari Divisi Internal Audit.

2. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) PT PII mengadakan sosialisasi SMAP ISO 37001:2016 kepada seluruh Insan Perseroan secara virtual, materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini salah satunya terkait Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran. Pemaparan materi dilakukan oleh Anggota TP3, Deki Santo Wibowo, yang mencakup antara lain:

- Definisi Pelapor -Kriteria pelanggaran yang dapat dilaporkan
- Tim Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (TP3)
- Saluran pelaporan pelanggaran -Kriteria pelaporan pelanggaran
- Perlindungan pelapor

3. Webinar Jaminan Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower*

PT PII bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Geodipa Energi (GeoDipa) mengadakan Webinar Forum GRC 2022 dengan mengangkat tema "Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower*" pada 1 Desember 2022 dengan menghadirkan Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias dan Kepala Satuan Tugas Sosialisasi Anti Korupsi KPK, Wuryono Prakoso.

Poin - poin yang dibahas dalam webinar antara lain :

- Peran penting *whistleblower*
- Perbedaan antara *whistleblower* dengan *Justice Collaborator*
- Tata cara permohonan perlindungan *whistleblower*
- Peraturan perundang undangan terkait perlindungan *whistleblower*

Forms of protection for Whistleblowers from potential retaliation, such as:

1. Unfair dismissal;
2. Demotion or rank;
3. Harassment and/or discrimination and/or pressure;
4. Intimidation in all its forms; and/or
5. Adverse records in their personal data file (*personal file record*).

For whistleblowers who do not wish their identities to be disclosed, the Company ensures the confidentiality of their personal identities, in accordance with the type of violation reported, and will only disclose the whistleblower's identity if the reporting is forwarded to the court or faces legal process that requires the whistleblower's testimony.

Socialization of WBS

IIGF has conducted socialization to the Company's personnel and stakeholders in order to provide understanding of the independently managed WBS.

WBS socialization that has been carried out during 2022 among others:

1. Company Gathering of IIGF 2022

IIGF held a *Company Gathering* on July 22, 2022 as an effort to increase engagement with various activities, one of which is the socialization of violation reporting system guidelines to employees, Directors and Board of Commissioners of IIGF. The material was delivered by Chairman and Members of TP3, namely Marsiyati from the Audit Committee and Deki Santo Wibowo from the Internal Audit Division.

2. Socialization of Anti-Bribery Management System (SMAP)

IIGF's Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) organized the socialization of SMAP ISO 37001: 2016 to all Company personnel virtually. Company virtually, the material presented in this socialization This socialization is one of them related to the Guidelines for the Whistleblowing System Guidelines. The material presentation was carried out by TP3 member, Deki Santo Wibowo, which includes among others:

- Definition of Whistleblower -Criteria of reportable violations
- Whistleblowing Management Team (TP3)
- Channel for reporting violations -Criteria for reporting violation
- Whistleblower protection

3. Webinar on Legal Protection Guarantee for Whistleblowers

IIGF in collaboration with PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), Indonesian Export Financing Institution (LPEI) and PT Geodipa Energi. Indonesia Export Financing Agency (LPEI) and PT Geodipa Energi (GeoDipa) held a GRC Forum 2022 Webinar with the theme "Legal Protection for Whistleblower" on December 1, 2022 by presenting Deputy Chairperson of the LPSK, Susilaningtias and Head of the KPK Anti-Corruption Socialization Task Force, Wuryono Prakoso.

The points discussed in the webinar include:

- The important role of whistleblowers
- The difference between a whistleblower and a Justice Collaborator
- Procedures for applying for whistleblower protection
- Legislation related to the protection of whistleblower



- Rekomendasi penguatan sistem pelaporan pelanggaran pada Perseroan

Webinar mendapatkan antusias yang baik, peserta webinar mencapai ± 500 orang yang terdiri dari Dewan Komisaris, perwakilan manajemen dan karyawan SMV.

4. Integrity Expo KPK

PT PII melaksanakan sosialisasi program WBS dalam acara Integrity Expo KPK yang dilaksanakan pada 9 -10 Desember 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri para menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Perwakilan Mitra KPK, masyarakat umum dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sosialisasi pelaksanaan WBS dilakukan dengan media poster dan video pelaksanaan WBS , game interaktif dan pendampingan langsung dari perwakilan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) PT PII. Dengan dilaksanakannya acara ini, PT PII memperluas target sosialisasi program WBS kepada perwakilan lembaga pemerintah dan masyarakat luas, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap PT PII dapat meningkat dan mekanisme pelaporan pelanggaran dapat tersampaikan dengan baik untuk mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang baiksertabebas dari praktik korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya.

Jumlah Laporan dan Tindak Lanjutnya Tahun 2022

Pada tahun 2022, Perseroan mencatat tidak ada pelaporan atas dugaan pelanggaran baik yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar terkait dan peraturan internal Perseroan yang meliputi hal-hal sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

Uraian Description	2022	2021
Jumlah pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir Number of complaints received in the last fiscal year	Nihil Nil	Nihil Nil
Jumlah pengaduan yang diproses pada tahun buku terakhir Number of complaints processed in the last fiscal year	Nihil Nil	Nihil Nil
Jumlah pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku terakhir Number of complaints that have been processed in the last fiscal year	Nihil Nil	Nihil Nil
Jumlah pengaduan yang belum selesai diproses Number of complaints that have not been processed	Nihil Nil	Nihil Nil

- Recommendations for strengthening the whistleblower reporting system in the Company

The webinar received good enthusiasm, webinar participants reached ± 500 people consisting of the Board of Commissioners, management representatives and SMV employees.

4. Integrity Expo KPK

IIGF carried out the socialization of the WBS program in the event of Integrity Expo KPK which was held on December 9-10, 2022 at Bidakara Hotel, Jakarta. 2022 at Bidakara Hotel, Jakarta. This activity was attended by ministers, Heads of Institutions, Heads of Regions, Representatives of KPK Partners, the general public and the Vice President of the Republic of Indonesia. KPK partners, the general public and the Vice President of the Republic of Indonesia.

The socialization of WBS implementation was carried out with media posters and videos on the implementation of WBS, interactive games, and direct assistance from representatives of the Management Team With the implementation of this event, IIGF expanded the target of WBS program socialization to representatives of institutions. socialization of the WBS program to representatives of government agencies and the wider community, so that it is expected that public and stakeholder trust in IIGF can increase and the mechanism for reporting violations can increase and the mechanism for reporting violations can be well conveyed to encourage implementation of good corporate governance as well as freedom from corruption, bribery and other fraudulent practices.

Number of Reports and Follow-up in 2022

In 2022, the Company recorded that there were no reports of alleged violation either categorized as act that violate laws and regulations, related regulations/standards and internal regulations of the Company which include matters as stipulated in the IIGF Violation Reporting System Guidelines.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DAN RUJUKAN KEBERLANJUTAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REFERENCES

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan meletakkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam koridor keberlanjutan sebagai salah satu upaya menjaga kesinambungan bisnis melalui kegiatan yang mendukung terwujudnya hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam melaksanakan aktivitas TJSL, Perseroan membangun jalur-jalur komunikasi untuk dapat menangkap aspirasi para pemangku kepentingan, baik yang terlibat ataupun terdampak, secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas operasional Perseroan. Perseroan dalam hal ini telah memetakan para pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan dan frekuensi keterlibatannya, yakni meliputi Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), Pemerintah Daerah, hingga masyarakat. Sementara itu, hubungan yang dibangun dengan para pemangku kepentingan diwujudkan sebagai salah satu bentuk komitmen tanggung jawab sosial perusahaan dengan melaksanakan berbagai aktivitas yang mencakup berbagai sektor, di antaranya kesehatan, lingkungan, donasi sosial, keagamaan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi para pelaku UMKM.

Dalam kapasitasnya mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, bahkan di tengah pandemi Covid-19 sekalipun, maka pelaksanaan program TJSL oleh Perseroan diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang digagas dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah menjadi komitmen global, termasuk di Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan TJSL juga diharapkan akan membangun daya saing Perseroan dan meningkatkan skala ekonomi Perseroan sehingga Perseroan mempertahankan kelangsungan bisnisnya dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk jangka panjang bagi seluruh *stakeholder*.

Kemudian dengan fokus menciptakan manfaat bersama atau *Creating Shared Value* (CSV), yaitu *Profit, People* dan *Planet*, pelaksanaan TJSL diharapkan meningkatkan kontribusinya terhadap perbaikan kualitas hidup manusia, dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, menciptakan kehidupan yang sehat, bebas sampah dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, inovasi dan infrastruktur, penanganan perubahan iklim, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Perseroan senantiasa mengedepankan komitmen dalam memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. Sebagai bentuk tanggung jawab atas layanan yang diberikan, Perseroan menyediakan media pengaduan melalui:

Corporate Social Responsibility

IIGF strives to maintain business continuity through activities that support the realization of harmonious relationships with the stakeholders, including by placing Corporate Social Responsibility (CSR) in the corridor of sustainability.

In connection with this, in carrying out CSR activities, IIGF establishes communication channels to be able to capture the aspirations from the stakeholders, both those involved or affected, directly or indirectly by IIGF's operational activities. In this case, IIGF has mapped the stakeholders based on their interests and frequency of involvement, which includes the Government Contracting Agency (GCA) the Local Government, and the community. Meanwhile, the relationship established with the stakeholders is realized as commitment to corporate social responsibility by carrying out various activities covering various sectors, including health, environment, social donations, religion, education to economic empowerment of MSME actors.

In the capacity to support the smooth development of infrastructure throughout Indonesia, even in the middle of the Covid-19 pandemic, CSR program by IIGF is expected to strengthen the government efforts to actualize the goals to be achieved in the Sustainable Development Goals (SDGs), which were initiated in the United Nations forum and have become global commitments, including in Indonesia.

Moreover, CSR implementation is also expected to build IIGF's competitiveness and increase its economic scale so as to maintain business continuity and be able to provide long-term sustainable benefits for all stakeholders.

Furthermore, with a focus on *Creating Shared Value* (CSV), namely *Profit, People* and *Planet*, CSR implementation is expected to increase its contribution to improving the quality of human life, in the form of community economic empowerment to support efforts to alleviate poverty, create a healthy, waste-free and prosperous life, quality education, clean water and proper sanitation, clean and affordable energy, innovation and infrastructure, handling climate change, and partnerships to achieve goals.

The Company always prioritizes the commitment to providing benefits for stakeholders. As a form of responsibility for the services, the Company provides a reporting media via:



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place 7th-8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18
Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12710 - Indonesia

+62 21 5795 0550

PT PII – Persero

+62 21 5795 0040

@pii_persero

info@iigf.co.id

@PII_Persero

www.iigf.co.id

Dasar Peraturan Pelaksanaan Program TJSL

Dalam menjalankan program TJSL, Perseroan berpedoman pada sejumlah peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Anggaran Dasar Perseroan;
- Surat Keputusan Direksi No. SK-004/BOD/CSR/2015 tentang Besaran Penyaluran Dana *Sponsorship*, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/PII-BOD/1020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Prinsip Dasar Pelaksanaan TJSL

Berdasarkan pedoman peraturan di atas, Perseroan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang memiliki prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan seluruh program TJSL yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini:

1. Keberlanjutan (Sustainability)

Pelaksanaan TJSL senantiasa mengakomodir prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) sumber daya/program di masa mendatang. Keberlanjutan (*going concern*) dari sumber daya maupun program yang dilaksanakan diharapkan akan memberikan manfaat bagi Perseroan dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya/program di masa mendatang.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Program TJSL dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya citra positif Perseroan serta memelihara jaringan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di samping dapat mengantisipasi potensi timbulnya penyalahgunaan dan penyimpangan.

Basic Regulations for Implementing the CSR

In carrying out the CSR program, IIGF is guided by a number of internal regulations and applicable laws and regulations, including:

- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning the Limited Liability Companies as amended by Law no. 11 of 2020 concerning the Job Creation;
- Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning the State-Owned Enterprises as amended by Law no. 11 of 2020 concerning the Job Creation;
- Government Regulation No. 47 of 2012 concerning the Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
- Articles of Association of the Company;
- Decree of the Board of Directors No. SK-004/BOD/CSR/2015 concerning the Amount of Sponsorship Fund Distribution, Donations, Corporate Social and Environmental Responsibility;
- Board of Directors Decree No. 010/SK/PII-BOD/1020 concerning the Guidelines for the Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility; and
- Standard Operating Procedures for the Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility.

Basic Principles of Implementing the CSR

Based on the above regulatory guidelines, IIGF prepared Guidelines for the Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility, which has the following basic principles as the basic of the overall CSR programs as follows:

1. Sustainability

CSR implementation always accommodates the principles of sustainability of resources/programs in the future. The sustainability (*going concern*) of the resources and programs carried out is expected to provide benefits to IIGF while still paying attention to and taking into account the ability of resources/programs in the future.

2. Accountability

The CSR program is carried out openly and responsibly to support the realization of a positive image of IIGF and maintain a good communication network with interested parties (*stakeholders*) in addition to anticipating the potential for abuse and irregularities.

3. Transparansi (Transparency)

Perseroan mengadopsi prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan TJSL melalui penyampaian pelaporan kegiatan Perseroan secara berkala kepada pihak eksternal maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait lainnya.

Struktur Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Divisi Corporate Secretary & Communication untuk merancang sekaligus melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Agar dapat merancang program TJSL yang tepat dan efektif, Corporate Secretary & Communication berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra pelaksana program yaitu institusi pemerintah, akademisi, lembaga kemanusiaan dan lembaga sosial serta komunitas masyarakat setempat. Dalam melaksanakan berbagai program TJSL, Divisi Corporate Secretary & Communication berkoordinasi dengan divisi terkait lainnya untuk dapat merancang dan melaksanakan program TJSL yang disesuaikan dengan strategi dan program kerja korporasi.

Visi dan Misi Pelaksanaan TJSL

Perseroan menjalankan kegiatan TJSL sebagai bagian dari komitmen untuk memenuhi tanggung jawab dan mandatnya kepada para pemangku kepentingan Perseroan untuk melaksanakan operasional yang berwawasan lingkungan dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, kegiatan operasional diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak positif yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan perusahaan.

Metode dan Lingkup Evaluasi atas Dampak Kegiatan Perseroan terhadap Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup

Perseroan senantiasa memastikan bahwa setiap kegiatan operasionalnya memiliki dampak positif yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan. Perseroan dalam hal ini melaksanakan studi kelayakan terhadap dampak yang timbul dari kegiatan penjaminan infrastruktur yang merupakan bisnis inti Perseroan dalam kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan para pemangku kepentingan. Studi kelayakan tersebut mencakup penilaian atas manfaat dan risiko kerugian yang dapat timbul dari setiap kegiatan pembangunan infrastruktur yang memperoleh penjaminan dari PT PII.

Penerapan Manajemen Risiko Seputar Pelaksanaan Kegiatan TJSL PT PII

Perseroan mengelola isu-isu terkait pelaksanaan TJSL sebagai bagian dari aktivitas manajemen risiko perusahaan. Pengelolaan isu-isu terkait pelaksanaan TJSL menjadi sangat penting agar Perseroan dapat mengukur dampak yang ditimbulkan dari setiap kegiatan operasionalnya terhadap aspek sosial ekonomi maupun lingkungan sekitar. Dalam hal ini, Perseroan mengidentifikasi isu-isu seperti pergerakan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat sebagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian jaminan sebagai salah satu wujud komitmennya terhadap pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan terkait aspek sosial ekonomi.

3. Transparency

IIGF adopts the principle of transparency in implementing the overall CSR activities through the submission of regular IIGF activity reports to the external parties and other relevant stakeholders.

Corporate Social Responsibility Management Structure

The Company has assigned the Corporate Secretary & Communication Division to design and to carry out the Corporate Social Responsibility (CSR) programs appropriately and effectively, the Corporate Secretary & Communication Division collaborates with numerous parties to carry out the programs as partners, including with the government institutions, academics, humanitarian institutions and social institutions as well as the surrounding communities. In carrying out the CSR programs, the Corporate Secretary & Communication Division coordinates with other related divisions in order to design and carry out the CSR programs in accordance with the Company's strategies and work programs.

CSR Vision and Mission

The Company carries out CSR activities as part of its commitment to fulfill the responsibilities and mandates to the Company's stakeholders in order to carry out environmentally-sound operations and with respect to the principles of good corporate governance. By this way, the operational activities are expected to provide maximum positive contribution and impact for all stakeholders, both directly and indirectly affected by the company's activities.

Method and Scope of Evaluation of the Impact of the Company's Activities on Social, Economic and Environmental Aspects

The Company always ensures that every operational activity will be impactful for all stakeholders. The Company in this case conducts a due diligence on the impacts potentially arising from infrastructure guarantee activities, which is our core business in relation to the social, economic and environmental aspects of the stakeholders. The due diligence includes an evaluation of the benefits and risks of losses that may arise from any infrastructure development activities that receive guarantees from IIGF.

Implementation of Risk Management Surrounding IIGF's CSR Activities

The Company manages issues related to the implementation of CSR as part of the company's risk management activities. Management of issues surrounding its CSR implementation is very important to help the Company measure the impact of each of its operational activities on socio-economic aspects and the surrounding environment. In this regard, the Company identifies issues such as economic movement and improvement of community welfare as factors that need to be considered in providing guarantees as part of its commitment to fulfilling corporate social responsibilities relating to socio-economic aspect.



Sementara itu, Perseroan juga memberikan perhatian atas potensi eksposur terhadap isu-isu pelestarian lingkungan, terutama perlindungan terhadap ekosistem di sekitar lokasi pembangunan infrastruktur yang memperoleh jaminan PII, sebagai bagian dari pelaksanaan TJSL terhadap aspek lingkungan hidup.

Tujuan Pelaksanaan TJSL

Perseroan melaksanakan program TJSL dalam rangka mengadopsi konsep Menciptakan Nilai Bersama (CSV), dengan tujuan untuk mengatasi sosial, dan menjadikan TJSL sebagai bagian dari strategi Perseroan dalam memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi Perseroan dan masyarakat, khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan telah menetapkan arah dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan TJSL, yaitu ke dalam 3 tujuan utama yang terdiri dari:

1. Memberikan dampak sosial dan ekonomi yang optimal serta memberikan kebermanfaatannya seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan;
2. Memperkuat reputasi Perseroan dan menciptakan citra positif dimata pemangku kepentingan; dan
3. Memberikan nilai tambah bagi Perseroan, Pemangku kepentingan dan masyarakat.

Program TJSL Prioritas

Perseroan juga telah menetapkan program TJSL prioritas, yakni difokuskan pada sektor yang mendukung percepatan pembangunan dan Environment, Social and Governance (ESG) khususnya pada aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua sektor ini merupakan fokus pemerintah dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam hal pelestarian lingkungan kemandirian masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Khusus terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya direalisasikan melalui dukungan Perseroan bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan sendiri Program Ekonomi Masyarakat/UMKM yang telah berjalan sejak tahun 2019 melalui pemberian edukasi dan pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku usaha kecil/UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha para pelaku usaha kecil/UMKM, terutama para perempuan, serta mereka yang menjadi penggerak dan tulang punggung ekonomi ke depan. Dengan demikian, dengan kapasitas yang lebih baik, para pelaku UMKM ini dapat berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Implementasi Program TJSL di Tahun 2022

Pada tahun 2022, Perseroan telah menyusun agenda program TJSL yang mencakup aspek lingkungan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sosial dan tanggap darurat bencana alam. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, Perseroan telah membuat perencanaan inisiatif kegiatan, yaitu sebanyak 29 program. Kemudian untuk mendukung pelaksanaannya, Perseroan telah menganggarkan dana sebesar Rp3.783.648.981 dengan tingkat penyerapan sebesar 57% dari total alokasi anggaran TJSL di tahun 2022. Berikut laporan penyerapan program TJSL berdasarkan sektornya:

Meanwhile, the Company also pays attention to potential exposure to environmental conservation issues, especially the protection of ecosystem around infrastructure development sites where PII provides guarantee, as part of the CSR implementation regarding the environmental aspect.

Objectives of CSR Implementation

The Company implements CSR program in order to adopt the Creating Shared Value (CSV) concept, with the aim of addressing social issues, and making CSR part of the Company's strategy in providing economic and social added value for the Company and the community, especially those related to business activities of the Company.

IIGF determined the direction and objectives of CSR activities into 3 main objectives consisting of the following:

1. Provides positive social and economic impacts as well as provides wide benefits for the communities and the environment;
2. Strengthening IIGF's reputation and create a positive image in the eyes of stakeholders; and
3. Providing added values for the stakeholders and communities.

Priority CSR Program

The Company has also determined the priority CSR programs, which is focused on sectors that support the acceleration of Environmental, Social and Governance (ESG) development, especially on environmental and community empowerment aspects. These two sectors are the government's focus in supporting the Sustainable Development Goals in the environmental preservation and community independency in establishing a sustainable public welfare.

Specifically related to community economic empowerment, one of which is realized through IIGF's support for the acceleration of infrastructure development in Indonesia. In addition, IIGF has also developed its own Community Economy/SME Program which has been running since 2019 through the provision of entrepreneurship education and training for small businesses/SMEs. This program aims to improve the quality and business capacity of small businesses/SMEs, especially women, as well as those who are the drivers and backbone of the economy in the future. Thus, with better capacity, these MSME players can play a major role in Indonesia's economic development in the future.

Implementation of the CSR Program in 2022

In 2022, IIGF developed CSR program agenda that includes the aspects of environment, education, health, community economic empowerment, social and natural disaster emergency response. Based on these aspects, IIGF planned 29 programs of activity initiatives. Furthermore, to support the implementation, IIGF budgeted funds amounting to Rp3,783,648,981 with an absorption rate of 57% of the total CSR budget allocation in 2022. The following is a report on the absorption of the CSR program based on its sector:

Rincian Penyerapan Dana TJSL

Details of CSR Fund Absorption

Program CSR CSR Program	Jumlah Kegiatan Number of Activities	Nilai Anggaran (Rp) Budget Value (Rp)
Jumlah Program TJSL/Total CSR Program	29 program/activities	3.783.648.981
Lingkungan/Environment	6 kegiatan/activities	794.913.900
Pemberdayaan Masyarakat/Community Empowerment	7 kegiatan/activities	887.963.506
Pendidikan/Education	6 kegiatan/activities	687.773.825
Sosial Keagamaan/Social Religion	9 kegiatan/activities	1.258.277.750
Kesehatan/Health	1 kegiatan/activities	154.720.000

Program TJSL yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 dapat dilaporkan berikut ini:

CSR programs implemented in 2022 are as follows:

Keselarasn dengan sasaran TPB Alignment with the SDG goals	Judul Kegiatan Activity Title	Keterangan Description	Penerima manfaat Beneficiaries	Alokasi biaya program Program cost allocation
No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, No. 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur No. 8 Decent Work and Economic Growth, No. 9 Industry, Innovation and Infrastructure	Pengisian Sentra UMKM KEK Mandalika Replenishment of Mandalika SEZ MSME Center	Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	Sentra UMKM KEK Mandalika Mandalika SEZ MSME Center	Rp71.587.506
No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, No. 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur No. 8 Decent Work and Economic Growth, No. 9 Industry, Innovation and Infrastructure	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Hoat Sorbay – Maluku Tenggara Community Empowerment in Hoat Sorbay Sub-district - Southeast Maluku	Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	Masyarakat di Kecamatan Hoat Sorbay – Maluku Tenggara Community in Hoat Sorbay Sub-district - Southeast Maluku	Rp185.592.000
No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, No. 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur No. 8 Decent Work and Economic Growth, No. 9 Industry, Innovation and Infrastructure	Program Donasi dan Support UMKM di wilayah DKI Jakarta “Semua Bisa Makan” Donation and Support Program for MSMEs in DKI Jakarta area “All Can Eat”	Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	UMKM di wilayah DKI Jakarta MSMEs in DKI Jakarta area	Rp112.200.000
No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, No. 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur No. 8 Decent Work and Economic Growth, No. 9 Industry, Innovation and Infrastructure	Program Dukungan Kewirausahaan Pelaku UMKM ex Pekerja Konstruksi PLTU Batang Entrepreneurship Support Program for SMEs ex-Construction Workers of CJPP	Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	Pelaku UMKM ex Pekerja PLTU Batang SMEs ex-Construction Workers of CJPP	Rp179.944.000
No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, No. 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur No. 8 Decent Work and Economic Growth, No. 9 Industry, Innovation and Infrastructure	Desa Berdaya -Pemberdayaan Masyarakat di Purwakarta Village Empowerment - Community Empowerment in Purwakarta	Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	Masyarakat di Purwakarta Community in Purwakarta	Rp148.440.000
No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, No. 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur No. 8 Decent Work and Economic Growth, No. 9 Industry, Innovation and Infrastructure	Desa Berdaya -Pemberdayaan Masyarakat di Kendal Village Empowerment - Community Empowerment in Kendal	Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	Masyarakat Kendal Kendal Community	Rp155.200.000



Keselarasan dengan sasaran TPB <i>Alignment with the SDG goals</i>	Judul Kegiatan <i>Activity Title</i>	Keterangan <i>Description</i>	Penerima manfaat <i>Beneficiaries</i>	Alokasi biaya program <i>Program cost allocation</i>
No. 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan No. 11 Sustainable Cities and Communities	Program CSR Donasi Bantuan Pembangunan Renovasi Rest Area di OKU Timur CSR Program Donation for the Construction of Rest Area Renovation in East OKU	Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	Masyarakat di OKU Timur Community in East OKU	Rp35.000.000
No. 4 Pendidikan berkualitas No. 4 Quality Education	Program CSR Pendidikan – Pelatihan Computer Assisted Test (CAT) Tahap 1 bagi Pegawai Honorer Kementerian PUPR RI CSR Education Program - Computer Assisted Test (CAT) Training Phase 1 for Honorer Employees of the Ministry of Public Works & Housing of the Republic of Indonesia	Pendidikan Education	Pegawai Honorer Kementerian PUPR RI Honorer Employees of the Ministry of Public Works & Housing of the Republic of Indonesia	Rp159.973.200
No. 4 Pendidikan berkualitas No. 4 Quality Education	Kementerian Keuangan Mengajar Ministry of Finance Teaching	Pendidikan Education	-	Rp50.000.000
No. 4 Pendidikan berkualitas No. 4 Quality Education	Peningkatan Kompetensi Profesional Guru melalui Program Pelatihan Guru Binar di Kota Denpasar, Semarang, Surabaya/ Malang, Kab. Maluku Utara dan Kab. Maluku Tenggara Improving Teachers' Professional Competence through the Guru Binar Training Program in Denpasar, Semarang, Surabaya/ Malang, North Maluku and Southeast Maluku districts	Pendidikan Education	Guru Binar di Kota Denpasar, Semarang, Surabaya/Malang, Kab. Maluku Utara dan Kab. Maluku Tenggara Guru Binar in Denpasar, Semarang, Surabaya/ Malang, North Maluku and Southeast Maluku districts	Rp148.000.000
No. 4 Pendidikan berkualitas No. 4 Quality Education	Program CSR Donasi Bantuan Renovasi Taman Baca Masyarakat Melati, Sidoarjo CSR Program Donation for the Renovation of Melati Community Reading Park, Sidoarjo	Pendidikan Education	Masyarakat Melati, Sidoarjo Melati Community, Sidoarjo	Rp31.206.000
No. 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera No. 3 Good Health and Well-Being	Program Kesehatan Zero TB di Yogyakarta Zero TB Health Program in Yogyakarta	Kesehatan Health	Masyarakat Yogyakarta Yogyakarta Community	Rp154.720.000
No. 1 Tanpa Kemiskinan, No. 2 Tanpa Kelaparan No. 1 No Poverty, No. 2 Zero hunger	Donasi bantuan tanggap bencana gempa di Cianjur Donation for earthquake disaster response in Cianjur	Sosial Keagamaan Social Religion	Masyarakat terdampak gempa Cianjur People affected by Cianjur earthquake	Rp110.880.000

Keselarasan dengan sasaran TPB <i>Alignment with the SDG goals</i>	Judul Kegiatan <i>Activity Title</i>	Keterangan <i>Description</i>	Penerima manfaat <i>Beneficiaries</i>	Alokasi biaya program <i>Program cost allocation</i>
No. 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera No. 3 Good Health and Well-Being	Pengolahan Sampah Organik dengan Bio Konversi di Kota Yogyakarta Processing Organic Waste with Bio Conversion in Yogyakarta City	Lingkungan Environment	Masyarakat Yogyakarta Yogyakarta Community	Rp200.000.000
No. 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak No. 6 Clean Water and Sanitation	Sanitasi & Pemanenan Air Hujan Sanitization & Rainwater Harvesting	Lingkungan Environment	-	Rp76.385.900
No. 13 Penanganan Perubahan Iklim, No. 14 Ekosistem Lautan No. 13 Climate Action, No. 14 Life Below Water	Program Akuakultur & Rehabilitasi Mangrove di Desa Pegat Batumbuk, Berau, Kaltim Aquaculture & Mangrove Rehabilitation Program in Pegat Batumbuk Village, Berau, East Kalimantan	Lingkungan Environment	Masyarakat Desa Pegat Batumbuk, Berau, Kaltim Batumbuk Village Community, Berau, East Kalimantan	Rp99.000.000
No. 13 Penanganan Perubahan Iklim, No. 14 Ekosistem Lautan No. 13 Climate Action, No. 14 Life Below Water	Sinergi all SMV- Program Akuakultur SECURE dan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan di Berau, Kaltim All SMV Synergy- SECURE Aquaculture Program and Sustainable Mangrove Ecotourism in Berau, East Kalimantan	Lingkungan Environment	Masyarakat Berau, Kaltim Berau Community, East Kalimantan	Rp160.000.000
No. 13 Penanganan Perubahan Iklim, No. 15 Ekosistem Daratan No. 13 Climate Action, No. 15 Life on Land	Sinergi Geo Dipa - Penghijauan di daerah Dieng, Jateng Geo Dipa Synergy - Greening in Dieng area, Central Java	Lingkungan Environment	Masyarakat Dieng, Jateng Dieng Community, Central Java	Rp126.318.000
No. 13 Penanganan Perubahan Iklim, No. 15 Ekosistem Daratan No. 13 Climate Action, No. 15 Life on Land	Sinergi SMF - Penghijauan daerah aliran sungai Citarum SMF Synergy - Citarum watershed reforestation	Lingkungan Environment	Masyarakat dekat aliran sungai Citarum Communities near the Citarum River	Rp133.200.000
No. 1 Tanpa Kemiskinan, No. 2 Tanpa Kelaparan No. 1 No Poverty, No. 2 Zero hunger	Donasi Ramadhan Ramadan Donation	Sosial Keagamaan Social Religion	-	Rp447.041.000
No. 1 Tanpa Kemiskinan, No. 2 Tanpa Kelaparan No. 1 No Poverty, No. 2 Zero hunger	Idul Adha Eid al-Adha	Sosial Keagamaan Social Religion	-	Rp350.000.000
No. 1 Tanpa Kemiskinan, No. 2 Tanpa Kelaparan No. 1 No Poverty, No. 2 Zero hunger	Program CSR Donasi Bantuan Sembako Ramadhan di Kota Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur CSR Program for Ramadan Food Donation in Pasuruan and Probolinggo City, East Java	Sosial Keagamaan Social Religion	Masyarakat Kota Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur People of Pasuruan and Probolinggo City, East Java	Rp32.000.000



Keselarasan dengan sasaran TPB <i>Alignment with the SDG goals</i>	Judul Kegiatan <i>Activity Title</i>	Keterangan <i>Description</i>	Penerima manfaat <i>Beneficiaries</i>	Alokasi biaya program <i>Program cost allocation</i>
No. 1 Tanpa Kemiskinan, No. 2 Tanpa Kelaparan No. 1 No Poverty, No. 2 Zero hunger	Program CSR Donasi Bantuan Sembako Ramadhan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur CSR Program for Ramadan Food Donation in Pasuruan Regency, East Java	Sosial Keagamaan Social Religion	Masyarakat Kota Pasuruan, Jawa Timur People of Pasuruan City, East Java	Rp30.000.000
No. 1 Tanpa Kemiskinan, No. 2 Tanpa Kelaparan No. 1 No Poverty, No. 2 Zero hunger	Program Bantuan Ramadhan Jawa Timur East Java Ramadan Assistance Program	Sosial Keagamaan Social Religion	Masyarakat Jawa Timur East Java Community	Rp198.256.750
No. 1 Tanpa Kemiskinan, No. 2 Tanpa Kelaparan No. 1 No Poverty, No. 2 Zero hunger	Program CSR Donasi Pembagian Paket Sembako Masa Pandemi Covid-19 kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Demak, Jawa Tengah CSR Program Donation Distribution of Food Packages during the Covid-19 Pandemic to Underprivileged Communities in Demak Regency, Central Java	Sosial Keagamaan Social Religion	Masyarakat kurang mampu di Kabupaten Demak, Jawa Tengah Underprivileged Communities in Demak Regency, Central Java	Rp32.100.000
No. 4 Pendidikan berkualitas No. 4 Quality Education	Program CSR Pendidikan untuk Pesantren – Bantuan Meja dan Kursi untuk Pembelajaran di Pesantren, Kendal Jawa Tengah CSR Education Program for Islamic Boarding Schools - Tables and Chairs for Learning in Islamic Boarding Schools, Kendal, Central Java	Sosial Keagamaan Social Religion	Pelajar Pesantren di Kendal Jawa Tengah Islamic Boarding School Students in Kendal, Central Java	Rp31.250.000
No. 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera No. 3 Good Health and Well-Being	Program CSR Donasi Jalan Santai dan Jalan Sehat dalam rangka HUT RI ke 77 di Tasikmalaya CSR Donation Program for Fun Walk and Healthy Walk for the 77 th Indonesian Independence Day in Tasikmalaya	Sosial Keagamaan Social Religion	Masyarakat Tasikmalaya Tasikmalaya Community	Rp26.750.000

Rujukan Keberlanjutan

Selain pelaksanaan program TJSL, Perseroan dalam kapasitasnya mendukung program-program keberlanjutan Pemerintah Indonesia yang fokus pada penyelarasan kinerja dunia usaha khususnya BUMN dengan pertumbuhan masyarakat dan lingkungan, juga melaksanakan program keberlanjutan di segenap aspek usahanya. Di antara program keberlanjutan yang dilaksanakan Perseroan adalah penguatan penerapan prinsip K3 dan pengendalian dampak lingkungan, dukungan bagi

Sustainability Reference

Apart from CSR program, the Company in its capacity to support the Indonesian Government sustainability programs that focus on aligning the performance of the business world, especially SOEs with community and environmental growth, also implements sustainability programs in all aspects of its business. Among the sustainability programs implemented by IIGF are strengthening the implementation of OHS principles and environmental impact control, support for efficient energy use, employee competency

penggunaan energi yang efisien, pengembangan kompetensi karyawan dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis antara Perseroan dan karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan, serta pemenuhan tanggung jawab atas produk dan layanan jasa.

Lebih lanjut mengenai kegiatan TJSL Perseroan serta wujud komitmen keberlanjutan Perseroan disajikan pada Laporan Keberlanjutan tahun 2022 yang merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan 2022 ini.

Penghargaan dan Sertifikasi

Perseroan belum melaksanakan sertifikasi terkait dengan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya mengenai pengelolaan lingkungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di tahun 2022, Perseroan menerima *award* yaitu *Environmental and Social Innovation Awards* dengan apresiasi *Gold* dalam kategori Inovasi Sosial.

Penyelarasan Kinerja Keberlanjutan Perseroan dengan Sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perseroan mendukung SDGs khususnya pada item No. 1, No. 2, No. 3, No.4, No. 6, No. 8, No. 9, No. 13 dengan kontribusi nyata melalui Program TJSL.

development in order to build harmonious industrial relations between the Company and employees as one of the stakeholders, and fulfillment of responsibility for products and services.

Detailed information on CSR activities of the Company and the realization of sustainability commitment of the Company is presented in the 2022 Sustainability Report which is an integral report of this 2022 Annual Report.

Award and Certification

The Company has yet to carry out certification regarding the implementation of corporate social responsibility, especially relating to environmental management. However, the Company received Environmental and Social Innovation Awards in 2022 with a Gold appreciation in the category of Social Innovation.

Alignment of IIGF's Sustainability Performance with the Goals of the Sustainable Development Objectives

The Company supports SDGs, especially on items No. 1, No. 2, No. 3, No.4, No. 6, No. 8, No. 9, No. 13 with real contributions through the CSR Program.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN





“Lebih lanjut tentang upaya PT PII dalam mewujudkan keberlanjutan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan tahun 2022 sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.”

“More detailed information on the Company’s efforts to actualize sustainability is presented in the 2022 Sustainability Report as an integral document of this Annual Report.”





LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN/*FINANCIAL STATEMENTS*

31 DESEMBER/*DECEMBER* 2022



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SERTA UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Wahid Sutopo
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Alamat Rumah : Jalan Taman Wijaya Kusuma I
No. 2-A, RT 009, RW 002,
Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021- 5795 0550
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Donny Hamdani
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Alamat Rumah : Jl. Duren Sawit Blok K2/10 RT
012 RW 011, Klender, Duren
Sawit, Jakarta Timur
Nomor Telepon : 021- 5795 0550
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2022 AND
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022**

We, the undersigned:

1. Name : M. Wahid Sutopo
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Residential address: Jalan Taman Wijaya Kusuma I
No. 2-A, RT 009, RW 002,
Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan
Telephone : 021- 5795 0550
Title : President Director
2. Name : Donny Hamdani
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Residential address: Jl Duren Sawit Blok K2/10 RT
012 RW 011, Klender, Duren
Sawit, Jakarta Timur
Telephone : 021- 5795 0550
Title : Finance Director

declare that:

1. we are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. all information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
b. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. we are responsible for the internal control system of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 27 Februari/February 2023

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors


M. Wahid Sutopo
Direktur Utama
President Director


Donny Hamdani
Direktur Keuangan/
Finance Director



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.



Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*



- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
27 Februari/February 2023

Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0229



Pengaman Infrastruktur Indonesia
00198/2.1025/AU.1/09/0229-3/1/II/2023

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 1 - Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>2022</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2021</u>	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	134,306,368	5	5,893,947,654	Cash and cash equivalents
Investasi	15,008,163,837	6	7,948,301,268	Investments
Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.000.000 (2021: nihil)	294,720,460	7	169,217,041	Account receivables – net of allowance for impairment losses of Rp 2,000,000 (2021: nil)
Piutang lainnya	9,884,584		10,735,297	Other receivables
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2,824,837		6,734,223	Prepaid expenses and advances
Aset tetap	4,895,573	8	8,140,743	Fixed assets
Aset hak guna	12,573,130	9	31,432,826	Right-of-use assets
Aset takberwujud	5,469,731	10	3,242,322	Intangible assets
Beban tangguhan	5,663,392	11	7,570,928	Deferred expenses
Pajak dibayar dimuka	2,015,255	13a	1,612,945	Prepaid income tax
Aset pajak tangguhan	69,194,332	13d	58,130,420	Deferred tax asset
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>5,369,039</u>		<u>5,369,039</u>	Refundable deposits
JUMLAH ASET	<u>15,555,080,538</u>		<u>14,144,434,706</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	9,993,160	12	7,372,764	Account payables
Utang pajak	3,779,948	13b	4,421,469	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	135,669,181	14	65,281,828	Accrued expenses, provisions and other payables
Pendapatan tangguhan	169,931,976	15	171,117,254	Unearned income
Liabilitas sewa pembiayaan	8,545,628	16	33,504,325	Finance lease liabilities
Pinjaman penerusan	55,126,686	17	55,126,686	Two-step loans
Liabilitas imbalan kerja	<u>18,565,047</u>	18	<u>18,895,639</u>	Employee benefits obligation
JUMLAH LIABILITAS	<u>401,611,626</u>		<u>355,719,965</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal dasar, 20.000.000 lembar - ditempatkan dan disetor penuh 10.655.000 lembar (2021: 9.570.000 lembar), dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	10,655,000,000	19	9,570,000,000	Share capital - authorised, 20,000,000 shares - issued and paid 10,655,000 shares (2021: 9,570,000 shares), with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share
Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	20,604,578		300,351,343	Unrealised gain from financial assets at fair value through other comprehensive income
Keuntungan aktuarial, setelah pajak	5,906,831		4,228,982	Gain from actuarial, net of tax
Saldo laba Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib	228,769,445	21	197,499,338	Retained earnings Appropriated - statutory reserve
Belum ditentukan penggunaannya	<u>4,243,188,058</u>		<u>3,716,635,078</u>	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	<u>15,153,468,912</u>		<u>13,788,714,741</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>15,555,080,538</u>		<u>14,144,434,706</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 2 - Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>2022</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2021</u>	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan penjaminan	252,573,833	22	156,529,213	<i>Revenue from guarantee</i>
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	41,098,924	22	29,171,852	<i>Revenue from project preparation and transaction advisory</i>
Pendapatan pengelolaan dana	793,702,056	22	735,871,054	<i>Income from investments</i>
Pendapatan lainnya	<u>1,477,498</u>	22	<u>935,260</u>	<i>Other income</i>
Jumlah pendapatan	<u>1,088,852,311</u>		<u>922,507,379</u>	<i>Total revenues</i>
Beban usaha				Operating expenses
Umum dan administrasi	(113,441,398)	23	(79,436,801)	<i>General and administrative</i>
Beban pajak final	(98,959,572)	13c	(115,019,709)	<i>Final tax expense</i>
Penjaminan	(82,378,959)	23	(73,413,285)	<i>Guarantee</i>
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	(49,357,081)	23	(34,093,470)	<i>Project preparation and transaction advisory</i>
Pengembangan usaha	(31,257,890)	23	(24,592,371)	<i>Business development</i>
Beban bunga (termasuk beban bunga sewa pembiayaan)	(6,403,589)		(8,452,222)	<i>Interest expense (including finance lease interest)</i>
Penyusutan	(4,526,421)	8	(4,427,073)	<i>Depreciation</i>
Kerugian penurunan nilai	(2,000,000)	7	-	<i>Impairment losses</i>
Amortisasi	(1,773,502)	10	(982,412)	<i>Amortisation</i>
Keuntungan/(kerugian) kurs, bersih	337,799		(3,498)	<i>Foreign exchange gain/(loss), net</i>
Penghasilan keuangan, kotor	1,815,715		6,082,614	<i>Finance income, gross</i>
Lain-lain	<u>1,729,057</u>		<u>397,562</u>	<i>Others</i>
Jumlah beban usaha	<u>(386,215,841)</u>		<u>(333,940,665)</u>	<i>Total operating expenses</i>
Laba sebelum pajak penghasilan	702,636,470		588,566,714	Profit before income tax
Manfaat pajak penghasilan	<u>11,537,151</u>	13c	<u>36,835,422</u>	<i>Income tax benefit</i>
Laba tahun berjalan	714,173,621		625,402,136	Profit for the year
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive (loss)/income for the year:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: (Kerugian)/keuntungan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	<u>(279,746,765)</u>	6	<u>1,358,616</u>	<i>Items that will be reclassified subsequently to profit and loss: (Loss)/gain from financial assets at fair value through other comprehensive income for the year</i>
	<u>(279,746,765)</u>		<u>1,358,616</u>	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	2,151,088	18	6,012,578	<i>Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss: Remeasurement from post-employment benefits obligation</i>
Pajak penghasilan terkait	<u>(473,239)</u>	13d	<u>(1,322,767)</u>	<i>Related income tax</i>
	<u>1,677,849</u>		<u>4,689,811</u>	
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<u>(278,068,916)</u>		<u>6,048,427</u>	<i>Other comprehensive (loss)/income for the year, net of tax</i>
Total laba komprehensif tahun berjalan	<u>436,104,705</u>		<u>631,450,563</u>	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 3 - Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Laba/(rugi) belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Unrealised gain/ (loss) from financial assets at fair value through other comprehensive income	(Kerugian)/ keuntungan aktuarial, setelah pajak/ Actuarial (loss)/gain, net of tax	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah/ Total	
					Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib/ Appropriated - statutory reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo 1 Januari 2021		<u>9.570.000.000</u>	<u>298.992.727</u>	<u>(460.829)</u>	<u>166.471.338</u>	<u>3.308.428.942</u>	<u>13.343.432.178</u>	Balance at 1 January 2021
Pencadangan saldo laba	21	-	-	-	31,028,000	(31,028,000)	-	Appropriation of retained earnings
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:								Comprehensive income for the year:
- Laba tahun berjalan		-	-	-	-	625,402,136	625,402,136	Profit for the year -
- Dividen	20	-	-	-	-	(186,168,000)	(186,168,000)	Dividend -
- Penghasilan komprehensif lain:								Other comprehensive income: -
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-	1,358,616	-	-	-	1,358,616	Financial assets at fair value through - other comprehensive income
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak		-	-	4,689,811	-	-	4,689,811	Remeasurement of post-employment - benefit liabilities, net of tax
Saldo 31 Desember 2021		<u>9.570.000.000</u>	<u>300.351.343</u>	<u>4.228.982</u>	<u>197.499.338</u>	<u>3.716.635.078</u>	<u>13.788.714.741</u>	Balance at 31 December 2021
Penambahan modal	19	1,085,000,000	-	-	-	-	1,085,000,000	Additional capital
Pencadangan saldo laba	21	-	-	-	31,270,107	(31,270,107)	-	Appropriation of retained earnings
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:								Comprehensive income for the year:
- Laba tahun berjalan		-	-	-	-	714,173,621	714,173,621	Profit for the year -
- Dividen	20	-	-	-	-	(156,350,534)	(156,350,534)	Dividend -
- Penghasilan komprehensif lain:								Other comprehensive income: -
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui (rugi)/penghasilan komprehensif lain		-	(279,746,765)	-	-	-	(279,746,765)	Financial assets at fair value - through other comprehensive (loss)/income
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak		-	-	1,677,849	-	-	1,677,849	Remeasurement of post-employment - benefit liabilities, net of tax
Saldo 31 Desember 2022		<u>10.655.000.000</u>	<u>20.604.578</u>	<u>5.906.831</u>	<u>228.769.445</u>	<u>4.243.188.058</u>	<u>15.153.468.912</u>	Balance at 31 December 2022

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 4 - Schedule

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Laba sebelum pajak penghasilan		702,636,470	588,566,714	Profit before income tax
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:				Add items not affecting cash flows:
- Beban penyusutan	8	4,526,421	4,427,073	Depreciation expense -
- Beban kerugian penurunan nilai	7	2,000,000	-	Impairment losses -
- Beban amortisasi	10	1,773,502	982,412	Amortisation expense -
- Beban/(pendapatan) penyesuaian imbalan kerja	18	3,387,218	(10,735,478)	Expense/(income) from provision for employee benefits obligation
- Beban amortisasi aset hak guna	9	18,859,696	18,859,696	Right-of-use assets amortisation expense
- Beban bunga sewa pembiayaan		2,475,813	4,317,721	Finance lease interest expense
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		735,659,120	606,418,138	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				(Increase)/decrease in operating assets:
- Piutang usaha		(127,503,419)	(14,027,551)	Account receivables -
- Piutang lainnya		850,713	2,021,941	Other receivables -
- Biaya dibayar dimuka dan uang muka		3,909,386	(5,586,758)	Prepaid expenses and advances -
- Beban tangguhan		1,907,536	11,592,992	Deferred expenses -
- Pajak dibayar dimuka		(402,310)	2,256,684	Prepaid tax -
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:				(Decrease)/increase in operating liabilities:
- Utang usaha		2,620,396	4,283,352	Account payables -
- Utang pajak		(641,521)	1,163,431	Taxes payable -
- Biaya yang masih harus dibayar, penyesuaian dan utang lain-lain		70,387,353	25,712,286	Accrued expenses, provisions and other payables
- Pembayaran manfaat imbalan kerja	18	(1,566,722)	(581,558)	Payment of employee benefit
- Pendapatan tangguhan		(1,185,278)	155,455,560	Unearned income
		(51,623,866)	182,290,379	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		684,035,254	788,708,517	Net cash flow provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penempatan investasi		(7,339,609,334)	433,563,485	Placement for investments
Pembelian aset tetap dan aset takberwujud	8,10	(5,282,162)	(4,141,545)	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi		(7,344,891,496)	429,421,940	Net cash flow (used in)/provided from investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan modal saham	19	1,085,000,000	-	Share capital received
Pembayaran dividen	20	(156,350,534)	(186,168,000)	Dividend payment
Pembayaran sewa	27	(27,434,510)	(21,907,776)	Payment for lease
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan		901,214,956	(208,075,776)	Net cash flow provided from/(used in) financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas		(5,759,641,286)	1,010,054,681	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	5	5,893,947,654	4,883,892,973	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun	5	134,306,368	5,893,947,654	Cash and cash equivalents at end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan dengan Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 tanggal 19 November 2020 yang memuat mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan serta perubahan modal dasar Perusahaan. Selanjutnya, perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 pada tanggal 19 November 2020.

Sesuai dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk:

- a) Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) di bidang infrastruktur;
- b) Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah; dan
- c) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat dan daerah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain:

- a) Memberikan penjaminan kewajiban finansial Pemerintah dalam skema perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ("KPBU") dalam proyek infrastruktur.
- b) Memberikan penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah di bidang infrastruktur.
- c) Memberikan penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan, dan penerbitan surat utang/obligasi.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 dated 27 January 2010.

The Company's Articles of Association have been amended several times the latest amendment was in accordance with Notarial Deed of Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 dated 19 November 2020 concerning change of the purposes and objective of the Company and change of the Company's authorised share capital. Subsequently, the amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decree No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 19 November 2020.

In accordance with adjustment of Article 3 of the Articles of Association, the Company's objective is to:

- a) To provide sovereign guarantees in infrastructure sectors;*
- b) To provide sovereign guarantee for financing in other than infrastructure sectors based on the assignment from the Government; and*
- c) To conduct activities related to the implementation of sovereign guarantees and other activities related to the implementation of project development that support the national economy both centralised and regional.*

In achieving its objective, the Company may do, among others:

- a) To provide guarantee for the Government's financial obligations in the Public Private Partnership ("PPP") cooperation agreement in infrastructure projects.*
- b) To provide guarantee for the Government's financial obligations in the infrastructure sector.*
- c) To provide guarantees for default risk of the State-Owned Enterprises ("SOEs") based on the assignment and/or the provision set by the Minister of Finance arising from the implementation of loan agreements with financial institutions, and issuance of debt securities/bonds.*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/2 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain: (lanjutan)

- d) Memberikan penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") dan/atau pemerintah daerah berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan, dan penerbitan surat utang/obligasi.
- e) Memberikan penjaminan atas risiko finansial lainnya kepada BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat perolehan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial selain pinjaman dan surat utang/obligasi.
- f) Memberikan penjaminan kepada pelaku usaha lainnya sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- g) Memberikan jasa konsultasi, penyediaan informasi, fasilitas perencanaan, penyiapan, dan penilaian kelayakan, atas proyek atau program serta hal lain terkait mitigasi risiko/pemantauan risiko dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek.
- h) Kerja sama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan internasional dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan.
- i) Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- j) Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan merupakan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("BUPI") yang beroperasi sebagai suatu entitas "single window" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK"). Penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan memiliki dukungan pemenuhan kelayakan dan kapasitas oleh, bila diperlukan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral atau kombinasinya - untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

1. GENERAL (continued)

In achieving its objective, the Company may do, among others: (continued)

- d) *To provide guarantees for default risk of the Regional Owned Enterprises based on the assignment and/or the provision set by the Minister of Finance arising from the implementation of loan agreements with financial institutions, and issuance of debt securities/bonds.*
- e) *To provide guarantee for other financial risks to SOEs, Regional Owned Enterprises and/or Enterprises based on the assignment and/or provision set by the Minister of Finance arising from obtaining financing or financial risk mitigation facilities other than loan and debt securities/bonds.*
- f) *To provide guarantee to other business entities in accordance with the assignments and/or provisions set by the Minister of Finance.*
- g) *To provide consulting services, providing informations, planning facilities, preparation, and feasibility assessment, on project or program and other matters related to risk mitigation/risk monitoring and/or activities related to risk allocation and project financing structure.*
- h) *Cooperation with other parties, including international financial institutions in implementation of guarantee provision.*
- i) *Joint ventures or equity participation in other legal entities that have similar goals and objectives with the Company's.*
- j) *Other activities to achieve the goals and objectives of the Company.*

The Company is BUPI that operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided by the Government of Indonesia for infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("GCA"). Guarantees provided by the Company have eligibility and capacity supports by, as necessary, the Government of Indonesia ("GOI"), a multilateral financing agency or a combination thereof - for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/3 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Komisaris Utama	Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	Wahyu Utomo
Komisaris	Mariatul Aini
Direktur Utama	Muhammad Wahid Sutopo
Direktur	Andre Permana
Direktur	Donny Hamdani ¹⁾

1) Donny Hamdani diangkat sebagai anggota Direksi mulai tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 14/KMK.06/2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki 151 pegawai (2021: 143 pegawai) (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Perusahaan diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 27 Februari 2023.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

1. GENERAL (continued)

The Company is domiciled in Indonesia, located at Capital Place Office Tower, 7th and 8th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

As at 31 December 2022 and 2021, the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors were as follows:

	<u>2021</u>	
Awan Nurmawan Nuh	Awan Nurmawan Nuh	<i>President Commissioner</i>
Wahyu Utomo	Wahyu Utomo	<i>Commissioners</i>
Mariatul Aini	Mariatul Aini	<i>Commissioners</i>
Muhammad Wahid Sutopo	Muhammad Wahid Sutopo	<i>President Director</i>
Andre Permana	Andre Permana	<i>Directors</i>
-	-	<i>Directors</i>

1) *Donny Hamdani has been appointed as the Company's Board of Directors starting 17 January 2022 based on KMK No. 14/KMK.06/2022.*

As at 31 December 2022, the Company has 151 employees (2021: 143 employees) (unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Company were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 27 February 2023.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the Company's financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements are prepared under the historical cost convention, as modified for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/4 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

**Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan dan interpretasi
pernyataan standar akuntansi keuangan**

Berikut ini adalah penerapan dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang relevan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontijensi dan asset kontijensi tentang kontrak memberatkan – Biaya memenuhi kontrak";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

The cash flows statement is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of Rupiah, unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

**Changes to the statements of financial
accounting standards and interpretations
of financial accounting standards**

The following are relevant adaptations of new and amended Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISFAS") which were effective since 1 January 2022:

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent asset related to onerous contracts – Cost of fulfilling the contract";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument"; and
- Annual improvement of SFAS 73: "Lease".

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/5 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Perusahaan mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021. Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material terhadap Perusahaan, sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan pada tahun berjalan.

b. Penjabaran mata uang asing

a. Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

b. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current year or prior financial years.

Regarding the DSAK IAI press release "Compensation Attribution in the Service Period" in April 2022, the Company changed the policy related to the attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in SFAS 24 for the general fact pattern of pension programs based on the UU Cipta Kerja No. 11/2020 and PP 35/2021. The impact of the change in calculation is immaterial to the Company, therefore the impact of the changes is recorded entirety in the current year financial statements.

b. Foreign currency translation

a. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the functional and presentation currency of the Company.

b. Transactions and balances

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/6 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Untuk saldo kas dan setara kas, manajemen menganggap bahwa pihak lawan memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya dalam waktu dekat. Akibatnya, tidak ada penyisihan kerugian yang diakui berdasarkan ekspektasi kerugian kredit 12 bulan, karena penurunan nilai tersebut juga tidak signifikan bagi Perusahaan.

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, (iii) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

- (i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka, piutang usaha, piutang lainnya, uang jaminan yang dapat dikembalikan serta investasi Perusahaan pada obligasi tertentu.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

For cash and equivalents balances, management considers that the counterparty has a strong capacity to meet its contractual obligations in near term. As a result, no loss allowance has been recognised based on 12-month expected credit losses, as any such impairment is also insignificant to the Company.

d. Financial assets and liabilities

Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) financial assets at fair value through other comprehensive income, (iii) financial assets measured at amortised cost. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial application.

- (i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short-term. The Company has no financial assets at fair value through profit or loss.

- (ii) Financial assets measured at amortised cost

Financial assets at amortised cost are recognised initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company's financial assets at amortised cost comprise of cash and cash equivalents, investment in time deposits, account receivables, other receivables, refundable deposits and the Company's investment in certain bonds.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/7 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

- (iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah aset keuangan non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi Perusahaan pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

Penilaian pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Perusahaan atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

- (iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income

Financial assets at fair value through other comprehensive income are non-derivative financial assets that are either designated in this category or not classified in any other categories. After initial measurement, these financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in stockholders' equity until the financial assets are derecognised. The Company's investments in certain bonds are classified in this category.

Solely payments of principal and interest ("SPPI") assessment

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Company's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/8 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portfolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen senior;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (berdasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Perusahaan dapat mereklasifikasikan seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perusahaan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Company. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but not limited to:

- How the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;
- The risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and
- How managers of the business unit are compensated (based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).

The Company can reclassify all of its financial assets if and only if, its business model for managing those financial assets changes.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Company reasonably expect to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Company did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/9 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menilai kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas dasar perkiraan masa depan, dengan mempertimbangkan informasi historis dan perkiraan masa depan terkait dengan aset keuangannya pada biaya yang diamortisasi. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas aset keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian atas aset keuangan tersebut sebesar kerugian kredit ekspektasian selama 12 bulan, Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk aset keuangan dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas aset keuangan meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan di mana kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui pada saat pengakuan awal perdagangan dan piutang lain-lain.

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto piutang usaha dan beban tanggahan.

Staging Criteria

Aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari tiga tahap penurunan nilai (tahap 1, tahap 2, tahap 3) dengan menentukan apakah terjadi penungkatan risiko kredit yang signifikan atas instrumen keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan.

Tahap 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Business model assessment (continued)

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

Impairment of financial asset

The Company assesses the expected credit losses ("ECL") on using a forward-looking basis, by considering both historical and forward-looking information associated with its financial assets at amortised cost. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. If, at reporting date, the credit risk on financial asset has not increased significantly since initial recognition, the Company will measure the loss allowance for that financial asset at an amount equal to 12-month expected credit losses. The Company will measure the loss allowance for a financial asset at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial asset has increased significantly since initial recognition.

The Company applies the simplified approach where lifetime expected credit losses are recognised at the initial recognition of trade and other receivables.

Presentation of allowance for expected credit losses in statements of financial position

Allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the account receivables and deferred expenses.

Staging Criteria

Financial assets have to be allocated to one of the three impairment stages (stage 1, stage 2, stage 3) by determining whether significant increase in credit risk has occurred on financial instrument since initial recognition or whether the facility is defaulted on the reporting date.

Stage 1: includes financial instruments that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk at the reporting date. For these assets, 12-month ECL are recognised.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/10 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Staging Criteria (lanjutan)

Tahap 2: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali jika memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan), namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang obyektif. Untuk aset ini, ECL *lifetime* dihitung. ECL *lifetime* adalah kerugian kredit yang diharapkan yang dihasilkan dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

Tahap 3: mencakup instrumen keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah *impaired* (gagal bayar). Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan ECL 12 bulan (tahap 1) atau ECL *lifetime* (tahap 2) disebut dengan kriteria Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit (SICR). SICR memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan klasifikasi liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Staging Criteria (continued)

Stage 2: includes financial instruments that have had significant increase in credit risk since initial recognition (unless they have low credit risk at the reporting date) but do not have objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL are recognised. Lifetime ECL are the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of the financial instrument.

Stage 3: includes financial instruments that have objective evidence of impairment at the reporting date. This stage has obligors that are already impaired (defaulted). The key factor in determining whether a financial instrument attracts 12-months (stage 1) or lifetime ECL (stage 2) is called by the criteria of Significant Increase in Credit Risk (SICR). SICR criteria involves assessment of whether there has been a significant increase in credit risk at each reporting date.

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.

At the reporting date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to this classification are not disclosed.

Financial liabilities measured at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/11 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain, dan pinjaman penerusan diklasifikasikan dalam kategori ini.

**Pemberhentian pengakuan atas liabilitas
keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities measured at amortised
cost (continued)

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value minus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Account payables, accrued expenses, provisions and other payables, and two-step loans are classified in this category.

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/12 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukhan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Determination of fair value (continued)

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss on over the life of the instrument.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/13 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh *LIBOR yield curve*, nilai tukar mata uang asing, volatilitas dan *counterparty spreads*) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sedangkan reklasifikasi untuk liabilitas keuangan tidak diperkenankan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Determination of fair value (continued)

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, LIBOR yield curve, foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset, and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Reclassification of financial assets

The Company is permitted to reclassify its financial assets if the Company change its business model for managing financial assets while reclassification for financial liabilities is not permitted.

The Company will reclassify financial assets affected by changes in business models. Changes in the Company's business model objectives must have an impact before the reclassification date.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/14 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Yang bukan merupakan perubahan model
bisnis adalah:

- perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar);
- hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan; dan
- pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

**Kontrak jaminan keuangan dan tagihan
komitmen lainnya**

Kontrak jaminan keuangan yang dimiliki Perusahaan terdiri dari: KPBU, Non-KPBU, dan penjaminan pelaku usaha korporasi.

Kerugian kredit ekspektasian nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan analisa spesifik untuk masing-masing risiko dalam perjanjian penjaminan. Kerugian kredit ekspektasian atas jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain.

KPBU

Perusahaan memiliki perjanjian regres dengan PJPk terkait dengan penjaminan KPBU, yang akan memberikan hak tagih kepada PJPk atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Badan Usaha ("BU") akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPk kepada BU.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

**Reclassification of financial assets
(continued)**

The followings are not a change in business
model:

- changes in intention relating to certain financial assets (even in situations significant changes in market conditions);
- temporary loss of certain markets for financial assets; and
- transfer of financial assets between parts of the Company with different business models.

The Company apply a prospective reclassification of the date of the reclassification. The Company does not restate profits, losses (including impairment profit or loss), or interest recognised earlier.

**Financial guarantee contracts and other
commitment receivables**

The financial guarantee contracts owned by the Company consist of: PPP, Non-PPP, and guarantees for corporate business entities.

Expected credit loss on financial guarantee contracts with credit risk are assessed based on each specific risk under the guarantee agreement. Expected credit loss on financial guarantees is recognised as other liabilities.

PPP

The Company has recourse agreement with GCA related to PPP's guarantee, which will give the Company the rights to claim or recourse back to GCA for any payment that have been made by the Company to the Investors, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/15 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

**Kontrak jaminan keuangan dan tagihan
komitmen lainnya (lanjutan)**

Non-KPBU

Perusahaan juga memiliki perjanjian regres dengan BUMN Terjamin terkait dengan penjaminan atas gagal bayar dari BUMN Terjamin yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur. Perusahaan akan mendapatkan hak tagih dari BUMN Terjamin atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada pemberi pinjaman dan/atau pemegang obligasi akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran BUMN Terjamin kepada pemberi pinjaman.

Pelaku Usaha Korporasi

Peran Perusahaan dalam penjaminan pelaku usaha korporasi adalah untuk memberikan dukungan *loss limit* dan melaksanakan penjaminan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") atas kewajiban finansial terjamin (Pelaku Usaha) kepada penerima jaminan (Bank) dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN").

e. Investasi

Investasi terdiri dari deposito berjangka, obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar uang dan di bursa efek serta Obligasi Pemerintah dan reksa dana.

Obligasi Pemerintah adalah surat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dibeli dari pasar.

Perusahaan telah mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai diukur pada nilai biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

**Financial guarantee contracts and other
commitment receivables (continued)**

Non-PPP

The Company also has recourse agreement with guaranteed SOEs related to provision of guarantee to guaranteed SOEs for defaulted payments by guaranteed SOEs who received loans and/or issued bonds to provide infrastructure financing. The Company will get the rights to claim or recourse back to guaranteed SOEs for any payment that have been made by the Company to the lenders and/or bondholders, due to inability of guaranteed SOEs in fulfilling its financial obligations to the lenders.

Corporate Business Entity

The Company's role in corporate business entity guarantee to provide loss limit support and carry out joint guarantees with the Indonesian Export Financing Agency ("LPEI") for guaranteed financial obligations (Business Entity) to guarantee recipients (Banks) related to the government's guarantee for National Economic Recovery ("PEN").

e. Investments

Investments consist of time deposits, corporate bonds traded in the money market and at the stock exchange and Government Bonds and mutual funds.

Government Bonds represent bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia purchased from the market.

The Company has classified all investment in sukuk as amortised cost in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/16 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Investasi (lanjutan)

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode jatuh tempo dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Tahun/Years

Prasarana kantor	4
Peralatan komputer	4
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	4

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Investments (continued)

Investment in sukuk measured at amortised cost are stated at acquisition cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity based on straight line method.

f. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives, as follows:

Leasehold improvement
Computer equipments
Office equipments, furnitures and fixtures

The assets residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the statement profit or loss.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/17 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

g. Aset takberwujud

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Aset takberwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset takberwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

h. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Intangible assets

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.

h. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity. The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date.

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/18 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

h. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

i. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2020, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2020 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Taxation (continued)

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

i. Employee benefits obligation

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.

Pension benefits

The Company is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Labor Law No. 11 Tahun 2020 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Labor Law No. 11 Tahun 2020 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the Rupiah currency in which the benefit will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/19 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 mengharuskan Perusahaan membayar jumlah tertentu kepada para karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi.

j. Utang usaha dan lain-lain

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Employee benefits obligation (continued)

Pension benefits (continued)

For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Job creation Law No. 11 of 2020 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.

Current service costs are expensed in the prevailing period.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Past service costs arising from amendment of curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.

Other long-term benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave is calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

j. Account and other payables

Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/20 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Penyisihan

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

l. Pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, pendapatan provisi dan komisi, serta pendapatan bunga regres.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diamortisasi berdasarkan metode garis lurus dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu periode penjaminan. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

- (i) *Guarantee fee* merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh Perusahaan.
- (ii) *Processing fee* merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *upfront fee* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya.

- (i) *Upfront fee* adalah pendapatan yang diterima pada saat kontrak penjaminan ditandatangani dan/atau pada saat penjaminan telah efektif, sesuai dengan kesepakatan dalam surat imbal jasa, dan tidak dapat dikembalikan.
- (ii) Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

Pendapatan bunga regres merupakan pendapatan bunga yang diterima atas timbulnya piutang regres. Pendapatan bunga regres diakui dengan metode bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.

l. Revenue and expenses

Revenue from guarantee consists of premium income, fees and commissions and recourse interest income.

Premium income consists of guarantee fee and processing fee. Revenue from guarantee fee is amortised based on straight line method and recognised as income over the guarantee period. Revenue from processing fee is recognised when earned.

- (i) *Guarantee fee is earned for guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.*
- (ii) *Processing fee is earned for providing services in processing claims submitted to the guarantor.*

Fees and commissions consist of upfront fee and other fees and commissions.

- (i) *Upfront fee is recognised upon signing of guarantee contract and/or the effectiveness of guarantee, in accordance with fee letter, and non-refundable.*
- (ii) *Other fees and commission is recognised as incurred.*

Recourse interest income is interest income received on the occurrence of recourse receivables. Recourse interest income are recognised using the effective interest method.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/21 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

l. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan penjaminan *loss limit* merupakan *guarantee fee* yang diakui sebesar porsi margin dari imbal jasa penjaminan *loss limit* dan penjaminan bersama yang diterima saat diberikannya penjaminan dan diamortisasi selama periode penjaminan atau periode pelaksanaan jasa.

Pendapatan jasa dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui ketika jasa telah dilaksanakan, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan biaya-biaya yang terjadi dapat diukur secara handal. Pendapatan diakui sebesar biaya-biaya yang terjadi ditambah margin yang diakui untuk semua penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pendapatan dari pendapatan bunga deposito dan investasi pendapatan tetap diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses penjaminan, ditangguhkan terlebih dahulu dan disajikan sebagai beban tangguhan. Biaya tersebut akan dibebankan pada laporan laba rugi Perusahaan, ketika Perusahaan mengakui pendapatan penjaminan.

m. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Pada tanggal permulaan sewa Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan. Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Revenue and expenses (continued)

Revenue from loss limit guarantee service is guarantee fee which recognised at margin portion of loss limit guarantee and Corporate Business Entity co-guarantee service fees that received when the guarantee was given and are amortised during guarantee period or period of service.

Revenue from project preparation and transaction advisory is recognised when services have been rendered, where it is probable that economic benefits will flow to the Company and expenses incurred can be reliably measured. Revenue is recognised from costs incurred plus recognised margin for all the work in process up to the stage completion as agreed.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised using the effective interest method.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Costs that are directly related to the guarantee process will be deferred and presented as deferred charges. The costs will be expensed to the Company's profit or loss, when Company recognised revenue from guarantee.

m. Leases

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date. The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/22 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset Hak-Guna" dan "Liabilitas sewa pembiayaan" di dalam laporan posisi keuangan.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Leases (continued)

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets as part of "Right of Use Asset" and "Finance lease liabilities" in the statement of financial position.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *the amount of the initial measurement of lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *any initial direct costs; and*
- *restoration costs.*

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/23 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

- i. perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
- ii. perusahaan asosiasi;
- iii. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- iv. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan III di atas;
- v. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
- vi. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor risiko keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

(1) Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan untuk tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with SFAS 7 "Related Party Disclosures" which are defined, among others, as:

- i. entities under the control of the Company;
- ii. associated companies;
- iii. investors with an interest in the voting that gives them significant influence;
- iv. entities controlled by investors under note III above;
- v. key employees and family members; and
- vi. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk factors

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

(1) Market risk

(i) Foreign currency exchange rate risk

The Company has no significant foreign exchange risks since the Company's transactions are performed using the Company's functional currency. As at 31 December 2022 and 2021, the Company has no material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company's functional currency will not significantly impact to the Company's current year profit after tax.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/24 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(1) Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Aset Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan, oleh karena deposito Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun (jangka pendek), sementara pengelolaan dana investasi lainnya terutama merupakan investasi dengan pendapatan tetap (*fixed income*).

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi Perusahaan karena investasi Perusahaan dikategorikan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan investasi yang diukur dengan biaya diamortisasi dengan suku bunga tetap.

Liabilitas Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel yang menggunakan *SUN Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perusahaan.

(2) Risiko kredit

Perusahaan memitigasi risiko kredit dengan menetapkan kebijakan investasi yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengatur mandat investasi untuk jenis, batasan alokasi, serta kriteria *counterparty* yang selektif.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(1) Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company's financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. The Company's investments mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's interest income, since the time deposit will mature within 1 (one) year (short-term), while most of the other investment are fixed rate investment.

Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company's profit and loss due to the financial assets are classified as investment at fair value through other comprehensive income and investment at amortised cost with fixed interest rate.

*The Company's financial liabilities which are exposed to interest rate risk are two-step loans with variable interest rate using *SUN Benchmark* with 20 years tenor. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's interest expense.*

(2) Credit risk

The Company mitigates its credit risk by setting a prudent investment policy, including investment mandates for type of investment, portfolio, allocation as well as selective criteria for counterparty.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/25 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Financial risk factors (continued)

(2) Risiko kredit (lanjutan)

(2) Credit risk (continued)

Deposito berjangka, deposito dan kas di bank ditempatkan pada bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi sebagai berikut:

Time deposits, time deposits classified as cash and cash equivalents and cash in bank are placed with highly reputable domestic banks as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
AAA	3,250,307,348	3,668,429,620	AAA
AA+	984,020,000	2,225,008,522	AA+
AA	<u>1,953,388,102</u>	<u>944,020,000</u>	AA
	<u>6,187,715,450</u>	<u>6,837,458,142</u>	

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek hutang dengan pendapatan tetap, Perusahaan menempatkan investasinya pada surat berharga hutang di luar Pemerintah dengan peringkat investasi paling rendah AA.

For placement of investment in fixed income debt securities, the Company places its investments on debt securities outside Government with investment grade at the lowest of AA.

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2022 and 2021 are as follows:

31 Desember/December 2022					
	<u>Lancar/ Current</u>	<u><1 tahun/ <1 year</u>	<u>1-2 tahun/ 1-2 years</u>	<u>>2 tahun/ >2 years</u>	<u>Jumlah/ Total</u>
Aset					Assets
Kas dan setara kas ¹⁾	133,920,301	-	-	-	133,920,301
Investasi	15,008,163,837	-	-	-	15,008,163,837
Piutang usaha	293,920,460	2,800,000	-	-	296,720,460
Piutang lainnya	9,884,584	-	-	-	9,884,584
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>5,369,039</u>	-	-	-	<u>5,369,039</u>
	<u>15,451,258,221</u>	<u>2,800,000</u>	-	-	<u>15,454,058,221</u>
Dikurangi:					
Penyisihan kerugian penurunan nilai					<u>(2,000,000)</u>
					<u>15,452,058,221</u>

*Cash and cash equivalents¹⁾
Investments
Account receivables
Other receivables
Refundable deposits*

*Less:
Allowance for impairment losses*

31 Desember/December 2021					
	<u>Lancar/ Current</u>	<u><1 tahun/ <1 year</u>	<u>1-2 tahun/ 1-2 years</u>	<u>>2 tahun/ >2 years</u>	<u>Jumlah/ Total</u>
Aset					Assets
Kas dan setara kas ¹⁾	5,893,438,142	-	-	-	5,893,438,142
Investasi	7,948,301,268	-	-	-	7,948,301,268
Piutang usaha	153,817,041	13,400,000	2,000,000	-	169,217,041
Piutang lainnya	10,735,297	-	-	-	10,735,297
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>5,369,039</u>	-	-	-	<u>5,369,039</u>
	<u>14,011,660,787</u>	<u>13,400,000</u>	<u>2,000,000</u>	-	<u>14,027,060,787</u>
Dikurangi:					
Penyisihan kerugian penurunan nilai					-
					<u>14,027,060,787</u>

*Cash and cash equivalents¹⁾
Investments
Account receivables
Other receivables
Refundable deposits*

*Less:
Allowance for impairment losses*

¹⁾Tidak termasuk kas

Not include cash in hand¹⁾

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/26 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(3) Risiko likuiditas

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain dan pinjaman penerusan yang jumlahnya tidak material terhadap aset likuid Perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(3) Liquidity risk

The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

As at 31 December 2022 and 2021, the Company's financial liabilities consist of account payables, accrued expenses, provisions, and other payables and two-step loans which are immaterial to the total Company's liquid assets. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investments.

31 Desember/December 2022				
Jumlah/ Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No maturity contract	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	9,993,160	-	9,993,160	-
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain	135,669,181	-	64,941,496	70,727,685
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	55,126,686
	<u>200.789.027</u>	<u>-</u>	<u>74.934.656</u>	<u>125.854.371</u>
Financial liabilities				
<i>Account payables</i>				
<i>Accrued expenses, provisions, and other payables</i>				
<i>Two-step loans</i>				
31 Desember/December 2021				
Jumlah/ Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No maturity contract	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	7,372,764	-	7,372,764	-
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain	65,281,828	-	39,914,312	25,367,516
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	55,126,686
	<u>127.781.278</u>	<u>-</u>	<u>47.287.076</u>	<u>80.494.202</u>
Financial liabilities				
<i>Account payables</i>				
<i>Accrued expenses, provisions, and other payables</i>				
<i>Two-step loans</i>				

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/27 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Manajemen risiko modal

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

c. Estimasi nilai wajar

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- **Tingkat 1**
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- **Tingkat 2**
Input diluar harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- **Tingkat 3**
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Capital risk management

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

c. Fair value estimation

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- **Level 1**
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- **Level 2**
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities; either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and
- **Level 3**
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/28 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

c. Fair value estimation (continued)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2022 dan 2021.

The following table presents the Company's asset and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2022 and 2021.

31 Desember/December 2022					
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					Financial assets at fair value
Investasi pada instrumen utang	6.327.272.274	-	6.327.272.274	-	6.327.272.274
Jumlah	6.327.272.274	-	6.327.272.274	-	6.327.272.274
					Debt investments
					Total

31 Desember/December 2021					
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					Financial assets at fair value
Investasi pada instrumen utang	6.762.411.795	-	6.762.411.795	-	6.762.411.795
Jumlah	6.762.411.795	-	6.762.411.795	-	6.762.411.795
					Debt investments
					Total

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Financial instrument not measured at fair values

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Perusahaan:

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial assets and liabilities not presented at their fair value in the Company's statements of financial position:

31 Desember/December 2022			
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan:			Financial assets:
Kas dan setara kas	134,306,368	134,306,368	Cash and cash equivalents
Investasi	8,680,891,563	8,609,103,278	Investments
Piutang usaha	294,720,460	294,720,460	Account receivables
Piutang lainnya	9,884,584	9,884,584	Other receivables
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,369,039	5,369,039	Refundable deposits
	9,125,172,014	9,053,383,729	
Liabilitas keuangan:			Financial liabilities:
Utang usaha	9,993,160	9,993,160	Account payables
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	135,669,181	135,669,181	Accrued expenses provisions and other payables
Pinjaman penerusan	55,126,686	55,126,686	Two-step loans
	200,789,027	200,789,027	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/29 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

c. Fair value estimation (continued)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Financial instrument not measured at fair values (continued)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Perusahaan: (lanjutan)

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial assets and liabilities not presented at their fair value in the Company's statements of financial position: (continued)

	31 Desember/December 2021		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan:			Financial assets:
Kas dan setara kas	5,893,947,654	5,893,947,654	Cash and cash equivalents
Investasi	1,185,889,473	1,163,221,824	Investments
Piutang usaha	169,217,041	169,217,041	Account receivables
Piutang lainnya	10,735,297	10,735,297	Other receivables
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>5,369,039</u>	<u>5,369,039</u>	Account receivables Refundable deposits
	<u><u>7,265,158,504</u></u>	<u><u>7,242,490,855</u></u>	
Liabilitas keuangan:			Financial liabilities:
Utang usaha	7,372,764	7,372,764	Account payables
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	65,281,828	65,281,828	Accrued expenses, provisions and other payables
Pinjaman penerusan	<u>55,126,686</u>	<u>55,126,686</u>	Two-step loans
	<u><u>127,781,278</u></u>	<u><u>127,781,278</u></u>	

(i) Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan

(i) Cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, nilai tercatat dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value of cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of cash and cash equivalents, account receivables and other receivables were a reasonable approximation of its fair value (level 2 - fair value hierarchy).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/30 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

(ii) Investasi pada instrumen utang

Nilai wajar dari investasi pada instrumen utang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa (level 2 - hirarki nilai wajar).

(iii) Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain

Nilai wajar dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain diperkirakan adalah sebesar nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah satu tahun (level 2 - hirarki nilai wajar).

(iv) Pinjaman penerusan

Nilai wajar untuk pinjaman penerusan dengan suku bunga mengambang, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya (level 2 - hirarki nilai wajar).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Fair value estimation (continued)

Financial instrument not measured at fair values (continued)

(ii) Debt investments

The fair value of debt investments are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity (level 2 - fair value hierarchy).

(iii) Account payables, accrued expenses and other liabilities

The fair value of account payables, accrued expenses and other liabilities are approximating their carrying amounts since the maturity is below one year (level 2 - fair value hierarchy).

(iv) Two-step loans

The fair value for two-step loans with floating interest rate, the carrying value approximates its fair value (level 2 - fair value hierarchy).

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING**

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

**4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS**

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/31 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

b. Penyisihan atas kewajiban terkait perjanjian penjaminan

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dengan estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat piutang usaha serta kerugian penurunan nilai pada periode masa perubahan estimasi tersebut terjadi.

4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Employee benefits obligation

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

b. Claim provision related to guarantee agreement

Allowance for impairment losses are provided when events or changes in circumstance indicate that the balance may not be collectible. The identification of uncollectible receivables require the use of judgement and estimates. If the expectations are different from the original estimates, such differences will impact the carrying value of account receivables and impairment losses in the period in which such estimate has been changed.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/32 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**b. Penyisihan atas kewajiban terkait
perjanjian penjaminan (lanjutan)**

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah kewajibannya atas proyek KPBU dan non-KPBU, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Untuk proyek KPBU, Perusahaan memiliki hak regres kepada PJKP terkait segala pembayaran klaim yang akan dilakukan Perusahaan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJKP kepada BU. Untuk proyek non-KPBU, Perusahaan juga memiliki hak regres kepada BUMN Terjamin terkait risiko gagal bayar BUMN Terjamin atas pinjaman yang diberikan.

Perusahaan secara aktif melakukan penelaahan atas kemungkinan kewajiban yang timbul di kemudian hari atas dukungan penjaminan *loss limit* dan penjaminan bersama pelaku usaha korporasi kepada LPEI. Identifikasi atas kemungkinan kewajiban yang timbul atas penjaminan pelaku usaha korporasi memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dengan ekspektasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak pada nilai estimasi komitmen dan kontijensi pelaku usaha korporasi pada periode masa perubahan estimasi tersebut terjadi.

**c. Beban tanggungan dan cadangan kerugian
penurunan nilai**

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti objektif bahwa proyek-proyek yang dibentuk dan memiliki beban tanggungan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelelangan proyek pada akhir tiap periode pelaporan.

**4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty:
(continued)

**b. Claim provision related to guarantee
agreement (continued)**

At each reporting date, the Company assess its obligations for PPP and non-PP project, in form of potential claim and/or claim on risks covered by the Company under guarantees agreements, to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. For PPP project, the Company has recourse to GCA in relation with any payments that would be made by the Company, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors. For non-PPP project, the Company also has recourse to guaranteed SOEs related to risk of default of the loans.

The Company actively conduct a review of possible liabilities that may arise in the future for the support of loss limit guarantees and joint guarantees for corporate business entities to LPEI. Identification of possible liabilities arising from guarantees for corporate business entities requires consideration and estimation. If the expectations are different from the initial expectations, then this difference will have an impact on the estimated value of commitments and contingencies of corporate business entities in the period when the changes in estimates occur.

**c. Deferred charges and allowance for
impairment losses**

The Company continually evaluates objective evidence of projects that had deferred charges could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders in regard to the tender process at the end of each reporting period.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/33 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**c. Beban tanggungan dan cadangan kerugian
penurunan nilai**

Penyisihan penurunan nilai atas beban tanggungan dibentuk dan dibebankan dalam laporan laba rugi ketika Perusahaan mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai ketidakpastian atas realisasi proyek.

**4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty:
(continued)

**c. Deferred charges and allowance for
impairment losses**

Provision for impairment losses on deferred expense is recorded and charged to profit and loss when the Company obtained information and confirmations about uncertainty of project realisation.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Bank	104,320,301	47,838,142	Cash in banks
Deposito	29,600,000	5,845,600,000	Time deposits
Kas	<u>386,067</u>	<u>509,512</u>	Cash on hand
	<u>134,306,368</u>	<u>5,893,947,654</u>	

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga 3,00% - 4,25% per tahun di 2022 (2021: 3,00% - 4,00%).

Time deposits with original maturities of three months or less earned interest rates 3.00% - 4.25% per annum in 2022 (2021: 3.00% - 4.00%).

Seluruh kas dan setara kas merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2022.

All cash and cash equivalents are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2022.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

6. INVESTASI

6. INVESTMENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Deposito berjangka	6,053,795,149	944,020,000	Time deposits
Investasi dengan pendapatan tetap			Fixed income investments
- Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6,327,272,274	6,762,411,795	Investment at fair value through - other comprehensive income
- Investasi yang diukur pada biaya diamortisasi	2,596,340,908	189,997,846	Investment at amortised cost -
- Investasi diukur pada biaya perolehan	<u>30,755,506</u>	<u>51,871,627</u>	Investments at cost -
	<u>15,008,163,837</u>	<u>7,948,301,268</u>	

Seluruh investasi merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2022.

All investments are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2022.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/34 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, karena manajemen berpendapat bahwa pihak lawan memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

a) Deposito berjangka

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Bank BUMN	4,234,775,149	-	State-Owned banks
Bank Swasta	1,819,020,000	944,020,000	Private banks
	<u>6,053,795,149</u>	<u>944,020,000</u>	

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 3,00% - 6,75% per tahun di 2022 (2021: 4,00% - 4,50%).

b) Investasi dengan pendapatan tetap

- Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Obligasi Pemerintah	5,096,118,574	5,419,287,095	Government bonds
Obligasi BUMN	1,231,153,700	1,343,124,700	State-Owned Enterprise bonds
	<u>6,327,272,274</u>	<u>6,762,411,795</u>	

Harga pasar investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berkisar antara 90,47% sampai dengan 118,13% dan antara 97,42% sampai dengan 118,72% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Perusahaan mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai pasar investasi dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 279.746.765 (rugi) dan Rp 1.358.616 (laba) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang dicatat pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan.

6. INVESTMENTS (continued)

The management does not provide any allowance for impairment losses for investments as of 31 December 2022 and 2021, since management believes that the counterparty has a strong capacity to meet its contractual obligations.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

a) Time deposits

Time deposits with original maturities more than three months and up to one year period earned interest rates ranging between 3.00% - 6.75% per annum in 2022 (2021: 4.00% - 4.50%).

b) Fixed income investments

- Investments at fair value through other comprehensive income

The market price of investments at fair value through other comprehensive income bonds ranged from 90.47% to 118.13% and from 97.42% to 118.72% as of 31 December 2022 and 2021, respectively.

The company recognised the unrealized gains or losses from the changes in the market value of the investments categorised as fair value through other comprehensive income in the amount of Rp 279,746,765 (loss) and Rp 1,358,616 (gain) for the year ended 31 December 2022 and 2021, respectively, both recorded in the equity section of the statement of financial position.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/35 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

**b) Investasi dengan pendapatan tetap
(lanjutan)**

**- Investasi yang diukur pada biaya
diamortisasi**

Pada tanggal 31 Desember 2022, periode jatuh tempo investasi pada obligasi berkisar antara 1 - 12 tahun (2021: 1 - 4 tahun) dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 6,95% - 10,25% per tahun di 2022 (2021: 7,90% - 10,25%).

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Obligasi Pemerintah	2,459,340,908	27,997,846	Government bonds
Obligasi BUMN	<u>137,000,000</u>	<u>162,000,000</u>	State-Owned Enterprise bonds
	<u>2,596,340,908</u>	<u>189,997,846</u>	

- Investasi diukur pada biaya perolehan

Investasi diukur pada biaya perolehan merupakan investasi pada obligasi Sukuk yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Obligasi BUMN	20,612,000	41,614,000	State-Owned Enterprise bonds
Obligasi Pemerintah	<u>10,143,506</u>	<u>10,257,627</u>	Government bonds
	<u>30,755,506</u>	<u>51,871,627</u>	

6. INVESTMENTS (continued)

b) Fixed income investments (continued)

- Investments at amortised cost

As of 31 December 2022, the maturity period of investments in bonds ranging between 1 - 12 years (2021: 1 - 4 years) maturities and earned interest rates ranging between 6.95% - 10.25% per annum in 2022 (2021: 7.90% - 10.25%).

- Investments at cost

Investments at cost represents investments in Sukuk bonds which is recorded in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

7. PIUTANG USAHA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Bunga yang belum diterima	126,019,099	87,184,338	Interest receivables
Penjaminan	122,258,750	71,882,624	Guarantee
Regres	35,233,991	-	Regress
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	<u>13,208,620</u>	<u>10,150,079</u>	Project preparation and transaction advisory
	<u>296,720,460</u>	<u>169,217,041</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(2,000,000)</u>	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	<u>294,720,460</u>	<u>169,217,041</u>	Total

Kerugian kredit ekspektasian telah dihitung sesuai dengan persyaratan penurunan nilai PSAK 71. Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha sebesar Rp 2.000.000 mengalami penurunan nilai dan telah dicadangkan sepenuhnya (2021: Rp nihil)

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Penambahan	<u>2,000,000</u>	-	Additions
Saldo akhir	<u>2,000,000</u>	-	Ending balance

7. ACCOUNT RECEIVABLES

Expected credit loss has been calculated according to impairment requirements of SFAS 71. As of 31 December 2022, account receivables amounting to Rp 2,000,000 are impaired and have been fully provisioned (2021 : Rp nil).

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/36 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

7. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Management believes that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover losses from uncollectible account receivables.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

		2022				
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	17,394	679,619	-	(697,013)	-	Construction in progress
Prasarana kantor	20,345,724	-	-	522,122	20,867,846	Leasehold improvement
Peralatan komputer	13,545,906	493,400	-	174,891	14,214,197	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	10,921,616	108,232	-	-	11,029,848	Office equipments, furnitures and fixtures
	44,830,640	1,281,251	-	-	46,111,891	
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(18,869,142)	(1,495,108)	-	-	(20,364,250)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(7,891,289)	(2,387,822)	-	-	(10,279,111)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(9,929,466)	(643,491)	-	-	(10,572,957)	Office equipments, furnitures and fixtures
	(36,689,897)	(4,526,421)	-	-	(41,216,318)	
Nilai buku	<u>8,140,743</u>				<u>4,895,573</u>	Net book value
		2021				
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	2,863,714	422,393	-	(3,268,713)	17,394	Construction in progress
Prasarana kantor	20,282,679	-	-	63,045	20,345,724	Leasehold improvement
Peralatan komputer	9,121,727	1,422,965	-	3,001,214	13,545,906	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	10,600,725	116,437	-	204,454	10,921,616	Office equipments, furnitures and fixtures
	42,868,845	1,961,795	-	-	44,830,640	
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(17,122,079)	(1,747,063)	-	-	(18,869,142)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(5,899,777)	(1,991,512)	-	-	(7,891,289)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(9,240,968)	(688,498)	-	-	(9,929,466)	Office equipments, furnitures and fixtures
	(32,262,824)	(4,427,073)	-	-	(36,689,897)	
Nilai buku	<u>10,606,021</u>				<u>8,140,743</u>	Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Management believes that no impairment in fixed assets value as at 31 December 2022 and 2021.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/37 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET HAK GUNA

Perusahaan menyewa aset berupa gedung kantor yang digunakan dalam operasinya yang memiliki masa sewa selama 3 tahun yang dimulai dari tanggal 1 September 2020.

Beban amortisasi sewa gedung kantor diakui sebagai beban sewa dalam kategori beban umum dan administrasi.

9. RIGHT-OF-USE ASSETS

The Company leases asset in form of office space used for its operations that has lease period of 3 years started on 1 September 2020.

Amortisation expense of office scape lease was recognised as rental expense under general and administrative expenses.

		2022				
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Gedung kantor		56,579,087	-	-	56,579,087	Office building
		<u>56,579,087</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56,579,087</u>	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortisation:
Gedung kantor		(25,146,261)	(18,859,696)	-	(44,005,957)	Office building
		<u>(25,146,261)</u>	<u>(18,859,696)</u>	<u>-</u>	<u>(44,005,957)</u>	
Nilai buku		<u>31,432,826</u>			<u>12,573,130</u>	Net book value
		2021				
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Gedung kantor		56,579,087	-	-	56,579,087	Office building
		<u>56,579,087</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56,579,087</u>	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortisation:
Gedung kantor		(6,286,565)	(18,859,696)	-	(25,146,261)	Office building
		<u>(6,286,565)</u>	<u>(18,859,696)</u>	<u>-</u>	<u>(25,146,261)</u>	
Nilai buku		<u>50,292,522</u>			<u>31,432,826</u>	Net book value

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/38 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

		<u>2022</u>				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pelepasan/ Disposals</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassifications</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Harga perolehan:						
Aset dalam penyelesaian	194,139	3,851,857	-	(3,997,118)	48,878	Acquisition cost: Construction in progress
Piranti lunak	9,717,074	149,054	-	3,997,118	13,863,246	Software
	<u>9,911,213</u>	<u>4,000,911</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13,912,124</u>	
Akumulasi amortisasi:						
Piranti lunak	(6,668,891)	(1,773,502)	-	-	(8,442,393)	Accumulated amortisation: Software
	<u>(6,668,891)</u>	<u>(1,773,502)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(8,442,393)</u>	
Nilai buku	<u>3,242,322</u>				<u>5,469,731</u>	Net book value
		<u>2021</u>				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pelepasan/ Disposals</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassifications</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Harga perolehan:						
Aset dalam penyelesaian	82,775	2,150,230	-	(2,038,866)	194,139	Acquisition cost: Construction in progress
Piranti lunak	7,648,688	29,520	-	2,038,866	9,717,074	Software
	<u>7,731,463</u>	<u>2,179,750</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,911,213</u>	
Akumulasi amortisasi:						
Piranti lunak	(5,686,479)	(982,412)	-	-	(6,668,891)	Accumulated amortisation: Software
	<u>(5,686,479)</u>	<u>(982,412)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6,668,891)</u>	
Nilai buku	<u>2,044,984</u>				<u>3,242,322</u>	Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Management believes that no impairment in intangible assets value as at 31 December 2022 and 2021.

11. BEBAN TANGGUHAN

11. DEFERRED EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban tangguhan	19,859,413	20,957,310	<i>Deferred expenses</i>
Penyisihan penurunan nilai	(14,196,021)	(13,386,382)	<i>Provision for impairment</i>
	<u>5,663,392</u>	<u>7,570,928</u>	

Beban tangguhan terutama merupakan biaya atas jasa konsultasi yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in providing long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/39 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. BEBAN TANGGUHAN (lanjutan)

Beban tanggungan juga mencakup biaya pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan akan dibebankan ke laba rugi pada saat pendapatan dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui.

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	13,386,382	24,112,770	Beginning balance
Penghapusan	-	(10,726,388)	Write-off
Penambahan	<u>809,639</u>		Additions
Saldo akhir	<u>14,196,021</u>	<u>13,386,382</u>	Ending balance

Pada tahun 2021, Perusahaan telah menutup cadangan kerugian penurunan nilai atas beban tanggungan proyek sebesar Rp 10.726.388 untuk Proyek *Minemouth* 9 dan 10 yang sekaligus mengakui seluruh biaya atas beban tanggungan terkait karena proyek tersebut tidak lagi direncanakan oleh PJKP untuk dilanjutkan.

Kecuali untuk jumlah beban tanggungan yang telah dibentuk penyisihannya, manajemen berkeyakinan bahwa proyek-proyek terkait akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu, beban tanggungan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

12. UTANG USAHA

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan penyediaan penjaminan, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan biaya operasional Perusahaan.

11. DEFERRED EXPENSES (continued)

Deferred expenses also included costs for project preparation and transaction advisory and will be recognised to profit and loss upon the recognition of revenue from project preparation and transaction advisory.

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

In 2021, the Company had recognised deduction of allowance for impairment for deferred expenses amounting to Rp 10,726,388 for Minemouth 9 and 10 Project which also recognized all the cost for deferred expenses due to the project no longer planned to be continued by GCA.

Except for deferred expenses that has been provided with impairment provision, management believes that outstanding projects could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company's statement of financial position as at 31 December 2022 and 2021.

Management believes that the provision for impairment losses on deferred expenses is adequate.

12. ACCOUNT PAYABLES

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee, project preparation and transaction advisory provision, and the Company's operational costs.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/40 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN

13. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid income tax

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Lebih bayar:			Overpayment of:
Pajak Pertambahan Nilai:			Value Added Tax:
- 2021	-	1,612,945	2021 -
- 2022	<u>2,015,255</u>	<u>-</u>	2022 -
	<u>2,015,255</u>	<u>1,612,945</u>	

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak lain-lain:			Other taxes:
- Pajak Pertambahan Nilai	1,677,341	1,286,807	Value Added Tax -
- Pajak Penghasilan Pasal 21	1,533,168	2,564,984	Withholding Tax Article 21 -
- Lainnya	<u>569,439</u>	<u>569,678</u>	Others -
	<u>3,779,948</u>	<u>4,421,469</u>	

c. Manfaat pajak penghasilan

c. Income tax benefit

Manfaat pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

Tax benefit of the Company consist of the following:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak tangguhan	<u>11,537,151</u>	<u>36,835,422</u>	Deferred tax
	<u>11,537,151</u>	<u>36,835,422</u>	

Rekonsiliasi antara manfaat pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the tax benefit and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>702,636,470</u>	<u>588,566,714</u>	Profit before income tax
Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	(154,580,023)	(129,484,677)	Tax calculated at applicable tax rate
Pengaruh atas:			Effects of:
- Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	175,013,910	163,229,807	Revenues subjected to - final income tax
- Laba pajak yang dibebankan di tahun berjalan	18,703,480	32,333,811	Tax income charged - in current year
- Beban yang tidak dapat diperhitungkan	(27,600,216)	(30,641,593)	Non-deductible expenses -
- Dampak perubahan tarif pajak	<u>-</u>	<u>1,398,074</u>	Impact of changes in tax rates -
Manfaat pajak penghasilan	<u>11,537,151</u>	<u>36,835,422</u>	Income tax benefit

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/41 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax benefit (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before income tax and the Company's taxable income is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	702,636,470	588,566,714	<i>Profit before income tax</i>
Beda waktu	52,441,595	161,057,282	<i>Timing differences</i>
Beda tetap	125,455,527	139,301,540	<i>Permanent differences</i>
Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	<u>(795,517,771)</u>	<u>(741,953,668)</u>	<i>Revenues subjected to final income tax</i>
Laba pajak berjalan	<u>85,015,821</u>	<u>146,971,868</u>	<i>Current tax income</i>
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	<u>(155,242,089)</u>	<u>(302,213,957)</u>	<i>Tax loss carry forward</i>
Akumulasi kerugian pajak	<u>(70,226,268)</u>	<u>(155,242,089)</u>	<i>Accumulated tax losses</i>

Berikut ini adalah rincian akumulasi kerugian fiskal:

Below are details of accumulated fiscal losses:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Tahun fiskal:			<i>Fiscal year:</i>
2020	(43,281,299)	(43,281,299)	<i>2020</i>
2019	(26,944,969)	(66,727,915)	<i>2019</i>
2018	<u>-</u>	<u>(45,232,875)</u>	<i>2018</i>
	<u>(70,226,268)</u>	<u>(155,242,089)</u>	

Termasuk di dalam koreksi fiskal beda tetap adalah beban pajak sebesar Rp 98.959.572 (2021: Rp 115.019.709) yang dibayarkan atas penerimaan bunga dari deposito berjangka, pendapatan tetap dan rekening giro.

Included in the fiscal correction of the permanent difference is the tax expense of Rp 98,959,572 (2021: Rp 115,019,709) paid for interest income from time deposits, fixed income and current accounts.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajaknya.

The above corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2022 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return ("SPT").

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/42 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax asset

	2022					
	1 Januari/ January 2022	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statements of profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December 2022		
Penyisihan gaji dan bonus	5,691,168	887,796	-	6,578,964	Provision for salaries and bonus	
Beban penyisihan imbalan kerja	4,157,042	400,509	(473,239)	4,084,312	Provision for employee benefits obligation	
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	2,110,555	(87,752)	-	2,022,803	Differences between accounting and tax fixed assets net book value	
Pendapatan tangguhan penjaminan	6,349,800	(929,828)	-	5,419,972	Guarantee unearned income	
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	440,000	-	440,000	Allowance for Account Receivable	
Penyisihan penurunan nilai	2,945,005	178,121	-	3,123,126	Provision for impairment	
Pendapatan tangguhan pelaku usaha korporasi	31,295,996	669,068	-	31,965,064	Corporate business entities unearned income	
Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan pelaku usaha korporasi	5,580,854	9,979,237	-	15,560,091	Commitment and contingencies of Corporate business entities revenue	
	<u>58,130,420</u>	<u>11,537,151</u>	<u>(473,239)</u>	<u>69,194,332</u>		
	2021					
	1 Januari/ January 2021	Dampak perubahan tarif pajak/ Impact of changes in tax rates	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statements of profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December 2021	
Penyisihan gaji dan bonus	5,128,782	-	562,386	-	5,691,168	Provision for salaries and bonus
Beban penyisihan imbalan kerja	7,245,052	724,505	(2,489,748)	(1,322,767)	4,157,042	Provision for employee benefits obligation
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	1,960,595	196,060	(46,100)	-	2,110,555	Differences between accounting and tax fixed assets net book value
Pendapatan tangguhan penjaminan	2,989,305	-	3,360,495	-	6,349,800	Guarantee unearned income
Penyisihan penurunan nilai	4,822,555	482,255	(2,359,805)	-	2,945,005	Provision for impairment
Pendapatan tangguhan pelaku usaha korporasi	456,267	-	30,839,729	-	31,295,996	Corporate business entities unearned income
Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan pelaku usaha korporasi	15,209	-	5,565,645	-	5,580,854	Commitment and contingencies of Corporate business entities revenue
	<u>22,617,765</u>	<u>1,402,820</u>	<u>35,432,602</u>	<u>(1,322,767)</u>	<u>58,130,420</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/43 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal (*tax losses carry forward*) karena ketidakpastian tersedianya penghasilan kena pajak di masa depan dimana akumulasi kerugian pajak dapat dimanfaatkan.

e. Pemeriksaan pajak

Tahun pajak 2017

- Pajak penghasilan

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan menerima surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) terkait pelaporan SPT tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21.

Pada tanggal 29 Desember 2022, Perusahaan telah membayarkan kekurangan tagihan pajak sebesar Rp 451.103, dan telah dilakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak 2017.

13. TAXATION (continued)

d. Deferred tax asset (continued)

On 31 March 2020, the Government issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 year 2020 which has become Law (UU) No. 2 year 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for fiscal year 2020 and 2021 and 20% for the fiscal year 2022 onwards.

On 29 October 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards. Hence, the previously tax rate determination of 20% will be invalid after the ratification of this Law.

As at 31 December 2022 and 2021, the Company does not recognise deferred assets relating to the tax losses carry forward due to uncertainty about the availability of future taxable income where the tax losses carry forward can be utilised.

e. Tax audit

Fiscal year 2017

- Income tax

On 31 March 2022, the Company received a letter requesting an explanation of data and/or information (SP2DK) regarding the reporting of Annual Income Tax Return with Income Tax Return Art 21.

On 29 December 2022, the Company has paid the insufficiency in tax bills amounting to Rp 451,103, and the Income Tax Return has been corrected for the fiscal year 2017.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/44 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2021

- Pajak pertambahan nilai

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2021.

Pada tanggal 18 Oktober 2022, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp 1.612.945 yang pembayarannya telah diterima Perusahaan pada tanggal 2 November 2022.

Tahun pajak 2020

- Pajak pertambahan nilai

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2020.

Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2020 sebesar Rp 1.408.247, yang pembayarannya telah diterima Perusahaan pada tanggal 22 September 2021.

Tahun pajak 2019

- Pajak pertambahan nilai

Pada tanggal 1 Juli 2020, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2019.

Pada tanggal 15 Desember 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2019 sebesar Rp 2.461.382, yang pembayarannya telah diterima Perusahaan pada tanggal 11 Januari 2021.

13. TAXATION (continued)

e. Tax audit (continued)

Fiscal year 2021

- Value added tax

On 31 March 2022, the Company received tax audit letter related to Value Added Tax for fiscal year 2021.

On 18 October 2022, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2021 amounting to Rp 1,612,945 and the payment has been received by the Company on 2 November 2022.

Fiscal year 2020

- Value added tax

On 28 May 2021, the Company received tax audit letter related to Value Added Tax for fiscal year 2020.

On 20 August 2021, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2020 amounting to Rp 1,408,247, and the payment has been received by the Company on 22 September 2021.

Fiscal year 2019

- Value added tax

On 1 July 2020, the Company received tax audit letter related to Value Added Tax for fiscal year 2019.

On 15 December 2020, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2019 amounting to Rp 2,461,382, and the payment has been received by the Company on 11 January 2021.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/45 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR,
PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN**

**14. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND
OTHER PAYABLES**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan pelaku usaha korporasi	70,727,685	25,367,516	<i>Estimated commitment and contingencies of corporate business entities</i>
Beban jasa konsultasi	31,901,707	11,813,942	<i>Advisory fees</i>
Bonus dan gaji	29,904,380	25,868,945	<i>Bonus and salary</i>
Lainnya	3,135,409	2,231,425	<i>Others</i>
	<u>135,669,181</u>	<u>65,281,828</u>	

Manajemen berpendapat bahwa estimasi komitmen dan kontinjensi atas penjaminan pelaku usaha korporasi yang diakui dalam laporan keuangan adalah cukup untuk menutup potensi klaim penjaminan yang tidak terpulihkan.

Management believes that the estimated commitment and contingency to guarantees for corporate business entities recognised in the financial statements are adequate to cover potential non-recoverable guarantee claims.

15. PENDAPATAN TANGGUHAN

15. UNEARNED INCOME

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Penjaminan pelaku usaha korporasi	145,295,740	142,254,524	<i>Corporate business entities guarantee</i>
Penjaminan infrastruktur	24,636,236	28,862,730	<i>Infrastructure guarantee</i>
	<u>169,931,976</u>	<u>171,117,254</u>	

16. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

16. FINANCE LEASE LIABILITIES

Liabilitas sewa pembiayaan merupakan liabilitas sewa pembiayaan aset hak guna yang merupakan nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar dan dihitung dengan suku bunga implisit dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Finance lease liabilities represent lease liabilities for right-of-use assets of present value of unpaid lease payments and are calculated using the implicit interest rate of the incremental loan interest rate.

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Future minimum lease payments together with the present value of the minimum lease payments for year 2022 and 2021 were as follows.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:			<i>The present value lease liabilities are as follows:</i>
- Tidak lebih dari 1 tahun	8,545,628	17,737,704	<i>Not later than 1 year -</i>
- Lebih dari 1 tahun	-	15,766,621	<i>Later than 1 year -</i>
	<u>8,545,628</u>	<u>33,504,325</u>	

17. PINJAMAN PENERUSAN

17. TWO-STEP LOANS

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development*.

On 27 May 2013, the Company entered into a two-step loans agreement with the Government in regards to the fund provided by the International Bank for Reconstruction and Development.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/46 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

17. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan)

Pinjaman penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yaitu *World Bank*, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman.

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai peningkatan kapasitas penjaminan Perusahaan dan pengadaan konsultan jasa atas proyek KPBU di bidang infrastruktur. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2029.

Pada tanggal 22 Februari 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-1504/MK.5/2016 sebagai amandemen atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan pada tingkat suku bunga, yaitu menggunakan *SUN Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Batas penarikan pinjaman penerusan telah berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Pada tanggal 19 November 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-162/MK.5/2020 sebagai amandemen kedua atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan jadwal pembayaran pokok pinjaman dengan masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penarikan pertama dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2034.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah akumulasi penarikan pinjaman penerusan adalah sebesar Rp 55.126.686. Pinjaman penerusan ini menggunakan *SUN Benchmark* sebagai acuan tingkat suku bunga atau setara dengan tingkat suku bunga 7,13% dan 7,50% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Selama tahun 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas bunga pinjaman penerusan Rp 3.927.776 (2021: Rp 4.134.501).

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. TWO-STEP LOANS (continued)

Two-step loans are loans obtained by the Government from international bank which is World Bank, which are then re-loaned to the Company. The loans were recorded and payable in Rupiah based on the exchange rate at the date of drawdown.

The loans are intended for the development of underwriting capacity of the Company and procurement of service consultants on PPP in infrastructure projects. The loan principal are payable in semi-annual installments after grace period of 9 (nine) years and are due up to 2029.

On 22 February 2016, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-1504/MK.5/2016 as an amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The loans drawdown expired on 30 April 2019.

On 19 November 2020, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-162/MK.5/2020 as second amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of changes in repayment schedule with grace period of 9 (nine) years starting from the first drawdown date and are due up to 2034.

As at 31 December 2022 and 2021, the withdrawal of accumulated two-step loans are amounting to Rp 55,126,686. This loan used SUN Benchmark as reference of interest expense or equivalent to 7.13% and 7.50% for the year ended 31 December 2022 and 2021, respectively. During 2022, the Company has paid the interest of the two-step loans amounting Rp 3,927,776 (2021: Rp 4,134,501).

The Company has complied with the covenants in the borrowing agreements above.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/47 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 tanggal 2 November 2020.

Liabilitas imbalan kerja diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	14,099,905	14,983,249
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>4,465,142</u>	<u>3,912,390</u>
	<u>18,565,047</u>	<u>18,895,639</u>

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	2,691,884	(2,467,539)
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>695,334</u>	<u>(8,267,939)</u>
	<u>3,387,218</u>	<u>(10,735,478)</u>

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan kewajiban imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years
Tingkat diskonto	7.30%	7.35%
Tingkat mortalita	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)
Tingkat kenaikan gaji	8.00%	8.00%
Tingkat pengunduran diri	5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ 5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter	5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ 5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter

Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya

Liabilitas imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Liabilitas imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	14,099,905	14,983,249

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The Company provides employee benefits based on the provisions of Job Creation Law No. 11/2020 dated 2 November 2020.

Employee benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	14,099,905	14,983,249
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>4,465,142</u>	<u>3,912,390</u>
	<u>18,565,047</u>	<u>18,895,639</u>

Net expense/(income) recognised in the statements of profit or loss is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	2,691,884	(2,467,539)
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>695,334</u>	<u>(8,267,939)</u>
	<u>3,387,218</u>	<u>(10,735,478)</u>

The principal assumptions used in determining the post-employment benefits obligation as at 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years
Tingkat diskonto	7.30%	7.35%
Tingkat mortalita	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)
Tingkat kenaikan gaji	8.00%	8.00%
Tingkat pengunduran diri	5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ 5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter	5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ 5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter

Pension and other post-employment benefits

Pension and other post-employment benefits recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Liabilitas imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	14,099,905	14,983,249

Pension and other post-employment benefits obligation

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/48 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
(lanjutan)**

**Pension and other post-employment benefits
(continued)**

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense/(income) recognised in the statements of profit or loss is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya jasa kini	2,556,846	3,340,666	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	954,820	1,182,293	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa lalu	435,231	230,140	<i>Past service cost</i>
Biaya jasa lalu - amandemen	-	(7,244,090)	<i>Past service cost - amendment</i>
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	(1,345,532)	-	<i>Adjustment due to change in benefit attribution method</i>
Kelebihan pembayaran imbalan	<u>90,519</u>	<u>23,452</u>	<i>Excess of benefit paid</i>
	<u>2,691,884</u>	<u>(2,467,539)</u>	

Mutasi imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya adalah sebagai berikut:

The movement in the pension and other post-employment benefits is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal tahun	14,983,249	23,902,342	<i>Balance at the beginning of the year</i>
Beban/(pendapatan) tahun berjalan	4,037,416	(2,467,539)	<i>Employee benefit expense/(income) charged in the current year</i>
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	(1,345,532)	-	<i>Adjustment due to change in benefit attribution method</i>
Pengukuran kembali: Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(2,151,088)	(6,012,578)	<i>Remeasurement: Loss from changes in financial assumptions</i>
Pembayaran imbalan kerja	<u>(1,424,140)</u>	<u>(438,976)</u>	<i>Benefit paid</i>
	<u>14,099,905</u>	<u>14,983,249</u>	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on pension and post-employment benefits obligation are as follow:

<u>31 Desember/December 2022</u>			
<u>Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation</u>			
<u>Perubahan asumsi/ Change in assumption</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in assumption</u>	
Tingkat diskonto	1.00%	(1,058,328)	1,200,631
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	2,095,819	(1,843,281)
			<i>Discount rate Rate of salary increase in the future</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/49 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
(lanjutan)**

**Pension and other post-employment benefits
(continued)**

31 Desember/December 2021

**Dampak atas kewajiban imbalan pasti/
Impact on defined benefit obligation**

	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(2,360,816)	372,903	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	1,492,236	(3,302,938)	<i>Rate of salary increase in the future</i>

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 13,76 tahun (2021: 13,98 tahun).

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2022 is 13.76 years (2021: 13.98 years).

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follow:

	2022	2021	
Kurang dari 1 tahun	1,060,785	1,293,939	<i>Less than a year</i>
1 sampai 2 tahun	1,044,610	1,003,346	<i>Between 1 - 2 years</i>
2 sampai 5 tahun	5,527,352	4,009,994	<i>Between 2 - 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	126,321,719	124,927,592	<i>Over than 5 years</i>

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Other long-term benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	2022	2021	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya	4,465,142	3,912,390	<i>Other long-term benefits obligation</i>

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense/(income) recognised in the statements of profit or loss is as follows:

	2022	2021	
Biaya jasa kini	800,294	824,345	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	37,480	27,213	<i>Past service cost</i>
Biaya jasa lalu - amandemen	-	(8,318,240)	<i>Past service cost - amendment</i>
Beban bunga	281,682	277,528	<i>Interest cost</i>
Keuntungan aktuarial	(424,122)	(1,078,785)	<i>Actuarial gains</i>
	<u>695,334</u>	<u>(8,267,939)</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/50 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term benefits (continued)

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal tahun	3,912,390	12,322,911	<i>Balance at the beginning of the year</i>
Beban/(pendapatan) tahun berjalan	695,334	(8,267,939)	<i>Employee benefit expense/(income) charged in the current year</i>
Pembayaran imbalan kerja	<u>(142,582)</u>	<u>(142,582)</u>	<i>Benefit paid</i>
	<u>4,465,142</u>	<u>3,912,390</u>	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on other long-term benefits obligation are as follow:

<u>31 Desember/December 2022</u>			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption
Tingkat diskonto	1.00%	(258,022)	289,474
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	305,587	(277,296)
			<i>Discount rate Rate of salary increase in the future</i>
<u>31 Desember/December 2021</u>			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption
Tingkat diskonto	1.00%	(238,902)	267,385
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	280,075	(254,586)
			<i>Discount rate Rate of salary increase in the future</i>

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted after other long-term benefits is as follow:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Kurang dari 1 tahun	530,164	159,970	<i>Less than a year</i>
1 sampai 2 tahun	513,740	564,927	<i>Between 1 - 2 years</i>
2 sampai 5 tahun	2,163,240	2,021,152	<i>Between 2 - 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	15,804,603	14,174,714	<i>Over than 5 years</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/51 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL

The composition of Company's shareholder as at 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	2022			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah Republik Indonesia	<u>10,655,000</u>	<u>100</u>	<u>10,655,000,000</u>	Government of the Republic of Indonesia

	2021			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah Republik Indonesia	<u>9,570,000</u>	<u>100</u>	<u>9,570,000,000</u>	Government of the Republic of Indonesia

Pemegang saham telah meningkatkan modal dasar Perusahaan menjadi Rp 20.000.000.000 melalui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan melalui Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 tanggal 19 November 2020 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 pada tanggal 19 November 2020.

The Shareholders had increased the Company's authorised capital to Rp 20,000,000,000 by amendment of the Company's Article of Association through Notarial Deed of Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 dated 19 November 2020 and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decree No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 19 November 2020.

Pada tanggal 23 Desember 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1.085.000.000 yang telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 23 Desember 2022.

On 23 December 2022, in accordance with Government Regulation No. 53 year 2022 regarding addition of investment on the Company's capital by Government of Indonesia, the payment for issuance of share capital amounting to Rp 1,085,000,000 had been received by the Company on 23 December 2022.

20. DIVIDEN

Pada tahun 2022, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H No. 15/A/Not/PT/VI/2022 Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2022 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2021 sejumlah Rp 156.350.534 yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2022.

20. DIVIDEND

In 2022, based on Notarial Deed of Arry Supratno, S.H No. 15/A/Not/PT/VI/2022 Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders on 20 June 2022 approved amount of dividend for 2021 amounting Rp 156,350,534 that has been paid on 29 June 2022.

Pada tahun 2021, berdasarkan Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., Mkn. No. 07 tanggal 23 Juli 2021, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan pada tanggal 23 Juni 2021 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2020 sejumlah Rp 186.168.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2021.

In 2021, based on Notarial Deed of Irma Devita Purnamasari, S.H., Mkn. No. 07 dated 23 July 2021, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders on 23 June 2021 approved amount of dividend for 2020 amounting Rp 186,168,000 that has been paid on 6 July 2021.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/52 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**21. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA - CADANGAN WAJIB**

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyetor jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada tahun 2022, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 31.270.107, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 228.769.445. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Arry Supratno, S.H. No.15/A/Not/PT/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.

Pada tahun 2021, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 31.028.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 197.499.338. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 Juni 2021 yang dituangkan dalam Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., Mkn. No. 07 tanggal 23 Juli 2021.

Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

**21. APPROPRIATED RETAINED EARNING -
STATUTORY RESERVE**

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

In 2022, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 31,270,107, as the reserve balance became Rp 228,769,445. This general reserve was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders as covered by Notarial Deed No. 15/A/Not/PT/VI/2022 of Arry Supratno, S.H. dated 20 June 2022.

In 2021, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 31,028,000, as the reserve balance became Rp 197,499,338. This general reserve was approved in the Decision General Meeting of Shareholders on 23 June 2021 as covered by notarial deed Irma Devita Purnamasari, S.H., Mkn. No. 07 on 23 July 2021.

Management plans to increase the general reserve in the future.

22. PENDAPATAN

22. REVENUES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pendapatan penjaminan:			Revenue from guarantee:
- Pendapatan premi	105,356,236	73,097,262	Premium income -
- Pendapatan provisi dan komisi	101,989,550	79,332,079	Fees and commission -
- Pendapatan pelaku usaha korporasi	<u>45,228,047</u>	<u>4,099,872</u>	Corporate business -
	<u>252,573,833</u>	<u>156,529,213</u>	entities revenue

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/53 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN (lanjutan)

22. REVENUES (continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	41,098,924	29,171,852	<i>Revenue from project preparation and transaction advisory</i>
Pendapatan pengelolaan dana:			<i>Income from investments:</i>
- Deposito	193,522,894	320,421,547	<i>Time deposits -</i>
- Investasi dengan pendapatan tetap:			<i>Fixed income: -</i>
Pendapatan bunga	593,316,114	415,449,507	<i>Interest income</i>
Laba atas penjualan obligasi	6,863,048	-	<i>Gain on sale of bonds</i>
	<u>793,702,056</u>	<u>735,871,054</u>	
Pendapatan lainnya	1,477,498	935,260	<i>Income from others</i>
	<u>1,088,852,311</u>	<u>922,507,379</u>	
Pendapatan penjaminan pelaku usaha korporasi yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:			<i>Revenue from corporate business entities recognised in the profit or loss is as follows:</i>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Amortisasi pendapatan tangguhan penjaminan pelaku usaha korporasi	120,395,442	29,398,257	<i>Amortisation of corporate business entities unearned income</i>
Estimasi komitmen pelaku usaha korporasi	(75,167,395)	(25,298,385)	<i>Estimated corporate business entities commitment</i>
	<u>45,228,047</u>	<u>4,099,872</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

23. BEBAN USAHA

23. OPERATING EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Umum dan administrasi:			General and administrative:
- Pegawai	48,849,981	37,988,624	<i>Employee cost -</i>
- Sewa	21,046,838	19,916,063	<i>Rent -</i>
- Jasa profesional	16,842,881	9,154,207	<i>Professional fees -</i>
- Rapat dan konferensi	7,783,538	1,210,022	<i>Meeting and conference -</i>
- Beban bina karyawan	6,386,544	1,178,980	<i>Employee development -</i>
- <i>Outsourcing</i>	4,631,827	3,891,162	<i>Outsourcing -</i>
- Perjalanan dinas	2,572,023	2,107,373	<i>Travelling -</i>
- Pemeliharaan	1,775,421	1,747,993	<i>Maintenance -</i>
- Pelatihan	1,101,145	783,297	<i>Training -</i>
- Perlengkapan kantor	1,014,994	544,650	<i>Office equipment -</i>
- Transportasi	842,032	378,626	<i>Transportation -</i>
- Komunikasi	304,741	180,104	<i>Communication -</i>
- Air dan Listrik	247,201	220,043	<i>Water & electricity -</i>
- Lainnya	42,232	135,657	<i>Others -</i>
	<u>113,441,398</u>	<u>79,436,801</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/54 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. BEBAN USAHA (lanjutan)

23. OPERATING EXPENSES (continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Penjaminan:			Guarantee:
- Pegawai	61,248,083	49,079,563	Employee cost -
- Konsultan	18,111,742	22,466,492	Consultancy -
- Perjalanan dinas	1,969,523	538,893	Travelling -
- Rapat dan konferensi	674,876	1,053,952	Meeting and conference -
- Loka-karya	374,735	274,385	Workshop -
	<u>82,378,959</u>	<u>73,413,285</u>	
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi:			Project preparation and transaction advisory:
- Konsultan	23,692,490	17,859,223	Consultancy -
- Pegawai	22,788,555	14,300,741	Employee cost -
- Rapat dan konferensi	1,385,557	889,235	Meeting and conference -
- Perjalanan dinas	987,141	376,480	Travelling -
- Loka-karya	503,338	422,860	Workshop -
- Iklan	-	244,931	Advertising -
	<u>49,357,081</u>	<u>34,093,470</u>	
Pengembangan usaha:			Business development:
- Pegawai	17,137,790	13,538,230	Employee cost -
- Sumbangan sosial	3,685,778	5,256,272	Social contribution -
- IIGF Institute	3,204,036	2,154,046	IIGF Institute -
- Loka-karya	2,754,645	1,807,383	Workshop -
- Iklan dan promosi	2,219,953	1,070,763	Advertising and promotion -
- Perjalanan dinas	996,083	192,352	Travelling -
- Representasi	808,833	423,340	Representation -
- Rapat dan konferensi	450,772	149,985	Meeting and conference -
	<u>31,257,890</u>	<u>24,592,371</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION

Sifat pihak berelasi

Nature of relationship

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
- Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
- Bank-bank BUMN dan entitas-entitas non-bank BUMN merupakan pihak berelasi oleh karena merupakan entitas sepengendali oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.

- The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.
- The Board of Directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.
- SOEs banks and non-banks SOEs are related parties as those entities under common controls of the Government of the Republic of Indonesia where the Company places its investments in time deposits and bonds.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/55 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sifat pihak berelasi (lanjutan)

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi

**24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES
INFORMATION (continued)**

Nature of relationship (continued)

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

Balances arising from related parties transactions

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalents
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	98,972,070	16,155,388	PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,907,029	14,870,703	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5,806,267	1,350,534,607	PT Bank Syariah Indonesia Tbk -
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7,628	425,008,048	PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	<u>474</u>	<u>1,800,000,474</u>	PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk - UUS
	<u>113,693,468</u>	<u>3,606,569,220</u>	
Investasi			Investments
- Pemerintah Republik Indonesia	7,565,602,988	5,457,542,568	Government of the Republic of Indonesia
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,931,585,149	-	PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	1,488,970,000	-	PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk - UUS
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	606,320,200	229,594,200	PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	407,355,500	251,442,000	PT Sarana Multigriya Finansial - (Persero)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	349,810,000	13,308,100	PT Bank Negara Indonesia - (Persero) Tbk
- PT Pegadaian (Persero)	187,748,000	193,301,900	PT Pegadaian (Persero) -
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	158,940,000	166,560,000	PT Pelabuhan Indonesia - (Persero)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	153,120,000	159,645,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	109,536,000	112,560,000	PT Semen Indonesia - (Persero) Tbk
- PT Pupuk Indonesia (Persero)	82,104,000	85,152,000	PT Pupuk Indonesia (Persero) -
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	77,000,000	77,000,000	PT Telekomunikasi Indonesia - (Persero) Tbk
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	41,052,000	68,357,500	PT Kereta Api Indonesia - (Persero)
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30,000,000	30,000,000	PT Perusahaan Listrik Negara - (Persero)
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	<u>-</u>	<u>159,818,000</u>	PT Sarana Multi Infrastruktur - (Persero)
	<u>13,189,143,837</u>	<u>7,004,281,268</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/56 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES
INFORMATION (continued)**

**Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-
pihak berelasi (lanjutan)**

**Balances arising from related parties
transactions (continued)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Piutang usaha			Account receivables
- Pemerintah Republik Indonesia	122,981,055	82,786,577	Government of the - Republic of Indonesia
- PDAM Way Rilau	36,350,951	-	PDAM Way Rilau -
- PT Pertamina (Persero)	35,394,750	-	PT Pertamina (Persero) -
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	6,425,938	1,658,561	PT Perusahaan Listrik Negara - (Persero)
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	2,950,875	2,950,875	PT Pelabuhan Indonesia - (Persero)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,877,473	-	PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2,191,312	2,076,000	PT Sarana Multigriya Finansial - (Persero)
- PT Len Industri (Persero)	1,939,000	-	PT Len Industri (Persero) -
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	766,437	872,063	PT Sarana Multi Infrastruktur - (Persero)
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	756,000	756,000	PT Semen Indonesia - (Persero) Tbk
- Perusahaan Umum Damri (Persero) Tbk	750,000	-	Perusahaan Umum Damri - (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	740,851	1,707,261	PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk - UUS
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	717,004	205,400	PT Bank Negara Indonesia - (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	659,121	1,033,604	PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk
- PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	1,575,000	PT Geo Dipa Energi (Persero) -
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	779,913	PT Bank Syariah Indonesia Tbk -
- Lain-lain (dibawah Rp 500.000)	<u>1,444,889</u>	<u>1,633,795</u>	Others (below Rp 500,000) -
	<u>216,945,656</u>	<u>98,035,049</u>	
	<u>13,519,782,961</u>	<u>10,708,885,537</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>86.92%</u>	<u>75.71%</u>	Percentage of total assets
Pinjaman penerusan			Two-step loans
- Pemerintah Republik Indonesia	<u>55,126,686</u>	<u>55,126,686</u>	Government of the - Republic of Indonesia
	<u>55,126,686</u>	<u>55,126,686</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>13.73%</u>	<u>15.50%</u>	Percentage of total liabilities
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain			Accrued expenses, provisions and other payables
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	<u>7,902,720</u>	<u>-</u>	Lembaga Pembiayaan Ekspor - Indonesia (Indonesia Eximbank)
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>1.97%</u>	<u>-</u>	Percentage of total liabilities

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/57 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES
INFORMATION (continued)**

**Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-
pihak berelasi (lanjutan)**

**Balances arising from related parties
transactions (continued)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pendapatan			Revenues
- Pemerintah Republik Indonesia	570,841,574	323,772,952	Government of the Republic of Indonesia
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	58,230,578	36,324,736	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	42,659,492	58,920,196	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Pertamina (Persero)	35,394,750	-	PT Pertamina (Persero)
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	28,888,505	19,070,849	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk	22,270,118	16,682,940	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17,807,750	15,481,306	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	13,725,000	13,743,000	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- PT Pegadaian (Persero)	13,277,000	13,277,000	PT Pegadaian (Persero)
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk	12,891,878	9,457,983	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12,786,945	12,750,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	11,276,139	12,618,278	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	9,450,000	9,450,000	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7,388,257	7,892,500	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,202,282	49,138,133	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Pupuk Indonesia (Persero)	6,160,000	6,228,444	PT Pupuk Indonesia (Persero)
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4,889,160	5,217,500	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3,630,906	105,086,504	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Geo Dipa Energi (Persero)	3,163,111	3,205,605	PT Geo Dipa Energi (Persero)
- PT Len Industri (Persero)	1,939,000	-	PT Len Industri (Persero)
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1,235,809	1,221,919	Indonesia Tourism Development Corporation (Persero)
- PDAM Way Rilau	1,116,960	-	PDAM Way Rilau
- Perum Damri	750,000	-	Perum Damri
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	-	4,387,500	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
- PT Angkasa Pura (Persero)	-	1,732,400	PT Angkasa Pura (Persero)
- PT Aneka Tambang Tbk	-	441,411	PT Aneka Tambang Tbk
	<u>886,975,214</u>	<u>726,101,156</u>	
Persentase terhadap jumlah pendapatan	<u>81.46%</u>	<u>78.71%</u>	Percentage of total revenue

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/58 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES
INFORMATION (continued)**

**Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-
pihak berelasi (lanjutan)**

**Balances arising from related parties
transactions (continued)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban penjaminan			Guarantee expense
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	<u>7,902,720</u>	<u>-</u>	<i>Lembaga Pembiayaan Ekspor - Indonesia (Indonesia Eximbank)</i>
Persentase terhadap jumlah beban usaha	<u>2.05%</u>	<u>-</u>	<i>Percentage of total operating expense</i>
Beban bunga			Interest expense
- Pemerintah Republik Indonesia	<u>3,927,776</u>	<u>4,134,501</u>	<i>Government of the - Republic of Indonesia</i>
Persentase terhadap jumlah beban usaha	<u>1.02%</u>	<u>1.24%</u>	<i>Percentage of total operating expense</i>
Kompensasi dan remunerasi manajemen kunci			Compensation and remuneration of the key management personnel
Dewan Komisaris - Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	7,086,592	6,196,415	<i>Board of Commissioners Salary and short-term - employee benefit</i>
Direksi - Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	<u>14,730,815</u>	<u>12,427,559</u>	<i>Board of Directors Salary and short-term - employee benefit</i>
	<u>21,817,407</u>	<u>18,623,974</u>	
Persentase terhadap jumlah beban usaha	<u>5.65%</u>	<u>5.58%</u>	<i>Percentage of total operating expenses</i>

25. PERJANJIAN PENTING

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Perjanjian Penjaminan

Guarantee Agreement

Hal-hal berikut adalah perjanjian penjaminan yang telah ditandatangani oleh Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2022:

The following are the guarantee agreement entered by the Company as at 31 December 2022:

KPBU

PPP

1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)

1. *Batang East Java Power Plant Project (CJPP)*

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") selaku BU.

On 6 October 2011, the Company together with the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") entered into a guarantee agreement with PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/59 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)
(lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Bhimasena berupa *arranging fee* dan *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan perolehan pembiayaan, sedangkan *processing fee* dan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 21 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya perjanjian kerja sama ("PKS") antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 6 Juni 2016, penandatanganan perolehan pembiayaan proyek dilakukan antara pemberi pinjaman dan Bhimasena. Pada saat yang bersamaan, penjaminan proyek sudah efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 300 miliar (nilai penuh) kerugian pertama yang meliputi risiko politik dan terminasi.

2. Proyek Palapa Ring Barat

Pada tanggal 29 Februari 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Barat berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 10 November 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

1. *Batang East Java Power Plant Project (CJPP) (continued)*

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Bhimasena in the form of arranging fee and upfront fee at the signing date and financial close date, while processing fee and guarantee fee are obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 21 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 6 June 2016, signing of financial close was held between lender and Bhimasena. At the same time, guarantee of the project has been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to the first loss of Rp 300 billion (full amount) covering political risk and termination.

2. *Western Package Palapa Ring Project*

On 29 February 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Palapa Barat in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 November 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/60 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

2. Proyek Palapa Ring Barat (lanjutan)

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 310 miliar (nilai penuh) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh Palapa Barat dan PJKP.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 2 Maret 2018.

3. Proyek Palapa Ring Tengah

Pada tanggal 4 Maret 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari LTI berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 30 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 336 miliar (nilai penuh) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh LTI dan PJKP.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 21 Desember 2018.

4. Proyek Palapa Ring Timur

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Telematika ("Palapa Timur") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

2. *Western Package Palapa Ring Project (continued)*

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 310 billion (full amount) covering the financial liability of Availability Payment, and 80% from termination cost approved by Palapa Barat and GCA.

The project operates starting on 2 March 2018.

3. *Central Package Palapa Ring Project*

On 4 March 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from LTI in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 30 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 336 billion (full amount) covering the financial liability of Availability Payment), and 80% from Termination Cost approved by LTI and GCA.

The project operates starting on 21 December 2018.

4. *Eastern Package Palapa Ring Project*

On 29 September 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/61 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

4. Proyek Palapa Ring Timur (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Timur berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 29 Maret 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 826 miliar (nilai penuh untuk sub-paket 1) dan Rp 570 miliar (nilai penuh untuk sub-paket 2) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh Palapa Timur dan PJPK.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 29 Agustus 2019.

5. Proyek Tol Batang - Semarang

Pada tanggal 27 April 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Semarang Batang berupa *upfront fee* pada saat tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

4. *Eastern Package Palapa Ring Project (continued)*

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Palapa Timur in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 29 March 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 826 billion (full amount for sub-package 1) and Rp 570 billion (full amount for sub-package 2) covering the financial liability of Availability Payment, and 80% from Termination Cost approved by Palapa Timur and GCA.

The project operates starting on 29 August 2019.

5. *Batang - Semarang Toll Road Project*

On 27 April 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Semarang Batang in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/62 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

5. Proyek Tol Batang - Semarang (lanjutan)

Pada tanggal 20 Juni 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.450 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 21 Januari 2019.

6. Proyek Tol Pandaan - Malang

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Pandaan Malang berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 5,6 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

Proyek ini telah beroperasi untuk seluruh seksi pada tanggal 2 April 2020.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

5. *Batang - Semarang Toll Road Project (continued)*

On 20 June 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,450 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

The project operates starting on 21 January 2019.

6. *Pandaan - Malang Toll Road Project*

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Pandaan Malang in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 3 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 5.6 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

The project operates for all sections on 2 April 2020.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/63 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

7. Proyek Tol Manado - Bitung

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Manado Bitung berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 6 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 3,4 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

Proyek ini telah beroperasi pada bulan Juni dan September 2020 untuk sebagian seksi.

8. Proyek Tol Balikpapan - Samarinda

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Balikpapan Samarinda berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

7. Manado - Bitung Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Manado Bitung in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 6 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 3.4 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

The project operates on June and September 2020 for some sections.

8. Balikpapan - Samarinda Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Balikpapan Samarinda in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/64 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

8. Proyek Tol Balikpapan - Samarinda (lanjutan)

Pada tanggal 2 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 6,1 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

Proyek ini telah beroperasi untuk seluruh seksi pada tanggal 24 Agustus 2021.

9. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Umbulan

Pada tanggal 21 Juli 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Meta berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 10 Februari 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

8. Balikpapan - Samarinda Toll Road Project (continued)

On 2 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 6.1 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

The project operates for all sections on 24 August 2021.

9. Water Supply System Umbulan Project

On 21 July 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Meta in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 February 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/65 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

9. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum
("SPAM") Umbulan (lanjutan)

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 180 miliar (nilai penuh) yang meliputi cidera janji pembayaran bulanan dan 80% atas harga pembelian proyek yang wajib dibayar oleh PJPB ke BU sesuai PKS.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 29 Januari 2021.

10. Proyek Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed (Sebelumnya Jalan Tol Jakarta - Cikampek II *Elevated*)

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek ("Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated*") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated* berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian penjaminan dan surat imbal jasa penjaminan. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPB.

Pada tanggal 8 Mei 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 600 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif dan risiko politik.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 12 Desember 2019.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

9. *Water Supply System Umbulan Project (continued)*

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 180 billion (full amount) covering the breach of monthly payment promise and 80% of project purchase price to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

The project operates starting on 29 January 2021.

10. *Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed (Previously Jakarta - Cikampek II Elevated Tol Road) Project*

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek ("Jasamarga Jakarta - Cikampek Elevated") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Jakarta - Cikampek Elevated in the form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter. Meanwhile, guarantee fee at the effective date of guarantee until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 8 May 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 600 billion (full amount) covering tariff adjustment and political risk.

The project operates starting on 12 December 2019.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/66 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

11. Proyek Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Citra Karya Jabar Tol ("Citra Karya") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Citra Karya berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 22 Februari 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 1.430 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

Proyek ini telah beroperasi pada bulan November 2020 untuk sebagian seksi.

12. Proyek Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Waskita Bumi Wira ("Waskita Bumi") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

11. *Cileunyi - Sumedang - Dawuan Toll Road Project*

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Citra Karya Jabar Tol ("Citra Karya") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Citra Karya in the form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 22 February 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 1,430 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

The project operates on November 2020 for some sections.

12. *Krian - Legundi - Bunder - Manyar Toll Road Project*

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Waskita Bumi Wira ("Waskita Bumi") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/67 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

12. Proyek Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Waskita Bumi berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 11 Desember 2017, penjaminan proyek telah efektif untuk ruas Krian - Legundi - Bunder dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan. Untuk ruas Bunder-Manyar telah efektif dengan diterbitkannya Berita Acara Pengadaan Tanah pada tanggal 1 Juli 2019.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 649 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik dan keterlambatan pengadaan tanah.

Proyek ini telah beroperasi pada bulan November 2020 untuk sebagian seksi.

13. Proyek Tol Serang - Panimbang

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Wika Sepang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Wika Sepang berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

12. Krian - Legundi - Bunder - Manyar Toll Road Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Waskita Bumi in the form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 11 December 2017, the guarantee of the project has been effective for Krian - Legundi - Bunder segment road since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled. For Bunder-Manyar segment road has been effective with issuance of Minutes of Land Acquisition on 1 July 2019.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 649 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk and delay in land acquisition.

The project operates on November 2020 for some sections.

13. Serang - Panimbang Toll Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Wika Sepang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Wika Sepang in the form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/68 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

13. Proyek Tol Serang - Panimbang (lanjutan)

Pada tanggal 17 November 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.053 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

Pada bulan Oktober 2018, dilakukan amandemen atas nilai maksimum penjaminan dana talangan tanah sehingga estimasi maksimum nilai penjaminan proyek ini menjadi Rp 2.053 miliar (nilai penuh).

Proyek ini telah beroperasi pada bulan November 2021 untuk sebagian seksi.

14. Proyek Tol Probolinggo - Banyuwangi

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("Jasamarga Probowangi") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Probowangi berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 10 Juli 2020, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.281 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

13. Serang - Panimbang Toll Road Project (continued)

On 17 November 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,053 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

In October 2018, there was an amendment of land bailout fund maximum guarantee therefore the estimated maximum guarantee of the project become Rp 2,053 billion (full amount).

The project operates on November 2021 for some sections.

14. Probolinggo - Banyuwangi Toll Road Project

On 29 December 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("Jasamarga Probowangi") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Probowangi in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 July 2020, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,281 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/69 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

15. Proyek Tol Jakarta - Cikampek II Selatan

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Japek Selatan ("Jasamarga Japek Selatan") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Japek Selatan berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 27 Juni 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.280 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

16. Proyek SPAM Lampung

Pada tanggal 14 Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Adhya Tirta Lampung ("ATL") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ATL berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

15. Jakarta - Cikampek II South Toll Road Project

On 29 December 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Japek Selatan ("Jasamarga Japek Selatan") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Japek Selatan in the form of *upfront fee* at the effective date of guarantees, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 27 June 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,280 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

16. Water Supply System Lampung Project

On 14 February 2018, the Company entered into a guarantee agreement with PT Adhya Tirta Lampung ("ATL") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from ATL in the form of *upfront fee* at the signing date and effective date of guarantees, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/70 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

16. Proyek SPAM Lampung (lanjutan)

Pada tanggal 14 Agustus 2018, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 150 miliar (nilai penuh) yang meliputi cicilan janji pembayaran bulanan dan 80% atas harga pembelian proyek yang wajib dibayar oleh PJKP ke BU sesuai PKS.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 12 Agustus 2020.

17. Proyek SPAM Semarang Barat

Pada tanggal 23 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Air Semarang Barat ("ASB") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ASB berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* yang diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 29 Mei 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 169 miliar (nilai penuh) yang meliputi biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung (termasuk bunga keterlambatan pembayaran) dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 22 Mei 2021.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

16. *Water Supply System Lampung Project (continued)*

On 14 August 2018, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 150 billion (full amount) covering the breach of monthly payment promise and 80% of project purchase price to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

The project operates starting on 12 August 2020.

17. *Water Supply System West Semarang Project*

On 23 November 2018, the Company entered into a guarantee agreement with PT Air Semarang Barat ("ASB") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from ASB in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 29 May 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 169 billion (full amount) covering non-termination costs (including late payment interest) and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

The project operates starting on 22 May 2021.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/71 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

18. Proyek Kereta Api Makassar - Parepare

Pada tanggal 5 April 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Celebes Railway Indonesia ("CRI") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari CRI berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 14 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 16 September 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 439 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan 70% atas biaya pengakhiran yang ditanggung yang wajib dibayar oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

19. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah

Pada tanggal 3 Mei 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Satelit Nusantara Tiga ("SNT") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari SNT berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

18. Makassar - Parepare Railway Train Project

On 5 April 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Celebes Railway Indonesia ("CRI") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from CRI in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 14 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 16 September 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 439 billion (full amount) that is non-termination costs and 70% of termination costs in to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

19. Government Multifunction Satellite Project

On 3 May 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Satelit Nusantara Tiga ("SNT") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from SNT in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/72 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

19. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah
(lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.670 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung mana yang lebih rendah antara Rp 7.200 miliar (nilai penuh) atau 80% atas biaya pengakhiran yang wajib dibayarkan oleh PJKP ke BU sesuai PKS.

20. Proyek Tol Semarang - Demak

Pada tanggal 23 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak ("PPSD") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PPSD berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 9 Januari 2020, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 5.167 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah dan terminasi.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

19. Government Multifunction Satellite Project
(continued)

On 31 March 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,670 billion (full amount) that is non-termination costs and termination costs whichever is lower between Rp 7,200 billion (full amount) or 80% of termination costs in to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

20. Semarang - Demak Toll Road Project

On 23 September 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak ("PPSD") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PPSD in the form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 9 January 2020, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 5,167 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund and termination.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/73 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

21. Proyek Bandar Udara Labuan Bajo

Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Cinta Airport Flores ("CAF") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari CAF berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 14 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 14 November 2022, perjanjian penjaminan antara Perusahaan dengan CAF berakhir sebelum efektif sehubungan dengan berakhirnya PKS antara PJPK dan CAF.

22. Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 3 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jalintim Adhi Abipraya ("JAA") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JAA berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 11 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

21. Labuan Bajo Airport Project

On 7 February 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Cinta Airport Flores ("CAF") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from CAF in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 14 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 14 November 2022, the guarantee agreement between the Company and CAF expired before being effective due to the expiration of the PKS between the GCA and CAF.

22. Preservation of The East Sumatera Cross Road at South Sumatera Province Project

On 3 August 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jalintim Adhi Abipraya ("JAA") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JAA in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 11 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/74 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

22. Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2020, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 1.303 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung oleh PJKP ke BU sesuai PKS.

23. Proyek Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo

Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jogjasolo Marga Makmur ("JMM") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JMM berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.760 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

24. Proyek Tol Yogyakarta - Bawen

Pada tanggal 13 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Jogja Bawen ("JJB") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

22. *Preservation of The East Sumatera Cross Road at South Sumatera Province Project (continued)*

On 30 December 2020, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 1,303 billion (full amount) that is non-termination costs and termination costs to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

23. *Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo Toll Road Project*

On 9 September 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jogjasolo Marga Makmur ("JMM") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JMM in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,760 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

24. *Yogyakarta - Bawen Toll Road Project*

On 13 November 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Jogja Bawen ("JJB") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/75 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

24. Proyek Tol Yogyakarta - Bawen (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JJB berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.634 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

25. Proyek SPAM Pekanbaru

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Pembangunan Perumahan Tirta Madani ("PPTM") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PPTM berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 21 Juli 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 469 miliar (nilai penuh) yang meliputi biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

24. Yogyakarta - Bawen Toll Road Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JJB in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,634 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

25. Water Supply System Pekanbaru Project

On 16 December 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Pembangunan Perumahan Tirta Madani ("PPTM") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PPTM in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 21 July 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 469 billion (full amount) covering non-termination costs and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/76 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

26. Proyek SPAM Jatiluhur I

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur ("WTJJ") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari WTJJ berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 10 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 527 miliar (nilai penuh) yang meliputi biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

27. Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau

Pada tanggal 12 April 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Adhi Jalintim Riau ("AJR") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari AJR berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 11 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 5 Oktober 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

26. *Water Supply System Jatiluhur I Project*

On 19 February 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur ("WTJJ") as the investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from WTJJ in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 10 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 527 billion (full amount) covering non-termination costs and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

27. *Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province Project*

On 12 April 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Adhi Jalintim Riau ("AJR") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from AJR in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 11 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 5 October 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/77 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

27. Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau (lanjutan)

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 792 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung oleh PJKP ke BU sesuai PKS.

28. Proyek SPAM Karian Serpong

Pada tanggal 29 April 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Karian Water Services ("KWS") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari KWS berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 610 miliar (nilai penuh) yang meliputi biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

29. Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton

Pada tanggal 6 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Baja Titian Utama ("BTU") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

27. Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province Project (continued)

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 792 billion (full amount) that is non-termination costs and termination costs to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

28. Water Supply System Karian Serpong Project

On 29 April 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Karian Water Services ("KWS") as the investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from KWS in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 610 billion (full amount) covering non-termination costs and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

29. Replacement and/or Duplication of Callender Hamilton Bridge Project

On 6 December 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Baja Titian Utama ("BTU") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/78 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

29. Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi
Jembatan Callender Hamilton (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari BTU berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 10 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.736 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

30. Proyek Tol Gedebage – Tasikmalaya -
Cilacap

Pada tanggal 31 Januari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Gedebage Cilacap ("JGC") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JGC berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

29. *Replacement and/or Duplication of
Callender Hamilton Bridge Project
(continued)*

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from BTU in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 10 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,736 billion (full amount) that is non-termination costs and termination costs to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

30. *Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Toll
Road Project*

On 31 January 2022, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Gedebage Cilacap ("JGC") as the investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JGC in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/79 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

30. Proyek Tol Gedebage – Tasikmalaya -
Cilacap (lanjutan)

Sampai dengan tanggal pelaporan,
penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari
proyek ini adalah Rp 3.460 miliar (nilai penuh)
yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik,
keterlambatan pengadaan tanah.

Pada tanggal 10 Februari 2023, perjanjian
penjaminan antara Perusahaan dengan JGC
berakhir sehubungan dengan berakhirnya
PKS antara PJPk dan JGC.

31. Proyek Tol Gilimanuk – Mengwi

Pada tanggal 8 Maret 2022, Perusahaan
menandatangani perjanjian penjaminan
dengan PT Tol Jagat Kerthi Bali (“JKB”)
selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini,
Perusahaan berhak menerima imbal jasa
penjaminan dari JKB berupa *upfront fee* yang
terhutang pada saat ditandatanganinya
perjanjian, sedangkan *guarantee fee*
diperoleh sejak tanggal efektif dan selama
mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah
tanggal operasional komersial, tanggal
berakhirnya perjanjian penjaminan atau
tanggal berakhirnya PKS antara BU dan
PJPk.

Sampai dengan tanggal pelaporan,
penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari
proyek ini adalah Rp 2.682 miliar (nilai penuh)
yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik,
keterlambatan pengadaan tanah.

32. Proyek Alat Penerangan Jalan Madiun

Pada tanggal 20 September 2022,
Perusahaan menandatangani perjanjian
penjaminan dengan PT Tri Tunggal Madiun
Terang selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

30. Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Toll
Road Project (continued)

*As at the reporting date, the guarantee of the
project has not been effective.*

*Estimated maximum guarantee from this
project is amounting to Rp 3,460 billion (full
amount) covering tariff adjustment, political
risk, delay in land acquisition.*

*On 10 February 2023, the guarantee
agreement between the Company and JGC
expired due to the expiration of the PKS
between the GCA and JGC.*

31. Gilimanuk - Mengwi Toll Road Project

*On 8 March 2022, the Company entered into
a guarantee agreement with PT Tol Jagat
Kerthi Bali (“JKB”) as the investor.*

*Based on this guarantee agreement, the
Company is entitled to receive fees from
JKB in the form of upfront fee that payable at
the signing date, while guarantee fee is
obtained from the effective date of
guarantee and until whichever is earlier
between 15 years after the date of
commercial operation, the date of which the
guarantee agreement is terminated, or the
date of which the cooperation agreement
between the Investor and GCA is expired.*

*As at the reporting date, the guarantee of the
project has not been effective.*

*Estimated maximum guarantee from this
project is amounting to Rp 2,682 billion (full
amount) covering tariff adjustment, political
risk, delay in land acquisit*

32. Road Lighting Device Project Madiun

*On 20 September 2022, the Company
entered into a guarantee agreement with PT
Tri Tunggal Madiun Terang as the investor.*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/80 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

32. Proyek Alat Penerangan Jalan Madiun (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PT Tri Tunggal Madiun Terang berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 4 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 10 November 2022 penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Penjaminan

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 97,7 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah.

33. Proyek *Proving Ground* BPLJKSB Bekasi

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Indonesia International Automotive *Proving Gtground* selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PT Indonesia International Automotive *Proving Ground* berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

32. *Road Lighting Device Project Madiun (continued)*

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PT Tri Tunggal Madiun Terang in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 4 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 November 2022, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 97.7 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition

33. *Proving Ground BPLJKSB Project Bekasi*

*On 31 October 2022, the Company entered into a guarantee agreement with PT Indonesia International Automotive *Proving Gtground* as the investor.*

*Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PT Indonesia International Automotive *Proving Gtground* in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/81 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

33. Proyek *Proving Ground* BPLJKSB Bekasi (lanjutan)

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 1.690 miliar (nilai penuh) yang meliputi biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

Non-KPBU

1. Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangunan fasilitas infrastruktur pariwisata KEK Mandalika dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC") selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ITDC berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 35 tahun.

Pada tanggal 22 Maret 2019, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai dengan 15,5% dari nilai pinjaman sebesar USD 94.392.000 (nilai penuh) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

33. *Proving Ground* BPLJKSB Project Bekasi (continued)

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 1,690 billion (full amount) covering non-termination costs and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

Non-PPP

1. Special Economic Zone (SEZ) Mandalika Project

On 31 December 2018, the Company entered into a loan guarantee agreement for the construction of SEZ Mandalika tourism infrastructure facilities with Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC") as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on 28 December 2018, the Company is entitled to receive fees from ITDC in the form of *upfront fee* owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee for 35 years.

On 22 March 2019, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to 15.5% of the principal loan amounting to USD 94,392,000 (full amount) plus interests and other charges.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/82 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

2. Proyek Hydropower Programme

Pada tanggal 5 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangunan fasilitas infrastruktur penyediaan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Sulawesi dan lainnya dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") selaku BUMN terjamin dimana penjaminan telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 14 tahun.

Pada tanggal 5 September 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah maksimum sebesar EUR 42.099.000 (nilai penuh).

3. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 dan Patuha-2

Pada tanggal 19 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng-2 dan Patuha-2 dengan PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GDE") selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari GDE berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

2. Hydropower Programme Project

On 5 September 2019, the Company entered into a loan guarantee agreement for the infrastructure development in providing hydroelectric power plants in Sulawesi region and others with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") as the guaranteed SOE which the guarantee of the project has been effective along with the signing of the guarantee agreement.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 14 years.

On 5 September 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is at the maximum amounting to EUR 42,099,000 (full amount).

3. Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development Project

On 19 August 2020, the Company entered into a loan guarantee agreement of Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development project with PT Geo Dipa Energi ("GDE") as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from GDE in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/83 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

3. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 dan Patuha-2 (lanjutan)

Pada tanggal 21 September 2020, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai sebesar USD 58.625.000 (nilai penuh).

4. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP)

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek RBL-KMP dengan PLN selaku BUMN Terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

Pada tanggal 14 Januari 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai sebesar USD 105.000.000 (nilai penuh).

5. Proyek Pengembangan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-SNT)

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek RBL-SNT dengan PLN selaku BUMN terjamin dimana penjaminan telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

3. *Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development Project (continued)*

On 21 September 2020 the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to USD 58,625,000 (full amount).

4. *Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network Development Project with Result-Based Lending Scheme (RBL-KMP)*

On 16 December 2020, the Company entered into a loan guarantee agreement of RBL-KMP project with PLN as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

On 14 January 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to USD 105,000,000 (full amount).

5. *Sulawesi and Nusa Tenggara Distribution Development Project with Result-Based Lending Scheme (RBL-SNT)*

On 16 December 2020, the Company entered into a loan guarantee agreement of RBL-SNT project with PLN as the guaranteed SOE which the guarantee of the project has been effective along with the signing of the guarantee agreement.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/84 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

5. Proyek Pengembangan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-SNT) (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 15 tahun.

Pada tanggal 16 Desember 2020, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai sebesar EUR 48.600.000 (nilai penuh).

6. Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali (EJB)

Pada tanggal 10 Februari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman Proyek dengan PLN selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

Pada tanggal 9 April 2021, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai sebesar USD 62.000.000 (nilai penuh) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

5. *Sulawesi and Nusa Tenggara Distribution Development Project with Result-Based Lending Scheme (RBL-SNT) (continued)*

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 15 years.

On 16 December 2020, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to EUR 48,600,000 (full amount).

6. *East Java and Bali (EJB) Distribution Network Development Project*

On 10 February 2021, the Company entered into a loan guarantee agreement of EJB Project with PLN as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

On 9 April 2021, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to USD 62,000,000 (full amount) plus interests and other charges.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/85 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

7. Proyek Sustainable and Reliable Energy Access Program – Western and Central Java (SREAP)

Pada tanggal 19 Mei 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman Proyek dengan PLN selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

Pada tanggal 31 Mei 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai sebesar USD 150.000.000 (nilai penuh) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

8. Proyek Pembangunan PLTU Tahap III (PLTU Timor-1 2 x 50 MW)

Pada tanggal 28 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman Proyek dengan PLN selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 10 tahun.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai sebesar Rp 412 miliar (nilai penuh) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

7. Sustainable and Reliable Energy Access Program – Western and Central Java (SREAP) Project

On 19 May 2022, the Company entered into a loan guarantee agreement of EJB Project with PLN as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

On 31 May 2022, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to USD 150,000,000 (full amount) plus interests and other charges.

8. PLTU Development Project Phase III (PLTU Timor-1 2 x 50 MW)

On 28 December 2022, the Company entered into a loan guarantee agreement of EJB Project with PLN as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 10 years.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to Rp 412 billion (full amount) plus interests and other charges.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/86 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Penjaminan pelaku usaha korporasi

Pada tanggal 28 Juli 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dimana peran Perusahaan adalah memberikan dukungan *loss limit* dan dapat melaksanakan penjaminan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("LPEI") sebagai Badan Usaha Penjamin yang ditunjuk Pemerintah. Berdasarkan PMK tersebut, pada tanggal 19 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dan pada tanggal 15 Desember 2020, Perusahaan juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan LPEI terkait pelaksanaan penugasan pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menandatangani adendum perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI terkait pengaturan tata cara penagihan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* yang terbit untuk periode bulan Desember 2021.

Pada tanggal 23 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan LPEI sehubungan dengan pelaksanaan penugasan penjaminan bersama dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2021, Perusahaan menandatangani adendum perjanjian kerja sama dengan LPEI terkait perubahan profil risiko debitur yang dapat dijamin.

Pada tanggal 1 April 2021, telah diterbitkan PMK No. 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas PMK 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria Korporasi yang mendapatkan pinjaman kredit modal kerja. Berdasarkan PMK tersebut, penerbitan sertifikat penjaminan telah berakhir pada tanggal 17 Desember 2021.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Corporate business entities

On 28 July 2020, the issuance of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Economic Recovery Program where the role of the Company are providing loss limit supports and performing co-guarantee with Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("LPEI") as a guarantor of Corporate Business Entities appointed by the Government of Indonesia. In accordance with the PMK, on 19 November 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance, and on 15 December 2020, the Company also entered into a cooperation agreement with LPEI regarding the implementation of the assignment to provide loss limit supports for the the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program. Furthermore, on 13 December 2021, the Company entered into an amendment of cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance regarding the procedure for collecting Loss Limit Guarantee Fees issued for the period December 2021.

On 23 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance and also on 15 February 2021 with LPEI regarding implementation of a co-guarantee assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program. Furthermore, on 9 Desember 2021, the Company entered into an amendment of cooperation agreement with LPEI regarding the changes in the debtor's risk profile that can be guaranteed.

On 1 April 2021, the issuance of PMK No. 32/PMK.08/2021 regarding Changes of PMK No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Recovery Program that changes several provisions related to criteria for Corporate Business Entities to obtain working capital credit loans. Based on PMK, the issuance of guarantee certificates has ended on 17 December 2021.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/87 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Penjaminan pelaku usaha korporasi

Pada tanggal 30 Maret 2022, telah diterbitkan PMK No. 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria Korporasi yang mendapatkan pinjaman kredit modal kerja. Berdasarkan PMK tersebut, penerbitan sertifikat penjaminan diperpanjang paling lama pada tanggal 16 Desember 2022.

Berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Perusahaan memberikan dukungan *loss limit* kepada LPEI dengan batasan 90% dari akumulasi imbal jasa penjaminan *loss limit* yang diterima Perusahaan dari Pemerintah.

Sampai dengan 31 Desember 2022, nilai pinjaman yang telah diterbitkan sertifikat penjaminannya oleh LPEI dan disetujui untuk diberikan dukungan *loss limit* oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 8,11 triliun (nilai penuh) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5,58 triliun (nilai penuh). Penjaminan bersama Pelaku Usaha Korporasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan LPEI untuk nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp 2,7 triliun (nilai penuh) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 2,0 triliun (nilai penuh) dimana porsi penjaminan Perusahaan dengan LPEI adalah 80% dan 20%.

BUMN

1. Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

Pada tanggal 16 September 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pelaksanaan penjaminan atas Obligasi III Waskita Karya tahun 2021 dengan Waskita dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("Kemenkeu") dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Corporate business entities

On 30 March 2022, the issuance of PMK No. 27/PMK.08/2022 regarding second amendment of PMK No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Recovery Program that changes several provisions related to criteria for Corporate Business Entities to obtain working capital credit loans. Based on PMK, the issuance of guarantee certificates was extended no later than 16 December 2022.

Based on assignment from the Government, the Company provides *loss limit* supports to LPEI with threshold 90% of the accumulated *loss limit* guarantee fees received from government.

As of 31 December 2022, the value of loans for which guarantee certificate has been issued by LPEI and approved for *loss limit* supports by the Company is Rp 8.11 trillion (full amount) with guarantee value amounting to Rp 5.58 trillion (full amount). The National Economic Recovery Program with LPEI has been carried out with the value of loans is Rp 2.7 trillion (full amount) with guarantee value amounting to Rp 2.0 trillion (full amount), with the portion of the guarantee between the Company and LPEI is 80% and 20%.

SOEs

1. Bonds III of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

On 16 September 2021, the Company entered into a guarantee implementation agreement for the 2021 Waskita Karya's Bonds III with Waskita and guarantee assignment implementation agreement with Ministry of Finance of the Republic of Indonesia ("MOF") regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/88 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

1. Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Kemenkeu berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Waskita sampai dengan berakhirnya penjaminan Pemerintah.

Pada tanggal 16 September 2021, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 112 miliar (nilai penuh).

2. Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman Waskita Karya dengan Waskita dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Kemenkeu berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Waskita sampai dengan berakhirnya penjaminan Pemerintah.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 3.231 miliar (nilai penuh).

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

1. Bonds III of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") (continued)

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from MOF in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee until 31 December 2022 and then will be paid by Waskita until the end of the Government guarantee.

On 16 September 2021, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 112 billion (full amount).

2. Loans of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

On 29 October 2021, the Company entered into a guarantee implementation agreement for Waskita Karya's loans with Waskita and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from Kemenkeu in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee until 31 December 2022 and then will be paid by Waskita until the end of the Government guarantee.

On 29 October 2021, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 3,231 billion (full amount).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/89 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

3. Obligasi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pelaksanaan penjaminan atas Obligasi IV Waskita Karya tahun 2022 dengan Waskita dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Kemenkeu berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Waskita sampai dengan berakhirnya penjaminan Pemerintah.

Pada tanggal 22 April 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp Nihil (nilai penuh).

4. Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pelaksanaan penjaminan atas Sukuk Mudharabah I Waskita Karya tahun 2022 dengan Waskita dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

3. Loans of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

On April 22, 2022, the Company entered into a guarantee implementation agreement for the 2022 Waskita Karya's Bond IV with Waskita and guarantee assignment implementation agreement with Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (MOF/Kemenkeu) regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from Kemenkeu in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee until 31 December 2022 and then will be paid by Waskita until the end of the Government guarantee.

On 22 April 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp Nil (full amount).

4. Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

On April 22, 2022, the Company signed a guarantee implementation agreement for Waskita Karya Sukuk Mudharabah I for 2022 with Waskita and an agreement for implementation of guarantee assignment with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (Ministry of Finance) in the context of government guarantees for the National Economic Recovery Program.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/90 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

4. Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Kemenkeu berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Waskita sampai dengan berakhirnya penjaminan Pemerintah.

Pada tanggal 30 Mei 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 586 miliar (nilai penuh).

5. Penjaminan Pinjaman PT Industri Kereta Api (Persero) ("INKA")

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman PT INKA dengan INKA dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari INKA berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif.

Pada tanggal 30 Desember 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp Nihil (nilai penuh).

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

4. Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") (continued)

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from Kemenkeu in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee until 31 December 2022 and then will be paid by Waskita until the end of the Government guarantee

On 30 May 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 586 billion (full amount).

5. Loans guarantee of PT Industri Kereta Api (Persero) ("INKA")

On 30 December 2022, the Company entered into a guarantee implementation agreement for PT INKA loans with INKA and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from INKA in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee.

On 30 December 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp Nil (full amount).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/91 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

6. Penjaminan Pinjaman Perusahaan Umum DAMRI

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman Perum DAMRI dengan DAMRI dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari DAMRI berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif.

Pada tanggal 30 Desember 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 72 miliar (nilai penuh).

7. Penjaminan Pinjaman PT Pertamina (Persero)

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Pertamina (Persero) dengan Pertamina dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Pertamina berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

6. Loans guarantee of Perusahaan Umum DAMRI

On 30 December 2022, the Company entered into a guarantee implementation agreement for Perum DAMRI loans with DAMRI and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from DAMRI in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee.

On 30 December 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 72 billion (full amount).

7. Loans guarantee of PT Pertamina (Persero)

On 30 December 2022, the Company entered into a guarantee implementation agreement for PT Pertamina (Persero) loans with Pertamina and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from Pertamina in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/92 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

7. Penjaminan Pinjaman PT Pertamina (Persero) (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 3.303 miliar (nilai penuh).

8. Penjaminan Pinjaman PT Len Industri (Persero)

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Len Industri (Persero) dengan Pertamina dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PT Len Industri berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif.

Pada tanggal 30 Desember 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 480 miliar (nilai penuh).

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

7. Loans guarantee of PT Pertamina (Persero) (continued)

On 30 December 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 3,303 billion (full amount).

7. Loans guarantee of PT Len Industri (Persero)

On 30 December 2022, the Company entered into a guarantee implementation agreement for PT Len Industri (Persero) loans with Pertamina and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PT Len Industri in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee.

On 30 December 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 480 billion (full amount).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/93 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Kontijensi

Dalam penjaminan KPBU, terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, batas akhir serah terima tanah untuk beberapa proyek jalan tol yang dijamin Perusahaan telah terlewati. Dalam hal adanya kompensasi tunai atas keterlambatan penyerahan tanah tersebut dapat diajukan oleh BU kepada PJPK 7 hari setelah diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi ("SLO"). Dalam hal PJPK tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka BU dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2022, estimasi potensi klaim kepada PJPK terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah untuk 6 (enam) proyek adalah sebesar Rp 676 miliar (nilai penuh) (tidak diaudit).

Selain itu, terdapat risiko keterlambatan penyesuaian tarif untuk 3 (tiga) proyek yang dapat mengajukan klaim ke PJPK dengan estimasi potensi klaim sebesar Rp 463,1 Miliar (nilai penuh), serta risiko kegagalan pembayaran tagihan bulanan untuk 3 (tiga) proyek yang dapat mengajukan klaim ke PJPK dengan estimasi potensi klaim sebesar Rp 195,3 Miliar sampai dengan 31 Desember 2022 (tidak diaudit).

Dalam penjaminan Non-KPBU, jika BUMN Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayar sesuai perjanjian pinjaman kepada pemberi pinjaman, Perusahaan akan mengambil alih kewajiban pembayaran tersebut sesuai dengan perjanjian penjaminan sebelum terjadinya gagal bayar BUMN Terjamin atas pinjaman yang diberikan. Terdapat potensi cidera janji dari satu debitor karena tidak bisa memenuhi ketentuan financial covenant dengan estimasi potensial klaim sebesar Rp 577,5 miliar (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah menelaah kewajibannya, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim aktual atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Atas penilaian tersebut, pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada penyisihan atas klaim yang dibentuk oleh Perusahaan.

Atas semua perjanjian penjaminan yang dimiliki di atas, Perusahaan juga menandatangani perjanjian dengan para PJPK (KPBU) atau BUMN Terjamin (Non-KPBU) dari masing-masing proyek yang mengatur tata cara pengembalian hak regres pada saat pembayaran klaim dilakukan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Contingencies

In PPP guarantee, regarding the risk of delay in land acquisition, the due date of land acquisition for few toll road project that guaranteed by Company have passed. In case of any cash compensation incurred due to delay in these land acquisition could be submitted by the Investor to GCA 7 days after the issuance of the Operation Worthiness Certificate ("OWC"). If the GCA did not fulfill the obligation to pay cash compensation in accordance with the time limit stipulated in the cooperation agreement, the investor could submit a claim to the Company. As per 31 December 2022, the estimated potential claims to GCA regarding the delay of land acquisition risk for 6 (six) guaranteed projects is Rp 676 billion (full amount) (unaudited).

In addition, there were risk of delay in tariff adjustments for 3 (three) projects that were eligible to submit the claim to GCA with an estimated potential claims of Rp 463.1 billion (full amount), and the risk of failure in monthly payment for 3 (three) project that can submit a claim to the GCA with an estimated potential claim of Rp 195.3 billion as at 31 December 2022 (unaudited).

In Non-PPP guarantee, if guaranteed SOEs are unable to fulfill payment obligation according to the loan agreement to the lenders, the Company will take over the payment obligations in accordance with guarantee agreement before the default of guaranteed SOEs' loan. There is a potential default of one debtor due to failure to comply with financial covenants with an estimated potential claim of Rp 577.5 billion (unaudited).

As at 31 December 2022 and 2021, the Company has reviewed its obligation, whether in the form of potential claims and/or actual claims over the risks borne by the Company as stipulated in the guarantee agreement, to assess whether any provision required to be recognised in the financial statements. Based on the assessment, as at 31 December 2022 and 2021, there was no provision of claims deemed necessary to be made by the Company.

Upon the signing of guarantee agreements above, the Company also signed agreement with GCA (PPP) or guaranteed SOEs (Non-PPP) of each projects, which stipulates term and conditions of recourse right when the Company make any claim payment.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/94 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

**Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota
Prima Properti**

Pada tanggal 22 Agustus 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk 4 (empat) tahun dimulai dari 1 September 2016 dan berakhir pada 31 Agustus 2020.

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Mahkota Prima Properti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dibayarkan setiap bulan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti yang ditahan oleh PT Mahkota Prima Properti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

Pada tanggal 27 Juli 2020, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti untuk periode perpanjangan sewa selama 3 (tiga) tahun dimulai dari 1 September 2020 dan berakhir pada 31 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai perjanjian sewa yang masih belum dibayarkan adalah sebesar Rp 14.074.765.

26. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas yang penting adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pencadangan saldo laba	31,270,107	31,028,000	Appropriation retained earnings
Kerugian penurunan nilai - Piutang usaha	(2,000,000)	-	Impairment losses - Account receivables
Perubahan nilai pasar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar	(279,746,765)	1,358,616	Changes in fair value of financial assets at fair value

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**Rent office agreement with PT Mahkota Prima
Properti**

On 22 August 2016, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for 4 (four) years starting from 1 September 2016 and expires on 31 August 2020.

This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Mahkota Prima Properti. Payment for the full amount of rent and service charges was charged monthly. In addition, the Company also paid in advance for security deposit, which is held by the PT Mahkota Prima Properti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

On 27 July 2020, the Company entered into extension of lease agreement with PT Mahkota Prima Properti for another 3 (three) years lease period starting from 1 September 2020 and expires on 31 August 2023. As of 31 December 2022, the remaining unpaid rental agreement amounted to Rp 14,074,765.

26. NON-CASH TRANSACTIONS

The principal non-cash transactions are as follows:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/95 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN 27. NET FINANCING ACTIVITIES
BERSIH RECONCILIATION**

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut: *Reconciliation from financing activities are as follows:*

2022					
Perubahan non-kas/ Non-cash changes					
Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cashflow	Pergerakan valuta asing/ Movement of foreign exchange	Pergerakan beban transaksi/ Changes in transaction cost	Saldo akhir/ Ending balance	
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	55,126,686	Two-step loans
Liabilitas sewa pembiayaan	<u>33,504,325</u>	<u>27,434,510</u>	-	<u>8,545,628</u>	Financial lease liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>88,631,011</u>	<u>27,434,510</u>	-	<u>63,672,314</u>	Total liabilities from financing activities
2021					
Perubahan non-kas/ Non-cash changes					
Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cashflow	Pergerakan valuta asing/ Movement of foreign exchange	Pergerakan beban transaksi/ Changes in transaction cost	Saldo akhir/ Ending balance	
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	55,126,686	Two-step loans
Liabilitas sewa pembiayaan	<u>51,094,380</u>	<u>21,907,776</u>	-	<u>33,504,325</u>	Financial lease liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>106,221,066</u>	<u>21,907,776</u>	-	<u>88,631,011</u>	Total liabilities from financing activities

28. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 28. SUBSEQUENT EVENTS

a) Perubahan komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan KMK No. 33/KMK.06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Pemegang Saham memberhentikan Wahyu Utomo dan mengangkat Iqbal Islami sebagai anggota Dewan Komisaris mulai tanggal 31 Januari 2023. Susunan Dewan Komisaris Perusahaan sesuai keputusan di atas menjadi sebagai berikut:

a) Changes in Board of Commissioners

Based on KMK No. 33/KMK.06/2023 regarding dismissal and appointment of member of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia's Board of Commissioners, Shareholders dismissed Wahyu Utomo and appointed Iqbal Islami as the Company's Board of Commissioner starting date 31 January 2023. The composition of the Company's Board of Commissioners according to the above decision were as follows:

2023		2022	
Komisaris Utama	Awan Nurmawan Nuh	Awan Nurmawan Nuh	President Commissioner
Komisaris	Iqbal Islami	Wahyu Utomo	Commissioner
Komisaris	Mariatul Aini	Mariatul Aini	Commissioner

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/96 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

b) Perjanjian Penjaminan

KPBU

Pada tanggal 24 Januari 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Akses Patimban selaku badan usaha.

28. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

b) Guarantee Agreement

PPP

On 24 January 2023, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Akses Patimban as the investor.

29. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas; dan
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya.
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensifkan;
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12: "Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction"; dan
- Amendemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023.

29. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 as follows:

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies;
- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities; and
- Amendment of SFAS 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations.
- Amendment of SFAS 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;
- Amendment of SFAS 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- Amendment of SFAS 107: "Ijarah Accounting".

The above standard will be effective on 1 January 2023.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/97 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**29. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU
EFEKTIF (lanjutan)**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 sebagai berikut: (lanjutan)

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

- PSAK 74 : "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - "Informasi Komparatif";

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**29. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 as follows: (continued)

- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant; and*
- *Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale and lease-back transactions.*

The above standards will be effective on 1 January 2024.

- *SFAS 74: "Insurance Contract";*
- *Amendment to SFAS 74: "Insurance Contracts on Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information";*

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact from the implementation of these new standards and the effect on the Company's financial statements.



**PENJAMINAN &
INFRASTRUKTUR**
Guarantee & Infrastructure

2022

Laporan Tahunan

Annual Report

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place 7th-8th Floor

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18

Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710 - Indonesia

Phone: +62 21 5795 0550

Fax: +62 21 5795 0040

Email: info@iigf.co.id

www.iigf.co.id